SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA **1918 - 2018**

BUKU SATU

DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918 - 1949

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2019

BUKU SATU

Dari Volksraad ke Komite Nasional Indonesia Pusat (1917-1949)

SEABAD
RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
SEJARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
1918-2018

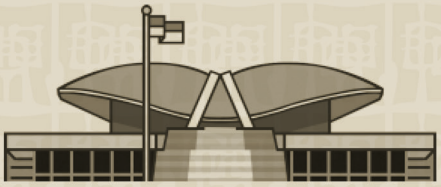

Penulis

Susanto Zuhdi

Achmad Sunjayadi

Dita Putri Prameswati

Ghamal Satya Mohammad

Fajar Nur Alam

Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2019

SEABAD
RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 1918-2018

BUKU SATU

DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT (1917-1949)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
All rights reserved

Perpustakaan Nasional
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
x + 454 hlm,; 21 x 28 cm

ISBN 978-623-91598-4-9
Cetakan Pertama, Oktober 2019

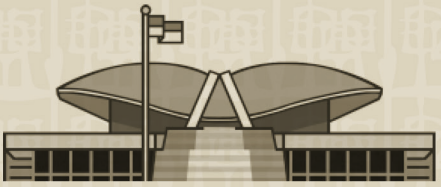

Penulis
Susanto Zuhdi
Achmad Sunjayadi
Dita Putri Prameswati
Ghamal Satya Mohammad
Fajar Nur Alam

Desain Sampul
Tata Letak
Tim Penerbitan - Biro Pemberitaan Parlemen

Diterbitkan oleh:
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Tlp. 021—571 5697 Faks. 021—571 5421
Surel: bag_penerbitan@dpr.go.id

KATA PENGANTAR KETUA DPR RI

Dalam buku ini tergambar bahwa pada kolonial telah banyak putera-putera terbaik bangsa yang terpelajar dan memiliki nasionalisme tinggi bagi kemerdekaan bangsa dan kesejahteraan rakyatnya.

SUATU bangsa tidak akan pernah menjadi besar apabila tidak pernah belajar dan bercermin dari sejarah masa lalunya. Sejarah bukan sekedar cerita masa lalu tanpa makna. Sejarah memberikan kita cakrawala luas untuk belajar dari masa lalu dan mengambil manfaat guna perbaikan dan kemajuan di masa depan.

Puji syukur patut kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Buku ke-1 berjudul 'Seabad Rakyat Indonesia Berparlemen; dari Volksraad ke Komite Nasional Indonesia Pusat". Dengan terbitnya buku ini, bertambah pula satu pustaka berkualitas yang membahas mengenai sejarah lembaga perwakilan perwakilan Republik Indonesia. Ada sesuatu yang istimewa dari buku ini, karena biasanya pembabakan awal dari sejarah lembaga perwakilan di Indonesia bermula dari pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 dijadikan sebagai tanggal dan hari lahir DPR RI. Walaupun memang pada masa kolonial telah dibentuk Dewan Rakyat (*Volksraad*) dan beberapa putera terbaik bangsa menjadi anggotanya.

Dalam buku ini tergambar bahwa pada kolonial telah banyak putera-putera terbaik bangsa yang terpelajar dan memiliki nasionalisme tinggi bagi kemerdekaan bangsa dan kesejahteraan rakyatnya. Perjuangan tersebut tidak mudah, karena lembaga perwakilan pada masa kolonial bukan benar-benar lembaga perwakilan yang demokratis dan didesain utnuk kepentingan bangsa Indonesia. Perjuangan beberapa tokoh untuk menggunakan Bahasa Indonesia (yang sebelumnya dilarang) dalam sidang-sidang *Volksraad* merupakan sebuah langkah pendobrak dan menjadi salah satu alat perjuangan kalangan pro-kemerdekaan. Sejarah mencatat beberapa nama besar putera bangsa yang menjadi anggota Volksraad, seperti Soetardjo yang dikenal dengan petisinya, Muhammad Husni Thamrin, Agus Salim, Tjokroaminoto, Radjiman Wediodipoero, dan masih banyak lagi lainnya.

Sejarah berparlemen kemudian berlanjut pada masa pendudukan Jepang melalui Chuo Sangi-in (Dewan Pertimbangan Pusat) sampai dengan terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Sidang-sidang BPUPKI inilah yang kita ketahui bersama melahirkan gagasan-gagasan mengenai dasar negara Pancasila dan rumusan undang-undang dasar bagi Indonesia merdeka.

Pada akhirnya, saya mengucapkan selamat membaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak, baik politisi, akademisi, dan masyarakat pada umumnya, khususnya gerenasi muda yang akan memegang tongkat estafet perjalanan bangsa ini ke depan. Semoga semangat demokrasi yang diwujudkan oleh lembaga perwakilan tidak pernah padam, hingga terwujud tujuan bernegara, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Ketua DPR RI

Bambang Soesatyo

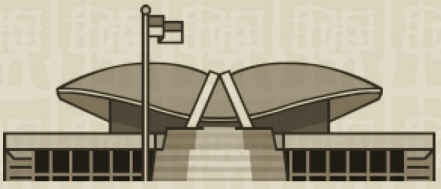

SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI

Buku ini memaparkan bukan hanya karena periode yang panjang, tetapi juga dengan pembahasan yang menyeluruh mengenai dinamika perjalanan bangsa Indonesia dalam berparlemen.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

PERTAMA-TAMA mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan karunia yang tak terhingga jumlahnya. Salah satu di antara karunia itu adalah kesempatan kepada kita untuk mewujudkan keinginan, yang tampaknya telah lama didambakan, yakni menghasilkan buku sejarah "Seabad Rakyat Indonesia Berparlemen". Memang bukan tidak ada atau pernah ada buku sejarah mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), tetapi dari buku yang ada, pada umumnya merupakan episode atau penggalan periode tertentu, dan belum merupakan gambaran menyeluruh. Buku ini memaparkan bukan hanya karena periode yang panjang, tetapi juga dengan pembahasan yang menyeluruh mengenai dinamika perjalanan bangsa Indonesia dalam berparlemen. Oleh karena itu dengan rasa gembira, kami menyambut dengan sepenuh hati kehadiran buku "Seabad Rakyat Indonesia Berparlemen".

Kami menyadari bahwa untuk menulis buku setebal lebih dari 2000 halaman dan bergambar, yang dibuat sebanyak lima jilid, tentu bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Melalui kerja sama dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dengan tim penulis yang dibentuk oleh Departemen Sejarah, keinginan kita bersama pada akhirnya dapat diwujudkan. Dalam kesempatan ini pula, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Universitas Indonesia yang telah bersedia kami gandeng untuk bekerjasama dalam penulisan buku ini.

Dalam kesempatan ini pula, kami ingin mengatakan bahwa buku ini bukan hanya telah menambahkan koleksi perbukuan mengenai DPR-RI, suatu khasanah yang berharga bagi sejarah kelembagaan DPR-RI itu sendiri, melainkan juga sebagai sumbangan penting bagi pembangunan demokrasi Indonesia. Oleh karena itu kami berharap kehadiran buku ini akan disambut baik oleh publik pembaca, sebagai bagian dari gerakan literasi kita dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sekretaris Jenderal DPR RI

INDRA ISKANDAR

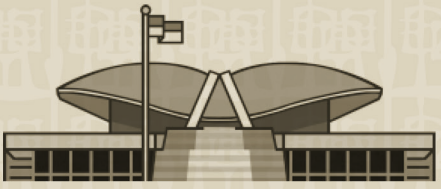

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KETUA DPR RI iii

SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI v

DAFTAR ISI Vii

BAB I

PENDAHULUAN 01

1.1 LATAR BELAKANG 01

1.2 TUJUAN 02

1.3 DARI DEWAN KOTA (*GEMEENTE RAAD*) KE DEWAN RAKYAT (*VOLKSRAAD*) 03

1.4 KERANGKA PENULISAN & SUMBER 08

BAB II

VOLKSRAAD 1918-1931 11

2.1 SEKILAS VOLKSRAAD 12

2.2 SITUASI SEBELUM PENDIRIAN VOLKSRAAD 1918 DI HINDIA-BELANDA 13

2.3 SITUASI DI HINDIA DAN KEINGINAN UNTUK BERPARLEMEN 15

2.4 SITUASI DI LUAR HINDIA DAN ISU *INDIË WEERBAAR* 20

2.5 VOLKSRAAD PERIODE 1918-1921: DARI' JANJI NOVEMBER' HINGGA REFORMASI KETATANEGARAAN 31

2.6 VOLKSRAAD PERIODE 1921-1923: ISU DESENTRALISASI DAN PERLUASAN HAK PILIH BAGI BUMIPUTRA 66

2.7 VOLKSRAAD PERIODE 1923-1927: PENERAPAN SISTEM PEMILIHAN ANGGOTA VOLKSRAAD DAN PENGARUH PERUBAHAN *REGERINGS-REGLEMENT* 1925 80

2.8 VOLKSRAAD PERIODE 1927-1931: LEMBAGA KO-LEGISLATIF DENGAN KEWENANGAN TERBATAS 103

BAB III

VOLKSRAAD 1931-1942 153

3.1. NAFAS BARU PERJUANGAN RAKYAT HINDIA DI PARLEMEN MELALUI FRAKSI NASIONAL 153

3.2. LAHIRNYA FRAKSI NASIONAL 159

3.3 STRATEGI GOLONGAN KOOPERATIF DAN NONKOOPERATIF DALAM MENGHADAPI PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA 164

3.4 SEPAK TERJANG FRAKSI NASIONAL DALAM PERSIDANGAN VOLKSRAAD 170

3.5 PERDEBATAN MENGENAI MASALAH PEREKONOMIAN HINDIA BELANDA DALAM MENGHADAPI KRISIS 172

3.6 PERHATIAN UTAMA VOLKSRAAD TERKAIT POLEMIK PENGELOLAAN PEREKONOMIAN HINDIA BELANDA 198

3.7 LIKA LIKU PETISI SOETARDJO 205

3.8 KEINGINAN UNTUK BERNEGARA YANG BERDIRI DIATAS KAKI SENDIRI 214

3.9 TUNTUTAN KONGGRES RAKYAT INDONESIA 218

3.10 GERAKAN INDONESIA BERPARLEMEN 220

BAB IV

CHUO SANGI-IN 1942 – 1945 235

4.1 TANGGAPAN PEMBENTUKAN CHUO SANGI-IN 250

4.2 DASAR DAN TUJUAN PEMBENTUKAN CHUO SANGI-IN 254

4.3 KEANGGOTAAN CHUO SANGI-IN 257

4.4 SIDANG PERTAMA CHUO SANGI-IN, 16–20 OKTOBER 1943 261

4.5 SIDANG KEDUA CHUO SANGI- IN, 30 JANUARI – 3 FEBRUARI 1944 (PENYEMPURNAAN KEKUATAN DI JAWA) 270

4.6 SIDANG KETIGA CHUO SANGI-IN, 7 – 11 MEI 1944 : MEMPERDALAM KESADARAN DAN PERSAUDARAAN DI ANTARA RAKYAT 276

4.7 SIDANG KE-EMPAT CHUO SANGI-IN 280

4.8 PENYEMPURNAAN HASIL PRODUKSI DAN PENGUATAN TERHADAP PEMBELAAN RAKYAT (SIDANG KE-IV CHUO SANGI-IN, 12 – 16 AGUSTUS 1944) 285

4.9 SIDANG ISTIMEWA V CHUO SANGI-IN, 11 SEPTEMBER 1944 INDONESIA AKAN DIBERI KEMERDEKAAN DI KEMUDIAN HARI 289

4.10 SIDANG VI CHUO SANGI-IN, 12–17 NOVEMBER 1944: MEMPERSATUKAN SEGALA TENAGA DAN MEMPERTINGGI DERAJAT PENDUDUK KE ARAH PERJUANGAN DAN PEMBENTUKAN INDONESIA MERDEKA 293

4.11 SIDANG VII CHUO SANGI-IN, 21–26 FEBRUARI 1945: DASAR USAHA UNTUK MENCAPAI KEMENANGAN AKHIR DAN TERCAPAINYA KEMERDEKAAN INDONESIA DI KEMUDIAN HARI 300

4.12 SIDANG VIII CHUO SANGI-IN, 18–21 JUNI 1945: MEMBANGKITKAN SEMANGAT RAKYAT UNTUK MEMPERKUAT PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA SECEPATNYA 308

4.13 BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (BPUPKI) 315

BAB V

KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1945 – 1949 329

5.1 PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (PPKI) 329

5.2 KNIP PERIODE MR. ASSAAT (1946–1949) 344

5.3 KNIP DAN OPOSISI DARI PERSATUAN PERJUANGAN, 1946 – AWAL 1947 353

5.4 SIDANG PLENO KNIP DI MALANG 367

5.5 PANDANGAN DAN SIKAP KNIP TERHADAP BERBAGAI ISU PADA TAHUN 1947 378

5.6 KNIP DI MASA GENTING REVOLUSI, 1948 391

5.7 PANDANGAN DAN SIKAP BP KNIP TERHADAP BERBAGAI ISU TAHUN 1948 396

5.8 SIDANG-SIDANG DAN PEMBAHASAN DALAM BP KNIP PADA TAHUN 1949 416

5.9 SIDANG-SIDANG DAN PEMBAHASAN DALAM BP KNIP PADA TAHUN 1949 429

BAB VI

PENUTUP 439

DAFTAR ACUAN 443

PENULIS 449

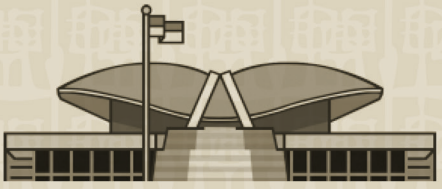

LATAR BELAKANG

PENDAHULUAN

Sepertinya perlu dikoreksi terkait ungkapan yang biasanya kita dengar bahwa "bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya".

SESUNGGUHNYA tidak seperti itu apa yang pernah dikatakan Presiden Soekarno, tetapi "hanya bangsa yang pandai mempelajari dan mengambil manfaat dari masa silam yang patut menjadi bangsa yang besar...". Kalau begitu, diperlukan upaya lebih dahulu bagi suatu bangsa untuk menjadi besar, yang berarti tidak terjadi begitu saja. Kalau begitu, salah satu syarat untuk menjadi bangsa yang besar adalah kemampuan mengambil pelajaran sejarah (*history is a lesson learned*). Dalam konteks ini, maka perlu ditawarkan ungkapan baru, yakni bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki narasi tentang identitasnya. Melalui pengisahannya, suatu bangsa dapat diamati berkenaan dengan perjalanannya dalam meretas waktu, membentang ruang, dan mengisi kehidupan, sehingga membentuk identitas tertentu. Sebagaimana dikemukakan Peter Munz, mengapa orang berkepentingan dengan masa lampau; Pertama, mereka hanya sekedar ingin tahu, atau karena masa lampau disebut memiliki pesona eksotismenya tersendiri. Kedua, karena adanya keinginan untuk belajar dari pengalaman orang lain. Ketiga, meskipun merupakan imajinasi, masa lampau diyakini merupakan modal untuk memperkuat rasa kebersamaan (*a sense of a community*), serta pembentuk identitas.[1]

1 Peter Munz,1997. "The Historical Narrative" dalam Michael Bentley, *Companion to Historiography*. London & New York, Routledge, hlm 851.

Meskipun pengertian identitas merupakan gejala yang cair, dalam arti sesuatu yang dibentuk secara terus menerus oleh faktor internal dan eksternal, tetapi gejalanya relative dapat diamati sebagai karakter dari suatu komunitas tertentu. Secara konseptual, setiap bangsa memiliki identitas oleh karena melekatnya identitas tersebut secara naluriah, seperti yang dikemukakan oleh Hegel. Dalam diri suatu bangsa, pertama, terdapat apa yang disebut sebagai *thymos*, yaitu bagian dari jiwa yang ditunjukkan sebagai pengakuan akan kehormatannya (*the part of soul that craves recognition of dignity*). Kedua, *isothymia*, yakni tuntutan untuk dihargai dalam kesetaraan dengan orang lain (*the demand to be respected on an equal basis with other people*). Ketiga, *megalothymia*, yakni hasrat untuk diakui sebagai yang paling unggul (*the desire to be recognized as superior*).[2] Ketiga konsep yang berkaitan dengan identitas inilah yang menjadi faktor pembentuk kesejarahan manusia.

Sebagai suatu institusi parlemen dari bangsa yang memperoleh kemerdekannya melalui perjuangan panjang membebaskan diri dari kolonialisme, DPR-RI mempunyai sejarah panjang yang dapat dirunut ke belakang, setidaknya hingga masa awal abad ke-20. Politik Etis pada hakikatnya telah mendorong terciptanya kehidupan baru di negeri jajahan yang disebut Hindia-Belanda. Namun, hingga saat ini, belum ada suatu buku yang secara komprehensif dapat mengungkap sejarah dewan perwakilan yang ada di Indonesia. Kalaupun terdapat beberapa buku, pada umumnya berbentuk kronik, cerita episodik, atau penggalan kisah saja. Oleh karena itu, bukan saja perlu, tetapi juga mendesak bagi sebuah bangsa dengan latar belakang historis, luas wilayah, serta keragamanan masyarakat dan kebudayaan yang sedemikian rupa untuk merekonstruksi sejarah bangsanya, termasuk parlemen yang dalam hal ini merupakan lembaga legislatif atau dewan perwakilan rakyat.

Penulisan buku ini adalah untuk menggambarkan pengalaman bangsa Indonesia dalam kehidupan berparlemen, khususnya dalam talian memperjuangkan aspirasi dari masyarakat yang tertindas, juga dalam upaya mencapai kemerdekaan dari penjajahan asing.

Tujuan

Penulisan buku ini adalah untuk menggambarkan pengalaman bangsa Indonesia dalam kehidupan berparlemen, khususnya dalam talian memperjuangkan aspirasi dari masyarakat yang tertindas, juga dalam upaya mencapai kemerdekaan dari penjajahan asing. Dalam pembahasannya, buku ini berusaha memperlihatkan "benang merah" perjuangan bangsa melalui peranan tokoh organisasi dan

2 Francis Fukuyama, 2018. *Identity: Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition*. London: Profile Book: xiii.

aktivis pergerakan di dalam lembaga parlemen masa kolonial hingga kemerdekaan; termasuk pula menyajikan riwayat para aktor parlemen yang aktif berperan dalam menyuarakan aspirasi rakyat, sumbangan pemikiran, serta gagasannya dalam pembangunan politik dan pengembangan kehidupan berdemokrasi, melalui bidang legislatif.

Indonesia adalah bangsa yang sadar akan proses historis pembentukannya, setidaknya ketika para peletak dasar bangsa merumuskan Pembukaan Undang-Undang Negara Indonesia 1945. Dalam alinea kedua terungkap, "dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur".

Proses historisitas bangsa Indonesia tentu saja tidak dapat dipisahkan dari perjuangan panjang untuk membebaskan dirinya dari penjajahan asing. Keberhasilan perjuangan pergerakan kemerdekaan, yang kemudian diproklamasikan oleh Sukarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia pada 1945, ternyata tidak menegasikan sama sekali peninggalan, kalau tidak mau dikatakan sebagai adanya unsur warisan dari kolonialisme. Eksistensi *Pax Nederlandica* ketika Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menegaskannya pada awal abad ke-20, suatu wilayah administrasi yang kelak dikenal sebagai "dari Sabang sampai Merauke", sulit untuk meniadakan pengaruh kolonial itu sendiri. Secara lebih konkret, a'Campo bahkan mengemukakan bahwa peranan Koninkelijk Paketvaart Maatschappij (KPM) itulah yang memperkokoh negara Hindia Belanda. Bukankah dalam perkembangannya di wilayah itu kemudian berdiri negara "baru" bernama Republik Indonesia?

Dengan berakhirnya Perang Napoleon yang ditandai oleh diselenggarakannya Kongres Wina 1816, wilayah jajahan resmi dikembalikan kepada Belanda.

Dari Dewan Kota (Gemeente Raad) ke Dewan Rakyat (Volksraad)

Memahami volksraad tidak dapat dipisahkan dari memahami sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Adapun praktik dari sistem administrasi kolonial Hindia Belanda, yang pada dasarnya diletakkan oleh Herman Willem Daendels (1808—1811), telah meninggalkan jejaknya pada sistem dan struktur birokrasi pemerintahan Republik Indonesia. Ketika memerintah Jawa, Thomas Stanford Raffles (1811—1816) menekankan bahwa desa berperan sebagai unit pusat pemerintahan kolonial, sementara prinsip Daendels

dipegang dalam hal bahwa para priyayi merupakan bagian dari mesin birokrasi kolonial. Dengan berakhirnya Perang Napoleon yang ditandai oleh diselenggarakannya Kongres Wina 1816, wilayah jajahan resmi dikembalikan kepada Belanda. Pemerintahan yang dijalankan kemudian bersifat dualistis, yakni pemerintahan dalam negeri (*Binnenlandsch Bestuur*) dan pemerintahan Eropa (*Europeesch Bestuur*). Dalam konteks inilah, perlu diberikan kerangka untuk memahami konteks pemerintahan di tanah jajahan yang bernama Hindia Belanda itu.

Pemerintahan di Hindia Belanda terdiri atas tiga lapis struktur yang meliputi *opperbestuur* (pemerintahan tinggi), *algemeen bestuur* (pemerintahan umum) dan *inlandsch bestuur* (pemerintahan pribumi). Pemerintah Kolonial Hindia Belanda meneruskan Kongsi Dagang Hindia Timur atau *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (1602—1799) yang tampak pada keberlanjutan Pemerintahan Tertinggi (*Hoge Regering*) yang terdiri atas Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia (*Raad van Indie*) yang berfungsi sebagai dewan penasihat. Kekuasaan diterapkan secara sentralistis di tangan gubernur jenderal, sekaligus ketua Dewan Hindia. Pelaksanaan sehari-hari seorang gubernur jenderal dibantu oleh lembaga *algemeene secretarie*, yang bertugas sebagai kantor gubernur jenderal.

... pada prinsipnya untuk memperkuat sistem adminstrasi Hindia Belanda, khususnya untuk pelaksanaan cultuurstelsel yang dibuatkan bidang tugas teknis.

Di dalam pemerintahan umum, tugas administrasi dibagi ke dalam pemerintahan sipil, militer, dan angkatan laut. Dengan terjadinya pergeseran sistem pengaturan koloni yang mengikuti undang-undang dasar baru di tahun 1848, pada prinsipnya untuk memperkuat sistem adminstrasi Hindia Belanda, khususnya untuk pelaksanaan *cultuurstelsel* yang dibuatkan bidang tugas teknis. Dalam perkembangannya pada 1854, dibentuklah lima departemen, yaitu Keuangan (*Departement van Financien*); Pendapatan Dalam Negeri (*Department van Landelijke Inkomsten*); Perkebunan (*Department van Cultures*); dan Pekerjaan Umum (Department van Burgerlijk Openbare Werken). Selanjutnya, terjadi reorganisasi adminstrasi pemerintahan dengan dibentuknya departemen baru, antara lain Dalam Negeri (*Departement van Binnelandsch Bestuur*); serta Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (*Department van Onderwijs, Eerendienst, en Nijverheid*) pada tahun 1866; Pertanian (Department van Landbouw) di tahun 1904, lalu direorganisasi lagi pada 1911 menjadi *Departement van Landbouw, Nijverheid, en Handel*. Sementara itu, pada 1885, di seluruh Hindia Belanda terdapat 30 orang pejabat yang berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Setempat (*Hoofden voor Gewestelijk Bestuur*).

Pejabat di Jawa dan Madura berjumlah 22 orang, di luar Jawa terdapat 17 orang, yaitu 3 orang Gubernur Sumatera's Westkust, Aceh *en Onderhoorigheden*, dan *Celebes en Orderhoorigheden*, serta 13 residen dan seorang sisten residen. Masing-masing pejabat didampingi oleh seorang sekretaris, kecuali yang bertugas di Yogyakarta dan Biliton.[3]

Dengan penggambaran di atas, tampak bahwa kekuasaan sentralistis gubernur jenderal dalam menangani wilayah dan daerah yang begitu luas dengan berbagai karakteristiknya berjalan dengan kurang intensif dan efektif. Dalam kenyataannya, pemerintahan daerah masih dilaksanakan oleh pangreh praja setempat. Timbul pemikiran bahwa urusan dan masalah spesifik dapat ditangani dengan baik, jika pelaksanaannya diberikan kepada daerah sebagai bentuk desentralisasi. Dengan demikian, maka banyak tugas yang harus didelegasikan ke daerah. Dalam kaitan itulah, maka Pemerintah Kolonial mengeluarkan Undang-Undang Desentralisasi sebagai dasar pembentukan dewan-dewan daerah. Undang-undang ini tidak dapat dipisahkan, atau bahkan sesungguhnya merupakan konsekuensi dari Politik Etis (*Ethische Politiek*) yang santer disuarakan sepanjang akhir abad ke-19, dan dilaksanakan pada awal abad berikutnya. Politik etis yang dijalankan pemerintah kolonial adalah mengenai upaya memajukan dan meningkat produksi pertanian, antara lain melalui program pengairan persawahan, pemindahan penduduk ke daerah-daerah yang masih sedikit penduduknya, dan memberikan pendidikan kepada masyarakat pribumi. Tiga program besar pemerintah kolonial itu secara umum dikenal terdiri dari irigasi, transmigrasi (kolonisasi), dan edukasi. Terutama pada aspek pengembangan daerah-daerah baru itulah, maka diperlukan adanya dukungan pemerintah daerah yang kuat. Begitulah pada akhirnya undang-undang yang berkaitan dengan desentralisasi mulai dikeluarkan pada 1903 hingga 1905.

Undang-undang beserta turunannya yang dikeluarkan adalah Decentralisatie Wet pada 23 Juli 1903, yang dimuat dalam Staatsblad van Nederlandsch Indie No. 329. Kemudian, Decentralisatie Besluit (Keputusan Pemerintah tentang Desentralisasi) dan Locale Raden Ordonantie (Ordonansi tentang Dewan-Dewan Lokal) pada 1905. Penerapan ordonansi dewan kota inilah yang menjadi dasar pembentukan sejumlah gemeente (kotapraja) di beberapa kota besar di Jawa. Setiap kotapraja dipimpin oleh seorang walikota (burgermeester), yang dalam tugasnya didampingi oleh dewan kota (gemeente raad).

... kekuasaan sentralistis gubernur jenderal dalam menangani wilayah dan daerah yang begitu luas dengan berbagai karakteristiknya berjalan dengan kurang intensif dan efektif.

3 Mona Lohanda, 2010. "Sistem Pemerintahan Hindia Belanda" dalam Taufik Abdullah dan A.B.

Pembentukan dewan kota didasarkan pada besar kecilnya penduduk orang Eropa, maka Batavia-lah kota yang pertama ditetapkan sebagai kotapraja (gemeente), berikut dengan kelengkapannya berupa dewan kota (gemeente raad). Kemudian, Meester Cornelis (sekarang Jatinegara) —yang kemudian disatukan dengan Batavia, lalu Buitenzorg (sekarang Bogor). Tiga kotapraja tersebut ditetapkan sejak 1 April 1905. Dalam perkembangan selanjutnya, dibentuk kotapraja di lima kota di Jawa, yaitu Semarang, Bandung, Sukabumi, Tegal, dan Surabaya.

Dewan kotapraja (*gemeente raad*) adalah badan perwakilan yang diisi oleh sejumlah anggota yang dipilih dan bekerja dalam periode empat tahun, menurut peraturan pemilihan (*Kiesordonantie*) yang ditetapkan pada 1908. Mereka yang berhak memilih adalah laki-laki kawula Belanda (*Nederlandsch-onderdaan*), berusia sekurang-kurang 21 tahun, dapat membaca dan menulis dalam bahasa Belanda, sedangkan untuk pemilih bumiputera harus mengusai bahasa Melayu dan bahasa daerah tempat tinggal yang bersangkutan, serta membayar pajak minimal 300 *gulden* per tahun. Adapun syarat untuk menjadi anggota dewan kotapraja minimal berusia 25 tahun, menguasai bahasa Belanda yang cukup. Berdasarkan persyaratan di atas maka tampak bahwa dewan kotapraja hanya dapat diisi oleh kalangan yang sangat elite, yang sesungguhnya berjumlah terbatas. Seperti terlihat pada Dewan Kotapraja Batavia antara tahun 1905 sampai 1929, keanggotaan dewan terdiri atas 173 warga Eropa, 67 bumiputra, dan 19 warga Cina, serta 10 orang warga timur asing lainnya, yang pada umumnya adalah warga Arab. Dapat dicatat di antara anggota dewan kotapraja Batavia dari bumiputra yang paling menonjol adalah Mohammad Husni Thamrin. [4] Tokoh yang kemudian melekat dengan kaum Betawi ini menjadi anggota Dewan Kotapraja Batavia dari tahun 1919 hingga 1927. Husni Thamrin kemudian tidak hanya dikenal sebagai tokoh Betawi, melainkan juga sebagai salah seorang yang revolusioner dan merintis perjuangan menuju kemerdekaan.[5] Akan halnya, sepak terjang Thamrin sebagai anggota perwakilan bumiputera tidak sebatas di Batavia saja, sebab ia lantas menjadi anggota Volksraad yang dapat begitu kerasnya dalam menyuarakan aspirasi nasib dan kehidupan para pemuda di tanah jajahan.

... pada prinsipnya untuk memperkuat sistem adminstrasi Hindia Belanda, khususnya untuk pelaksanaan cultuurstelsel yang dibuatkan bidang tugas teknis.

4 Mona Lohanda, 2010. "Sistem Pemerintahan Hindia Belanda" dalam Taufik Abdullah dan A.B. Lapian (editor umum). *Indonesia Dalam Arus Sejarah*, Jilid 5 "Masa Pergerakan Kebangsaan", Jakarta: Ikhtiar Baru : 55-56.
5 Bob Hering 2003. *Mohammad Husni Thamrin: Tokoh Betawi-Nasionalis Revolusioner Perintis Kemerdekaan*. Jakarta: Hasta Mitra.

Jan Hendrik Malefijt, pengganti Fock, mengusulkan pendirian Dewan Kolonial (Koloniaal Raad) yang beranggotakan 29 orang.

Suatu perkembangaan yang menarik dalam sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda khususnya mengenai lembaga perwakilan, yaitu mengenai bagaimana lembaga perwakilan banyak berupaya untuk mengakomodasi aspirasi rakyat jajahan. Dalam konteks itulah, *Volksraad* sebagai isu dan kenyataan yang terwujud, meskipun tidak benar-benar sepenuhnya menjadi lembaga perwakilan. Pembentukan Volksraad di negeri jajahan bernama Hindia Belanda dilatarbelakangi banyak faktor, baik dari lingkungan dalam maupun luar negeri. Pada 1907, Menteri Urusan Jajahan Dirk Fock mengajukan usul kepada pemerintah Kerajaan Belanda untuk memperluas peran Dewan Hindia (*Raad van Indie*), suatu lembaga yang berfungsi sebagai dewan penasihat. Dalam konteks inilah agaknya pemikiran untuk membentuk "dewan rakyat" mulai digulirkan. Faktor lain adalah karena situasi dan kondisi di negeri jajahan, serta termasuk pula yang terjadi di luar negeri, khususnya Eropa, karena pengaruh Perang Dunia Pertama (1914—1918) di tanah jajahan yang lebih bersifat pada kekhawatiran terhadap dampak langsungnya.

Begitulah ketika Jan Hendrik Malefijt, pengganti Fock, mengusulkan pendirian Dewan Kolonial (*Koloniaal Raad*) yang beranggotakan 29 orang. Agenda yang dibahas, misalnya, mengenai anggota pasukan non-reguler dari penduduk Hindia Belanda, dalam kaitannnya dengan konsep "Hindia Berketahanan" (*Indie Weerbaar*). Isu ini dikaitkan dengan pembentukan *volksvertegenwordiging*, yang diusulkan Sarekat Islam dan Budi Utomo. Pada 1916, mulai mengerucutlah gagasan pembentukan dewan rakyat dengan penggantian Kolonial Raad menjadi *Voksraad voor Nederlandsch-Indie*, berdasarkan keputusan Staten Generaal di Belanda.

Pembentukan Volksraad diperjuangkan secara politik oleh Indische Partij (1912), dengan tokohnya: Cipto Mangunkusumo, Douwes Dekker, dan Suwardi Suryaningrat, yang bertujuan "untuk membangkitkan patriotisme semua orang Hindia terhadap Hindia yang telah menghidupi mereka, untuk mendesak mereka supaya bekerja sama berdasarkan kesetaraan politik yang membawa perkembangan bagi tanah air Hindia ini, dan untuk mempersiapkan rakyat yang merdeka. Pembelaan Suwardi (1913) tercantum pada kritiknya terhadap kebijakan pemerintah kolonial, dengan artikelnya yang berjudul "*Als Ik een Nederlander was*". Ia mengatakan bahwa "keinginan bagi terwujudnya perwakilan rakyat (*volksvertegenwoordiging*) tinggal menunggu waktu; tidak lama lagi kalau dihitung dengan umur suatu bangsa".

Kerangka Penulisan & Sumber

Buku jilid kesatu ini dimulai dari masa Volksraad hingga Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Akan tampak bahwa periode Volksraad mengambil tempo paling panjang, kira-kira 24 tahun (1918—1942), masa panjang kedua adalah periode KNIP (1945—1949), sedangkan masa terpendek adala pada masa Chuo Sangi In (1943—1945). Badan penasihat yang dibentuk Jepang ini lebih berfungsi sebagai pemberi saran dan pertimbangan, khususnya dalam strategi memenangkan Perang Asia Timur Raya. Panjang pendeknya rentang waktu sesungguhnya tidak berpengaruh secara nyata terhadap substansi, karena masing-masing periode mempunyai karakteristiknya, atau *zeitgeist*-nya sendiri.

Sebagian besar sumber dan bahan penulisan merupakan kategori primer atau sezaman. Sumber sekunder juga digunakan sebagai kerangka, atau untuk memperkaya perspektif, terutama dalam meletakkan pijakan konteks dan wawasan. Pemuatan gambar atau foto dalam buku ini diharapkan dapat menghidupkan kisah sejarah yang seringkali dianggap membosankan.

Buku jilid kesatu ini dimulai dari masa Volksraad hingga Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

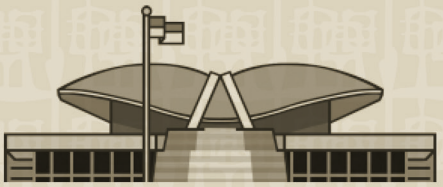

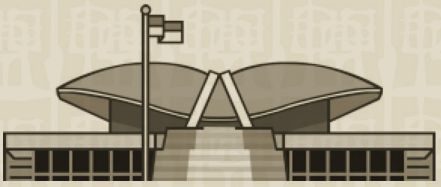

BAB II

Volksraad 1918 – 1931

Pembentukan Volksraad di Hindia-Belanda tidak lepas dari situasi dan kondisi di dalam dan luar masyarakat kolonial yang dikuasai oleh Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda. Dasar sistem pemerintahan ini diletakkan oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808–1811).

OLEH karena negeri Belanda waktu itu sedang dikuasai Napoleon Bonaparte, maka sistem pemerintahan dipengaruhi corak Prancis. Selain itu, para tokoh pergerakan juga memberikan sumbangan bagi terbentuknya dewan rakyat sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat pribumi. Sesungguhnya, telah ada wadah atau lembaga yang berfungsi untuk membicarakan urusan aspirasi daerah sebelum Volksraad dibentuk, yakni dewan daerah kabupaten (*regentschap-raad*) dan dewan kota (*gemeente-raad*). Penggambaran Volksraad ini dapat dianggap sebagai cikal bakal pembentukan dewan perwakilan rakyat dimulai dari 1918. Periode ini, dalam pergerakan nasional Indonesia, dikenal sebagai masa awal menguatnya kesadaran nasional dekade 1920-an, kemudian

disusul dengan masa radikal ditandai pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1926/27, dan diakhiri masa suramnya pergerakan sebagai dampak dari depresi ekonomi dunia pada 1929/31.

2.1 Sekilas Volksraad

Volksraad berasal dari bahasa Belanda yang berarti dewan rakyat atau parlemen. Ada dua daerah koloni yang memiliki Volksraad yaitu di *Zuid-Afrikaansche Republiek* (Republik Afrika Selatan) dan Hindia-Belanda. Di Afrika Selatan, Volksraad telah ada sejak pertengahan abad kesembilan belas hingga 1902. Lembaga ini merupakan perwakilan unikameral (sistem satu kamar) dengan anggota sebanyak dua puluh empat orang. Selain berfungsi sebagai dewan perwakilan bagi rakyat, Volksraad di Afrika Selatan merupakan suatu sistem pemerintahan yang dideskripsikan Giliomee (2013) sebagai berikut:

> *System of a local government consisting of a landrost of magistrate, assisted by burghers called heemraden, serving as his councilors. In the district, burghers, called field cornets, acted as the representatives of government authority. All burghers could be called up for commandos under the direction of field cornets and district commandants.*[6]
>
> [Sistem pemerintahan lokal yang terdiri dari *landrost of magistrate*, dibantu oleh para *burghers*, yang disebut *heemraden*, yang bertindak sebagai anggota dewannya. Di tingkat distrik, para *burghers* dikenal dengan sebutan *field cornets* yang bertindak sebagai perwakilan dari otoritas pemerintah. Semua *burghers* dapat disatukan ke dalam suatu pasukan komando di bawah arahan *field cornets* dan komandan distrik.]

Volksraad berasal dari bahasa Belanda yang berarti dewan rakyat atau parlemen. Ada dua daerah koloni yang memiliki Volksraad yaitu di *Zuid-Afrikaansche Republiek* (Republik Afrika Selatan) dan Hindia-Belanda.

Volksraad di Afrika Selatan terdapat di *Boerenrepublieken* (Negara-negara Republik Boer) yaitu Natalia, *de Zuid-Afrikaansche Republiek* (Republik Afrika Selatan/Transvaal), dan *Oranje-Vrijstaat* (Negara Oranye Bebas). Mereka mengadakan sidang di Oud Raadsal

6 Sebagai contoh, Republik yang dibentuk di Natal, Afrika Selatan pada 1939. Lihat Hermann Giliomee, 2003, *The Afrikaner: Biography of a people*. London: Hurst & Company, hlm. 166

di Kerkplein, Pretoria. Pada 1890, Volksraad di Afrika Selatan diubah menjadi perwakilan bikameral, atau sistem dua kamar. Tujuan perubahan ini supaya wewenang Boerenrepublieken dapat tetap mengawasi masalah negara, terutama yang berkaitan dengan orang asing (*uitlanders*) yang banyak dipekerjakan di sektor pertambangan. Setelah kemenangan Inggris dalam Perang Anglo-Boer kedua (1899–1902), Boerenrepublieken dan Volksraad dihapus. Perang Anglo-Boer Kedua merupakan perang antara kerajaan Inggris melawan dua negara bagian Boer, yaitu de Zuid-Afrikaansche Republiek dan Oranje-Vrijstaat.[7]

2.2 Situasi Sebelum Pendirian Volksraad 1918 di Hindia-Belanda

Berdasarkan *Regeringsreglement* (RR) 1854, pemegang pimpinan pemerintahan di Hindia-Belanda adalah Gubernur Jenderal (*Gouverneur Generaal*). Gubernur jenderal harus seorang berkebangsaan Belanda, bertanggung jawab kepada Raja/Ratu dan Parlemen di Belanda.[8] Berdasarkan RR Hindia-Belanda adalah sebuah *wingeweest* yang berarti daerah yang menguntungkan bagi Kerajaan Belanda.

Perang Anglo-Boer Kedua merupakan perang antara kerajaan Inggris melawan dua negara bagian Boer, yaitu *de Zuid-Afrikaansche Republiek* dan *Oranje-Vrijstaat*.

Situasi yang berat sebelah ini, terutama bagi bumiputra, disadari oleh sebagian kecil elite di negeri induk di Belanda. Mereka mengajukan beberapa rencana perubahan yang akan diterapkan di Hindia-Belanda (Indonesia sekarang) untuk menjadi faktor penyeimbang. Pada 1894, melalui Menteri Urusan Koloni Willem van Dedem, pernah ada rencana untuk membentuk suatu badan perwakilan di samping gubernur jenderal dan *Raad van Indië*.[9]

Sebagai bentuk pembaruan terhadap RR, yang memusatkan kekuasaan di Hindia-Belanda pada satu tangan yakni gubernur jenderal, maka pada 23 Juli 1903 dikeluarkan *Decentralisatie Wetgeving* (Perundang-undangan Desentralisasi) yang disetujui oleh *Staten Generaal* di Belanda. Undang-undang ini dipublikasikan melalui *Nederlandsche Staatsblad* Nomer 219.[10] Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut membuka kemungkinan desentralisasi dalam pemerintahan untuk mewujudkan daerah-daerah otonom yang meliputi *gewest* (wilayah) dan *gedeelte van gewest* (bagian dari wilayah).

7 *Ibid.*, hlm. 238
8 Djody Gondokusumo, 1951, *Parlemen Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 3-4
9 *Ibid.*
10 Decentralisatiewet, *Bataviaasch Nieuwsblad*, 18 November 1903, hlm. 2; Staten Generaal, *Het Nieuws van den dag: kleine courant*, 16 September 1903, hlm. 14; Decentralisatie in Indië, *Algemeen Handelsblad*, 10 September 1913, hlm 2

Desentralisasi adalah sasaran utama para pendukung Politik Etis. Desentralisasi yang diharapkan terjadi adalah berupa pendistribusian kekuasaan dari Den Haag ke Batavia, dari Batavia ke daerah-daerah, dan dari orang-orang Belanda ke orang-orang Bumiputra.[11] Pelaksanaan desentralisasi tersebut diikuti dengan dibentuknya dewan-dewan di daerah. Di tingkat *gewest* dibentuk *gewestelijkraad*, di daerah-daerah bagian *gewest* dibentuk *plaatselijkraad*, sedangkan di daerah-daerah yang banyak penduduk Eropa dibentuk *gemeenteraad*. Selanjutnya, pada 1905, pembentukan dewan-dewan tersebut diatur dalam *Locale Raden Ordonantie* yang dicatat dalam *Indische Staasblad* Nomor 181.[12]

Pada 1 April 1905, didirikan dewan kota di tiga kota di wilayah Jawa Barat, yaitu *Gemeente* Batavia, Meester Cornelis (Jatinegara), dan Buitenzorg (Bogor). Setelah ketiga kota itu diikuti dua belas dewan kota besar di Hindia-Belanda. Misalnya, setahun setelah pembentukan dewan kota pertama, pada 1906 muncul di beberapa kota di Jawa, seperti *Gemeente* Surabaya, dan luar Jawa. Setelah tahun 1907, dibentuk dewan-dewan daerah pada tingkat keresidenan yang didirikan di seluruh Jawa.[13]

Undang-undang desentralisasi memberikan wewenang otonomi semu kepada kabupaten dan *gemeente* (pemerintah kota) di Hindia-Belanda.

Undang-undang desentralisasi memberikan wewenang otonomi semu kepada kabupaten dan *gemeente* (pemerintah kota) di Hindia-Belanda. Pembaruan ini memberikan jalan bagi bumiputra untuk ikut serta dalam pemerintahan kolonial.[14] Dewan kabupaten dan *gemeente* (*haminte*) kota dibentuk dengan aturan setiap 500 bumiputra berhak memilih *keesman* (wali pemilih). Kemudian, wali pemilih ini berhak memilih sebagian anggota dewan kabupaten, sebagian lain diangkat oleh gubernur atas usul bupati. Demikian pula dengan setiap provinsi memiliki dewan provinsi yang sebagian anggotanya dipilih oleh dewan kabupaten dan *gemeente* kota di wilayah provinsi tersebut.[15]

Golongan masyarakat Eropa merupakan anggota mayoritas dari dewan kota tersebut. Di antara anggota dewan kota, ada yang diangkat oleh gubernur jenderal, ada yang diangkat berdasarkan jabatan, seperti bupati dan patih dalam dewan daerah atau keresidenan. Dengan demikian, sistem ini belum dapat disebut sebagai otonomi daerah. Namun, setidaknya pemerintah kolonial

11 M.C. Ricklefs, 2005, *Sejarah Indonesia Modern* 1200-2004 . Jakarta: Serambi, hlm. 337
12 Gemeentebelangen, *Bataviaasch Nieuwsblad*, 14 Agustus 1905, hlm 1; Kuncoro Purbopranoto, 1960, *Sistem Pemerintahan* .Surabaya: Penerbitan Universitas Airlangga, hlm. 95
13 Akira Nagazumi, 1989, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, Budi Utomo* 1908-1918. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti-KITLV). hlm. 28
14 Makmur Amir dan Reni Dwi, 2005, *Lembaga Perwakilan Rakyat* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 58
15 *Ibid*.

telah mengupayakan suatu pemerintahan desentralisasi.

Maka, setidaknya hingga tahun 1939, telah terdapat 32 Dewan Kota, 19 di antaranya di Jawa, dan yang menjadi ketua adalah walikota. Semua anggota melewati proses pemilihan, meskipun anggotanya mayoritas orang Belanda. Hal itu disebabkan batasan hak memilih yang diterapkan, yaitu anggota harus pria yang melek huruf dengan pajak pendapatan sedikitnya 300 gulden, sehingga hanya mencakup segolongan bumiputera.[16] Selain itu, anggota dewan harus paham bahasa Belanda. Untuk kegiatan harian di dewan kota dilakukan oleh dewan pengurus harian. Dewan-dewan lokal juga dibentuk di setiap kabupaten (76 kabupaten di Jawa), sebagian anggotanya adalah para pegawai dengan bupati sebagai ketuanya. Di luar Jawa, jumlah dewan lokal sebanyak sepuluh dewan, kecuali di Sumatra Timur yang semua anggotanya adalah bumiputra.

2.3 Situasi di Hindia dan Keinginan untuk Berparlemen

Sebelum Volksraad dibentuk di Hindia-Belanda, tuntutan rakyat Hindia untuk memperjuangkan adanya badan perwakilan rakyat telah mengemuka di kalangan elite bumiputra. Gagasan perwakilan rakyat tersebut dirancang para *founding fathers* Indonesia dalam sejumlah organisasi yang dibentuk pada awal abad ke-20, dan diserukan dalam banyak tulisan mereka.

Sebelum Volksraad dibentuk di Hindia-Belanda, tuntutan rakyat Hindia untuk memperjuangkan adanya badan perwakilan rakyat telah mengemuka di kalangan elite bumiputra.

Salah satu organisasi yang dibentuk adalah *Indische Partij* (Partai Hindia). Indische Partij merupakan partai politik pertama di Hindia-Belanda yang didirikan di Bandung pada 6 September 1912[17] oleh E.F.E. Douwes Dekker (1879–1950), seorang wartawan radikal yang berupaya untuk membangkitkan kesadaran pentingnya kesetaraan antara bangsa. Tujuan organisasi ini adalah untuk:

> *Het patriotisme aller Indiërs voor den bodem, welke hen voedt, wakker te roepen, ten einde hen te nopen, tot samenwerking op den grondslag van staatkundige gelijkstelling om dit Indisch vaderland tot bloei te brengen en het voor een onafhankelijk volksbestaan voor te bereide*n.

16 M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 337
17 Dalam beberapa tulisan, disebutkan bahwa tanggal berdirinya Indische Partij adalah 25 Desember 1912. Lihat Jan B. Ave, "'Indonesia', 'Insulinde', and 'Nusantara': Dotting the I's and Crossing the T", *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde*, Deel 145, 2/3 afl, 1989, hlm. 229

> [Untuk membangkitkan patriotisme semua orang Hindia terhadap Hindia yang telah menghidupi mereka, untuk mendesak mereka supaya bekerja sama berdasarkan kesetaraan politik yang membawa perkembangan bagi tanah air Hindia ini dan mempersiapkan rakyat yang merdeka).[18]

Tujuan organisasi tersebut adalah keinginan yang cukup besar untuk memersatukan orang Hindia dan kalangan bumiputra, sehingga dapat mengakhiri pemerasan yang dilakukan negeri Belanda dengan prinsip kapitalisme.

Kebanyakan anggota Indische Partij adalah keturunan Indo[19], tetapi di antara mereka terdapat pula bangsa Bumiputra, seperti Cipto Mangunkusumo (1886–1943), seorang dokter lulusan *School Tot Opleiding Indische Artsen* (STOVIA) atau Sekolah Dokter Jawa, dan Suwardi Suryaningrat kemudian dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara (1889–1959), seorang keturunan keluarga Pakualam yang sempat belajar di STOVIA dan kemudian aktif menjadi wartawan.[20]

Setelah setahun Indische Partij berdiri, organisasi politik ini tidak juga mendapatkan izin dari pemerintah kolonial untuk diakui sebagai partai politik resmi. Menurut Pemerintah Hindia-Belanda, Indische Partij sudah terlalu jauh berpropaganda menentang diskriminasi rasial dan memperjuangkan gagasan Hindia yang mandiri, lepas dari negeri Belanda.[21] Pada 4 Maret 1913, terbitlah surat dari Gubernur Jenderal A.W.F. Idenburg yang ditujukan kepada Indische Partij. Isi surat itu adalah penolakan gubernur jenderal terhadap anggaran dasar organisasi yang diajukan untuk menjadikan Indische Partij sebagai organisasi politik berbadan hukum (*rechtspersoon*).[22] Penolakan tersebut disambut oleh Indische Partij dengan mengajukan permohonan kembali pada 5 Maret 1913 agar dapat disahkan oleh pemerintah. Pemerintah Hindia-Belanda kembali menolak permohonan itu dengan mengeluarkan *Gouvernements Besluit* pada 11 Maret 1913 Nomer 1.[23]

Setelah setahun Indische Partij berdiri, organisasi politik ini tidak juga mendapatkan izin dari pemerintah kolonial untuk diakui sebagai partai politik resmi.

18 "Het Indische Beweging", *Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, 7 Oktober 1913, hlm. 1
19 Indo adalah pengertian untuk menyebut orang keturunan dari ayah seorang Eropa dengan ibu orang pribumi dapat pula sebaliknya, tetapi jumlahnya lebih sedikit.
20 Harry Poeze, 2014, *Di Negeri Penjajah, Orang Indonesia di Negeri Belanda* 1600-1950. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia), hlm. 89
21 *Ibid.*
22 "Verboden", *Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, 5 Maret 1913, hlm. 2
23 "Verboden", *Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, 12 Maret 1913, hlm. 1

Pemerintah Hindia-Belanda menganggap Indische Partij merupakan organisasi yang terlalu berbahaya bagi kelangsungan pemerintahan kolonial yang ada. Hampir di setiap rapatnya, partai ini mendapat penjagaan dan pengawasan yang ketat oleh polisi dan jaksa. Para pegawai pemerintah yang menjadi anggota Indische Partij pun diperingatkan. Bahkan, terdapat beberapa perusahaan memecat pegawai mereka karena menjadi anggota Indische Partij. Dalam jangka waktu satu hingga dua tahun dari sikap keras pemerinta kolonial ini, jumlah keanggotaan Indische Partij turun menjadi hanya 700 orang dari sekitar 4,000 anggota sebelumnya, dengan catatan bahwa keanggotaan tersebut bersifat rahasia, dalam arti para pendukung partai mendaftarkan diri mereka sebagai anggota secara diam-diam.[24]

Meskipun Indische Partij tidak diakui sebagai organisasi resmi, Douwes Dekker dan rekan-rekannya tetap menyuarakan gagasan dan kritik terhadap pemerintah.

Meskipun Indische Partij tidak diakui sebagai organisasi resmi, Douwes Dekker dan rekan-rekannya tetap menyuarakan gagasan dan kritik terhadap pemerintah. Salah satunya adalah ketika Pemerintah Hindia-Belanda berencana untuk merayakan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari Prancis pada 1813. Perayaan kemerdekaan itu direncanakan akan dilaksanakan pada bulan November 1913.

Berdasarkan berita *Tjahaja Timoer*, di Malang, dibentuk panitia bagi perayaan kemerdekaan tersebut untuk memungut sejumlah uang dari rakyat. Demikian pula di Batavia, menurut *Pantjaran Warta*, juga dibentuk panitia serupa, sementara di Buitenzorg, asisten-residen sendiri mengepalai panitia perayaan kemerdekaan tersebut.

Untuk mengimbangi panitiaan perayaan kemerdekaan tersebut, maka dibentuklah sebuah panitia di Bandung dengan nama *Comite Boemi Poetra* yang diketuai oleh Cipto Mangunkusumo, dengan Suwardi Surjaningrat sebagai sekretaris, serta Abdul Muis dan A. Wignyadisastra sebagai anggota. Tujuan dari pembentukan komite tersebut adalah:

1. Mencabut Pasal 111 Regering Reglement yang memuat bahwa perkumpulan-perkumpulan atau persidangan-persidangan yang membicarakan soal pemerintahan (politik) atau membahayakan umum dilarang di Hindia-Belanda
2. Membentuk parlemen/majelis perwakilan rakyat sejati
3. Adanya kebebasan berpendapat di tanah jajahan[25]

---

24 "Sarekat Islam en Indische Partij", *Algemeen Handelsblad*, 2 Juli 1913, hlm. 2
25 E.F.E. Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan R.M. Soewardi Soerjaningrat, 1913, *Onze Verbanning* Schiedam: De Indier-Drukkerij 'De Toekomst'.

Melalui komite tersebut, Suwardi Suryaningrat pada tahun 1913 menulis *vlugschrift* (leaflet) berjudul *Als ik eens een Nederlander was* ("Kalau saya seorang Belanda"). Artikel ini memuat sindiran kepada Pemerintah Kolonial atas ketidakadilan yang terjadi di koloni, terkait rencana perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis. Akibat artikel tersebut, Suryaningrat beserta rekan-rekannya ditahan. Pada 29 Juli 1913, Cipto Mangunkusumo adalah yang pertama ditangkap di kantor redaksi *De Express*. Lalu, menyusul Suryaningrat ditangkap di rumahnya, Abdul Muis di kantor *Preangerbode*, dan Wignyadisastra, yang merupakan pemimpin redaksi *Kaoem Moeda*, ditangkap di rumahnya.[26]

Artikel Suwardi Suryaningrat dianggap menghina Pemerintah Hindia-Belanda dan memicu keresahan di masyarakat karena ia menyinggung soal pencabutan Pasal 111 dari RR, serta pembentukan dengan segera parlemen di Hindia, seperti dikutip sebagai berikut: "... *waarbij echter tevens aangedrongen wordt op de buitenwerkingstelling van artikel 111 R.R., en op spoedige instelling van een Indisch Parlement* [... bagaimanapun juga menyerukan untuk mencabut Pasal 111 RR dan segera membentuk Parlemen Hindia]".[27]

Perihal keinginan untuk pembentukan parlemen, kembali ditegaskan oleh Suryaningrat dalam catatan pembelaannya ketika ia sudah ditahan. Ia mengacu pada cita-cita yang diinginkan oleh Indische Partij, yaitu "kebebasan... untuk memerintah diri sendiri dengan Parlemen Hindia" (dikutip dari *Memorie van verdedeging van R.M. Soewardi Soerjaningrat* 11 Agustus 1913 dalam *Onze Verbanning*, 1913). Dalam pembelaannya tersebut, Surjaningrat menggunakan istilah *de volksvertegenwoordiging* (perwakilan rakyat). Perwujudan untuk cita-cita memiliki parlemen tersebut kiranya dapat terealisasikan dalam waktu singkat, sebab menurut Douwes Dekker (1913), mereka hanya "tinggal menunggu waktu, tidak lama lagi kalau dihitung dengan umur suatu bangsa".[28]

Selain Indische Partij, keinginan untuk berparlemen juga dikemukakan oleh Cokroaminoto, seorang tokoh Sarekat Islam. Cokroaminoto mengemukakan hal tersebut dalam pidatonya di Kongres Nasional Sarekat Islam I di Bandung 17-24 Juni 1916. Cokroaminoto mengungkapkan perihal desentralisasi, *zelfbestuur*, dan

Selain Indische Partij, keinginan untuk berparlemen juga dikemukakan oleh Cokroaminoto, seorang tokoh Sarekat Islam.

26 "Opzienbarende Arrestatie", *Bataviaasch Nieuwsblad*, 31 Juli 1913, hlm. 3
27 Soewardi Soerjaningrat, "Als ik eens Nederlander Was", 1913, hlm. 15
28 R.E. Elson, 2009, *The Idea of Indonesia. Sejarah Pemikiran dan Gagasan* (Jakarta: Serambi), hlm. 29

otonomi di berbagai wilayah di Hindia-Belanda. Menurutnya, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan:

> "[...] pengurusan kepentingan masing-masing telah diberikan kepada suatu *Locale Raad* (Dewan Perwakilan Setempat) yang harus mengurus soal-soal keuangannya sendiri-sendiri, singkatnya, sebagian dari pemerintahan diserahkan kepada mereka yang kita anggap lebih mengetahui kebutuhan-kebutuhan setempat. Dengan demikian, terjadilah di mana-mana dewan pemerintah daerah dan sidang negeri. Selain dewan-dewan perwakilan tersebut, ada pula badan lain yang telah terbentuk sejak dahulu yang sifatnya sama dengan dewan-dewan tersebut, yakni *inlandsche gemeenten* (kota praja Bumiputra) di desa-desa di Jawa dan Madura yang sekarang telah mengalami perbaikan, walaupun masih jauh dari sempurna.[29]

... bahwa dewan-dewan tersebut merupakan tempat untuk belajar, yaitu semacam sekolah, untuk kemudian dapat mengarah pada visi *zelfbestuur* bagi seluruh Hindia-Belanda.

Dalam pidatonya tersebut, Cokroaminoto juga mengatakan bahwa dewan-dewan tersebut merupakan tempat untuk belajar, yaitu semacam sekolah, untuk kemudian dapat mengarah pada visi *zelfbestuur* bagi seluruh Hindia-Belanda. Menurut Cokroaminoto:

> "Dewan Sidang Negeri (*gemeente*), Dewan Pemerintahan Daerah, dan kemudian *Koloniale Raad*, adalah sebenarnya sekolah-sekolah bagi kaum kita yang dalam pengetahuan berada di tingkat yang lebih tinggi dari mereka yang kita sebut tadi. Kita diwajibkan membayar pajak dan harus tunduk pada pada berbagai kewajiban yang semuanya ditanggung oleh rakyat. Maka dari itu, dewan-dewan tersebut harus pula membuka pintu mereka bagi kita untuk dapat berbicara dalam rapat-rapat mereka, agar kita dapat belajar turut campur dalam soal-soal pemerintahan. Sekarang memang sudah ada beberapa anggota Bumiputra

29 A. Zainoel Ihsan dan Pitut Soeharto, 1981, *Aku Pemuda Kemarin di Hari Esok: Kumpulan tulisan asli, lezing, dan pidato tokoh pergerakan kebangsaan* 1913-1938 (Jakarta: Jayasakti), hlm. 24-25

dalam dewan-dewan tersebut, namun apalah artinya segelintir anggota itu dibandingkan dengan penduduk yang sedemikian besarnya?"[30]

Pendapat Cokroaminoto sangat kuat terhadap hal ini, yaitu bahwa dewan perwakilan dapat dijadikan sebagai sarana untuk belajar atau sekolah yang harus membuka pintu, terutama bagi kalangan Bumiputra yang terpelajar. Untuk itu, Cokroaminoto menambahkan:

"Koloniale Raad dalam proyeknya telah siap, dan bilamana gedung itu akan didirikan di sana, di Batavia, maka rakyat harus mengirimkan para pemimpinnya ke sana untuk mengikuti pelajaran di situ. Tentang *gemeenteraden* (Dewan Kota Praja), *geweestelijke raden* (Dewan Daerah), dan Koloniale Raad kita akan membicarakannya lebih lanjut."[31]

2.4 Situasi di Luar Hindia dan Isu *Indië Weerbaar*

Pada 1912, muncul pertama kali usulan untuk memberlakukan sistem milisi pribumi.

Beberapa tahun menjelang meletusnya Perang Dunia I pada 1914, Pemerintah Kolonial sangat mengutamakan pembangunan pertahanan laut di Hindia-Belanda. Sementara itu, usulan untuk memperkuat pasukan darat tidak lagi mendapatkan perhatian. Ketika Pemerintah Kolonial menyadari adanya kemungkinan serangan militer, mereka mulai berpikir bahwa usaha untuk mempertahankan wilayah Hindia-Belanda yang luas merupakan usaha sia-sia dengan jumlah pasukan yang ada. Persoalannya ada pada anggaran. Untuk mengurus pasukan reguler di Hindia-Belanda sendiri sesungguhnya sudah merupakan masalah, terlebih jika harus menambah pasukan reguler dalam waktu singkat. Kalaupun tersedia dana untuk membiayai pasukan tambahan, jumlah pasukan yang diharapkan tidak akan banyak sebanyak itu. Oleh karena itu, perlu ada perekrutan milisi pribumi yang terdiri dari pasukan non-reguler. Persoalan ini dikenal dengan nama *Indië Weerbaar* (Pertahanan Hindia).[32]

Pada 1912, muncul pertama kali usulan untuk memberlakukan sistem milisi pribumi. Usulan ini diajukan oleh seorang komandan

30 *Ibid.*, hlm. 26
31 *Ibid.*, hlm. 27–28
32 Akira Nagazumi, Op.Cit., hlm. 161

militer di Makassar, Buys, pada 13 Juni 1912 kepada atasannya. Pada akhir bulan Maret 1913, panglima militer di Batavia dengan bersungguh-sungguh mempertimbangkan gagasan milisi tersebut dan menyatakan dukungannya terhadap sistem milisi seperti yang sudah berjalan di beberapa wilayah lain di Sulawesi. Ia juga mendesak Gubernur Jenderal saat itu untuk mempertimbangkan pengesahan pemberlakuan milisi tersebut. Namun, setelah mempertimbangkan rencana tersebut, pada bulan Februari 1914, Pemerintah Kolonial menganggap rencana tersebut masih prematur dan untuk sementara diabaikan saja. Dengan kata lain, gagasan ini ditolak oleh Pemerintah Hindia-Belanda.[33]

Ketika Perang Dunia I meletus pada September 1914, pandangan Pemerintah Kolonial berubah dengan cepat. Meskipun negeri Belanda dan Hindia-Belanda tidak terlibat langsung dalam Perang Dunia I, ancaman perang dirasakan oleh penduduk Belanda di Hindia-Belanda. Ancaman tersebut bukan datang dari Jerman, khususnya angkatan laut Jerman yang pada saat itu menjadi kekhawatiran utama, melainkan salah satu sekutunya, yaitu Jepang, yang dikhawatirkan akan menyerbu Hindia-Belanda secara lebih efektif. Akibat dari peperangan ini akan menimbulkan kesulitan komunikasi antara negeri induk di Belanda dengan Hindia-Belanda. Oleh karena itu, Pemerintah Kolonial harus mengambil keputusan sendiri mengenai persoalan tersebut.[34] Maka, masalah pertahanan Hindia kembali menjadi persoalan nasional, sehingga gagasan *Indië Weerbaar* kembali muncul. Organisasi pemuda Budi Utomo, yang anggota-anggota cabangnya berasal dari kalangan orang Jawa, banyak yang memutuskan untuk menjadi anggota tentara kolonial dan ikut mengkampanyekan pembentukan milisi tersebut. Pengurus pusat Budi Utomo mengirim dua orang anggota terkemuka mereka, Komisaris Dwijosewoyo dan Sastrowiyono untuk melakukan perjalanan di Jawa, berkampanye untuk mendukung rencana tersebut.[35]

Ketika Perang Dunia I meletus pada September 1914, pandangan Pemerintah Kolonial berubah dengan cepat.

Selain Budi Utomo, Sarekat Islam juga ikut mengkampanyekan *Indië Weerbaar* dan mengakui pentingnya usulan tersebut. Sarekat Islam bahkan mengajukan tuntutan yang lain, yaitu harus adanya perwakilan Bumiputra dalam Pemerintahan Hindia-Belanda. Sebaliknya, D.A. Rinkes dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal tanggal 10 Maret 1916, meragukan dukungan yang diberikan Sarekat Islam. Menurut Rinkes, isu pertahanan Hindia-Belanda bagi Sarekat

33 *Ibid.*
34 *Ibid.*, hlm. 162
35 *Ibid.*, hlm. 165

Islam bukanlah permasalahan yang memusingkan pribumi, oleh karena rakyat pribumi yang ketika itu hanya dihargai sebagai subyek "setengah manusia saja", sehingga urusan pertahanan Hindia-Belanda hanyalah urusan pemerintah. Dalam sebuah rapat Sarekat Islam di Surabaya, diharapkan akan disusun sebuah mosi yang mendukung milisi, tetapi hal tersebut tidak pernah terjadi. Mosi yang diusulkan oleh Cokroaminoto justru dijadikan sebagai jaminan untuk membentuk *volksvertegenwordiging* atau Perwakilan Rakyat. Dengan kata lain, Cokroaminoto menuntut pembentukan sebuah badan resmi di mana rakyat Hindia-Belanda dapat menyatakan pendapat mereka dengan bebas, sebelum membahas milisi pribumi.[36]

Pada 1915, Budi Utomo mendukung tuntutan Sarekat Islam, sehingga kampanye *Indië Weerbaar* berubah menjadi kampanye isu perwakilan rakyat. Gubernur Jenderal Hindia-Belanda Van Limburg Stirum memberikan harapan pada pembahasan masalah pertahanan Hindia oleh organisasi pribumi ini. Pada Juli 1916, dibentuk *Comite Indie Weerbaar* (Komite Pertahanan Hindia) dengan anggota para wakil dari organisasi Budi Utomo, Centrale Sarekat Islam (CSI), *Regenten Bond* (Ikatan Para Bupati), serta perhimpunan dari empat daerah kerajaan, yaitu *Narpowandowo* (kawasan Susuhunan di Surakarta), *Prinsen Bond Mataram* (Kawasan Sultan di Yogyakarta), *Mangkunegaran* (Kadipaten Mangkunegaran), *Abdi Dalem Wargo Pakualam* (Kadipaten Pakualaman).[37] Sementara itu, golongan Insulinde dan kaum sosialis tidak tertarik pada komite ini.

Pada 1915, Budi Utomo mendukung tuntutan Sarekat Islam, sehingga kampanye *Indië Weerbaar* berubah menjadi kampanye isu perwakilan rakyat.

Lantas, terkait isu seputar *Indië Weerbaar*, melalui rapat komite pada 31 Agustus 1916, dihasilkanlah keputusan berupa usulan untuk mengirim sejumlah delegasi ke negeri Belanda guna menyampaikan mosi kepada Ratu Belanda, Wilhelmina, juga kepada Menteri Urusan Koloni dan Parlemen Belanda. Wakil-wakil bupati, daerah kerajaan, dan Budi Utomo segera menyetujui usulan tersebut, tetapi bagi CSI masalahnya tidak sesederhana itu. Sejak semula, para anggota Sarekat Islam tidak begitu bersemangat dengan usulan milisi pribumi atau persoalan pertahanan Hindia-Belanda pada umumnya. Keanggotaan CSI dalam komite pertahanan Hindia-Belanda bagi Sarekat Islam merupakan kesempatan bagi mereka untuk menyatakan keberatannya terhadap persoalan tersebut. Namun, salah seorang anggota CSI

36 *Ibid.*, hlm. 172
37 *Ibid.*, hlm. 184; Petrus Blumberger, 1931, *de Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indië* (Haarlem: H.D. Tjeenk Willing & Zoon), hlm. 25

bernama Abdul Muis tiba-tiba menyetujui gagasan untuk mengirim delegasi ke Negeri Belanda tersebut.

Maka, delegasi terdiri atas enam anggota, yaitu Pangeran Ario Kusumodiningrat sebagai perwakilan dari Prinsen Bond Mataram, Bupati Magelang Raden Tumenggung Danu Sugondo sebagai perwakilan dari Regenten Bond, Mas Ngabehi Dwijosewoyo sebagai perwakilan dari Budi Utomo, Abdul Muis sebagai perwakilan dari Sarekat Islam, Frits Laoh sebagai perwakilan dari Perserikatan Minahasa, dan W.V. Rhemrev. Keenam anggota tersebut didampingi oleh Dirk van Hinloopen Labberton, Ketua Perhimpunan Teosofi, yang juga merupakan salah seorang tokoh pendukung Politik Etis, yang ditunjuk untuk bertindak sebagai Ketua Delegasi. Idenburg, mantan Gubernur Jenderal Hindia-Belanda yang saat itu telah kembali ke Belanda, juga bersedia membantu para delegasi selama mereka berada di Negeri Belanda.[38]

Di Belanda, beberapa anggota delegasi aktif mengikuti berbagai diskusi.

Berkaitan dengan delegasi tersebut, dalam surat dari Gubernur Jenderal Hindia-Belanda untuk Menteri Urusan Tanah Jajahan Pleyte tanggal 9 September 1916 disebutkan bahwa rencana mengirim utusan yang beranggotakan beberapa orang pribumi dari komite telah menimbulkan kehebohan di kalangan pribumi. Berdasarkan alasan ini juga, Gubernur Jenderal merasa perlu mendesak kepastian untuk segera membahas perundang-undangan tentang dibentuknya dewan kolonial yang pada saat itu masih terkatung-katung di Majelis Rendah Staten Generaal. Dalam konteks ini, Gubernur Jenderal jelas mengaitkan masalah dewan kolonial dengan sistem milisi. Secara praktis, prioritas yang harus diambil antara kedua masalah tersebut sangat bertolak belakang. Tidak ada tuntutan tegas untuk melaksanakan sistem milisi, namun surat itu justru dengan jelas menuntut diputuskannya undang-undang tentang pendirian dewan kolonial.[39] Mengenai kedatangan para delegasi, ada yang mengatakan bahwa mereka tiba di Belanda pada akhir tahun 1916, namun ada pula yang menyebutkan bahwa mereka tiba di sana pada bulan Maret 1917 dan kembali ke tanah air menjelang bulan Agustus 1917.[40]

Di Belanda, beberapa anggota delegasi aktif mengikuti berbagai diskusi. Dua anggota yang sangat aktif adalah Abdul Muis

38 Nagazumi, Op.Cit., hlm. 185
39 *Ibid.*, hlm. 187
40 Akira Nagazumi menuliskan rombongan delegasi tersebut tiba pada akhir tahun 1916, sedangkan Robert van Niel menyebutkan kedatangan mereka adalah pada bulan Maret 1917. Menurut Nagazumi, van Niel tidak menyebutkan sumber dari pernyataannya tersebut. Sementara itu, menurut Blumberger, dilaporkan bahwa misi delegasi tersebut baru menyampaikan petisi kepada Ratu pada bulan Januari 1917, *Ibid.*

dan Dwijosewoyo. Dwijosewoyo berusaha menjalin relasi sebanyak-banyaknya selama ia berada di Belanda. Dalam *Verslag Boedi Oetomo* 1919, dilaporkan sejumlah kegiatan Dwijosewoyo yang meluas ke semua kalangan masyarakat di Belanda.

> "Di negeri Belanda ia menghadap Sri Ratu, bersama-sama dengan perutusan dewan pertahanan Belanda, dan kemudian ia menghadiri sidang majelis rendah. Di sini ia berusaha menyampaikan cita-cita Budi Utomo, yaitu agar tugas milisi diberikan kepada penduduk pribumi dalam hubungan dengan hak perwalian rakyat bagi Hindia-Belanda. M.Ng. Dwidjosewojo berusaha mempropagandakan kedua tujuan yang sangat penting ini, dengan jalan berbicara di depan banyak rapat [-rapat], menyebarkan beratus-ratus pamflet di seluruh Negeri Belanda atau biaya Badan Pengurus Budi Utomo.[41]

Dwijosewoyo berpidato di berbagai kota di Belanda, seperti Den Haag, Amsterdam, Enschede, Delft, dan Rotterdam. Ia membicarakan dua isu utama yang menjadi dasar keberangkatan delegasi dari Hindia-Belanda, yaitu soal milisi dan parlemen. Ia menegaskan bahwa dengan keberadaan sebuah perwakilan rakyat yang berkekuatan legislatif merupakan tuntutan yang mendesak di Hindia-Belanda saat itu. Konsep pertahanan Hindia tidak dapat dibayangkan terwujud tanpa adanya partisipasi milisi pribumi. Oleh karena itu, usaha memperkuat militer di Hindia harus sejalan dengan pembangunan penduduk pribumi di bidang perekonomian, kepandaian, dan politik.[42]

Berbeda dengan Dwijosewoyo yang menyampaikan pendapatnya secara moderat, Abdul Muis menyampaikan pendapatnya dengan cara yang menimbulkan rasa tidak senang dari pihak lain. Terdorong oleh situasi bahwa ia tidak diawasi dengan ketat seperti ketika berada di Hindia-Belanda, serta dukungan yang diterima dari partai politik di Belanda, Muis berbicara sedikit menyimpang. Ia mengungkapkan tujuan Sarekat Islam yaitu mencapai kondisi *zelfstandigheid* (mandiri) bagi Hindia-Belanda. Namun, ia sedikit memberikan nada lunak dengan mengatakan bahwa sementara ini CSI sangat puas dengan berada tetap

Gambar 1.
Mas Dwidjosuwojo, c. 1920
[Sumber: KITLV 7268]

41 *Ibid.*
42 *Ibid.*

Gambar 2. Abdul Muis, c. 1916
[Sumber: KITLV 7814]

di bawah kekuasaan Belanda dan siap membantu menghadapi musuh dari manapun "selama Belanda memerintah dengan adil dan baik".[43]

Pernyataan Muis menimbulkan kerisauan dari pihak Belanda yang menjadi penanggung jawab para delegasi ini. Idenburg, yang sangat khawatir dengan pandangan Muis, menuliskan laporan kepada Gubernur Jenderal dengan nada pesimistis karena gagalnya misi delegasi. "Tidak seorang pun di antara mereka yang berbicara atas nama delegasi. Mereka masing-masing lebih banyak menyuarakan kepentingan sendiri dan pemerintah tidak berhasil mengajukan usul konkret apa pun kepada mereka," tulis Idenburg dalam laporannya tanggal 15 Mei 1917.[44]

Sebenarnya, di luar dari pandangan kontroversial Abdul Muis dan beberapa anggota delegasi lainnya yang menimbulkan rasa jengkel bagi beberapa kalangan orang Belanda, aksi-aksi tersebut tidak berpengaruh terhadap langkah Staten Generaal dalam mengambil keputusan. Persoalan milisi, kemungkinannya bagi pihak Belanda, bukanlah persoalan penting. Komponen-komponen yang menjadi penting adalah keraguan yang ada pada pokok sistem tersebut, jika benar-benar dilaksanakan, serta faktor oposisi partai sayap kiri di Staten Generaal yang tidak tertarik pada konsep pertahanan Hindia, sehingga usulan soal milisi tidak mendapatkan dukungan penuh dalam Parlemen Belanda.[45]

Maka, adalah jelas bahwa persoalan milisi bukan sasaran pokok yang ingin dicapai para delegasi. Tujuan rakyat pribumi melalui perwakilan ini sebenarnya adalah munculnya perundang-undangan yang dapat menjamin terbentuknya parlemen sendiri. Gubernur Jenderal Hindia-Belanda sendiri pun sangat memperhatikan persoalan ini. Hal ini diperlihatkan dalam surat-suratnya yang ditujukan kepada Menteri Urusan Tanah Jajahan, supaya penyelesaian terhadap persoalan perundang-undangan itu dapat diselesaikan dengan cepat. Surat-menyurat tersebut dilakukan sejak bulan Juli hingga undang-undang tersebut akhirnya disahkan pada bulan Desember 1916.[46]

Pembahasan mengenai perundang-undangan untuk pembentukan parlemen di Hindia-Belanda sebenarnya sudah dibicarakan pada periode sebelumnya. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pemberian otonomi kepada Hindia-Belanda. Salah

43 *Ibid.*, hlm. 188
44 *Ibid.*
45 *Ibid.*, hlm. 189
46 *Ibid.*

satu bentuk pelaksanaan dan pemberian otonomi itu adalah persiapan mendirikan Dewan Rakyat. Pada tahun 1907, Menteri Urusan Koloni Dirk Fock (1858–1941) mengusulkan perluasan Dewan Hindia. Pada tahun 1913, pengganti Fock, Jan Hendrik de Waal Malefijt, mengusulkan pendirian suatu *Koloniaal Raad* (Dewan Kolonial) yang beranggotakan 29 orang.[47]

Di antara anggota Dewan Kolonial terdapat anggota Dewan Hindia. Sebelas anggota yang dipilih oleh Dewan Lokal sebagiannya mewakili kepentingan Belanda, sementara sebagian lain diangkat untuk membela kepentingan pribumi.[48] Nama *Koloniale Raad* (Dewan Kolonial) tidak dapat diterima oleh kaum pergerakan, sehingga yang digunakan adalah nama *Volksraad* (Dewan Rakyat). Berdasarkan amandemen dari Dirk Fock dan kawan-kawan pada 20 September 1916, nama "*Koloniale Raad*" diganti dengan "*Volksraad voor Nederlandsch-Indië*" yang terdapat dalam Pasal 131. Perihal penggantian nama *Koloniale Raad* menjadi *Volksraad* juga dibahas dalam rapat *Tweede Kamer* pada 3 Oktober 1916. Menteri Urusan Tanah Jajahan, Thomas Baastian Pleyte (1864–1926), mengajukan usul kepada ketua sidang:

> "*Mijnheer der Vorzitter! Mag ik een enkel woord zeggen naar aanleiding van den titel. Er staat nu boven 'Van een Kolonialen Raad', welken titel ik zou willen wijzigen in 'Van den Volksraad', ook in verband met het amendement, door den heer Fock c.s. voorgesteld.*"[49]
>
> [Tuan Ketua! Bolehkah saya mengatakan sesuatu tentang judul. Saat ini judulnya "Dari Dewan Kolonial", judul yang saya ingin ubah adalah "Dari Dewan Rakyat". Hal itu juga berhubungan dengan amandemen yang diajukan oleh Mr. Fock dan kawan-kawan.]

Di antara anggota Dewan Kolonial terdapat anggota Dewan Hindia. Sebelas anggota yang dipilih oleh Dewan Lokal sebagiannya mewakili kepentingan Belanda

Sementara itu, dalam Pasal 132, disebutkan bahwa anggota dari *Koloniale Raad* terdiri atas sekurang-kurangnya 39 anggota. Ketua dan anggota diangkat oleh Raja/Ratu. Anggota lain, sebanyak-banyaknya

47 "Koloniale raad", *Algemeen Handelsblad*, 23 Juni 1913, hlm. 2
48 Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, 2008, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia-Belanda* [Edisi Pemutakhiran] (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 34-35
49 "*Handelingen der Staten Generaal* 1916-1917", 3 Oktober 1916, 6de Vergadering

separuh diangkat oleh Gubernur Jenderal setelah mendapatkan saran dari *Raad van Nederlandsch-Indië* (Dewan Hindia-Belanda), dengan rekomendasi sedikitnya dua orang. Seperempat dari jumlah anggota yang diangkat oleh Gubernur Jenderal sedikitnya terdiri atas bangsa pribumi, Eropa, dan Timur Asing. Anggota lainnya dipilih oleh anggota Dewan Hindia-Belanda sesuai dengan Pasal 68b.[50] Pembentukan Volksraad disetujui pada 16 Desember 1916.[51]

Menurut ketetapan undang-undang, Volksraad terdiri atas anggota-anggota yang ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Ketua diangkat oleh Ratu;
2. Sembilan belas anggota dipilih oleh anggota Dewan Daerah dan Dewan Kota; di antara mereka sepuluh orangnya berasal dari kalangan pribumi dan sembilan orang lainnya adalah orang Eropa;
3. Sembilan belas anggota juga dipilih oleh Gubernur Jenderal atas nasihat Dewan Hindia-Belanda; dari sembilan belas ini, lima adalah pribumi, sementara empat belas sisanya adalah Eropa.[52]

Berita pengesahan undang-undang didirikannya Volksraad oleh Staten Generaal telah sampai ke Hindia-Belanda sebelum delegasi kembali dari Belanda.

Pada tahun 1916, J.J. Schrieke, Wakil Panitera *Raad van Justitie* (Dewan Kehakiman) Batavia, menulis dalam bahasa Melayu untuk para priyayi. Ia menekankan kaitan antara pembentukan Volksraad dengan persamaan hak menurut gagasan Politik Etis. Ia menunjukkan bahwa dewan-dewan setempat, yang merupakan tempat bagi calon anggota Volksraad, di waktu yang akan datang akan lebih dikuasai oleh pegawai pemerintah, dan hal itu harus diubah. Jika Volksraad dikendalikan oleh para pejabat, maka Volksraad hanya akan menjadi suatu kegagalan dalam konteks perwakilan.[53]

Berita pengesahan undang-undang didirikannya Volksraad oleh Staten Generaal telah sampai ke Hindia-Belanda sebelum delegasi kembali dari Belanda. Kabar yang menarik perhatian penduduk pribumi adalah dalam parlemen baru tersebut akan ada 15 anggota dari kalangan pribumi, dengan perincian 10 anggota dipilih dan lima anggota diangkat dari 38 anggota keseluruhan.[54]

---

50 "*Kamerstuk Tweede Kamer* 1916-1917", Kamerstuk Nummer 22, Ondernummer 6
51 *Nederlandsch Staatsblad No.* 535, 1916; *Indische Staatblad No.* 114, 1917
52 S.L. van der Wal (ed.), 1964, *De Volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Nederlandsch-Indië: een bronnenpublicatie. Eerste stuk* 1891-1926 (Groningen: J.B.Wolters), hlm. 179
53 J.J. Schrieke, "Koloniale Raad: apa boeahnja sidang?" dan "Koloniale Raad: oentoek anak Hindia", *Pedoman Prijaji*, I (1916), hlm. 42-52 dan 65-76 (Dalam Heather Sutherland, 1983, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi* (Jakarta: Sinar Harapan), hlm. 179
54 Nagazumi, *Op.Cit.*, hlm. 200

Budi Utomo segera mengambil inisiatif membentuk Komite Nasional dengan para anggota pimpinan berbagai organisasi pribumi. Tujuannya adalah untuk membahas masalah Volksraad dan mempersiapkan diri bagi pemilihannya. Organisasi yang ikut dalam komite tersebut, antara lain Budi Utomo dengan dua utusan, empat organisasi daerah kerajaan dengan enam utusan, Ikatan Para Bupati dengan dua orang utusan, CSI dengan satu utusan, serta dua utusan dari Persatuan Guru Hindia-Belanda (PGHB). Dari semua organisasi, hanya PGHB yang tidak termasuk ke dalam anggota delegasi yang sebelumnya diberangkatkan ke Belanda.[55]

Menjelang pemilihan anggota Volksraad, bangsa Belanda di Hindia juga serentak membentuk partai-partai politik. Kelompok yang konservatif di kalangan pejabat Belanda dalam pemerintahan diwakili oleh *Vereeniging van Ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur*- (VABB) atau Perhimpunan Pegawai Pemerintahan Dalam Negeri, yang dibentuk pada 1911. Kalangan etis, baik yang berada di dalam maupun di luar kalangan pejabat Belanda, membentuk *Nederlandsch-Indische Vrijzinnige Bond* (NIVB) atau Perhimpunan Liberal Hindia-Belanda, yang dibentuk pada 1916. Partai ini dikelola secara luwes menjadi suatu perhimpunan dengan keanggotaan yang terbuka bagi berbagai lapisan penduduk pribumi.[56]

Menjelang pemilihan anggota Volksraad, bangsa Belanda di Hindia juga serentak membentuk partai-partai politik.

Kelompok masyarakat Kristen juga membentuk partainya sendiri, seperti masyarakat Protestan yang membentuk *Christelijke Ethische Partij* (CEP) atau Partai Kristen Etis pada bulan September 1917. Sesudah Volksraad diresmikan, masyarakat Katolik Roma mendirikan *Indische Katholieke Partij* (IKP) pada bulan November 1918.[57]

Terdorong oleh inisiatif dari Budi Utomo, masyarakat Tionghoa mengadakan rapat pada 7 Oktober 1917 untuk memilih calon-calon anggota Volksraad. Budi Utomo dan CSI segera mengumumkan daftar nama masing-masing, sementara Ikatan Para Bupati juga berhasil menyusun daftar nama, meskipun sebagian besar anggota bersikap masa bodoh dengan hal tersebut.[58]

Daftar nama yang disusun oleh CSI, berdasarkan laporan *Politieke Inlichtingen Dienst* (PID) pada 7 November 1917, adalah sebagai berikut:[59]

---

55 *Ibid.*
56 *Ibid.*, hlm. 202
57 *Ibid.*
58 *Ibid.*, hlm. 210
59 *Ibid.*

1.	O.S. Cokroaminoto	Partikelir	Surabaya
2.	Abdul Muis	Partikelir	Surabaya
3.	R. Hasan Jayadiningrat	Partikelir	Serang
4.	R.M. Suryopranoto	Partikelir	Yogyakarta
5.	R.P. Sosrokardono	Partikelir	Surabaya
6.	Joyosudiro	Partikelir	Weltevreden
7.	Mohammad Yusuf	Pegawai Pemerintah	Semarang
8.	R.A.A.A. Jayadiningrat	Bupati	Serang
9.	Sutan Tumenggung	Wedana	Weltevreden
10.	R. Wijoyodiseno	Wedana	Weltevreden
11.	M. Ng. Dwijosewoyo	Guru Bahasa Jawa	Yogyakarta
12.	R. Achmad	Asisten Wedana	Weltevreden
13.	R. Sosrodanukusumo	Mantan Wedana	Sampang
14.	R. Sutopo	Guru Pertanian	Purworejo
15.	R. Hadiwijoyo	Partikelir	Blitar
16.	R. Tirtodanudirjo	Partikelir	Surabaya
17.	Alimin	Partikelir	Weltevreden

Pemilihan diperkirakan berlangsung pada bulan Januari 1918.

Sementara itu, dari Ikatan Para Bupati, daftar nama yang akan dicalonkan antara lain:

1. R. Gondosubroto
2. M. Budiarjo
3. M. Dwijosewoyo
4. Rajiman
5. Atmodirono
6. R.M. Suryopranoto
7. R. Sastrowijono

Pemilihan diperkirakan berlangsung pada bulan Januari 1918. Gubenur Jenderal Van Limburg Stirum menyampaikan kepada Menteri Urusan Koloni Pleijte pada 21 Januari 1918 tentang hasil pemungutan suara. Anggota-anggota dari kalangan pribumi yang terpilih adalah sebagai berikut:[60]

1.	Abdul Muis	CSI, Perserikatan Sumatra
2.	M. Abukasan Atmodirono	Budi Utomo
3.	R. Kamil	Budi Utomo
4.	Rajiman (R. Ng. Wediodipuro)	Budi Utomo
5.	R. Sastrowijono	Budi Utomo

60 *Ibid.*, hlm. 214

6.	Abdul Rivai	Insulinde
7.	R.A.A.A. Jayadiningrat	Ikatan Para Bupati dan NIVB
8.	R.A.A.A. Kusumo Yudo	Ikatan Para Bupati
9.	R.M.A.A. Kusumo Utoyo	Ikatan Para Bupati
10.	A.L. Waworuntu	Orang Manado dari Perserikatan Minahasa

Hasil pemilihan ini tidak menggembirakan Gubernur Jenderal karena dari susunan tersebut, anggota pribumi yang dipilih adalah para bupati, wedana, dan orang-orang dengan jabatan sejenis. Kekhawatiran Gubernur Jenderal tersebut disampaikan pada bulan Juni 1917, dengan mengemukakan bahwa sistem pemilihan harus diubah jika Volksraad tidak ingin dianggap sebagai "sekedar boneka pemerintah belaka".[61]

Dalam jangka pendek, satu-satunya alternatif yang harus dilakukan oleh Gubernur Jenderal adalah menggunakan kekuasaannya untuk mengangkat lima anggota pribumi, selebihnya agar ada keseimbangan di antara berbagai kelompok etnis, politis, dan keagamaan di kalangan penduduk pribumi. Namun, Gubernur Jenderal harus berhati-hati supaya pengangkatan tersebut tidak menimbulkan kecaman yang semakin luas.[62]

Dalam jangka pendek, satu-satunya alternatif yang harus dilakukan oleh Gubernur Jenderal adalah menggunakan kekuasaannya ...

Pada 8 Maret 1918, Dewan Hindia mengajukan rekomendasi kepada Gubernur Jenderal mengenai golongan kepentingan pribumi yang harus diwakili dalam Volksraad, baik melalui jalur pemilihan maupun pengangkatan. Rekomendasi yang diberikan untuk penduduk pribumi adalah:[63]

1. Para penguasa otonom di Jawa;
2. Para penguasa otonom di luar Jawa;
3. Sarekat Islam;
4. Budi Utomo; dan
5. Insulinde

Lima anggota yang ditunjuk, masing-masingnya mewakili satu kelompok kepentingan berdasarkan rekomendasi Dewan Hindia. Mereka adalah Cipto Mangunkusumo dari Insulinde, O.S. Cokroaminoto dari CSI, Dwijosewoyo dari Budi Utomo, P.A.A.P. Prangwadono dari Ikatan Para Bupati, Sri Mangkunegara VI yang merupakan penguasa otonom di Jawa, dan Teuku Chi Mohamad

61 S.L. van der Wal, 1964, *De Volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Nederlands-Indie: een bronnenpublicatie. Eerste stuk 1891-1926* (Groningen: J.B. Wolters), hlm. 218
62 Nakazumi, *Op.Cit.*, hlm. 215
63 Van der Wal, *Op.Cit.*, hlm. 224

Thayeb yang merupakan penguasa daerah Peureula di Aceh.[64] Anggota lainnya adalah F. Laoh dari Perserikatan Minahasa dan J.A. Soselisa dari *Ambonsch Studiefonds*.[65]

Bagi pemerintah, kehadiran para bupati dalam Volksraad memang memberikan pengaruh yang menguntungkan, terutama dalam bidang politik, namun di bidang yang lainnya, seperti pemerintahan, posisi para bupati di Volksraad justru merugikan Pemerintah Kolonial. Sebagai persyaratan, anggota dewan paling kurang harus menetap di Batavia selama empat bulan setiap tahunnya, sehingga beberapa anggota merasakan hal ini telah menurunkan efektivitas pemerintahan. Tercatat ada empat orang bupati yang menjadi anggota Volksraad yaitu Kusumo Utoyo, Jayadiningrat, Kusumo Yudo, dan Suyono.[66]

Bagi pemerintah, kehadiran para bupati dalam Volksraad memang memberikan pengaruh yang menguntungkan ...

2.5 Volksraad 1918–1921: Dari' Janji November' hingga Reformasi Ketatanegaraan

Gambar 3. Sidang pembukaan Volksraad tahun 1918

[Sumber: KITLV 4513]

64 Nakazumi, *Op.Cit.*, hlm. 217
65 Wardiningsih Soerjohardjo, 2011, *Radicale Concentratie versus Volksraad (Dewan Rakyat): Aspirasi Bangsa Indonesia Menentang "Dewan Rayap"* (Jakarta: Abacus), hlm. 40
66 Sutherland, *Op.Cit.*, hlm. 178-179

Pelantikan anggota Volksraad diselenggarakan pada 18 Mei 1918, dengan pembukaan sidang pertama oleh Gubernur Jenderal Mr. Johan Paul Graaf van Limburg Stirum. Dalam pidato pembukaannya, ia menyinggung sekilas mengenai upaya pemerintah kolonial dalam mendirikan semacam badan penasihat sejak akhir abad ke-19. Ia juga mengungkapkan dengan nada optimistis kemungkinan keberhasilan dari badan ini pada masa mendatang. Limburg Stirum mengatakan:

> "*Moeizaam was de voorbereiding van de thans gelegde grondvesten voor Indië's eigen staatkundig leven: in de 24 jaren die zij heeft geduurd, is de in 1893 voorgenomen uitbreiding van den Raad van Indië uitgegroeid tot het thans tot stand gebracht vertegenwoordigend lichaam, overeenkomstig welks gevoelen de Gouverneur-Generaal jaarlijks de begrooting vaststelt, tot het raadplegen waarvan hij in zake eenige belangrijke aangelegenheden verplicht is en welks oordeel hij kan vragen wanneer hij dat wenscht, terwijl den Volksraad het recht van petitie is gewaarborgt.*"[67]
>
> [Persiapan fondasi kehidupan politik Hindia-Belanda sendiri sulit: dalam 24 tahun bahwa itu telah terjadi, ekspansi Dewan Hindia yang direncanakan pada tahun 1893 telah tumbuh menjadi badan perwakilan yang sekarang dibuat, menurut pendapat Gubernur Jenderal, setiap tahun menetapkan anggaran, untuk berkonsultasi apa yang wajib dilakukannya pada hal-hal penting dan penilaian kepada siapa dia bisa bertanya kapan dia mau, sementara Volksraad dijamin hak petisi.]

Ketua Volksraad, J.C. Koningsberger, sebagai pembicara kedua mengingatkan bahwa lembaga Volksraad mudah-mudahan di mata penduduk pribumi dapat "memuaskan walaupun belum sempurna". Koningsberger mengatakan:

Ketua Volksraad, J.C. Koningsberger, sebagai pembicara kedua mengingatkan bahwa lembaga Volksraad mudah-mudahan di mata penduduk pribumi ...

67 *Handelingen* 1918-1919, Tahun 1, hlm. 1

> "*Voor velen – het is van algemeene bekendheid geldt hier het "dankbaar, maar niet voldaan"; zij hadden mèèr gewenscht en mèèr verwacht. Niet tevreden met hetgeen hier de toekomst aan perspectieven vertoont, ging hun verlangen uit naar de onmiddellijke verwezenlijking van idealen, waarvan de vervulling zich waarschijnlijk nog eenigen tijd zal moeten doen wachten omdat de juiste verhouding tusschen den ontwikkelingstoestand eener groote gemeenschap en haar staatkundige vorming zich niet ongestraft laat verbreken.*"[68]
>
> [Bagi banyak orang – pada umumnya diketahui di sini bahwa itu merupakan rasa "bersyukur tetapi tidak merasa puas"; mereka mengharapkan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Mereka tidak puas dengan prospek masa depan, keinginannya adalah justru merealisasikan secara langsung cita-cita mereka, pemenuhan yang mungkin harus menunggu beberapa waktu karena hubungan yang sesuai antara perkembangan masyarakatnya yang besar dan ketatanegaraan konstitusionalnya tanpa harus melepaskan hukuman.]

... Koningsberger juga menyuarakan rasa optimistisnya pada masa mendatang, dengan didorong oleh kemauan untuk bekerja keras demi kebaikan Hindia-Belanda ...

Namun, Koningsberger juga menyuarakan rasa optimistisnya pada masa mendatang, dengan didorong oleh kemauan untuk bekerja keras demi kebaikan Hindia-Belanda dan yakin akan tujuan bekerja sama dengan pemerintah.[69]

Dalam pemerimtahan kolonial, tanggal 18 Mei 1918 merupakan "hari bersejarah", karena mengingat sudah lebih dari 25 tahun disusun rencana pembentukan sebuah dewan kolonial. Di lembaga itulah berbagai kelompok penduduk dan kelompok fungsional dapat mendengarkan pendapat masing-masing dari mereka mengenai kebijakan kolonial. Bila ditelusuri ke belakang, pencapaian ini bermula pada rencana pertama pembentukan Dewan Kolonial di tahun 1893, sampai kepada pembentukan Volksraad di tahun 1916.[70]

---

68 *Ibid.*, hlm. 5
69 *Ibid.*
70 Hans van Miert, 2003, *Dengan Semangat Berkobar: Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia*, 1918-1930 (Jakarta: KITLV), hlm. 178; mengutip Van der Wal, 1975, hlm. 1–19

Rapat Volksraad pertama digelar pada tanggal 21 Mei 1918, dibuka pada pukul sembilan pagi oleh Ketua Volksraad, Koningsberger. Jumlah anggota yang hadir, termasuk ketua, adalah sebanyak 30 orang. Di antaranya adalah R.A.A. Jayadiningrat, P. Bergmeijer, Abdul Muis, Ch. G. Cramer, H.H. Kan, F. Laoh, S. Ismail bin Abdullah Alatas, J.A. Soselisa, M.C. Koning, Mr. J. Gerritzen, Mr. H. 's Jacob, D. van Hinloopen Labberton, Mr. Or. W.M.G. Schumann, W.A.C. Whitlau, J.C. Pabst, K.A.R. Bosscha, M.B. van der Jagt, R. Kamil, M. Ng. Dwijosewoyo, P.A.A.P. Prangwadono, Or. R. Ng. Rajiman alias Wediodipuro, R. Sastrowiyono, Cipto Mangunkusumo, M. Abukasan Atmodirono, J.J.E. Teeuwen, Z. Stokvis, R.M.T.A. Kusumo Utoyo, R.M.T.A. Kusumo Yudo Sumiodo, dr. Abdul Rivai, R. Umar Said Cokroaminoto, Or. J. Schmutzer, L. Coster van Voorhout, D. Birnie, T.E. Mohamad Thayeb, H. Ketner, Lim A Pat, A.L. Waworuntu.[71]

Dalam rapat kelima Volksraad tanggal 19 Juni 1918, para anggota Volksraad menyampaikan pandangan umum mereka. Anggota dari kalangan Bumiputra yang menyampaikan pandangan umumnya adalah Cipto Mangunkusumo, Rivai, Jayadiningrat, Abdul Muis, Cokroaminoto, Rajiman, Sastrowiyono, Atmodirono, dan Waworuntu.[72] Sebagai contoh, dalam pandangan umumnya, Cipto Mangunkusumo mengungkapkan kembali cita-cita yang pernah diutarakan bersama Indische Partij. Ia mengatakan:

Dalam rapat kelima Volksraad tanggal 19 Juni 1918, para anggota Volksraad menyampaikan pandangan umum mereka.

> "*Ik gevoel mij gedwongen, om deze waardeering uit te spreken omdat naar mijne meening in die begrooting uitdrukking heeft gevonden de tendenz in het regeeringsbeleid, om in 'Indië niet meer alleen te zien het wingewest dat vette dividenden aan de moederlandsche ondersnemers heeft te leveren, maar ook een gewest, dat er recht op heeft om bestuurd te worden om zijn zelfs wil. Indië om Indië'.*"[73]
>
> [Saya merasa terdorong untuk mengungkapkan penghargaan ini karena, menurut pendapat saya, dalam anggaran itu, kecenderungan telah dinyatakan dalam kebijakan pemerintah untuk tidak lagi melihat di Hindia saja sebagai provinsi yang memiliki keuntungan besar kepada

71 *Verslag der Handelingen van den Volksraad, Eerste Gewone Zitting in* 1918, hlm. 3
72 *Handelingen van den Volksraad Eerste Zitting* 1918, hlm. 3
73 *Ibid.*, hlm. 124

para pengusaha ibu pertiwi, tetapi juga sebagai wilayah yang memiliki hak untuk diatur demi kepentingannya sendiri "Hindia untuk Hindia".]

Sementara itu, Cokroaminoto yang mewakili Sarekat Islam, di awal pandangan umumnya mengungkapkan:

> "*Mijnheer de Voorzitter! Ik zal mijn rede zeer kort maken met het oog op den beperkten tijd en vooral wegens mijn gebrekkige kennis van de Nederlandsche taal. In deze taal kan ik niet alles uitdrukken, wat ik wel in mijn eigen taal of in het Maleisch heel goed kan doen. Daarom zal ik heel kort zijn.*"[74]

> [Tuan Ketua! Saya akan membuat pidato saya sangat singkat, mengingat waktu yang terbatas dan terutama karena pengetahuan bahasa Belanda yang tidak memadai. Dalam bahasa ini, saya tidak dapat mengungkapkan semuanya, yang dapat saya lakukan dengan sangat baik adalah dalam bahasa saya sendiri, atau dalam bahasa Melayu. Itu sebabnya saya akan berpidato sangat singkat.]

Saya akan membuat pidato saya sangat singkat, mengingat waktu yang terbatas dan terutama karena pengetahuan bahasa Belanda yang tidak memadai.

Setelah menyampaikan niatnya untuk berpidato dengan singkat karena pengetahuan bahasa Belanda yang terbatas, Cokroaminoto melanjutkan pidatonya:

> "*Mijnheer de Voorzitter! In de rede uitgesproken bij de installatie van den Volksraad heeft Zijne Excellentie de Gouverneur-Generaal er op gewezen, dat de leden van dezen Raad, die tot de inheemsche bevolking dezer gewesten behooren, de nooden en behoeften der bevolking het best zullen kennen en daarop de aandacht vestigen. Ons, Inlandsche leden, heeft Hij op onzen plicht gewezen de belangen onzer landgenooten voor te staan. Het is daarvoor mijne heeren, dat ik Uw aandacht kom vragen. Als*

74 *Verslag der Handelingen van den Volksraad. De eerste gewone Zitting in het jaar* 1918, *5de vergadering* 19 Juni 1918, hlm. 148

leider van de "Sarekat Islam" vrijwel van af het tot stand komen dier vereeniging, meen ik in alle bescheidenheid te mogen zeggen, inderdaad op de hoogte te zijn van die nooden en behoeften."[75]

[Tuan Ketua! Dalam pidato pelantikan anggota Volksraad, Yang Mulia Gubernur Jenderal telah menunjukkan bahwa para anggota Dewan yang merupakan penduduk asli negeri ini, akan sangat mengetahui keperluan dan kebutuhan penduduknya dan kemudian menarik perhatian. Kami, para anggota Bumiputra, telah menunjukkan tugas kami untuk mewakili kepentingan saudara-saudara setanah air kami. Oleh karena itu, Tuan, saya ingin meminta perhatian. Sebagai pemimpin "Sarekat Islam" yang mengetahui perhimpunan tersebut dari awal, saya pikir saya bisa mengatakan dengan segala kesopanan, tentunya harus menyadari keperluan dan kebutuhan itu.]

Pernyataan H.O.S. Cokroaminoto di awal pandangan umum menunjukkan peran penting dari para anggota Bumiputra dalam Volksraad

Pernyataan H.O.S. Cokroaminoto di awal pandangan umum menunjukkan peran penting dari para anggota Bumiputra dalam Volksraad, seperti yang disampaikan dalam pidato Gubernur Jenderal bahwa ada di antara para anggota Volksraad yang merupakan penduduk asli negeri (Hindia).

Dalam hal ini, Dr. Rajiman juga berpendapat tentang pentingnya pembentukan Volksraad di Hindia-Belanda. Dr. Rajiman di awal pandangan umumnya menyatakan:

"*Mijnheer de Voorzitter! Ik stel hier voorop dat mijne rede hier gesproken wordt in den Volksraad en daar met de instelling van dezen raad ook beoogd wordt om de denkbeelden, opvattingen en gevoelens van de Inlandsche bevolking tot hun recht te doen komen zal ik dus ook beginnen met een critiek op den huidigen toestand van Indië. Een critiek, ik bedoel een gezonde, mijnheer de Voorzitter, verdraagt iedere*

75 *Ibid.*

moderne regeering, die er eenigszins naar streeft op democratische basis te werken. Immers daardoor krijgt de regeering een maatstaf van de gevoelens der verschillende groepeeringen der bevolking en daaruit zal de regeering een distillaat moeten maken voor het richtsnoer van haren bestuursarbeid. De instelling van den Volksraad is het beste bewijs, dat de Regeering ook dien kant uitwil en juist daarom is een gezonde critiek onmisbaar."[76]

[Tuan Ketua! Saya sampaikan bahwa pidato saya di sini, dituturkan di Volksraad, dan dengan lembaga dewan ini juga maksudnya adalah untuk menyalurkan gagasan, pendapat, dan perasaan orang pribumi yang menjadi hak mereka, saya juga akan mulai dengan kritik atas keadaan saat ini di Hindia. Sebuah kritik, maksud saya yang sehat, Tuan Ketua, menanggung setiap pemerintahan modern yang berjuang untuk bekerja berdasarkan demokrasi. Bagaimanapun, hal ini memberi pemerintah suatu ukuran perasaan berbagai kelompok penduduk, dan dari sini pemerintah harus membuat saringan untuk pedoman pekerjaan administratifnya. Lembaga Volksraad adalah bukti terbaik bahwa Pemerintah juga ingin menuju ke arah itu dan itulah mengapa kritik yang sehat sangat diperlukan.]

Lembaga Volksraad adalah bukti terbaik bahwa Pemerintah juga ingin menuju ke arah itu dan itulah mengapa kritik yang sehat sangat diperlukan.

76 *Ibid.*, hlm. 153

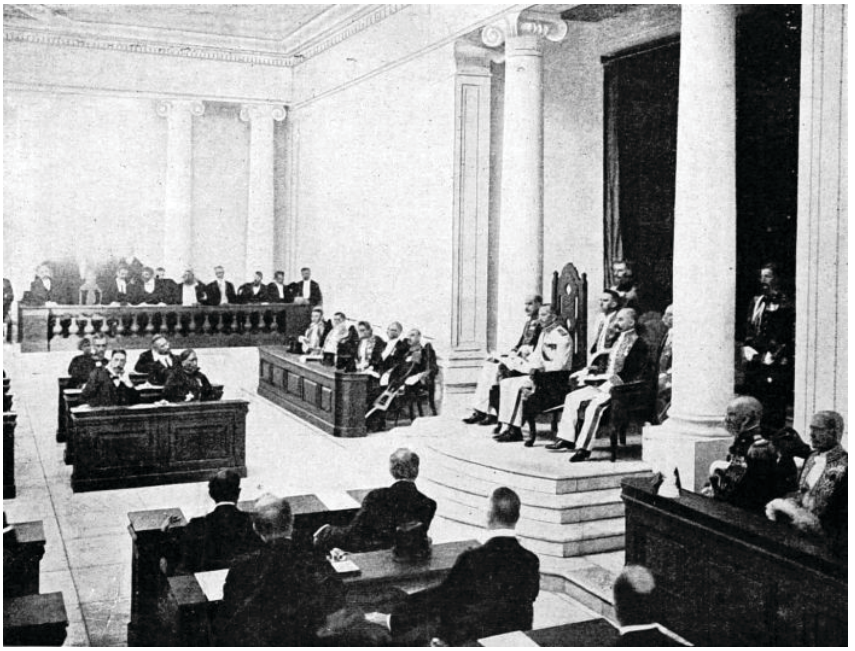

Pembukaan Sidang Volksraad oleh Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum pada 18 Mei 1918
(Koleksi Tropen Museum Amsterdam)

Berkat Van Limburg Stirum, maka pada periode Volksraad yang pertama (1918-1921) bermunculan sejumlah pemimpin politik yang progresif, seperti tokoh sosialis Ch. G. Cramer (*Sociaal Democratische Arbeiders Partij*/SDAP), Teeuwen dan Cipto Mangunkusumo (*Nationaal Indische Partij*), H.O.S. Cokroaminoto dan Abdul Muis (Sarekat Islam), serta beberapa orang anggota Budi Utomo. Berbeda dari antuasisme yang ditunjukkan para pemimpin organisasi pribumi, masyarakat Eropa tidak begitu memedulikan berdirinya Volksraad. Hal ini diperlihatkan dari situasi jalan-jalan di Batavia pada 18 Mei 1918, yaitu pada hari pembukaan dewan itu. Hanya ada satu bendera yang berkibar di sepanjang rute yang ditempuh oleh wali negeri tersebut. Tampaknya, publik masih beristirahat sesudah mengikuti pesta besar di Kebun Tanaman dan Binatang (*Planten-en Dierentuin*) dan menghindari Taman Hertogspark, lokasi keberadaan gedung Volksraad.[77]

Berkat Van Limburg Stirum, maka pada periode Volksraad yang pertama (1918-1921) bermunculan sejumlah pemimpin politik yang progresif

Dilihat dari keanggotaannya, Volksraad bukan dewan rakyat yang sebenarnya. Dari 39 anggotanya, dua puluh orang, termasuk ketua, berasal dari kelompok masyarakat Eropa, lalu kemudian diikuti oleh lima belas kelompok penduduk Bumiputra, dan tiga orang yang

77 *Ibid.*, hlm. 179 (Dikutip dari *Verslag van de Commissie* 1941, hlm. 778)

tergolong sebagai *Vreemde Oosterlingen* (Timur Asing). Setengahnya, dipilih oleh dewan-dewan lokal.[78]

Dalam sidang-sidang pertama, tribun untuk publik sering kosong. Suasana persidangan tampak hangat dan seru setelah banyak lontaran kritik dari para anggota Bumiputra, sehingga kemudian barulah membangunkan perhatian para wakil golongan Eropa. Kebanyakan dari mereka bereaksi atau mengejek orang-orang Bumiputra yang vokal.[79] Kaum komunis dan mereka yang berasal dari *Indische Sociaal Democratische Vereeniging* (ISDV), serta berbagai pemimpin Sarekat Islam yang berorientasi kiri, sudah sejak pembentukan dewan itu menentangnya. Dewan itu hanya sebuah "permainan boneka", sebuah "komedi omong". Itulah dua nama ejekan yang sering diberikan kepada Volksraad oleh mereka. Jumlah kaum nasionalis yang meragukan manfaat dewan itu cepat meningkat pada awal dekade 1920-an.[80]

Meskipun berada di tengah-tengah kritik dari kelompok kiri dan menghadapi berbagai persoalan lainnya, Volksraad tetap bekerja secara efektif dan memiliki berbagai *afdeling* (bagian).

Pada bulan-bulan pertama kegiatan Volksraad, mereka menghadapi persoalan kontroversial yang mengancam keutuhan lembaga tersebut. Persoalan yang mereka hadapi adalah tentang bahasa resmi yang digunakan di dalam Volksraad. Dalam konteks itu, pada 25 Mei 1918, yaitu pada sidang hari kedua, para wakil Budi Utomo bersama dengan anggota Volksraad lainnya mengajukan mosi, antara lain menuntut supaya bahasa Melayu tidak dikesampingkan. Berbeda dengan usul Jayadiningrat, Van Hinloopen Labberton mengajukan usul yang sedikit berbeda. Labberton tidak secara khusus menyebutkan bahasa Melayu, melainkan sekedar menganjurkan untuk menggunakan juga "salah satu bahasa pribumi". Laporan mosi tersebut ditandatangani oleh Van Hinloopen Labberton, Cipto Mangunkusumo, dan Whitlau.[82]

Pada 28 Mei 1918, Jayadiningrat dan Van Hinloopen Labberton menyampaikan sebuah mosi supaya baik bahasa Melayu dan Belanda ditetapkan sebagai bahasa resmi Volksraad. Jayadiningrat, dalam rapat Volksraad 1918, mengusulkan penggunaan bahasa Melayu di

78 *Ibid.*
79 Van Miert, *Op.Cit.*, hlm. 179
80 *Ibid.*, hlm. 180
81 *Handelingen Volksraad, Eerste Gewone Zitting* 1918, hlm. 6
82 *Zitting Volksraad* 1918 – 2-5, *Gedrukt stuk No.* 2

dalam Volksraad dengan argumen sebagai berikut: "*Door verschillende sprekers is reeds betoogd hoe ongewenscht het is verschillende talen in te voeren en daarom ga ik er mede accoord om een taal te noemen, n.l., het Maleisch.*" [Telah dikemukakan oleh berbagai pembicara betapa tidak diinginkannya memperkenalkan bahasa yang berbeda dan oleh karena itu, saya setuju untuk menyebutkan suatu bahasa, yaitu bahasa Melayu]. [83]

Selanjutnya, terkait dengan penggunaan bahasa dalam perdebatan di Volksraad: "*Bij de beraadslagingen mag zoowel het Nederlandsch als het Maleisch gebezigd worden.*" [Selama pembahasan, baik bahasa Belanda maupun Melayu dapat digunakan].[84] Alasan di balik mosi Jayadiningrat dan Van Hinloopen Labberton adalah kepraktisan dalam menyampaikan pernyataan mereka di muka dewan. Jika para wakil pribumi mendapat kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapat mereka di depan Volksraad, maka mereka harus diizinkan untuk membahas persoalannya dengan bebas menggunakan bahasa ibu mereka sendiri. Namun, hal ini mendapatkan tentangan dari pihak Belanda. Bahkan J.E. Stokvis, seorang wakil yang merupakan tokoh sosialis Belanda dan selalu mendukung perjuangan pribumi, menyatakan bahwa hal tersebut pasti akan menimbulkan kekacauan komunikasi luar biasa.[85]

Selama sidang pertama Volksraad, para wakil Budi Utomo lebih banyak membahas masalah pendidikan.

Selama sidang pertama Volksraad, para wakil Budi Utomo lebih banyak membahas masalah pendidikan. Secara khusus, Rajiman Wedyodiningrat menegaskan arti politik dalam pendidikan bagi rakyat pribumi. Ia menyatakan rasa kecewanya karena pembangunan masyarakat pribumi masih jauh dari kata memuaskan. Sementara itu, pemerintah tidak melangkah dengan cepat dalam mengimbangi keinginan untuk maju di pihak penduduk pribumi yang semakin berkembang dengan pesat.[86]

Menurut Rajiman, dibentuknya Volksraad merupakan suatu hasil positif dari hasrat untuk maju. Jika penduduk pribumi tidak diizinkan untuk berkembang, yaitu jika politik Belanda yang pada tahun 1816 bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan mengorbankan penduduk Hindia-Belanda masih terus diterapkan, maka hasilnya mungkin akan menjadi sangat berbeda, yaitu "rakyat yang tidak memiliki kepribadian". Lalu, Rajiman memperingatkan pula bahwa

83 *Handelingen Volksraad 1918 Derde vergadering*, hlm. 18
84 *Handelingen Volksraad zitting 2-1918*
85 Handelingen 1918-1919, Tahun 1, hlm 17.
86 Handelingen 1918-1919, Tahun 1, hlm 153-155.

mereka "hanya akan jatuh ke tangan lain", bahkan seandainya jika pada akhirnya Belanda akan memerdekakan mereka.[87]

Berkaitan dengan ungkapan "kepribadian" tersebut, Radjiman menyampaikan pentingnya pendidikan untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan masyarakat. Dalam pidatonya di depan Volksraad pada 27 Juni 1918, ia menekankan betapa pentingnya pengajaran sejarah pribumi bagi penduduk Hindia-Belanda supaya mereka mengerti arti penting demokrasi. Rajiman mengatakan:

Berkaitan dengan ungkapan "kepribadian" tersebut, Radjiman menyampaikan pentingnya pendidikan untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan masyarakat.

> "*Ik heb het oog op het ontbreken van de Indische geschiedenis op het leerprogramma van de Indische scholen, speciaal de Inlandsche scholen. Daar waar de Regeering vol monding bekend heeft, dat het onderwijs dikwijts éénzijdig intellectueel is, daar zou men natuurlijk verwachten, dat zij andere maatregelen zou nemen. Deze bekentenis is zeer toe te juichen, want een eenzijding intellectueel systeem geeft dikwijls resultaten, die niet-intellectueel vormend zijn, immers de ontplooiing van het intellect staat in verband met het karakter van het individu, of het volk. Indien het intellectueel onderwijssysteem niet aanpast aan het karakter, zal dat systeem eer remmend dat inteltectueel ontwikkelend zijn. [...] De geschiedenis is de ervaring van een volk in de ruimste beteekenis van het woord, in al zijn kennen, en kunnen, doch ook in zijn falen [...] De geschiedenis te kennen beteekent voor den Inlander zich zelve kennen, en is dit niet bepaald nood zakelijk voor het herwinnen van ons zelfvertrouwen, voor het oordeelen van wat goed en slecht is, voor onze naaste toekomst? De toekomst is immers afhankelijk van het heden, terwijl het heden opgebouwd is uit het verleden.*"[88]
>
> [Saya melihat tidak ada mata pelajaran sejarah pada kurikulum sekolah-sekolah di Hindia, terutama di sekolah pribumi. Oleh karena

87 Handelingen 1918-1919, Tahun 1, hlm 157.
88 Handelingen 1918-1919, Tahun 1, hlm 472.

pemerintah dengan terus terang mengakui bahwa kadang-kadang pendidikan terlalu memberat ke akal, maka wajar jika orang berharap agar diambil langkah-langkah tertentu lainnya. Pengakuan ini sangat menggembirakan oleh karena pendidikan yang terlalu intelektualistis dapat menimbulkan akibat luas yang bertentangan dengan intelegensi. [...] Sejarah ialah pengalaman manusia dalam arti yang seluas-luasnya, dengan segala pengetahuan, kemampuan, dan kesalahannya [...] Bagi rakyat pribumi, mengetahui sejarah adalah mengetahui dirinya sendiri. Maka, seharusnyalah sejarah dihubungkan untuk mengembalikan kepercayaan diri di dalam menentukan mana yang baik dan yang buruk demi hari depan kita. Hari depan bergantung pada hari ini, sedangkan hari ini adalah hasil dari hari yang lalu.]

Meskipun beberapa organisasi pergerakan di Hindia telah memiliki wakil di Volksraad, tetapi susunan keanggotaan pada 1918 dan sifat Volksraad hanya berfungsi sebagai badan penasihat. Hal tersebut menimbulkan reaksi di kalangan sebagian penduduk di Hindia-Belanda karena Volksraad tidak memperlihatkan suatu perwakilan dari seluruh penduduk di Hindia-Belanda. Satu pernyataan muncul dari Mohamad Syah yang mewakili penduduk Borneo. Pernyataan tersebut dicatat dalam nota yang ditujukan kepada Volksraad pada bulan Juli 1918. Isi pernyataan tersebut sebagai berikut:

Meskipun beberapa organisasi pergerakan di Hindia telah memiliki wakil di Volksraad, tetapi susunan keanggotaan pada 1918 dan sifat Volksraad hanya berfungsi sebagai badan penasihat.

1e. Volksraad van Nederlandsch-Indie itoe artinja apa boekan soeara raijat di Hindia Belanda?

2e. Dari bangsa-bangsa anak negeri di Hindia Belanda ini, berapa jang terbilang raijat Hindia Belanda golongan anak negeri?

3e. Apa tjoema bangsa Djawa, Melajoe, Menado dan Ambon sadjakah bangsa anak negeri di Hindia Belanda ini?

4e. Apa bangsa Borneo, Madoera, Boegis, dan I.I itoe tidak terpandang bangsa anak negeri Hindia Belanda?

5e. Kalau masoek djoega kami Borneo raijat Hindia Belanda apa sebab tjoema dari bangsa Djawa, Melajoe, Menado, dan Ambon sadja dipilih dari lid Volksraad?

6e. Apa kami anak negeri di Borneo dipandang anak tiri, dan Djawa, Melajoe, Menado, dan Ambon anak kandoeng?

7e. Apa bangsa Menado dan Ambon itoe lebih besar rekenan djiwanja dari kami anak negeri di Borneo?

8e. Apa kami anak negeri di Borneo tidak ada hak jang boleh dipilih djadi lid Volksraad itoe?

9e. Apa kami anak negeri Borneo tidak mengeloearkan hasilkan goena kas government Hindia Belanda?

10e. Apa lantaran pandai meminta atau memboedjoekkah kepada Reegering baroe mendjadi lid Volksraad?

11e. Lid Volksraad dari pada bangsa anak negeri yang terpilih sekarang apa dia bisa mengetahoei sedjelas-djelasnya malang melintangnja kami anak negeri Borneo ini?

Oo saudaraku bangsawan pikiran, kami saudaramoe anak negeri Borneo sengadja kebelakang boeka soeara, karena kami melihat bagaimana taktieknja pilihan Volksraad itoe, apa dengan djalan adil atau bagaimana, nah sekarang saudaramoe minta djawab segala pertanjaan tersebut.

> *Soeara kami anak negeri Borneo ini sengadja kami toempangkan disoerat kabar doeloe, dan kalau sadja pilihan lid Volksraad tetap tidak adil begini, maka nanti permoelaan tahoen 1919 akan kami madjoekan soerat request kepada jang dipertoean G.G. Hindia Belanda dan satoenja kepada jang moelia Baginda Ratoe di Negeri Belanda.*[89]

Pernyataan Mohamad Syah memperlihatkan bahwa rakyat dari luar Jawa, khususnya Borneo, merasa belum terwakili dan diperlakukan secara tidak adil, meskipun sudah ada Volksraad yang dikatakan sebagai suatu dewan perwakilan rakyat.

Sidang pertama Volksraad dimanfaatkan oleh para anggota pribumi untuk mengajukan daftar panjang keinginan dan catatan mengenai kebijakan pemerintah. Hampir semua mengemukakan kritik terhadap cara pembentukan dewan dan kurangnya kewenangan dewan tersebut. Dalam pemandangan umum mengenai anggaran, banyak anggota mengedepankan tiadanya kepercayaan masyarakat pribumi yang diduga ada terhadap pemerintah, sebagai tema terpenting.[90]

Kritik dan celaan tetap disampaikan secara moderat dengan nada yang tenang. Ketidakpuasan juga disampaikan secara teratur, serta cukup banyak pula yang disampaikan oleh wakil-wakil Budi Utomo. Sebagai contoh, Atmodirono pada sidang tanggal 20 Juni 1918 menyatakan bahwa:

> "*De stemming van het gros van de bevolking tegenover het Inlandsch bestuur is, zoo niet beter, dan toch niet slechter dan een 25 jaren geleden.* [...] *In het algemeen kunnen we tevreden zijn over het Nederlandsche bestuur; maar er is nog veel te doen, op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, afwatering en bevloeiing van terreinen. verkeerswegen boschwezen, landsverdediging, enz.*"[91]

Pernyataan Mohamad Syah memperlihatkan bahwa rakyat dari luar Jawa, khususnya Borneo, merasa belum terwakili dan diperlakukan secara tidak adil, ...

89 Wardiningsih Soerjohardjo, 2011, *Radicale Concentratie versus Volksraad (Dewan Rakyat): Aspirasi Bangsa Indonesia Menentang "Dewan Rayap"* (Jakarta: Abacus), hlm. 46-47; Dikutip dari Mohamad Sjah, "Pilihan dan Pengangkatan leden Volksraad tidak adil", *Neratja*, Th. II, No. 123, 1 Juli 1918, hlm. 2
90 Van Miert, *Op.Cit.*, hlm. 189
91 *Zitting Volksraad 1918*, hlm. 195

[Keadaan penduduk pribumi memang tidak lebih baik, tapi pun tidak lebih buruk dari dua puluh lima tahun yang lalu. [...] Secara umum, kita boleh merasa puas dengan Pemerintahan Belanda; tetapi masih banyak yang harus dilakukan, di bidang pendidikan, perawatan kesehatan, drainase, dan irigasi situs. Jalur lalu lintas kehutanan, pertahanan, dan sebagainya.]

Meskipun muncul kontroversi selama persidangan, Gubernur Jenderal menyampaikan kepada Menteri Urusan Koloni bahwa ia merasa puas dan yakin untuk menegaskan sudah saatnya Volksraad harus dibentuk.

Sidang pertama Volksraad ditutup pada 3 Juli 1918. Dalam kesempatan itu, Abdul Muis mengemukakan pendapatnya:

"*Mijnheer de Voorzitter, zou ik nog even een enkel woord mogen zeggen? Ik zou op den voorgrond willen stellen, dat ik niet veel voel voor enkele stellingen welke door de I.S.D.V. worden verkondigd, maar in het algemeen protesteer ik tegen elke bemoeilijking van openbare vergaderingen.*"[92]

[Tuan Ketua, bisakah saya mengatakan satu kata? Saya ingin menunjukkan bahwa saya tidak merasa terganggu untuk beberapa pernyataan yang dibuat oleh I.S.D.V., tetapi secara umum saya protes terhadap setiap campur tangan dari pertemuan publik.]

Meskipun muncul kontroversi selama persidangan, Gubernur Jenderal menyampaikan kepada Menteri Urusan Koloni bahwa ia merasa puas dan yakin untuk menegaskan sudah saatnya Volksraad harus dibentuk. Menurut Gubernur Jenderal, rakyat Bumiputra sudah cukup matang untuk sebuah badan parlemen.[93]

Sikap puas Gubernur Jenderal tidak sama dengan apa yang dirasakan oleh Abdul Rivai yang menyampaikan kritiknya pada bulan Juni 1918. Kritik tersebut didasari oleh pendapat di kalangan Eropa dan Bumiputra mengenai Volksraad, baik secara lisan maupun tulisan. Abdul Rivai mengemukakan:

---

92 *Handelingen Volksraad 1918-Eerste Zitting, 16de vergadering*, 3 Juli 1918, hlm. 619
93 Nagazumi, *Op.Cit.*, hlm. 240

"Men sprak van een surrogaat van een volksvertegenwoordiging, men noemde dit college een embryo van een parlement, waar men niets van verwachtte en men sprak zelfs van een komedie vertooning, enz. Enz...

Zeker is het, dat deze Volksraad nog geen Volksvertegenwoordiging is, zooals men dit instituut 'in West Europa vindt, daar zijn bevoegdheid beperkt is; het heeft immers slechts een adviseerende stem. Bij de bespreking van dezen Raad in de Tweede Kamer zeide Mr. Mendels o.m: "Wat wij hier bieden is bitter, bitter weinig. Wat wij hier bieden, heeft met een recht van medezeggenschap van de Inlandsche bevolking om mede te beslissen over eigen belang niets te maken"."[94]

[Ada jang menjatakan bahwa Volksraad sekarang ini hanja tiroean Volksvertegenwoordiging, telor atau bidji parlement jang tidak menetas, malah ada djoega menyeboet satoe komedi enz.

Soenggoeh Volksraad sekarang ini boekan Volksvertegenwoordiging [Perwakilan Rakyat] di West Europa [Eropa Barat], karena kekoeasaannja hanja memberi advise sadja. Dalam membitjarakan Volksraad ini dalam Tweede Kamer [Majelis Rendah] maka Mr. Mendels berkata: "apa jang kita berikan disini bagi Hindia, hanja sedikit sekali, soenggoeh amat sedikit. Boekan sekali-kali dapat diseboet satoe hak ra'iat oentoek dapat toeroet membitjarakan dan memoetoeskan bakal nasib dirinja dan keperloeannja."][95]

Soenggoeh Volksraad sekarang ini boekan Volksvertegen-woordiging [Perwakilan Rakyat] di West Europa [Eropa Barat], karena kekoeasaannja hanja memberi advise sadja.

Rivai kemudian melanjutkan:

94 *Handelingen van den Volksraad* 1918, *Eerste Zittingsjaar* 1918, hlm. 136
95 Terjemahan ini diambil dari Dr. Abdoel Rivai, "Wakil Regeering dan Wakil Ra'iat dalam Volksraad", *Neratja*, Th. II, No. 149, 8 Agustus 1918, hlm. 1

> *"Een college, dat de vertegenwoordiging van het volk wil zijn, maar geen wetgevende bevoegdheid, geen recht van enquête, en geen recht van interpellatie heeft, kan geen áanspraak maken op den naam van een volksvertegenwoordiging."*[96]

> [*Seboeah college, jang akan djadi Volksvertegenwoordiging ra'iat tetapi tidak punja hak membuat wet, hak enquete, dan hak interpelatie, tidak haroes disebut Volksvertegenwoordiging.*][97]

Kritikan Abdul Rivai terkait wewenang Volksraad memang beralasan. Volksraad memang betul telah dibentuk pada tahun 1916 sebagai realisasi keinginan untuk mengakomodasi aspirasi organisasi pribumi dalam ikut menentukan dalam urusan pemerintahan, namun kewenangannya sangat terbatas. Sampai 1927, Volksraad hanya memiliki tugas memberikan nasihat, bukan ikut membentuk undang-undang, juga tidak memiliki hak inisiatif. Pemerintah dapat meminta nasihat kepada dewan hanya jika pemerintah membutuhkan, walaupun dalam beberapa kasus nasihat tersebut adalah wajib, misalnya dalam menyusun anggaran belanja Hindia-Belanda, juga dalam menyusun ordonansi umum tertentu, seperti peraturan umum bagi penduduk Hindia-Belanda untuk melakukan tugas militer, atau untuk ordonansi tingkat tinggi lembaga-lembaga di daerah dan ordonansi pemilihan untuk Volksraad.[98]

Volksraad memang betul telah dibentuk pada tahun 1916 sebagai realisasi keinginan untuk mengakomodasi aspirasi organisasi pribumi dalam ikut menentukan dalam urusan pemerintahan, namun kewenangannya sangat terbatas.

Setiap tahun, Volksraad melakukan dua kali sidang, tetapi dalam hal khusus, dewan dapat mengadakan sidang tambahan. Semua laporan persidangan dimasukkan ke *Handelingen van den Volksraad*. Cara kerja dewan berangkat dari cara kerja yang sama yang diterapkan di *Tweede Kamer* (Majelis Rendah) di Belanda. Para anggotanya berdebat dalam termin pertama dan kedua, lalu mengajukan mosi dan kemudian amandemen.[99]

Sidang periode kedua Volksraad tahun 1918 dibuka pada 15 Oktober 1918. Dalam sidang pembukaan tersebut, hadir 35 anggota.[100] Mereka antara lain adalah Abdul Muis, Dr. Abdul Rivai, S. Ismail bin

96 *Handelingen van den Volksraad* 1918, *Eerste Zittingsjaar* 1918, hlm. 136
97 Terjemahan ini diambil dari Dr. Abdoel Rivai, "Wakil Regeering dan Wakil Ra'iat dalam Volksraad", *Neratja*, Th. II, No. 149, 8 Agustus 1918, hlm. 1
98 *Verslag van der Commissie* 1941, hlm. 96
99 Van Miert, *Op.Cit.*, hlm. 178
100 *Handelingen van den Volksraad*, *Tweede Gewone Zitting* 1918-1919, hlm. 3

Abdullah Alatas, M. Abukasan Atmodirono, P. Bergmeijer, D. Birnie, K.A.R. Bosscha, L. Coster van Voorhout, Ch. G. Cramer, R.A.A. Jayadiningrat, M. Ng. Dwijosewoyo, Mr. J. Gerritzen, Mr. H. 's Jacob, M.B. van der Jagt, H.H. Kan, H. Ketner, R.M.T.A. Kusumo Yudo Sumiodo, R.M.T.A. Kusumo Utoyo, M.C. Koning, D. van Hinloopen Labberton, F. Laoh, Lim A Pat, Cipto Mangunkusumo, T.E. Mohamad Thayeb, J.C. Pabst, P.A.A.P. Prangwadono, R. Sastrowiyono, Mr. Or. W.M.G. Schumann, J.A. Soselisa, G. Th. Stibe, Z. Stokvis, A.L. Waworuntu, Dr. R. Ng. Rajiman alias Wediodipuro, dan W.A.C. Whitlau.[101]

Dalam sidang, dibahas beberapa hal, antara lain mengenai surat permohonan. Seperti surat permohonan yang dikirim melalui kawat oleh Manullang mengenai *heerendiensten* (kerja wajib) di Tapanuli, surat permohonan dari seorang Arab dengan gelar Mualim mengenai pajak atas perusahaan dan pemasukan lain dari penduduk pribumi di Pantai Barat Sumatra, surat permohonan dari para pedagang di Banda Neira untuk meminta dukungan Volksraad dalam rencana mendirikan stasiun nirkabel di Banda Neira yang akan diajukan kepada Gubernur Jenderal, serta surat permohonan Pedanda Waja Kekeran dari Lombok mengenai keberatannya atas *heerendiensten* di sana. Pedanda Waja Kekeran juga meminta anggota Volksraad untuk datang berkunjung ke sana guna melakukan penyelidikan terkait dengan penanganan pimpinan pemerintahan. Perihal penghapusan *heerendiensten* juga menjadi isi dari surat permohonan Haji Muhamad Saat dan Haji Muhamad Syarif, ketua dan sekretaris Sarekat Islam di Padang. Hal lain yang diajukan oleh Haji Muhamad Saat dan Haji Muhamad Syarif adalah permohonan pembebasan bagi pribumi dari wajib militer.[102]

Pada 14 November 1918, selama persidangan kedua Volksraad, Cipto Mangunkusumo mengkritik pemerintah Hindia Belanda.

Pada 14 November 1918, selama persidangan kedua Volksraad, Cipto Mangunkusumo mengkritik pemerintah Hindia Belanda. Ia menyampaikan kritik tersebut dalam bahasa Belanda yang dengan dibungkus nada humor. Cipto juga "memparodikan" sifat gender dan menggunakan metafora untuk penguasa kolonial. Hal tersebut dilakukannya untuk menggambarkan keberatannya terhadap kebijakan Belanda di Hindia-Belanda.[103]

Sementara itu di Belanda, di penghujung Perang Dunia I, sedang ada gejolak yang muncul dari kaum sosialis yang mendesak pemerintah untuk melakukan perubahan demokratis dan juga

101 *Handelingen De Tweede Gewone Zitting 1918*, hlm. 3
102 *Ibid.*, hlm. 5
103 Frances Gouda, "The Gendered Rhetoric of Colonialism and Anti-Colonialism in Twentieth-Century Indonesia", *Indonesia*, No. 55, April 1993, hlm. 2

mengenai koloni mereka di Hindia-Belanda. Beberapa peristiwa di Eropa juga memberikan pengaruhnya. Pada tanggal 11 November 1918, secara mendadak ditandatangani *wapenstilstand* (gencatan senjata) antara negara-negara sekutu (Inggris, Prancis, dan Rusia) dengan Jerman. Revolusi terjadi di Jerman dan imbasnya terasa sampai ke Belanda. Di Belanda, P.J. Troelstra (1860–1930), politikus yang aktif dalam gerakan buruh sosialis, ingin menggerakkan revolusi. Pada tanggal 13 November 1918, ia berbicara di depan *Tweede Kamer* untuk menyampaikan keinginannya. Troelstra pun berbicara di depan umum dalam suatu rapat dan berupaya mempengaruhi rakyat Belanda untuk melakukan revolusi. Memang revolusi yang dianjurkan Troelstra gagal, tetapi Pemerintah Belanda mengirimkan berita ke Hindia-Belanda terkait situasi yang ada di negara induk.[104]

Pada tanggal 11 November 1918, secara mendadak ditandatangani wapenstilstand (gencatan senjata) antara negara-negara sekutu

Berita tersebut disampaikan dalam rapat Volksraad pada 18 November 1918. Mr. Dr. D. Talma, sebagai Wakil Pemerintah Untuk Urusan Umum (*Regeering Gemachtigde voor Algemeene Zaken*) membacakan *November-verklaring* (Pernyataan November). Pernyataan tersebut merupakan pedoman baru yang akan digunakan oleh pemerintah dalam politiknya. Ia menyatakan bahwa pemerintah akan menghilangkan aturan-aturan yang kurang baik di dalam Volksraad. Hal itu lebih populer dengan nama *November-belofte* (Janji November).[105]

> Isi dari keterangan pemerintah (November-Verklaring) tersebut berbunyi:
>
> "*Pedoman baru yang telah perlu diambil oleh Nederland lantaran kedjadian-kedjadian di dunia jang baru-baru ini, djuga menundjukkan arah manakah jang harus ditudju disini (Hindia). Sebenarnya di sini bukan lagi masalah mengganti arah, melainkan mempertjepat langkah. Oleh karena itu, pemerintah dan Volksraad menghadapi bermatjam-matjam soal jang berhubungan dengan keadaan-keadaan jang baharu dan pemindah an hak kekuasaan dari satu kepada lain, jang semuanja itu belumlah dapat ditindjau dengan amat terang benar. Akan tetapi jang sudah terang benar ialah bahwa kewadjiban kedua-duanja bertambah berat*

104 Gondokoesomo, Op.Cit., hlm. 6
105 Van der Wal, No. 2, hlm. 256

dan perlu kepada persamaan pekerdjaan jang amat rapat. Kemauan jang sungguh untuk jang demikian itu sudah ada pada fihak pemerintah dan dia tahu bahwa difihak Volksraad pun tentu begitu pula... Pemerintah mengundang Volksraad supaja bekerdja bersama-sama dengan rela dan gembira untuk mentjiptakan perobahan-perobahan jang perlu dan untuk mempertinggi kemakmuran masjarakat umumnja dengan selekas-lekas mungkin.[106]

Sebelum ini, pada 16 November 1918, di Volksraad berdiri *Radicale Concentratie* (Konsentrasi Radikal) yang kemudian bernama *Politieke Concentratie*. Mereka mendesak perluasan hak-hak istimewa dalam parlemen. Para anggota dari *Radicale Concentratie* adalah Sarekat Islam, Budi Utomo, Insulinde, dan SDAP *Afdeeling Indië* (cabang Hindia). Tujuan Konsentrasi Radikal adalah sebagai *parlementaire combinatie* (kombinasi parlementer) yang menuntut parlemen sesungguhnya dan memperluas hak rakyat.[107] Anggota *Radicale Concentratie* terdiri atas Cipto Mangunkusumo (Budi Utomo), Ch. G. Cramer (ISDV), dan M.W. Dwijosewoyo (Budi Utomo).

Menanggapi *November-verklaring* tersebut, para anggota Konsentrasi Radikal, yang terdiri dari Cokroaminoto, Sastrowiyono, Dwijosewoyo, Cramer, Rajiman Wediodingrat, Cipto Mangunkusumo, Teeuwen, Abdul Muis, dan Thayeb, mempersiapkan mosi yang ditujukan kepada Volksraad pada 25 November 1918. Mosi tersebut dikenal dengan nama "Mosi Cokroaminoto".

Mosi Cokroaminoto lahir karena ketidakjelasan rencana pedoman Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda. Hal-hal yang tidak jelas, antara lain mengenai batasnya dan bagaimana bentuk perubahan-perubahan yang akan dilaksanakan bersama-sama tersebut. Mosi itu diajukan pada *adres van Antwoord* (jawaban) untuk Volksraad. Mosi Cokroaminoto ini ikut ditandatangani oleh Sastrowiyono, Dwijosewoyo, Cramer, Cipto Mangunkusumo, Rajiman, Teeuwen, Abdul Muis, dan Thayeb, berikut merupakan isi dari mosi tersebut:

"*Volksraad*,

Mosi Cokroaminoto lahir karena ketidakjelasan rencana pedoman Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda.

106 Gondokoesomo, *Op.Cit.*, hlm. 6-7
107 *Ibid.*, hlm. 6

Menimbang, bahwa temponja soedah datang boeat mengadakan perobahan besar dalam atoeran pemerintahan dikepoelauan2 ini;

Menimbang, bahwa selekas-lekasnja haroes diadakan seboeah parlement jang dipilih dari dan oleh ra'jat dengan mempoenjai kekoeasaan memboeat wet jang sempoerna, dan haroes mengadakan seboeah Pemerintah jang memikoel tanggoeangan kehadapan parlement itoe;

Minta kepada Pemerintah, soepaja beroesaha bersama-sama dengan sekalian perhimpoenan politiek, akan mengadakan atoeran baroe jang dikehendaki oleh Volksraad sebelom atau dalam tahoen 1921, djikalau Volksraad sekarang telah meletakkan mandaatnja; dan minta soepaja motie ini dikirim kepada Pemerintah Agoeng dengan djalan kawat."[108]

Pada 2 Desember 1918, pemerintah hanya memberikan tanggapan tanpa dapat memberikan jawaban atas mosi tersebut.

Pada 2 Desember 1918, pemerintah hanya memberikan tanggapan tanpa dapat memberikan jawaban atas mosi tersebut. Pemerintah tidak mau dianggap mendahului pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh sebuah komisi yang dibentuk. Komisi tersebut dipimpin oleh Prof. Carpentier Alting dengan anggota yang juga merupakan anggota Volksraad, seperti 's Jacob, Kan, Utojo, Rajiman, Schuman, Teeuwen, dan Waworuntu. Namun, hal lain dalam mosi tersebut, yaitu tuntutan Cokroaminoto tentang adanya parlemen, tidak dibahas ataupun dijawab.

Pada 3 Desember 1918, muncul "Mosi Achmad Jayadiningrat". Mosi ini lahir karena ketidakpuasan atas jawaban pemerintah terhadap Mosi Cokroaminoto. Penjelasan pemerintah mengenai *November-verklaring* menimbulkan kecurigaan bahwa *November-verklaring* atau *November-belofte* lahir karena situasi kalut internasional dan kekhawatiran situasi tersebut akan terjadi juga di Belanda. Mosi Achmad Jayadiningrat ikut ditandatangani oleh Waworuntu, Kan, Schumann, Van Hinloopen Labberton, dan 's Jacob.

108 H.A.S., "Volksraad: gerakan jang penting", *Neratja*, Th. II, No. 223, 26 November 1918, hlm. 1; *Oetoesan Hindia*, Th. 6, No. Extra, 29 November 1918, hlm. 2

Achmad Jayadiningrat, yang merupakan wakil Ikatan Para Bupati, beserta Labberton, mengajukan mosi untuk menggunakan bahasa Melayu selain bahasa Belanda sebagai bahasa resmi dalam persidangan di Volksraad. Setelah Gubernur Jenderal setuju dan mayoritas hasil pemungutan suara menyetujui Mosi Jayadiningrat, bahasa Melayu pun digunakan dalam sidang Volksraad, selain dari bahasa Belanda.

Pada 17 Desember 1918, anggota *Herzieningscommissie* (Komisi Peninjau) dilantik. Ketua komisi tersebut adalah Prof. Carpentier Alting. Para anggotanya adalah H. Agus Salim, D.M.G. Koch, Kusumo Utoyo, Darwis Datuk Majolelo, H.H. Kan, dan Cramer. Baik Mosi Cokroaminoto dan Jayadiningrat tidak pernah secara langsung dibicarakan dalam Volksraad karena kerap ditunda. Jawaban yang diberikan oleh pemerintah terkait kedua mosi tersebut adalah untuk menunggu laporan dari *Herzieningscommissie*.

Herzieningscommissie mengeluarkan laporan yang berisi tentang rancangan-rancangan perubahan yang dikehendaki. Salah satunya adalah menuju ke arah Hindia-Belanda yang otonom dengan membentuk parlemen yang memiliki hak untuk mengatur urusan dalam negeri dengan nama *Landstaten* sebagai pengganti Volksraad yang hanya dapat memberikan *advies* (saran).

Kelak pada 30 Juni 1920, laporan *Herzieningscommissie* dikirimkan kepada pemerintah. Dalam laporan tersebut, diusulkan perubahan yang berhubungan dengan Volksraad. Isinya adalah hak bersama-sama untuk menetapkan anggaran belanja, hak mengajukan amandemen di dalam membuat undang-undang, hak mempertahankan kepentingan Hindia-Belanda di Belanda dengan cara mengirim utusan ke sana, hak ikut serta dalam pengangkatan anggota *Raad van Indië*, hak mengajukan calon kepada pemerintah untuk diangkat menjadi ketua dari *Rekenkamer* (Dewan Audit), hak interpelasi, dan hak angket.

Seperti yang diuraikan sebelumnya, para anggota Volksraad tidak hanya berasal dari masyarakat Eropa. Berikut daftar nama para anggota Volksraad pada 1918 dari kalangan Bumiputra, Tionghoa, dan Arab:[109]

Herzieningscommissie mengeluarkan laporan yang berisi tentang rancangan-rancangan perubahan yang dikehendaki.

109 *Handelingen der Volksraad, eerste zitting* 1918, *bijlage*, hlm. 5-6

No.	Nama	Pekerjaan	Tempat tinggal	Masa tugas
1.	Abdul Muis	Jurnalis	Batavia	17 Januari 1918–1921
2.	Dr. Abdul Rivai	Dokter	Surabaya	17 Januari 1918–1921
3.	Alatas (S. Ismail bin Abdullah)	Partikelir	Batavia	23 Februari 1918–1921
4.	M. Abukasan Atmodirono	Arsitek *Burgerlijke Openbare Werken*	Semarang	17 Januari 1918–1921
5.	R.A.A. Jayadiningrat	Bupati	Serang	17 Januari 1918–1921
6.	M. Ng. Dwijosewoyo	Guru di Kweekschool (Sekolah Guru)	Yogyakarta	17 Januari 1918–1921
7.	R. Kamil	*Adjunct-Inspecteur Inlandsch Onderwijs*	Yogyakarta	17 Januari 1918–1921
8.	Hok Hoei Kan	Pemilik Lahan	Batavia	23 Februari 1918–1921
9.	R.M.T.A. Kusumo Yudo Sumiodo	Bupati	Ponorogo	17 Januari 1918–1921
10.	R.M.T.A. Kusumo Utoyo	Bupati	Jepara	17 Januari 1918–1921
11.	Frits Laoh	Pegawai KPM	Batavia	23 Februari 1918–1921
12.	Lim A Pat	Mayor Cina Senior	Muntok	23 Februari 1918–1921
13.	Cipto Mangunkusumo	Dokter	Surakarta	23 Februari 1918–1921
14.	T.T. Mohamad Thayeb	Ketua Peureula	Aceh	23 Februari 1918–1921
15.	P.A.A.P. Prangwadono	Mangkunegara	Surakarta	23 Februari 1918–1921
16.	R. Sastrowijono	Asisten penerjemah bahasa Jawa, Wakil Ketua Budi Utomo	Surakarta	17 Januari 1918–1921
17 .	J.A. Soselisa	Kepala Komis *Departement van Gouvernementsbedrijven* (Departemen Perusahaan Pemerintah)	Batavia	23 Februari 1918–1921
18.	R.O.S. Cokroaminoto	Ketua Centrale Sarekat Islam	Surabaya	23 Februari 1918–1921
19 .	A.L. Waworuntu	Mayor Senior	Manado	17 Januari 1918–1921
20.	Dr. R. Ng. Rajiman Wediodipuro	Dokter	Surakarta	17 Januari 1918–1921

Dari daftar nama para anggota Volksraad Bumiputra, Tionghoa, dan Arab di atas, terdapat anggota Volksraad yang berasal dari luar pulau Jawa yaitu T.T. Mohamad Thayeb dari Aceh, J.A. Soselisa dari Ambon, Frits Laoh dari Minahasa, dan A.L. Waworuntu dari Manado. Namun, bukan berarti mereka tinggal di tempat asal mereka. J.A. Soselisa misalnya, berdomisili di Batavia dan bekerja sebagai Kepala Komis di Departemen Perusahaan Pemerintah, sementara Frits Laoh adalah karyawan KPM yang tinggal di Batavia.

Frits Laoh adalah seorang karyawan KPM kelahiran Minahasa tahun 1888. Setelah menyelesaikan *Middelbare Handels Onderwijs* di Batavia, hingga tahun 1908 ia bekerja di *Deutsch-Australische Dampschiffs-Gesselschaft* A.G. di Batavia. Pada tahun 1908, ia bekerja

sebagai kepala karyawan di KPM. Pada 1918, Laoh menjadi anggota Volksraad sebagai delegasi dari *Kieskring* X *Celebes*.[110]

Dalam masa persidangan pertama 1918, para anggota Volksraad mengajukan *voorstellen* (usulan). Tercatat ada 13 usulan yang diajukan oleh para anggota Volksraad. Para anggota Volksraad dari kalangan Bumiputra juga memberikan usulan mereka. Dari 13 usulan yang ada, sembilan usulan diajukan oleh anggota Volksraad dari kalangan Bumiputra. Berikut daftar usulan yang diajukan anggota Volksraad dari kalangan Bumiputra, beserta statusnya dalam masa persidangan pertama pada 1918.[111]

No.	Pengusul	Usulan	Status
1.	Jayadiningrat	Penggunaan bahasa Melayu dalam debat terbuka di Volksraad	Diterima
2.	Ciptomangunkusumo	Pemberian gaji bagi anggota Volksraad dan pemberian cuti di dalam negeri kepada para anggota pejabat secara penuh	Ditarik
3.	Utoyo	Penambahan *Reglement van Orde* atau Peraturan Tata Tertib (Staatsblad 1917 No. 443)	Belum diputuskan sehubungan dengan keputusan komisi yang belum membahasnya
4.	A. Rivai, dkk.	Penjelasan penerapan pasal 3 *Koninklijk Besluit* 3 November 1866 No. 72 (*Indisch Staatsblad* 1867 No. 10) tentang anggota Volksraad yang non-Eropa	Diterima
5.	A. Rivai, dkk.	Penjelasan mengenai dokumen-dokumen arsip kantor pemerintah	Diterima
6.	A. Rivai, dkk.	Persiapan pembentukan yayasan untuk pendirian universitas di Hindia-Belanda	Diterima (usulan tersebut selama debat terbuka dimodifikasi oleh para pengusul)
7.	Abdul Muis	Pembentukan Komisi yang menangani lahan pertanian partikelir di sebelah timur Cimanuk	Belum dibahas
8.	Abdul Muis	Perubahan "peraturan baru" mengenai lahan pertanian partikelir di sebelah barat Cimanuk	Belum dibahas
9.	Thayeb, dkk.	Perubahan kuli ordonansi di *buitengewesten* (daerah di luar Jawa dan Madura)	Belum dibahas

Selain dapat mengajukan usulan, para anggota Volksraad juga dapat mengajukan *amandement* (amandemen). Tercatat pada tahun 1918, ada setidaknya 50 amandemen, sementara di tahun 1919 hanya sekitar 13 amandemen. Berikut daftar amandemen yang diajukan anggota Volksraad dari kalangan bumiputra beserta statusnya pada tahun 1918-1919:[112]

110 "Beknopte biografie van de nieuwe ministers", *Java Bode*, 13 Agustus 1955, hlm. 2
111 *Handelingen van den Volksraad, De Eerste Zitting* 1918, *Bijlage*, hlm. 8; *Handelingen van den Volksraad, De Tweede Gewone Zitting* 1918-1919, *Bijlage*, hlm. 7-8
112 *Ibid.*, hlm. 9-17; *Handelingen van den Volksraad, De Tweede Gewone Zitting* 1918-1919, *Bijlage*, hlm. 9-11

No.	Pengusul	Usulan	Status
1.	Cipto Mangunkusumo, dkk.	Kenaikan anggaran Volksraad hingga 150,000 gulden	Ditarik
2.	F. Laoh, dkk.	Kenaikan gaji pegawai Bumiputra di pengadilan dalam anggaran sebanyak 6,800 gulden	Diterima
3.	Utoyo, dkk.	Kenaikan anggaran biaya perawatan dan transportasi narapidana dan mantan narapidana, biaya perawatan narapidana yang sakit dan pemakaman, biaya listrik penjara, serta sarana air dan barang-barang inventaris sebanyak 10,000 gulden	Diterima
4.	Utoyo, dkk.	Kenaikan anggaran untuk remunerasi dan tunjangan para bupati, patih, kepala distrik, dan kepala desa, serta calon pejabat pemerintahan pribumi, juru tulis, dan pegawai di pemerintahan umum dan distrik sebanyak 1 gulden	Diterima
5.	F. Laoh, dkk.	Kenaikan anggaran perbaikan pemerintahan distrik di Minahasa, Karesidenan Manado sebanyak 34,000 gulden	Diterima
6.	A. Rivai, dkk.	Pembatalan sensus penduduk dan kantor statistik penduduk dengan anggaran sebanyak 40,000 gulden	Ditolak
7.	Cipto Mangunkusumo	Pengajuan anggaran untuk pendidikan guru pribumi perempuan sebanyak 294,650 gulden	Ditarik
8.	Dwijosewoyo, dkk.	Pengajuan aturan baru mengenai remunerasi untuk para guru pribumi yang mengikuti dan tidak mengikuti pendidikan guru sebanyak 1,209,340 gulden	Diterima
9.	A. Rivai, dkk.	Kenaikan anggaran bagi para dokter di *Burgerlijke Geneeskundigen Dienst* sebanyak 1 gulden	Diterima
10.	Jayadiningrat, dkk.	Pengajuan kenaikan anggaran penyebaran pengetahuan pertanian di kalangan penduduk pribumi sebanyak 8,100 gulden	Diterima
11.	Waworuntu, dkk.	Kenaikan anggaran bagi prajurit di bawah perwira sebanyak 652,000 gulden	Ditarik
12.	Rajiman, dkk.	Pembatalan kontribusi dari Susuhunan Surakarta untuk biaya makan para tahanan di wilayahnya sebanyak 27,381 gulden	Ditolak
13.	Waworuntu, dkk.	Status sipil berbagai kelompok pribumi tertentu dan usulan kenaikan tunjangan bagi mereka sebanyak 1 gulden	Ditarik
14.	F. Laoh, dkk.	Perbaikan pemasukan kepala distrik dan desa di beberapa daerah di luar Jawa dan Madura sebesar 1 gulden	Diterima
15.	Atmodirono, dkk.	Kenaikan remunerasi dan tunjangan bagi para kolektor dan wakil kolektor untuk pengumpulan data pendapatan nasional sebesar 87,000 gulden	Ditarik

Dalam tahun persidangan 1918–1919, tercatat ada 22 mosi dengan berbagai persoalan yang diajukan oleh anggota Volksraad. Mosi tersebut dicatat menurut abjad dari A hingga Z dalam bahasa Belanda. Semisal, di bawah abjad A untuk *Algemeen Regeeringsbeleid* (Kebijakan Pemerintah Secara Umum), B untuk *Belastingen* (Pajak), *Bestuur-Inlandsch* (Pemerintahan Bumiputra), D untuk *Decentralisatie* (Desentralisasi), E untuk *Examens-Natuurkundige* (Ujian Ilmu Alam) dan *Examen voor Ambtenaar* (Ujian Untuk Pegawai), F untuk

Fabrieksnijverheid (Industri Pabrik), M untuk *Marine* (Angkatan Laut), O untuk *Onderwijs* (Pendidikan), P untuk *Particuliere landerijen* (Lahan Partikelir), R untuk *Regeeringsverklaring* (Penjelasan Pemerintah), serta V untuk Volksraad dan *Vreemde Oosterlingen* (Orang Timur Asing).[113]

Sepanjang tahun-tahun pertama Volksraad berdiri, kondisi sosial ekonomi masyarakat memburuk. Cadangan makanan menipis, khususnya beras. Keresahan semakin meluas. Hal tersebut ditandai dengan munculnya kerusuhan di berbagai daerah yang terdapat pabrik gula karena aksi para buruhnya maupun aksi massa setempat yang membakar perkebunan tebu. Pada bulan Januari 1919, Volksraad menyelenggarakan sidang istimewa karena masalah kelangkaan pangan. Saat itu, di dalam masyarakat muncul dua pendapat untuk mengatasi kelangkaan pangan. Pendapat pertama menginginkan upaya penciutan lahan perkebunan tebu, yang langsung mendapat dukungan dari penduduk Bumiputra. Sementara, pendapat kedua menentang upaya tersebut dan mendapat dukungan dari masyarakat Eropa, terutama dari kelompok pengusaha gula yang mengancam pemerintah akan menuntut ganti rugi jika lahan perkebunan tebu diciutkan. Meskipun didesak untuk mengambil keputusan, Gubernur Jenderal tidak juga memberikan kepastian.[114]

Demikian pula dengan situasi di dalam Volksraad. Ada kelompok yang mendukung dan tentunya ada pula yang menentang penciutan ladang tebu tersebut.

Demikian pula dengan situasi di dalam Volksraad. Ada kelompok yang mendukung dan tentunya ada pula yang menentang penciutan ladang tebu tersebut. Mereka yang menentang berargumen bahwa menurut perhitungan, penciutan ladang tebu sebesar 25% ternyata hanya mampu menaikkan produksi beras sebanyak 1,5% saja. Belum lagi munculnya masalah lain akibat penciutan, yaitu pengangguran. Dari kalangan partai politik pergerakan, seperti Sarekat Islam dan Budi Utomo, opsi penciutan ladang tebu mendapatkan dukungan besar. Misalnya, Dr. Rajiman berpendapat bahwa penciutan ladang tebu mutlak diperlukan, bahkan jika perlu diciutkan hingga 100%, atau dengan kata lain semua lahan.[115]

Sementara itu, dalam menanggapi perbedaan pendapat mengenai penciutan ladang tebu, para bupati yang juga duduk di Volksraad tidak secara terang-terangan mengemukakan pendapatnya. Jayadiningrat, misalnya, menyimpan pendapatnya dalam hati. Di satu sisi, Jayadiningrat tidak ingin rakyatnya menderita, tapi di sisi lain,

113 *Handelingen van den Volksraad, De Tweede Gewone Zitting* 1918-1919, *Bijlage*, hlm. 12-14
114 Atashendartini Habsjah (ed.), 2008, *Perjalanan Panjang Anak Bumi: Biografi* R.M.A.A. *Koesoemo Oetoyo* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hlm. 122
115 *Ibid.*, hlm. 123

ia tidak ingin berada di posisi yang menentang pemerintah. Kusumo Utoyo juga dengan hati-hati ikut menolak penciutan ladang tebu. Ia mengetahui kehidupan petani di Bandar Sedayu, Ngawi, dan Jepara. Ia tahu keuntungan yang dihasilkan oleh perluasan penanaman padi tidak akan seimbang dengan akibat negatif jika ladang tebu diciutkan.[116]

Para anggota Bumiputra juga mengajukan mosi dengan beragam persoalan, antara lain persoalan pemerintahan Bumiputra oleh Kamil, dkk., desentralisasi oleh A. Muis, dkk., Ujian Ilmu Alam oleh A. Rivai, dkk., Ujian Untuk Pegawai oleh F. Laoh, lahan partikelir oleh A. Muis, dkk., penjelasan pemerintah oleh Cokroaminoto, dkk. dan Jayadiningrat, dkk., Volksraad oleh Cipto Mangunkusumo, dkk., A. Rivai, dkk., Timur Asing oleh Alatas, dkk., dan seterusnya.

Berikut daftar mosi yang diajukan oleh anggota Volksraad dari kalangan Bumiputra beserta statusnya dalam sidang Volksraad di rentang periode 1918–1919:[117]

No.	Pengusul	Isi	Status
1.	Jayadiningrat, dkk.	Penghapusan personil desa	Diterima
2.	A. Muis, dkk.	Peninjauan kembali aturan lahan pertanian partikelir (*Staatsblad 1912* No. 422)	Tidak dipertimbangkan
3.	A. Rivai, dkk.	Promosi perawatan pasien individual	Diterima
4.	A. Rivai, dkk.	Pemberhentian secara hormat para dokter pribumi ikatan dinas pemerintah dengan mengembalikan uang ganti rugi jika mereka memutuskan kontrak	Diterima
5.	A. Muis, Cokroaminoto, Van Hinloopen Labberton, Thayeb, Teeuwen, Sastrowijono, dan Dwijosewoyo	Perluasan hak pilih untuk pribumi	Belum dibahas
6.	Lim A Pat, dkk.	Penghapusan penggunaan opium	Diterima
7.	A. Muis, dkk.	Pengurangan beban pajak	Diterima (dimodifikasi)
8.	Kamil, Cipto Mangunkusumo, Sastrowijono, dan Dwijosewoyo	Penghapusan jabatan bupati karena warisan hubungan darah/keluarga	Belum dibahas dalam sidang terbuka
9.	A. Rivai, dkk.	Penyetaraan Pasal 31 peraturan *Burgerlijke Geneeskundige Dienst* yang berhubungan dengan ujian ilmu alam pertama	Diterima
10.	F. Laoh	Perubahan peraturan ujian kursus pegawai kelas 4 dan 5 bea dan cukai	Diterima
11.	Cokroaminoto, Sastrowijono, Dwijosewoyo, Cramer, Cipto Mangunkusumo, Rajiman, Teeuwen, Muis, dan Thayeb	Reformasi sistem tata negara pemerintah Hindia-Belanda terkait pembentukan parlemen yang memiliki wewenang penuh dan bertanggung jawab kepada pemerintah	Belum dibahas dalam sidang terbuka
12.	Jayadiningrat, Schuman, Waworuntu, Van Hinloopen Labberton, Kan, dan s' Jacobs	Deskripsi reformasi yang diperlukan dalam sistem tata negara pemerintah	Belum dibahas

116 *Ibid.*
117 *Handelingen van den Volksraad, De Tweede Gewone Zitting* 1918-1919, Op.Cit., hlm. 18-19; *Handelingen van den Volksraad, De Tweede Gewone Zitting* 1918-1919, *Bijlag*, hlm. 12-1

13.	Cipto Mangunkusumo, Van Hinloopen Labberton, Sastrowijono, Thayeb, Teeuwen, Cramer, Waworuntu, Rivai, dan Kamil	Pemberian hak angket	Belum dibahas dalam sidang terbuka
14.	Rivai, dkk.	Pemberian cuti kepada anggota Volksraad yang tinggal di Batavia serta para pegawai Volksraad berdasarkan *Staatsblad 1918* No. 194	Ditarik
15.	Alatas, dkk.	Perlakuan yang sama bagi semua orang Timur Asing dalam urusan keimigrasian	Diterima
16.	Jayadiningrat, Cipto Mangunkusumo, Waworuntu, Rivai, Dwijosewoyo, Utoyo, Atmodirono, Rajiman, Prangwadono, dan Mohamad Thayeb	Pemisahan antara gereja dan negara	Belum dibahas dalam sidang terbuka
17.	M. Ng. Dwijosewoyo, Kamil, Schumann, dan Rivai	Perbaikan posisi pengajar Bumiputra	Diterima

Terkait dengan salah satu mosi yang diajukan, yaitu mosi pemisahan antara gereja dan negara, dalam memoarnya, R.A.A. Jayadiningrat menuliskan bahwa ia merasa karirnya di Volksraad akan "habis" di mata para anggota Volksraad dari kalangan Eropa. Apalagi pada kesempatan sebelumnya, pidato yang ia sampaikan seolah-olah bernada anti-Eropa. Hal itu menimbulkan kecurigaan dari beberapa golongan Eropa. Sejak saat itu prasangka buruk terhadap dirinya selalu ada, baik secara lisan maupun tulisan. Kritik mereka tidak hanya ditujukan kepada arah politik, tetapi juga kepada diri Jayadiningrat secara pribadi dan pekerjaannya.[118]

Volksraad juga menerima surat-surat permohonan mengenai berbagai permasalahan masyarakat. Berdasarkan laporan dari Komisi *Verzoekschriften* (Surat-surat Permohonan) dengan anggota Abdul Muis, K.A.R. Bosscha, dan Raden Kamil, serta anggota pengganti R.M.T.A. Kusumo Utoyo dan W.A.C. Whitlau, ada 87 surat dengan berbagai pokok masalah. Catatan mengenai permasalahan dari surat permohonan yang masuk, seperti catatan mosi, disusun berdasarkan urutan abjad dari A hingga Z dalam bahasa Belanda misalnya di bawah abjad A untuk *Artesisch water* (air tanah); B untuk *Ballingschap* (pengasingan), *Belasting* (pajak), dan *Burgemeester* (walikota); C untuk *Chineezen* (orang Tionghoa); D untuk *Duurtoeslag* (biaya tambahan), F untuk *Familiegraven* (pemakaman keluarga); G untuk *Gratie* (grasi), *Gronden* (lahan tanah), dan *Grondhuren* (sewa tanah); H untuk *Heerendiensten* (kerja wajib), *Hondenbelasting* (pajak anjing), dan *Huishuurtoelage* (biaya tambahan sewa rumah); I untuk

118 P.A. Achmad Djajadingrat, 1996, *Memoar Pangeran Aria Achmad Djajadingrat* (Jakarta: PT. Dian Rakyat), hlm. 366

Instituut Pasteur; K untuk Karang Anyar, *Kiesrecht* (hak pilih), *Klacht* (keluhan), dan Kudus; L untuk *Landbouwbedrijf* (tanah pertanian); M untuk *Militie* (milisi); N untuk *Natuurkundig Examen* (Ujian Ilmu Alam); O untuk *Onderwijs* (pendidikan), *Ontslag* (pemecatan), dan *Overwerkgelden* (uang lembur); P untuk *Pandhuizen* (rumah gadai), *Particulaire Landerijen* (lahan partikelir), *Passerloodsen* (gudang pasar), dan *Positieverbetering* (perbaikan positif); R untuk *Regeeringsreglement* (peraturan pemerintah) dan *Reisroute* (rute perjalanan); S untuk *Schadeloosstelling* (kompensasi/ganti rugi), dan Sneevliet; T untuk *Telegrafie* (telegraf); V untuk *Vereeniging en Vergadering* (perhimpunan dan rapat), *Verpleegkosten* (biaya perawatan), *Verzoekschriften* (surat permohonan), *Vezelfabriek* (pabrik serat), dan *Vrije Vrijdag* (libur di hari Jumat); W untuk *Weduwen-en Wezenfonds* (dana para janda dan yatim piatu) dan *Wegaanleg* (pembangunan jalan).[119] Dapat dikatakan masalah yang diajukan sangat beragam, mulai dari pertanian, pajak, perusahaan pemerintah, *heerendiensten* (kerja wajib), imigran, hak pilih, pendidikan, peraturan pemerintah, transportasi, hingga kesehatan.[120]

Meskipun di dalam Volksraad telah ada wakil-wakil dari masyarakat Bumiputra, tetapi suara ketidakpuasan di kalangan mereka masih muncul. Rasa tidak puas tersebut muncul oleh karena fungsi dari Volksraad yang hingga saat itu hanya berperan sebagai lembaga pemberi nasihat bagi Pemerintah Kolonial. Seperti yang diungkapkan dalam surat kabar berbahasa Sunda, *Padjajaran*, edisi 2 Agustus 1919:

> "Mr. Fock adalah salah satu kaum liberal, ia merasa heran bahwa semua yang dimusyawarahkan dan diputuskan ada dalam Volksraad di Hindia Belanda. Menurutnya, ini adalah salah satu jalan untuk orang Hindia Belanda mengurus pemerintahan. Rupanya pujian ini hanyalah kedok belaka karena buktinya sekarang orang Pribumi cukup diberi majelis yang hanya bisa memberi nasihat saja."

Meskipun di dalam Volksraad telah ada wakil-wakil dari masyarakat Bumiputra, tetapi suara ketidakpuasan di kalangan mereka masih muncul.

Padjajaran pun berkomentar bahwa Volksraad masih dianggap tidak penting di Belanda. Ketua Volksraad Mr. Dr. W.M.G. Schumann mengatakan bahwa Hindia-Belanda dianggap oleh Belanda sebagai

119 *Handelingen van den Volksraad, De Tweede Gewone Zitting 1918-1919, Bijlage*, hlm. 15-25
120 *Ibid.*

'anak kecil' yang diberikan mainan baru, yaitu Volksraad supaya diam dan tidak mengoceh. Dengan demikian, seperti yang diungkapkan oleh para wakil di Volksraad, baik dari pihak kiri (Sarekat Islam, Budi Utomo, SDAP, dan Insulinde), pihak kanan (Regenten Bond dan NIVB) maupun netral (Wilde Partij), mereka merasa tidak senang karena semua hasil pemikiran dan pertimbangan yang diperoleh secara susah-payah disampaikan di Volksraad, di negeri Belanda oleh Tweede Kamer dan para menteri dianggap sebagai "omongan anak kecil" belaka. Memang sejak dahulu, Hindia-Belanda telah meminta kepada pemerintah untuk dibentuk sebuah majelis yang berfungsi untuk mengurus dan memerintah negerinya sendiri (*Padjajaran*, 2 Agustus 1919).

Sidang pertama pada 1920 dibuka oleh Gubernur Jenderal J.P. van Limburg Stirum pada 18 Mei 1920. Sidang tersebut dihadiri oleh Ketua Volksraad, Schumann, beserta dengan 21 anggota. Mereka adalah Abdul Muis, S. Ismail bin Abdullah Alatas, P. Bergmeijer, Ch. G. Cramer, R.A.A.A. Jayadiningrat, M.W. Dwijosewoyo, Mr. A.A. Galestin, Mr. H. s' Jacobs, M.B. van der Jagt, R. Kamil, H.H. Kan, F. Laoh, Lim A Pat, J.V.L. Oppermann, Dr. J. Schmutzer, J.A. Soselisa, J.M.I. Suys, A.M. Valkenburg, M. Vierhout, Th. F. Vreede, dan A.L. Waworuntu.[121]

Anggota Volksraad pada 1920 dari kalangan Bumiputra, Tionghoa, dan Arab pada saat itu adalah sebagai berikut:[122]

No.	Nama	Pekerjaan	Tempat tinggal	Mulai bertugas
1.	Abdul Muis	Jurnalis	Batavia	17 Januari 1918
2.	Alatas (S. Ismail bin Abdullah)	Pedagang	Batavia	23 Februari 1918
3.	R.A.A.A. Jayadiningrat	Bupati	Serang	17 Januari 1918
4.	M.W. Dwijosewoyo	Sekretaris partikelir Sultan Yogyakarta	Yogyakarta	23 Februari 1918
5.	R. Kamil	*Adjunct-Inspecteur Inlandsch Onderwijs*	Yogyakarta	17 Januari 1918
6.	Hok Hoei Kan	Pemilik lahan	Batavia	23 Februari 1918
7.	P.T.A. Kusumo Yudo Sumiodo	Bupati	Ponorogo	17 Januari 1918
8.	R.M.T.A. Kusumo Utoyo	Bupati	Jepara	17 Januari 1918
9.	Khauw Kim An	Mayor Cina senior	Batavia	1 Februari 1921
10.	Frits Laoh	Pegawai KPM	Batavia	23 Februari 1918
11.	Lanjumin, gelar Sutan Tumenggung	Pejabat sementara *Inlandsche Zaken* dengan pangkat wedana	Batavia	19 Januari 1921
12.	Lim A Pat	Mayor Cina senior	Muntok	23 Februari 1918
13.	Cipto Mangunkusumo	Dokter	Bandung	23 Februari 1918

121 *Handelingen van den Volksraad, De Eerste Gewone Zitting* 1920, hlm. 3
122 *Ibid.*, hlm. 2-4

14.	Ch. Ponto	Penguasa Kandhar, Teruna (Kepulauan Sangi)	-	Belum disumpah
15.	P.A.A.P. Prangwadono	Kepala Istana Mangkunegara	Surakarta	23 Februari 1918
16.	R. Sastrowijono	Penerjemah bahasa Jawa, Wakil Ketua Budi Utomo	Yogyakarta	17 Januari 1918
17.	R.P. De Queljo	Bupati Porto	Saparua	15 Mei 1920
18.	R.T. Suyono	Bupati	Pasuruan	5 Agustus 1920
19.	J.A. Soselisa	Pejabat Departemen Perusahaan Pemerintah	Batavia	23 Februari 1918
20.	R.O.S. Cokroaminoto	Ketua Centrale Sarekat Islam	Surabaya	23 Februari 1918
21.	A.L. Waworuntu	Mayor senior	Manado	17 Januari 1918
22.	Dr. R. Ng Rajiman Wediodipuro	Dokter	Surakarta	17 Januari 1918

Ada beberapa catatan terkait keanggotaan Volksraad pada periode di atas, antara lain T.T. Mohammad Thayeb yang mengajukan permohonan pengunduran diri sejak 20 Mei 1920. Disusul oleh R. Sastrowijono di tanggal 15 Oktober 1920 dan Alatas S. Ismail bin Abdullah di tanggal 23 Oktober 1920. Berbeda lagi dengan Dr. Abdul Rivai yang sejak 3 Mei 1920 telah tidak hadir di Hindia-Belanda selama lebih dari delapan bulan, atau Mas Atmodirono yang meninggal dunia pada 23 Juli 1920.[123]

Sidang biasa kedua di tahun 1920 dibuka oleh Ketua Volksraad Jayadiningrat pada 19 Oktober 1920. Dalam pembukaannya, sidang dihadiri oleh para anggota yang terdiri atas Abdul Muis, P. Bergmeijer, Ch. G. Cramer, R.A.A.A. Jayadinigrat, Mr. A.A. Galestin, Mr. S.J. Hirsch, Mr. H. s' Jacobs, M.B. van der Jagt, R. Kamil, H.H. Kan, P.T.A. Kusumo Yudo, R.M.T.A. Kusumo Utoyo, D. van Hinloopen Labberton, F. Laoh, Lim A Pat, Cipto Mangunkusumo, J.V.L. Oppermann, T. Ottolander, P.A.A.P. Prangwadono, R.P. de Queljoe, Dr. J. Schmutzer, R.T. Suyono, J. A. Soselisa, J.M.I. Suys, J.J.E. Teeuwen, R. Omar Said Cokroaminoto, A.M. Valkenburg, M. Vierhout, dan A.L. Waworuntu, dengan Muurling selaku perwakilan dari Pemerintah Kolonial.[124]

Pada persidangan kali ini, terdapat 27 mosi yang diajukan. Daftar catatan mosi yang diajukan oleh anggota Volksraad, seperti periode sebelumnya, disusun menurut abjad dalam bahasa Belanda. Pada periode ini, catatan mosi dimulai dengan abjad B untuk *Belastingen* (pajak), *Besturstelsel* (sistem pemerintah), dan *Bezoldiging* (remunerasi); D untuk *Decentralisatie* (desentralisasi); G untuk *Gelijkstelling* (kesetaraan) dan *Getuigengelden* (uang saksi); H untuk *Heerendiensten*

123 *Ibid.*
124 *Handelingen van den Volksraad, De Tweede Gewone Zitting* 1920, hlm. 3

(kerja wajib); O untuk *Ontginning* (pertambangan); P untuk *Pensioenen* (pensiun) dan *Politie* (polisi); R untuk *Regeeringsverklaring* (penjelasan pemerintah); V untuk *Veeartsenijkundige dienst* (dinas dokter hewan), *Veetelt* (peternakan), dan Volksraad; Z untuk *Zelfbesturen* (pemerintahan otonom).[125]

Anggota Volksraad dari kalangan Bumiputra pada periode ini juga mengajukan mosi. Berikut daftar mosi dari anggota kalangan Bumiputra, beserta dengan statusnya dalam sidang Volksraad 1920:[126]

No.	Pengusul	Isi	Status
1.	Jayadiningrat	Keinginan pendirian dan mempertahankan sejumlah kota praja kecil	Diterima
2.	A. Muis, Cokroaminoto, Van Hinloopen Labberton, Thayeb, Teeuwen, Sastrowijono, dan Dwijosewoyo	Perluasan hak pilih untuk pribumi	Belum dibahas
3.	Cokroaminoto, Sastrowijono, Dwijosewoyo, Cramer, Cipto Mangunkusumo, Rajiman, Teeuwen, Muis, dan Thayeb	Reformasi sistem tata negara Pemerintah Hindia-Belanda terkait pembentukan parlemen yang memiliki wewenang penuh dan bertanggung jawab kepada pemerintah	Belum dibahas dalam sidang terbuka
4.	Jayadiningrat, Schuman, Waworuntu, Van Hinloopen Labberton, Kan, dan s' Jacobs	Deskripsi reformasi yang diperlukan dalam sistem tata negara pemerintah	Belum dibahas
5.	Cipto Mangunkusumo, Van Hinloopen Labberton, Sastrowijono, Thayeb, Teeuwen, Cramer, Waworuntu, Rivai, dan Kamil	Pemberian hak angket	Pembahasan lebih lanjut ditunda menunggu laporan Komite Peninjau

Selanjutnya, pada periode persidangan kedua Volksraad tahun 1920, terdapat 91 surat permohonan yang diajukan kepada Volksraad dengan beragam permasalahan. Permasalahan disusun secara alfabetis dari A hingga Z, antara lain: A untuk *Ambtscostuum* (pakaian pegawai); B untuk *Ballingschap* (pengasingan); C untuk *Concessie* (konsesi); D untuk *Duurtoeslag* (biaya tambahan); E untuk *Electriciteitsvoorziening* (sarana listrik); G untuk *Gelijkstelling* (kesetaraan) dan *Grondbezit* (kepemilikan tanah); H untuk *Herplaatsing* (penempatan kembali), *Huishuurvergoeding* (tunjangan sewa rumah), dan *Huwelijkssluiter* (ikatan pernikahan); K untuk *Klachten* (keluhan); M untuk *Middelbaar Technisch Onderwijs* (Sekolah Teknik Menengah) dan untuk *Motie* (mosi); O untuk *Onderdistricten* (kecamatan-kecamatan), *Onderwijs* (pendidikan), *Ontslag* (pemecatan), dan *Overplaatsing* (pemindahan); *Pensioenen* (pensiun), *Pestbestrijding* (penanganan pes), *Politie* (polisi), *Positieverbetering* (perbaikan posisi), dan *Preventieve hechtenis*

125 *Handelingen van den Volksraad, De Tweede Gewone Zitting 1918-1919, Bijlage*, hlm. 17-20
126 *Ibid.*, hlm. 18-19; *Handelingen van den Volksraad, De Tweede Gewone Zitting 1918-1919, Bijlage*, hlm. 12-14

(penahanan preventif); R untuk *Rechtsspraak* (pengadilan) dan *Rijstverkoop* (penjualan beras); S untuk *Schadevergoeding* (ganti rugi) dan *Spoorwegen* (kereta api); T untuk *Telefoondienst* (layanan telefon); V untuk *Veeartsen* (dokter hewan) dan *Verkiezing* (pemilihan).[127]

Sidang kedua ini diketuai oleh Jayadiningrat oleh karena Mr. Dr. Schumann yang menggantikan Dr. Koningsberger mengambil cuti ke Eropa. Pada hari pertama Jayadiningrat menduduki jabatan sebagai ketua, ia harus mengumumkan berita duka cita wafatnya anggota Volksraad, Atmodirono, yang kemudian digantikah oleh Raden Tumenggung Ario Suyono, Bupati Pasuruan.[128]

Permasalahan yang masuk ke Volksraad sangat beragam, mulai dari urusan pakaian dinas, pengasingan, konsesi, infrastruktur (listrik), kepemilikan tanah, keluhan terhadap pejabat, pendidikan, pemecatan, putusan pengadilan, penjualan beras, hingga pemilihan lurah. Beberapa surat permohonan yang berhubungan dengan masyarakat Bumiputra, antara lain permohonan pakaian dinas oleh E. Karimelah, seorang Pembantu Guru Tingkat II di Kwandang, Karesidenan Manado, permohonan pembatalan pengasingan seorang perempuan Bali bernama Ni Kuplit ke Timor, serta permohonan seorang perempuan bernama Naina di Manado untuk mengajukan keluhan kepada Raja Manganitu.[129]

Pada persidangan kedua ini terdapat 21 komisi. Komisi-komisi tersebut terdiri atas:[130]

No.	Nama Komisi	Tugas	Ketua dan Anggota
1.	*Commissie voor de huishoudelijke aangelegenheden* (Komisi Urusan Rumah Tangga)	Terdapat dalam Pasal 7 dalam *Reglement van Orde*	Ketua: Schumann Anggota: Cramer dan Kan
2.	*Centrale Afdeeling* (Bagian Pusat)	Konsultasi untuk mengatur tugas	Ketua: Schumann Anggota: ketua dari bagian kedua dan ketiga

Pada periode persidangan ini, Volksraad juga membahas rancangan-rancangan yang diajukan oleh Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda untuk diberikan saran. Rancangan-rancangan tersebut ada tujuh rancangan yang juga dicatat secara alfabetis. Pada periode ini, rancangan yang diajukan antara lain *Arbeidsregeling* (Peraturan Tenaga Kerja) untuk wilayah Banyuwangi yang diajukan pada 18 November

127 *Handelingen van den Volksraad, De Tweede Gewone Zitting* 1920, *aanhangsel*, hlm. 21-32
128 P.A. Achmad Djajadingrat, *Memoar Pangeran*, Op.Cit, hlm. 367
129 *Handelingen van den Volksraad, De Tweede Gewone Zitting* 1920, *aanhangsel*, Op.Cit., hlm. 21-32
130 *Ibid.*, hlm. 5-7

3.	*Schakkelcommissie* (Komisi Peralihan)	Mendukung kontak antara pemerintah dan Volksraad	Para ketua dari ketiga bagian: Schumann, Jayadiningrat, dan Bergmeijer, ditambah Abdul Muis, Cramer, Schmutzer, Teeuwen, dan Galestin
4.	*Heerendienstcommissie* (Komisi Kerja Wajib)	Mempertimbangkan usul dan pertanyaan Van Hinloopen-Labberton, mempelajari persoalan kerja wajib	Ketua: ... Anggota: Laoh, Vreede, dan Waworuntu
5.	*Commissie voor onderzoekvan het Reglement van Orde* (Komisi Penyelidikan Tata Tertib)	Memisahkan tata tertib menjadi ketentuan yang secara khusus dikeluarkan oleh pemerintah dan harus dicatat dalam satu peraturan	Ketua: s' Jacobs Anggota: Jayadiningrat, Van Hinloopen-Labberton, dan Schumann
6.	*Commissie voor verzoekschriften* (Komisi Surat Permohonan)	Membuat laporan surat-surat permohonan yang masuk ke Volksraad	Anggota: Dwijosewoyo, Kan, dan Waworuntu. Anggota pengganti: Kamil dan Vreede
7.	*Commissie van voorebereiding met betrekking tot de voorstellen inzake de algemeene salarisherziening* (Komite Persiapan mengenai proposal untuk tinjauan gaji umum)	Mempersiapkan bagian penyelidikan tentang usulan peninjauan gaji umum	Ketua: Schumann Anggota: Bergmeijer, Cramer, Jayadiningrat, Galestin, s' Jacobs, Van Hinloopen-Labberton, Suys, dan Valkenburg
8.	*Commissie van rapporteurs voor de eerste algemeene aanvullingsbegrooting voor 1921* (komisi pelapor untuk anggaran tambahan umum pertama)	Tugasnya terdapat dalam Pasal 39–44 *Reglement van Orde*	Anggota: Kamil, Kan, dan Teeuwen
9.	*Commissie van rapporteurs voor de eerste nota van wijziging op de eerste algemene aanvullingsbegrooting voor 1921* (komisi pelapor untuk nota pertama anggaran tambahan umum pertama tahun 1921)	s.d.a.	Anggota: Kamil, Kan, dan Suyono
10.	*Commissie van rapporteurs voor de motie-Oppermann inzake de pensionneering van landsdienaren* (komisi pelapor untuk mosi Opperman mengenai pensiun pegawai pemerintah)	s.d.a.	Anggota: Galestin, Opperman, dan Schmutzer
11.	*Commissie van rapporteurs voor de motie-Van Hinloopen Labberton inzake de belastingvoorstellen* (komisi pelapor untuk mosi Van Hinloopen Labberton mengenai usul pajak)	s.d.a.	s.d.a.
12.	*Commissie van rapporteurs voor den aanvullingsbegrooting voor 1921* (komisi pelapor untuk anggaran tambahan tahun 1921)	s.d.a.	Anggota: Galestin, Hirsch, dan Schmutzer
13.	*Commissie van rapporteurs voor regulatie-ontwerp voor den dienst 1919* (komisi pelapor untuk rancangan regulasi tahun 1919)	s.d.a.	Anggota: Kamil, Kan, dan Suyono
14.	*Commissie van rapporteurs voor het ontwerp inzake de hervorming van het bestuurstelsel* (komisi pelapor untuk rancangan reformasi ketatanegaraan)	s.d.a.	Anggota: Cramer, van der Jagt, dan Teeuwen
15.	*Commissie van rapporteurs voor de aanvullingsbegrooting voor 1921* (komisi pelapor untuk anggaran tambahan tahun 1921)	s.d.a.	Anggota: Kamil, Oppermann, dan Teeuwen

16.	*Commissie van rapporteurs voor het rapport de heerendienstcommissie* (komisi pelapor untuk laporan komisi kerja wajib)	s.d.a.	Anggota: Kamil, Oppermann, dan Sutan Tumenggung
17.	*Commissie van rapporteurs voor de tweede algemeene aanvullingsbegrooting voor 1921* (komisi pelapor untuk anggaran tambahan umum kedua tahun 1921)	s.d.a.	Anggota: Kamil, Oppermann, dan Teeuwen
18.	*Commissie van rapporteurs voor de eerste nota van wijzigingen op de tweede algemeene aanvullingsbegrooting voor 1921* (komisi pelapor untuk nota pertama perubahan pada anggaran tambahan kedua tahun 1921)	s.d.a.	Anggota: Laoh, Oppermann, dan de Queljoe
19.	*Commissie van rapporteurs voor het voorstel-Van Hinloopen Labberton inzake de vaststelling van de tarieven voor de gebruiksmaking van publieke diensten* (komisi pelapor untuk usul Van Hinloopen Labberton mengenai penetapan tarif penggunaan pelayanan publik)	s.d.a.	Anggota: Laoh, Oppermann, dan de Queljoe
20.	*Commissie van rapporteurs voor de motie-Van Hinloopen Labberton in zake de exploitatie der Djambi- olievelden* (komisi pelapor untuk mosi Van Hinloopen Labberton tentang eksplotasi ladang minyak di Jambi)	s.d.a.	s.d.a.
21.	*Commissie van rapporteurs voor de motie-Van Hinloopen Labberton in zake verhooging getuigengelden* (komisi pelapor untuk mosi Van Hinloopen Labberton tentang kenaikan uang saksi)	s.d.a.	s.d.a.

1918. Berdasarkan surat dari Sekretaris Pertama Pemerintah tanggal 5 Oktober 1920 No. 3118/IIIA, pemerintah tidak mengapresiasi saran yang muncul dari rapat Volksraad. Rancangan lain adalah: (1) *Begrooting eerste algemeene aanvullingsbegrooting voor het dienstjaar 1921 met nota van wijzigingen* (Anggaran tambahan umum pertama untuk tahun 1921 dengan sebuah surat perubahan) yang diajukan pada 22 Oktober 1920, dengan hasil Volksraad sepakat dengan keputusan rancangan berupa perubahan yang diajukan oleh pemerintah; (2) *Begrooting: Aanvullingsbegrooting voor het dienstjaar 1921 (bezoldiging Gouverneur-Generaal)* (Anggaran: Anggaran tambahan untuk tahun 1921 (remunerasi Gubernur Jenderal)) yang diajukan pada 16 November 1920, dengan hasil Volksraad sepakat dengan keputusan rancangan; (3) *Begrooting Regularisatie-Ontwerp voor het dienstjaar 1919* (Rancangan Regularisasi Anggaran untuk tahun 1919) yang diajukan pada 19 Oktober 1920, dengan hasil Volksraad sepakat dengan rancangan keputusan;

(4) *Bestuurstelsel: Hervorming van het bestuurstelsel* (Tata Negara: Reformasi Tata Negara) yang diajukan pada 11 September 1920, dengan hasil Volksraad menyepakati rancangan undang-undang seperti yang diajukan pemerintah.[131]

Pada periode 1918–1921, komposisi partai di Volksraad terdiri atas *Nederlandsch-Indische Vrijzinnige Bond* (NIVB), *Christelijke Ethische Partij* (CEP), *Indische Katholieke Partij* (IKP), dan *Indische Sociaal-Democratische Partij* (ISDP) dengan anggota yang multirasial. Wakil dari NIVB, antara lain terdiri dari lima orang Eropa dan lima orang Indonesia menjadi kelompok terkuat di Volksraad. CEP merepresentasikan diri dengan menempatkan tiga wakil, disusul oleh IKP dan ISDP dengan masing-masing satu wakil. Beberapa perwakilan lainnya muncul dari *Vereeniging van Ambtenaren van het Binnenlandsch Bestuur* (VABB) dengan satu wakil, Budi Utomo dengan empat wakil, Serikat Sumatera dengan satu wakil, serta Sarekat Islam dengan dua wakil. Selain itu, terdapat pula anggota independen yang tidak mewakili partai atau organisasi politik apapun, yaitu delapan orang Eropa, lima orang Indonesia, dan tiga dari golongan Timur Asing.[132]

2.6 Volksraad periode 1921-1923: Isu Desentralisasi dan Perluasan Hak Pilih bagi Bumiputra

Sidang luar biasa pertama Volksraad pada periode yang baru ini dibuka pada 4 April 1921 dan kembali diketuai oleh Mr. Dr. W.M.G. Schumann. Dalam pembukaan tersebut, hadir 22 anggota yang terdiri dari Abdul Muis, P. Bergmeijer, Ch. G. Cramer, Mr. D.A. Delprat, M.W. Dwijosewoyo, Mr. A.A. Galestin, G.J. Houtsma, Mr. H. s' Jacobs, R. Kamil, H.H. Kan, Khouw Kim An, D. van Hinloopen Labberton, Lanjumin gelar Sutan Tumenggung, F. Laoh, J.V.L. Oppermann, P.A.A.P. Prangwadono, J.A. Soselisa, J.J.E. Teeuwen, A.M. Valkenburg, Th. F. Vreede, dan A.L. Waworuntu. Muurling juga kembali menjadi perwakilan dari Pemerintah Kolonial.[133]

Anggota Volksraad yang tidak hadir dalam pembukaan sidang dengan pemberitahuan sebelumnya adalah R.A.A.A. Jayadiningrat, Mr. S.J. Hirsch, Van der Jagt, P.T.A. Kusumo Yudo, R.M.T.A. Kusumo

... terdapat pula anggota independen yang tidak mewakili partai atau organisasi politik apapun, yaitu delapan orang Eropa, lima orang Indonesia, dan tiga dari golongan Timur Asing.

131 *Handelingen der Volksraad, Tweede Gewone Zitting* 1920, *bijlage*, hlm. 8-9
132 Bob Hering, 1994, *M.H. Thamrin and His Quest for Indonesian Nationhood* 1917-1941 (Stein: Yayasan Kabar Seberang), hlm. 64-65
133 *Handelingen van den Volksraad, De Eerste Buitengewone Zitting* 1921, hlm. 1

Utoyo, Lim A Pat, T. Ottolander, Ch. Ponto, A.P. de Queljoe, Dr. R. Ng. Rajiman, Dr. J. Schmutzer, R.T. Suyono, Z. Stokvis, J.M.I. Suys, Cipto Mangunkusumo, dan M. Vierhout. Sedangkan anggota yang tidak hadir tanpa pemberitahuan adalah R.O.S Cokroaminoto.[134]

Dalam sidang tersebut, Sekretaris Sementara membacakan surat keputusan dari Gubernur Jenderal tertanggal 3 Maret 1921 mengenai pengangkatan nama-nama berikut sebagai anggota Volksraad mulai dari persidangan biasa tahun 1921. Nama-nama tersebut adalah S.J. Aay, Dr. Abdul Rivai, Mr. J. van den Brand, W. Burer, Ch. G. Cramer, Mr. D.A. Delprat, M. Ng. Dwijosewoyo, H.H. Kan, Khouw Kim An, F. Laoh, Lim A Pat, Mohamad Yusuf, Ch. Ponto, P.A.A.P. Prangwadono, R.P. de Queljoe, Haji A. Salim, J.F.C. van Sandick, Dr. J. Schmutzer, Raden Kosasih alias Surakusumah, H. Sutadi, J.A. Soselisa, J.J.E. Teeuwen, S.A. Teixeira de Mattos, dan Todong gelar Sutan Gunung Mulia. Dari nama-nama tersebut, menurut Sekretaris Pertama Pemerintah, terdapat penolakan dari Prangwadono dan Mohamad. Sedangkan, Lim A Pat, Surakusumah, Laoh, Ponto, Schmutzer, dan Delprat menerimanya.[135]

Pada sidang yang dilangsungkan tanggal 17 Meil 1921, diperkenalkan pula anggota baru, yaitu H. Agus Salim, yang menggantikan posisi Cokroaminoto di Sarekat Islam. Dalam sidang yang sama, persoalan yang dibahas adalah terkait peninjauan kembali undang-undang yang menginginkan hak otonomi yang lebih luas bagi daerah koloni.

Pada sidang yang dilangsungkan tanggal 17 Meil 1921, diperkenalkan pula anggota baru, yaitu H. Agus Salim, yang menggantikan posisi Cokroaminoto di Sarekat Islam.

Sebelumnya, dalam pembukaan sidang pada 4 April 1921, dikemukakan pula surat-surat yang masuk dan akan dibahas dalam tiap bagian (*afdeling*) yang menangani persoalan-persoalan tersebut. Surat-surat permohonan tersebut ada yang ditujukan langsung kepada Volksraad, namun ada pula yang disampaikan melalui instansi terkait. Misalnya, surat dari Sekretaris Pertama Pemerintah pada tanggal 14 Maret 1921, mengenai surat permohonan yang ditujukan kepada Volksraad dari Kepala Desa Kajene, Pemalang terkait penyerahan lahan dari penduduk desanya yang seluas 200 bahu untuk sawah atau tegalan. Atau, surat dari Sekretaris Pertama Pemerintah berikutnya pada tanggal 16 Maret 1921, mengenai surat permohonan permintaan informasi dari Mas Joyokusumo dan kawan-kawan di Dinas Garam Grobogan, khususnya tentang skema kompensasi remunerasi yang ia terima.[136]

Selain daripada itu, surat-surat permohonan ditujukan langsung

134 *Ibid.*
135 *Ibid.*, hlm. 4
136 *Ibid.*, hlm. 5

kepada Volksraad, antara lain surat permohonan Areani dari Sambas (*Westerafdeling van Borneo*) mengenai penempatan guru dari daerah tersebut dan permohonan pemberian biaya perjalanan gratis pada saat cuti, surat permohonan Mas Mohamad Sukardi dari Sekayu, Palembang terkait pemberhentian dirinya sebagai mantri suntik, surat permohonan tanpa segel dari Tengku Mohamad Yusup Asahan dari Biliton untuk peningkatan statusnya sebagai keturunan Sultan Asahan, surat permohonan W.J.D. Wattimena, Raja Makareki, untuk memperhatikan perhatian kepada *rekest* (surat permohonan) tanggal 28 Mei 1919 dan 12 Februari 1921, serta surat permohonan dari J.L.K. Landon, seorang calon guru di Balikpapan mengenai perbaikan posisi calon guru dan calon guru bantu di seluruh Hindia-Belanda.[137]

Pada periode 1921 ini, secara keseluruhan terkumpul 23 surat permohonan yang masuk ke Volksraad yang ditangani oleh *Commissie voor de verzoekschriften* (Komisi untuk Surat Permohonan), dengan para anggota yang terdiri atas Dwijosewoyo, Kan, dan Waworuntu, serta dua anggota pengganti, yaitu Kamil dan Vreede. Surat permohonan dicatat secara alfabetis, antara lain A untuk *Ambstgronden*; D untuk *Declaraties* (deklarasi) dan *Duurtoeslag* (biaya tambahan); G untuk *Grondbezit* (kepemilikan tanah); K untuk *Klachten* (keluhan); O untuk *Oorlogwinstbelasting* (pajak keuntungan perang); P untuk *Pasars* (pasar-pasar), *Pensioenen* (pensiun), dan *Positieverbetering* (perbaikan jabatan); R untuk *Rechtspraak* (pengadilan); dan terakhir S untuk *Schutterijen* (penembak).[138]

Pada periode 1921 ini, secara keseluruhan terkumpul 23 surat permohonan yang masuk ke Volksraad yang ditangani oleh *Commissie voor de verzoekschriften* (Komisi untuk Surat Permohonan)

Komisi-komisi yang terdapat dalam Volksraad pada tahun 1921 antara lain sebagai berikut:

1. *Commissie voor de huishoudelijke aangelegenheden* (Komisi untuk Urusan Rumah Tangga) dalam sidang biasa pertama tahun 1920 dengan Schumann sebagai ketua, dan Cramer dan Kan sebagai anggotanya.
2. *Centrale afdeling* (Bagian Pusat) dengan Schumann sebagai ketua, dan ketua dari afdeling II dan III sebagai anggotanya.
3. *Schakelcommissie* (Komisi Peralihan) dalam sidang biasa kedua tahun 1918 dan sidang biasa pertama 1920, dengan tiga ketua *afdeling* yaitu Schumann, Jayadiningrat, Bergmeijer, Abdul Muis, Cramers, Schmutzer, Teeuwen, dan Galestin.
4. *Heerendienstcommissie* (Komisi Kerja Wajib) dalam sidang

137 *Ibid.*, hlm. 7
138 *Ibid.*, hlm. 15

biasa kedua 1918 dan sidang pertama tahun 1920 yang ketuanya tidak diketahui, namun para anggotanya adalah Laoh, Vreede, dan Waworuntu.

5. *Commissie voor verzoekschriften* (Komisi untuk Surat-surat Permohonan) dalam sidang biasa pertama tahun 1920 dan sidang biasa kedua tahun 1920. Para anggotanya adalah Dwijosewoyo, Kan, dan Waworuntu, dengan anggota pengganti Kamil dan Vreede.
6. Komisi Laporan Anggaran tahun 1921 yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan biaya ekspor minyak bumi dan produk sampingannya, dengan anggota Kan, Vreede, dan Valkenburg.
7. Komisi Peninjau Undang-undang dengan anggota Galestin, van Hinloopen Labberton, dan 's Jacobs.
8. Komisi untuk Mosi Vreede mengenai perbedaan antara para pekerja lokal dan impor dengan anggota Van Hinloopen Labberton dan Vreede.[139]

Pada pertengahan tahun 1921, diselenggarakan sebuah rapat besar yang dihadiri kalangan pergerakan.

Pada pertengahan tahun 1921, diselenggarakan sebuah rapat besar yang dihadiri kalangan pergerakan. Ada sekitar 300 orang berkumpul dan menghasilkan "*Motie Politieke Concentratie*" yang berisi kritik bahwa Volksraad dibentuk hanya sebagai alat kepentingan pemerintah. Kondisi tersebut sempat membuat kalangan pergerakan pesimis dengan Volksraad, khususnya ketika muncul pertanyaan sejauh mana Volksraad mampu membawakan aspirasi masyarakat ke arah pembentukan pemerintahan sendiri. Kritik tersebut kemudian mendapatkan tanggapan.

Pada akhir bulan Desember 1921, R.M.A.A. Kusumo Utoyo ikut berperan dalam *Commite voor de autonomie van Indië* (Komite Otonomi Hindia) bersama R.T.A. Wiranata Kusuma, dan R.A.A. Achmad Jayadiningrat sebagai ketua. Pembentukan komite ini melibatkan sejumlah utusan partai besar, minus PKI, dalam masa reses. Pemilihan ketiga tokoh bupati tersebut sepertinya didasari oleh alasan latar belakang mereka sebagai bupati yang kinerjanya cakap dan progresif. Komite itu sendiri dibentuk untuk membangun argumen yang diharapkan dapat mempengaruhi pendapat umum, baik di Hindia-Belanda maupun di negara induk. Pada awal tahun 1922, komite

139 *Handelingen der Volksraad, De Eerste Buitengewone Zitting 1921, bijlagen*, hlm. 5-6

ini mengirim sejumlah utusan ke Belanda yang ketika itu sedang melakukan pemilihan para anggota parlemen baru. Utusan tersebut diharapkan dapat memberikan pengaruh kepada pandangan anggota parlemen di Belanda supaya mendukung otonomi yang lebih luas di Hindia-Belanda.[140]

Pada periode persidangan tahun 1922, terdapat pembagian *afdeling* (bagian) ke dalam sebelas bagian, yaitu *Afdeling* I *Regeering en Hooge College* (Pemerintah dan Dewan Tinggi), *Afdeling* II *Departement van Justitie* (Departemen Kehakiman), *Afdeling* III *Departement van Financien* (Departemen Keuangan), *Afdeling* IIIA *Indische Schuld* (Hutang Hindia), *Afdeling* IV *Departement van Binnenlandsch Bestuur* (Departemen Pemerintahan Dalam Negeri), *Afdeling* V *Departement van Onderwijs en Eeredienst* (Departemen Pengajaran dan Agama), *Afdeling* VI *Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel* (Departemen Pertanian, Industri, dan Perdagangan), *Afdeling* VII *Departement der Burgerlijke Openbare Werken* (Departemen Pekerjaan Umum), *Afdeling* VIII *Departement van Gouvernementsbedrijven* (Departemen Perusahaan Pemerintah), *Afdeling* IX *Departement der Oorlog* (Departemen Urusan Perang), *Afdeling* X *Departement der Marine* (Departemen Angkatan Laut).[141]

Usulan yang diajukan oleh anggota Volksraad pada periode 1921 hanya ada dua usulan. Usulan pertama diajukan oleh Van Hinloopen Labberton mengenai perubahan undang-undang yang diajukan sejak sidang biasa kedua tahun 1920. Status usulan tersebut adalah ditarik. Sementara itu, usulan kedua diajukan Thayeb, Teeuwen, Cokroaminoto, Muis, Waworuntu, dan Van Hinloopen Labberton mengenai perubahan *koeli-ordonantie* (peraturan perundang-undangan tentang kuli) yang diajukan sejak sidang biasa kedua tahun 1918-1919, sidang biasa pertama tahun 1919, sidang biasa kedua tahun 1919, dan sidang biasa pertama tahun 1919. Usulan ini ditunda berdasarkan rapat pada 16 Juli 1920. Pemerintah diminta untuk menangani biaya-biaya terlebih dahulu.[142]

Usulan yang diajukan oleh anggota Volksraad pada periode 1921 hanya ada dua usulan.

Dalam periode rapat luar biasa 1921, muncul 17 amandemen yang terbagi atas dua pokok persoalan. Persoalan pertama adalah mengenai *de behandeling der aanvulling begrooting voor het dienstjaar* 1921 (pembahasan tambahan anggaran untuk tahun 1921). Hal ini berhubungan dengan kenaikan tarif ekspor minyak bumi dan produk sampingan, dengan ruang lingkup kenaikan tarif yang diajukan

140 Atashendartini Habsjah (ed.), *Perjalanan Panjang Anak Bumi*, *Op.Cit.*, hlm. 123-124
141 *Handelingen der Volksraad, Volksraad Tweede Gewone Zitting 1922, bijlagen*, hlm. ?
142 Handelingen van den Volksraad, De Eerste Buitengewone Zitting 1921, hlm. 7

oleh pemerintah. Anggota Volksraad yang mengajukan amandemen persoalan ini adalah Vreede, Cramer, Sujono, dan Jayadiningrat. Status dari amandemen ini adalah diterima.[143]

Persoalan amandemen kedua yang diajukan pada periode rapat luar biasa tahun 1921 adalah *de behandeling van het voorstel tot herziening der Grondwet* (pembahasan atas usul peninjauan kembali Undang-undang Dasar). Ada enam belas amandemen untuk persoalan yang berhubungan dengan pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar, antara lain amandemen Pasal 1 dan 164 Undang-undang Dasar mengenai penggantian istilah "Nederlandsch-Indië" dengan "Indonesia" yang diajukan Van Hinloopen Labberton, Cramer, dan Vreede dengan status ditolak, amandemen Pasal 122 mengenai penggantian istilah "*Koloniën en bezittingen*" (Koloni dan Bawahannya) dengan "*zelfstandige staatsdelen*" (negara bagian mandiri) yang diajukan oleh Van Hinloopen Labberton, Cramer, dan Vreede dengan status dibatalkan.[144]

Beberapa anggota Volksraad dari kalangan Bumiputra yang ikut serta mengajukan amandemen tersebut bersama dengan anggota Volksraad lainnya, antara lain Kusumo Yudo, Abdul Muis, Soselisa, Laoh, Sutan Tumenggung, dan Dwijosewoyo.[145]

Sementara itu, terdapat sepuluh mosi yang diajukan pada periode rapat luar biasa kedua tahun 1921. Mosi-mosi tersebut dicatat secara alfabetis dan terbagi atas persoalan di bawah abjad, sebagai berikut: A untuk *Aardolie* (minyak bumi); B untuk *Bezoldiging* (remunerasi); D untuk *Decentralisatie* (desentralisasi); P untuk *Pensioenen* (pensiun); R untuk *Regeeringsverklaring* (penjelasan pemerintah); V untuk Volksraad; dan Z untuk *Zelfbesturen* (pemerintahan otonom). Dalam periode rapat ini, persoalan *Bezoldiging* (remunerasi) disampaikan dalam tiga mosi dan merupakan persoalan yang paling banyak disoroti.[146]

Anggota Volksraad Bumiputra yang turut mengajukan mosi pada periode ini adalah Suyono, Jayadiningrat, Sutan Tumenggung, De Queljoe, Abdul Muis, Cokroaminoto, Thayeb, Sastrowijono, Dwijosewoyo, Laoh, Soselisa, Cipto Mangunkusumo, Rajiman, Waworuntu, Rivai, dan Kamil. Persoalan-persoalan yang mereka ajukan dalam mosi, antara lain terkait persoalan desentralisasi, khususnya perluasan hak pilih bagi Bumiputra, yang diajukan oleh Abdul Muis, Cokroaminoto, Van Hinloopen Labberton, Thayeb, Teeuwen, Sastrowijono, dan Dwijosewoyo. Mosi tersebut diajukan

Beberapa anggota Volksraad dari kalangan Bumiputra yang ikut serta mengajukan amandemen tersebut bersama dengan anggota Volksraad

143 *Ibid.*, hlm. 8
144 *Ibid.*, hlm. 8-12
145 *Ibid.*
146 *Ibid.*, hlm. 13-14

sejak sidang biasa pertama tahun 1918 dengan status belum dibahas karena pembahasan ditunda dan harus menunggu peninjauan kembali berdasarkan konstitusi negara. Mosi menyoroti perihal persoalan penjelasan pemerintah dalam hal reformasi ketatanegaraan di Hindia-Belanda yang bersamaan dengan pembentukan sebuah parlemen dengan wewenang legislatif penuh dan pemerintah yang bertanggung jawab pada parlemen tersebut. Mosi tersebut diajukan sejak sidang biasa kedua pada tahun 1918-1919 dengan status belum dibahas dalam sidang terbuka. Pembahasan berikutnya juga menunggu peninjauan kembali konstitusi negara. [147]

Anggota Volksraad pada persidangan tahun 1921 dari kalangan Bumiputra, Tionghoa, dan Arab adalah sebagai berikut:[148]

No.	Nama	Pekerjaan	Tempat tinggal	Mulai bertugas
1.	R.M.A. Ardiodinoto	Bupati	Cirebon	17 Mei 1921
2.	R.A.A. Djajadiningrat	Bupati	Serang	17 Mei 1921
3.	M.W. Dwijosewoyo	Partikelir, Sekretaris Sultan Yogyakarta	Yogyakarta	17 Mei 1921
4.	R. Kamil	Ajunct Inspektur Senior Inlandsch Onderwijs	Weltvereden	17 Mei 1921
5.	Hok Hoei Kan	Pemilik lahan	Weltevreden	17 Mei 1921
6.	Khouw Kim An	Mayor Cina Senior	Weltevreden	17 Mei 1921
7.	P.T.A. Kusumo Yudo	Bupati	Ponorogo	17 Mei 1921
8.	R.M.A.A. Kusumo Utoyo	Bupati	Jepara	17 Mei 1921
9.	Kosasih Al Surakusumah	Guru sekolah pertanian	Bandung	17 Mei 1921
10.	F. Laoh	Pegawai KPM	Weltevreden	17 Mei 1921
11.	Lim A Pat	Mayor Cina Senior	Muntok	17 Mei 1921
12.	P.A. Mandagie	Kepala Distrik	Manado	17 Mei 1921

Pada periode ini, salah satu anggota Volksraad dari luar Jawa adalah Christiaan Nomor Ponto, putra Raja Salmon Ponto yang menjadi Jogogu, Pemerintah Sementara di Pulau Sangir. Ia menggantikan ayahnya sebagai Raja Kandhar-Taruna di Pulau Sangir sejak Februari 1914. Christiaan Ponto baru dinobatkan sebagai raja pada 21 Desember 1916 dan disahkan oleh Gubernur Jenderal pada tanggal 24 Maret 1917 No. 91.[149]

Christiaan Ponto adalah raja pertama Kandhar-Taruna yang

147 *Ibid.*
148 Handelingen der Volksraad, eerste zitting 1921, bijlage, hal. 5-6.
149 "Verklaring van Trouw", *Bataviaasch Nieuwsblad*, 27 Maret 1917, hlm. 2

13.	Todung gelar Sutan Gunung Mulia	Kepala Sekolah Holandsch Inlandsche School	Kota Nopan (Tapanuli)	17 Mei 1921
14.	R.T. Moh. Notohadisuryo	Bupati	Banyuwangi	17 Mei 1921
15.	Christian Ponto	Zelfbestuurder	Taruna (P. Sangir)	17 Mei 1921
16.	R.P. de Queljoe	Asisten Pemerintah Kelas II	Porto (Saparua)	17 Mei 1921
17.	Dr. Abdul Rivai	Dokter	Weltevreden	17 Mei 1921
18.	R. Sajirun	Wedana	Banyumas	17 Mei 1921
19.	Haji Agus Salim	Jurnalis	Weltevreden	17 Mei 1921
20.	R.T.A. Said	Bupati	Blora	17 Mei 1921
21.	R.T.R. Suria Kartalegawa	Bupati	Garut	17 Mei 1921
22.	H. Sutadi	Jurnalis	Surakarta	17 Mei 1921
23.	R.M. Sutatmo Suriokusumo	Pengawas Kelas III BOW	Bali	13 Juni 1921
24.	J.A. Soselisa	Pejabat SS	Mr. Cornelis	17 Mei 1921
25.	R. Sosrohadiwijoyo	Patih	Kutoarjo	17 Mei 1921
26.	A.L. Waworuntu	Mayor Senior	Manado	17 Mei 1921
27.	Sutan Moh. Zain	Pemimpin Redaksi Commissie voor de Volkslectuur	Weltevreden	17 Mei 1921

mendapatkan pendidikan tinggi. Ia lulus dari *Hoofdenschool* (Sekolah Raja) di Tondano, serta kursus *Middelbare Landbouwschool* (Sekolah Menengah Pertanian) di Buitenzorg (Bogor) pada September 1909. Ia ditunjuk menjadi anggota Volksraad berdasarkan Surat Keputusan tanggal 16 November 1920 dan mulai bertugas di Batavia sejak 23 Februari 1921. Ia tercatat sebagai anggota fraksi CEP dan bertugas di Volksraad sampai bulan Januari 1924.[150]

Selanjutnya, sidang luar biasa pertama Volksraad tahun 1922 dibuka pada tanggal 21 Maret. Jumlah anggota Volksraad, termasuk ketua, sebanyak 37 anggota. Para anggota Volksraad yang hadir adalah Aay, Abdul Rivai, Ariodinoto, Ten Berge, Bergmeijer, Burer, Cramer, Dahler, Delprat, Dwijosewoyo, Galestin, Van Gennep, Den Hollander, Houtsma, 's Jacob, Van der Jagt, Kamil, Kan, Kerkkamp, Khouw Kim An, Kusumo Yudo, Kusumo Utoyo, Sajirun, Salim, Van Sandick, Said, Surakusumah, Suria Kartalegawa, Suriokusumo, Sutadi, Soselisa, Sosrohadiwijoyo, Valkenburg, Waworuntu, Westra, dan Zain. Anggota yang tidak hadir, namun tetap mengabarkan, adalah Jayadiningrat,

150 "De Les van Sangir", *Algemeen Handelsblad*, 21 Mei 1929, hlm. 1

Engelenberg, Kies, Laoh, Lim A Pat, Mandagie, Mulia, Notohadisuryo, dan Teixera de Mattos, sementara anggota yang tidak hadir tanpa kabar adalah Ponto dan De Queljoe.[151]

Sidang luar biasa pertama Volksraad di tahun 1922 memiliki lima komisi, yaitu:[152]

1. *Commissie voor de huishoudelijke aangelegenheden* (Komisi Untuk Urusan Rumah Tangga) dengan tugas yang tercantum dalam Pasal 7 *de Reglement van Orde*. Ketua komisinya adalah Schumann dengan anggota Cramer dan Kan.
2. *Centrale afdeeling* (Bagian Pusat) dengan tugas mengkonsultasikan pengaturan tugas. Ketua komisinya adalah Schumann dengan anggota para ketua afdeling II dan III.
3. *Schakelcommissie* (Komisi Peralihan) dengan tugas sebagai penghubung antara pemerintah dengan Volksraad. Ketua komisinya adalah Schumann dengan anggota Kusumo Yudo yang menggantikan Den Hollander, Bergmeijer menggantikan Valkenburg, Galestin menggantikan Teixeira de Mattos, Ten Berge menggantikan Burer, Kerkkamp menggantikan Jayadiningrat, Dwijosewoyo menggantikan Suriokusumo, serta Cramer, Dahler, dan Salim.
4. *Commissie voor de verzoekschriften* (Komisi Untuk Surat Permohonan) dengan tugas membuat laporan surat permohonan yang masuk ke Volksraad. Anggota komisinya adalah Galestin, Kamil, dan Khouw Kim An, dengan anggota pengganti Dwijosewoyo.
5. *Commissie van rapporteurs voor de wijziging van den opzet van het vlootbasisfonds* (Komisi pelapor pada perubahan struktur dana basis untuk pembangunan armada) dengan tugas yang tercantum dalam Pasal 39-44 *Reglement van Orde*. Anggota komisinya adalah Den Hollander, Van Sandick, dan Westra.

Pada periode persidangan ini, hanya ada satu rancangan yang diajukan pemerintah untuk dibahas Volksraad, yaitu perubahan struktur dana basis untuk pembangunan armada. Rancangan ini diajukan pada 14 Maret 1922 dengan keputusan Volksraad menerima Mosi Den Hollander, dkk. dengan perubahan yang telah diterima.

Pada periode persidangan ini, hanya ada satu rancangan yang diajukan pemerintah untuk dibahas Volksraad, yaitu perubahan struktur dana basis untuk pembangunan armada.

151 *Handelingen den Volksraad, De eerste buitengewone zitting* 1922, hlm. 3
152 *Ibid.*, Index, hlm. 2

Sementara itu, usulan dan amandemen yang diajukan pada periode persidangan luar biasa pertama tahun 1922 ini tidak ada.[153]

Mosi yang diajukan pada periode persidangan ini ada empat. Mosi tersebut adalah perubahan dana basis untuk pembangunan armada yang diajukan oleh Abdul Rivai dengan status ditarik. Mosi berikut adalah mosi yang sama seperti sebelumnya yang pernah diajukan oleh Den Hollander, Bergmeijer, 's Jacob, dan Kusumo Yudo. Mosi ketiga adalah mosi permohonan keputusan dengan segera oleh *Staten Generaal* mengenai *Vlootwet* (Undang-undang Armada) yang juga diajukan oleh Den Hollander, Bergmeijer, 's Jacob, dan Kusumo Yudo. Status mosi ini diterima. Mosi keempat adalah penarikan sementara rancangan undang-undang armada yang diajukan Aay, Salim, Suriokusumo, Cramer, dan Dahler, oleh karena statusnya yang ditolak.[154]

Mosi yang diajukan pada periode persidangan ini ada empat. Mosi tersebut adalah perubahan dana basis untuk pembangunan armada yang diajukan oleh Abdul Rivai dengan status ditarik.

Jumlah komisi Volksraad pada periode kedua sidang biasa tahun 1922 adalah delapan komisi. Komisi-komisi tersebut adalah:[155]

1. *Commissie voor de huishoudelijke aangelegenheden* (Komisi Untuk Urusan Rumah Tangga) dengan tugas yang tercantum dalam Pasal 7 *de Reglement van Orde*. Ketua komisinya adalah Schumann, dengan anggota Cramer dan Kan.
2. *Centrale afdeeling* (Bagian Pusat) dengan tugas mengkonsultasikan pengaturan tugas. Ketua komisinya adalah Schumann dengan anggota para ketua afdeling II dan III.
3. *Schakelcommissie* (Komisi Peralihan) dengan tugas sebagai penghubung antara pemerintah dengan Volksraad. Ketua komisinya adalah Schumann, dengan anggota Kusumo Yudo yang menggantikan Den Hollander, Bergmeijer menggantikan Valkenburg, Galestin menggantikan Teixeira de Mattos, Ten Berge menggantikan Burer, Kerkkamp menggantikan Jayadiningrat, dan Dwijosewoyo menggantikan Suriokusumo, serta Cramer, Dahler, dan Salim.
4. *Commissie voor de verzoekschriften* (Komisi Untuk Surat Permohonan) dengan tugas membuat laporan surat permohonan yang masuk ke Volksraad, dengan anggota komisi Burer, Kamil, dan Kies.
5. *Commissie van rapporteurs voor de eerste algemeene*

153 *Ibid.*, hlm. 3
154 *Ibid.*
155 *Handelingen van den Volksraad, Tweede Gewone Zitting 1922, index*, hlm. 5-6

aanvullingsbegrooting voor 1923, *tevens voor de Eerste nota van wijzigingen op die aanvullingsbegrooting* (Komisi pelapor untuk anggaran tambahan umum pertama untuk tahun 1923, juga untuk nota pertama amandemen anggaran tambahan itu) dengan tugas yang tercantum dalam Pasal 39-44 dalam de Reglement van Orde, dan anggota komisi antara lain Rup, Suyono, dan Sosrohadiwijoyo.

6. *Commissie van rapporteurs voor het regularisatie ontwerp over* 1921 (Komite pelapor untuk rancangan regularisasi tahun 1921), dengan anggota komisi adalah Mandagie, Rup, dan Suyono.
7. *Commissie van rapporteurs voor de amendementen op het voorontwerp van wet tot herziening van het Regeeringsreglement* (Komisi pelapor untuk amandemen terhadap rancangan undang-undang awal yang merevisi Peraturan Pemerintah), dengan anggota komisi Buffart, s' Jacobs, dan Westra.
8. *Commissie van rapporteurs voor het ontwerp betr. de ijkwetgeving* (Komisi pelapor untuk rancangan undang-undang alat ukur), dengan anggota komisi Rup, Suyono, dan Waworuntu.

Pada periode persidangan biasa kedua tahun 1922, ada empat rancangan yang diajukan oleh pemerintah untuk dibahas. Rancangan tersebut terdiri atas dua rancangan mengenai *Begrooting* (Anggaran), satu rancangan mengenai *Regeeringsreglement* (Peraturan Pemerintah), dan satu rancangan mengenai *Ijkwetgeving* (Undang-undang Alat Ukur).[156]

Pada periode persidangan biasa kedua tahun 1922, ada empat rancangan yang diajukan oleh pemerintah untuk dibahas.

Rancangan mengenai anggaran terdiri atas empat rancangan, antara lain: (1) Rancangan anggaran tambahan pertama umum untuk tahun 1923 yang diajukan pada 2 November 1922, dengan keputusan Volksraad menyepakati rancangan seperti yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah dan melengkapi rancangan tersebut; (2) Rancangan mengenai regularisasi untuk tahun 1921 yang juga diajukan pada 2 November 1922, dengan keputusan Volksraad sepakat dengan rancangan tersebut; (3) Rancangan terkait peninjauan kembali Peraturan Pemerintah yang diajukan pada 18 Juni 1922, dengan keputusan Volksraad menyepakati rancangan seperti yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah dan melengkapi

156 *Ibid.*

rancangan tersebut; dan (4) Rancangan keempat adalah peninjauan kembali undang-undang alat pengukur yang diajukan pada 2 November 1922, dengan keputusan Volksraad menyepakati rancangan bersyarat, yaitu mengikuti perubahan yang diajukan oleh Volksraad.[157]

Pada periode ini, tidak ada usulan yang diajukan. Sementara itu, tiga amandemen diajukan ke Volksraad. Amandemen pertama membahas terkait tambahan anggaran umum untuk tahun 1923, dengan ruang lingkup penetapan kenaikan jumlah subsidi dalam anggaran sebanyak 3,000 gulden untuk *Nederlandsch-Indische groep* (Kelompok Hindia-Belanda) dalam *Interparlementaire Unie* (Uni Antarparlemen), yang diajukan oleh Schumann, Kusumo Yudo, Bergmeijer, Cramer, dan Kan. Amandemen ini diterima Volksraad. Amandemen kedua adalah peninjauan kembali peraturan pemerintah yang dicatat pada bagian lain, sedangkan amandemen ketiga adalah peninjauan kembali undang-undang alat ukur yang diajukan oleh s' Jacobs, Rup, dan Westra dengan status amandemen yang juga diterima Volksraad.[158]

Mosi yang diajukan pada periode persidangan biasa kedua di tahun 1922 ini ada sebanyak 16 mosi. Mosi-mosi tersebut dicatat sesuai abjad, antara lain: A untuk *Algemeen Nieuws en Telegraaf Agentschap* (Aneta/Kantor Berita Hindia-Belanda); B untuk *Belasting* (pajak) dan *Bezoldiging* (remunerasi); D untuk *Decentralisatie* (desentralisasi); P untuk *Pensioenen* (pensiun); R untuk *Rechtschool* (sekolah hukum), *Regeeringsreglement* (peraturan pemerintah), dan *Regeeringsverklaring* (penjelasan pemerintah); S untuk *Schoolgelden* (uang sekolah); V untuk *Volksgezondheid* (kesehatan masyarakat) dan Volksraad; dan W untuk *Wachtgeldregeling* (peraturan uang tunggu).[159]

Beberapa mosi yang diajukan dengan pengusul kalangan Bumiputra, antara lain mosi tentang desentralisasi (perluasan hak pilih bagi Bumiputra)

Beberapa mosi yang diajukan dengan pengusul kalangan Bumiputra, antara lain mosi tentang desentralisasi (perluasan hak pilih bagi Bumiputra) yang diajukan oleh Dwijosewoyo sejak sidang biasa kedua tahun 1921, dengan keputusan ditunda hingga pembahasan pengaturan sistem pemilihan yang baru. Mosi lainnya adalah mosi untuk tidak memindahkan sekolah hukum di Batavia ke Surabaya yang diajukan oleh Van Gennep, Jayadiningrat, dan Ten Berge. Mosi yang berkaitan dengan penjelasan pemerintah mengenai perlunya penjelasan reformasi ketatanegaraan diajukan oleh Jayadiningrat, Schumann, Waworuntu, Kan, dan s' Jacobs sejak persidangan biasa kedua tahun 1918 dengan keputusan pembahasannya ditunda karena

157 *Ibid.*
158 *Ibid.*
159 *Ibid.*, hlm. 8-9

menunggu konstitusi ketatanegaraan yang baru, dan kemudian dicabut pada persidangan biasa kedua tahun 1922. Mosi lain yang berhubungan dengan penjelasan pemerintah adalah mengenai reformasi konsitusi ketatanegaraan di Hindia-Belanda yang bersamaan dengan pembentukan sebuah parlemen dengan wewenang legislatif penuh dan pemerintah yang bertanggung jawab pada parlemen tersebut. Mosi ini diajukan oleh Dwijosewoyo dan Cramer sejak persidangan biasa kedua tahun 1918 dengan keputusan pembahasannya ditunda karena menunggu konstitusi ketatanegaraan yang baru dan kemudian dicabut pada persidangan biasa kedua tahun 1922.

Mosi lain yang melibatkan anggota Volksraad dari kalangan Bumiputra adalah mengenai kesehatan masyarakat terkait perubahan dari *Burgerlijken Geneeskundige Dienst* menjadi *Dienst voor de Volksgezondheid* yang diajukan oleh Kies, Mandagie, Jayadiningrat, dan Cramer dengan keputusan diterima. Mosi lain adalah pemberian hak angket kepada Volksraad yang diajukan oleh Cramer, Waworuntu, Rivai, dan Kan dengan keputusan pembahasannya ditunda karena menunggu konstitusi ketatanegaraan yang baru dan kemudian dicabut pada persidangan biasa kedua tahun 1922.[160]

Surat-surat permohonan yang masuk ke Volksraad dalam periode persidangan biasa kedua tahun 1922 sebanyak 34 surat permohonan. Surat-surat tersebut dicatat secara alfabetis, dimulai dengan abjad A untuk *Adat-toestanden* (situasi Adat); B untuk *Belasting* (pajak), *Benoeming negeri-hoofd* (pengangkatan kepala negeri), dan *Benoemingsreglement* (peraturan pengangkatan); D untuk *Duurtetoeslag* (biaya tambahan); E untuk *Electric gemeentebedrijf* (perusahaan listrik kotapraja); G untuk *Grond* (tanah) dan *Gronden* (tanah); H untuk *Herplaatsing in 's Landsdienst* (penempatan kembali di dinas pemerintah) dan *Hollandsch Inlandsche school* (sekolah Belanda untuk Bumiputra); K untuk *Klachten* (keluhan); L untuk *Landraadvonnis* (keputusan pengadilan negeri); M untuk *Militaire Dienst* (dinas militer); O untuk *Ondersteuning verzoekschrift* (surat permohonan dukungan), O untuk *Ontheffing* (pembebasan), dan *Ontslag* (pemecatan); P untuk *Passagegelden* (uang perjalanan), *Pensioen* (pension), dan *Preventieve hechtenis* (penahanan preventif); S untuk *Schadevergoeding* (kompensasi), *Statuten-goedkeuring* (persetujuan hukum), dan *Studiebeurs* (beasiswa); dan W untuk *Weduwen-en wezenpensioen* (pensiun para janda dan yatim piatu). Persoalan yang terbanyak dari

Surat-surat permohonan yang masuk ke Volksraad dalam periode persidangan biasa kedua tahun 1922 sebanyak 34 surat permohonan.

160 *Ibid.*, hlm. 8-9

surat permohonan yang masuk adalah *Ontslag* (pemecatan), yaitu sebanyak enam surat, disusul dengan *Klachten* (keluhan) sebanyak lima surat.[161]

Sebagai contoh, surat permohonan yang berhubungan dengan *Ontslag* (pemecatan) dikirim oleh Raden Yudo, seorang komis pembantu dinas pos di Randublatung, tertanggal 29 April 1922. Ia bermaksud menanyakan alasan pemecatannya sebagai pegawai pemerintah. Surat permohonan berisi hal pemecatan lain berasal dari Kamsir alias Sosrodimejo, tertanggal 28 Juli 1922, yang juga menanyakan alasan pemecatannya sebagai kepala juru taksir di kantor pegadaian Sukaraja. Contoh surat permohonan yang berisi *Klachten* (keluhan) adalah surat dari beberapa kepala desa di Lampung yang mengeluhkan Asisten Residen Manggala dan surat keluhan dari Raden Haji Muhammad Rasyid di Teluk Betung, tertanggal 2 November 1922, yang mengeluhkan Demang di Kota Buni.[162]

Persoalan bahasa yang pernah muncul pada awal berdirinya Volksraad kembali muncul dalam persidangan Volksraad periode ini. Pada tahun 1922, dalam suatu sidang Volksraad, Agus Salim berpidato dengan menggunakan bahasa Melayu. Puluhan anggota Volksraad, terutama mereka yang berasal dari kalangan Eropa, terkejut saat menyaksikan hal tersebut. Apa yang dilakukan oleh Salim membuat geger para peserta sidang. Sebagai lembaga yang dibentuk untuk kepentingan Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda, ada semacam aturan tak tertulis yang mewajibkan semua anggota Volksraad untuk berbicara dalam bahasa Belanda. Agus Salim pada akhirnya ditegur oleh Ketua Volksraad, walaupun ia tak bergeming akan teguran tersebut. Ia beralasan bahwa sebagai anggota dewan, ia memiliki hak berbicara dalam bahasa Melayu. Namun, Salim tidak hanya berbicara dalam bahasa Melayu, tetapi juga mengkritik sikap pemerintah Belanda yang tidak memedulikan rakyat jajahannya, sebagai berikut: "Apa yang diputuskan Volksraad tidak diindahkan oleh pemerintah dan hilang lenyap, padahal Hindia-Belanda telah menyelamatkan Negeri Belanda dari kehancuran akibat Perang Dunia I,".[163]

Perbuatan Salim membuat gusar Bergmeijer, salah seorang anggota Volksraad dari perwakilan Zending. Bergmeijer lalu meminta Salim menerjemahkan kata "ekonomi" ke dalam bahasa Melayu. Ia mengira dan berharap bahwa Salim akan menghentikan pidatonya

Persoalan bahasa yang pernah muncul pada awal berdirinya Volksraad kembali muncul dalam persidangan Volksraad periode ini.

161 *Ibid.*, hal. 10-14.
162 *Ibid.*
163 Panitia Buku Peringatan, 1996, *Seratus Tahun Haji Agus Salim* (Jakarta: Sinar Harapan), hlm. 69

karena malu tidak dapat menjawab pertanyaannya. Namun, dengan cerdik Salim menjawab tantangan Bergmeijer. Salim akan menjawab pertanyaan Bergmeyer dengan satu syarat, yaitu: "Tuan sebutkan dulu apa kata "ekonomi" itu di dalam bahasa Belanda,". Bergmeijer terdiam, lalu Salim meneruskan pidatonya. Salim telah mengetahui pula bahwa pada masa itu memang belum ada padanan kata bahasa Belanda yang sesuai untuk kata "ekonomi".[164]

2.7 Volksraad periode 1923-1927: Penerapan Sistem Pemilihan Anggota Volksraad dan Pengaruh Perubahan *Regerings-Reglement 1925*

Sidang luar biasa pertama Volksraad tahun 1923 dibuka pada 2 Mei 1923. Posisi Ketua Volksraad ketika itu masih dipegang oleh Mr. Dr. W.M.G. Schumann, dengan anggota sebanyak 36 orang. Anggota Volksraad pada periode ini adalah Aay, Abdul Rivai, Ten Berge, Bergmeijer, Burer, Dahler, Delprat, Jayadiningrat, Dwijosewoyo, Engelenberg, Houtsma, s' Jacobs, Kamil, Kan, Kerkkamp, Khouw Kim An, Kies, Kusumo Yudo, Laoh, Mandagie, De Queljoe, Rup, Sajirun, Salim, Van Sandick, Surakusumah, Suyono, Sutatmo Suriokusumo, Sutadi, Soselisa, Sosrohadiwijoyo, Valkenburg, Westra, dan Wiranata Kusuma. Sementara itu, wakil dari pemerintah adalah Schrieke.[165]

Pada periode 1923 ini mulai diterapkan *kiesregeling* atau peraturan pemilihan yang ditujukan kepada warga Bumiputra di Jawa dan Madura. Wilayah tersebut dibagi menjadi empat *kieskring* (daerah pemilihan), antara lain: (1) I, *West–Java* (Jawa Barat); (2) II, *Midden-Java* (Jawa Tengah); (3) III, *Oost-Java* (Jawa Timur); dan (4) IV, *Vorstenlanden* (Daerah Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta). Daerah pemilihan Jawa Barat terdiri atas Banten, Batavia, Kabupaten Priangan, dan Cirebon, dengan jumlah pemilih Bumiputra sebanyak kurang lebih sembilan juta orang yang akan diwakili oleh tiga calon untuk menjadi anggota Volksraad. Para pemilih, selain kelompok penduduk yang disebutkan sebelumnya, juga termasuk anggota *Geweestelijke Raad* (dewan lokal), yaitu:[166]

Pada periode 1923 ini mulai diterapkan *kiesregeling* atau peraturan pemilihan yang ditujukan kepada warga Bumiputra di Jawa dan Madura.

164 *Ibid.*
165 *Handelingen van den Volksraad, De Eerste Buitengewone Zitting 1923*, hlm. 3
166 *Ibid.*, Onderwerp 2, hlm. 3

I. *Geweestelijke Raad* Banten, dengan tujuh anggota
II. *Geweestelijke Raad* Batavia, dengan lima anggota
III. *Geweestelijke Raad* Kabupaten Priangan, dengan tujuh anggota
IV. *Geweestelijke Raad* Cirebon, dengan lima anggota
V. *Gemeente* (Kota Praja) *van Batavia*, dengan delapan anggota
VI. *Gemeente van Mr. Cornelis*, dengan empat anggota
VII. *Gemeente van Buitenzorg*, dengan empat anggota
VIII. *Gemeente van Bandung*, dengan lima anggota
IX. *Gemeente van Sukabumi*, dengan tiga anggota
X. *Gemeente van Cirebon*, dengan empat anggota

Jumlah keseluruhan pemilih di daerah pemilihan I Jawa Barat adalah sebanyak 52 orang.

Selanjutnya, Daerah Pemilihan II Jawa Tengah terdiri atas:

1. *Geweestelijke Raad van Pekalongan*, dengan empat anggota
2. *Geweestelijke Raad van Semarang*, dengan sembilan anggota
3. *Geweestelijke Raad van Rembang*, dengan empat anggota
4. *Geweestelijke Raad van Banyumas*, dengan lima anggota
5. *Geweestelijke Raad van Kedu*, dengan tujuh anggota
6. *Gemeenteraad van Pekalongan*, dengan empat anggota
7. *Gemeenteraad van Tegal*, dengan empat anggota
8. *Gemeenteraad van Semarang*, dengan delapan anggota
9. *Gemeenteraad van Salatiga*, dengan dua anggota
10. *Gemeenteraad van Magelang*, dengan empat anggota

Jumlah pemilih di Daerah Pemilihan II Jawa Tengah sebanyak 51 pemilih.[167]

Sementara di Daerah Pemilihan III Jawa Timur komposisinya adalah sebagai berikut:

1. *Geweestelijke Raad van Surabaya*, dengan enam anggota
2. *Geweestelijke Raad van Madura*, dengan empat anggota
3. *Geweestelijke Raad van Madiun*, dengan lima anggota
4. *Geweestelijke Raad van Kediri*, dengan lima anggota
5. *Geweestelijke Raad van Pasuruan*, dengan enam anggota
6. *Geweestelijke Raad van Besuki*, dengan empat anggota
7. *Gemeenteraad van Surabaya*, dengan delapan anggota
8. *Gemeenteraad van Mojokerto*, dengan tiga anggota
9. *Gemeenteraad van Pasuruan*, dengan empat anggota

167 *Ibid.*

10. *Gemeenteraad van Malang*, dengan empat anggota
11. *Gemeenteraad van Probolinggo*, dengan empat anggota
12. *Gemeenteraad van Madiun*, dengan empat anggota
13. *Gemeenteraad van Kediri*, dengan empat anggota
14. *Gemeenteraad van Blitar*, dengan empat anggota

Jumlah keseluruhan pemilih di Daerah Pemilihan III Jawa Timur adalah sebanyak 65 pemilih.[168]

Di Daerah Pemilihan IV, Vorstenlanden hanya terdiri atas *Geweest* Surakarta dan Yogyakarta dengan jumlah penduduk Bumiputra sekitar tiga juta orang yang akan diwakili oleh satu orang wakil di Volksraad.[169]

Di luar Jawa dan Madura, terdapat Daerah Pemilihan V (*Zuid-Sumatra*/Sumatra Selatan), VI (Minangkabau), VII (Tanah Batak), VIII (Pantai Timur Sumatra, Riau, dan daerah bawahan), IX (*Oost-Borneo*/Borneo Timur), X *Celebes* (Sulawesi), XI (Kepulauan Maluku), dan XII (Bali dan Lombok).[170]

Daerah Pemilihan Sumatra Selatan terdiri atas *gewesten* distrik Lampung, Bengkulu, Palembang, Jambi, Bangka dan daerah bawahan, termasuk Belitung dengan jumlah penduduk Bumiputra sekitar 1,5 juta orang. Para pemilih termasuk anggota dewan lokal yaitu:

1. *Gemeenteraad van Palembang*, dengan lima anggota
2. *Onderafdeelingraaad van Komering Ilir*, dengan 19 anggota
3. *Onderafdeelingraad van Ogan Ilir*, dengan 25 anggota
4. *Onderafdeelingraad van Lematang Ilir*, dengan 21 anggota

Maka, jumlah pemilih untuk Daerah Pemilihan V Sumatra Selatan sebanyak 70 pemilih.[171]

Di Daerah Pemilihan VI Minangkabau, terdapat *geweest* Pantai Barat Sumatra dengan jumlah penduduk Bumiputra sekitar 1,5 juta orang, termasuk anggota dewan lokal yaitu:

1. *Gemeenteraad van Padang*, dengan lima anggota
2. *Gemeenteraad van Fort de Kock*, dengan tiga anggota
3. *Gemeenteraad van Sawah Lunto*, dengan tiga anggota
4. *Onderafdeelingraad van Padang Panjang*, dengan 27 anggota

Jumlah pemilih untuk Daerah Pemilihan VI Minangkabau adalah sebanyak 38 pemilih.[172]

Di Daerah Pemilihan VII Tanah Batak, terdapat *geweest* Tapanuli dengan jumlah penduduk Bumiputra sekitar 800,000 orang. Para

Di Daerah Pemilihan IV, Vorstenlanden hanya terdiri atas *Geweest* Surakarta dan Yogyakarta dengan jumlah penduduk Bumiputra sekitar tiga juta orang

168 *Ibid.*
169 *Ibid.*
170 *Ibid.*
171 *Ibid.*
172 *Ibid.*

pemilih ini termasuk ke dalam *Onderafdeelingraad van Angkola dan Sipirok* yang anggotanya mencapai 24 orang.

Di Daerah Pemilihan VIII Pantai Timur Sumatra, Riau, dan daerah bawahan terdapat *geweest* dengan penduduk Bumiputra sekitar 1,200,000 orang. Para pemilih termasuk anggota dewan lokal, yaitu:

1. *Raad van het Cultuurgebied* (Dewan Daerah Perkebunan), dengan empat anggota
2. *Gemeenteraad van Medan*, dengan lima anggota
3. *Gemeenteraad van Tebing Tinggi*, dengan tiga anggota
4. *Gemeenteraad van Binjai*, dengan tiga anggota
5. *Gemeenteraad van Tanjung Balai*, dengan tiga anggota
6. *Gemeenteraad van Pematang Siantar*, dengan tiga anggota

Jumlah pemilih di Daerah Pemilihan VIII Pantai Timur Sumatra, Riau, dan daerah bawahan adalah sebanyak 21 pemilih.[173]

Di Daerah Pemilihan VIII Pantai Timur Sumatra, Riau, dan daerah bawahan terdapat *geweest* dengan penduduk Bumiputra sekitar 1,200,000 orang

Di Daerah Pemilihan IX Oost-Borneo, termasuk *geweest Zuid-en Oosterafdeling Borneo* (Borneo Selatan dan Timur) dengan penduduk Bumiputra sebanyak hampir satu juta orang, termasuk dewan lokal, yaitu *Gemeenteraad van Banjarmasin* sebanyak empat anggota dan *Onderafdeelingraad van Barabai* sebanyak 26 anggota, sehingga jumlah keseluruhannya adalah 30 pemilih.[174]

Di Daerah Pemilihan X Celebes, termasuk *geweest* Manado, Celebes, dan daerah bawahan dengan jumlah penduduk Bumiputra sekitar tiga juta orang. Berbeda dengan daerah pemilihan lain di luar Jawa dan Madura, dari daerah ini ditentukan dua calon wakil.[175] Para pemilih termasuk anggota dewan lokal, yaitu:

1. *Minahasaraad*, sebanyak 36 anggota
2. *Gemeenteraad van Makassar*, sebanyak lima anggota
3. *Gemeenteraad van Manado*, sebanyak tiga anggota

Jumlah pemilih di Daerah Pemilihan X Celebes adalah sebanyak 44 pemilih.[176]

Di Daerah Pemilihan XI Kepulauan Maluku, termasuk *Geweest Amboina dan Nieuw-Guinea* dengan jumlah penduduk Bumiputra sebanyak 600,000 orang. Para pemilih termasuk anggota dewan lokal, yaitu *Ambonraad* sebanyak 21 anggota dan *Gemeenteraad van Ambon* sebanyak dua anggota. Jumlah keseluruhan pemilih di Daerah

173 *Ibid.*
174 *Ibid.*
175 *Ibid.*
176 *Ibid.*

Pemilihan XI Kepulauan Maluku adalah sebanyak 23 pemilih. Sementara itu, di Daerah Pemilihan XII Bali dan Lombok jumlah penduduk Bumiputra-nya adalah sebanyak 1,5 juta penduduk. Para pemilih dari *Onderafdeelingraad van Karangasem* adalah sebanyak 33 anggota.[177]

Dengan sistem pemilihan seperti ini, ada 30 kursi di Volksraad yang dapat ditempati oleh warga pribumi. Dua puluh kursi diperoleh melalui pemilihan, sementara sepuluh kursi lainnya didapatkan melalui proses pengangkatan.[178] Dua puluh kursi yang diperoleh melalui pemilihan di Daerah Pemilihan adalah sebagai berikut:[179]

1. Daerah Pemilihan Jawa Barat sebanyak tiga wakil
2. Daerah Pemilihan Jawa Tengah sebanyak tiga wakil
3. Daerah Pemilihan Jawa Timur sebanyak empat wakil
4. Daerah Pemilihan Vorstenlanden sebanyak satu wakil
5. Daerah Pemilihan Sumatra Selatan sebanyak satu wakil
6. Daerah Pemilihan Minangkabau sebanyak satu wakil
7. Daerah Pemilihan Tanah Batak sebanyak satu wakil
8. Daerah Pemilihan Pantai Timur Sumatra, Riau, dan daerah bawahan sebanyak satu wakil
9. Daerah Pemilihan Oost-Borneo sebanyak satu wakil
10. Daerah Pemilihan Celebes sebanyak dua wakil
11. Daerah Pemilihan Kepulauan Maluku sebanyak satu wakil
12. Daerah Pemilihan Bali dan Lombok sebanyak satu wakil

Pada tanggal 21-23 Desember 1923, diadakan rapat di Kantor Pemilihan mengenai para calon anggota Volksraad.

Pada tanggal 21-23 Desember 1923, diadakan rapat di Kantor Pemilihan mengenai para calon anggota Volksraad. Dari data para calon yang diterima dari seluruh wilayah di Hindia-Belanda tercatat nama-nama sebagai berikut:

Verkiezing Europeanen en Vreemde Oosterlingen [Pemilihan Orang Eropa dan Timur Asing]

S.J. Aay (Mr. Cornelis), V. Ahn, Cigombong (Buitenzorg), P.C. Arends, Asisten Residen (Padang Panjang), Mr. E.C.M.A. Batta (Indramayu), A.B. Ten Berge (saat ini sedang cuti ke Eropa), Mr. A.S. Block (Bandung), J.A.M.

177 *Ibid.*
178 *Ibid.*
179 *Ibid.*, hlm 1.

Bruineman (Weltevreden), W. Burer (Buitenzorg), P.F. Dahler (Weltevreden), Dr. O. Deggeler (Weltevreden), H. Deinum (Cianjur), A.J. van Deventer (Salatiga), G.J. Dijkerman (Surabaya), A.J.N. Engelenberg (Weltevreden), H.E.K. Ezerman (Pematang Siantar), F.L.P.G. Fournier (Weltevreden) , Dr. R.A.A. Fruin (Medan), E.J.L. Fuhr (Madiun), Mr. A. van Gennep (Surabaya), J.E. van Gogh (Bandung), G.F.E. Gonggrijp (Sawah Lunto), E. Th. Harkink (Weltevreden), K.P. Harting (Pasuruan), N. VV. van Hartingveldt (Cirebon), Mr. C.C. van Helsdingen (Weltevreden), J.M.M. Hetharia (Weltevreden), J.G. van Heyst (Buitenzorg), F.H. de Hoog (Weltevreden), Mr. H. s'Jacob (Weltevreden), H.C. Kakebeeke (Semarang), Ir. Th. Karsten (Ungaran), E.A. Kayadu, Kepala Sekolah Ambon (Amboina), H.C. Kerkkamp (Weltevreden), C.H.M. Kies (Weltevreden), W.F.J. Kroon (Bandung), Lambui Jamaludin Rasad (Fort de Kock), F. Laoh (Weltevreden), L.H. Levert (Purwakarta), Tjam Tien Lie (Weltevreden) L.J. Mamahit, (Mojokerto), J.L. Manusama, Pegawai Pos (Riau dan daerah bawahan), V.J. van Marie, (Bandung), J.A. Monod de Froidevüle (Weltevreden), Dr. G.J. Nieuwenhuis (saat ini sedang cuti ke Eropa), K. Nikijuluw (Amboina), J.J.B. Oostmeier (Cikudapateuh), Mr. W. Ouwerkerk (Weltevreden), A. Pattipeilohy, Ketua Pengurus Ambon Studiefonds (Weltevreden), W.A. Pénard (Weltevreden), Ir. L.J. Polderman (Semarang), J.W. Meyer Ranneft (Weltevreden), Abdul Rivai, Dokter (Semarang), B. Rup (Surabaya), J.J.G.E. Rückert (Semarang), P. Rugebregt (Weltevreden), Hadji A. Salim (Weltevreden), A.P. Salomons Jr. (Weltevreden), H.P. Salomons Jr. (Weltevreden), Dr. J. Schmutzer (Buitenzorg), Ir. H.J.J. Schneider (Bandung), C.A. Schnitzler (Magelang), H.P. Schouten (Tegal), Ph. T.L. Sigar (Manado), J.A. Soselisa (Weltevreden), J.E. Stokvis (Weltevreden), J. Stormer (Manado), Dr. W.K. Tehupeiory (Mr. Cornelis), G.B. Tiekstra (Tomohon), G. Topee (Semarang), Dr. R. Tumbelaka (Batavia), A.M. Valkenburg (Weltevreden), G. van der Veen (Weltevreden), J.G. Vergouwen (Sibolga), J.L.

Vleming Jr. (Weltevreden), J.W. Vorderman (Mr. Cornelis), H.M. Waworoentoe (Semarang), J. van der Weyden (Bandung), H.E. Weitkamp (Yogyakarta), F.H.K. Zaalberg (Weltevreden), F.A. Zeydel (Semarang), F.H. Zeydel (Mr. Cornelis), G.J. Zuyderhoff (Malang), R. Abas Soeria Nata Atmaja, Wakil Inspektur *Volkscredietwezen* (Garut), Abdul Hakim, Dokter (Padang), Abdul Muis, Jurnalis (Padang), Abdul Rasyid, Dokter Kota Nopan (Tapanuli), R. Achmad, Wedana (Batavia), A.B. Andu, Dokter (Manado), H.J.D. Apituley, Dokter Utrecht (Holland), R.M.A.P. Ariodinoto, Bupati (Cirebon), R. Admadinata (Cimahi), Darwis Gelar Datuk Mojolelo, Pangkalan Kota Baru (Sumatra), R.A.A. Achmad, Bupati (Serang), M. Gunawan Mangunkusumo, Dokter (Palembang), Pangeran Hario Hajiwijoyo (Surakarta), I Dewa Ngurah Hasti Sedahan Agung, Singaraja (Bali), Kajamudin Gelar Raja Gunung, Pengawas Sekolah (Medan), M. Kadmirah, Karnadija Pengawas Sekolah (Bandung), P.T.A. Kusumo Yudo, Bupati Ponorogo, R. Kusumasujana, Dokter (Toboali), Lanjumin Gelar Datu' Tumenggung (Weltevreden), M. Latip Kartosubroto, Guru HIS (Pekalongan), Sutan Gelar Datuk Rangkaya Maharaja, *Demang der Bahari-districten* (Pantai Barat Sumatra), P.A. Mandagie, Kepala Distrik (Manado), J.U. Mangowal, Guru (Tomohon), A.A. Maramis, anggota *Minahasaraad* (Manado), R. Marjono, Kapten Infantri (Gombong), Marzuki, Dokter Tanjung Pinang (Riau), Masri, Kaum Betawi (Weltevreden), Mohamad Husni, Pegawai KPM (Weltevreden), Mohamad Rusad Gelar Sutan Perpatih, Demang (Padang), Mulia Todong Gelar Sutan Gunung, Kota Nopan (Tapanuli), Teungku Musa, Kepala Distrik Tanjung Balai (Pantai Timur Sumatra), R.M. Mohamad, Arsitek BOW (Weltevreden), Mohamad Yusuf, Dokter (Weltevreden), M. Notohadiprojo, Patih (Sidoarjo), J.A. Patty, Redaktur "Menna Moeria" (Weltevreden), Ch. Ponto, Penguasa Kandhar (Taruna), P.C.S. Pranata, Guru (Weltevreden), R. Odang Prawiradireja, Arsitek (Rembang), R.P. de Queljoe, Bupati Porto (Ambon), Dr. R.T. Rajiman Wiriodiningrat, Dokter Istana (Solo), Cokorda Raka, Punggawa Ubud (Gianyar, Bali), Dr. G.S.S.J. Ratu Langie, Sekretaris Minahasaraad (Manado),

L.L. Rahatta, Bupati Soya (Ambon), A.C. Saerang (Langowan), Sarengat, Insinyur BOW (Mojokerto), R. Sastrowijono, Penerjemah (Yogyakarta), R. Slamet (Semarang), Maharaja Soangkupon, Komisaris BB Tanjung Balai (Pantai Timur Sumatra), R. Otto Subrata, Komisaris S.S. (Bandung), R.M. Sudarto Mangku Subroto, Wakil Ketua Landraad (Cirebon), R.T.A. Suyono, Bupati (Pasuruan), R.M.J. Suyadi, Dokter Hewan (Magelang), R. Sumarjo, Guru Pertanian (Kuningan), M. Suparman, Wedana Slawi (Tegal), R.T. Suriadi, Bupati (Purworejo), R.T.R. Suria Diningrat, Bupati (Cianjur), R. Rangga Suria Miharja, Wedana Pacet (Kabupaten Cianjur), R. Surio, Patih (Trenggalek), R.M.A. Suryo Atmo, Paku Alaman (Yogyakarta), M. Sutisnasenjaya, Guru HIS (Tasikmalaya), R. Sutomo, Dokter (Surabaya), R. Suwandi (Weltevreden), Atik Suwardi, Guru HIS (Indramayu), Sopian Rasad, Dokter (Solok), R.T.A. Sosrodiprojo, Bupati (Wonosobo), R. Ng. Sosrohadikusumo (Tegal), R.T. Sosrohadiwijoyo, Bupati (Demak), A.H.D. Supit, Kepala Distrik (Tondano), Zacharias Talumepa, Guru (Manado), J.R. Titaley, Asisten Pemerintahan (Saparua), Cipto Mangunkusumo, Dokter (Bandung), R.T. Cokrosutomo, Bupati (Temanggung), I. Tupamahu, Guru Sekolah Kristen (Saparua), J.J. Tupamahu, Dokter (Saparua), M. Wibawa, Asisten Wedana (Tulangan), R.E.S. Winatasastra, Guru (Yogyakarta), R. Muin Wiradinata, Wakil Dokter Hewan (Purwakarta), R.A.A. Wiranata Kusuma, Bupati (Bandung), dan R.Wiryosaputro (Gombong).[180]

Berdasarkan daftar nama, pekerjaan, dan daerah asal calon anggota Volksraad di atas, terlihat keragaman profesi yang mereka sandang. Mulai dari guru, dokter, jurnalis, pegawai pemerintah, hingga pejabat pemerintah.

Dari hasil pemungutan suara pada 1924, pembagian jumlah suara pemilih ketika itu adalah sebagai berikut:

1. Para pemilih PEB dan IEV sebanyak 500 suara
2. Para pemilih radikal sebanyak 104 suara
3. Para pemilih NIVB sebanyak 95 suara
4. Para pemilih BB sebanyak 79 suara

180 "De Volksraadverkiezingen", *De Indische Courant*, 16 Februari 1924, hlm 4

Namun, tidak semua pemilih menentukan pilihannya, sebab terdapat beberapa kartu pemilihan yang tidak ditindaklanjuti. Misalnya, terdapat sejumlah kartu yang hanya diisi oleh tulisan "*Toeroet di Betawi*".[181] Entah apakah maksudnya si pemilih mengikuti saja situasi di Batavia, atau memang tidak bermaksud memilih sama sekali.

Pada periode persidangan biasa kedua tahun 1923, tercatat 52 surat permohonan yang masuk ke Volksraad. Catatan persoalan dari surat permohonan disusun menurut abjad dari A hingga Z seperti berikut ini: A untuk *Aanplantingen* (penanaman); B untuk *Belasting* (pajak), *Benoeming* (pengangkatan), dan *Bezuiniging* (penghematan); D untuk *Doleanties* (keluhan) dan *Duurtoeslag* (biaya tambahan); H untuk *Herbenoeming* (pengangkatan kembali) dan *Huurprijs* (harga sewa); I untuk *Inlandsche verponding* (kepemilikan mutlak bagi bumiputra) dan *Inschuiving* (penarikan kembali); K untuk *Klachten* (keluhan); O untuk *Onderstand* (dukungan), *Ondersteuning* (bantuan), *Onderzoek* (penyelidikan), *Ontslag* (pemecatan), dan *Opheffing* (pembatalan); P untuk *Pensioen* (pensiun), *Pensioenaanvraag* (permohonan pensiun), *Pensioenfonds* (dana pensiun), *Plaatsing* (penempatan), *Positieverbetering* (perbaikan jabatan), dan *Protest* (protes); R untuk *Rijstverbouw* (penanaman padi); S untuk *Schadeloosstelling* (kompensasi) dan *Schadevergoeding* (ganti rugi); T untuk *Toewijzing huis* (rumah alokasi); U untuk *Uitbetaling* (pembayaran); V untuk *Vergaderverbod* (larangan berkumpul/rapat), *Verlof* (cuti), dan *Vervoer* (transportasi); serta W untuk *Wachtgeld* (uang tunggu). Persoalan yang terbanyak adalah *Benoeming* (pengangkatan) dan *Ontslag* (pemecatan), yang masing-masingnya terdapat lima surat.[182]

Informasi mengenai surat-surat permohonan yang masuk ke Volksraad disampaikan dalam sidang pembukaan pada 2 Mei 1923. Contoh surat permohonan tentang *benoeming* (pengangkatan) berasal dari Haji Abdulgani di Bulukumba, tertanggal 26 Januari 1923. Dalam suratnya, ia memohonkan informasi terkait mengapa ia tidak diangkat menjadi *penghoeloe-landaardkalif*. Surat permohonan lainnya adalah surat dari Mohamad Zaman gelar Sutan Zainal, Guru Kepala di Sidinginan, *Onderafdeling Bagan Siapi-api*, untuk mempromosikan dirinya sebagai administrator Rambah. Surat permohonan lainnya adalah surat dari sejumlah penduduk Pelauw, tertanggal 11 April 1923, yang mengajukan *klachten* (keluhan) terhadap Bupati Pelauw, Maluku.[183]

Namun, tidak semua pemilih menentukan pilihannya, sebab terdapat beberapa kartu pemilihan yang tidak ditindaklanjuti.

181 "De Volksraadverkiezingen", De Indische Courant, 16 Februari 1924, hlm 4
182 Handelingen van de Volksraad, Tweede Gewone Zitting 1923, index, hlm. 7-17
183 Handelingen van den Volksraad, De Eerste Buitengewone Zitting 1923, hlm. 7

Sebagai contoh, untuk surat permohonan yang berkaitan dengan *Ontslag* (pemecatan), berasal dari Paulus Dominggus Dias pada tanggal 4 Agustus 1923 yang menanyakan alasan pemecatannya sebagai *Onderdistricthoofd* (Kepala Kecamatan) di Koyoa, Ternate. Surat permohonan berkaitan dengan pemecatan lain berasal dari Ompu Sampider yang bertempat dan tanggal Bakara pada 8 April 1923 yang menanyakan alasan pemecatannya sebagai Kepala Kampung Huta Parhorian, Tapanuli.[184]

Amandemen yang masuk pada periode persidangan kedua di tahun 1923 adalah berjumlah 16 amandemen. Amandemen-amandemen tersebut meliputi ordonansi di provinsi dan kabupaten, seperti satu amandemen tentang ordonansi kuli di Pantai Timur Sumatra, satu amandemen tentang pengaturan bantuan di Pantai Timur Sumatra, tiga amandemen mengenai pertambangan batu bara di Zuid-Oost Borneo, serta sebelas amandemen mengenai ordonansi pemilihan yang terbagi atas ordonansi pemilihan di tingkat provinsi dan ordonansi di tingkat pemilihan di kabupaten.[185]

... amandemen ordonansi kuli di Pantai Timur Sumatra, diajukan oleh Kerkkamp, Aay, dan Suyono terkait dengan keputusan hakim yang layak, namun mosi tersebut ditolak.

Sebagai contoh amandemen ordonansi kuli di Pantai Timur Sumatra, diajukan oleh Kerkkamp, Aay, dan Suyono terkait dengan keputusan hakim yang layak, namun mosi tersebut ditolak. Atau, amandemen ordonansi pemilihan di tingkat provinsi yang mengajukan persoalan terkait tidak perlunya pemisahan daerah pemilihan di tingkat provinsi yang diajukan oleh Kerkkamp, Jayadiningrat, dan Wiranata Kusuma dengan keputusan ditolak dan tidak berlaku. Juga amandemen-amandemen lainnya, seperti ordonansi pemilihan di tingkat kabupaten terkait dengan tidak adanya calon anggota dari kalangan Bumiputra yang diajukan oleh Stokvis, Salim, dan Dahler dengan keputusan yang tidak berlaku. Amandemen terkait ordonansi pemilihan di tingkat kabupaten, khususnya mengenai kemungkinan untuk memilih perempuan diajukan oleh Engelenberg, Bergmeijer, dan Rup dengan keputusan diterima. Namun, amandemen dengan perihal sama yang diajukan oleh Kerkkamp, Jayadiningrat, dan Wiranata Kusuma diputuskan untuk ditarik.[186]

Mosi yang diajukan pada periode persidangan biasa kedua tahun 1923 adalah sebanyak 16 mosi. Mosi-mosi yang masuk terdiri atas *Arbeidsinspectie* (Inspektorat Ketenagakerjaan), *Assistenregeling* (Pengaturan Bantuan), *Belastingen in de Vorstenlanden* (Pajak di

184 Handelingen van de Volksraad, Tweede Gewone Zitting 1923, index, hlm. 12
185 Ibid., hlm. 4-5
186 Ibid.

Vorstenlanden), *Belastinginspecteur* (Inspektur Pajak), *Decentralisatie* (Desentralisasi), *Inlandsche Verponding* (Kepemilikan Tetap bagi Bumiputra), *Koelie-ordonantie* (Peraturan Perundang-undangan tentang Kuli), *Levensverzekeringsmaatschappij* (Perusahaan Asuransi Jiwa), *Poeasa Vacantie* (Liburan Puasa), *Regentschapraden* (Dewan Kabupaten), *Staatsexploitatie* (Eksploitasi Negara), *Zegelverordening* (Peraturan Segel). Mosi yang paling banyak adalah mosi mengenai ordonansi kuli yang muncul sebanyak tiga mosi, mosi mengenai dewan kabupaten, serta mosi peraturan segel yang masing-masingnya memunculkan dua mosi.[187]

Mosi tersebut berisikan tuntutan pembentukan komisi perubahan ordonansi kuli untuk membahas kontrak imigrasi yang dipersingkat.

Adapun contoh mosi yang masuk pada periode persidangan biasa kedua tahun 1923 yakni mosi ordonansi kuli yang diajukan oleh Stokvis, Salim, Sutadi, Dahler, dan Dwijosewoyo. Mosi tersebut berisikan tuntutan pembentukan komisi perubahan ordonansi kuli untuk membahas kontrak imigrasi yang dipersingkat. Mosi tersebut ditolak. Sementara itu, mosi yang berkaitan dengan pajak di Vorstenlanden berisikan penundaan pembahasan nota kedua usulan tersebut yang diajukan oleh Dwijosewoyo, Sutadi, dan Suriokusumo dengan keputusan diterima. Contoh mosi lain adalah mosi tentang liburan puasa dengan isi pembatalan liburan tersebut untuk sementara waktu, yang diajukan oleh Jayadiningrat, Kusumo Yudo, Ariodinoto, dan Kamil.[188]

Pada periode persidangan biasa kedua tahun 1923, para anggota dari kalangan Bumiputra yang mengajukan mosi adalah Kusumo Yudo, Dwijosewoyo, Sutadi, Suriokusumo, Wiranata Kusuma, Salim, Ariodinoto, Kamil, dan Jayadiningrat.[189] Mereka mengajukan berbagai persoalan dalam sidang Volksraad.

Sidang biasa pertama Volksraad pada tahun 1924 dibuka oleh Gubernur Jenderal Dirk Fock yang sebelumnya disambut oleh Komisi Penyambutan yang terdiri dari Ariodinoto, Dwijosewoyo, ‘s Jacobs, dan Van der Weyden.[190]

Dalam pidato sambutannya, salah satu persoalan menarik yang dibahas oleh Gubernur Jenderal Dirk Fock di antaranya adalah isu penghematan anggaran, berita pengeboran minyak oleh *Nederlandsch-Indische Aardoliemaatschappij* di Jambi, pembukaan sekolah-sekolah adalah kasus penipuan, serta penggelapan di kalangan pejabat:

187 Ibid., hlm. 5-6
188 Ibid., hlm. 6
189 Ibid., hlm. 5-6
190 Handelingen van den Volksraad, De Eerste Gewone Zitting 1924, hlm. 4

> *"Ten zeerste wordt betreurd, dat in den laatsten tijd opzienbarende gevallen van fraudes en verduistering zijn voorgekomen en dat zelfs onder de hoogere politie-ambtenaren, wier integriteit haast nog het meest boven alle verdenking moest staan, zeer ernstige feiten zijn gebleken. De Regeering acht het plicht om met de meeste gestrengheid op te treden tegen elke oneerlijkheid, tegen elke onregelmatigheid, waaraan landsdienaren zich op financieel gebied schuldig maken, en om onder aanzien des persoons te straffen, die straf verdient."*[191]
>
> [Sangat disesalkan bahwa, akhir-akhir ini, ada kasus-kasus penipuan dan penggelapan yang mencolok, bahkan di kalangan para pejabat polisi yang integritasnya hampir paling buruk dari semua kecurigaan. Hal tersebut ternyata merupakan fakta yang sangat serius. Pemerintah wajib bertindak dengan sangat keras terhadap ketidakjujuran, melawan ketidakberesan yang dilakukan oleh pejabat di bidang keuangan dan menghukum orang yang pantas dihukum.]

Tahun 1924 merupakan pertama kali para wakil pribumi di Volksraad ditentukan melalui sistem pemilihan. Sejumlah daerah diwakili oleh wakilnya masing-masing. Sebagai contoh, jumlah kursi untuk keseluruhan Sumatera hanya diwakili satu kursi atau satu orang. Sementara itu, jumlah calon dari wilayah tersebut cukup banyak, antara lain Dr. Abdul Rasyid (Dokter di Kotanopan), Mr. Todung gelar Sutan Gunung Mulia (Guru HIS Kotanopan), Mr. Mangaraja Soangkupon (Komisaris BB Tanjung Balai), Dr. Abdul Hakim (Dokter di Padang), Kajamudin gelar Raja Gunung (Pengawas Sekolah, Medan).[192] Dari sejumlah calon wilayah Sumatera, sebagai kandidat yang terpilih pada pemilihan di daerah adalah Abdul Muis dari Pantai Barat Sumatera.

Tahun 1924 merupakan pertama kali para wakil pribumi di Volksraad ditentukan melalui sistem pemilihan. Sejumlah daerah diwakili oleh wakilnya masing-masing.

Pembukaan sidang biasa pertama berlangsung pada 20 Mei 1924 dengan ketua Mr. Dr. W.M.G. Schumann. Anggota Volksraad adalah sebanyak 40 orang yaitu Aay, Ariodinoto, Delprat, Jayadiningrat,

191 Ibid., hlm. 6-7
192 "De Volksraadverkiezingen", De Indische Courant, 16 Februari 1924, hlm. 4

Dwijosewoyo, Engelenberg, Fruin, Fűhri, Hadiwijoyo, Han Tiauw Tjong, Van Helsdingen, De Hoog, 's Jacobs, Kan, Kayadu, Kerkkamp, Kies, Kusumo Yudo, Laoh, Van Lonkhuyzen, Mangku Subroto, Marjono, Meyer Ranneft, Musa, Rivai, Schmutzer, Schneider, Suyono, Suyadi, Suroso, Sutadi, Sosrodiprojo, Sosrohadiwijoyo, Stokvis, Talma, Cokorda, van der Weyden, Wiessing, dan Zaalberg.[193]

Setelah melakukan 33 kali persidangan, sidang ke-34 yang merupakan sidang penutupan berlangsung pada 19 Juli 1924.[194] Anggota Volksraad pada persidangan tahun 1924-1925 dari kalangan Bumiputra dan Tionghoa adalah sebagai berikut:[195]

No.	Nama	Pekerjaan	Tempat tinggal	Mulai bertugas
1.	R.M.A.P. Ardiodinoto	Bupati	Cirebon	20 Mei 1924
2.	R.A.A. Jayadiningrat	Bupati	Weltevreden	20 Mei 1924
3.	M.W. Dwijosewoyo	Partikelir, Sekretaris Sultan Yogyakarta	Yogyakarta	20 Mei 1924
4.	P.H. Hadiwijoyo	Kepala Bagian Keraton	Surakarta	20 Mei 1924
5.	Dr. Ir. Han Tiauw Tjong	Insinyur	Pekalongan	20 Mei 1924
6.	Hok Hoei Kan	Pemilik lahan	Weltevreden	20 Mei 1924
7.	E.A. Kayadu	Kepala Ambon Burgersschool	Ambon	20 Mei 1924
8.	Khouw Kim An	Mayor Cina Titular	Weltevreden	26 Mei 1924
9.	P.T.A. Kusumo Yudo	Bupati	Ponorogo	20 Mei 1924
10.	Frits Laoh	Pegawai KPM	Weltevreden	20 Mei 1924
11.	Sutan (Gelar Datuk Rangkayo Maharajo)	Demang	Sungei Dareh (Pantai Barat Sumatra)	23 Mei 1924
12.	P.A. Mandagie	Kepala distrik di Minahasa dengan gelar Mayor	Manado	14 Oktober 1924
13.	Mangku Subroto	Wakil Ketua Landraad	Cirebon	20 Mei 1924
14.	R. Marjono	Kapten Infantri	Weltevreden	20 Mei 1924
15.	Mulia (Todung gelar Sutan Gunung)	Kepala Hollandsch Inlandsche School	Kota Nopan (Tapanuli)	23 Mei 1924
16.	R.P.E. De Queljoe	Asisten Pemerintah Kelas Dua	Saparua (Amboina)	2 Juni 1924
17.	Dr. Abdul Rivai	Dokter	Semarang	20 Mei 1924
18.	R.T.A. Suyono	Bupati	Pasuruan	20 Mei 1924
19.	R.M.J. Suyadi	Dokter hewan kota praja	Magelang	20 Mei 1924
20.	R.P. Suroso	Pemimpin Redaksi "Kemadjoean Hindia"	Mojokerto	20 Mei 1924
21.	H. Sutadi	Jurnalis	Solo	20 Mei 1924
22.	R.T.A. Sosrodiprojo	Bupati	Wonosobo	20 Mei 1924
23.	R.T. Sosrohadiwijoyo	Bupati	Demak	20 Mei 1924
24.	Tengku Musa	Kepala distrik	Tanjung Balai (S.O.K)	20 Mei 1924
25.	Cokorda Gde Raka Sukawati	Punggawa	Ubud (Gianyar, Bali)	20 Mei 1924
26.	R.A.A. Wiranata Kusuma	Bupati	Bandung	14 Oktober 1924

193 Handelingen van den Volksraad, De Eerste Gewone Zitting 1924, hlm. 9
194 Handelingen van den Volksraad, De Eerste Gewone Zitting 1924, hlm. 1128 (?)
195 Handelingen der Volksraad, Tweede Gewone Zitting 1924, Index Handelingen en bijlage, hlm. 2-4

Jumlah komisi Volksraad pada periode kedua sidang biasa tahun 1924 adalah lima komisi. Komisi-komisi tersebut adalah:[196]

1. *Commissie voor de huishoudelijke aangelegenheden* (Komisi Untuk Urusan Rumah Tangga) dengan tugas yang tercantum dalam Pasal 7 *de Reglement van Orde*. Ketua komisinya adalah Schumann, dengan anggota Kerkkamp dan Kan.
2. *Centrale afdeeling* (Bagian Pusat) dengan tugas mengkonsultasikan pengaturan tugas. Ketua komisinya adalah Schumann, dengan anggota para ketua afdeling II dan III, yaitu Kusumo Yudo dan Schmutzer.
3. *Schakelcommissie* (Komisi Peralihan) dengan tugas sebagai penghubung antara pemerintah dengan Volksraad. Ketua dari komisi ini adalah Schumann, dengan anggota Kusumo Yudo (pengganti), Engelenberg, Schmutzer (pengganti), Suyadi, Kerkkamp (pengganti), Jayadiningrat, Van Helsdingen (pengganti), Laoh, Dwijosewoyo (pengganti), Hadiwijoyo, De Hoog (pengganti), Zaalberg, Stokvis (pengganti), Abdul Rivai, Kan (pengganti), Khouw Kim An, dan Suroso.
4. *Commissie voor de verzoekschriften* (Komisi Untuk Surat Permohonan) dengan tugas membuat laporan surat permohonan yang masuk ke Volksraad. Anggota komisi adalah Aay (pengganti), Jayadiningrat, Kies (pengganti), Meyer Ranneft, Laoh (pengganti), dan Zaalberg.
5. *Commissie van voorbereiding* (Komisi Persiapan) dengan tugas menyelidiki rancangan kontrak pekerja. Ketua komisinya adalah Schmutzer, sementara anggotanya adalah Aay, Ahn, Fuhri, ‘s Jacobs, Laoh, Van Lonkhuyzen, dan Talma.

Jumlah komisi Volksraad pada periode kedua sidang biasa tahun 1924 adalah lima komisi.

Selanjutnya, amandemen yang diajukan pada periode persidangan biasa kedua tahun 1924 sebanyak delapan amandemen. Amandemen-amandemen tersebut terbagi atas persoalan sebagai berikut: anggaran tambahan untuk tahun 1925 sebanyak satu amandemen, rancangan Undang-undang Armada 1925 sebanyak satu amandemen, perihal usulan gaji sebanyak dua amandemen, serta perihal ordonansi guru sebanyak empat amandemen.[197] Amandemen persoalan anggaran tambahan untuk tahun 1925, khususnya mengenai pengurangan sebesar 1 gulden dari pos tertentu, diajukan oleh ‘s Jacobs, Rup, dan

196 Handelingen van den Volksraad, Tweede Gewone Zitting 1924, index, hlm. 6
197 Ibid., hlm. 9

Mandagie dengan status diterima. Amandemen rancangan Undang-undang Armada 1925 mengenai penetapan Tanjung Priok sebagai kawasan pendukung diajukan oleh Engelenberg, Kusumo Yudo, dan Kies dengan status diterima. Amandemen usulan gaji masing-masing diajukan oleh Kerkkamp, Wiranata Kusuma, Aay, dan Meyer, serta Ranneft, Ahn, dan Talma, dengan status kedua amandemen ditarik. Amandemen ordonansi guru dengan tujuan pembebasan pesantren, amandemen tidak adanya pengawasan penghulu di pengadilan, amandemen pendampingan oleh tenaga ahli, dan amandemen tidak diperlukannya hukuman bagi pelanggaran pertama yang diajukan oleh Wiranata Kusuma, Sutadi, dan De Queljoe keseluruhannya berstatus ditolak.[198]

Mosi yang diajukan pada periode persidangan biasa kedua tahun 1924 ada 34 mosi. Mosi-mosi tersebut antara lain persoalan *Arbeidscontract* (Kontrak Pekerja), *Beperkende Bepalingen* (Ketentuan yang Membatasi), *Bezoldigingsregeling* (Aturan Remunerasi), *Commissie* (Komisi), *Driejaarlijks Verslag* (Laporan Tiga Tahunan), *Gelijkstelling en Pensioenen* (Penyetaraan dan Pensiun), *Geneeskundige Behandeling in Kleine Garnizoenen* (Penanganan Kesehatan di Garnisun Kecil), *Ontwerp-vlootwet* (Rancangan Undang-undang Armada), *Regentschapraden* (Dewan Kabupaten), dan *School* (Sekolah).[199]

Para anggota dari kalangan Bumiputra yang mengajukan mosi pada periode ini adalah Suroso, dengan mosi penarikan ketentuan yang membatasi pendirian pabrik gula milik Bumiputra. Mosi ini kemudian ditarik. Selain itu, terdapat pula Mosi Wiranata Kusuma mengenai penyerahan wewenang di pemerintahan Bumiputra terkait pembentukan Dewan Kabupaten yang terlalu lama. Mosi ini juga ditarik. Lalu, ada Mosi Sutadi dan Dwijosewoyo mengenai perubahan edaran dari direktur pendidikan dan agama tertanggal 6 Oktober 1924 yang bahkan ditolak. Berbeda dengan Mosi Laoh dan Mandagie mengenai kabar dari *Minahasa Raad* terkait pencabutan biaya barang di Manado yang statusnya diterima. Beberapa nama anggota Bumiputra lain yang mengajukan mosi bersama anggota Volksraad kalangan Eropa antara lain: Marjono, yaitu terkait penolakan perampingan tentara; Kayadu dan Sujono, yaitu mosi penyerderhanaan ejaan di sekolah-sekolah dasar; Mulia, yaitu mosi aturan remunerasi di wilayah-wilayah yang berbeda di Hindia-Belanda; De Queljoe, yaitu mosi penyetaraan pensiunan.[200]

Para anggota dari kalangan Bumiputra yang mengajukan mosi pada periode ini adalah Suroso, dengan mosi penarikan ketentuan yang membatasi pendirian pabrik gula milik Bumiputra.

198 Ibid.
199 Ibid., hlm. 10-13
200 Ibid.

Sementara itu, jumlah surat permohonan yang masuk ke Volksraad pada periode persidangan biasa kedua tahun 1924 adalah sebanyak 35 surat. Surat-surat tersebut terbagi atas permasalahan *Benoeming* (Pengangkatan), *Circulaire* (Edaran), *Duurtoeslag* (Biaya Tambahan), *Garnizoenopheffing* (Pencabutan Garnisun), *Geheime Circulaire* (Edaran Rahasia), *Gemeenteraad* (Dewan Kota Praja), *Hout* (Kayu), *Huisvesting* (Perumahan), *Huurcommisie-ordonantie* (Peraturan Perundang-undangan tentang Komisi Penyewaan), *Inlandsche Verponding* (Kepemilikan Mutlak bagi Bumiputra), *Klachten* (Keluhan), *Ondersteuning* (Dukungan), *Ontginningsvergunning* (Izin Renovasi), *Ontslag* (Pemecatan), *Pensioen* (Pensiun), *Reisrekening* (Rekening Perjalanan), *Sadon-aanplant* (Penanaman Sadon), *Schadevergoeding* (Kompensasi), *Titel* (Gelar), *Uitbetaling* (Pembayaran), *Velgbreedte* (Lebar Pelek Gerobak), *Veroordeling* (Kecaman), *Wachtgeld* (Uang Tunggu).[201] Surat permohonan terbanyak adalah mengenai *Klachten* sebanyak tujuh surat, disusul oleh *Ontslag* sebanyak lima surat, kemudian *Inlandsche Verponding* dan *Pensioen* yang masing-masingnya ada sebanyak dua surat.[202]

Beberapa contoh surat keluhan adalah surat dari Ong Thiam Hiat, pedagang di Tanggung (Distrik Singen Kidul, Afdeeling Demak) yang mengajukan keluhan terhadap Asisten Residen Purwodadi. Surat keluhan lain adalah dari Anang Kecil bin Kiai Kusuma Wira Negara tertanggal Samarinda, 20 Februari 1924, yang mengajukan keluhan terhadap Kontrolir Sampit. Terdapat pula surat permohonan mengenai ukuran lebar pelek gerobak yang dikirim oleh Raja Gawang dari Teluk Betung tertanggal 17 Mei 1924. Ukuran lebar pelek gerobak ini berkaitan dengan biaya yang harus dibayar ketika melewati jalan umum di Distrik Lampung. Lebar pelek gerobak yang harus membayar adalah yang ukurannya mencapai 7,6 sentimeter.[203]

contoh surat keluhan adalah surat dari Ong Thiam Hiat, pedagang di Tanggung (Distrik Singen Kidul, *Afdeeling* Demak) yang mengajukan keluhan terhadap Asisten Residen Purwodadi.

201 Ibid., hlm. 14-19
202 Ibid.
203 Ibid., hlm. 16 dan 19

Gambar 4. Sidang Volksraad, c. 1924/1925
[Sumber: KITLV 116908]

Pembukaan sidang luar biasa pertama Volksraad selanjutnya di tahun 1925 berlangsung pada 6 Mei 1925.

Pembukaan sidang luar biasa pertama Volksraad selanjutnya di tahun 1925 berlangsung pada 6 Mei 1925. Ketua Volksraad pada periode itu adalah Mr. A. Neytzell De Wilde dengan jumlah anggota, termasuk ketua, sebanyak 35 orang. Para anggotanya, antara lain: Aay, Ariodinoto, Ten Berge, Delprat, Jayadiningrat, Dwijosewoyo, Fuhri, Hadiwijoyo, Van Helsdingen, De Hoog, Kan, Kayadu, Kerkkamp, Khouw Kim An, Kiès, Kusumo Yudo, Laoh, Lutan, Van Lonkhuyzen, Mangku Subroto, Marjono, Meyer Ranneft, De Queljoe, Rup, Schneider, Suroso, Sutadi, Sosrohadiwijoyo, Stokvis, Van der Weyden, Wiessing, Wiranata Kusuma, dan Zaalberg.[204] Pada 1925, terdapat penambahan anggota Volksraad dari kalangan Bumiputra, yaitu R.M.A. Surjoatmojo, Bendahara Paku Alaman yang bertempat tinggal di Yogyakarta. Ia diangkat pada 8 Juli 1925.[205]

Komisi-komisi di Volksraad pada periode persidangan ini ada tujuh komisi.[206] Komisi-komisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Commissie voor de huishoudelijke aangelegenheden* (Komisi Untuk Urusan Rumah Tangga) dengan tugas yang tercantum dalam Pasal 7 *de Reglement van Orde*. Ketua komisinya adalah Neytzell de Wilde dengan anggota Kerkkamp dan Kan.
2. *Centrale Afdeeling* (Bagian Pusat) dengan tugas

204 Handelingen van de Volksraad, De Eerste Buitengewone Zitting 1925, hlm. 3
205 Handelingen van den Volksraad, Tweede Gewone Zitting 1925, bijlage, hlm. 4
206 Ibid., hlm. 6-7

mengkonsultasikan pengaturan tugas. Ketua komisinya adalah Neytzell de Wilde, dengan anggota para Ketua Afdeling II dan III, yaitu Kusumo Yudo dan Schmutzer.

3. *Schakelcommissie* (Komisi Peralihan) dengan tugas sebagai penghubung antara pemerintah dengan Volksraad. Ketua komisinya adalah Neytzell de Wilde dengan anggota Kusumo Yudo (pengganti), Engelenberg, Schmutzer (pengganti), Suyadi, Kerkkamp (pengganti), Jayadiningrat, Van Helsdingen (pengganti), Laoh, Dwijosewoyo (pengganti), Hadiwijoyo, De Hoog (pengganti), Zaalberg, Stokvis (pengganti), Abdul Rivai, Kan (pengganti), Khouw Kim An, dan Suroso.
4. *Commissie voor de verzoekschriften* (Komisi Untuk Surat Permohonan) dengan tugas membuat laporan surat permohonan yang masuk ke Volksraad. Anggota dari komisi ini adalah Aay, Kan, Laoh (pengganti), Ten Berge, Jayadiningrat, dan Zaalberg.
5. *Commissie voor de verslagen van den Algemeene Rekenkamers in Nederland en Nederlandsch-Indië over het jaar* 1924 (Komisi Untuk Laporan Dewan Audit Umum di Belanda dan Hindia-Belanda tentang tahun 1924) dengan tugas mempelajari Laporan Tahunan Dewan Audit Umum. Anggota dari komisi ini adalah Aay, Van Helsdingen, dan Rup.
6. *Commissie van Voorbereiding* (Komisi Persiapan) dengan tugas mempersiapkan penyelidikan *afdeling* (bagian) mengenai rancangan Undang-undang Jalur Kereta. Ketua komisinya adalah Neytzell de Wilde, sementara anggota komisinya terdiri dari Delprat, Jayadiningrat, Han Tiauw Tjiong, De Hoog, s' Jacobs, Schmutzer, dan Schneider.
7. *Commissie van Voorbereiding* (Komisi Persiapan) dengan tugas mempersiapkan penyelidikan *afdeling* (bagian) mengenai rancangan penilaian bersyarat. Ketua komisinya adalah Neytzell de Wilde, sementara anggotanya adalah Ten Berge, Van Helsdingen, Kan, Kerkkamp, Mangku Subroto, Stokvis, dan Wiessing.

Sejumlah rancangan pemerintah yang diajukan untuk dibahas oleh Volksraad pada periode ini ada sebanyak tiga belas rancangan. Rancangan tersebut adalah anggaran tambahan untuk tahun 1926 dengan keputusan diterima setelah diubah oleh pemerintah, rancangan regularisasi tahun 1923 dengan keputusan diterima, rancangan

Sejumlah rancangan pemerintah yang diajukan untuk dibahas oleh Volksraad pada periode ini ada sebanyak tiga belas rancangan.

penilaian bersyarat dengan keputusan diterima setelah diubah oleh pemerintah, rancangan aturan umum kereta dan trem dengan keputusan diterima setelah diubah oleh pemerintah, rancangan ordonansi dalam rangka peninjauan kembali ordonansi pemilihan di Dewan Kota Praja dengan keputusan diterima setelah diubah oleh pemerintah, rancangan ordonansi pengaturan gubernur di Kepulauan Maluku dengan keputusan diterima, perubahan ordonansi provinsi dan kabupaten dengan keputusan diterima, rancangan regulasi pemilihan anggota Volksraad 1925 dengan keputusan diterima setelah diubah oleh pemerintah, rancangan ordonansi perubahan anggaran Provinsi Jawa Barat dengan keputusan diterima, anggaran tambahan tahun 1925 dengan keputusan diterima, perubahan ordonansi Provinsi Jawa Barat dengan keputusan diterima, serta pendeteksian dan eksplorasi minyak bumi yang belum dibahas.[207]

Pada periode ini, tidak ada usulan yang masuk, sedangkan amandemen yang diajukan terdapat sebanyak 13 amandemen. Amandemen-amandemen tersebut terbagi atas persoalan anggaran tambahan untuk tahun 1925 sebanyak tiga amandemen, persoalan penilaian bersyarat sebanyak satu amandemen, persoalan pengaturan kereta dan trem sebanyak tiga amandemen, serta persoalan peninjauan kembali ordonansi pemilihan di Dewan Kota Praja sebanyak enam amandemen.[208]

Anggota Volksraad dari kalangan Bumiputra yang mengajukan amandemen adalah Ariodinoto, dkk. yang mengajukan amandemen kenaikan sejumlah 1 gulden untuk pemasukan pegawai pendapatan nasional dengan status amandemen diterima. Kemudian, amandemen Laoh mengenai kenaikan sejumlah 1 gulden untuk pegawai pemerintahan Bumiputra dengan status amandemen ditarik.[209]

Pada periode persidangan ini, mosi yang diajukan ke Volksraad adalah sebanyak 24 mosi. Berbeda dengan periode sebelumnya, catatan persoalan mosi yang masuk tidak disusun secara alfabetis. Catatan mosi yang diajukan dimulai dengan persoalan *Ruime personeelbezetting en zelfstandigheid van het bezoldingskantoor gewenscht* (jumlah staf yang memadai dan keinginan independensi dari kantor remunerasi).[210]

Persoalan dari mosi yang diajukan pada periode ini cukup beragam. Mulai dari persoalan di dalam Volksraad sendiri, pegawai,

Pada periode ini, tidak ada usulan yang masuk, sedangkan amandemen yang diajukan terdapat sebanyak 13 amandemen.

207 *Ibid.*, hlm. 8
208 *Ibid.*, hlm. 10
209 *Ibid.*
210 *Ibid.*, hlm. 11-12

aturan pemerintah, militer, perusahaan pemerintah, pendidikan, hingga pemerintah daerah. Para anggota Volksraad dari kalangan Bumiputra yang mengajukan mosi adalah Jayadiningrat, dengan mosi pengambilalihan amandemen dan mosi di persidangan pada bulan Maret-Juni yang berstatus ditarik. Lalu, ada pula Suroso dengan mosi partisipasi dari konsultasi yang tidak terencana terkait *Staatsspoorwegen* dan PTT (*Post, Telegraaf, Telefoon*) dengan status mosi ditarik. Namun, mosi dari De Queljoe mengenai penunjukan bupati untuk Ambon, serta termasuk sebagai Kepala Pemerintahan Daerah, statusnya diterima. Selanjutnya, terdapat mosi dari Laoh mengenai pemisahan Ketua Minahasa Raad dengan status mosi ditahan, mosi dari Sukawati mengenai tidak adanya bantuan pemerintah untuk propaganda keagamaan di Bali dengan status mosi ditahan, mosi dari Laoh mengenai penyelidikan pengaturan seragam militer dengan pangkat di bawah perwira dengan status mosi ditolak, serta mosi dari Suyono mengenai penambahan jumlah Bumiputra dalam Dewan Kota Praja dengan status mosi diterima.[211]

Selain amandemen, surat-surat permohonan yang masuk pada periode persidangan luar biasa pertama tahun 1925 adalah sebanyak 28 surat.

Selain amandemen, surat-surat permohonan yang masuk pada periode persidangan luar biasa pertama tahun 1925 adalah sebanyak 28 surat. Persoalan-persoalan yang terdapat dalam surat-surat tersebut adalah *belasting* (pajak), *faillisement* (pailit), *herplaatsing* (penempatan kembali), *huis* (rumah), *huwelijk* (pernikahan), *inlandsche verponding* (kepemilikan mutlak bagi bumiputra), *interneering* (pembuangan), *klachten* (keluhan), *onderstand* (dukungan), *ontslag* (pemecatan), *pensionen* (pensiun), *positieverbetering* (perbaikan jabatan), *radiotelegrafie* (radio telegraf), *restitutie* (pengembalian uang), *steun* (bantuan), dan *weduwen-wezenfonds* (dana untuk para janda dan yatim piatu).[212]

Surat permohonan yang paling banyak muncul pada periode ini adalah mengenai *ontslag* (pemecatan) sebanyak lima surat, disusul mengenai *onderstand* (dukungan) sebanyak empat surat dan *pensioenen* (pensiun) sebanyak tiga surat. Contoh surat permohonan mengenai dukungan dikirim oleh Sitti Zaenal, janda dari Abdul Salim yang tercatat dibuat di Padang Panjang pada tanggal 1 Mei 1925, lalu surat permohonan dari L. Engel-Papilaya dari Saparua tertanggal 26 Mei 1925, dan surat permohonan yang dikirim oleh Siti Ijir dari Fort de Kock pada tanggal 21 Oktober 1925.[213]

211 *Ibid.*
212 *Ibid.*, hlm. 13-16
213 *Ibid.*, hlm. 14

Pada 1925, RR 1854 diubah namanya menjadi *Indische Staatsregeling*. Perubahan ini juga memiliki konsekuensinya tersendiri, yaitu mengubah susunan anggota Volksraad menjadi 61 anggota, termasuk ketua, dengan perincian 30 anggotanya berasal dari kalangan Bumiputra terpilih, sedangkan 23 anggotanya diangkat dari kalangan warga Belanda. Sehubungan dengan pembagian tersebut, terkait dengan komposisi kewarganegaraan yang ada, para anggota dibagi lagi menjadi sebagai berikut:

1. Dari jumlah tiga puluh anggota yang dipilih, diperinci lagi menjadi dua puluh anggota dipilih dan sepuluh anggota diangkat;
2. Dari minimum dua puluh lima anggota warga Belanda, diperinci menjadi lima belas anggota dipilih dan sepuluh (maksimal) anggota diangkat; dan
3. Maksimal lima orang warga negara bukan orang Belanda, dengan ketentuan tiga dipilih dan dua diangkat.[214]

Pembukaan sidang biasa pertama Volksraad tahun 1926 dilaksanakan pada Sabtu, 15 Mei 1926. Sidang dibuka oleh Gubernur Jenderal Dirk Fock.[215] Jumlah anggota Volksraad pada periode persidangan biasa pertama tahun 1926 adalah sebanyak 42 anggota, termasuk ketua. Para anggota tersebut adalah Aay, Ariodinoto, Ten Berge, Dahler, Delprat, Jayadiningrat, Dwijosewoyo, Engelenberg, Ezerman, Führi, Gonggrijp, Hadiwidjojo, Han, Van Helsdingen, s' Jacobs, Kan, Kerkkamp, Khouw Kim An, Kusumo Yudo, Laoh, Lutan, Van Lonkhuyzen, Mangku Subroto, Marjono, Mulia, De Queljoe, Rup, Schneider, Suyadi, Suyono, Sukowati, Sutadi, Sosrodiprojo, Sosrohadiwijoyo, Talma, Van der Weyden, Wiessing, Wiranana Kusuma, Zaalberg, dan Zuyderhoff.[216]

Jumlah komisi pada periode persidangan biasa kedua Volksraad tahun 1926 adalah sebanyak tujuh komisi.[217] Komisi-komisi tersebut terdiri atas:

1. *Commissie voor de huishoudelijke aangelegenheden* (Komisi Untuk Urusan Rumah Tangga) dengan tugas yang tercantum dalam Pasal 7 *de Reglement van Orde*. Ketua komisinya adalah Neytzell de Wilde, dengan anggota Kerkkamp dan Kan.
2. *Centrale Afdeeling* (Bagian Pusat) dengan tugas

Pada 1925, RR 1854 diubah namanya menjadi *Indische Staatsregeling.*

214 Kuntjoro Purbopranoto, 1960, *Sistem Pemerintahan* (Surabaya: Penerbitan Universitas Airlangga), hlm. 99
215 *Handelingan van den Volksraad*, *Eerste Gewone Zitting* 1926, hlm. 1
216 *Ibid.*, hlm. 7
217 *Handelingen van den Volksraad. Tweede Gewone Zitting* 1926, *Index*, hlm. 6

mengkonsultasikan pengaturan tugas. Ketua komisinya adalah Neytzell de Wilde dengan anggota para Ketua Afdeling II dan III, yaitu Kusumo Yudo dan Schmutzer.

3. *Schakelcommissie* (Komisi Peralihan) dengan tugas sebagai penghubung antara pemerintah dengan Volksraad. Ketua komisinya adalah Neytzell de Wilde, dengan anggota Kusumo Yudo (pengganti), Engelenberg, Schmutzer (pengganti), Suyadi, Kerkkamp (pengganti), Jayadiningrat, Van Helsdingen (pengganti), Laoh, Dwijosewoyo (pengganti), Hadiwijoyo, De Hoog (pengganti), Zaalberg, Stokvis (pengganti), Kan (pengganti), Khouw Kim An, dan Suroso.
4. *Commissie voor de verzoekschriften* (Komisi Untuk Surat Permohonan) dengan tugas membuat laporan surat permohonan yang masuk ke Volksraad. Anggota komisi ini, antara lain De Hoog, Kan, Laoh (pengganti), Ten Berge, Jayadiningrat, dan Zaalberg.
5. *Commissie van voorbereiding* (Komisi Persiapan) dengan tugas mempersiapkan *Reglement van de Orde* untuk Volksraad yang baru dan untuk *het College van de Gedelegeerden.* Komisi ini diketuai oleh Neytzell de Wilde, dengan anggota komisi Jayadiningrat, Van Helsdingen, s' Jacobs, Kan, Kerkkamp, Kusumo Yudo, Schmutzer, dan Stokvis.
6. *Commissie van voorbereiding* (Komisi Persiapan) dengan tugas mempersiapkan penyelidikan *afdeling* (bagian) mengenai rancangan ordonansi kapal. Ketua komisinya adalah Neytzell de Wilde, sedangkan anggotanya adalah Van Lonkhuyzen, Delprat, Laoh, Kan, Fruin, dan Mangku Subroto.
7. *Commissie voor de verslagen van den Algemeene Rekenkamers in Nederland en Nederlandsch-Indië over het jaar* 1925 (Komisi untuk Laporan Dewan Audit Umum di Belanda dan Hindia-Belanda tentang tahun 1925) yang bertugas untuk mempelajari laporan tahunan Dewan Audit Umum. Anggota komisi ini adalah Talma, Van Helsdingen, dan Rup.

Jumlah rancangan yang diajukan oleh pemerintah untuk dibahas di Volksraad pada periode persidangan biasa kedua tahun 1926 adalah sebanyak 11 rancangan. Rancangan-rancangan tersebut adalah rancangan mengenai anggaran tambahan untuk tahun 1927 yang diterima oleh Volksraad setelah diubah oleh pemerintah, rancangan mengenai regulasi untuk tahun 1925 dengan hasil keputusan diterima,

Jumlah rancangan yang diajukan oleh pemerintah untuk dibahas di Volksraad pada periode persidangan biasa kedua tahun 1926 adalah sebanyak 11 rancangan.

rancangan tata cara pemilihan perwakilan yang diterima setelah diubah oleh pemerintah, rancangan anggaran tambahan untuk tahun 1926 dengan hasil keputusan diterima, anggaran tambahan untuk tahun 1927 (rencana sekolah guru) dengan hasil keputusan diterima, rancangan ordonansi kapal yang diterima setelah diubah oleh pemerintah, rancangan undang-undang ratifikasi kenaikan biaya impor kertas rokok dengan keputusan diterima, rancangan ordonansi penyerahan tempat pemakaman di kabupaten Cirebon dengan keputusan diterima, rancangan undang-undang dan *Koninklijke Besluit* (Keputusan Kerajaan) mengenai peraturan perusahaan asuransi jiwa yang belum dibahas, perubahan ordonansi provinsi dan kabupaten dengan keputusan diterima, serta perubahan tata negara Hindia-Belanda yang belum dibahas.[218]

Sementara itu, pada periode ini tidak ada usulan sama sekali. Sedangkan jumlah amandemen yang masuk ke Volksraad adalah sebanyak dua amandemen. Amandemen-amandemen tersebut adalah amandemen mengenai *Reglement van Orde* dan amandemen mengenai tata cara peraturan pemilihan perwakilan. Amandemen kedua diajukan oleh Dwijosewoyo dengan status diterima Volksraad.[219]

Jumlah mosi yang masuk ke Volksraad pada periode ini adalah sebanyak sembilan mosi. Substansi mosi yang masuk adalah mosi penghapusan *poenale-sanctie* yang diajukan oleh Stokvis, dkk. dengan status ditarik, mosi pengetahuan bahasa Belanda untuk HIS yang diajukan oleh Dwijosewoyo dengan status ditarik, pendirian *Nederlandsch-Indische Veeartsschool* (Sekolah Peternakan Hindia-Belanda) di Batavia yang diajukan oleh Suyadi dengan status ditolak, mosi kesepakatan kontrak penerimaan aspal di Buton dalam perjanjian penambangan undang-undang tambang yang diajukan oleh Stokvis dengan status diterima, mosi pembentukan pemburu opium sebanyak mungkin di Hindia-Belanda yang diajukan oleh Kerkkamp dengan status ditolak, mosi dua pilihan untuk pemilihan *College van Gedelegeerden* yang diajukan oleh Kerkamp dengan status ditolak, mosi penundaan pembahasan rencana sekolah guru yang diajukan oleh Stokvis, dkk. dengan status ditolak, serta mosi biaya *college* sesuai kapasitas yang diajukan oleh Stokvis dengan status mosi ditahan.[220]

Surat-surat permohonan yang masuk ke Volksraad pada periode persidangan biasa kedua tahun 1926 adalah sebanyak 23 surat

Sementara itu, pada periode ini tidak ada usulan sama sekali. Sedangkan jumlah amandemen yang masuk ke Volksraad adalah sebanyak dua amandemen.

218 *Ibid.*, hlm. 7
219 *Ibid.*, hlm. 8
220 *Ibid.*, hlm. 9

permohonan. Catatan permasalahan surat permohonan pada periode ini masih disusun menurut abjad, antara lain soal *belasting* (pajak), *bestuur* (pemerintahan), *communism* (komunisme), *dienstbetrekking* (hubungan layanan), *dienstverlenging* (perpanjangan layanan), *grondrechten* (hak tanah), *hechtenis* (tahanan), *irrigatie* (irigasi), *justitie* (hukum), *klachten* (keluhan), *landschap Boelah Beureungkang* (lanskap Bulah Beureungkang), *onderwijs* (pendidikan), *ontslag* (pemecatan), *politie* (polisi), *salaris* (gaji), *staandplaatstoelage* (tunjangan tetap), dan *verponding* (kepemilikan tetap).[221] Persoalan terbanyak dari surat-surat permohonan tersebut adalah persoalan *salaris* (gaji) sebanyak empat surat, disusul dengan persoalan *belasting* (pajak) sebanyak tiga surat dan *justitie* (hukum) sebanyak dua surat.[222]

Contoh surat permohonan mengenai *salaris* (gaji) dikirim oleh juru tulis dan juru tulis bantu di Distrik Nias dari Gunung Sitoli tertanggal 8 Mei 1925 terkait perbaikan jabatan, sementara surat permohonan mengenai pajak dikirim oleh Kho Han Tiong dari Sukaraja tertanggal 14 Agustus 1926 terkait pemasukan dan pajak untuk Perhimpunan T.H.K.K. Contoh terakhir adalah surat permohonan mengenai komunisme yang berasal dari Bandung pada tanggal 15 November 1926 yang dikirim oleh Ketua Pengurus *Verbond Nederland en Indië* mengenai hukuman pidana bagi komunisme.[223]

... pada tahun 1927 Volksraad memiliki wewenang sebagai lembaga ko-legislatif bersama Gubernur Jenderal. Namun, kewenangan Volksraad masih terbatas karena Gubernur Jenderal memiliki hak veto.

2.8 Volksraad periode 1927-1931 Lembaga Ko-Legislatif dengan Kewenangan Terbatas

Jika pada periode sebelumnya wewenang Volksraad tidak lebih dari sekedar lembaga penasihat, pada tahun 1927 Volksraad memiliki wewenang sebagai lembaga ko-legislatif bersama Gubernur Jenderal. Namun, kewenangan Volksraad masih terbatas karena Gubernur Jenderal memiliki hak veto. Dari jumlah total anggota sebanyak 60 orang, 30 orang merupakan penduduk Belanda dengan komposisi 15 terpilih dan 15 ditunjuk, 25 orang berasal dari kalangan Bumiputra, dengan komposisi 19 terpilih dan 4 ditunjuk, serta lima orang penduduk Tionghoa yang tiganya dipilih, sementara dua ditunjuk. Mekanisme keanggotaan Volksraad dipilih melalui pemilihan tidak langsung.[224]

221 *Ibid.*, hlm. 10-12
222 *Ibid.*
223 *Ibid.*, hlm. 10 dan 12
224 Eduard J.M. Schmutzer, 1977, *Dutch colonial policy and the search for identity in Indonesia* 1920-1931 (Leiden: E.J. Brill), hlm. 68

De Regent van Bandoeng Wiranata Koesoema (links) en Tjokorde Gde Rake Soekawati. Poenggawa van Oeboed (Zuid-Bali) leden van den Volksraad.

Gambar 5. Dua orang anggota Volksraad dari golongan pribumi, Wiranatakusumah dari Bandung (kiri) dan Cokorda Gde Raka Sukawati dari Bali (kanan)
[Sumber: *De Sumatra Post*, 16 Juli 1927]

Pembukaan sidang Volksraad tahun 1927-1928 berlangsung pada 16 Mei 1927 yang diketuai oleh Mr. A. Neytzell de Wilde. Pembukaan sidang Volksraad juga dihadiri oleh Gubernur Jenderal de Graeff yang memberikan pidatonya.[225]

Jumlah anggota Volksraad pada periode ini adalah sebanyak 57 anggota, termasuk dengan ketua. Mereka adalah Ali Musa, Arif, Apituley, Van Baalen, Beets, Ten Berge, Blaauw, Jayadiningrat, Dwijosewoyo, Engelenberg, Fruin, Hadiwijoyo, Han, Van Helsdingen, De Hoog, 's Jacobs, Jahja, Jonkman, Kan, Kerkkamp, Kertoamiprodjo, Khouw Kim Am, Kies, Kusumo Yudo, Kusumo Utoyo, Kusuma Subrata, Van Lonkhuyzen, Mandagie, Meyer Ranneft, Middendorp, Mochtar, Mulia, Mohamad Ali, Monod de Froideville, Oppenheim, Ostmeier, Pauw, Ratu Langi, Rup, Schmutzer, Soangkupon, Suyono, Sukawati, Suroso, Sutadi, Sosrodiprojo, Sosrohadiwijoyo, Thamrin, Cia Ceng Siang, Van der Weyden, Wiranatakusuma, Yo Heng Kam, Zaalberg, Van Zalinge, Zeydel, dan Zuyderhoff. Sementara itu, wakil pemerintah masih dijabat oleh Schrieke.[226]

Terdapat sebelas komisi di Volksraad pada periode persidangan 1927-1928, antara lain:[227]

1. *Commisie voor het onderzoek van de geloofsbrieven* (Komisi Untuk Penyelidikan Surat-surat Kepercayaan) dengan tugas menyelidiki surat kepercayaan anggota yang dipilih. Ketua komisinya adalah Mulia, dengan anggota Jonkman dan Monod de Froideville.
2. *Commissie voor de huishoudelijke aangelegenheden* (Komisi Untuk Urusan Rumah Tangga) dengan tugas yang tercantum dalam Pasal 10 *de Reglement van Orde*. Ketua komisinya adalah Neytzell de Wilde, dengan anggota Kerkkamp dan Kan.
3. *Commissie voor de verzoekschriften* (Komisi Untuk Surat Permohonan) dengan tugas membuat laporan surat permohonan yang masuk ke Volksraad dan *het College van Gedelegeerden*. Anggota komisi adalah De Hoog, Kan, Mulia (pengganti), Jonkman, Beets, dan Sukawati.
6. *Commisie van overleg* (Komisi Konsultasi) dengan tugas menghubungkan antara Volksraad dengan pemerintah. Jika diperlukan, komisi ini dapat memberikan saran kepada ketua.

225 *Handelingen van de Volksraad, Zittingsjaar* 1927-1928, hlm. 1
226 *Ibid.*, hlm. 9
227 *Ibid.*, Index, hlm. 7-8

DE MAJOOR DER CHINEEZEN TE BATAVIA, de heer Khouw Kim An, lid van den Volksraad, die voor zaken in Europa vertoeft, werd door de Koningin in audiëntie ontvangen. — De heer Khouw Kim An bij het verlaten van het Hôtel des Indes in Den Haag.

Gambar 6. Khouw Kim An, seorang anggota Volksraad dari golongan Tionghoa

[Sumber: *De Indische Courant*, 22 Oktober 1927]

Ketua dari komisi ini adalah Neytzell de Wilde, sementara anggotanya adalah Kusumo Yudo (pengganti), Kies, De Hoog (pengganti), Zaalberg, Kusumo Utoyo (pengganti), Dwijosewoyo, Van Helsdingen (pengganti), Mulia, Schmutzer (pengganti), Ten Berge, Stokvis (pengganti), Middendorp, Suroso (pengganti), Ratu Langie, Kerkkamp (pengganti), Jayadiningrat, Van Zalinge (pengganti), dan Khouw Kim An.

7. *Commissie van voorbereiding* (Komisi Persiapan) dengan tugas mempersiapkan rancangan undang-undang peraturan perusahaan asuransi jiwa. Ketua komisinya adalah Neytzell de Wilde, dengan anggota komisi yang terdiri dari Jayadiningrat, Dwijosewoyo, s' Jacobs, Van Helsdingen, Kan, Kerkkamp, Schmutzer, Stokvis, dan Zalberg.
8. *Commissie van voorbereiding* (Komisi Persiapan) dengan tugas mempersiapkan penyelidikan rancangan surat keputusan akun akhir pengeluaran dan pemasukan Hindia-Belanda untuk tahun 1923, yang beranggotakan Van Helsdingen, Ligthart, dan Rup.
9. *Commissie van voorbereiding* (Komisi Persiapan) dengan tugas menyelidiki rancangan ordonansi pengaturan pemerintahan Sumatera Selatan. Ketua dari komisi ini adalah Neytzell de Wilde, dengan anggota komisi Soangkupon, Ali Musa, Fruin, Yahya, Kerkkamp, Middendorp, Mochtar, Nya Arif, dan Mulia.
10. *Commissie voor de verslagen van den Algemeene Rekenkamers in Nederland en Nederlandsch-Indië over het jaar 1926* (Komisi untuk Laporan Dewan Audit Umum di Belanda dan Hindia-Belanda tentang tahun 1926) dengan tugas mempelajari laporan tahunan Dewan Audit Umum, dengan anggota komisi Van Helsdingen, Ligthart, dan Rup.
11. *Commissie van voorbereiding* (Komisi Persiapan) dengan tugas mempersiapkan penyelidikan rancangan ordonansi pemilihan untuk provinsi dan kabupaten di Jawa dan Madura. Ketua komisinya adalah Neytzell de Wilde, sementara anggota komisinya adalah Rup, Kerkkamp, Van Helsdingen, Stokvis, De Hoog, Kusumo Utoyo, dan Schmutzer.
12. *Commissie van voorbereiding* (Komisi Persiapan) dengan tugas mempersiapkan penyelidikan rancangan undang-undang mengenai kontrak-kontrak minyak bumi dengan BPM. Ketua komisi ini adalah Neytzell de Wilde, dengan anggota komisi

Van Helsdingen, s' Jacobs, Van Lonkhuyzen, Oppenheim, Rup, Schmutzer, Suroso, dan Stokvis.

13. *Commissie van voorbereiding* (Komisi Persiapan) dengan tugas mempersiapkan penyelidikan rancangan ordonansi peninjauan kembali ketentuan kepemilikan utuh dan rancangan undang-undang pencegahan pajak ganda. Ketua komisinya adalah Neytzell de Wilde, dengan anggota komisi yang terdiri dari Aay, Jayadiningrat, Fruin, De Hoog, s' Jacobs, Kan, Van Lonkhuyzen, Ligthart, Rup, Rückert, Sukawati, dan M.H. Thamrin.

Periode 1927-1928 merupakan kali pertama komisi *het College van Gedelegeerden* bekerja dengan anggota sebanyak 20 orang.[228] Komposisi anggotanya terdiri atas mereka yang berasal dari *Politiek Economische Bond* (PEB) sebanyak tujuh orang, yang sesungguhnya tiga di antaranya adalah golongan Bumiputra; kemudian mereka yang berasal dari *Nederlandsch Indische Vrijzinnige Bond* (NIVB) sebanyak tiga orang, dengan dua orang di antaranya golongan Bumiputra; IEV dan Budi Utomo sebanyak dua orang; CEP, IKP, ISDP, dan *Chung Hwa Hui* (CHH) masing-masing satu orang. Ada dua orang yang tidak berkaitan dengan partai, yang salah satunya adalah orang Bumiputra. Maka, jumlah keseluruhannya adalah 11 orang Eropa, 8 Bumiputra, dan 1 Timur Asing.[229] Jumlah komisi dari *het College van Gedelegeerden* pada periode ini adalah sebanyak enam komisi.[230] Komisi-komisi tersebut antara lain:

1. *Eerste Commissie* (Komisi Pertama) yang bertugas membahas permasalahan *Algemene Zaken*, *Regeering en Hooge Colleges*, *Financiën*, *Binnenlandsche Zaken*, dan *Oorlog en Marine*. Ketua komisinya adalah Neytzell de Wilde, dengan anggotanya adalah Kan, Kies, Blaauw, Mandagie, Rup, Jayadiningrat, Kerkamp, Van Helsdingen, Stokvis, dan Pauw.
2. *Tweede Commissie* (Komisi Kedua) bertugas membahas permasalahan *Landbouw*, *Nijverheid*, *en Handel*, B.O.W, *Gouvernementsbedrijven*, *Justitie*, *Onderwijs en Eeredienst*. Ketua komisinya adalah Kusumo Yudo, sementara para anggotanya adalah s' Jacobs, De Hoog, Fruin, Sukawati, Kusumo Utoyo, Ali Musa, Schmutzer, Suyono, dan Dwijosewoyo.

Periode 1927-1928 merupakan kali pertama komisi *het College van Gedelegeerden* bekerja dengan anggota sebanyak 20 orang.

228 Bob Hering, *Op.Cit.*, hlm. 71
229 *Ibid.*, hlm. 72
230 *Ibid.*, hlm. 9

3. *Stenografische Commissie* (Komisi Stenografi) bertugas membuat keputusan dari hasil laporan stenografi. Ketua komisinya adalah Neytzell de Wilde, dengna anggota Schmutzer dan Van Helsdingen.
4. *Fondscommissie* (Komisi Dana) bertugas meninjau usulan yang berhubungan dengan *fonds* (dana). Ketua komisinya adalah Neytzell de Wilde, sementara anggotanya adalah Blaauw, Suyono (pengganti), dan Kan.
5. *Reces-commissie* (Komisi Reses) yang ditunjuk oleh Ketua Volksraad pada 5 Agustus 1927 dalam rapat *College* dengan tugas melaksanakan usulan *College van Gedelegeerden* untuk mengadakan reses. Ketua komisinya adalah Neytzell de Wilde, dengan anggota Kan, Stokvis, Rup, Suyono, dan Blaauw.
6. *Bijzondere Commissie* (Komisi Khusus) yang bertugas untuk mempersiapkan penyelidikan rancangan hak istimewa atas hak hibah. Ketua komisinya adalah Neytzell de Wilde, semenara anggotanya adalah Ali Musa, Blaauw, Fruin, Van Helsdingen, s' Jacobs, dan Kan.

Sementara itu, jumlah rancangan yang diajukan oleh pemerintah untuk dibahas oleh Volksraad pada periode persidangan 1927-1928 adalah sebanyak 121 rancangan.

Sementara itu, jumlah rancangan yang diajukan oleh pemerintah untuk dibahas oleh Volksraad pada periode persidangan 1927-1928 adalah sebanyak 121 rancangan. Jumlah ini meningkat dengan sangat signifikan, jika dibandingkan dengan masa persidangan sebelumnya. Rancangan yang diajukan, antara lain mengenai rancangan anggaran untuk tahun 1928 terkait perubahan semua afdeeling, dari afdeeling I hingga X; rancangan surat keputusan akun penutup tahun 1923; rancangan undang-undang dan *Koninklijke Besluit* mengenai perusahaan asuransi jiwa; rancangan ordonansi peraturan pemerintah terkait penentuan hukuman; rancangan ratifikasi pinjaman *geweest* Kedu, *gemeente* Surabaya, dan *gemeente* Pekalongan; rancangan ordonansi pembukaan Pelabuhan Toboali, Koba, dan Jebus; rancangan ordonansi perubahan ordonansi kuli di Pantai Timur Sumatera; rancangan ordonansi retribusi "pajak burung" di Nieuw-Guinea Selatan; perubahan ordonansi pendidikan tinggi; serta rancangan ordonansi peningkatan uang negara di *gemeente* Amboina, Banjarmasin, Bandung, dan Meester Cornelis.[231]

Selain catatan daftar rancangan yang diajukan untuk dibahas di Volksraad, terdapat hal lain yang disampaikan, salah satunya adalah usulan untuk membuat undang-undang penyelidikan terkait

231 *Ibid.*, index, hlm. 10-22

kerusuhan yang disebabkan oleh komunisme. Volksraad memutuskan untuk mencegah penerapan undang-undangnya.[232]

Jumlah amandemen yang diajukan kepada Volksraad dalam masa persidangan periode 1927-1928 adalah sebanyak 26 amandemen. Amandemen yang diajukan adalah delapan amandemen mengenai anggaran untuk tahun 1928; dua amandemen terkait rancangan ordonansi untuk menarik ordonansi komisi sewa; satu amandemen tentang rancangan ordonansi pengaturan pemerintahan Sumatera Selatan; dua amandemen tentang rancangan ordonansi perbaikan ordonansi kuli; satu amandemen tentang perubahan pengaturan uang saksi bagi bumiputra dan yang sederajat; dua amandemen tentang rancangan ordonansi pemilihan untuk provinsi dan kabupaten di Jawa dan Madura; dua amandemen tentang rancangan ordonansi pengaturan kompensasi pajak pemasukan; satu amandemen tentang rancangan pengaturan pencabutan pajak provinsi, kabupaten, dan kota praja; satu amandemen tentang rancangan ordonansi pengaturan hak penghentian dan penghapusan Gubernur Jenderal; satu amandemen tentang anggaran tambahan untuk tahun 1928; satu amandemen tentang rancangan ordonansi untuk perubahan peraturan pendidikan Eropa; satu amandemen tentang rancangan perubahan surat keputusan dinas wajib untuk Hindia-Belanda; dua amandemen tentang pembatalan rancangan ordonansi di *geweest* Rembang; dan dua amandemen tentang rancangan ordonansi perubahan ordonansi Dewan Lokal dan Dewan Kota Praja.[233]

Anggota Volksraad dari kalangan Bumiputra yang mengajukan amandemen pada periode persidangan 1927-1928 adalah Suroso dengan amandemen anggaran untuk 1928, Jayadiningrat dengan amandemen rancangan ordonansi pemilihan untuk provinsi dan kabupaten di Jawa dan Madura, juga amandemen rancangan pengaturan pencabutan pajak provinsi, kabupaten, dan kota praja, Dwijosewoyo dengan amandemen rancangan ordonansi pengaturan hak penghentian dan penghapusan Gubernur Jenderal dan amandemen rancangan ordonansi untuk perubahan peraturan pendidikan Eropa.[234]

Seperti halnya meningkatnya jumlah rancangan yang diajukan oleh pemerintah untuk dibahas dalam Volksraad, jumlah mosi yang diajukan pada periode persidangan ini juga meningkat. Jumlah mosi pada periode ini tercatat ada sebanyak 69 mosi. Catatan untuk

Anggota Volksraad dari kalangan Bumiputra yang mengajukan amandemen pada periode persidangan 1927-1928 adalah Suroso dengan amandemen anggaran untuk 1928, ...

232 *Ibid.*, hlm. 23
233 *Ibid.*, hlm. 24 -27

234 *Ibid.*

daftar persoalan mosi tidak disusun secara alfabetis, antara lain:[235] mosi penggabungan departemen urusan perang dan angkatan laut, penerapan reformasi pemerintahan di Sumatra, *buitengeweesten* (daerah di luar Jawa dan Madura), memperkuat Korps Barisan di Madura, penghapusan *exorbitante rechten*, penghapusan *poenale sanctie*, perbaikan gaji pengawas sekolah dan kepala penilik sekolah, pergeseran pos untuk pengeluaran pembentukan jalur udara ke dalam anggaran tahun 1929, dan pembatasan durasi rapat di Volksraad.[236]

Para anggota Volksraad dari kalangan Bumiputra yang mengajukan mosi adalah Thamrin, Sosrohadiwijoyo, Jayadiningrat, Dwijosewoyo, Mulia, Suroso, Kusumo Utoyo, Hadiwijoyo, Sutadi, Suyono, Sosrodiprojo, Wiranata Kusuma, Sukawati, Mandagie, Ali Musa, Soangkupon, Apituley, Nya Arif, Mohamad Ali, Yahya, Ratu Langie, Mochtar, Kertoamiprojo, Otto Subrata, dan Kusumo Yudo. Mereka ada yang mengajukan mosi kepada sesama Bumiputra, namun ada pula yang mengajukan ke anggota dari kalangan Belanda.[237]

Contoh mosi yang diajukan oleh anggota Volksraad dari kalangan Bumiputra adalah mosi pengangkatan komisi yang mempelajari masalah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Jawa. Mosi ini diajukan oleh Dwijosewoyo, Hadiwijoyo, dan Sutadi dengan status ditarik. Mosi penekanan dari polisi lapangan dan reserse kepada pemerintah lokal Bumiputra di Jawa dan Madura diajukan oleh Suyono, Utoyo, Sosrodiprojo, dan Wiranata Kusuma dengan status diterima. Mosi pengaturan untuk komisi peninjauan kembali undang-undang agraria yang diajukan oleh Sukawati, Mandagie, Ali Musa, Soangkupon, Suyono, Apituley, Nya Arif, Jonkman, Mulia, Mohamad Ali, Yahya, Ratu Langie, dan Middendorp dengan status diterima. Mosi penerimaan Bumiputra untuk masuk sekolah militer Eropa di Magelang diajukan oleh Ratu Langie, Apituley, Suyono, dan Mulia dengan status mosi ditahan. Mosi penerapan reformasi pemerintahan di Sumatera Selatan diajukan oleh Sukawati, Nya Arif, dan Soangkupon dengan status dibatalkan.[238]

Contoh mosi yang diajukan oleh anggota Volksraad dari kalangan Bumiputra adalah mosi pengangkatan komisi yang mempelajari masalah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Jawa.

Surat permohonan yang masuk ke Volksraad pada periode ini adalah sebanyak 94 surat permohonan. Catatan surat permohonan disusun sesuai abjad dari A hingga Z. Di antara permasalahan yang masuk adalah *aanleg van ladang* (pembukaan ladang), *belasting* (pajak), *benoeming* (pangangkatan), *bestuur* (pemerintahan), *bezoldigingsregeling* (aturan remunerasi), *diensttijdberekening*

235 *Ibid.*, hlm. 28- 32
236 *Ibid.*
237 *Ibid.*
238 *Ibid.*, hlm. 28-30

(penghitungan waktu layanan), *electriciteitsvergunning* (izin listrik), *erfpacht* (sewa tanah), *gratie* (grasi), *grond* (lahan), *grondhuur* (sewa lahan), *grondrechten* (hak lahan), *gronduitgifte* (masalah lahan), *herplaatsing* (penempatan kembali), *justitie* (hukum), *kiesrecht* (hak pilih), *klachten* (keluhan), *leveranties* (pengiriman), *missigit* (masjid), *nalatenschap* (warisan), *onderscheiding* (penghargaan), *onderstand* (dukungan), *onregelmatigheden* (ketidakteraturan), *ontheffing uit betrekking* (pembebasan dari pekerjaan), *ontslag* (pemecatan), *overgang als beroepsofficier* (transisi sebagai petugas profesional), *overname verbouwing* (pengambilalihan renovasi), *pensioen* (pensiun), *pensioenregeling* (aturan pensiun), *politiezaken* (urusan polisi), *positieregeling* (aturan jabatan), *positieverbetering* (perbaikan jabatan), *regeling* (pengaturan), *restitutie en vervoerskosten* (restitusi dan biaya transportasi), *schadeloosstelling* (aturan kompensasi), *schadevergoeding* (ganti rugi), *standsplaatstoelage* (tunjangan tetap), *subsidies particulier onderwijs* (subsidi pendidikan swasta), *terugvordering* (pemulihan), *toelage* (tunjangan), *uitbetaling salaris* (pembayaran gaji), *verbanning* (pengasingan), *verduistering* (penggelapan), *vergoeding* (penggantian), *verkiezing* (pemilihan), *Volksraad-afgevaardigde* (perwakilan Volksraad), *vrijlating* (pembebasan), *wedersopneming in landsdienst* (reintegrasi di layanan nasional), *wenschen* (keinginan).[239]

Persoalan yang paling banyak diajukan dalam surat permohonan adalah persoalan *onstlag* (pemecatan) sebanyak sepuluh surat, *belasting* (pajak) sebanyak enam surat, *positieverbetering* (perbaikan jabatan) sebanyak enam surat, serta *justitie* (hukum), *klachten* (keluhan), *onderstand* (dukungan), *pensioen* (pensiun), *benoeming* (pengangkatan), *bestuur* (pemerintahan), *herplaatsing* (penempatan kembali) sebanyak masing-masing satu surat.[240]

Anggota Volksraad pada persidangan tahun 1927 dari kalangan Bumiputra dan Tionghoa adalah sebagai berikut:[241]

Persoalan yang paling banyak diajukan dalam surat permohonan adalah persoalan *onstlag* (pemecatan) sebanyak sepuluh surat, ...

239 *Ibid.*, hlm. 33-45
240 *Ibid.*
241 *Handelingen der Volksraad, Zittingsjaar* 1927-1928, hlm. 2-5

No	Nama	Pekerjaan	Daerah pemilihan	Tempat tinggal	Menjadi anggota
1.	Ali Musa	Anggota *College van Gedelegeerden*	VII Sumatera Utara	Buitenzorg	16 Mei 1927
2.	Dr. H.D.J. Apituley	Pegawai Kesehatan Kelas I	XI Maluku	Weltevreden	16 Mei 1927
3.	R.A.A. Jayadiningrat	Anggota *College van Gedelegeerden*	I Jawa Barat	Weltevreden	16 Mei 1927
4.	M.W. Dwijosewoyo	Anggota *College van Gedelegeerden*	-	Buitenzorg	16 Mei 1927
5.	P.H. Hadiwijoyo	Kepala Bagian Keraton	IV Vorsten-landen	Surakarta	16 Mei 1927
6.	Dr. Ir. Han Tiauw Tjong	Insinyur	-	Pekalongan	16 Mei 1927
7.	Yahja Gelar Datuk Kayo	Kepala Distrik Kelas I	VI Minang-kabau	Air Bangis	16 Mei 1927
8.	Hok Hoei Kan	Anggota *College van Gedelegeerden*	-	Weltevreden	16 Mei 1927
9.	R.A.A. Kertoamiprojo	Bupati	III Jawa Timur	Pamekasan	16 Mei 1927
10.	Khouw Kim An	Mayor Cina, Ketua Dewan Cina	-	Weltevreden	16 Mei 1927
11.	P.T.A. Kusumo Yudo	Anggota *College van Gedelegeerden*	III Jawa Timur	Weltevreden	16 Mei 1927
12.	R.M.A.A. Kusumo Utoyo	Anggota *College van Gedelegeerden*	II Jawa Tengah	Weltevreden	16 Mei 1927
13.	Kusuma Subrata	Provinsi Jawa Barat	I Jawa Barat	Mr. Cornelis	16 Mei 1927
14.	P.A. Mandagie	Anggota *College van Gedelegeerden*	X Celebes	Weltevreden	16 Mei 1927
15.	Mochtar Bin Prabu Mangku Negara	Pengawas Kelas I B.O.W.	V Sumatera Selatan	Weltevreden	16 Mei 1927
16.	Mulia (Todung gelar Sutan Gunung)	Guru Kelas I *Normaalschool* Mr. Cornelis	-	Mr. Cornelis	16 Mei 1927
17.	Pangeran Mohamad Ali	Anggota Dewan Kota Praja Banjarmasin	IX Borneo	Banjarmasin	16 Mei 1927
18.	Teuku Nya Arif	Kepala Sagi XXVI Mukim	-	Kutaraja	16 Mei 1927
19.	Dr. G.G.S.J. Ratu Langie	Partikelir	X Celebes	Buitenzorg	16 Mei 1927
20.	Soangkupon (Abdul Firman gelar Maharaja)	Pejabat Inspektur Kepala Departemen Keuangan	VIII Sumatera Timur	Weltevreden	16 Mei 1927
21.	R.A.A. Suyono	Anggota *College van Gedelegeerden*	III Jawa Timur	Weltevreden	16 Mei 1927
22.	Cokorda Gde Raka Sukawati	Anggota *College van Gedelegeerden*	XII Kepulauan Sunda Kecil	Weltevreden	16 Mei 1927
23.	R.P. Suroso	Partikelir	III Jawa Timur	Mojokerto	16 Mei 1927
24.	H. Sutadi	Jurnalis	-	Surakarta	16 Mei 1927

25.	R.T.A. Sosrodiprojo	Bupati	II Jawa Tengah	Wonosobo	16 Mei 1927
26.	R.T.A. Sosrohadiwijoyo	Bupati	II Jawa Tengah	Demak	16 Mei 1927
27.	Mohamad Husni Thamrin	*Wethouder* Batavia	-	Weltevreden	16 Mei 1927
28.	Tjia Tjeng Siang	Kapiten Cina	-	Pontianak	16 Mei 1927
29.	R.A.A. Wiranata Kusuma	Bupati Bandung	I Jawa Barat	Bandung	16 Mei 1927
30.	Yo Heng Kam	Kapiten Cina, Anggota Dewan Cina, Wakil Provinsi Jawa Barat	-	Weltevreden	16 Mei 1927

Pada 16 Mei 1927, Muhammad Husni Thamrin, seorang *Wethouder* Kota Praja Batavia, diangkat menjadi anggota Volksraad.[242] Pengangkatan M.H. Thamrin sebagai anggota Volksraad dimaksudkan untuk menggantikan posisi Dr. Sutomo.[243] Pada periode ini, Kusumo Utoyo kembali berkiprah di Volksraad. Kali ini, Kusumo Utoyo telah pensiun dari jabatan bupati dan masuk Volksraad karena jabatannya sebagai ketua di Budi Utomo. Sebagai tokoh senior, Kusumo Utoyo bekerja sama dengan M.H. Thamrin, Dr. Sutomo, Datuk Tumenggung, Ratu Langie, dan Wiranata Kusumah.[244]

Salah satu tokoh Bumiputra dalam keanggotaan Volksraad lainnya adalah Yahya Gelar Datuk Kayo dari Minangkabau. Ia terpilih menjadi anggota Volksraad pada tahun 1927. Sidang pertama Volksraad yang ia ikuti adalah sidang yang diselenggarakan pada bulan Juni 1927. Ketika terpilih menjadi anggota Volksraad, ia masih menjadi Demang Padang Panjang, yang kemudian dipindahkan ke Air Bangis (Desember 1928–Mei 1929).[245]

Yahya adalah salah satu dari 25 wakil golongan Bumiputra dari jumlah keseluruhan 55 orang yang menjadi anggota Volksraad. Ia mewakili Minangkabau untuk periode 1927–1931, menggantikan Tuan Lutan Datuk Rangkayo Maharajo. Dari seorang penghulu, pemuka Masyarakat Nagari Koto Gadang, dan demang senior di Padang Panjang, Yahya akhirnya menjadi anggota Volksraad.[246] Ada anggapan bahwa sesungguhnya pemerintah setempat "membuang" Yahya ke Volksraad karena ia berseteru secara terbuka dengan Residen Whitlau. Yahya mengkritik ketidakadilan yang dirasakan oleh *Korps Ambtenar*

242 "De Volksraad", *Bataviaasch Nieuwsblad*, 16 Mei 1927, hlm. 1
243 "De plaats van dr. Soetomo", *Het Vaderland*, 16 Mei 1927, hlm. 1
244 Atashendartini Habsjah (ed.), *Perjalanan Panjang Anak Bumi*, *Op.Cit.*, hlm. 181
245 Azizah Etek (ed.), 2008, *Kelah Sang Demang Jahja Datoek Kajo: Pidato Otokritik di Volksraad 1927-1938* (Yogyakarta: LKIS), hlm. 6
246 *Ibid.*, hlm. 9

Binnenlansche Bestuur Bumiputra di Sumatera Barat. Hal lain adalah keberadaan Yahya di Padang Panjang, di mana ia merupakan tokoh yang paling mengetahui perihal Pemberontakan Silungkang pada 1927.[247]

Dalam pidato pertamanya tanggal 16 Juni 1927, Yahya menyatakan:

> "*Toean Voorzitter! Dengan senang hati saja pada saat ini doedoek bersama dengan toean-toean pada madjelis persidangan ini, dimana saja bersama-sama dengan toean-toean boleh memberi pemandangan kepada pemerintah apa-apa jang dirasa baik oentoek pemerintah dan ra'jat.*"[248]

Ada beban tersendiri bagi Yahya ketika ia harus memikul jabatan sebagai anggota Volksraad. Pada periode sebelumnya, yaitu di periode 1921-1923, salah satu anggota Volksraad, Haji Agus Salim, menyebut Volksraad sebagai suatu "komedi omong" oleh karena isinya yang hanya melulu pembicaraan dalam bentuk pidato-pidato. Isi pidato-pidato tersebut pun hanya sekedar pembicaraan yang ingin menarik hati atau memuaskan para pendengarnya. Yahya ingin mengubah pandangan "komedi omong" tersebut, sehingga dalam pidatonya, Yahya melanjutkan:

> "*Toean Voorzitter! Meskipoen persidangan Diwan Ra'jat di tanah Hindia Nederland soedah berdjalan sekian tahoen, tetapi masih kedengaran soeara dari segala pihak membantah mengatakan "Diwan Ra'jat tidak ada ertinja" dan ada poela kedengaran soeara mengatakan "Volksraad tempat komidi omong". Bantahan itoe saja lawani. Berdirinja Diwan Ra'jat ini lama kelamaan akan menjenangkann hati hamba ra'jat di Hindia Nederland dan akan membawa keamanan jang sempoerna.*"[249]

... salah satu anggota Volksraad, Haji Agus Salim, menyebut Volksraad sebagai suatu "komedi omong" oleh karena isinya yang hanya melulu pembicaraan dalam bentuk pidato-pidato.

Yahya membantah pendapat bahwa Volksraad hanyalah sekedar "komidi omong" tanpa memiliki fungsi yang jelas. Menurut Yahya:

> "*Boektinja: sebeloemnja Diwan Ra'jat diadakan maka pemerintah tinggi selaloe mendengar chabar hal keadaan negeri ialah dari pihak wakil-wakil pemerintah sadja, djarang benar pemerintah tinggi*

247 *Ibid.*
248 *Handelingan van den Volksraad, Zittingsjaar* 1927-1928, *3de vergadering 16 Juni* 1927, hlm. 100
249 *Ibid.*

mendengar chabar keadaan negeri dari anak negeri sendiri. Pemerintah mesti pertjaja kepada chabar2 jang diterima dari wakil pemerintah."[250]

Sebelum ada Volksraad, pemerintah hanya mendengar dari pihak pemerintah. Pemerintah tidak mendapatkan cukup informasi dari penduduknya. Namun, setelah ada Volksraad, situasi berubah.

Ketika Yahya pertama kali berpidato di depan sidang Volksraad tanggal 16 Juni 1927, hal tersebut bukanlah sesuatu yang lazim untuk dilakukan, sebab Yahya berpidato menggunakan bahasa Melayu (Indonesia). Selain Agus Salim, Yahya adalah orang kedua yang menggunakan bahasa Melayu (Indonesia) dalam pidato pertamanya. Pada sidang Volksraad tanggal 22 Juni 1927, Yahya kembali menggunakan bahasa Melayu. Yahya berkata:

Yahya Datuk Kayo
(Sumber: *Volksalmanak Melajoe Serie* No. 77, 1928)

"*Tuan Voorzitter! Saja berharap kepada toean2 jang berhadir dalam Diwan Ra'jat ini soeka menjerikati pembitjaraan saja. Sekiranja diantara toean2 ada jang tidak menjerikati pembitjaraan saja, dengan hormat saja minta, soepaja dilakoekan dengan berbahasa Melajoe.*"[251]

Yahya memberikan himbauan kepada para anggota Volksraad yang hadir untuk menyela pembicaraannya jika ada suatu ketidakpantasan, namun perlu dilakukan dalam bahasa Melayu.

Tokoh lain dari Volksraad yang berasal dari masyarakat Bumiputra adalah Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratu Langie (1890–1949), atau yang lebih dikenal dengan panggilan Sam Ratu Langie. Ia merupakan wakil dari *Persatoean Minahasa* yang menjadi anggota Volksraad pada periode 1927 sampai 1937. Seperti halnya para anggota baru Volksraad, Ratu Langie memberikan pidatonya di depan sidang Volksraad pada 15 Juni 1927. Kalimat-kalimat awal pidatonya adalah sebagai berikut:

"*Mijnheer der Voorzitter.*

Het is eigenlijk met zeer veel schroom dat ik het woord gevraagd heb. Voor iemand, die Jaren lang geleefd heeft in een kleine maatschappij, een kleine

250 *Ibid.*
251 *Ibid.*, hlm. 327

samenleving met kleine vraagstukken en problemen is het heel zich in korten tijd te oriënteeren in een samenleving, waar de vraagstukken en problemen zich vertoonen in voor zijn oogen gigantische afmetingen.

Ik heb jarenlang geleefd in een land waar de hamerslagen van het pulseerende groote leven slechts in zwakke nagalmen doordringen. Ik spreek expresselijk van nagalmen, Mijnheer de Voorzitter, omdat als de berichten van berichten van belangrijke gebeurtenissen in de Minahasa zijn gekomen deze misschien reeds op hun beurt overstemd zijn geworden door andere.

Het psychologisch effect van deze zaak is: mindere en steeds meer verflauwende belangstelling voor de groote vraagstukken, totdat men tenslotte niet meer 'bij' is en op het laatst er heelemaal uitraakt."[252]

[Tuan Ketua,

Sebenarnya saya segan sekali minta kesempatan berbicara. Untuk seorang yang bertahun-tahun hidup dalam sebuah masyarakat kecil, sebuah kehidupan bersama yang kecil dengan pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah yang kecil, sungguh sulit dalam waktu yang singkat berorientasi ke dalam kehidupan bersama dengan pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah di hadapannya dalam ukuran besar.

Bertahun-tahun saya hidup di sebuah daerah dengan irama kehidupan yang serba cepat itu hanyalah kedengaran gemanya. Saya sengaja menyebutnya gema, Tuan Ketua karena apabila berita-berita tentang kejadian penting di Minahasa tiba, semuanya sudah tertimpa oleh berita lainnya.

Yahya memberikan himbauan kepada para anggota Volksraad yang hadir untuk menyela pembicaraannya jika ada suatu ketidakpantasan, namun perlu dilakukan dalam bahasa Melayu.

252 *Handelingen van Volksraad Zittingsjaar* 1927-1928, *2de Vergadering*, 15 *Juni* 1927, hlm. 41

Efek psikologisnya, semakin berkurang dan luntur perhatian terhadap pertanyaan-pertanyaan besar, sampai akhirnya orang tidak lagi mengikuti zaman dan akhirnya ketinggalan sama sekali.]

Dalam awal pidatonya, Ratu Langie mengungkapkan perbedaan pandangan antara masalah kecil di dalam Minahasa Raad, serta masalah besar di Volksraad, tempat ia sekarang menjadi salah satu anggotanya. Dalam pidato awalnya, Ratu Langie juga mengemukakan pendapat supaya pemerintah bersedia untuk menghapuskan segala perbedaan antara pribumi dan orang Belanda, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun pendidikan.

Ratu Langie juga membahas istilah *overheersching* (penjajahan) dan *leiding* (pimpinan). Istilah yang pada masa itu merupakan hal yang sensitif:

"*Welnu dan, Mijnheer de Voorzitter, ik ben overtuigd van den ernst van deze Regeering om in het bestuur dezer landen steeds meer "leiding" te substitueeren in de plaats van "overheersching"; de toezeggingen in de rede Z.E. den Gouverneur-Generaal ten aanzien van de hoogste posten in den lande en van een herziening van de numerieke verhouding der nationaliteiten in de vertegenwoordigende lichamen wijzen misschien in die richting. Op dit punt kunnen Regeering en nationalisten elkander reeds gevonden hebben, laat mij de hoop uitspreken, dat dit geen bloot ontmoetingspunt is, maar dat vanaf dit punt de richtlijnen parallel zullen loopen.*"[253]

[Maka dari itu, Tuan Ketua, saya yakin pada keseriusan pemerintah dalam mengatur pemerintahannya di negeri ini untuk menggantikan istilah "penjajahan" dengan "pimpinan", seperti janji-janji dalam pidato Yang Mulia Gubernur Jenderal tentang jabatan-jabatan tertinggi di negeri ini dan

Dalam awal pidatonya, Ratu Langie mengungkapkan perbedaan pandangan antara masalah kecil di dalam Minahasa Raad, serta masalah besar di Volksraad, tempat ia sekarang menjadi salah satu anggotanya.

253 *Ibid.*, hlm. 47

tentang peninjauan kembali jumlah hubungan yang tak terhitung hubungan-hubungan kaum nasionalis di dalam badan-badan perwakilannya, mungkin mengacu ke arah tersebut. Dalam titik ini, izinkan saya mengungkapkan harapan supaya hal ini tidak menjadi pertemuan yang sia-sia, tetapi bertolak pada titik garis penunjuk yang akan berjalan sejajar.]

Pendapat Ratu Langie mengenai penggantian istilah "penjajah" menjadi "pimpinan" merupakan hal yang menarik jika ditelaah berdasarkan semangat zamannya. Setidaknya, kesadaran dari seseorang yang mendapatkan pendidikan di Belanda menjadi salah satu pembuka kesadaran dalam berbangsa.

Pendapat Ratu Langie mengenai penggantian istilah "penjajah" menjadi "pimpinan" merupakan hal yang menarik jika ditelaah berdasarkan semangat zamannya.

Ketika dilakukan pembahasan tentang beban hutang Hindia-Belanda yang disebut mencapai 810 juta gulden, kalangan pergerakan Bumiputra di Volksraad memberikan reaksi keras, khususnya seperti yang dilakukan oleh Suroso. Reaksi keras tersebut dimaksudkan untuk menyuarakan kritik atas pembebanan hutang kepada Hindia-Belanda. Suroso berpendapat bahwa negara induk Kerajaan Belanda justru memiliki *eereschuld* (hutang budi) terhadap Hindia-Belanda, sehingga pemerintah Belanda-lah yang seharusnya membayar hutang tersebut dan mengurangi beban yang harus ditanggung oleh rakyat Hindia-Belanda.[254] Berkaitan dengan persoalan tersebut, Ratu Langie, Kusumo Utoyo, dan I.J. Kasimo mengajukan mosi sebagai berikut:

"*De Volksraad, gehoord de debatten, van meening, dat bestaande schuldenlast een zware druk uitoefent op de Indische gemeenschap en de overheid belemmert te voldoen aan de natuurlijke behoefte van de samenleving aan groei en verbetering van de overheids voorziening in openbare verzorging; noodigt de regeering uit, in overleg met het opperbestuur stappen te doen, die er toe zullen leiden, dat een belangrijk deel van den schulden ten lasten komt van de Nederlandsche Staatsbegrooting.*"

[Volksraad, setelah mendengar perdebatan, berpendapat bahwa beban hutang yang ada

254 Atashendartini Habsjah (ed.), *Perjalanan Panjang Anak Bumi*, *Op.Cit.*, hlm. 182

memberikan tekanan besar pada masyarakat Hindia dan menghalangi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan alami masyarakat demi pertumbuhan dan perbaikan sarana pemerintah untuk kesejahteraan publik. Maka, kami mengundang pemerintah, berkonsultasi dengan pemerintahan tertinggi, untuk mengambil langkah-langkah, yang akan mengarah ke bagian penting dari hutang yang dikeluarkan oleh anggaran Negara Belanda.][255]

Inti dari mosi tersebut adalah hutang Hindia-Belanda yang merupakan beban berat. Oleh karena itu, pemerintah dihimbau untuk dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat mendorong perbaikan kehidupan kaum Bumiputra. Mereka mendesak supaya sebagian hutang dibebankan kepada negeri Belanda. Mosi ini mendapatkan dukungan luas dalam Volksraad karena banyak yang tidak setuju jika hutang dibebankan kepada rakyat yang kehidupannya sudah sangat sulit.

Inti dari mosi tersebut adalah hutang Hindia-Belanda yang merupakan beban berat. Oleh karena itu, pemerintah dihimbau untuk dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat mendorong perbaikan kehidupan kaum Bumiputra.

Masa persidangan tahun 1928-1929 dibuka pada 15 Mei 1928. Sidang dibuka pada pukul sembilan pagi, yang dimulai dengan pidato Gubernur Jenderal A.C.D. De Graeff. Pada pukul 10.30 pagi, Ketua Volksraad Mr. A. Neytzell de Wilde menyampaikan pidatonya. Jumlah anggota di periode ini adalah sebanyak 49 orang, yaitu Aay, Ali Musa, Apituley, Van Baalen, Beets, Ten Berge, Blaauw, Bruineman, Jayadiningrat, Dwijosewoyo, Fruin, Hadiwijoyo, Van Helsdingen, De Hoog, Yahya, Jonkman, Kan, Khouw Kim An, Kies, Kusumo Yudo, Kusumo Utoyo, Kusuma Subrata, Ligthart, Van Lonkhuyzen, Mandagie, Meyer Ranneft, Middendorp, Mochtar, Mulia, Mohamad Ali, Monod de Froideville, Ratu Langie, Rup, Rückert, Schmutzer, Soangkupon, Suyono, Sukawati, Suroso, Sutadi, Sosrodiprojo, Sosrohadiwijoyo, Stokvis, Thamrin, Yo Heng Kam, Van Zallinge, Zeydel, dan Zuyderhoff. Wakil pemerintah yang hadir adalah seorang *de hoofden der departementen van algemeen bestuur*, *de Regeeringsgemachtigde voor algemeene zaken*, *de adviseur voor de decentralisatie* (Kepala Departemen Administrasi Umum sebagai perwakilan resmi Pemerintah Kolonial untuk urusan umum, termasuk penasihat untuk desentralisasi).

255 *Ibid.*, hlm. 183

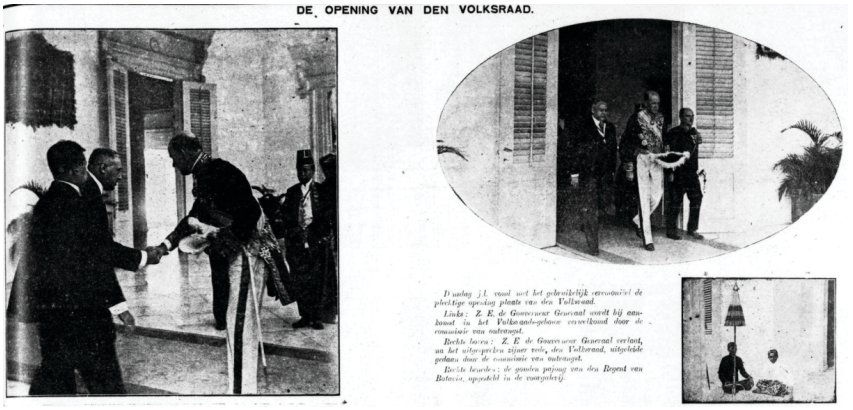
DE OPENING VAN DEN VOLKSRAAD.

Gambar 7. Sidang Pembukaan Volksraad tahun 1928

[Sumber: *Bataviaasch Nieuwsblad*, 19 Mei 1928]

Tahun 1928, bertepatan dengan sepuluh tahun berdirinya Volksraad di Hindia-Belanda, Ketua Volksraad Mr. A. Neytzell de Wilde menyatakan dalam pidatonya:

Tahun 1928, bertepatan dengan sepuluh tahun berdirinya Volksraad di Hindia-Belanda, ...

> "*Hoewel dezer dagen de Volksraad reeds tien jaar zal bestaan hebben, wordt nog telkens de vraag vernomen, hoe het mogelijk is, dat men met de ontaarding der Westersche parlementen voor oogen het toch aangedrufd heeft, hier te lande een vertegenwoordigend lichaam in te stellen en daaraan gedurende den loop der jaren in Westersche richting voort te bouwen; met de kans, zoo niet de zekerheid, dat ook dit College denzelfden weg van verwording zal opgaan, als bij de parlementen geconstateerd wordt en wegens de koloniale toestanden allicht met nog nadeeliger gevolgen dan elders.*"[256]
>
> [Meskipun hari-hari ini Dewan Rakyat genap berusia sepuluh tahun, masih muncul pertanyaan bagaimana mungkin bahwa dengan kemunduran parlemen Barat, tidak dapat dihindari bagi kita untuk membentuk badan perwakilan di negeri ini. Selama bertahun-tahun, kita terus membangun mengikuti Barat berdasarkan peluang, jika bukan

256 *Handelingen van Volksraad Ziitingsjaar* 1928-1929, *Eerste Vergadering* 15 *Mei* 1928, hlm. 10

kepastian, bahwa *College* (dewan) ini juga akan berjalan di jalur degenerasi yang sama, seperti yang menjadi perhatian parlemen, dan karena situasi kolonial, itu mungkin akan memiliki konsekuensi yang lebih merugikan daripada di tempat lain.]

Selanjutnya de Wilde mengatakan:

> "*Aangezien een goed werkende volksvertegenwoordiging van zoo 'n erkend groot nut voor een land kan zijn en het mede van zooveel waarde is, dat ook juist zij, die buiten den Volksraad staan, vertrouwen in de goede werking van dit College behouden of verkrijgen, zal het de moeite loonen om op twee quaesties wat dieper in te gaan.*"[257]
>
> [Oleh karena perwakilan rakyat yang berfungsi dengan baik dapat menjadi manfaat besar yang diakui bagi suatu negara dan itu juga sangat berharga sehingga bahkan mereka yang berada di luar Volksraad memiliki keyakinan atas berfungsinya *College* (dewan) ini. Keberadaan Dewan ini akan sepadan dengan usaha untuk mendalami dua persoalan tersebut.]

Salah satu anggota Volksraad dari kalangan Bumiputra adalah Teuku Nyak Arif (1899–1946) dari Aceh yang diangkat menjadi anggota pada 1927.

Salah satu anggota Volksraad dari kalangan Bumiputra adalah Teuku Nyak Arif (1899–1946) dari Aceh yang diangkat menjadi anggota pada 1927. Setelah ia menyelesaikan Sekolah Raja jurusan pamong praja pada 1908 di Bukittinggi, Teuku Nyak Arif melanjutkan sekolah ke *Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA), atau Sekolah Pendidikan bagi Calon Pegawai Bumiputra pada tahun 1912 di Banten, dan selesai pada 1915. Setelah itu, Nyak Arif kembali ke Aceh dan bekerja sebagai pegawai urusan distribusi beras rakyat. Ia juga aktif dalam kegiatan politik dengan menjadi anggota *Nationale Indische Partij* (NIP) pada 1918 yang sebelumnya bernama Insulinde. Atas usulan dari Residen Aceh, pada 16 Mei 1927, Nyak Arif diangkat menjadi anggota Volksraad. Di samping itu, ia juga menjabat sebagai Panglima Sagi XXVII. Meskipun telah diangkat menjadi anggota Volksraad, Nyak Arif lebih banyak tinggal di Aceh.

257 *Ibid.*

Beberapa bulan sebelum Kongres Pemuda dilaksanakan pada bulan Oktober 1928, dalam sidang Volksraad 18 Juni 1928, Nyak Arif menyampaikan pidato dalam bahasa Belanda yang berisikan konsep "Indonesia". Pada saat itu, konsep "Indonesia" masih berupa cita-cita dan merupakan hal yang sensitif bagi Pemerintah Kolonial. Dalam pidatonya, Nyak Arif menyatakan:

> *"Mijnheer de voorzitter! Wanneer men den inwendingen politieke toestand hier te lande bespreekt, dan kan het woord "Indonesië" niet onaangeroerd blijven. Sommige sprekers gebruiken het gaarne, andere daarentegen weer met tegenzin. Ik echter behoor tot diegenen, die het woord "Indonesië" met genoegen gebruiken. Immers, de vorming van een Indonesische natie is in de naaste toekomst geen idee fixe doch een mogelijkheid; de basis ervan bestaat reeds. In dit verband moge worden verwezen naar de taal, kunst en het gronden recht. Het is wel degelijk mogelijk en gewenscht dien reeds bestaanden grondslag binnen de perken van den wet, voort te bouwen in de richting van een nationale eenheid, een der noodzakelijke voorwaarden om te komen tot staatkundige vrijheid."*[258]

> [Tuan Ketua! Jika kita membicarakan keadaan politik di dalam negeri ini, maka tidak dapat dipungkiri menyinggung kata "Indonesia". Beberapa pembicara memakainya dengan segala senang hati, sebaliknya yang lain segan memakai kata "Indonesia" itu. Namun, saya sendiri termasuk di antara orang-orang yang dengan segala senang hati memakai kata "Indonesia". Memang, sesungguhnya, pembentukan suatu kesatuan nasional Indonesia dalam waktu yang dekat ini, bukanlah suatu impian yang hampa tetapi suatu kemungkinan. Dasar-dasar pembentukannya sudah ada. Dalam hubungan ini dapat ditunjukkan adanya bahasa, kesenian, dan hak dasar. Maka, adalah mungkin sekali dan

Beberapa bulan sebelum Kongres Pemuda dilaksanakan pada bulan Oktober 1928, dalam sidang Volksraad 18 Juni 1928, Nyak Arif menyampaikan pidato dalam bahasa Belanda yang berisikan konsep "Indonesia".

258 *Handelingen van Volksraad Zittingsjaar* 1928-1929, hlm. 166

sangat diharapkan dasar-dasar yang telah ada itu dikembangkan dalam batas-batas hukum yang ada ke arah suatu kesatuan nasional, salah satu di antaranya syarat-syarat mutlak untuk mencapai kemerdekaan dalam bernegara.]

Kelak Nyak Arif bersama M.H. Thamrin membentuk Fraksi Nasional di dalam Volksraad. Selain Thamrin, dalam Fraksi Nasional tersebut terdapat Kusumo Utoyo, Dwijosewoyo, Yahya Datuk Kayo, Mochtar, Soangkupon, Pangeran Ali, Satudi, dan R.P. Suroso.

Pada periode persidangan Volksraad 1928–1929, terdapat delapan komisi.[259] Komisi-komisi tersebut adalah:

1. *Commisie voor het onderzoek van de geloofsbrieven* (Komisi Untuk Penyelidikan Surat-surat Kepercayaan) dengan tugas menyelidiki surat kepercayaan anggota yang dipilih. Anggota dari komisi ini adalah Jonkman, Mulia, dan Monod de Froideville.
2. *Commissie voor de huishoudelijke aangelegenheden* (Komisi Untuk Urusan Rumah Tangga) dengan tugas yang tercantum dalam Pasal 10 *de Reglement van Orde*. Ketua komisinya adalah Ketua Volksraad, dengan anggota Kan dan Kies.
3. *Commissie voor de verzoekschriften* (Komisi Untuk Surat Permohonan) dengan tugas membuat laporan surat permohonan yang masuk ke Volksraad dan *het College van Gedelegeerden*. Anggota komisinya adalah De Hoog, Kan (pengganti), Beets, Sukawati, dan Jonkman.
4. *Commisie van overleg* (Komisi Konsultasi) dengan tugas menghubungkan antara Volksraad dengan pemerintah. Jika diperlukan, komisi ini dapat memberikan saran kepada ketua. Ketua komisi ini adalah Ketua Volksraad, dengan anggota komisi Kusumo Yudo (pengganti), Kies, De Hoog (pengganti), Blaauw, Kusumo Utoyo (pengganti), Dwijosewoyo, Van Helsdingen (pengganti), Mulia, Schmutzer (pengganti), Ten Berge, Stokvis (pengganti), Middendorp, Suroso (pengganti), Ratu Langie, Jayadiningrat (pengganti), Aay, Van Zalinge (pengganti), Bruineman, Kan (pengganti), dan Khouw Kim An.

Kelak Nyak Arif bersama M.H. Thamrin membentuk Fraksi Nasional di dalam Volksraad.

259 *Handelingen van Volksraad Zittingsjaar* 1928-1929, *Index*, hlm. 7-8

5. *Commissie van voorbereiding* (Komisi Persiapan) dengan tugas mempersiapkan penyelidikan rancangan keputusan rekening akhir pengeluaran dan pemasukan Hindia-Belanda tahun 1924. Anggota komisi ini antara lain Ligthart, Rup, dan Stokvis.
6. *Commissie voor de verslagen van den Algemeene Rekenkamers in Nederland en Nederlandsch-Indië over het jaar* 1927 (Komisi untuk Laporan Dewan Audit Umum di Belanda dan Hindia-Belanda tentang tahun 1927) dengan tugas untuk mempelajari Laporan Tahunan Dewan Audit Umum tahun 1927. Anggota komisi ini adalah Ligthart, Rup, dan Stokvis.
7. *Commissie van voorbereiding* (Komisi Persiapan) dengan tugas menyelidiki rancangan ordonansi pengaturan pengadilan Bumiputra di wilayah yang diperintah langsung. Ketua komisinya adalah Ketua Volksraad, sementara anggota komisi terdiri dari Ali Musa, Blaauw, Jonkman, Mandagie, Mochtar, Soangkupon, Suyono, dan Suermondt.
8. *Commisie voor het onderzoek van den geloofsbrief van het gekozen lid Tjipto Mangoenkoesoemo* (Komisi Penyelidikan Surat Kepercayaan Anggota yang Dipilih, yaitu Cipto Mangunkusumo), dengan Oppenheim sebagai ketua komisi, sementara Jonkman dan Thamrin menjadi anggotanya.

Tweede Commissie (Komisi Kedua) bertugas menangani permasalahan yang berkaitan dengan *Landbouw, Nijverheid, en Handels, Burgerlijke Openbare Werken, Gouvernements Bedrijven, Justitie, dan Onderwijs en Eerdienst.*

Sementara itu, jumlah komisi *het College van de Gedelegeerden* pada periode persidangan ini adalah sebanyak empat komisi.[260] Komisi-komisi tersebut antara lain:

1. *Eerste Commissie* (Komisi Pertama) bertugas untuk menangani permasalahan dalam *Algemeene Zaken*, *Regeering en Hooge Colleges*, *Financiën*, *Binnenlandsche Bestuur*, dan *Oorlog en Marine*. Ketua komisinya dipegang oleh Ketua Volksraad, dengan anggota Kan, Kies, Blaauw, Mandagie, Rup, Kerkamp, Van Helsdingen, Stokvis, dan Bruineman.
2. *Tweede Commissie* (Komisi Kedua) bertugas menangani permasalahan yang berkaitan dengan *Landbouw*, *Nijverheid, en Handels*, *Burgerlijke Openbare Werken*, *Gouvernements Bedrijven*, *Justitie*, dan *Onderwijs en Eerdienst*. Ketua komisinya adalah Kusumo Yudo, dengan para anggota s' Jacob, De Hoog, Fruin, Sukawati, Kusumo Utoyo, Ali Musa,

260 *Ibid.*, hlm. 9

Schmutzer, Suyono, dan Dwijosewoyo.

3. *Stenografische Commissie* (Komisi Stenografis) bertugas untuk memutuskan jika ada perselisihan dalam laporan stenografi. Ketua komisinya adalah Ketua Volksraad, sementara anggotanya adalah Schmutzer dan Van Helsdingen.
4. *Fondscommissie* (Komisi Dana) membahas usulan-usulan yang berhubungan dengan dana. Jabatan ketua komisi dipegang oleh Ketua Volksraad, dengan anggota Blaauw, Suyono (pengganti), dan Kan.

Jumlah amandemen yang diajukan pada periode ini adalah sebanyak 19 amandemen.[261] Amandemen yang diajukan, antara lain tujuh amandemen tentang anggaran tahun 1929, tiga amandemen terkait rancangan ordonansi peninjauan kembali ketentuan retribusi lahan pada periode persidangan 1927-1928, satu amandemen terkait rancangan ordonansi pemindahan wewenang dewan provinsi dan kabupaten, satu amandemen terkait rancangan perubahan ordonansi satu kota praja, satu amandemen terkait rancangan ordonansi pembentukan Provinsi Jawa Barat, satu amandemen terkait rancangan ordonansi ratifikasi keputusan peminjaman dari Dewan Kota Praja Surabaya, satu amandemen terkait rancangan ordonansi persetujuan pemilihan kepala desa dan pemimpin di kota praja Bumiputra di luar Jawa dan Madura, satu amandemen terkait rancangan ordonansi perubahan peraturan sewa tanah di Vorstenlanden, satu amandemen terkait rancangan keputusan anggaran untuk bagian pertama tahun 1929, satu amandemen terkait rancangan perubahan ordonansi pajak perusahaan tahun 1925, satu amandemen terkait rancangan perubahan peraturan lelang.[262]

Amandemen yang diajukan, antara lain tujuh amandemen tentang anggaran tahun 1929

Pada periode persidangan Volksraad 1928–1929, jumlah mosi yang diajukan adalah sebanyak 41 mosi. Para anggota Volksraad Bumiputra yang mengajukan mosi, antara lain: (1) Dwijosewoyo, Suroso, Subrata, Sutadi, dan Thamrin mengenai pengurangan bunga untuk bangunan jenis A dari dua bulan menjadi satu bulan dengan status ditarik; (2) Suroso, Stokvis, dan Dwijosewoyo mengenai tanaman wajib setelah mengijon padi di lahan yang disewakan pada perusahaan gula dengan status ditahan; (3) Stokvis, Dwijosewoyo, dan Jayadiningrat mengenai pengaturan hipotek untuk Bumiputra dengan status ditolak; (4) Mulia,

261 *Ibid.*, hlm. 27-30
262 *Ibid.*

Sutadi, dan Sukawati mengenai pembentukan lembaga kursus bagi bahasa lokal, hingga kesempatan pendidikan sampai tingkat menengah dengan status diterima.[263]

Terdapat satu satu persoalan yang muncul di kalangan pers Belanda, lingkaran Pemerintah Kolonial, dan juga dalam perdebatan di Volksraad. Persoalan itu adalah persoalan seragam bagi para pejabat militer dan pegawai rendah kolonial. Sebenarnya, persoalan ini pernah muncul pada periode persidangan tahun 1925, namun tidak dilanjutkan. Para pejabat militer dan pegawai rendah kolonial, atau bahkan bagi mereka yang sedang tidak bertugas, diminta untuk lebih sering mengenakan seragam-seragam berkerah kaku dan berwarna serba putih. Sebelumnya, seragam seperti ini hanya dikenakan dalam kesempatan-kesempatan acara seremonial, terlepas dari kesulitan, serta biaya yang dibutuhkan untuk menganji dan memutihkan seragam-seragam tersebut.[264]

Pembukaan sidang Volksraad periode 1929–1930 dilaksanakan pada 15 Juni 1929.[265] Dalam pembukaan sidang Volksraad, Gubernur Jenderal A.C. Dirk de Graeff menyampaikan pidatonya. Ketua Volksraad ketika itu adalah J.W. Meyer Ranneft, dengan para anggota sebanyak 50 orang, termasuk ketua. Para anggota Volksraad tersebut adalah Van Aalderen, Ali Musa, Apituley, Van Baalen, Ten Berge, Blaauw, Bruineman, Dahler, Dwijosewoyo, Engelenberg, Fruin, Hadiwijoyo, Van Helsdingen, De Hoog, Hulstijn, s' Jacob, Yahya, Jonkman, Kan, Kerkkamp, Khouw Kim An, Kusumo Yudo, Kusumo Utoyo, Loa Sek Hie, Van Lonkhuyzen, Mandagie, Middendorp, Mochtar, Mulia, Mohamad Ali, Monod de Froideville, Ratu Langie, Rup, Rückert, Sandkuyl, Soangkupon, Suyono, Sukawati, Suroso, Sutadi, Sosrodiprojo, Sosrohadiwijoyo, Suermondt, Thamrin, Van der Weyden, Wiranata Kusuma, Yo Heng Kam, Van Zalinge, dan Zeydel.[266]

Pembukaan sidang Volksraad periode 1929–1930 dilaksanakan pada 15 Juni 1929.

263 *Ibid.*, hlm. 31-34
264 *Handelingen van den Volksraad zittingjaar* 1928-1929, hlm. 1344, 2047, 2213, 2223, 2229
265 *Handelingen van de Volksraad zittingjaar* 1929-1930, hlm. 3
266 *Ibid.*, hlm. 12

De Opening van den Volksraad.

De Gouverneur-generaal tijdens het voorlezen van de openingsrede.

Gambar 8. Sidang Pembukaan Volksraad tahun 1929
[Sumber: *Bataviaasch Nieuwsblad*, 15 Juni 1929]

Terdapat tiga belas komisi yang terdapat di Volksraad pada periode persidangan 1929-1930, antara lain:[267]

1. *Commisie voor het onderzoek van de geloofsbrieven* (Komisi Untuk Penyelidikan Surat-surat Kepercayaan) dengan tugas untuk menyelidiki surat kepercayaan anggota yang dipilih, yaitu R.C.A.F.J. Nessel. Anggota dari komisi ini adalah Jonkman, Laoh, dan De Hoog.
2. *Commisie voor het onderzoek van de geloofsbrieven* (Komisi Untuk Penyelidikan Surat-surat Kepercayaan) dengan tugas untuk menyelidiki surat kepercayaan anggota yang dipilih, yaitu R. Idih Prawiradipura. Anggota dari komisi ini adalah Jonkman, Laoh, dan De Hoog.
3. *Commisie voor het onderzoek van de geloofsbrieven* (Komisi Untuk Penyelidikan Surat-surat Kepercayaan) dengan tugas untuk menyelidiki surat kepercayaan anggota yang dipilih, yaitu R.A.A. Purbonegoro. Anggota dari komisi ini adalah Suyono, Jonkman, dan Laoh.
4. *Commissie voor de huishoudelijke aangelegenheden* (Komisi Untuk Urusan Rumah Tangga) dengan tugas yang tercantum

Terdapat tiga belas komisi yang terdapat di Volksraad pada periode persidangan 1929-1930

267 Handelingen de Volksraad zittingjaar 1929-1930, Index, hal. 7-8.

dalam Pasal 10 *de Reglement van Orde*. Ketua komisinya adalah Ketua Volksraad Neytzell de Wilde, dengan anggota Kan dan Kerkkamp.

5. *Commissie voor de verzoekschriften* (Komisi Untuk Surat Permohonan) dengan tugas untuk membuat laporan surat permohonan yang masuk ke Volksraad dan *het College van Gedelegeerden*. Anggota komisinya adalah De Hoog, Kan, Sukawati (pengganti), Jonkman, dan Yo Heng Kam.
6. *Commisie van overleg* (Komisi Konsultasi) dengan tugas menghubungkan antara Volksraad dengan pemerintah. Jika diperlukan, komisi ini dapat memberikan saran kepada ketua. Ketua komisi dari komisi ini adalah Ketua Volksraad, sementara anggota komisinya adalah Rup, De Hoog (pengganti), Blaauw, Kusumo Utoyo (pengganti), Dwijosewoyo, Van Helsdingen (pengganti), Van Lonkhuyzen, Monod de Frodeville (pengganti), Ten Berge, Thamrin (pengganti), Ratu Langie, Kerkkamp, Bruineman (pengganti), Sandkuyl, Kan (pengganti), dan Khouw Kim An.
7. *Commissie van voorbereiding* (Komisi Persiapan) dengan tugas mempersiapkan penyelidikan rancangan surat keputusan akun akhir pengeluaran dan pemasukan Hindia-Belanda untuk tahun 1925. Anggota dari komisi ini adalah Van Helsdingen, Rup, dan Suroso.
8. *Commissie van voorbereiding* (Komisi Persiapan) dengan tugas mempersiapkan penyelidikan perubahan aturan dana para janda dan yatim piatu militer Eropa. Anggota dari komisi ini adalah Dwijosewoyo, Van der Weyden, Fruin, Apituley, dan Van Hulstijn.
9. *Commissie voor de verslagen van den Algemeene Rekenkamers in Nederland en Nederlandsch-Indië over* 1928 (Komisi Untuk Laporan Dewan Audit Umum di Belanda dan Hindia-Belanda tentang tahun 1928) dengan tugas mempelajari Laporan Tahunan Dewan Audit Umum. Anggota komisi ini adalah Van Helsdingen, Rup, dan Suroso.
10. *Commissie van voorbereiding* (Komisi Persiapan) dengan tugas menyelidiki rancangan ordonansi pengaturan pemerintahan Sumatera Selatan. Ketua komisi ini adalah Ketua Volksraad, sementara anggotanya antara lain Soangkupon, Ali Musa, Fruin, Yahya, Kerkkamp, Middendorp, Mochtar, Nya Arif, dan Mulia.

Commissie van voorbereiding (Komisi Persiapan) dengan tugas menyelidiki rancangan ordonansi pengaturan pemerintahan Sumatera Selatan.

11. *Commissie van voorbereiding* (Komisi Persiapan) dengan tugas mempersiapkan penyelidikan rancangan ordonansi penambangan yang baru. Ketua komisinya adalah Ketua Volksraad, dengan anggota komisi Sandkuyl, Schmutzer, Mochtar, Ruckert, Kan, Kusumo Utoyo, Van Helsdingen, Blaauw, Fruin, Middendorp, dan Suroso.
12. *Commissie van voorbereiding* (Komisi Persiapan) dengan tugas mempersiapkan penyelidikan rancangan kontrak KPM. Ketua komisi ini adalah Ketua Volksraad, dengan anggota komisi yang terdiri dari Blaauw, Diephuis, Kan, Kusumo Utoyo, Middendorp, Ratu Langie, Ruckert, dan Sukawati.
13. *Commissie van voorbereiding* (Komisi Persiapan) dengan tugas mempersiapkan penyelidikan undang-undang pertahanan. Ketua komisinya adalah Ketua Volksraad, dengan anggota komisi antara lain Apituley, Fruin, Van Helsdingen, Van Hulstijn, Kies, Laoh, Suroso, dan Van der Weyden.

Sementara itu, komisi untuk *College van Gedelegeerden* pada periode 1929–1930 adalah sebanyak empat komisi, yaitu:[268]

1. *Eerste Commissie* (Komisi Pertama) bertugas menangani permasalahan dalam *Algemeene Zaken*, *Regeering en Hooge Colleges*, *Financiën*, *Binnenlandsche Bestuur*, dan *Oorlog en Marine*. Ketua komisi dipegang oleh Ketua Volksraad, dengan anggota Kan, Kies, Blaauw, Mandagie, Rup, Kerkamp, Van Helsdingen, dan Bruineman.
2. *Tweede Commissie* (Komisi Kedua) bertugas menangani permasalahan yang berkaitan dengan *Landbouw*, *Nijverheid*, *en Handels*, *Burgerlijke Openbare Werken*, *Gouvernements Bedrijven*, *Justitie*, *dan Onderwijs en Eerdienst*. Ketua komisinya adalah De Hoog, dengan para anggota antara lain s' Jacob, Fruin, Sukawati, Kusumo Utoyo, Ali Musa, dan Dwijosewoyo.
3. *Stenografische Commissie* (Komisi Stenografis) bertugas memutuskan jika ada perselisihan dalam laporan stenografi. Ketua komisinya adalah Ketua Volksraad, sementara para anggotanya adalah Schmutzer dan Van Helsdingen.
4. *Fondscommissie* (Komisi Dana) mempersiapkan penelitian rancangan ordonansi hingga perubahan peraturan organisasi

Commissie van voorbereiding (Komisi Persiapan) dengan tugas mempersiapkan penyelidikan undang-undang pertahanan.

268 *Ibid.*, Index, hlm. 9

yudisial. Ketua komisi dipegang oleh Ketua Volksraad, dengan anggota Blaauw, Dwijosewoyo (pengganti), dan Kan.

Pada rapat Volksraad tanggal 3 Januari 1930, mantan Bupati Jepara yang menjabat posisi Ketua Budi Utomo, Kusumo Utoyo (1871–1953), membacakan mosinya di hadapan sidang *College van Gedelegeerden Volksraad*. Mosi tersebut ditandatangani oleh lima orang, yaitu Rup, Sukawati, Suyono, De Hoog, dan Kusumo Utoyo sendiri. Dalam mosi berjudul "Tidak Aman Hati di Antara Penduduk Negeri", Utoyo meminta penjelasan tentang tindakan Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda yang menangkap sejumlah pimpinan pergerakan. Sejumlah pertanyaan diajukan Utoyo dalam mosinya, antara lain: "Apakah penangkapan ini hanya ditujukan kepada anggota Partai Nasional Indonesia (PNI)?; Apakah pemerintah dan polisi, dengan cara tersebut, akan melakukan pengawasan kepada perhimpunan-perhimpunan Bumiputera yang haluannya sangat sederhana?; Apakah rapat-rapat yang terbuka untuk umum dilarang, atau juga rapat perkumpulan yang tertutup?" Pelarangan ini menimbulkan keresahan di kalangan rakyat. Oleh banyak kalangan, Mosi Kusumo Utoyo kerap disebut sebagai "mosi keresahan" karena ia berulangkali menggunakan ungkapan "perasaan hati yang tidak aman" dalam pidatonya tersebut. Berbagai pertanyaan berkecamuk, apakah memang harus demikian nasib penduduk negeri yang belum bebas dari rasa ketakutan, rakyat yang hidupnya harus selalu diingatkan akan harta dan nyawanya? *Nek awan duweke Sang Nata*, *nek wengi duweke Dursila* (kalau siang milik sang raja, namun kalau malam milik para kriminal)?[269]

Pada rapat Volksraad tanggal 3 Januari 1930, mantan Bupati Jepara yang menjabat posisi Ketua Budi Utomo, Kusumo Utoyo (1871–1953), membacakan mosinya di hadapan sidang College van Gedelegeerden Volksraad.

Pada 27 Januari 1930, M.H. Thamrin berpidato di hadapan sidang Volksraad dengan mencetuskan gagasan terkait *Nationale Fractie* (Fraksi Nasional). Salah satu tujuannya, seperti yang ia nyatakan dalam pidatonya, adalah mewujudkan Indonesia Merdeka dalam waktu secepatnya. Fraksi tersebut, walaupun hanya terdiri atas sepuluh orang, tetapi memiliki pengaruh yang besar. Salah satu anggota Fraksi Nasional adalah Kusumo Utoyo (*Midden-Java*/Jawa Tengah), Dwijosewoyo (*Vorstenlanden*/Daerah Kesultanan), Yahya Datuk Kayo (*Westkust van Sumatra*/Pantai Barat Sumatra), Mochtar (Palembang), Nya Arif (Aceh), Soangkupon (*Oostkust van Sumatra*/Pantai Timur Sumatra), Pangeran Ali (Borneo), Sutadi (*Midden-Java*/Jawa Tengah), Suroso (*Oost-Java*/Jawa Timur), dan M.H. Thamrin (*West-Java*/Jawa Barat).

Selain mengecam penggeledahan rumah anggota PNI, seperti

269 Atashendartini Habsjah (ed.), *Perjalanan Panjang Anak Bumi*, *Op.Cit.*, hlm. 184

yang ditanyakan Kusumo Utoyo dalam mosinya, Fraksi Nasional yang dipelopori oleh M.H. Thamrin menuntut pembatalan *Wilde-school ordonantie* (Peraturan Perundang-undangan tentang Sekolah Liar) yang kelak dikeluarkan pada 27 September 1933. Thamrin mengancam akan mundur, jika tuntutannya tidak dipenuhi. Pemerintah pada akhirnya mengalah, kemudian mencabut ordonansi tersebut pada 1 April 1934.

Jumlah amandemen yang diajukan pada periode persidangan 1929–1930 adalah 47 amandemen. Amandemen-amandemen tersebut terdiri enam amandemen terkait persoalan anggaran tahun 1930, satu amandemen terkait persoalan rancangan ordonansi hingga perubahan ordonansi pajak kemitraan, 17 amandemen terkait persoalan rancangan ordonansi pengaturan lembaga kredit pemerintah Bumiputra di Jawa dan Madura, empat amandemen terkait persoalan rancangan ordonansi pengaturan subsidi sekolah khusus guru Eropa, satu amandemen terkait persoalan rancangan ordonansi pengambilalihan atas nama Kota Praja Meester Cornelis terhadap sewa tanah dan hak atas beberapa lahan lainnya ada satu amandemen, satu amandemen terkait persoalan rancangan ordonansi peninjauan kembali aturan pernikahan dan perceraian di kalangan Islam di Jawa dan Madura, empat amandemen terkait persoalan rancangan penetapan ordonansi pertambangan yang baru, satu amandemen terkait persoalan rancangan ordonansi peraturan pensiun warga Hindia dengan aturan pengganti, dua amandemen terkait persoalan rancangan ordonansi penetapan anggaran untuk Provinsi Jawa Tengah, lima amandemen terkait persoalan rancangan ordonansi *Wetbuk van Strafrecht* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) untuk menangani gejolak revolusi, satu amandemen terkait persoalan rancangan ordonansi perpindahan kepemilikan lahan milik pemerintah di Ciampea, Sadeng atau Pengawungan, dan Cibunbulan, satu amandemen terkait persoalan rancangan ordonansi perubahan peraturan lelang, dua amandemen terkait persoalan rancangan perubahan ordonansi Provinsi dan ordonansi pemilihan di Jawa pada tingkat provinsi dan kabupaten, serta satu amandemen terkait persoalan rancangan ordonansi pengenalan pemilihan Dewan Kota Praja Manado dan Banjarmasin, juga perubahan komposisi Dewan Kota Praja Manado.[270]

Pemerintah pada akhirnya mengalah, kemudian mencabut ordonansi tersebut pada 1 April 1934.

270 *Handelingen den Volksraad, zittingsjaar 1929-1930*, hlm. 28-34

Dari kiri kekanan: 1. R. A. A. Koesoemo Oetoyo; 2. M. Samin; 3. Soeis; 4. Arsjad; 5. Mr. Soenarjo; 6. Kanoen; 7. Thamrin; 8. Dr. A. Manap; 9. Djauhari Salim dan 10. Ahmad Marzoeki.

Kunjungan Thamrin dan R.A.A. Kusumo Utoyo ke Medan pada bulan Mei 1930, sehubungan dengan Fonds Nasional

[Sumber: https://niadilova.wordpress.com; mengutip Pandji Pustaka, No. 3, 30 Mei 1930, hlm. 685]

Mosi-mosi yang diajukan oleh anggota Volksraad dari kalangan Bumiputra dan Tionghoa disampaikan dengan sesama anggota dari kalangan Bumiputra dan Eropa.

Pada periode persidangan Volksraad tahun 1929-1930, terdapat 78 mosi yang diajukan.[271] Anggota Volksraad dari kalangan Bumiputra dan Tionghoa yang mengajukan mosi adalah Thamrin, Suroso, Sutadi, Dwijosewoyo, Kertoamiprojo, Soangkupon, Sosrodiprojo, Kusumo Yudo, Suyono, Ratu Langie, Mochtar, Apituley, Ali Musa, Yahya Datuk Kayo, Mandagie, Idih, Laoh, Sukawati, dan Kan.[272]

Mosi-mosi yang diajukan oleh anggota Volksraad dari kalangan Bumiputra dan Tionghoa disampaikan dengan sesama anggota dari kalangan Bumiputra dan Eropa. Mosi-mosi tersebut terdiri atas berbagai persoalan, antara lain mosi yang diajukan oleh Thamrin, Suroso, dan Dwijosewoyo untuk menghapuskan Pasal 153 ter dan Pasal 161 bis dari Undang-Undang Pidana. Pasal ini mengekang hak bicara, berkumpul, dan berkegiatan. Status mosi ini kemudian ditarik. Lalu, mosi yang diajukan oleh Ratu Langie, Ali Musa, Soangkupon, Mochtar, dan Apituley adalah mosi yang berkaitan dengan pemulihan

271 *Ibid.*, hlm. 35-41
272 *Ibid.*

kembali institut para pembesar. Status mosi ini diterima, begitu pula dengan mosi yang diajukan untuk menarik keputusan pemerintah yang membatasi perjalanan di daerah Manado. Mosi tersebut diajukan oleh Ratu Langie, Thamrin, Soangkupon, Suroso, dan Mochtar, dengan status mosi diterima. Mosi lainnya adalah mosi yang mengundang pemerintah untuk menyampaikan keinginan untuk menghapus *exorbitante rechten* (Hak Istimewa Gubernur Jenderal). Mosi ini disampaikan oleh Suroso, Thamrin, dan Ratu Langie.[273]

Pada periode persidangan ini, ada 105 surat permohonan. Permasalahan dari setiap surat yang masuk disusun menurut abjad dari A hingga Z. Masing-masing permasalahan tersebut adalah A untuk *Afkoop* (penebusan) dan *Automobielregeling* (peraturan kendaraan mobil); B untuk *Belasting* (pajak), *Benoeming* (pengangkatan), dan *Bevordering* (promosi); D untuk *Diensttijdberekening* (penghitungan waktu pelayanan), *Duurtetoeslag* (biaya tambahan); G untuk *Grond* (lahan) dan *Gunsten* (hadiah); H untuk *Herplaatsing* (penempatan kembali); I untuk *Inpassing* (penyesuaian) dan *Interneering* (pengasingan); K untuk *Klachten* (keluhan); M untuk *Margawezen* (penunjukan marga) dan *Missigit* (masjid); O untuk *Onderstand* (dukungan), *Onderwijs* (pendidikan), *Ontheffing* (pembebasan), dan *Ontslag* (pemecatan); P untuk *Pacht* (sewa), *Pensioeun* (pensiun), dan *Positie-verbetering* (perbaikan jabatan); S untuk *Schadeverguding* (ganti rugi), *Schorsing* (skorsing), *Standplaatstulage* (tunjangan jabatan), dan *Subsidie* (subsidi); T untuk *Terugkeer* (pemulangan); V untuk *Verdeeling* (pembagian), *Verkiezing* (pemilihan), *Vernieling* (perusakan), dan *Vrijwillige onderwerping* (pengiriman sukarela); W untuk *Wachtgeld* (uang tunggu) dan *Wederopbouw* (perbaikan); Z untuk *Zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).[274]

Permasalahan terbanyak adalah *Grond* (tanah) sebanyak tujuh belas surat, lalu *Onderstand* (dukungan) sebanyak sepuluh surat, *Ontslag* (pemecatan) dan *Pensioen* (pensiun) sebanyak sembilan surat, dan *Belasting* (pajak) sebanyak delapan surat.[275]

Pembukaan sidang Volksraad periode 1930–1931 berlangsung pada 16 Juni 1930 yang dibuka dengan pidato dari Gubernur Jenderal Hindia-Belanda, A.C. Dirk de Graeff.[276] Ketua Volksraad ketika itu adalah J.W. Meyer Ranneft, dengan jumlah anggota sebanyak 50 orang,

Pembukaan sidang luar biasa pertama Volksraad selanjutnya di tahun 1925 berlangsung pada 6 Mei 1925.

273 *Ibid.*
274 *Handelingen den Volksraad, zittingsjaar* 1929-1930, hlm. 42-61
275 *Ibid.*
276 *Handelingen den Volksraad, zittingsjaar* 1930-1931, hlm. 3

termasuk ketua. Para anggota Volksraad pada periode ini adalah Van Aalderen, Ali Musa, Van Baalen, Beets, Ten Berge, Blaauw, Bruineman, De Dreu, Dwijosewoyo, Everts, Führi, Hadiwijoyo, Van Helsdingen, De Hoog, Idih, Yahya, Jonkman, Kan, Kerkkamp, Kertoamiprojo, Khouw Kim An, Kiès, Kusumo Utoyo, Laoh, Loa Sek Hie, Van Lonkhuyzen, Mandagie, Mochtar, Mohamad Ali, Monod de Froideville, Nessel, Nya Arif, Purbonegoro, Ratu Langie, Rup, Rückert, Sandkuyl, Soangkupon, Sukawati, Sutadi, Sosrodiprojo, Sosrohadiwijoyo, Suermondt, Thamrin, Van der Weyden, Wiranata Kusuma, Yo Heng Kam, Zeydel, dan Zuyderhoff.[277]

Berikut adalah komposisi anggota Volksraad dari kalangan Bumiputra dan Tionghoa pada periode persidangan 1930-1931:[278]

No	Nama	Pekerjaan	Daerah pemilihan	Tempat tinggal	Menjadi anggota
1.	Ali Musa	Dokter hewan	VIII Pantai Timur Sumatra	Pematang Siantar	16 Mei 1927
2.	J.D. Apituley	Dokter	-	-	16 Mei 1927
3.	M.W. Dwijosewoyo	Anggota *College van Gedelegeerden*	-	Weltev-reden	- 18 Mei 1918 - 17 Mei 1921 - 20 Mei 1924 - 16 Mei 1927
4.	P.H. Hadiwijoyo	Kepala Bagian Keraton	IV Vorsten-landen	Surakarta	- 20 Mei 1924 - 21 Mei 1928
5.	R. Idih Prawiradiputra	Ahli hukum	-	Garut	10 Februari 1930
6.	Yahya gelar Datuk Kayo	Kepala Distrik Tingkat Pertama	VI Minang-kabau	Buiten-zorg	16 Mei 1927
7.	Hok Hui Kan	Anggota *College van Gedelegeerden*	-	Weltev-reden	- 18 Mei 1918 - 17 Mei 1921 - 20 Mei 1924 - 16 Mei 1927
8.	R.A.A. Kertoamiprojo	Bupati	III Jawa Timur	Pameka-san	16 Mei 1927
9.	Khouw Kim An	Anggota *College van Gedelegeerden*	-	Weltev-reden	16 Mei 1927
10.	R.M.A.A. Kusumo Utoyo	Anggota *College van Gedelegeerden*	II Jawa Tengah	Weltev-reden	- 18 Mei 1918 - 17 Mei 1921 - 16 Mei 1927
11.	F. Laoh	Pegawai KPM	-	Weltev-reden	- 18 Mei 1918 - 23 September 1929
12.	Loa Sek Hie	Pemilik lahan dan pertanian	-	Weltev-reden	15 Juni 1929
13.	P.A. Mandagie	Anggota *College van Gedelegeerden*	X Celebes	Weltev-reden	- 17 Mei 1921 - 14 Oktober 1924 - 16 Mei 1927

277 *Ibid.*, hlm. 11
278 *Ibid.*, Index, hlm. 3-6

14.	Cipto Mangunkusumo	Dokter	I Jawa Barat	Neira	Oleh karena statusnya sebagai orang buangan, maka keanggotan-nya tidak dapat diterima
15.	Mochtar bin Prabu Mangku Negara	Pengawas Kelas I, BOW	V Sumatra Selatan	Weltev-reden	16 Mei 1927
16.	Pangeran Mohamad Ali	Anggota Dewan Kota Praja Banjarmasin	IX Borneo	Banjar-masin	16 Mei 1927
17.	Teuku Nya Arif	Kepala Sagi Mukim XXVI	-	Kutaraja	16 Mei 1927
18.	R.A.A. Purbonegoro	Bupati	-	Trengga-lek	10 Maret 1930
19.	Dr. G.G.S.J. Ratu Langie	Anggota *College van Gedelegeerden*	X Celebes	Purwakar-ta	16 Mei 1927
20.	Soangkupon (Abdul Firman gelar Maharaja)	Anggota *College van Gedelegeerden*	VIII Sumatra Timur	Weltev-reden	16 Mei 1927
21.	R.A.A. Suyono	Bupati Senior Pasuruan	III Jawa Timur	Weltev-reden	- 5 Agustus 1920 - 15 September 1922 - 20 Mei 1924 - 16 Mei 1927
22.	Cokorda Gde Raka Sukawati	Anggota *College van Gedelegeerden*	XII Kepulauan Sunda Kecil	-	- 20 Mei 1924 - 16 Mei 1927
23.	R.P. Suroso	Anggota *College van Gedelegeerden*	III Jawa Timur	Mojokerto	- 20 Mei 1924 - 16 Mei 1927
24.	H. Sutadi	Jurnalis	-	Surakarta	- 17 Mei 1921 - 20 Mei 1924 - 16 Mei 1927
25.	R.T.A. Sosrodiprojo	Bupati	II Jawa Tengah	Wonosobo	- 20 Mei 1924 - 16 Mei 1927
26.	R.T.A. Sosrohadiwijoyo	Bupati	II Jawa Tengah	Demak	- 17 Mei 1921 - 20 Mei 1924 - 16 Mei 1927
27.	Mohamad Husni Thamrin	*Wethouder* Kota Praja Batavia	-	Weltev-reden	16 Mei 1927
28.	Tjia Tjeng Siang	Mayor Cina	-	Pontianak	16 Mei 1927
29.	R.A.A. Wiranata Kusuma	Bupati	I Jawa Barat	Bandung	- 11 September 1922 - 14 Oktober 1924 - 16 Mei 1927
30.	Yo Heng Kam	Kapiten Cina, Anggota Dewan Tionghoa dan Wakil Provinsi Jawa Barat	-	Weltev-reden	16 Mei 1927

Jumlah komisi di Volksraad pada periode persidangan ini adalah 14, antara lain:[279]

1. *Commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven* (Komisi Penyelidikan Surat-surat Kepercayaan) dengan tugas melakukan penyelidikan surat-surat kepercayaan dari

279 *Ibid.*, hlm. 7-8

anggota Volksraad yang dipilih, yaitu J. Kaya. Para anggotanya adalah Jonkman, Sandkuyl, dan Idih, yang kemudian berganti menjadi Jonkman, Sandkuyl, dan Soangkupon.

2. *Commissie voor de huishoudelijke aangelegenheden* (Komisi Untuk Urusan Rumah Tangga Volksraad) dengan tugas yang tercantum dalam Pasal 10 *de Reglement van Orde*. Posisi ketua komisi dipegang oleh Ketua Volksraad, sementara anggotanya adalah Kan dan Kerkkamp.
3. *Commissie voor de verzoekschriften* (Komisi Untuk Surat-surat Permohonan) dengan tugas menangani laporan dari surat permohonan yang ditujukan kepada Volksraad dan College van Gedelegeerden. Para anggota dari komisi ini adalah De Hoog, Kan, Sukawati dengan pengganti Jonkman, Yo Heng Kam, dan Thamrin.
4. *Commissie van overleg* (Komisi Konsultasi) memiliki tugas untuk menjadi penengah antara Volksraad dan pemerintah. Ketua dari komisi ini adalah Ketua Volksraad dengan para anggota Kusumo Utoyo (pengganti), Dwijosewoyo, De Hoog (pengganti), Blaauw, Van Helsdingen (pengganti), Van Lonkhuyzen, Monod de Froideville (pengganti), Ten Berge, Thamrin (pengganti), Ratu Langie, Kerkkamp (pengganti), Jonkman, Bruineman (pengganti), Sandkuyl, Kan (pengganti), Khouw Kim An, Kies, Stokvis (pengganti), dan De Dreu.
5. *Commissie van voorbereiding* (Komisi Persiapan) memiliki tugas meneliti rancangan surat keputusan (*besluit*) yang berkaitan dengan penutup anggaran pemasukan dan pengeluaran Hindia-Belanda tahun 1926. Para anggotanya adalah Van Helsdingen, Van Aalderen, dan Suroso, yang menyampaikan laporannya pada 2 Januari 1931.
6. *Commissie voor de verslagen der Algemene Rekenkamer* (Komisi Untuk Laporan Pengadilan Audit) yang bertugas untuk mempelajari laporan tahunan dari pengadilan audit di Hindia-Belanda dan Belanda tahun 1929. Anggota komisi ini terdiri atas Van Helsdingen, Van Aalderen, dan Suroso.
7. *Commissie van voorbereiding* (Komisi Persiapan) memiliki tugas untuk mempersiapkan penelitian rancangan ordonansi penetapan peraturan pengadilan agama. Ketua dari komisi ini adalah Ketua Volksraad, sementara anggotanya antara lain Dwijosewoyo, Van Helsdigen, Jonkman, Soangkupon,

Commissie van voorbereiding (Komisi Persiapan) memiliki tugas untuk mempersiapkan penelitian rancangan ordonansi penetapan peraturan pengadilan agama.

Sosrohadiwijoyo, dan Wiranata Kusuma, yang telah menyampaikan laporan mereka pada 15 Agustus 1930.

8. *Commissie van voorbereiding* (Komisi Persiapan) memiliki tugas untuk mempersiapkan penelitian rancangan penetapan izin pembagunan perangkat penerima radio. Ketua komisinya adalah Ketua Volksraad, dengan anggota De Dreu, Fournier, Fruin, Idih, Kusumo Utoyo, Monod de Froideville, Rup, dan Kan.
9. *Commissie voor de voorlopige rekening* 1928 (Komisi Untuk Rekening Sementara tahun 1928) yang bertugas mempelajari rekening pengeluaran dan pemasukan Hindia-Belanda tahun 1928. Para anggotanya adalah Van Helsdingen, Van Aalderen, dan Suroso.
10. *Commisie van voorbereiding* (Komisi Persiapan) yang bertugas mempersiapkan penelitian rancangan ordonansi peninjauan kembali ordonansi kuli di luar Jawa dan Madura, serta pembentukan Dewan Registrasi di Medan. Posisi ketua komisi dipegang oleh ketua Volksraad dengan anggota Blaauw, Fruin, Kerkkamp, Loa Sek Hie, Van Lonkhuyzen, Sandkuyl, Soangkupon, Stokvis, dan Thamrin.
11. *Commisie van voorbereiding* (Komisi Persiapan) bertugas untuk mempersiapkan penelitian rancangan ordonansi peninjauan kembali peraturan para asisten. Ketua komisinya adalah Ketua Volksraad. Para anggotanya adalah Fruin, Laoh, Van Lonkhuyzen, Yo Heng Kam, dan Zuyderhoff.
12. *Commisie van voorbereiding* (Komisi Persiapan) bertugas untuk mempersiapkan penelitian rancangan ordonansi tambahan *Burgerlijke Wet* (Hukum Perdata) dan peraturan lembaga peradilan. Ketua komisinya adalah Ketua Volksraad, dengan anggota Fruin, Laoh, Van Lonkhuyzen, Yo Heng Kam, dan Zuyderhoff.
13. *Commisie van voorbereiding* (Komisi Persiapan) bertugas dalam mempersiapkan penelitian rancangan keputusan menetapkan anggaran tambahan kedua Bagian IV untuk anggaran tahun 1931, mengenai reformasi pemerintahan di luar Jawa dan Madura. Ketua dari komisi ini adalah Ketua Volksraad, dengan anggota Ali Musa, Beets, Yahya, Kerkkamp, Kies, Mochtar, Nessel, Soangkupon, dan Suermondt.
14. *Commisie van voorbereiding* (Komisi Persiapan) bertugas

Commisie van voorbereiding (Komisi Persiapan) bertugas untuk mempersiapkan penelitian rancangan ordonansi peninjauan kembali peraturan para asisten.

dalam mempersiapkan penelitian rancangan ordonansi mengenai pembagian tugas antara pemerintahan Eropa dan Bumiputra di Jawa dan Madura. Ketua komisinya adalah Ketua Volksraad. Para anggotanya adalah Kusumo Utoyo, Suermondt, Wiranata Kusuma, Beets, Sosrohadiwijoyo, dan Rückert.

Sementara itu, jumlah komisi *Het College van Gedelegeerden* adalah sebanyak empat komisi, antara lain:[280]

1. *Eerste Commissie* (Komisi Pertama) yang bertugas dalam menangani permasalahan dalam *Algemeene Zaken*, *Regeering en Hooge Colleges*, *Financiën*, *Binnenlandsche Bestuur*, dan *Oorlog en Marine*. Jabatan ketua komisi dipegang oleh Ketua Volksraad, dengan anggota Khouw Kim An, Kies, Blaauw, Sukawati, Kerkkamp, Ali Musa, Van Helsdingen, Dwijosewoyo, Stokvis, dan Kusumo Utoyo.
2. *Tweede Commissie* (Komisi Kedua) bertugas untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan *Landbouw*, *Nijverheid, en Handels*, *Burgerlijke Openbare Werken*, *Gouvernements Bedrijven*, *Justitie*, dan *Onderwijs en Eerdienst*. Ketua komisinya adalah De Hoog, dengan para anggota s' Jacob, Kan, Fruin, Mandagie, Rup, Bruineman, Ten Berge, Suroso, dan Ratu Langie.
3. *Stenografische Commissie* (Komisi Stenografis) bertugas dalam memutuskan perkara jika terdapat perselisihan dalam laporan stenografi. Ketua komisinya adalah Ketua Volksraad, sementara para anggotanya adalah Van Helsdingen dan Kerkkamp.
4. *Fondscommissie* (Komisi Dana) bertugas untuk meninjau usulan yang berhubungan dengan dana. Ketua komisinya adalah Ketua Volksraad, beserta dengan Blaauw, Dwijosewoyo (pengganti), dan Kan sebagai anggota.

Stenografische Commissie (Komisi Stenografis) bertugas dalam memutuskan perkara jika terdapat perselisihan dalam laporan stenografi.

Amandemen yang diajukan pada periode persidangan ini adalah sebanyak 39 amandemen.[281] Amandemen yang diajukan antara lain 16 amandemen mengenai anggaran tahun 1931, satu amandemen terkait rancangan ordonansi penetapan peraturan pengadilan agama, dua

280 *Ibid.*, hlm. 9
281 *Ibid.*, hlm. 29-34

amandemen terkait ordonansi perburuan yang baru tahun 1931 dan rancangan ordonansi perlindungan hewan tahun 1931, satu amandemen terkait usulan perubahan *Reglement van Orde* (peraturan tata tertib), tiga amandemen terkait rancangan ordonansi mengenai ketentuan baru peraturan dan pengaturan kota praja Bumiputra di Bengkulu, tiga amandemen terkait rancangan ordonansi peninjauan kembali ordonansi kuli untuk luar Jawa dan Madura, serta pembentukan dewan registrasi di Medan. Amandemen lainnya adalah satu amandemen terkait rancangan ordonansi perubahan ketetapan legislasi kereta api, empat amandemen rancangan ordonansi perubahan susunan Dewan Kota Praja, satu amandemen terkait rancangan ordonansi peraturan perusahaan asuransi, dua amandemen terkait rancangan ordonansi tambahan *Burgelijke Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan peraturan lembaga yudisial, satu amandemen terkait rancangan ordonansi perubahan peraturan posisi Volksraad tahun 1926, serta empat amandemen terkait rancangan ordonansi ekspor gula.[282]

Jumlah mosi yang diajukan pada periode persidangan ini adalah sebanyak 83 mosi.[283] Anggota Volksraad dari kalangan Bumiputra dan Tionghoa yang mengajukan mosi, antara lain Ratu Langie, Kusumo Utoyo, Suyono, Mochtar, Thamrin, Soangkupon, Suroso, Ali Musa, Jayadiningrat, Kusumo Yudo, Sukawati, Idih, Sutadi, Sosrodiprojo, Mandagie, Kan, Khouw Kim An, Dwijosewoyo, Nya Arif, Wiranata Kusuma, Laoh, Apituley, Mohamad Ali, Laoh, Loa Sek Hie, dan Tjia Tjeng Siang.[284] Mosi-mosi tersebut diajukan bersama dengan sesama anggota Volksraad dari kalangan Eropa, antara lain mosi pengenalan bertahap pelajaran bahasa Belanda di sekolah-sekolah standar yang diajukan oleh Suroso, Thamrin, dan Soangkupon dengan status ditahan, mosi percepatan pembangunan sambungan telepon di beberapa daerah di luar Jawa dan Madura yang diajukan oleh Nessel, Mohamad Ali, dan Mochtar dengan status diterima, mosi mengundang pemerintah terkait rancangan ordonansi kota praja Bumiputra untuk Minahasa yang diajukan oleh Ratu Langie, Kusumo Utoyo, dan Dwijosewoyo dengan status ditarik, mosi pencabutan secara keseluruhan *Poenale Sanctie* di luar Jawa dan Madura dalam waktu lima tahun yang diajukan oleh Stokvis, Thamrin, Ratu Langie, dan De Dreu dengan status ditolak.[285]

Sementara itu, jumlah surat permohonan yang diajukan

Jumlah mosi yang diajukan pada periode persidangan ini adalah sebanyak 83 mosi.

282 *Ibid.*
283 *Ibid.*, hlm. 35-42
284 *Ibid.*
285 *Ibid.*

kepada Volksraad pada periode ini terdapat sebanyak 125 surat dengan permasalahan yang dicatat menurut abjad dari B hingga Z.[286] Permasalahan tersebut yaitu B untuk *Bedijking* (tanggul), *Belasting* (pajak), *Benoeming* (pengangkatan), *Bouw van passarloodsen* (pembangunan gudang pasar), dan *Bouw van woningen* (pembangunan tempat tinggal); C untuk *Concessie* (konsesi) dan *Concurrentie* (persaingan); E untuk *Erfpacht* (sewa tanah); G untuk *Gemeente-diensten* (dinas kota praja), *Grenskwestie* (masalah batas), dan *Grondrechten* (hak tanah); H untuk *Heerendiensten* (kerja wajib), *Herbenoeming* (pengangkatan kembali), *Herplaatsing* (penempatan kembali), *Herstel van onrecht* (pemulihan dari ketidakadilan), *Hooger Beroep* (naik banding), dan *Huishuurtoelage* (tunjangan sewa rumah); K untuk *Klachten* (keluhan); O untuk *Onderscheiding* (penghargaan), *Onderstand* (dukungan), *Ontevredenheidsbetuiging* (pernyataan ketidakpuasan), *Ontslag* (pemecatan), *Overschrijving* (pemindahan), dan *Overtochskosten* (biaya perjalanan); P untuk *Pensioen* (pensiun) dan *Positieverbetering* (perbaikan jabatan); S untuk *Schadeloosstelling* (kompensasi), *Schade vergoeding* (ganti rugi), *Scheiding en deeling* (pemisahan dan pembagian), *Schorsing* (skorsing), dan *Standplaatstoelage* (tunjangan jabatan); T untuk *Teruggaaf van erfgoederen* (pengembalian warisan), *Terugkeer* (pemulangan), dan *Terugvordering* (pemulihan); U untuk *Uitzetting* (pengusiran); V untuk *Verbanning* (pengasingan), *Verbod* (pelarangan), *Vergoeding* (penggantian), *Verkiezing* (pemilihan), *Voorpraktijkberekening* (perhitungan sebelum praktik), dan *Voorschot* (uang muka); W untuk *Wegenverbetering* (perbaikan jalan); Z untuk *Zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).[287]

Jumlah permasalahan terbanyak adalah *Zelfbestuur* (pemerintahan sendiri) yang disampaikan melalui sebanyak 18 surat, disusul *Onderstand* (dukungan) sebanyak sebelas surat, *Grondrechten* (hak tanah) dan *Ontslag* (pemecatan) masing-masing sembilan surat, serta *Belasting* (pajak) dan *Klachten* (keluhan) masing-masing delapan surat.[288]

Kegiatan para anggota Volksraad tidak hanya terbatas dalam ruang sidang untuk memperdebatkan dan mendiskusikan berbagai persoalan, mengajukan mosi, dan menyampaikan amandemen, tetapi juga terdapat kegiatan di luar ruang sidang, terutama yang

Kegiatan para anggota Volksraad tidak hanya terbatas dalam ruang sidang untuk memperdebatkan dan mendiskusikan berbagai persoalan, ...

286 *Ibid.*, hlm. 43-68
287 *Ibid.*
288 *Ibid.*

berkaitan dengan kegiatan rekreasi. Pada tanggal 7–10 September 1930, sejumlah anggota Volksraad melakukan ekskursi ke Bali. Mereka melakukan kunjungan ke Kintamani, Gunung Batur, dan Pliatan. Di Kintamani, para anggota Volksraad bermalam di hotel milik KPM. Namun, kunjungan para anggota Volksraad ke Bali tidak hanya sekedar rekreasi, mereka melihat langsung situasi perekonomian dan sosial Bali, serta mendapatkan banyak informasi dari pejabat terkait, seperti Dr. Goorissen dari Dinas Kepurbakalaan (*Oudheidkundige Dienst*) dan Ir. Kley dari Dinas Irigasi.[289]

Salah satu anggota rombongan Volksraad yang melakukan ekskursi ke Bali, Zuyderhoff, berkomentar bahwa pengaruh spiritual dari masa Hindu kuno masih bertahan di Bali karena dipertahankan oleh aturan adat. Di sisi lain, Zuyderhoff mengkhawatirkan masyarakat Hindu Bali yang baik ini akan terdesak jika terdapat ajaran agama lain yang masuk ke Bali. Ia mengkaitkan dengan meningkatnya kegiatan turisme yang dapat memberikan pengaruh terhadap situasi spiritual tersebut. Seluruh kegiatan ekskursi para anggota Volksraad ini tidak dibiayai oleh pemerintah, namun ditanggung sendiri oleh para anggota Volksraad tersebut.[290]

Setelah itu, pembukaan sidang Volksraad periode 1931-1932 berlangsung pada 15 Juni 1931, dengan ketua Volksraad J.W. Meyer Ranneft.[291] Jumlah anggota Volksraad adalah sebanyak 58 anggota, termasuk ketua. Mereka adalah Abdul Rasyid, Alatas, Apituley, Arifin, Van Baalen, Barre, Beets, Blaauw, Burger, De Dreu, Dwijosewoyo, Feuilleteau, de Bruyn, Fournier, Fruin, Führi, Gondosubroto, Hadiwijoyo, Hamer, Van Helsdingen, Holst Pellekaan, De Hoog, Iskandar Dinata, Kan, Kasimo, Kusumo Utoyo, Loa Sek Hie, Van Lonkhuyzen, Tuanku Mahmud, Mandagie, Menschaar, Mochtar, Mohamad Nur, Monod de Froideville, Van Mook, Notosutarso, Pastor, Prawotokusumo, Ratu Langie, Rup, Sandkuyl, Soangkupon, Sujono, Sutarjowiryo, Pranoto, Suroso, Sutarjo, Sosrohadikusumo, Staargaard, Thamrin, Cakraningrat, Tjia Tjeng Siang, Wiradiatmaja, Wiranatakusumah, Wiwoho Purbo Hadijoyo, Wolff, Yo Heng Kam, Van Zalinge, dan Zeydel, sedangkan wakil dari pemerintah adalah Kiewiet de Jonge dan dr. Schrieke.[292]

Perubahan susunan anggota Volksraad menjadi 61 anggota, termasuk ketua, terjadi pada periode ini. Perinciannya adalah 30

Karikatur Kunjungan Anggota Volksraad ke Bali pada September 1930
(sumber: *Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 13 September 1930, hlm. 2)

289 'De Volksraadsleden naar Bali, *De Indische Courant*, 15-09-1930, hal. 2.
290 *Ibid.*
291 *Handellingen van den Volksraad Zittingsjaar* 1931-1932, hlm. 3
292 *Ibid.*, hlm. 10

NA ZIJN OPENINGSREDE ter gelegenheid van de eerste zitting van den nieuwen Volksraad te Batavia verlaat Gouverneur-Generaal jhr. mr. A.C.D. de Graeff het gebouw, in gezelschap van Koesoemo Oetoyo.

Gambar 9. Anggota Volksraad, Kusumo Utoyo (kiri) bersama Gubernur Jenderal de Graeff selepas sidang pembukaan Volksraad tahun 1931
[Sumber: *De Sumatra Post*, 29 Juli 1931]

anggota dari kalangan Bumiputra dipilih dan 23 anggota berasal dari kalangan warga Belanda yang diangkat, kemudian mulai berlaku per tahun 1931 berdasarkan Staatsblad 1929 No. 285.[293] Demikian pula dengan sistem pemilihan anggota yang sedikit diubah. Badan pemilihan sebelumnya dipecah menjadi tiga badan pemilihan, menurut golongan penduduk yang harus dipilih, serta diselenggarakan sistem pembagian dalam dua belas daerah pemilihan bagi pemilihan anggota warga pribumi. Mereka yang memiliki hak pilih adalah para anggota Dewan Kabupaten dan *Gemeente*, serta Dewan Daerah (*Buitengeweesten*). Berdasarkan jumlah anggota *Locale Raden*, yang berhak memilih anggota Volksraad pada tahun 1924 terdiri atas 1,126 orang yang terbagi atas 594 warga Eropa (215 anggota dipilih, 313 diangkat), 451 Bumiputra (138 anggota dipilih, 313 diangkat), dan 81 warga Timur Asing (41 anggota dipilih, 40 diangkat).[294]

Pada periode 1931-1932, terdapat enam belas komisi dalam Volksraad, yaitu:[295]

1. *Commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven* (Komisi Penyelidikan Surat-surat Kepercayaan) dengan tugas melakukan penyelidikan surat-surat kepercayaan dari anggota Volksraad yang dipilih. Para anggotanya adalah Van Helsdingen, Soangkupon, dan Kan. Komisi ini membahas anggota Volksraad, seperti Gondosubroto, Jubhar, Prawoto, de Queljoe, Sukarjo, Wiryopranoto, Sutarjo, dan Wolff.
2. *Commissie voor de huishoudelijke aangelegenheden* (Komisi Untuk Urusan Rumah Tangga Volksraad) dengan tugas yang tercantum dalam Pasal 10 *de Reglement van Orde*. Jabatan ketua komisi dipegang oleh Ketua Volksraad, sementara para anggotanya adalah Kan dan Wiranata Kusuma.
3. *Commissie voor de verzoekschriften* (Komisi Untuk Surat-surat Permohonan) dengan tugas menangani laporan dari surat permohonan yang ditujukan kepada Volksraad dan College van Gedelegeerden. Para anggota komisi ini adalah De Hoog, Kan, Thamrin (dengan pengganti Van Lonkhuyzen), Yo Heng Kam, dan Mochtar.
4. *Commissie van overleg* (Komisi Konsultasi) memiliki tugas menjadi penengah antara Volksraad dan pemerintah. Ketua

293 Kuntjoro Purbopranoto, 1960, *Sistem Pemerintahan* (Surabaya: Penerbitan Universitas Airlangga), hlm. 99
294 *Ibid.*
295 *Handeling van den Volksraad, Zittingsjaar* 1931-1932, hlm. 6-7

komisi ini adalah Ketua Volksraad, dengan para anggota Fruin (pengganti), Hamer, De Hoog (pengganti), Blaauw, Stargaard (pengganti), Van Zalinge, Van Helsdingen (pengganti), Van Lonkhuyzen, Monod de Froideville (pengganti), Kasimo, Rup (pengganti), Yo Heng Kam, Kan (pengganti), Loa Sek Hie, Kusumo Utoyo (pengganti), Dwijosewoyo, Thamrin (pengganti), Soangkupon, Wiranata Kusuma (pengganti), Sutarjo, Suyono (pengganti), Fournier, Sosrohadikusumo (pengganti), dan Arifin.

5. *Commissie van voorbereiding* (Komisi Persiapan) memiliki tugas untuk meneliti rancangan surat keputusan (*besluit*) yang berkaitan dengan anggaran pemasukan dan pengeluaran Hindia-Belanda tahun 1927. Para anggotanya adalah Van Helsdingen, Van Baalen, dan Loa Sek Hie, yang telah menyampaikan laporan pada 22 Desember 1931.
6. *Commissie voor de verslagen der Algemene Rekenkamer* (Komisi Untuk Laporan Pengadilan Audit) yang bertugas mempelajari laporan tahunan dari pengadilan audit di Hindia-Belanda dan Belanda tahun 1930. Para anggota komisi ini terdiri atas Van Helsdingen, Van Baalen, dan Loa Sek Hie.
7. *Commissie voor de voorlopige rekening van ontvangsten en uitgaven* (Komisi Untuk Rekening Sementara Penerimaan dan Pengeluaran) dengan tugas untuk mempelajari rekening sementara penerimaan dan pengeluaran Hindia-Belanda tahun 1929. Para anggotanya adalah Van Helsdingen, Van Baalen, dan Loa Sek Hie.
8. *Commissie voor het jaarverslag van de* N.I.A.M – *Nederlandsch-Indische Aardolie Maatschaapij* (Komisi Untuk Laporan Tahunan NIAM) bertugas dalam mempelajari laporan tahunan, seperti menyelaraskan antara keuntungan dan kerugian dalam rekening NIAM tahun 1930. Para anggota dari komisi ini adalah Van Helsdingen, Van Baalen, dan Loa Sek Hie.
9. *Commissie van advies* (Komisi Penasehat) bertugas dalam mempelajari masalah tentang penggunaan hak interpelasi dalam sidang luar biasa. Ketua komisinya adalah Ketua Volksraad dengan para anggota yang terdiri dari Suyono, Thamrin, Van Mook, dan Sandkuyl. Komisi ini berinisiatif untuk mengajukan usulan petisi.

Commissie van advies (Komisi Penasehat) bertugas dalam mempelajari masalah tentang penggunaan hak interpelasi dalam sidang luar biasa.

10. *Commissie van advies* (Komisi Penasehat) bertugas dalam mempersiapkan usulan-usulan perubahan ketentuan mengenai pemilihan anggota College van Gedelegeerden. Ketua komisinya adalah Ketua Volksraad, dengan para anggota seperti Hamer, Kusumo Utoyo, Van Lonkhuyzen, dan Wiraatmaja.
11. *Commissie voor buitenlandsche aangelegenheden* (Komisi Untuk Urusan Luar Negeri) yang bertugas mempersiapkan penyelidikan rancangan peraturan hubungan internasional. Para anggota komisi yang lain adalah Van Helsdingen, Suyono, dan Feuilletau de Bruyn. Laporan yang disampaikan adalah mengenai persetujuan perjanjian perdagangan antara Belanda dengan Swiss, serta persetujuan perjanjian perdagangan antara Belanda dan Turki.
12. *Commisie van voorbereiding* (Komisi Persiapan) bertugas dalam mempersiapkan penelitian atas rancangan keputusan hingga penetapan anggaran yang berhubungan dengan bagian IV untuk tahun 1932, yaitu mengenai reformasi pemerintahan di *Buitengewesten*/luar Jawa dan Madura. Ketua komisi ini adalah Ketua Volksraad, sementara para anggotanya adalah Burger, Beets, Soangkupon, Mahmud, Feuilletau de Bruyn, Jubhar, Mandagie, dan De Queljoe.
13. *Commisie van voorbereiding* (Komisi Persiapan) bertugas untuk mempersiapkan penelitian rancangan ordonansi pajak penghasilan tahun 1932. Ketua komisinya adalah Ketua Volksraad dengan anggota Blaauw, Burger, Dwijosewoyo, Ratu Langie, dan Sutarjo.
14. *Commisie van voorbereiding* (Komisi Persiapan) yang bertugas untuk mempersiapkan penelitian rancangan ordonansi status hukum para pejabat. Jabatan ketua komisi dipegang oleh Ketua Volksraad, dengan anggota De Dreu, Pastor, Hamer, Suroso, dan Sutarjo.
15. *Commisie van voorbereiding* (Komisi Persiapan) yang bertugas dalam mempersiapkan penelitian rancangan ordonansi pajak kekayaan tahun 1932. Ketua komisinya adalah Ketua Volksraad, sedangkan para anggotanya adalah Kan, Staargaard, Ratu Langie, Thamrin, dan Van Baalen.
16. *Commisie van advies* (Komisi Penasehat) yang mempelajari kemungkinan perubahan susunan atau pembatalan dari

Commisie van voorbereiding (Komisi Persiapan) bertugas untuk mempersiapkan penelitian rancangan ordonansi pajak penghasilan tahun 1932.

College van Gedelegeerden. Ketua komisinya adalah Ketua Volksraad, dengan para anggota Fruin, De Hoog, Van Mook, Suyono, Sosrohadikusumo, Thamrin, dan Wiryopranoto.

Komisi untuk *College van Gedelegeerden* pada periode ini ada empat komisi, yaitu:[296]

1. *Eerste Commissie* (Komisi Pertama) yang bertugas dalam menangani permasalahan dalam *Algemeene Zaken*, *Regeering en Hooge Colleges*, *Financiën*, *Binnenlandsche Bestuur*, dan *Oorlog en Marine*. Ketua komisi dipegang Ketua Volksraad dengan anggota Blaauw, Fruin, Kusumo Utoyo, Sutarjo, Yo Heng Kam, Wiranata Kusuma, Monod de Froideville, Rup, Soangkupon, dan Ratu Langie.
2. *Tweede Commissie* (Komisi Kedua) yang bertugas menangani permasalahan yang berkaitan dengan *Landbouw*, *Nijverheid, en Handels*, *Burgerlijke Openbare Werken*, *Gouvernements Bedrijven*, *Justitie*, dan *Onderwijs en Eerdienst*. Ketua komisinya adalah De Hoog, dengan para anggota seperti Hamer, Thamrin, Dwijosewoyo, Kan, Suyono, Van Helsdingen, Van Baalen, Mochtar, dan Staargaard.
3. *Stenografische Commissie* (Komisi Stenografis) bertugas untuk memutuskan jika ada perselisihan dalam laporan stenografi. Ketua komisinya adalah Ketua Volksraad, sementara anggotanya adalah Kusumo Utoyo dan Van Helsdingen.
4. *Bijzondere Commissie* (Komisi Khusus) adalah komisi yang mempersiapkan penelitian rancangan ordonansi hingga perubahan peraturan organisasi yudisial. Ketua komisi ini dipegang oleh Ketua Volksraad dengan anggota Blaauw, Hamer, Van Helsdingen, Kusumo Utoyo, Suyono, dan Thamrin.

Bijzondere Commissie (Komisi Khusus) adalah komisi yang mempersiapkan penelitian rancangan ordonansi hingga perubahan peraturan organisasi yudisial

Berikut adalah daftar anggota Volksraad pada persidangan tahun 1931-1932 dari kalangan Bumiputra, Tionghoa, dan Arab:[297]

296 *Ibid.*, hlm. 8
297 Handelingen der Volksraad, Zittingsjaar 1931-1932, Bijlage hal. 2-5.

No	Nama	Pekerjaan	Daerah pemilihan	Tempat tinggal	Menjadi anggota
1.	Abdul Rasyid	Dokter partikelir	VII Sumatra Utara	Padang Sidempuan	15 Juni 1931
2.	Ir. Said Mohamad Bin Abdullah Alatas	Pegawai dinas keuangan	-	Surabaya	15 Juni 1931
3.	Dr. H.D.J. Apituley	Pegawai Kesehatan Kelas II	-	Batavia	15 Juni 1931
4.	Arifin gelar Sutan Saidi Maharaja	Dokter	-	Fort de Kock	15 Juni 1931
5.	M.W. Dwijosewoyo	Anggota *College van Gedelegeerden*	-	Batavia	15 Juni 1931
6.	R.A.A. Gandasubrata	Bupati	II Jawa Tengah	Banyumas	15 Juni 1931
7.	P.H. Hadiwijoyo	Kepala Bagian Keraton	IV Vorstenlanden	Surakarta	15 Juni 1931
8.	Raden Otto Iskandar Dinata	Guru partikelir	I Jawa Barat	Batavia	15 Juni 1931
9.	Jubhar gelar Datuk Perpatih	Kepala Distrik Kelas I	VI Minangkabau	Padang	20 Juni 1931
10.	Hok Hoei Kan	Anggota *College van Gedelegeerden*	-	Batavia	15 Juni 1931
11.	I.J. Kasimo	Ajunct Konsultan Pertanian	-	Delanggu	15 Juni 1931
12.	R.M.A.A. Kusumo Utoyo	Anggota *College van Gedelegeerden*	II Jawa Tengah	Batavia	15 Juni 1931
13.	Loa Sek Hie	Pemilik lahan pertanian	-	Batavia	15 Juni 1931
14.	Tuanku Mahmud	Pegawai di Kantor Gubernur Aceh	-	Kutaraja	15 Juni 1931
15.	P.A. Mandagie	Kepala Distrik	X Celebes	Manado	15 Juni 1931
16.	Mochtar Bin Prabu Mangku Negara	Anggota *College van Gedelegeerden*	V Sumatra Selatan	Batavia	15 Juni 1931
17.	Ir. Gusti Mohamad Noor	Insinyur Kelas III BOW	IX Borneo	Batavia	15 Juni 1931
18.	R.M. Notosutarso	Akuntan *Nederlandsch Handel Maatschappij*	-	Meester Cornelis	15 Juni 1931
19.	Prawotokusumo	Patih	II Jawa Tengah	Banjarnegara	15 Juni 1931
20.	R.P. De Queljoe	Asisten Pemerintah Kelas I	XI Maluku	Saparua	15 Juni 1931
21.	Dr. G.G.S.J. Ratu Langie	Anggota *College van Gedelegeerden*	X Celebes	Batavia	15 Juni 1931
22.	Soangkupon (Abdul Firman gelar Maharaja)	Anggota *College van Gedelegeerden*	VIII Sumatra Timur	Batavia	15 Juni 1931
23.	R.A.A. Suyono	Anggota *College van Gedelegeerden*	II Jawa Timur	Batavia	15 Juni 1931
24.	R. Sukarjo Wiryopranoto	Ahli hukum	III Jawa Timur	Malang	15 Juni 1931
25.	Cokorda Gde Raka Sukawati	Punggawa Ubud	XII Kepulauan Sunda Kecil	-	15 Juni 1931

26.	R.P. Suroso	Partikelir, *Ketua Persatoean Vakbonden Hindia*	III Jawa Timur	Mojokerto	15 Juni 1931
27.	Mas Sutarjo Kartodikusumo	Anggota *College van Gedelegeerden*	III Jawa Timur	Batavia	15 Juni 1931
28.	R. Ng. Sosrohadikusumo	Anggota Dewan Provinsi Jawa Tengah	-	Semarang	15 Juni 1931
28.	Mohamad Husni Thamrin	Anggota *College van Gedelegeerden*	-	Batavia	15 Juni 1931
29.	R.A.A. Cakraningrat	Bupati	-	Bangkalan	15 Juni 1931
30.	Tjia Tjeng Siang	Mayor Titular Cina	-	Pontianak	15 Juni 1931
31.	R.A.A. Wiranata Kusuma	Anggota *College van Gedelegeerden*	I Jawa Barat	Batavia	15 Juni 1931
32.	Raden Demang Wiradiatmaja	Patih Kantor *Volkstelling*	I Jawa Barat	Batavia	15 Juni 1931
33.	Wiwoho Purbohadijoyo	Pegawai *Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij*	-	Semarang	15 Juni 1931
34.	Yo Heng Kam	Anggota *College van Gedelegeerden*	-	Batavia	15 Juni 1931

Salah satu anggota Volksraad dari kalangan Bumiputra yang diangkat pada bulan Juni 1931 adalah Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono. Ia berdomisili di Delanggu, Klaten karena bekerja di Jawatan Pertanian Surakarta, sehingga jika ada sidang, ia harus ke Batavia. Setiap minggu, ia pulang menengok keluarganya, meskipun hanya sehari. Pemerintah menyediakan "uang rapat" sebesar 10 gulden per hari yang dapat digunakan untuk biaya akomodasi. Kasimo biasanya menginap di Hotel Victoria bersama rekan-rekannya dari Solo. Hotel tersebut menyediakan makanan Eropa, namun karena Kasimo tidak menyukai makanan Eropa, maka hotel tersebut menyewa koki khusus untuk memasak makanan lokal.[298]

Sebagian besar isi pidato Kasimo memuat hal-hal teknokratis yang berhubungan dengan pertanian dan sedikit berhubungan dengan iman Kristen. Dari isi pidato-pidatonya, dapat diketahui bagaimana sikap, pendirian, dan kepada siapa Partai Katolik berpihak. Kelak pada tahun 1932, isi pidatonya mengundang perdebatan. Kasimo menyatakan bahwa suku-suku bangsa di Hindia-Belanda yang berada di bawah kekuasaan Belanda menurut kodratnya mempunyai hak serta kewajiban untuk membina eksistensinya sendiri sebagai bangsa. Oleh

298 J.B. Sudarmanta, 2011, *Politik Bermartabat: Biografi I.J. Kasimo* (Jakarta: Penerbit Kompas), hlm. 74

karena itu, mereka berhak memperjuangkan pengaturan negaranya sendiri sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan bangsa, sesuai dengan kebutuhan sosial.[299]

Kembali kepada persoalan terkait dengan aktivitas Volksraad. Berkaitan dengan surat permohonan yang masuk ke Volksraad pada periode ini, seperti periode sebelumnya, surat-surat tersebut ditangani oleh *De Commissie voor de Verzoekschriften* (Komisi Untuk Surat-surat Permohonan). Surat-surat tersebut dikirim, baik secara individu, maupun melalui institusi. Tercatat dalam daftar surat permohonan yang masuk ke Volksraad, ada 192 surat permohonan. Surat-surat tersebut dicatat berdasarkan permasalahan secara alfabetis dari A sampai Z dalam bahasa Belanda, antara lain terdapat permasalahan A untuk *Afvloeiing* (drainase), B untuk *Belastingaangelegenheid* (urusan pajak), D untuk *Desadiensten* (layanan desa), G untuk *Gouvernementsrechtspraak* (pengadilan pemerintah) dan *Grond* (lahan), I untuk *Inheemsche rechtspraak* (pengadilan pribumi), K untuk *Klachten* (keluhan) yang terbagi atas *Klachten tegen het bestuur* (keluhan terhadap pemerintah), *Klachten tegen Europeesche bestuurambtenaren* (keluhan terhadap pejabat-pejabat Eropa), dan *Klachten tegen de politie* (keluhan terhadap polisi), serta Z untuk *Zelfbesturende landschappen* (pengelolaan wilayah sendiri).[300]

Tindakan pertama atas surat permohonan tersebut adalah dengan mencantumkan catatan dari komisi. Misalnya, *overgaan tot de orde van de dag* (dilanjutkan keesokan harinya), *geen termen voor aanwezig voor tusschenkomst* (tidak ada intervensi), *nader antwoord van de Minister van Kolonien afwachten* (menunggu tanggapan lanjut dari menteri urusan koloni), *de Regeering om nadere inlichtingen verzoeken* (tanyakan kepada pemerintah untuk informasi lebih lanjut), *verstrekte nadere inlichtingen voor kennisgeving aannemen* (berikan informasi lebih lanjut untuk pemberitahuan), *ter lezing leggen ter secretarie* (untuk diberikan penjelasan kepada sekretaris), dan *geen tusschenkomst in zaken van gouvernementsrechtspraak* (tidak ada intervensi dalam kasus peradilan pemerintah).[301]

Tindakan pertama atas surat permohonan tersebut adalah dengan mencantumkan catatan dari komisi.

299 *Ibid.*, hlm. 75
300 *Volksraad Zittingsjaar* 1931-1932, index, hlm. 43-53
301 *Ibid.*

Bentuk catatan surat permohonan tersebut, disertai contoh permasalahannya adalah sebagai berikut:

Nomor urut	Pengirim	Permasalahan	Laporan dan nomor	Kesimpulan dari komisi
30	Pangeran Atmo Kesumo	Pengadilan Pemerintah	VII 45	tidak ada intervensi dalam kasus peradilan pemerintah
63	Haji Ngabdullah Rais	Keluhan (terhadap pemerintah)	II 2	Dilanjutkan keesokan harinya

Jumlah amandemen yang diajukan dalam persidangan periode ini sebanyak 85 amandemen.[302] Amandemen itu terbagi atas berbagai persoalan, antara lain permasalahan anggaran tahun 1932 sebanyak 25 amandemen, amandemen mengenai rancangan ordonansi memerangi penggalangan dana yang tidak diinginkan sebanyak satu amandemen, amandemen rancangan peraturan pemberian uang pensiun kepada pejabat lokal non-Eropa sebanyak dua amandemen, amandemen rancangan ordonansi pengurangan sementara semua kompensasi cuti sebanyak lima persen sebanyak dua amandemen, amandemen rancangan ordonansi peraturan pengadilan Bumiputra di daerah yang dikelola secara langsung sebanyak enam amandemen, amandemen rancangan ordonansi penetapan peraturan pemberian uang pensiun kepada para janda yang bukan pejabat Eropa sebanyak dua amandemen, amandemen rancangan ordonansi perubahan peraturan kerja wajib di *Buitengewesten* (luar Jawa dan Madura) sebanyak satu amandemen, amandemen rancangan keputusan penentuan anggaran mengenai bagian IV untuk anggaran tahun 1932 sebanyak satu amandemen, amandemen rancangan ordonansi perubahan peraturan cuti di luar negeri sebanyak empat amandemen.[303]

Amandemen lain yang diajukan adalah amandemen rancangan ordonansi penarikan subsidi pengawas sekolah-sekolah partikelir Bumiputra sebanyak satu amandemen, amandemen rancangan ordonansi peraturan baru mengenai kotapraja bumiputra sebanyak dua amandemen, amandemen rancangan ordonansi perubahan subsidi WLO dan MULO sebanyak satu amandemen; amandemen rancangan ordonansi perubahan subsidi HBS sebanyak satu amandemen; amandemen rancangan ordonansi perubahan subsidi pendidikan guru Bumiputra sebanyak satu amandemen; amandemen rancangan ordonansi retribusi pajak kendaraan bermotor di luar Jawa dan Madura sebanyak satu amandemen; amandemen rancangan ordonansi

Amandemen lain yang diajukan adalah amandemen rancangan ordonansi penarikan subsidi pengawas sekolah-sekolah partikelir Bumiputra sebanyak satu amandemen

302 *Ibid.*, hlm. 25-35
303 *Ibid.*

perubahan peraturan subsidi umum pendidikan dasar Bumiputra sebanyak satu amandemen; amandemen rancangan ordonansi perubahan hasil peninjauan kembali pajak penghasilan tahun 1920 sebanyak satu amandemen; amandemen rancangan ordonansi pajak penghasilan tahun 1932 sebanyak 12 amandemen; amandemen rancangan ordonansi perubahan peraturan pendidikan Eropa sebanyak dua amandemen; amandemen rancangan ordonansi pemberian tunjangan negara kepada pegawai dengan pendidikan khusus sebanyak satu amandemen; amandemen rancangan ordonansi penetapan peraturan pensiun yang baru untuk guru khusus sebanyak satu amandemen; amandemen rancangan ordonansi subsidi untuk sekolah guru sebanyak satu amandemen; amandemen rancangan ordonansi perubahan penambangan timah di Bangka menjadi perusahaan negara sebanyak satu amandemen; amandemen rancangan keputusan penetapan anggaran kedua bagi bagian I untuk anggaran tahun 1932 sebanyak satu amandemen; amandemen rancangan ordonansi retribusi atas krisis retribusi tahun 1932 untuk pemasukan sebanyak lima amandemen; amandemen rancangan ordonansi kenaikan cukai untuk bensin sebanyak satu amandemen.[304]

Anggota Volksraad dari kalangan Bumiputra yang mengajukan amandemen, antara lain Suroso, de Queljoe, Mochtar, Alatas, Dwijosewoyo, Ratu Langie, Abdul Rasyid, Suyono (amandemen anggaran tahun 1932), Sukarjo Wiryopranoto (rancangan ordonansi memerangi penggalangan dana yang tidak diinginkan), Thamrin (rancangan peraturan pemberian uang pensiun kepada pejabat lokal non-Eropa), Iskandar Dinata (rancangan ordonansi perubahan peraturan cuti di luar negeri), Sutarjo, Mandagie (rancangan ordonansi pajak penghasilan tahun 1932), serta Thamrin (rancangan ordonansi perubahan penambangan timah di Bangka menjadi perusahaan negara).[305]

Pada periode ini, jumlah mosi yang diajukan dalam sidang Volksraad sebanyak 82 mosi.

Pada periode ini, jumlah mosi yang diajukan dalam sidang Volksraad sebanyak 82 mosi. Mosi-mosi tersebut diajukan oleh sejumlah anggota Volksraad dari kalangan Bumiputra dengan anggota lainnya. Berikut beberapa mosi yang diajukan oleh anggota Volksraad dari kalangan Bumiputra, beserta statusnya dalam sidang Volksraad 1931-1932: (1) mosi pengenalan bahasa Belanda secara bertahap sebagai mata pelajaran di sekolah umum yang diajukan oleh Suroso,

304 *Ibid.*
305 *Ibid.*

Thamrin, dan Soangkupon dengan status ditunda; (2) mosi perluasan perkembangan pendidikan dasar diajukan oleh Sutadi, Dwijosewoyo, Fournier, dan Stokvis dengan status ditunda, lalu diambil-alih oleh Suroso dan diterima; (3) mosi penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang melakukan penggeledahan rumah pada 29 Desember 1929 dengan status ditolak; (4) mosi keinginan untuk mengangkat orang Indonesia dalam *College van Burgemeester en Wethouder* di sejumlah kota praja yang diajukan oleh Sukarjo Wiryopranoto, Thamrin, dan Mohammad Noor dengan status ditolak; (5) mosi undangan kepada pemerintah untuk memberikan data statistik sebagai hasil dari pengaturan pemberantasan pes, perbaikan tempat tinggal, pengawasan bangunan, dan inspeksi tempat tinggal yang diajukan oleh Prawotokusumo, Sosrohadikusumo, Suyono, dan Wiwoho Purbohadijoyo dengan status diterima; (6) mosi penarikan larangan memperdengarkan lagu Indonesia Raya di lembaga-lembaga militer yang diajukan oleh Wiwoho Purbohadijoyo, De Dreu, dan Wiryopranoto dengan status ditolak.[306]

Dalam periode 1930-an, Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda semakin memperketat pengawasannya terhadap partai-partai yang bersikap radikal. Penangkapan terhadap para tokoh yang dianggap membahayakan pemerintah mewarnai tahun-tahun akhir dekade 1920-an. Namun cita-cita persatuan nasional semakin kuat. Berbagai isu di dalam dan di luar Volksraad yang memancing timbulnya perdebatan di dalam sidang-sidang yang mewarnai catatan sejarah Volksraad dalam kebijakan reaksioner pemerintah kolonial.

Dalam periode 1930-an, Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda semakin memperketat pengawasannya terhadap partai-partai yang bersikap radikal.

Gambar 10. Gedung Volksraad di Batavia, c. 1935
[Sumber: KITLV 4226]

306 *Ibid.*, hlm. 36-42

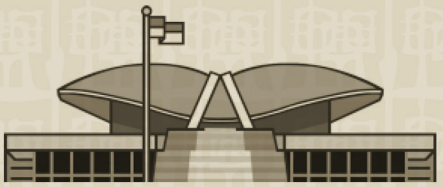

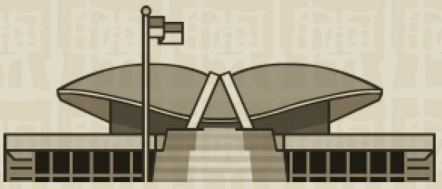

BAB III

Volksraad PERIODE 1931 – 1942

3.1 Nafas Baru Perjuangan Rakyat Hindia di Parlemen Melalui Fraksi Nasional

Pada suatu masa, ketika kaum pribumi mempunyai suatu momentum untuk menyuarakan aspirasi rakyat Hindia Belanda dari suatu ketidakadilan yang terjadi di tanah ibu pertiwi, maka panggung di dalam parlemen Volksraad-lah yang menjadi alat untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda mengenai keadaan sosial masyarakat pada waktu itu.

VOLKSRAAD merupakan lembaga legislatif untuk Hindia-Belanda dikala itu. Di mulai dari sanalah suatu kesempatan muncul bagi rakyat untuk menunjukan berbagai gagasan dan ide yang lebih memihak kepada kaum pribumi. Berangkat dari keinginan tersebut, munculah suatu gagasan untuk membuat fraksi yang beranggotakan

Para anggota Volksraad, c. 1935. Tampak di antaranya M.H. Thamrin (berdiri, 13 dari kanan), Soangkupon (berdiri, 7 dari kanan), dan Kusumo Utoyo (duduk, 4 dari kanan)
[Sumber: KITLV 2641].

orang pribumi dalam Volksraad.

Jika kita sedikit menelaah kebelakang, suhu perdebatan tentang mayoritas pribumi di Volksraad meningkat dengan duduknya Thamrin sebagai ketua *Comite voor de Inlandsche Meerderheid in de Volksraad* (Komite bagi Mayoritas Pribumi di Volksraad). Komite tersebut mempunyai anggota eksekutif, antara lain Parada Harahap (sekretaris), Sutan Mohammad Zain (SS), R.A.A.A. Jayadiningrat dan R.A. Sujono (NIVB), E.A. Kayadu (Sarekat Ambon), R.O. Subrata dan R. Puradireja (Pasundan), R.M.A. Kusumo Utoyo (BO), serta F. Laoh (Persatuan Minahasa).[307] Mengenai usulan tentang ide "mayoritas pribumi" di Volksraad, menurut Thamrin usul tersebut dirumuskan terlalu terburu-buru, dan ketika para anggota dari golongan sosialis menyetujui usul itu, Thamrin Kurang setuju dengan usul tersebut. Di samping itu, komposisi dari komite yang diketuai Thamrin itu segera dimasukan dalam PPPKI.[308] Thamrin yang kemudian menjadi tokoh terkemuka dalam PPPKI membentuk kelompok nasionalis yang sama

307 *De Locomotief*, 18 Oktober 1927, hlm. 11
308 Suatu federasi partai politik Indonesia gagasan Sukarno yang berdiri beberapa hari sebelum pemungutan suara di Volksraad.

di Volksraad, seperti yang dilakukannya di Dewan Kota Batavia.[309]

Pada waktu itu jumlah anggota dewan dari hasil pemilihan sangat sedikit, misalnya pada tahun 1924 di Jawa, jumlah anggota terpilih kurang lebih 700 orang, di antaranya hanya 169 orang dari kalangan pribumi, dari jumlah tersebut kurang lebih 70 orang di antaranya terdiri dari golongan priayi seperti para bupati, dan sebagian besar sisanya adalah anggota pangreh praja, tekanan dari kalangan priayi atas proses pemilihan wakil-wakil dari golongan pribumi sangat kuat dan tidak dapat dihindarkan. Kebanyakan anggota pribumi di dalam Volksraad jika bukan pejabat atau, maka dapat dipastikan berhaluan nasional yang paling moderat seperti Thamrin dkk. Pada periode persidangan yang kedua, ketiga dan keempat yang diselenggarakan pada tahun 1921-1931, pada persidangan tersebut kelompok yang mendominasi dikalangan pribumi adalah dari kelompok PEB, sedangkan di dalam persidangan Volksraad yang kelima yang dilaksanakan pada tahun 1931-1935, kelompok yang mendominasi justru perhimpunan yang terdiri dari para pejabat pribumi.[310]

De Volksraad bijeen in Hotel der Nederlanden

In verband met het op handen zijnde einde van de vierjarige zittingsperiode hebben de leden van den Volksraad zich gisteravond aan een diner in Hotel der Nederlanden verenigd. Talrijke speeches werden gehouden en de leden, die voorgoed uit het college verdwijnen, werden hartelijk toegesproken. Ook aan den voorzitter, mr. Spit, werden vele waardeerende woorden gewijd.

Pertemuan dalam rangka Akhir Masa Kerja Volksraad periode 1931-1935
[Sumber: *Bataviaasch Nieuwsblad*, 20 Februari 1935]

Pada waktu itu jumlah anggota dewan dari hasil pemilihan sangat sedikit, misalnya pada tahun 1924 di Jawa, jumlah anggota terpilih kurang lebih 700 orang, di antaranya hanya 169 orang dari kalangan pribumi,

Dalam pergolakan politik di Volksraad, fraksi kaum Pribumi berusaha menempatkan wakil-wakil andalannya untuk tetap masuk dalam kursi jabatan Volksraad, agar bisa menyuarakan perihal permasalahan dan kondisi sosial masyarakat Hindia-Belanda yang kemudian di bahas di dalam forum tersebut. Beberapa perwakilan dari masyarakat pribumi di Volksraad sering mengemukakan pendapat dan gagasannya, dan seringkali gagasan tersebut disampaikan melalui

309 Bob Hering, 2003, *M.H. Thamrin : Membangun Nasionalisme Indonesia* (Jakarta: Hasta Mitra), hlm. 94
310 Heather Sutherland, 1983, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi* (Jakarta : Sinar Harapan), hlm. 179-180

pidato atupun sebuah mosi, yang kemudian dipertimbangkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda sebelum ditembuskan kepada Minister atau Menteri Negara Jajahan dan *Tweede Kamer* di Belanda.

Dalam rangka mewujudkan keterwakilan kaum pribumi di Volksraad yang telah dicanangkan sejak lama oleh penduduk Hindia-Belanda yang menginginkan sebuah pemerintahan sendiri, maka tentunya harus ada suatu dasar pemikiran dan perencanaan terkait langkah selanjutnya untuk merealisasikan gagasan yang ada. Di sepanjang perjalannya dalam rentang periode 1928–1930 di Volksraad, Thamrin menantang pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk memindahkan seorang nasionalis veteran yakni Cipto Mangunkusumo dari pembuangannya di Banda ke Batavia untuk menduduki kursinya di dewan itu.[311]

Gubernur Jenderal A.C.D. de Graeff (1926–1933) mencoba memecahkan masalah jurang pemisah yang semakin tumbuh antara masyarakat Eropa dan Indonesia, antara lain dengan memperkuat posisi penasihat untuk *Inlandse Zaken* (Badan Urusan Pribumi). Dengan *Gouvernementsbesluit* (Suatu Keputusan dari Pemerintah kolonial Hindia Belanda), pada tanggal 14 Agustus 1931, jabatan penasihat ditempatkan langsung di bawah Gubernur Jenderal. Pejabat Hindia Belanda pada waktu itu boleh berkorespondensi langsung dengan otoritas sipil dan militer. Ia harus selalu tahu tentang tindak-tanduk masyarakat Arab di Hindia-Belanda, dan juga harus mempelajari perkembangan internal Islam dalam konteks internasional. Namun, instruksi baru itu hampir tidak memberikan efek politik.

Gubernur Jenderal A.C.D. de Graeff (1926–1933) mencoba memecahkan masalah jurang pemisah yang semakin tumbuh antara masyarakat Eropa dan Indonesia

Pada bulan Juli 1931, M.H. Thamrin mengemukakan persoalan *Poenale Sanctie*[312] sebagai persoalan yang akan ditangani oleh *Nationale Fractie* atau Fraksi Nasional. Setahun setelahnya, yakni pada Juli 1932, M.H. Thamrin yang kembali terpilih sebagai ketua Fraksi Nasional mengumumkan di Volksraad bahwa terdapat perubahan kecil terkait tujuan dari fraksi tersebut, yang sebelumnya "*de zoo spoedig mogelijke zelfstandigheid van Indonesia*" menjadi "*de zoo spoedig mogelijke onafhankelijkheid van Indonesia*". Pada 1933, M.H. Thamrin menanggapi penanganan kasus pemberontakan di kapal perang *Zeven Provinciën* yang terjadi pada 6 Februari 1933. Juli 1934, pidato M.H.

311 *Handelingen Volksraad 1928-1929*, hlm. 157-158
312 *Poenale Sanctie*, yang berisi: "setiap koeli kontrak yang meninggalkan pekerjaannya, yang lari, dan yang mengabaikan kewajiban kerjanya bisa didenda atau dihukum penjara". Lihat Antony Reid, "Early Chinese Migration into North Sumatera" dalam Jerome Ch'en and Nicholas Tarling (ed.), 1970, *Studies in the Social History of China and Southeast Asia* (London: Cambridge University Press), hlm. 293

Cornelia Hendrika Razoux Schultz-Metzer
Sumber: Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indie

Thamrin di depan sidang Volksraad adalah mengenai pandangannya tentang penetrasi (pengaruh) Jepang di Hindia. Pada 1935, Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda menunjuk seorang perempuan Belanda bernama Razoux Schultz-Metzer menjadi anggota Volksraad. Dua tahun kemudian, ia mengusulkan hak pilih bagi perempuan tanpa diskriminasi ras.

Saat itu juga komposisi anggota Volksraad beragam, ada yang anggotanya merupakan orang Belanda yang memang kelompok anggota mayoritas, serta orang Hindia Belanda (Indonesia), Timur Asing (Arab, Cina), juga mereka yang berasal dari ras campuran Belanda-Indonesia (Belanda *totok*), yang kemudian hari membentuk fraksi. Kemunculan Razoux Schultz-Metzer adalah faktor pembeda dari Volksraad pada periode ini. Ia kemudian mendukung agar perempuan pribumi juga dapat menduduki posisi sebagai anggota di dalam Volksraad.[313]

Pada 16 September 1928, Cipto ditunjuk oleh kantor pemilihan Volksraad untuk menduduki kursi kosong yang ditinggalkan oleh anggota dari *Paguyuban Pasundan*, Oto Kusuma Subrata.[314] Dengan duduknya Cipto di Volksraad, maka pendapat yang biasanya banyak diwakili oleh golongan konservatif yakni para pangreh praja dan pejabat BB (*Binnenlands Bestuur*/Pegawai Negeri), kini dapat ditandingi secara kuat oleh seorang veteran nasionalis yang sangat faham dengan situasi dan masalah daerah tersebut.[315]

Setelah usul tentang "mayoritas pribumi" yang telah dimenangkan, juga setelah apa yang disebut Stokvis sebagai keadaan sulit yang dihadapi De Graeff, Fraksi Nasional kemudian menikmati tahun pertama yang indah. Mayoritas anggota Volksraad tidak melunakkan sikap mereka terhadap kaum nasionalis yang dengan lantang menentang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Terlebih terhadap lonjakan gerakan terbuka yang dilakukan oleh sejumlah tokoh pembawa aspirasi nasional, seperti Sukarno misalnya, yang dipandang mempunyai aspirasi yang kuat, sehingga dituduh melakukan suatu kecurangan untuk melemahkan pengaruh yang kemungkinan dapat dibawanya ke Volksraad.[316]

Keterwakilan pribumi di Volksraad rupanya menghimpun sebuah kekuatan baru, para wakil rakyat di Volksraad dari kalangan pribumi tidak berhenti disitu saja dalam menggalang kekuatan politik, muncul

313 Lihat di *Soerabaijasch handelsblad*, 9 Mei 1935
314 *Handelingen Volksraad* 1928-1929, hlm. 2
315 Bob Hering, *Op.Cit.*, hlm. 110
316 *Ibid.*, hlm. 112

lagi suatu manuver politik yang dinamai dengan "Front Sawo Matang",[317] bertambah lagi dengan bergabungnya VC (*Vaderlandsche Club*) yang mula-mula hanyalah suatu klub debat kecil di Simpang, Surabaya yang didirikan oleh seorang Belanda *totok* yang tidak puas terhadap apa yang mereka sebut sebagai "proses likuidasi". Kemudian, mereka sibuk melangkah untuk memenangkan kursi fraksi-fraksi di Volksraad dengan memaklumkan konsolidasi politik dengan orientasi rasialis. Debut VC merupakan hasil kampanye "Front Kulit Putih", yang akan menjadi sumber propaganda yang baik bagi kaum pribumi. Para anggota Volksraad bersikap agak lebih bersahabat terhadap VC. Mereka masih melihatnya sebagai dampak positif terhadap polarisasi kepentingan karena hal itu dapat menuju pada pengertian yang lebih besar di pihaknya sendiri, atau bahkan akan memunculkan suatu bentuk kerja sama di kemudian hari. Dengan sangat menyadari kecenderungan yang mengarah pada suatu polarisasi para anggota Volksraad, para wakil di Volksraad mengantisipasi masuknya keanggotaan VC berikutnya, karena dikhawatirkan berpotensi untuk memperkuat sikap menentang terhadap Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, sehingga secara tidak langsung akan memperlancar agenda yang telah disusun oleh para anggota dari "Front Sawo Matang".[318]

Selama sidang di Volksraad pada saat pembahasan anggaran umum, telah terjadi perdebatan antara para anggota sayap kanan yang dipimpin oleh Fruin dengan sepuluh anggota yang kini bersatu dengan "Front Sawo Matang". Ia telah memprediksi akan terjadinya perdebatan yang berhubungan dengan tindakan pemerintah yang preventif pada waktu itu.[319] Sementara itu, saat mengumumkan tentang adanya kelompok "Front Sawo Matang", Thamrin mewakili para anggota Volksrad yang tergabung dalam fraksi tersebut, yang kemudian menjelaskan bahwa fraksinya bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Fraksi tersebut bertujuan untuk melakukan segala upaya reformasi konstitusional, serta menyegerakan penghapusan segala bentuk diskriminasi politik, ekonomi, dan ras, oleh pihak Kolonial Hindia Belanda. Hal ini diupayakan dengan segala cara sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Anggota fraksi tersebut terdiri dari Kusumo Utoyo, Mochtar Prabu Mangkunegara, Dwiyosewoyo, Datu' Kayo, Nya Arif, Soangkupon, Pangeran Ali, Sutadi, Suroso, dan Thamrin.

Selama sidang di Volksraad pada saat pembahasan anggaran umum, telah terjadi perdebatan antara para anggota sayap kanan yang dipimpin oleh Fruin dengan sepuluh anggota yang kini bersatu dengan "Front Sawo Matang".

Sebelum itu, suatu peristiwa yang hampir sama terjadi di Dewan

317 'Front sawo matang' merupakan penamaan kelompok Pribumi dalam Volksraad
318 *Ibid.*, hlm. 113-114
319 *Handelingen Volksraad* 1929-1930, hlm. 1710-1714

Kota Batavia yang dipegang oleh Thamrin telah menunjukan adanya fraksi dipihaknya dengan menggunakan cara penentangan yang sama. Ia pun merasakan bahwa sebagai ketua kelompoknya sendiri, ia merasa didiskriminasikan dengan tidak diakuinya haknya dalam posisi *locoburgemeester* (wakil walikota). Sebelumnya di Volksraad, ia meminta perhatian RGAZ (Regeerings Gemachtigde voor Algemene Zaken) melakukan pendekatan dengan cara elegan untuk mengurus masalah politik antara rakyat Pribumi dan Pemerintah kolonial Hindia Belanda.[320]

Keinginan dalam membentuk Fraksi Nasional menjadi bukti bahwa sejak saat itu hanya ada dua partai yang mendominasi Volksraad.

3.2 Lahirnya Fraksi Nasional

Keinginan dalam membentuk Fraksi Nasional menjadi bukti bahwa sejak saat itu hanya ada dua partai yang mendominasi Volksraad. Satu pihak dalam kenyataannya tidak pernah percaya bahwa kebijakan dari politik etis kolonial dapat dilaksanakan. Sedangkan di pihak Fraksi Nasional, mereka tidak berharap akan adanya sesuatu yang berharga yang dapat dihasilkan oleh hasil kebijakan kolonial tersebut. Oleh karena itu, jika masyarakat Pribumi yang menjadi wakil di Volksraad harus melanjutkan politik saling percaya untuk mendapatkan keuntungan bagi pihaknya, kesetiaan tidak lagi dapat diharapkan pada kekuasaan Kolonial Belanda. Pendekatan yang lebih realistis adalah dengan membangun kepercayaan dan penguatan pada internal Fraksi Nasional, dilain pihak Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mempunyai kepentingan besar untuk mereka sendiri dalam sektor argobisnis, pertambangan, keuangan, dan usaha-usaha besar bisnis yang mereka kelola. Maka dari itu golongan Fraksi Nasional sering kembali pada tema masalah perekonomian ini. Selama sidang yang memperdebatkan masalah anggaran di Volksraad pada awal tahun 1931, Thamrin sebagai ketua fraksi nasional menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada keberatan untuk melanjutkan politik etis dalam memberikan konsesi tertentu yang telah lama tidak diakui.[321]

Konsesi semacam itu akan memberikan kekuatan politik dan kepercayaan bagi orang Indonesia. Dengan alasan itulah, pembentukan Fraksi Front Sawo Matang di Volksraad seperti sebuah gerakan nasionalis yang sempat menderita parah karena "diamputasi" kuasanya, dikacaukan, dan diposisikan dalam keadaan bimbang. Tetapi, para anggota dari golongan Fraksi Nasional bertekad melanjutkan

320 *Handelingen Volksraad* 1929-1930, hlm. 673
321 *Handelingen Volksraad* 1931-1932, hlm. 177

perjuangan gerakan nasional demi memerdekakan masyarakat Pribumi ditengah situasi krisis politik, sosial, dan ekonomi yang melanda Indonesia.

Ide pembentukan Fraksi Nasional di dalam Volksraad ini muncul dari anggota Volksraad sendiri, yakni M.H Thamrin, yang merupakan ketua dari Perkumpulan Kaum Betawi, atas dasar beberapa faktor, antara lain:[322]

a. Sikap Pemerintah Kolonial Hindia Belanda terhadap gerakan politik masyarakat Pribumi Hindia Belanda.
b. Anggapan dan perlakuan yang sama oleh pemerintah kolonial Hindia terhadap semua gerakan nasional baik yang bersifat koopertif dan nonkooperatif, dan sering dilakukannya aksi sepihak oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap organisasi pergerakan masyarakat pribumi Hindia Belanda.
c. Didirikannya *Vaderlandsche Club* (VC) pada tahun 1929 sebagai protes terhadap "*ethisch beleid*" Gubernur Jenderal de Graef.

Dalam tindakannya, Fraksi Nasional lebih memusatkan usahanya di dalam lingkungan Volksraad. Maka, Fraksi Nasional mempunyai tujuan untuk menjamin tercapainya kemerdekaan nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan jalan:[323]

a. Mengusahakan perubahan-perubahan ketatanegaraan.
b. Berusaha menghapuskan perbedaan-perbedaan politik, ekonomi, dan intelektual antara masyarakat Pribumi dan Pemerintah kolonial Hindia Belanda.
c. Mengusahakan kedua hal tersebut diatas dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Terlepas dari itu pemakaian kata fraksi dalam Volksraad adalah hal yang kurang tepat, sebab para anggotanya bukan berasal dari satu partai politik atau perkumpulan yang sama

Terlepas dari itu pemakaian kata fraksi dalam Volksraad adalah hal yang kurang tepat, sebab para anggotanya bukan berasal dari satu partai politik atau perkumpulan yang sama, atau bahkan ada yang tidak berpartai, tetapi hal tersebut telah biasa terjadi di dalam Volksraad, dimana suatu golongan pada akhirnya dapat berdiri sebagai suatu faksi tersendiri. Dari tujuannya, telah jelas terlihat bahwa Fraksi Nasional bersifat revolusioner, untuk mensejahterakan masyarakat pribumi Hindia Belanda, meskipun kerap kali pendapat dari fraksi nasional di dalam Volksraad tidak direalisasikan oleh pemerintah Hindia Belanda.[324]

322 Nugroho Notosusanto, Marwati Djoened Poesponegoro, dkk., 1984, *Sejarah Nasional Indonesia* V (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 217
323 Nugroho Notosusanto, Marwati Djoened Poesponegoro, *Op. Cit.*, hlm. 218.
324 *Ibid.*

Kegiatan-kegiatan dari fraksi ini sebagian adalah pembelaan terhadap pemimpin-pemimpin PNI yang ditangkap dalam sidang-sidang Volksraad,

Kegiatan-kegiatan dari fraksi ini sebagian adalah pembelaan terhadap pemimpin-pemimpin PNI yang ditangkap dalam sidang-sidang Volksraad, terutama sebelum tokoh-tokoh PNI tersebut diadili pada bulan Agustus 1930. Fraksi Nasional, berpendapat bahwa tindakan penggeledahan dan penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin PNI oleh pemerintah tidak dapat dipertanggungjawabkan, terlebih karena banyak di antaranya yang terkena penggeledahan dan penangkapan bukan anggota PNI. Daftar dari beberapa peristiwa penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh polisi di beberapa tempat di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi telah disampaikan oleh Thamrin ke muka sidang Volksraad. Dengan peristiwa ini, terbukti bahwa pemerintah dalam tindakannya telah berlaku tidak bijaksana dan tidak adil terhadap pergerakan rakyat Indonesia, yang sesungguhnya merupakan hak bagi rakyat Indonesia ketika mereka telah masuk ke dalam Volksraad.

Thamrin juga berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa yang sering merugikan pergerakan rakyat berpangkal kepada pasal 153 bis dan 161 bis. Oleh karena itu, ia mengajukan suatu mosi kepada Volksraad mengenai pasal-pasal ini, yang kemudian diterima oleh sidang setelah mendapat gugatan dari Mosi Fruin dari VC. Kemudian, dibentuklah suatu komisi untuk meninjau kembali pasal-pasal tersebut. Thamrin juga mengusulkan agar sidang perkara pemimpin-pemimpin PNI yang dituduh melanggar artikel-artikel itu dilakukan di hadapan majelis yang lebih tinggi, yaitu *Hooggerechtschof*, dan bukan pada *Landraad*. Namun, usulannya ditolak oleh pemerintah dengan alasan bahwa pengadilan tertinggi itu hanya untuk suatu penuntutan politik, sedangkan bukti-bukti yang dibawa oleh Thamrin sifatnya berkenaan dengan hukum pidana.[325]

Sementara itu, masalah pertahanan juga dibicarakan dalam sidang Volksraad pada tahun 1930, di mana pemerintah bermaksud untuk meningkatkannya. Maksud ini ditentang oleh para anggota Fraksi Nasional. Mereka berpendapat bahwa peningkatan kekuatan pertahanan itu pasti akan memerlukan biaya besar, sedangkan keadaan keuangan negara saat itu sangat buruk, dan lagi tidak ada manfaatnya bagi Indonesia. Daerah-daerah di seluruh Indonesia tidak mempunyai sesuatu yang harus dipertahankan, juga tidak keseluruhannya menginginkan kemerdekaan, sedangkan yang dimaksud dengan peningkatan pertahanan terhadap serangan musuh adalah pertahanan terhadap upaya-upaya kemerdekaan. Oleh karena itu, adalah lebih

325 *Handelingen Volksraad Zittingsjaar*, hlm. 1929-1930

baik jika biaya tersebut digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat Indonesia.[326]

Terlandanya Indonesia oleh pengaruh malaise dan diangkatnya de Jonge, seorang yang sangat reaksioner, sebagai Gubernur Jenderal yang baru pada tahun 1931, ternyata telah memberi akibat yang sangat buruk bagi Indonesia, baik dalam segi sosial dan ekonomi maupun kehidupan politik setelahnya. De Jonge menjalankan pemerintahan dengan sikap yang sangat keras dan kaku, sehingga masa pemerintahannya dianggap sebagai masa yang terburuk bagi rakyat Indonesia.[327]

Vijfde Blad Maandag 14 September 1931. SOERABAIASCH HANDELSBLAD 79ste Jaargang

De Overdracht van het Bestuur

De nieuwe Landvoogd in Indië's hoofdstad. — De plechtigheid in den Volksraad.

De beide Excellenties op weg naar den Volksraad

Jhr. de Jonge betreedt Java's bodem. Boven aan de trap Mevrouw de Jonge.

In den Volksraad. — Z. E. Jhr. De Graeff draagt het bestuur over.

Het vertrek uit den Volksraad.

De vertegenwoordiger van den Soenan, Pangeran Ario Mataram wordt voorgesteld.

De begroeting tusschen beide Excellenties.

Z. E. Jhr. mr. De Jonge poseert voor onzen fotograaf.

Upacara di Volksraad pada tahun 1931 dalam rangka menyambut Gubernur Jenderal yang baru, de Jonge.

[Sumber: *Soerabaijasch handelsblad*, 14 September 1931]

Dalam kehidupan politik, Fraksi Nasional yang tidak radikal itu telah "didorong" ke arah politik nonkooperasi, yang seharusnya justru diarahkan kepada jalan politik yang lebih kooperatif. Sesuai dengan

326 *Handelingen Volksraad Zittingsjaar*, hlm. 1929-1930, 2437
327 Nugroho Notosusanto, Marwati Djoened Poesponegoro, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 219

Dalam kehidupan politik, Fraksi Nasional yang tidak radikal itu telah "didorong" ke arah politik nonkooperasi, yang seharusnya justru diarahkan kepada jalan politik yang lebih kooperatif.

keadaan kehidupan sosial-ekonomi yang sangat tertekan akibat depresi ekonomi, maka kegiatan fraksi utamanya ditujukan untuk memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi rakyat, terlebih kehidupan di bidang politik memang sangat ditekan sekali oleh pemerintah de Jonge. Masalah sosial yang banyak dibicarakan pada waktu itu adalah bidang pendidikan, sebagai akibat dari diumumkannya rencana penertiban sekolah-sekolah liar melalui peraturan baru, yaitu *Wilde Schoolen Ordonnantie* oleh pemerintah. Dijalankannya peraturan ini pasti akan menghambat kemajuan rakyat Indonesia, bahkan juga bagi mereka yang berasal dari golongan Cina, India, dan Arab. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh yang menentang peraturan ini dengan keras. Anggota-anggota Fraksi Nasional di dalam sidang Volksraad juga menuntut agar pemerintah segera mencabut peraturan tersebut. Bahkan, M.H. Thamrin bermaksud untuk keluar dari Volksraad apabila tuntutan itu gagal. Melihat kemungkinan jejak Thamrin akan diikuti pula oleh anggota-anggota lainnya, bila hal itu memang terjadi, Volksraad berpotensi untuk kehilangan asas pembentukannya karena wakil-wakil bangsa Indonesia praktis hilang. Setelah melihat reaksi-reaksi yang ada, baik di luar maupun di dalam Volksraad, yang dapat mengganggu ketenangan masyarakat, Pemerintah Kolonial dengan terpaksa mencabut peraturan tersebut.[328]

Lahirnya Fraksi Nasional di bawah pimpinan Thamrin merupakan sebuah langkah konkret bagi kaum pribumi di Volksraad yang berada dalam dominasi orang Belanda. Para wakil pribumi di Volksraad banyak menyuarakan apa yang sebenarnya terjadi di kehidupan sosial masyarakat Hindia Belanda yang jarang diketahui secara langsung oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

328 *Ibid.*, hlm. 220

3.3 Strategi Golongan Kooperatif dan Nonkooperatif dalam Menghadapi Pemerintah Kolonial Belanda

Perbedaan sifat politik pergerakan dari kaum pribumi pada waktu itu dibedakan menjadi dua tipe, yakni golongan kooperatif dan golongan nonkooperatif. Keduanya kadang bersitegang satu sama lain, oleh karena sifat pergerakan yang berbeda. Akan tetapi, faktanya, yang terjadi adalah tidak selamanya dinamika di antara keduanya menjadi hal yang kurang baik. Justru dari dinamika tersebut muncul berbagai variasi dalam mengolah strategi demi kepentingan rakyat pribumi.

Masa-masa setelah ditahannya Sukarno, nyawa gerakan nasional yang bersifat emansipatoris berangsur-angsur mereda. Para pejabat kolonial semakin menyadari bahwa semangat menggebu-gebu dari kampanye anti-kolonial tersebut jelas tidak dapat dibiarkan terus berlangsung, dan harus dihadapi dengan cara menyingkirkan sang tokoh utama secara permanen, atau setidaknya untuk jangka pendek dari pentas politik yang dikendalikan dan dipengaruhinya.[329]

Ketika Sukarno ditahan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada awal 1930-an, Fraksi Nasional yang dipimpin oleh Thamrin segera mengambil langkah baru.

Ketika Sukarno ditahan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada awal 1930-an, Fraksi Nasional yang dipimpin oleh Thamrin segera mengambil langkah baru. Thamrin segera tampil di Volksraad untuk memimpin sepuluh anggota orang Indonesia di bawah satu bendera nasionalis. Menurut Gobee, langkah ini merupakan nasionalisme yang terorganisir dan didasari oleh landasan radikal, dengan tawaran kerja sama dengan pemerintah.[330] Thamrin sendiri menulis kepada Stokvis yang berada di Belanda tentang diumumkannya pembentukan Fraksi Nasional. Ada yang melihatnya sebagai gerakan kaum nasionalis praktis, oleh karena banyaknya varian nasionalisme yang ada ketika itu. Thamrin tidak melihat potensi untuk mengembangkan suatu gaya pergerakan yang kuat dan tegas, tetapi tetap menganggap hal ini pantas untuk di coba.[331]

Pada saat (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) PPPKI melakukan rapat protes pada 12 Januari 1930 di *Gedung Permufakatan Indonesia* yang difasilitasi oleh Volksraad, dicanangkan kembali pembentukan organisasi tersebut. Dr. Sutomo menyimpulkan bahwa banyaknya anggota yang hadir dalam pertemuan itu menunjukan perasaan ingin tahu yang berkembang. Sejumlah

329 Bob Hering, *Op.Cit.*, hlm. 147
330 Helsdingen, 1941, hlm. 439-440
331 Surat tertanggal 11 September 1930 kepada Stokvis, IISG, hlm. 115

pembicara menyatakan bahwa sikap pemerintah pada 10 Januari 1930 tentang hukuman terhadap PNI merupakan tindakan yang meragukan, berlebihan, dan tidak berdasarkan pada hukum yang jelas.[332]

Kongres kedua PPPKI di Surakarta, c. 1929. Tampak di antaranya M.H. Thamrin (duduk, 3 dari kiri), Sukarno (duduk, 7 dari kiri), Ali Sastroamijoyo (berdiri, 7 dari kiri), dan Sartono (berdiri, 9 dari kiri)
[Sumber: KITLV 53480]

Akan tetapi, segera setelah diambilnya keputusan tentang pembaruan persatuan PPPKI, hal ini justru menguap begitu saja. Kepemimpinan PNI yang imajinatif dan kohesif itu tidak lagi hadir, mesin propagandanya pun tersumbat dan terpecah dalam berbagai kekuatan yang ada di PPPKI. Selanjutnya, muncul berbagai upaya untuk menangguk kekosongan politik yang ada.[333] Kini, (Partai Sarekat Islam Indonesia) PSII menambahkan dengan bangga kata "Indonesia" pada nama organisasinya karena menyadari bahwa selama ini PNI telah membuka jalan bagi seluruh kalangan perkotaan untuk mengambil langkah berani tersebut. Posisi PSII di pedalaman, terutama di Jawa Barat, sangat dekat dengan massa yang dirambah PNI, terutama di daerah Bandung. Terlebih lagi, PSII selama ini dijauhi oleh kaum intelektual nasionalis, oleh karena anggapan bahwa prestasi sosialnya

332 Lihat Mr. 79/1930 dengan Laporan *Inlandsche Zaken*
333 Surat Thamrin kepada Stokvis tertanggal 19 Januari 1930

tidak setara dengan PNI, juga tidak bisa disandingkan dengan *Studieclub* yang didirikan Sutomo, ataupun *Muhammadiyah*. Maka, seorang pengantar konservatif menyatakan bahwa atap federatif yang didirikan oleh PSII dari PNI di masa lampau menunjukan kegagalannya karena pilar keindonesiaan dan keislaman berbeda tajam.[334]

Maka, tidak aneh jika prospek masa depan PSII dan PNI banyak tergantung pada keseimbangan, serta turut menunggu momen yang tepat, untuk memperbaiki kehilangan yang pernah dialaminya dan memulihkan prestisenya sebagai suatu organisasi politik. Hal yang sama dihadapi oleh Sutomo dengan menjadikan prospek daerah pedesaan PNI sebagai bagian dari rencana untuk memulihkan pembangunan sosial dan ekonomi dalam pengaruh *Indonesische Studieclub* yang akan diubahnya menjadi partai[335], serta termasuk rencana "penyembuhan" kembali kaum nasionalis di Volksraad. Sejumlah pakar memandang Fraksi Nasional yang dibentuk Thamrin hanyalah sebatas langkah reaksioner terhadap kemunculan VC (*Vaderlandsche Club*) yang Progresif.[336]

Maka, tidak aneh jika prospek masa depan PSII dan PNI banyak tergantung pada keseimbangan, serta turut menunggu momen yang tepat, untuk memperbaiki kehilangan yang pernah dialaminya dan memulihkan prestisenya sebagai suatu organisasi politik.

Pada sidang 8 Februari 1930, Thamrin dan koleganya di Fraksi Nasional mengajukan mosi terkait digantinya Pasal 153 bis & ter, serta Pasal 161 dalam hukum pidana untuk mengendalikan "kerusuhan revolusioner" agar dapat didiskusikan. Dalam pembukaan pidatonya, Thamrin mengulang kembali argumen yang telah disampaikannya pada 18 Juli 1929, di mana ia menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut telah jelas dan terbuka terhadap interpretasi menurut kehendak dan kegunaannya.[337] Sementara itu, pada 24 Maret 1930, Thamrin menyampaikan pernyataan tertulis kepada pemerintah dengan keluhan tentang kecilnya ukuran sel tempat Sukarno ditahan, yakni 1,5 x 2 meter. Disebutkan pula olehnya bahwa tahanan politik seperti Sukarno tidak bisa diperlakukan seperti tahanan kriminal biasa.[338] Tembusan surat itu dikirimkan kepada pers Indonesia dan Stokvis di Belanda yang kemudian juga dimuat dalam pers setempat. Pada akhir tahun, dimulailah sidang pengadilan Sukarno, Maskun, Supriadinata, dan Gatot Mangkupraja di Bandung. Thamrin dengan teratur menghadiri persidangan tersebut. Ia duduk di deretan depan bersama Gobee dan Stokvis untuk memberikan dukungan moral kepada mereka.

334 J. Th. Petrus Blumberger, 1987, *De Nationalistische Beweging In Nederlandsch Indie* (Harlem: H.D. Ijeeok Williok & Zooo NIV), hlm. 274
335 Surat kepada Stokvis tertanggal 2 Februari 1930, IISG, hlm. 2
336 *Handelingen Volksraad* 1929-1930, hlm. 142
337 *Handelingan Volksraad* 1929-1930, hlm. 139
338 *Handelingen Volksraad* 1930-1931, hlm. 37

Dalam keterangannya di depan Volksraad pada 16 Juni 1930, Gubernur Jenderal mengindikasikan bahwa Sukarno diperkirakan telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 169 dan 153 bis. Oleh karena itu, perkaranya akan dilimpahkan ke pengadilan.[339]

Sementara itu di Pengadilan Bandung, setelah beberapa bulan pemeriksaan dan persidangan, diberikanlah kesempatan kepada Sukarno untuk melakukan pembelaan. Sebanyak 60.000 kata-kata orasi pembelaannya disampaikan secara lengkap, serta dilengkapi oleh data-data yang baik resmi maupun tidak resmi, yang menunjukan bahwa Sukarno merupakan korban sasaran dari apa yang disebutnya sebagai "*open door imperialism*" atau imperialisme pintu terbuka. Penghisapan yang terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang kapitalis terhadap potensi sumber kekayaan kaum pribumi yang lebih jauh lemah mendorongnya untuk bangkit sebagai kekuatan pribumi yang menantang. Atas nama nasionalisme populis yang berakar pada kesadaran nasional yang sedang tumbuh dan tak dapat dibasmi, pimpinan PNI bangkit dengan aksi massa damai. Mereka bergerak dalam tataran nonkooperatif dari Front Sawo Matang untuk menghadapi kekuatan kolonial secara damai dan setara.[340]

Setelah Sukarno bebas, dengan bantuan Thamrin, ia mencoba menata kembali kesatuan kepemimpinan yang semula berada pada PNI, beserta dengan struktur federatifnya.

Setelah Sukarno bebas, dengan bantuan Thamrin, ia mencoba menata kembali kesatuan kepemimpinan yang semula berada pada PNI, beserta dengan struktur federatifnya. Resepsi di *Balai Pertemuan* yang berlangsung di Bandung pada 31 Desember 1931 dipersiapkan oleh Thamrin. Selanjutnya, di kongres *Indonesia Raya* di Surabaya pada 1 Januari 1932, ia diperkenalkan kepada Dr. Sutomo sebagai seseorang yang telah menjadi korban hukuman yang tidak adil dari pihak kolonial. Melalui sambutannya, seperti biasanya Sukarno menyengat para pendengarnya. Ia membandingkan dirinya dengan pahlawan wayang bernama Kokrosono yang kembali dari penjara untuk menemui saudaranya, Banowati dan Irowati, yang terpisah karena pertempuran, dengan maksud untuk merujuk pada perpecahan yang terjadi pada Partindo dan PNI Baru. Sukarno meminta saudara-saudaranya untuk bersatu dalam Front Sawo Matang.[341]

Para anggota Fraksi Nasional, seperti Thamrin, Suroso, Mochtar, dan De Dreu merupakan orang-orang pertama yang memperingatkan Volksraad akan potensi perubahan kondisi di masa yang akan datang bagi kaum pribumi, tidak seperti pada permulaan diberlakukannya

339 *Handelingen Volksraad* 1930-1931, hlm. 9-10
340 Bob Hering, *Op.Cit.*, hlm. 162-163
341 *Ibid.*, hlm. 169-170

langkah-langkah pembatasan oleh pemerintah. Misalnya, perkebunan karet rakyat dikelola lebih ekonomis daripada perkebunan yang ditangani oleh perusahaan perkebunan besar. Seharusnya, mereka yang tidak terkena pembatasan dari pemerintah berhak atas subsidi.[342] Mereka juga mempertanyakan anggaran yang tidak cukup bagi Departemen Pertanian, yakni 57 juta gulden, jika dibandingkan dengan anggaran yang tersedia untuk AD, AL, dan Kepolisian yang mencapai 174 juta gulden. Mochtar, di sisi lain, juga mengharapkan dukungan bagi industri batik.

Ketidaksabaran terhadap perjuangan pihak kaum nasionalis emansipatoris mengakar pada masalah serius dan tidak menetapnya kondisi ekonomi di Hindia-Belanda pada masa itu. Perasaan superior pihak kolonial, serta nada rasialis yang sering dilontarkan telah melukai sensitivitas orang Indonesia. Van Meurs, anggota *Eugenitic Assosiation*, cenderung bersikap rasialis dan memandang orang Indonesia sama sekali belum matang secara politis, kendati menyadari bahwa nasionalisme mereka bersifat sangat eksplosif dan tidak bebas dari pengaruh pengaruh asing. Sedangkan, Fruin menyatakan bahwa pemerintah harus tidak berada diatas partai tetapi berdiri tanpa reserve di pihak sana, dan bukan dengan musuh.[343]

Di Volksraad, Fraksi Nasional menunjukan penentangannya terhadap keputusan pengadilan itu dan akan melakukan rapat-rapat protes di seluruh Jawa yang akan digerakan bersama dengan PPPKI. Salah satu rapat itu diadakan di *Gedung Permufakatan Indonesia* di Gang Kenari, kini Museum M.H. Thamrin, pada 3 Mei 1931. Fraksi Nasional merasa sangat dilanggar kehormatannya dengan adanya keputusan pengadilan yang tidak adil terhadap Sukarno dan tokoh pribumi lainnya. Pihak PPPKI secara bulat menolak keputusan itu. Maka dari itu, Fraksi Nasional menekankan bahwa tidak satu pun organisasi rakyat yang dapat ditindas dalam jangka panjang oleh kekuatan yang menyimpang. Sebenarnya, tidak ada perbedaan mendasar di antara nasionalisme ekstrim dan moderat, pandangan itu hanyalah dari pihak pemerintah Hindia Belanda semata, agar mereka dapat melancarkan politik yang memecah belah pergerakan. Front Sawo Matang yang sangat padu segera diuji dengan kejadian di luar Indonesia, yaitu ketika di negeri Belanda, kelompok Hatta melakukan kritik terhadap postur PPPKI yang lemah, serta pembubaran diri PNI yang kurang demokratis.[344]

Di Volksraad, Fraksi Nasional menunjukan penentangannya terhadap keputusan pengadilan itu dan akan melakukan rapat-rapat protes di seluruh Jawa yang akan digerakan bersama dengan PPPKI.

342 *Handelingen Volksraad* 1930-1931, hlm. 41, 46, dan 87-88
343 *Handelingen Volksraad* 1930-1931, hlm. 224
344 *Indonesia Raja*, Agustus 1931

Terhadap keputusan pengadilan ini, Fraksi Nasional bertanya-tanya perihal apakah yang disebut sebagai atmosfir yudisial/polisionil yang telah mempengaruhi ketenangan yang diharapkan oleh mereka yang selama ini menyusun skenario. Dalam hubungan ini, ia menyatakan:

> *"Satu hal yang dapat dipastikan, bahwa rasa keadilan yang dibangun dewasa ini sangatlah sulit dicari. Kepercayaan terhadap putusan pengadilan termasuk salah satu sandaran utama negara yang sangat penting. Akan tetapi, dengan banyaknya keraguan terhadap kenetralan institusi pengadilan, maka pemerintah akan kehilangan salah satu pilar terkuat untuk memelihara kedaulatan hukum."*[345]

Perbedaan sifat pergerakan dari golongan kooperatif dan nonkooperatif dibedakan berdasarkan dua faktor besar.

Dengan merujuk pada *De Stuw*, yang belakangan menulis tentang teriakan putus asa yang disuarakan lebih lanjut oleh para wakil di Fraksi Nasional, mereka berharap bahwa pemerintah tidak pernah lagi merasa perlu mengalihkan tanggung jawabnya dengan menindak organisasi seperti PNI berdasar Pasal 169 melalui pundak pengadilan. Sekalipun mereka yang di Fraksi Nasional merasa berkewajiban mendiskusikan 51 halaman keputusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman itu, 50 halaman diantaranya hanyalah masalah hubungan politik, pandangan politik, dan pernyataan politik.[346]

Perbedaan sifat pergerakan dari golongan kooperatif dan nonkooperatif dibedakan berdasarkan dua faktor besar. *Pertama*, golongan kooperatif adalah mereka yang bersedia untuk menjadi mitra bagi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, akan tetapi tetap menyuarakan perjuangan rakyat demi melawan ketidakadilan melalui institusi Volksraad yang mereka jadikan sebagai sarana bagi pemenuhan kepentingan rakyat pribumi. *Kedua*, golongan nonkooperatif adalah golongan yang memiliki sifat pergerakan yang menentang Pemerintah Kolonial Hindia Belanda secara langsung dan terang-terangan, oleh karena sering terjadinya penolakan mosi yang sebelumnya diajukan di Volksraad oleh Fraksi Nasional, yang di kemudian hari ditolak oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dan Kerajaan Belanda, sehingga pergerakan dari kaum nonkooperatif ini merupakan buah perlawanan langsung dari rakyat pribumi.

345 *Handelingen Volksraad* 1930-1931, hlm. 1868
346 *Handelingen Volksraad* 1930-1931, hlm. 1869

3.4 Sepak Terjang Fraksi Nasional dalam Persidangan Volksraad

Para anggota Volksraad sedang berkumpul di rumah Sukarjo (2 dari kiri). Tampak di antaranya Soangkupon (4 dari kiri), Sam Ratulangi (5 dari kiri), dan M.H. Thamrin (paling kanan)

[Sumber: *Bataviaasch nieuwsblad*, 24 Desember 1935].

Fraksi Nasional di Volksraad selanjutnya meningkat jumlahnya menjadi 11 orang, antara lain Kusumo Utoyo, Mochtar, Soangkupon, Suroso, Dwijosewoyo, Iskandardinata, Sukarjo Wiropranoto, Mohammad Noor, Abdul Rasyid, Wiwoho Purbohadijoyo, dan Thamrin, yang segera memutuskan untuk menempuh kebijakan untuk memulai sesuatu langkah politik. Dalam hal ini, juga disampaikan bahwa terdapat rencana untuk membentuk beberapa bagian di bahwa fraksi tersebut, seperti Kusumo Utoyo untuk masalah ekonomi, Sukarjo untuk PNI, atau Suroso untuk Digul. Anggota fraksi memandang Thamrin sebagai sosok yang dapat mewakili seluruh rakyat yang akan menangani hak politik di bidang sosial dan ekonomi dalam negeri karena masalah ini tidak dapat dipisahkan dari politik kolonial.

> *"Nasionalis kooperatif dan nonkooperatif memiliki satu tujuan bersama yang sama-sama, yakin pada Indonesia merdeka! Jika kami kaum kooperator merasa bahwa pendekatan kami tidak efektif, maka kami akan menjadi yang pertama mengambil arah kebijakan politik yang diperlukan."*[347]

"Nasionalis kooperatif dan nonkooperatif memiliki satu tujuan bersama yang sama-sama, yakin pada Indonesia merdeka!

347 *Handelngen Volksraad* 1931-1932, hlm. 173

Perkumpulan kedaerahan Indonesia yang diilhami oleh pandangan sovinisme sudah lewat, dan kini digantikan oleh federasi organisasi politik yang lebih besar. Hal itu akan berakibat pada pengelompokan baru bagi seluruh perserikatan anak negeri untuk membentuk suatu organisasi modern yang tanpa batas. Partai-partai Indonesia, yang menjadi benteng pandangan asosiasi, kini mengelompok dalam partai kebangsaan, bahkan juga bersifat lintas agama. Sebagian besar partai kini menyatakan bahwa tujuan dari pergerakannya adalah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, baik melalui status persemakmuran maupun tidak. Kelompok-kelompok yang bukan bagian dari Indonesia, yang tidak mengikuti kepentingan politik tertentu dari kelompoknya sendiri tetapi juga berjuang untuk kelompok tertentu, secara komersial atau yang lain, tidak akan dilarang selama tidak menentang kepentingan pihak lain.[348]

Fraksi Nasional orang Indonesia tidak kehilangan kepercayaan pada tujuannya yang jauh dengan politik pemerintahan modern yang dipupuk dengan surutnya kelompok bangsa Eropa yang tinggal di Indonesia. Dengan pandangan demikian, dalam benaknya dan menurut pendapatnya, maka keikutsertaan mereka dengan sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang terbuka dalam politik yang nyata. Fraksi pribumi juga berhasil meminta golongan Cina dan Arab untuk melakukan perenungan terhadap kenyataan bahwa mereka juga bagian dari bangsa Asia. Dengan demikian, mereka seharusnya memberikan pertimbangan dalam perspektif yang telah dikemukakan. Dalam hubungan ini, Fraksi Nasional menanyakan kepada pemerintah terkait rencana persamaan grup etnis Cina secara hukum. Bukannya menghendaki hak istimewa, namun fraksi pribumi tidak menghendaki terus berlanjutnya keadaan di mana orang Indonesia di negerinya sendiri justru mempunyai hak paling sedikit.[349]

Fraksi Nasional orang Indonesia tidak kehilangan kepercayaan pada tujuannya yang jauh dengan politik pemerintahan modern yang dipupuk dengan surutnya kelompok bangsa Eropa yang tinggal di Indonesia.

Tujuan IEV (*Indo-Europeesch Verbond*) secara sosial dan politik adalah untuk mendapatkan hak atas tanah untuk golongan minoritas Indo-Eropa yang mendapatkan tantangan dari Fraksi Nasional. Dalam hal ini, pendapatan sejajar dengan pendapatan sebelumnya mengenai golongan Arab dan Cina. Mereka meminta pimpinan golongan Indo-Eropa (*De Hoog Beest*) untuk memperhatikan kedekatan rasial golongan Indo dengan orang Indonesia dan menghadapi tanggung jawab pengakuan, daripada terus-menerus memupuk kepercayaan samar-samar dan sentimental terkait apa yang disebut sebagai pertalian Indo dengan Holland.[350]

348 *Handelingen Volksraad* 1931-1932, hlm. 175-177
349 *Handelingen Volksraad* 1931-1932, hlm. 189
350 *Handelingen Volksraad* 1931-1932, hlm. 807-810 dan 1128-1129

Mosi Fraksi Nasional menang dengan suara 31 melawan 26.[351] Mosi Thamrin ini bertujuan agar perusahaan-perusahaan besar dapat mengurangi beban keuangan Indonesia dengan cukup berarti. Ia mengulangi lagi pandangannya tentang sangat besarnya perbedaan kemampuan belanja antara orang Belanda dan Indonesia, beserta pajak yang dikumpulkan.[352]

Berbagai mosi yang diajukan oleh Fraksi Nasional merupakan representasi dari keadaan rakyat pribumi di Hindia Belanda, yakni apa yang menyangkut berbagai isu yang terjadi di seputar kehidupan sosial masyarakat pada waktu itu. Akan tetapi, tidak semua mosi dikabulkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, walaupun ada beberapa yang di tolak juga.

3.5 Perdebatan mengenai masalah Perekonomian Hindia Belanda dalam menghadapi krisis

Berbagai mosi yang diajukan oleh Fraksi Nasional merupakan representasi dari keadaan rakyat pribumi di Hindia Belanda, yakni apa yang menyangkut berbagai isu yang terjadi di seputar kehidupan sosial masyarakat pada waktu itu.

Depresi Ekonomi Dunia pada tahun 1930-an menimbulkan situasi yang sulit bagi perekonomian di seluruh dunia dan Hindia Belanda, terutama pada industri perdagangan ekspor. Harga komoditi perdagangan di pasar dunia merosot tajam, demikian pula permintaannya. Dengan demikian, jumlah keseluruhan nilai ekspor dari tanah jajahan menurun, meskipun bunga dan hutang luar negeri tetap tinggi dan harus dibayar, sehingga menciptakan sisa pembayaran luar negeri yang sangat sedikit.

Untuk mengurangi beban berat keuangan orang Indonesia, Wiranata Kusuma, Thamrin, Ratu Langie, dan De Dreu mengajukan mosi tentang *opcenten* (bea tambahan) agar dicabut untuk beberapa jenis barang impor di sepanjang tahun 1932-1933. Menurut Fraksi Nasional, berdasarkan angka anggaran tahun mendatang, beban bagi penduduk Indonesia dari pajak impor diperkirakan sekitar 38 juta gulden dari jumlah keseluruhan 76 juta gulden. Hal ini tidaklah adil jika dijadikan sebagai tanggungan berat bagi penduduk pribumi.[353] Mosi ini pun diperdebatkan sama dengan sebelumnya, dan dikalahkan dengan suara 29 melawan 24, sedang tentang bea tambahan dikalahkan dengan suara 32 melawan 22 pada persidangan tahun 1932.[354]

351 *Handelingen Volksraad* 1931-1932 *onderwerp* 110, *stuk* 12
352 *Handelingen Volksraad* 1931-1932, hlm. 182-184
353 *Handelingen Volksraad* 1931-1932, hlm. 1414-1417
354 *Handelingen Volksraad* 1931-1932, hlm. 1452

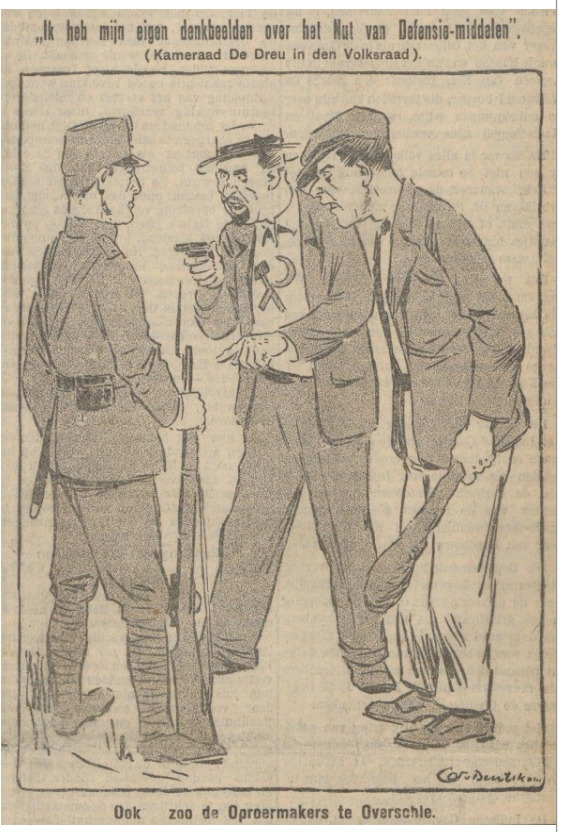

Ilustrasi yang menggambarkan sindiran terhadap pandangan De Dreu, seorang anggota Volksraad yang juga anggota Fraksi Nasional, mengenai isu anggaran pertahanan

[Sumber: *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie*, 25 Juli 1932]

Persidangan Volksraad yang kelima masih diliputi oleh optimisme selama perdebatan ketika Thamrin, pada 3 Februari 1932, menyampaikan pidato dengan menyoroti situasi ekonomi. Ia menyampaikan empat pandangan. Pertama, krisis yang dialami ketika itu merupakan akibat dari konsumsi yang terlalu rendah. Hal ini terjadi karena kesalahan struktur politik ekonomi dunia. Kedua, kebangkitan akan kesadaran politik ekonomi di kalangan masyarakat bangsa kolonial dan semi kolonial. Mereka ingin melepaskan diri dari pengaruh produksi Barat agar dapat menghentikan perkembangan pemiskinan oleh intensifnya penghisapan. Ketiga, tidak berubahnya struktur politik ekonomi kolonial membuat krisis menjadi bertahan lama atau bahkan permanen. Keempat, hanya politik yang berani melakukan perubahan konstitusional menyeluruh yang akan menghasilkan pemecahan krisis dengan cepat dan tepat.[355]

Dengan mengemukakan empat butir pemikiran tersebut, kemudian ia bertanya apa yang harus dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi tendensi kolonial yang eksploitatif yang tidak memberikan manfaat bagi produsen Indonesia? Bagaimana cara yang harus ditempuh untuk melawan pemiskinan Indonesia dan tendensi komisi yang terlalu rendah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ia menilai bahwa struktur ini tidak normal karena bertumpu pada sistem penghisapan yang tujuannya adalah untuk memperkaya lapisan yang terus menerus memerintah dan mendominasi. Kekayaan yang didapatkan dari tanah dan rakyat Indonesia disimpan dan ditanamkan di tempat lain, sehingga secara langsung memiskinkan tanah dan rakyat setempat.[356]

Kaum pribumi dalam Fraksi Nasional juga mengusulkan suatu rencana ekonomi yang berorientasikan pada kebaikan penduduk Indonesia. Terdapat enam butir yang terkandung dalam usul yang disampaikannya, termasuk penghapusan secara bertahap politik pintu terbuka dan pemerintahan dualistis dalam negeri. Selanjutnya, mereka juga mengusulkan untuk dilakukannya pengalihan pekerjaan kepada orang Indonesia, beserta gajinya, baik tanpa sifat sementara maupun pengecualian skala, juga peningkatan investasi pribumi dalam industri dengan penyesuaian yang bisa diterima. Hal ini akan meningkatkan bagian keuangan negeri ini. Soal modal Indonesia dalam industri, mereka ingin mencontoh Jepang sebagai yang disebutkan dalam laporan Menteri Koloni Van Kol.[357]

355 *Handelingen Volksraad* 1931-1932, hlm. 1840
356 *Handelingen Volksraad* 1931-1932, hlm. 1841
357 *Handelingen Volksraad* 1931-1932, hlm. 1843

Hindia Belanda pada 1930-an terseret ke dalam krisis ekonomi yang merajalela di seluruh dunia. Sebagai negeri yang banyak mengekspor Hindia Belanda sangat terpukul, lebih-lebih karena selama beberapa tahun tidak mau melepaskan standar emasnya. Perusahaan-perusahaan besar terkena, dengan akibat bahwa penurunan upah dan pemecatan secara besar-besaran membawa penderitaan berat bagi rakyat. Pemerintah Hindia Belanda juga mengadakan penghematan, secara keseluruhan, semua tindakan ini pun diselaraskan kepada tuntutan untuk mempertahankan standar emas dan dengan demikian sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan penduduk.[358]

Di Volksraad, Thamrin membantah bahwa apa yang disebut sebagai krisis itu tidak lebih dari upaya membawa badan itu untuk sejalan dengan aspirasi para anggotanya. Tidak ada masalah konspirasi dalam persoalan tersebut. Semua saran yang telah dipersiapkan, juga konsep Sukarno tentang reorganisasi PPPKI, diumukan secara terbuka.[359] Dalam membaca jalannya kejadian, tidaklah secerah seperti yang diharapkan oleh kawan-kawannya di dewan. Konferensi PPPKI diadakan di Sala, pada 30 April dan 1 Mei 1932 dengan agenda mempersiapkan bahan-bahan sejak berlangsungnya *Kongres Indonesia Raya* pada 1-3 Januari.

Di Volksraad, Thamrin membantah bahwa apa yang disebut sebagai krisis itu tidak lebih dari upaya membawa badan itu untuk sejalan dengan aspirasi para anggotanya.

Dalam kongres tersebut, timbul permusuhan di antara Sartono dan Sutomo, terutama karena kelakuan arbitrer Sutomo selama persiapan. Sutomo sendiri telah melakukan perubahan terhadap beberapa bagian program yang telah disiapkan oleh Thamrin dalam "*Susunan dan Peraturan Kongres*",[360] yang dibuat pada tanggal 23 sampai 31 Juli, serta 10 dan 14 Desember 1930. Dua pertemuan yang pertama dilaksanakan di kediamannya di Sawah Besar, dan berhasil membuat kongres itu menjadi terbuka, bukan hanya bagi anggota PPPKI saja tetapi juga bagi organisasi lain. Para pimpinan ini diperbolehkan juga menyampaikan usul mereka sendiri tentang masalah politik, sosial, dan ekonomi. Dalam dua pertemuan lainnya juga di Sawah Besar, ia mengusulkan dibentuknya suatu front pergerakan melalui institusi permanen yang akan bertindak sebagai payung bagi seluruh organisasi pribumi. Persoalan ini disampaikan dalam pertemuan di Sala, pada tanggal 24 Mei 1931. Dalam pertemuan itu, kata "*Permufakatan*" diganti dengan kata "*Persatuan*". Usulan Thamrin ditentang oleh Sutomo yang menangguhkan, menunda, sehingga selanjutnya tak dapat diterima lagi.

358 Nugroho Notosusanto, Marwati Djoened Poesponegoro, *Op. Cit.*, hlm. 86.
359 *Handelingen Volksraad* 1932-1933, hlm. 893-894
360 PPPI dan PPKD Kasimo berpihak pada Sartono (Lihat B.R. van der Most "Indonesia Raja Congress", Laporan PID, terlampir pada surat Verheijen kepada De Jonge, 28 Januari 1932, Mr, 123/1932

Sukarno masih diundang sebagai tamu kongres PPPKI dalam perkembangannya ketika itu. Dalam konferensi di Sala, pada tanggal 30 April sampai 1 Mei 1932, ia menyatakan bahwa solidaritas internal yang telah ia pupuk selama ini rupanya terancam buyar. Kegagalan untuk membangun persatuan, menurut pendapatnya, adalah karena PSII masih tetap berada di luar, sedang Partindo dan PNI Baru keduanya sama-sama enggan bergabung. Hal ini mengganggu Sutomo yang ketika itu ada dalam *Majelis Pertimbangan*. Gobee, penasihat *Inlandsche Zaken*, agaknya sangat iri terhadap posisi kepemimpinan dirinya di PPPKI. Nampaknya, ia kesal ketika yang lain memimpin dengan cara merebut perhatian umum. Posisi semacam itulah yang mungkin membuatnya terpilih kembali sebagai anggota Majelis Pertimbangan pada 2 Januari 1932, di samping adanya kritik terhadap pidatonya.

Kejadian yang menggemparkan seputar ordonansi bagi sekolah liar cukup menyita perhatian. Sejak 1923, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda begitu bernafsu untuk mengendalikan pemerataan pendidikan dengan mensponsori pendidikan swasta.[361] Pengurangan anggaran karena depresi ekonomi berpengaruh pula terhadap pemotongan anggaran pendidikan, sehingga keadaan ini mendorong berkembangnya sekolah-sekolah tak berizin yang disebut sebagai sekolah liar. Melalui ordonansi yang muncul pada September 1932, Pemerintah Kolonial berusaha menghentikan perkembangan sekolah tersebut dengan dalih bahwa sekolah ini menerapkan standar yang rendah. Selanjutnya, guru-guru sekolah swasta yang tidak bersubsidi harus mendapatkan ijin tertulis pejabat pemerintah setempat supaya bisa mengajar. Di samping itu, mereka juga harus membuktikan bahwa mereka tidak akan mengancam ketenteraman dan ketertiban umum melalui pengajaran yang diberikannya.[362]

Kejadian yang menggemparkan seputar ordonansi bagi sekolah liar cukup menyita perhatian. Sejak 1923, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda begitu bernafsu untuk mengendalikan pemerataan pendidikan dengan mensponsori pendidikan swasta.

Permasalahan tentang ini dijawab dengan pedas oleh Ki Hajar Dewantara dan yang lainnya, bahwa pendidikan di bawah standar masih lebih baik daripada tidak ada pendidikan sama sekali. Mereka juga khawatir akan apa yang dimaksudkan dengan standar oleh Pemerintah Kolonial. Dengan demikian, ordonansi itu benar-benar merupakan ancaman terhadap aspirasi pendidikan nasional. Ki Hajar Dewantara memandang ordonansi tersebut memang komprehensif dan jelas menghambat kesempatan pendidikan bagi rakyat. Usul

361 Staatsblad No. 219 tahun 1925
362 *Handelingen Volksraad* 1932-1933, hlm. 1647-1654

tentang ordonansi dibicarakan di Volksraad oleh Direktur Pendidikan, Prof. B.J.O. Schrieke mendukung usul itu dan agar diundangkan pada 15 September. Hal ini membenarkan kekhawatiran Dewantara selaku pimpinan *Taman Siswa*, yakni bahwa kepentingan budaya Indonesia dengan sengaja ditekan. Sekalipun Gubernur Jenderal B.C. de Jonge menundanya sampai 1 Oktober, Ki Hajar Dewantara pada hari yang sama mengirimkan pesan dengan kata-kata pedas untuk mengecam ordonansi itu dan mengancam untuk melancarkan perlawanan pasif.[363]

Selama pertemuan dewan yang berlangsung pada 23 Desember 1932, jawaban yang diterima pemerintah atas pertanyaan Wiranata Kusuma di Volksraad sepenuhnya dapat dimengerti.[364] Sidang pada 21 Januari 1933 diagendakan untuk membahas usul inisiatif Wiranata dan rongrongannya terkait perdebatan penundaan ordonansi. Fraksi Nasional menghendaki agar ordonansi dibatalkan sama sekali, atau direvisi secara drastis, sebab hanya dengan cara begitu fraksi ini mau mendukung inisiatif tersebut.[365]

Fraksi Nasional menekankan, untuk sementara mereka menyambut inisiatif yang sesungguhnya merupakan kompromi yang bermanfaat untuk memecahkan jalan buntu di antara pergerakan yang ingin dilakukan kelompok pribumi dengan sikap keras pemerintah kolonial. Fraksi Nasional juga meminta pemerintah untuk membentuk komite yang dapat menemukan suatu solusi alternatif yang layak dan dapat diterima oleh semua pihak, daripada sekedar merevisi ordonansi yang menimbulkan oposisi keras dari kalangan yang sangat luas di antara organisasi pendidikan, agama, dan politik Indonesia.[366] Hal itu diikuti dengan manifesto yang dikirimkannya kepada seluruh pemimpin pergerakan untuk meredakan agitasi dan perlawanan keras. Selanjutnya, fraksi meminta dukungan keuangan untuk mengatasi kemungkinan korban aksi.[367]

Fraksi Nasional juga mengingatkan bahwa pada 6 September, melalui Suroso, akan diajukan mosi untuk mencoba menenangkan situasi seputar isu ordonansi. Mosi itu akan menyarankan kepada pemerintah untuk membatalkan ordonasi tersebut, lalu menggantinya dengan seperangkat peraturan yang lebih dapat diterima. Mosi ini akhirnya ditarik karena kurangnya dukungan pada 8 September 1932.[368]

Semuanya itu bukanlah untuk menunjukan pihaknya benar, tetapi

Selama pertemuan dewan yang berlangsung pada 23 Desember 1932, jawaban yang diterima pemerintah atas pertanyaan Wiranata Kusuma di Volksraad sepenuhnya dapat dimengerti.

363 *Oetoesan Hindia*, 1 Oktober 1932
364 *Handelingen Volksraad* 1932-1933, hlm. 33
365 *Handelingen Volksraad* 1932-1933, hlm. 2178
366 *Handelingen Volksraad* 1932-1933, hlm. 2195-2196
367 *Oetoesan Hindia*, 4 Oktober 1932
368 *Handelingen Volksraad* 1932-1933, hlm. 1646-1647; *Volksraad Zittingjaar* 1932-1933, Onderwerp 59, stuk 7, hlm. 1

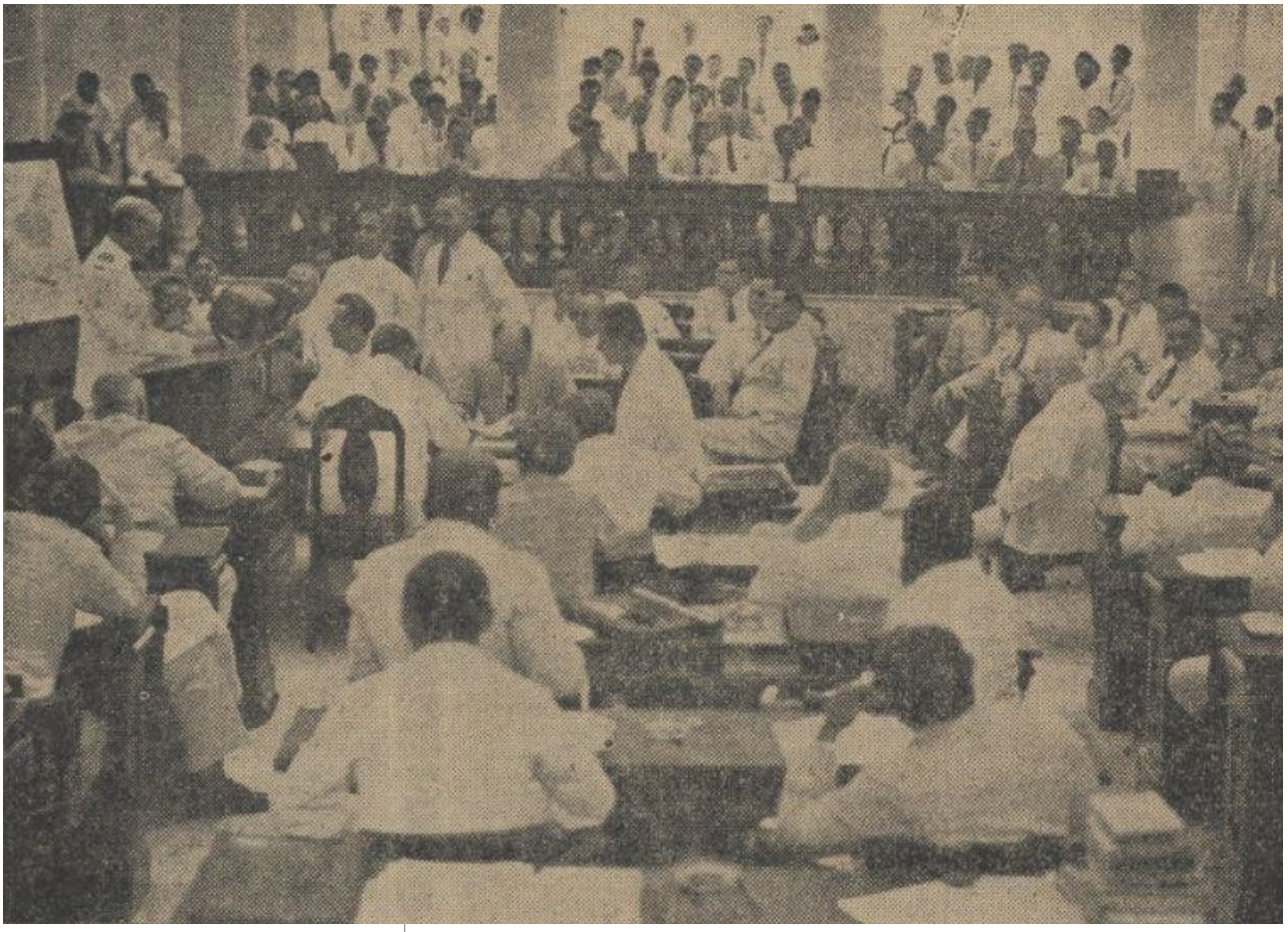

Sidang Volksraad pada tahun 1933
[Sumber: *De Indische courant*, 17 Juni 1933]

sekedar menunjukan bahwa Volksraad seharusnya dapat berlaku bijak, oleh karena keseriusan Fraksi Nasional dalam menghadapi masalah itu. Perilaku demikian tentulah dipandang sebagai suatu langkah bijak yang menunjukan pertimbangan politis seorang negarawan. Masalah lainnya adalah agar para anggota dewan merenungkan bahwa para anggota fraksinya, beserta dengan organisasi yang mereka wakili, tidak berpikir atau terbujuk untuk memperalat kehebohan ordonansi tersebut untuk menghimpun opini massa. Di lain pihak, organisasi yang bersifat kooperatif terhadap pemerintah menyesuaikan diri dengan sikap yang senantiasa berjuang dan bekerja dengan jujur bersama pemerintah untuk mencapai kedamaian dan solusi praktis yang memuaskan semua pihak. Dengan demikian, maka Fraksi Nasional dengan senang hati siap menghindari penajaman konflik, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan pendirian untuk menjaga pemeliharaan dan membebaskan rakyat lewat pendidikan swasta yang dipimpin oleh kalangan rakyat sendiri. Dalam konteks ini, dapat dimengerti bahwa

rencana BO (Budi Utomo) dan *Paguyuban Pasundan* belakangan ini adalah untuk menarik wakil-wakilnya dari dewan dan badan lainnya, jika ordonansi itu dipertahankan. Hal ini dijadikan sebagai pernyataan kepedulian terhadap hak pendidikan bagi rakyat Indonesia.[369]

Setelah dilakukannya diskusi lebih lanjut pada 7 Februari 1933, pemerintah memperhatikan usul yang meminta untuk menunda sementara ordonansi sekolah liar. Pada 4 Februari 1933, Gubernur Jenderal mengeluarkan konsep ordonansi yang berisikan sejumlah pasal yang lebih lunak guna menghindari isu politik, serta melaporkan *Memori van Toelichting* untuk masa persidangan berikutnya. Langkah tersebut diikuti oleh manifesto Ki Hajar Dewantara untuk menunda kampanye perlawanan pasif, tetapi ia meminta rekan-rekannya untuk tetap waspada dan melawan dengan tegas ordonansi yang mengancam pendidikan rakyat tersebut.[370]

Pada pertengahan sidang kedua di tahun 1932, muncul tanda-tanda yang mengarah pada suatu perbaikan. Reorganisasi PPPKI dilakukan oleh Thamrin dan Sukarno yang pada waktu itu termasuk kepada golongan nonkooperatif, dan sedang menjadikan Partindo sebagai instrumen yang lebih kuat daripada PNI. Harapan dan aspirasinya adalah untuk menyatukan organisasi politik yang kooperatif dan yang nonkooperatif ke dalam program perlawanan pasif, kapan saja kepentingan murni rakyat menjadi taruhan, dan siasat itu sedikit banyak berhasil. Strategi ini akan dilanjutkan, dan bahkan diperkuat jika mereka diproyeksikan untuk melawan kaum kolonial rasialis dengan kepentingan sosial, politik, dan ekonomi yang berbenturan. Selanjutnya, Fraksi Nasional melanjutkan perannya yang menonjol dalam kehidupan politik Indonesia.

Otto Iskandar Dinata, yang ketika itu menjadi petinggi Pasundan, memimpin PPPKI, sementara Suroso bertugas di *Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri* (PVPN). Selanjutnya, BO, yang diwakili oleh Kusumo Utoyo, Dwiyosewoyo, Sukarjo Wiropranoto, dan Wiwoho Purbohadijoyo, merupakan anggota dengan pandangan Islam yang moderat di bidang kepemudaan. Dua orang berorientasi progresif, yaitu Muchtar bin Prabu Mangku Negara yang mewakili kaum aristrokrat Sumatra, dan Abdul Firman gelar Maharaja Soangkupon yang mewakili komunitas Batak. Sam Ratu Langie, wakil dari Minahasa yang mumpuni, meski tidak pernah menjadi anggota fraksi secara

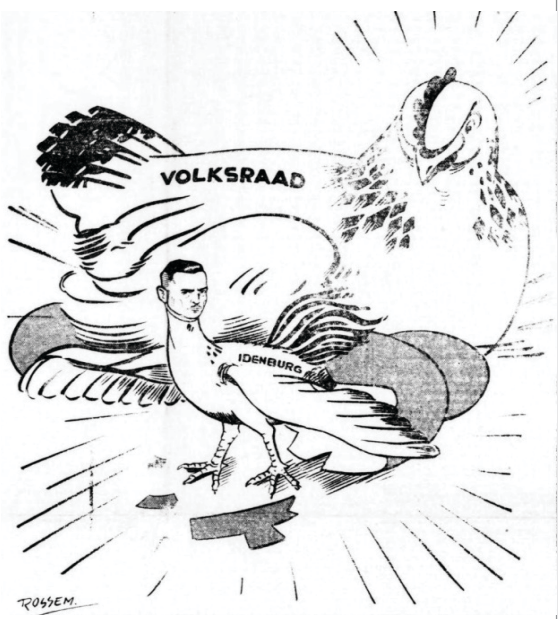

Ilustrasi yang menggambarkan akhir dari perdebatan di dalam Volksraad mengenai anggaran pendidikan.
[Sumber: *Bataviaasch nieuwsblad*, 21 Agustus 1937]

369 *Handelingen Volksraad* 1932-1933, hlm. 2196
370 *Oetoesan Hindia*, 2 Maret 1933

formal, senantiasa bertindak sejalan dengan fraksi. Keanggotaan para tokoh terkemuka ini dalam Volksraad bukan penghalang bagi oposisi yang mereka duduki. Sebaliknya, keanggotaan mereka justru menambah prestise dan otoritas kalangan nasionalis anak negeri.[371]

Sementara itu, di Batavia dan kota-kota lainnya, demonstrasi yang menyatakan kesetiaan kepada Pemerintah Kolonial dilakukan oleh kelompok politik kanan. Di Batavia, aksi demonstrasi diadakan di Lapangan Waterloo (sekarang Lapangan Banteng) dalam bentuk rombongan besar menuju taman di depan istana Gubernur Jenderal. Pada saat itu, Gubernur Jenderal De Jonge memberikan sambutannya. Semua pernyataan tersebut semakin dipertegas oleh pihak pers Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dengan adanya laporan berita eksklusif yang menyalahkan para marinir Indonesia sebagai pihak yang membangkitkan gagasan anti-Indonesia berkembang, sehingga pada gilirannya mempengaruhi pula para pejabat pemerintah dan Volksraad. Iklim politik selama keadaan darurat ketika itu diracuni oleh ketakutan terhadap penguasa Belanda dengan merusak lebih lanjut kekuatan pergerakan yang belakangan sedang dibina oleh Sukarno dan Thamrin.[372]

Keadaan tersebut semakin diperparah dengan adanya penolakan dari kaum konservatif secara instingtif terhadap usaha persuasif kaum kiri Belanda. Kaum konservatif kanan memandang kritik mereka telah menggerogoti kebanggaan hierarki pada perwira laut atau marinir. Pemerintah Kolonial kemudian menyadari bahwa emosi tersebut membuka kesempatan yang samar-samar untuk mengembalikan kembali pergerakan. Dalam diskusi tingkat tinggi pada pertemuan khusus Dewan Hindia dilakukan upaya pemberantasan pemberontakan, termasuk dipertimbangkan pula cara menghadapi gerakan radikal. Selain itu, bentuk gerakan kian menonjol dengan tumbuh berkembangnya popularitas Sukarno dan Partindo, dan kini juga dengan dekatnya PPPKI yang dipimpin oleh Thamrin, disamping partai lain seperti PNI Baru yang dipimpin oleh Hatta dan Syahrir. Pada 2 Mei 1933, Partindo dengan cepat menjadi kuat dengan keanggotaan sebesar 20.000 orang. Hal ini disebabkan oleh kekuatan mental dan kemampuan berorganisasi yang baik. Hal itu juga berarti pimpinannya, Sukarno, bersemangat dalam mengejar tujuan. Ketika telah nampak tanda-tanda bahwa partai ini akan dapat dengan

Otto Iskandar Dinata, yang ketika itu menjadi petinggi Pasundan, memimpin PPPKI, sementara Suroso bertugas di Persatuan *Vakbonden* Pegawai Negeri (PVPN).

371 *Notulen Gemeenteraad* 1932 No.1, 11 Januari 1932, hlm. 10-11
372 *Handelingen Volksraad* 1932-1933, hlm. 2726

mudahnya memobilisasi massa, sikap waspada ditunjukkan oleh Vonk sebagaimana disampaikannya di depan pertemuan *Gedelegeerden* pada 20 April 1933. Sebelumnya, pada 17 Maret 1933, Gobee mengharapkan langkah yang lebih moderat dapat diambil, meskipun tidak ada toleransi untuk pelanggaran atas hal-hal yang telah diberitahukan oleh polisi dan pejabat BB selama rapat-rapat Partindo di Jawa Tengah. Untuk gangguan semacam itu, pada 24 Maret 1933, Fraksi Nasional menyampaikan usul untuk menggunakan hak interpelasi dalam Volksraad.[373]

Dalam survei yang dilampirkan pada pertanyaan Fraksi Nasional, ada daftar yang berisikan 18 pelanggaran yang disponsori oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dalam rapat-rapat Partindo, dua pertemuan PNI Baru, serta masing-masing sekali dalam *Persatuan Buruh Kereta Api* dan *Persatuan Muslimin Indonesia* (Permi). Selanjutnya, tertera pula sejumlah pelanggaran terhadap rumah pribadi dan gedung perkumpulan, penahanan, atau bahkan pemukulan terhadap anggota partai dan wartawan, perampasan buku-buku jurnal dan pamflet partai. Beberapa pertanyaan tersebut tercantum juga dalam pertanyaan sebelumnya yang diajukan Thamrin dan Mochtar pada 11 dan 22 Februari, serta pada 1 Maret 1933. Salah satu keluhan yang ada adalah penahanan terhadap editor utama *Soeara Oemoem*, Candrabumi, karena artikelnya pada 6 Februari 1933 tentang pemberontakan kapal *Zeven Provinciën*. Dirinya dituduh melanggar Pasal 153 *bis*.[374]

Dalam survei yang dilampirkan pada pertanyaan Fraksi Nasional, ada daftar yang berisikan 18 pelanggaran yang disponsori oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dalam rapat-rapat Partindo, dua pertemuan PNI Baru,...

Peristiwa di kapal *Zeven Provinciën* merupakan imbas dari adanya krisis di Hindia Belanda pada tahun 1930-an, akibat dari krisis tersebut, terjadilah penghematan anggaran yang berpengaruh kepada pengurangan gaji para marinir Hindia Belanda pada waktu itu. Pengurangan gaji anak buah kapal militer telah membuat keresahan, hanya saja dalam melaksanakan politik pengurangan gaji ini sifat kolonialisme masih tidak bisa dilupakan, sebagaimana dibedakannya gaji Anak buah kapal berkebangsaan Belanda sebesar 14%, sementara orang pribumi dipotong 17%. Kejanggalan dari perbedaan 3% ini sangat dirasakan karena gaji anak kapal Belanda dua kali lebih besar dari orang Pribumi. Peristiwa di kapal *Zeven Provincien* terjadi di perairan barat pulau Sumatra, dalam pelayaran kembali dari Ulele ke Surabaya.[375]

373 *Volksraad Zittingsjaar* 1932-1933, *Onderwerp* 147, *Stuk* 1, hlm. 1-7
374 *Handelingen Volksraad* 1932-1933, hlm. 2694
375 J.C.H. Blom, dan Elly Touwen, 2015, *De Zeven Provincien: Ketika Kelasi Indonesia Berontak* 1933 (Jakarta : LIPI Press).

Ketika Pemerintah kolonial Hindia Belanda mengetahui peristiwa di kapal *Zeven Provinciën* maka pemerintah memutuskan kalau peristiwa itu disebabkan oleh perlawanan dari bangsa Pribumi Indonesia, dan perlawanan itu harus segera dihentikan. Pada waktu itu juga berbarengan dengan peristiwa pemogokan buruh di Surabaya sedang terjadi pula. Maka pada tanggal 10 Februari 1933 serangan udara pun dilakukan untuk menyudahi perlawanan di kapal. Ketika semuanya selesai ternyata peristiwa tersebut menewaskan 19 orang yang terdiri dari, 16 pribumi dan 3 dari Belanda, dan 11 luka berat terdiri 8 pribumi dan 3 orang Belanda.[376]

Ketika Pemerintah kolonial Hindia Belanda mengetahui peristiwa di kapal Zeven Provinciën maka pemerintah memutuskan kalau peristiwa itu disebabkan oleh perlawanan dari bangsa Pribumi Indonesia, dan perlawanan itu harus segera dihentikan.

Akibat dari peristiwa tersebut, terjadi perbincangan dikalangan masyarakat Hindia Belanda pada waktu itu, berita pemboman kapal *Zeven Provinciën* ini tersiar di dalam beberapa surat kabar pribumi dan sangat dikecam. Peristiwa ini pun menjadi perhatian kaum pribumi yang duduk sebagai wakil rakyat di Volksraad, salah satunya M.H. Thamrin, ketua Fraksi Nasional sekaligus tokoh Parindra, ia melontarkan kritiknya yang teramat pedas kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam mengatasi peristiwa di kapan *Zeven Provinciën* ini, pada pidatonya Thamrin mengatakan "*Peristiwa ini membuktikan betapa pemerintah Hindia Belanda Tidak Bertuhan*". Pidato ini di ucapkan dalam sidang Volksraad, bukan di rapat umum ataupun di surat kabar.[377]

Kasus Candrabumi ini muncul di Volksraad periode sidang 1932-1933, tepatnya pada sidang tanggal 20 Februari, dan segera timbul perdebatan antara Mr. G. Vonk dengan Fraksi Nasional. Menurut Vonk, apa yang telah ditulis oleh Candrabumi mengundang solidaritas anggota angkatan laut Belanda dan Hindia Belanda dengan pangkat lebih rendah dalam peristiwa penangkapan kapal perang yang memenuhi syarat tuduhan 153 *bis*. Fraksi Nasional mengingatkan pandangan sebelumnya tentang Pasal 153 *bis* ini dan menyatakan bahwa editor *Soeara Oemoem* hanya membeberkan beberapa pandangan obyektif. Hal itu sekedar mempertimbangkan jika terjadi sesuatu, bahkan pemerintah tidak bisa menduganya apa, menyusul sesuatu penyelesaian kekerasan terhadap suatu pemberontakan. Memotong analisis semacam itu dari keseluruhannya untuk menuduh si penulis, maka dengan sendirinya menjadi hak istimewa pemerintah. Tetapi, Fraksi Nasional mempertanyakan, adakah yang berwenang

376 *Ibid.*
377 *Ibid.*

untuk menyetujui upaya menghalangi korban yang pada tengah malam diseret dari tempat tidurnya itu untuk dikunjungi istrinya, untuk membaca dan merokok di selnya? Vonk menolak menjawab, dengan alasan bahwa kasus itu sudah diajukan ke pengadilan, atau *sub judice*.[378]

Meskipun usul dari Fraksi Nasional tersebut diterima untuk diagendakan pada 4 April 1933 pada sidang *Gedelegeerden* sebagai interpelasi, hal itu diperlakukan kasar oleh Mr. Vonk, wakil pemerintah bidang kepolisian. Dirinya menyatakan bahwa seluruh kegiatan yang telah dilakukan polisi bertujuan untuk menciptakan ketenangan dan bukannya menyebarkan ketegangan. Pernyataan itu mendapatkan dukungan ramai. Merasakan suasana demikian, maka Vonk lebih lanjut meminta para anggota Fraksi Nasional untuk memeriksa kembali sumber-sumber yang membuatnya berpihak pada elemen kaum pergerakan pribumi. Dalam jawabannya, Fraksi Nasional yang diwakili oleh Thamrin menyatakan untuk menenangkan pihaknya, tetapi tetap mengancam polisi dan VC Fruin yang pada akhirnya memicu keresahan di kalangan penduduk Indonesia. Hal itu membuatnya memutuskan untuk tidak lagi mengajukan mosi mengenai masalah tersebut, lalu dewan mengeluarkannya dari pembicaraan.[379]

Meskipun usul dari Fraksi Nasional tersebut diterima untuk diagendakan pada 4 April 1933 pada sidang *Gedelegeerden* sebagai interpelasi, hal itu diperlakukan kasar oleh Mr. Vonk, wakil pemerintah bidang kepolisian.

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menyimpan perhatian lebih terhadap kegiatan Partindo, sementara pengawasan terhadap Sukarno menjadi meningkat. Mereka terganggu dengan brosur Sukarno yang berjudul *Mencapai Indonesia Merdeka*, yang disusunnya pada akhir Maret 1933. Brosur ini merupakan kontribusi terpenting Sukarno dalam khasanah polemik nasionalisme Indonesia, sejak pembebasannya dari penjara Sukamiskin, yang sesungguhnya sama kuatnya dengan pidato pembelaannya pada akhir 1930 yang berjudul *Indonesia Menggugat*. Seperti halnya pembelaan Sukarno yang terdiri dari 60.000 kata tersebut, brosurnya kali itu juga menggunakan data resmi yang secara luas menjadikan argumennya padat. Di situlah Sukarno menguraikan tentang kejahatan imperealisme dalam bentuk politik pintu terbuka, serta mengecam seluruh sistem kolonialisme yang menciptakan surplus kapital yang tanpa henti memeliharanya, dan secara sistematis menguras potensi dan sumber kekayaan rakyat dan negeri setempat.[380] Dengan demikian, seperti sebelum 1930, Sukarno dalam brosurnya pada tahun 1933 dengan argumen yang kuat menyatakan perjuangan kaum nasionalis, dipersiapkan dengan kuat oleh aksi massa bersama,

378 *Handelingen Volksraad* 1932-1933, hlm. 2695-2696
379 *Handelingen Volksraad* 1933-1934, hlm. 164-165
380 *Soeloeh Indonesia Moeda*, No.2, Juni 1932

dan tetap menggunakan metode yang tepat untuk melawan kekuatan kapitalisme kolonial.

Penuh dengan gambaran modern, bersatunya kembali Front Sawo Matang dalam perjuangan menentang kulit putih, secara diametrik berlawanan dengan pihak sana. Sukarno yang sejak muda memperkaya dirinya dengan impian luas, hidup di lingkungan yang akrab dengan wayang Jawa dan Bali, dengan tidak ragu memberikan gambaran penuh arti dari masa lampau yang gemilang, yang penuh dengan kekerasan dan perkelahian tanpa henti. Selain permasalahan brosur, masih terdapat satu masalah lagi. Bagaimanapun, tidaklah mungkin untuk merebut kekuasaan Belanda yang ingin mengambil langkah untuk mengendalikan pergerakan nonkooperatif yang radikal, atau bahkan menindasnya dengan cepat. Mengherankan bahwa sementara itu PNI Baru, serta Premi dan PSII di Sumatera Barat memperoleh perhatian khusus dari pemerintah. Kegiatan cabang-cabang partai nonkooperatif dari Permi dan PSII diamati dengan cermat karena di daerah itu belum lama berselang terjadi pemberontakan PKI.[381] PNI Baru, dengan pesan-pesan bernada marxist, tetap sangat dicurigai sejak permulaan. Perjalanan Hatta belakangan ke Jepang agaknya juga membuat Pemerintah Kolonial tidak senang.

Penuh dengan gambaran modern, bersatunya kembali Front Sawo Matang dalam perjuangan menentang kulit putih, secara diametrik berlawanan dengan pihak sana.

Para pejabat Pemerintah Kolonial Hindia Belanda seolah ketakutan dengan kaum nasionalis Partindo dan PNI Baru, seperti halnya PBI yang dalam kenyataannya merupakan organisasi dengan basis perkotaan. Mereka utamanya menggunakan gejolak pedalaman, khususnya di daerah tersebut, juga krisis yang menyebabkan dikuranginya jumlah buruh dan upahnya, serta sewa tanah petani. Selanjutnya, polisi membicarakan tentang *Kongres Rukun Tani* di Surabaya pada 8-9 Juli 1933, suatu organisasi yang dapat menghimpun 20.000 anggota. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar pimpinan yang hadir bukan petani yang termasuk golongan kelas menengah dan penganggur, demikian seperti tercantum dalam survey polisi politik atau *Politiek-Politioneele Oversichten* (PPO). Para wakil dewan di Fraksi Nasional juga melakukan pertemuan dengan pejabat setempat ketika *Gedung Nasional* Sutomo tiba-tiba ditutup, sehingga kemudian dilaporkan ke Volksraad pada 13 Juli 1933 agar gedung itu dapat dipergunakan kembali, namun tidak dicapai persetujuan.[382]

Pada 31 Juli sampai dengan 1 Agustus 1933, Sukarno ditangkap di jalan raya di depan rumah kediaman Thamrin di Sawah Besar, Batavia.

381 *Algemeene Secretarie* akhir Juni-Agustus, 1933
382 *Handelingen Volksraad* 1933-1934, hlm. 154

Polisi kolonial menunggu Sukarno di luar rumah Thamrin, sementara pertemuan pengurus pusat Partindo sedang berlangsung di dalamnya. Aksi politik Sukarno dan seluruh suasana genting diawasi polisi. Sukarno diminta untuk mengambil langkah lebih moderat.[383] Pada sidang dewan tanggal 9 Agustus, Fraksi Nasional langsung meminta catatan interpelasi. Mereka menyebutkan perlunya penjelasan dengan tegas tentang motif tindakan pemerintah, kemudian disampaikan dalam bentuk pengumuman melalui perwakilan urusan kepolisian, yakni Mr. Vonk, selama sidang bulan Agustus 1933. Setelah perdebatan pendek, interpelasi Fraksi Nasional diterima dengan hasil voting suara 49 melawan 9.[384]

Masalah utama yang dikemukakan adalah apakah pemerintah memiliki bukti konkret tentang pengaruh buruk terhadap massa yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pergerakan. Jika demikian, seberapa jauh peranan pengaruh buruk itu terhadap massa maupun gangguannya terhadap ketenangan dan ketertiban umum. Fraksi Nasional juga ingin mengetahui lebih lanjut terkait kehendak pemerintah untuk memberikan penjelasan rinci atas motif dasar untuk membatasi hak berkumpul dari berbagai organisasi pergerakan, serta perincian halaman dan alinea dari buku Sukarno yang berjudul *Mencapai Indonesia Merdeka* yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap Pasal 153 *bis*. Selanjutnya, Fraksi Nasional juga meminta penjelasan terkait kebenaran laporan dalam pers tentang penahanan segera Sukarno tanpa pengadilan. Jika pemerintah memutuskan penahanan dengan prosedur semacam itu, apakah Volksraad diperbolehkan untuk mendiskusikan keputusan tersebut?

Lima hari kemudian, pemerintah menjelaskan kepada Volksraad bahwa tidak ada cukup alasan untuk melayani pertanyaan dari Fraksi Nasional dalam sidang dewan, sebab justru yang akan dijawabnya ialah pertanyaan tertulisnya. Keesokan harinya, Suroso, Thamrin, dan Sukarjo Wiryopranoto mengajukan mosi. Disebutkan bahwa berbeda dengan pemahaman pemerintah, maka pertanyaan lisan yang diajukan dalam interpelasi dari Fraksi Nasional itulah yang akan dianggap sebagai pertanyaan yang harus dijawab oleh sidang dewan. Sebenarnya, cara dari Pemerintah Kolonial dalam menjawab secara tertulis akan menjadi berbahaya bagi posisi konstitusional Volksraad. Akhirnya, mereka menyelesaikan penolakan pertanyaan interpelasi dan menyatakan bahwa strategi dari Pemerintah Kolonian Hindia Belanda

Pada 31 Juli sampai dengan 1 Agustus 1933, Sukarno ditangkap di jalan raya di depan rumah kediaman Thamrin di Sawah Besar, Batavia.

383 *Handelingen Volksraad* 1933-1934, hlm. 571-575
384 *Handelingen Volksraad* 1933-1934, hlm. 847

Ilustrasi yang menggambarkan sindiran terhadap Stokvis, seorang anggota Volksraad dari golongan Eropa, yang simpati pada perjuangan kaum pribumi

[Sumber: *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie*, 1 Maret 1930]

adalah semata untuk mengatur perpolitikan.[385] Setelah perdebatan sejenak, maka pada 16 Agustus mosi ditarik setelah adanya usul dari Fruin dan rekan-rekannya untuk menyelesaikan masalah itu dalam persidangan tersebut.[386]

Dalam tanggapannya, Stokvis menyimpulkan bahwa terpencilnya taktik lama didorong oleh perasaan tanpa kekuatan bercampur dengan tumbuhnya perasaan pahit dan kelesuan. Jurang antara Pemerintah Kolonial dengan gerakan nasional bertambah lebar dari sebelumnya. Bahkan, jika pihak sana dapat bersikap lebih bersahabat, pengalaman telah memperlemah kehendak bekerja sama di antara mereka dan golongan pribumi. Gerakan sarekat buruh pribumi seperti mati. Keadaan patah semangat, daya amuk yang terkendali, serta impotensi kini merupakan keadaan sehari-hari dari gerakan pribumi. Demikian kesimpulan akhir Stokvis.[387]

Keadaan putus asa dalam pergerakan begitu jelas digambarkan oleh Thamrin dan Stokvis dalam korespondensi mereka, bahkan menjadi lebih jelas ketika rumor "minta ampun" Sukarno beredar di kalangan politik Indonesia. Mula-mula, laporan tentang tanda-tanda lemahnya Sukarno selama dalam interogasi dan kemungkinan dirinya berubah, muncul dalam editorial pers pihak kolonial.[388] Hal ini disanggah dengan cepat oleh pihak pers Indonesia yang menyebut hal itu sebagai upaya mengejek para pemimpin nasionalis dan memerosotkan moral pergerakan.[389] Beberapa waktu kemudian, laporan tentang perubahan yang dramatis yang dibuat Sukarno, muncul terus menerus. Dua arus pendapat muncul dalam koran Indonesia. Satu pihak minoritas mati-matian membela Sukarno.

Dalam sarannya pada tanggal 13 Oktober 1933, Dewan Hindia menentang pembebasan Sukarno karena ia akan selalu membahayakan ketenangan dan ketertiban umum. Pada 23 November 1933, interogasi terakhir terhadap Sukarno dilaksanakan. Sebelum itu, ia harus mengisi kuesioner yang telah dipersiapkan. Dengan Dekrit Pemerintah No. 2z tanggal 28 Desember 1933, Kota Ende di Pulau Flores ditetapkan sebagai tempat pembuangan Sukarno. Pemerintah Kolonial bergeming dengan perubahan Sukarno. Menghadapi hukuman itu, mungkin ia akan merujuk pada filsafat Jawa "*wani ngalah duwur wekasane*", yang berarti yang berani mengalah pada akhirnya akan mencapai yang

385 *Volksraad Zittingsjaar* 1933-1934, *Onderwerp* 54, *Stuk* 3, hlm. 1
386 *Handelingen Volksraad* 1933-1934, hlm. 1068-1071
387 Laporan pada SDAP, Batavia, 2 Januari 1934, File No. 961, IISG, hlm. 6
388 *Algemeen Indische Dagblad dan Nieuws van den Dag*, 27 September 1933
389 *Bintang Timoer*, 20 November 1933

tinggi. Seperti memberikan konsesi akan sesuatu terlebih dahulu, untuk kemudian menunggu kemenangan yang datang di akhir. Pada 17 Februari 1934, Sukarno dengan ditemani rombongan kecil keluarganya, naik kapal *Jan van Riebeeck* dalam perjalanan ke Ende dan disaksikan oleh sedikit orang dari jauh.[390]

Posisi sarekat buruh yang kooperatif maupun yang nonkooperatif lenyap selamanya dengan "dikebirinya" sayap radikal nonkooperatif. Hal ini berarti praktis menonaktifkan PPPKI. PPPKI, dengan Partindo yang ada didekatnya, tidak melakukan rekonstruksi yang bisa bertahan. Tujuan Partindo sendiri adalah untuk menegaskan ikatannya dengan PPPKI melalui kongres akhir di tahun 1934 dalam menghadapi larangan pemerintah setempat.[391] Maka, pada saat inilah waktunya politik domestik harus ditinggalkan untuk sementara karena adanya tekanan yang lebih mendesak dalam masalah sosial dan ekonomi. Hal itu dilakukan baik di Volksraad, maupun di *College van Gedelegeerden* tempatnya bergiat, yaitu tempat permulaan gugurnya interpelasi yang disampaikan tentang retriksi yang dikenakan pada sayap radikal pergerakan. Masalah ini kemudian terlewatkan dengan datangnya masalah lain berupa depresi ekonomi. Pada tahun sidang 1933 dan permulaan 1934, soal langkah-langkah ekonomi yang digambarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sejak permulaan 1933, tindakan itu meliputi langkah-langkah luas yang berkaitan dengan restriksi di bidang impor dan ekspor, pemotongan upah, serta pengaturan lisensi dan kuota. Sebagian peraturan tersebut dibuat untuk melindungi perusahaan raksasa Eropa dan kepentingan korporasi Eropa lainnya, baik yang ada di negeri Belanda maupun Indonesia.

Posisi sarekat buruh yang kooperatif maupun yang nonkooperatif lenyap selamanya dengan "dikebirinya" sayap radikal nonkooperatif.

Aspek lain dari sistem kuota dibicarakan oleh koran *Sipatahoenan*. Dikatakan bahwa perusahaan tekstil dan Twente di negeri Belanda jelas diuntungkan dari peraturan baru yang meliputi industri tersebut, serta bertentangan dengan kepentingan Indonesia.[392] Ir. S.J. Rutgers dengan segera menambahkan bahwa kurangnya gerakan massa dan buruh pribumi militan memberikan kesempatan pada pemerintah untuk mengabaikan keputusan mayoritas Volksraad, kalau keputusan tersebut merupakan keputusan yang tidak disukai pemerintah. Bahkan, De Jonge dalam pidatonya di Volksraad pada 15 Juni 1934 mengakui bahwa regulasi konflik singkat mungkin saja diterapkan dan mosi dapat diabaikan melebihi dari yang pernah terjadi sebelumnya.[393]

390 *IPO* 9, 3 Maret 1934, hlm. 133
391 *Oetoesan Hindia*, 8 Oktober 1934
392 *Sipatahoenan*, 10 April 1934
393 *Handelingen Volksraad* 1934-1935

Pada bulan April 1933, Dewan Hindia juga memperhatikan berlangsungnya terus gangguan dan kejengkelan antara Volksraad dengan pemerintah tentang masalah itu.

Pada bulan April 1933, Dewan Hindia juga memperhatikan berlangsungnya terus gangguan dan kejengkelan antara Volksraad dengan pemerintah tentang masalah itu. Regulasi konflik untuk mengatasi politik antara dewan dengan pemerintah diatur pada Pasal 89 dan 90 *Indische Staatsregeling*, Konstitusi Hindia Belanda, yang memberikan wewenang pada Gubernur Jenderal untuk membuka kembali debat-debat di Volksraad, sehingga mengakhiri jalan buntu dan mendapatkan kompromi dalam waktu enam bulan. Hal ini disebut sebagai *lange conflict regeling* (regulasi konflik panjang) dari Pasal 89. Akan tetapi, dalam hal atau keadaan darurat, Gubernur Jenderal secara unilateral dapat mengeluarkan dekrit atau peraturan yang pelaksanaannya disebut sebagai *korte regeling* (regulasi pendek), sebagaimana tercantum pada Pasal 90.[394]

Dengan beberapa pembuktian, Volksraad menyatakan bahwa pada periode 1933–1935, dengan sering ditetapkannya regulasi pendek dan penolakan terhadap perdebatan interpelasi, pemerintah De Jonge berusaha menyingkirkan Volksraad dari posisinya sebagai mitra legislatif menjadi sekedar sebagai penasihat. Interpelasi oleh Fruin dan petisi oleh anggota VC, yakni Dr. W.H.K Feuilletau de Bruyn, untuk memohon kepada Kerajaan Belanda agar membereskan masalah tersebut, daripada menerima mayoritas Volksraad, baik yang berasal dari dewan hariannya yang dipotong oleh Gubernur Jenderal maupun oleh Kerajaan Belanda.[395]

Pada tahun yang sama, dua orang sekutunya yang sebelumnya orang terkenal dalam pemerintahan kolonial, J.W. Meyer Ranneft dan F.H. Visman, dengan senang hati mendukung partai nazi, *Parteitag*, dengan kehadiran mereka sebagai tamu kehormatan. Tidak mengherankan jika selama pemerintahannya, di samping kehendak profesionalnya untuk menjamin kesejahteraan umum para pengikutnya di bawah yuridiksinya, Indonesia kenyataannya lebih mirip ke suatu usaha pertanian raksasa, sekaligus sebagai negara polisi. Kenyataannya tidaklah dapat dihapuskan dengan sejumlah pendapat yang mendalam yang menyebut Indonesia sebagai koloni percontohan karena situasinya relatif tenteram jika dibandingkan dengan koloni negara Barat lain di Asia. Diagnosis ini tetaplah sama sekali tidak berguna, jika pada saat yang sama penilaian tersebut gagal menunjukan kenyataan bahwa suasana tenteram yang ada dapat memberikan faedah sosial bagi rakyat Indonesia dan pemimpinnya ketika itu.[396]

394 *Visman Verslag I*, 1941, hlm. 115-116
395 *Handelingen Volksraad* 1934-1935, hlm. 113-115
396 *Handelingen Volksraad* 1932-1933, hlm. 226- 2196

Selama persidangan Volksraad 1933–1934, usul pemerintah untuk menaikkan pajak pendapatan dan menurunkan gaji pegawai pemerintah memasuki perdebatan panas. Konsep pemerintah tentang pajak pendapatan dengan cara menaikkan tarif dasar langsung dihubungkan dengan apa yang disebut sebagai krisis *ekstra opcenten* (pajak tambahan). Hal ini terjadi pada 6 September 1933, dan dikalahkan dengan telak oleh karena yang menyetujuinya hanyalah mereka yang tergabung dalam Grup Ekonomi, dengan anggota seorang Cina bernama H.H. Kan dan Ketua Dewan H.J. Spit.[397]

Setelah itu, Van Mook mengajukan mosi yang memperkenankan kenaikan progresif tarif pajak di tahun 1932. Sekalipun kenaikan itu hanya kecil saja, Fraksi VC Fruin dan Fraksi Nasional tetap menolaknya, sebab peraturan itu mengabaikan kepentingan golongan yang bergaji rendah, sedangkan Van Holst Pellekaan dari VC memilih penerapan pajak tak langsung. Pada bulan Oktober 1933, pemerintah kembali dengan usulan lain, meskipun tetap menerima saran dalam Mosi Van Mook yang memberlakukan tarif 1932, yaitu tarif perpajakan yang tetap memerlukan sedikit kenaikan yang akan mendatangkan pendapatan kira-kira 9,800,000 gulden.[398] Hal itu dengan cepat memancing keributan karena dalam laporan bulan November, disebutkan bahwa usul itu membuat pajak yang akan ditarik menjadi lebih besar daripada konsep awal pada permulaan pengusulannya pada tanggal 7 September 1933 yang telah ditolak.[399]

Selama persidangan Volksraad 1933–1934, usul pemerintah untuk menaikkan pajak pendapatan dan menurunkan gaji pegawai pemerintah memasuki perdebatan panas.

Dalam bulan Januari 1934, masalah tersebut tercantum kembali. Kali ini Grup Ekonomi dan VC berada dalam satu kubu, sedang Fraksi Nasional, ISDP, dan Van Mook berada dalam kubu lain. Soangkupon menyuarakan bahwa konsep pemerintah kali ini hanyalah ulangan dari konsep tahun lalu yang telah ditolak. Ia menyebut konsep itu, sekali lagi, membantu borjuasi, sementara amandemen Van Mook sedikitnya mempertahankan kepentingan proletariat.[400] Maka, timbul perdebatan tentang pihak mana yang mendapatkan beban terlalu berat dengan usul bulan September yang ditolak, dan itulah yang disodorkan pemerintah, sehingga amandemen Van Mook menang. Fraksi Nasional, IEV, ISDP, Van Mook, dan Fournier mengalahkan VC, Grup Ekonomi, serta golongan Cina dan Indonesia konservatif dengan suara 28 melawan 22. Pada hari yang sama dengan VC, grup ekonomi, dan Spit untuk memastikan kemenangan dengan 27 lawan 24.[401]

397 *Volksraad Zittingsjaar* 1933-1934, *Onderwerp* 55, *Stuk* 1-3, hlm. 1-4
398 *Volksraad Zittingsjaar* 1933-1934, *Onderwerp* 89, *Stuk* 1-3, hlm. 1-6
399 *Gedelegeerden Verslag*, 28 November 1933
400 *Handelingen Volksraad* 1933-1934, hlm. 1701
401 *Handelingen Volksraad* 1933-1934, hlm. 1708

Ilustrasi yang menggambarkan sindiran terhadap pandangan nasionalis Soangkupon, seorang anggota Volksraad dari golongan pribumi

[Sumber: *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie*, 27 Februari 1932]

Amandemen Van Mook diterima karena adanya perbaikan bagi rakyat yang diwakilinya. Akan tetapi, ia tetap mengingatkan pemerintah bahwa tidak cukup jika pemerintah hanya ingin menarik pajak dari mereka yang lebih berpotensi, dan dukungan Fraksi Nasional jangan disalahkan untuk tetap tidak memperhatikan masalah tersebut.[402] Drooglever menjelaskan bahwa Thamrin maupun Fruin sudah sewajarnya mencari manfaat paling besar dari konsep pemerintahan bagi kepentingan konstituen masing-masing. Akan tetapi, mereka tidak begitu menghendaki tanggung jawab agar realisasi peraturan yang diusulkan berhasil. Ritman dari *Bataviaasch Nieuwsblad* menganjurkan Fruin dan Hart untuk melakukan tekanan agar segera dilakukan pemungutan suara terhadap amandemen Van Mook guna menghindari banyak perdebatan.[403] Dengan mengandalkan Grup ekonomi dan VC, serta menyadari bahwa kehendak Fraksi Nasional kini akan menentang mosi, mereka juga hendak memastikan bahwa amandemen mereka tersebut akan berpuncak pada suatu ordonansi pemerintah. Disamping itu, mereka hendak menipu Fraksi Nasional dengan sesegera mungkin menemukan dua amandemen paling buruk yang hendak dilaksanakan pemerintah melalui peraturan konflik pendek (*korte conflictenregeling*) dengan ordonansi berdasar usul Hart, dkk. pada 3 Januari 1934.[404]

Drooglever mencatat bahwa cara itu sudah merupakan cara yang kesebelas yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal De Jonge, yang tidak memberikan kesempatan berlangsungnya perkembangan parlemen yang sehat dan bermanfaat bagi Hindia Belanda. Ia juga merasa aneh bahwa Fruin yang telah berperan besar dalam hal itu justru mempertanyakan seringnya penggunaan peraturan konflik pendek.[405] Pada 9 Oktober 1934, perdebatan tentang pernyataan tokoh VC (*Vaderlandsche Club*) yakni Fruin. Pada 12 Juli 1934, Fruin mendukung sekali politik tangan besi pemerintah, kendati di sisi lain menentang dan menekankan perlunya perhatian pemerintah terhadap semua mosi dan amandemen sebelumnya. Fraksi Nasional mengejek berbagai permintaan Fruin seolah hal-hal itu merupakan "pertanyaan meminta-minta". Mereka mempertanyakan apakah pemerintah menyadari perbedaan frekuensi penerapan peraturan konflik panjang dan pendek yang sebelas kali itu karena penerapan yang panjang dua kali dan yang pendek sebelas kali. Karena itu, Fraksi Nasional cenderung menimbangnya sebagai kuesioner murid sekolah

402 *Handelingen Volksraad* 1933-1934, hlm. 1789
403 *Bataviaasch Nieuwsblad*, 16 Januari 1934
404 *Indisch Staatsblad* 1934, No. 49
405 *Handelingen Gedelegeerden* 1934-1935, hlm. 61

yang tidak begitu penting. Akan tetapi, para wakil di Fraksi Nasional tidak akan mengelak untuk pemungutan suara. Hal ini penting karena pemerintah perlu menyadari bahwa bahkan kalangan konservatif yang tadinya enggan menyatakan sesuatu, apalagi mengritik sifat tinggi hati dan bersikap unilateral pemerintah, kini sangat siap untuk beranjak dari yang dulu, yang awalnya dianggap sebagai suatu keharusan. Pada hari yang sama, interpretasi Fruin diterima secara bulat.[406]

Sementara itu, bagian lain dari paket krisis pemerintahan perlu diteliti lebih lanjut oleh para anggota kuasi parlemen ini. Posisi pasar dalam negeri, komoditas seperti gula, kedelai, dan beras sebagai produk utama yang dikonsumsi dan juga diproduksi, terutama oleh mayoritas penduduk Indonesia. Masalah tersebut dipelajari dengan teliti, diperdebatkan dengan sengit, jika masalahnya menyangkut terancamnya kepentingan mereka. Misalnya, selama sidang Dewan Delegasi pada tanggal 24 Februari 1934, dalam hubungan peraturan restriksi, pelaksanaan pembatasan impor beras sama sekali gagal karena harga jual jauh dari harga yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi petani. Maka dari itu didesak untuk segera mengubah tanah-tanah yang disewa perusahaan besar supaya dikembalikan untuk menanam padi pada saat musim hujan. Hal ini merupakan isu sensitif karena otoritas pemerintah harus membeberkan dasar kontrak yang dikembalikan kepada penduduk pribumi hanya dengan beberapa dolar tip atau bahkan tanpa uang apa pun bagi pemilik tanah itu. Kusumo Utoyo dan Sukarjo pada 21 Desember 1932 mengajukan mosi dalam semua segi yang diperlukan bagi penyelesaian adil kontrak sewa di antara penduduk setempat dengan perusahaan gula, tetapi mosi itu ditarik pada 23 Desember 1932.[407]

Dalam hal beras impor pun lebih murah karena membanjirnya produksi beras dari Thailand dan Jepang.

Dalam hal beras impor pun lebih murah karena membanjirnya produksi beras dari Thailand dan Jepang. Maka dari itu didesak untuk diciptakan suatu keseimbangan antara harga beras dalam negeri dengan beras impor. Kedua negara tersebut mendevaluasikan mata uangnya beberapa waktu sebelumnya, dengan kata lain keduanya melihat masalah instabilitas pada keuangan Belanda yang jelas ketinggalan dalam mengendalikan krisis moneter. Akhirnya, amandemen terhadap perimbangan harga beras dan kedelai kalah dengan 14 suara melawan 4, dengan seluruh fraksi nasional mendukungnya.[408]

406 *Handelingen Gedelegeerden* 1934-1935, hlm. 62-64
407 Volksraad Zittingsjaar 1932-1933, Onderwerp 101, Stuk 16, hlm. 5.
408 Handelingen Gedelegeerden 1933-1934.

Dalam hal harga gula, pada Desember 1932, pemerintah menyampaikan konsep peraturan tentang asosiasi penjualan gula, yaitu *Nederlandsh Indische Vereneeging voor den afzet van suiker* (NIVAS), sehingga Fraksi Nasional mengajukan amandemen agar harga gula dalam negeri tidak terpengaruh oleh peraturan pemerintah. Meskipun amandemen dari Fraksi Nasional diterima, akan tetapi tidak juga dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini disesalkan oleh sejumlah anggota pada Maret 1934. Mereka khawatir bahwa harga gula dalam negeri akan meningkat banyak, dan bertentangan dengan perkiraan pemerintah pada Desember 1932 itu.[409]

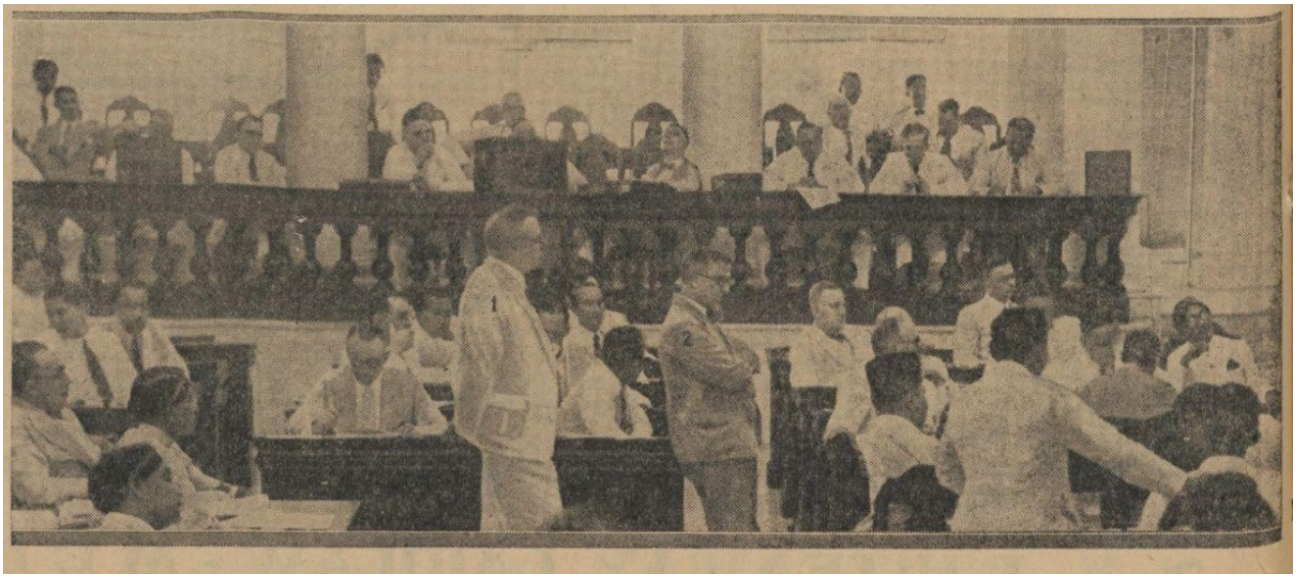

Sidang Volksraad sedang membahas mengenai pengaturan penjualan gula
[Sumber: *De Sumatra Post*, 30 Januari 1933]

Ketika pembahasan ekstensif tanaman karet diperdebatkan pada Mei hingga Juni 1934, Fraksi Nasional menyatakan bahwa produsen karet petani kecil jauh lebih tangguh untuk bertahan pada masa itu daripada perkebunan besar. Mereka dapat bekerja dalam kerangka yang lebih ekonomis dan tidak padat modal, jika dibandingkan dengan perkebunan yang dikelola oleh orang Barat. Karena itu, para wakil di Fraksi Nasional menentang tambahan bea ekspor untuk produksi kaum tani tersebut. Di samping itu, pemerintah tidak menguasai data yang terperinci tentang area, produksi, dan potensi kapasitas para produsen karet pribumi, seperti yang dikatakan Van Gelderen di kemudian hari.[410]

409 Volksraad Zittingsjaar 1933-1934, Onderwerp 142, Stuk 4.
410 *Handelingen Volksraad* 1933-1934, hlm. 2204

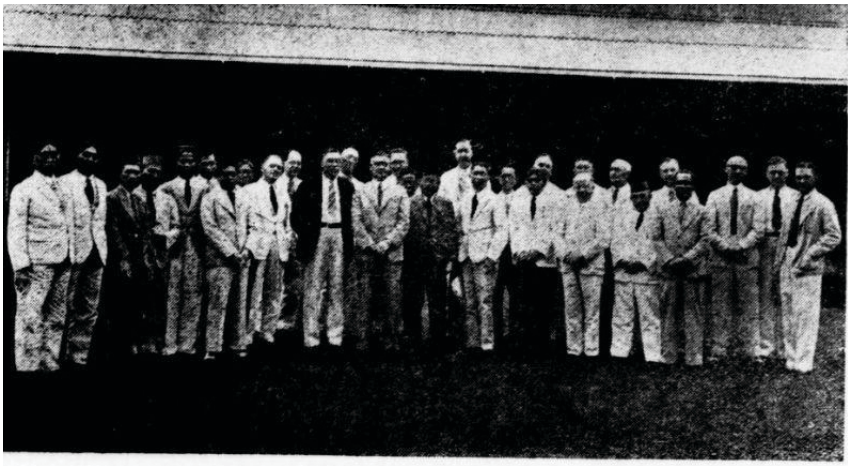

Voorzitter en leden van den Volksraad hebben onlangs een bezoek gebracht aan de Goodyear-fabriek te Buitenzorg. Onder deskundige leiding hebben de heeren het fabricageproces der Goodyear-producten gevolgd, en na afloop bood de heer R. W. Hadley, managing director van Goodyear, het gezelschap een lunch aan in Hotel Dibbets. In het midden van de groep, in zwarte jas, de heer Hadley, en naast hem, rechts op de foto, mr. W. H. van Helsdingen, voorzitter van den Volksraad.

Para anggota Volksraad mengunjungi pabrik *Goodyear* di Buitenzorg, salah satu perusahaan yang menggunakan karet sebagai bahan bakunya.
[Sumber: *Bataviaasch Nieuwsblad*, 3 Februari 1937]

Reaksi terhadap pasar oleh perusahaan-perusahaan Barat tertinggal jauh di belakang jika dibandingkan dengan produksi yang dilakukan oleh petani kecil. Mereka ini, dengan keuletannya yang telah teruji dan dengan kemauan mereka sendiri, telah mampu mengendalikan diri dan memberikan sumbangan pada kemajuan formasi harga ketika itu. Tetapi, mendapat pujian saja mereka tidak. Mereka justru dikenakan denda tanpa ada pengakuan atas potensi produksi mereka. Para petani pun terpukul oleh alokasi kuota ekspor dan pajak tambahan ekspor. Menurut pendapatnya, hal tersebut merupakan persoalan sederhana, dalam arti untuk membiarkan produksi petani tersebut memelihara perbedaan dengan perusahaan Barat dengan hasil mereka sendiri dan jumlah seluruhnya ditentukan untuk ekspor karet secara bersaing. Dalam hubungan ini, dalam analisisnya, para anggota Fraksi Nasional menggunakan tabel kantor pusat statistik.[411]

Sebab, terbukti bahwa produsen karet pribumi menunjukan ketangguhan dengan kemampuannya memproduksi dengan ongkos lebih rendah. Maka, usulan dari Fraksi Nasional menyatakan bahwa dalam masalah ini perlu diberlakukan diktum *the survival of the fittest*, atau yang paling tangguhlah yang dapat bertahan hidup. Akhirnya, mereka berkesimpulan bahwa pendapatan petani karet akan tetap stabil di negeri ini, sesuatu yang tidak dapat disandingkan pada

Sebab, terbukti bahwa produsen karet pribumi menunjukan ketangguhan dengan kemampuannya memproduksi dengan ongkos lebih rendah.

411 *Handelingen Volksraad* 1933-1934, hlm. 2205

perusahaan karet besar Barat yang terus tergantung pada modal investor dari luar negeri. Berdasarkan keadaan itu, sampailah pada kesimpulan bahwa konsep peraturan yang ada tidaklah bijak dan adil, sehingga karenanya tidak dapat diterima oleh Fraksi Nasional.[412]

Dalam perdebatan yang kedua kalinya antara Fraksi Nasional dan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, mereka (Fraksi Nasional) mengulangi lagi tuntutan mereka bahwa pemerintah belum juga memulai survei terhadap seluruh potensi produksi pertanian yang diusahakan rakyat. Karenanya, mereka menyatakan bahwa restriksi terhadap produksi karet pribumi dan alokasi kuotanya adalah kebijakan yang tidak adil.[413] Maka dari itu, para anggota dewan di Fraksi Nasional melakukan gerakan dengan tema "harga adil untuk produsen petani". Dalam hal ini, pemerintah dan Volksraad berbeda suara. Ketua Spit memberikan komentar timpang pada penutupan, sebagai berikut:

> "*Kami menyesal bahwa pemerintah dan Volksraad tidak mencapai persetujuan. Akan tetapi, seluruh hari-hari perundingan bermanfaat untuk kedua belah pihak. Volksraad menghargai harapan pemerintah melihat isu yang diperdebatkan sepenuhnya dengan pengertian bahwa pertahanan yang dilakukan wakil pemerintah membawa kesaksian maksud yang murni meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Dewan juga puas karena mengetahui bahwa pemerintah akan memperhatikan semua saran dewan.*"[414]

Kesempatan para pemimpin nasionalis untuk membuktikan dirinya benar sangatlah terbatas dalam menghadapi latar belakang pendapat yang berkembang di Volksraad, serta permusuhan yang tak kenal kompromi dari birokrasi yang sering ditunjukan oleh Pemerintah De Jong. Jadi, dengan produk tanaman pohon lain, misalnya pohon kina, cara-cara yang dilakukan dewan dalam menanggapi usul pemerintah sama-sama dapat diduga. Indonesia boleh dikatakan merupakan pemegang monopoli pasar kina dunia ketika itu, namun Pemerintah Koloial justru menghendaki restriksi produksi ekspor karena adanya stok yang telah menumpuk terlalu

Dalam perdebatan yang kedua kalinya antara Fraksi Nasional dan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, mereka (Fraksi Nasional) mengulangi lagi tuntutan mereka ...

412 *Handelingen Volksraad* 1933-1934, hlm. 2207
413 *Handelingen Volksraad* 1933-1934, hlm. 2263-2264
414 *Handelingen Volksraad* 1933-1934, hlm. 2203

besar di gudang-gudang di Amsterdam dan Bandung. Fraksi Nasional mengajukan dua amandemen, antara lain mengenai produksi kina yang masih bisa dilakukan oleh produsen kecil, sehingga petani kecil yang memiliki sampai 2,000 pohon kina tidak terkena restriksi. Dua amandemen tersebut dikalahkan dalam proses pemungutan suara di Volksraad dengan 30 suara melawan 25, serta 31 suara melawan 24. Dengan begitu, mayoritas anggota Volksraad telah menyatakan siap memelihara kepentingan ekonomi dalam menghadapi kaum miskin golongan pribumi masyarakat kolonial.[415]

Perkembangan yang sama juga muncul pada permulaan jawaban pemerintah terhadap Ratulangie, Thamrin, dan Wiranata Kusuma terkait perkebunan teh, bahwa sejak November 1933, harga patokan minimumnya adalah lima sen per kilogram teh basah. Boeke menyatakan bahwa kesulitan dirasakan lebih dari 50,000 petani teh pribumi karena ketergantungan sepenuhnya pada pembelian pabrik yang dimiliki pihak kolonial, dan hal ini ketika itu dirasa benar-benar aneh. Sebagai anggota dewan, dalam menjawab Direktur Ekonomi, Wellenstein, Thamrin menyatakan pada 14 Februari 1934 yang dilaporkan oleh Boeke bahwa tingkat minimum jauh lebih sering digunakan untuk harga pembelian dan penjual lokal, bahkan Wellenstein sendiri sadar akan praktek ini. Dengan demikian, ia siap membuat teguran terhadap para tuan perkebunan yang melanggar aturan.[416]

Tetapi, pada kenyataannya, hal itu tidak dilakukan sampai di tahun 1937. Lima bulan setelah terjadinya devaluasi nilai mata uang terhadap gulden, harga yang adil untuk teh basah baru dilakukan. Sementara itu, tiga anggota tersebut di atas terus mengingatkan pemerintah tentang isu tersebut. Ratulangie malah melangkah lebih jauh dengan meninjau bahwa restriksi hampir-hampir membunuh perdagangan teh rakyat. Namun, terdapat satu hal yang bagus di pabrik teh pribumi, yaitu ketika Soemosor menunjukan betapa baiknya suatu eksperimen ekonomi dijalankan, dalam keadaan semua pejabat mencoba untuk membatasi perkembangannya.[417] Industri sarung tenun pribumi juga penting, demikian halnya dengan industri rokok kretek kelobot yang dikerjakan dengan tangan, baik yang milik pribumi maupun yang milik orang Cina. Hal ini juga menarik perhatian Fraksi Nasional.

Tetapi, pada kenyataannya, hal itu tidak dilakukan sampai di tahun 1937. Lima bulan setelah terjadinya devaluasi nilai mata uang terhadap gulden, harga yang adil untuk teh basah baru dilakukan.

415 *Volksraad Zittingsjaar* 1933-1934, *Onderwerp* 102, *Stukken* 1-3: 2, hlm. 26
416 *Handelingen Volksraad* 1933-1934, hlm. 2065-2066
417 *Handelingen Volksraad* 1934-1935, hlm. 445-446

Keseluruhan langkah sebagai benteng dalam menghadapi krisis dan tujuan yang dikemukakan oleh Fraksi Nasional diringkas dengan baik dalam dua pidato maraton yang disampaikan di sidang Volksraad pada tanggal 13 Juli 1934 dan 13 Juli 1935. Dalam pidato yang pertama, dikemukakan berkah dari barang-barang impor dari Jepang yang murah untuk penduduk. Penetrasi ekonomi yang damai itu menjadi seperti prosesi kemenangan, yang hanya dalam beberapa tahun, bukan saja karena harga yang murah tetapi juga karena para pemilik toko Jepang biasanya tidak menunjukan arogansi rasial sama sekali dalam proses jual-belinya. Selanjutnya, disebutkan bahwa pilihan kaum pribumi pada barang-barang Jepang terbentuk karena mereka sama sekali tidak menghalangi, juga tidak membantu, segala kepentingan penduduk pribumi dalam keadaan industri nasional. Mereka juga merasakan pengalaman menjadi penduduk paling terbelakang yang secara instingtif merasa bahwa pilihan mereka menciptakan perimbangan terhadap supremasi ekonomi perdagangan Eropa yang menyeluruh. Lebih jauh lagi, kaum tani yang paling miskin pun sadar akan kenyataan penetrasi ekonomi Jepang yang secara langsung berhubungan dengan aspirasi politik negeri itu.[418]

Kegagalan pemerintah dalam menyusun perangkat hukum pelestarian alam menuai kecaman. Tak tanggung-tanggung, kecaman itu datang dari masyarakat di negeri induk.

Pada tahun 1919, peraturan tentang cagar alam kembali ditelurkan. Cagar alam –yang sebagian letaknya ada di luar Jawa– dibuat dengan menyertakan petisi yang diajukan perhimpunan itu (NIVN). Kebanyakan cagar alam itu berukuran kecil.[419] Pemerintah memperkuat peraturan itu dengan melarang perburuan burung cenderawasih dan merpati berjambul pada 1922. Peraturan ini merevisi sebagian peraturan di tahun 1909.[420] Peraturan kali ini memuat daftar hewan yang dilindungi dari seluruh kepulauan, antara lain delapan spesies mamalia –di antaranya orangutan–, dan 53 spesies unggas. Jumlah itu termasuk insektivora (organisme pemakan serangga dan hewan kecil). Peraturan itu juga memperkenalkan surat izin menembak dan musim terlarang untuk berburu, namun peraturan itu hanya berlaku efektif di Jawa dan tidak di luar pulau, sehingga sulit dijelaskan mengapa peraturan itu, meski disiapkan para ahli, jauh dari harapan dalam penerapannya.

Kegagalan pemerintah dalam menyusun perangkat hukum pelestarian alam menuai kecaman. Tak tanggung-tanggung, kecaman itu datang dari masyarakat di negeri induk. *Nederlandsch Commise*

418 *Handelingen Volksraad* 1934-1935, hlm. 173
419 Keputusan ini termaktub dalam *Staatsblad* No. 90 dan 392
420 Revisi total terhadap peraturan 1909 keluar pada tahun 1924 melalui *Staatsblad* No. 234

voor Internationale Natuurbescherming (Komisi Belanda untuk Pelestarian Alam Internasional) menilai Pemerintah Kolonial sedikit berbuat, banyak terlambat. Meski kecil, komisi ini terdiri dari orang-orang berpengaruh, sehingga tidak berarti banyak bagi pemerintah kolonial. Ada jeda enam tahun sejak 1924, dan Pemerintah Kolonial tidak mengambil langkah apapun terkait konservasi alam, terlebih lingkungan tidak pernah menjadi isu khalayak. Hal ini berubah ketika memasuki tahun 1930. Suatu kali Volksraad bersidang, salah satu sidangnya membahas tentang pelestarian lingkungan. Ini agak mengejutkan karena konservasi tak pernah menjadi isu penting bagi gerakan nasionalis, meski isu itu kadangkala sedikit menarik perhatian.

Dalam sidang itu, Volksraad mengeluarkan beberapa poin penting untuk pemerintah kolonial, antara lain pendirian lebih banyak suaka margasatwa, perluasan cagar alam, perlindungan sejumlah spesies hewan, baik di dalam maupun di luar suaka margasatwa, pembatasan dan pelarangan berburu dalam beberapa kasus, serta pelarangan total ekspor hewan yang dilindungi, baik hidup maupun mati. Setahun kemudian, pemerintah menelurkan dua peraturan tentang perlindungan margasatwa.[421] Peraturan tersebut mengandung amanat agar dapat dilaksanakan upaya perluasan suaka margasatwa dan melarang ekspor beberapa jenis burung dan mamalia liar, juga gading gajah. Untuk penerapannya, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang perburuan.[422]

Poin penting peraturan itu adalah pembatasan perburuan yang lebih ketat. Peraturan itu kian lengkap pada tahun 1932 dengan keluarnya Staatsblad No 17. Peraturan ini memperbaiki peraturan tahun 1916 tentang cagar alam. Karena peraturan ini, luas cagar alam di Hindia Belanda bertambah. Tambahan itu berasal dari Baluran di Jawa (25,000 hektar), Gunung Leuser di Sumatra Selatan, Way Kambas di Lampung (900,000 hektar), serta Kutai dan Kotawaringin/Sampit –sekarang Taman Nasional Tanjung Puting– di Kalimantan (650,000 hektar). Tak seperti peraturan sebelumnya, sebagian besar publik menerima peraturan itu. Meski semua peraturan itu lebih ditujukan untuk kepentingan kolonial, kecaman untuk pemerintah kolonial berkurang.

Poin penting peraturan itu adalah pembatasan perburuan yang lebih ketat. Peraturan itu kian lengkap pada tahun 1932 dengan keluarnya Staatsblad No 17.

Dengan demikian, jumlah keseluruhan nilai ekspor dari tanah jajahan menurun, sementara bunga dan hutang luar negeri tetap tinggi

421 *Staatsblad* No. 134 dan 266
422 *Staatsblad* No. 133 dan 265

dan masih harus dibayar, sehingga sisa pembayaran luar negeri yang sangat sedikit. Dengan demikian, impor barang-barang hasil industri merosot tajam dan masih tetap rendah selama depresi, terutama pada periode 1931–1935. Hal itu menimbulkan kesulitan ekonomi yang berat di seluruh daerah jajahan. Hal itu juga menjadi penyebab bangkrutnya banyak perusahaan perkebunan, baik di Jawa maupun di Sumatera Timur. Situasi yang makin membaik terjadi pada 1936–1937, meskipun hanya membawa sedikit perbaikan pada kurun waktu menjelang Perang Dunia II, dan justru menciptakan situasi yang jauh lebih parah bagi perekonomian di sektor perkebunan secara keseluruhan di Hindia Belanda.

Situasi yang makin membaik terjadi pada 1936–1937, meskipun hanya membawa sedikit perbaikan pada kurun waktu menjelang Perang Dunia II ...

3.6 Perhatian Utama Volksraad Terkait Polemik Pengelolaan Perekonomian Hindia Belanda

Dalam menyelesaikan beberapa polemik yang terjadi setelah krisis tahun 1930-an, para anggota Volksraad di Fraksi Nasional mulai menaruh perhatian utama untuk memperbaiki perekonomian di Hindia Belanda secara bertahap untuk kepentingan rakyat. Perkembangan yang bermula dari muncul di PBI (Persatuan Bangsa Indonesia) PBI menjadi tekad Parindra untuk memusatkan perhatian juga pada kejadian di luar Indonesia guna mendapatkan inspirasi. Hal ini menyebabkan golongan kooperatif, juga terutama Parindra, dipandang oleh pers yang lain sebagai organisasi yang memiliki sentimen sangat pro kepada Jepang. Mulai dari perjalanan Sutomo ke Jepang dan publikasi yang menunjukan antusiasme terhadap negeri matahari terbit itu, lalu kemudian diikuti perjalanan yang sama oleh Sukarjo dan penetapan ahli bahasa Rade Sujono.[423] Haluan kooperatif dilakukan oleh bermacam kelompok nasionalis pada tahun 1930-an dan permulaan 1940-an, namun tidak dapat dipandang secara sederhana dengan mengatakan bahwa faktor yang menentukannya hanyalah keputusan apakah mereka menginginkan kursi di dewan perwakilan yang didirikan Belanda.

Dalam merumuskan suatu konsep tentang haluan kooperatif selama periode 1930 dan 1940-an, harus diperhatikan bahwa mereka digerakan pada pikiran menarik yang biasa digunakan sebelumnya

423 *Handelingen Volksraad* 1934-1935, hlm. 170 175

dari masyarakat pribumi yang masih bergabung dalam gambaran masyarakat lama yang berprinsip gotong royong, harmonis, dan tolong menolong. Hal itu dipandang lebih lanjut sebagai sesuatu yang tidak lazim dengan cara-cara dasar barat yang dominan dan konfrontatif dengan pengertian individualisme kasar, dengan prinsip yang bertahan hidup adalah yang paling kuat.[424]

Pemikiran lebih moderat menyatakan bahwa suatu otonomi di Hindia Belanda akan meningkatkan *Rijkseednheid* dengan menerima Indonesia dalam suatu ikatan yang longgar bersama Belanda. Fraksi Nasional kemudian menentang dan belum memastikan sikap. Paham etis kemudian dianggap sebagai dogma. Sejarah kolonial penuh dengan dogma-dogma ini, antara lain sistem tanam paksa, diikuti dengan buruh bebas, kemudian lagi dengan sistem sanksi hukuman (*poenale sanctie*). Semua sistem ini diadakan untuk kepentingan masyarakat, seperti juga ekspedisi hongi di masa lampau dan penyerahan tenaga kerja kepada perusahaan swasta, serta komunitas tanpa bayaran apapun. Kreasi terbaru dari persemaian dogma ini muncul dari Dr. Colijn mengenai *Rijkseenheid*, yaitu suatu kesatuan imperium, slogan yang siap diterapkan oleh VC. Hal ini kemudian menjadi tidak biasa, bahwa kepentingan antara para majikan dengan VC begitu bersatu. Akan tetapi, mengapa membuat gembar gembor *Rijkseenheid* ketika elemen-elemen untuk itu begitu kurangnya. Semua pernyataan yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat dari kedua negeri ditolak oleh rakyat. Ras, budaya, bahasa, idealisme, dan ekonomi mereka, keseluruhannya adalah sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di luar itu semua, dogma *Rijkseenheid* menjadi nyaring didengungkan sampai ke puncaknya dan mempermainkan banyak orang. Untuk sementara, banyak kerugian dilindungi oleh *Rijkseenheid*. Pembatasan kuota dipaksakan terhadap penduduk yang telah dimiskinkan dengan daya tarik *Rijkseenheid*. VC menyebarluaskan persiapan pertahanan intensif juga dengan ajakan *Rijkseenheid*.

Pemikiran lebih moderat menyatakan bahwa suatu otonomi di Hindia Belanda akan meningkatkan Rijkseednheid dengan menerima Indonesia dalam suatu ikatan yang longgar bersama Belanda.

Maka dari itu kepentingan mana yang perlu dipertahankan dan dilindungi oleh masyarakat pribumi, karena Secara de facto, hal itu tergantung pada orang Hindia Belanda untuk membayar harga sebagai konsekuensi kepercayaan terhadap *Rijkseenheid*. Jadi, petunjuk yang ruwet dan bertentangan tidak akan menolong, sebab hanya membuang-buang waktu jika berbicara terlalu banyak tentang itu. Pernyataan Belanda bahwa mereka memberikan pengorbanan ekonomi

424 *Handelingen Volksraad* 1934-1935, hlm. 125

yang sama beratnya dengan Hindia Belanda pun cuma omong kosong belaka, sepanjang orang menolak melakukan pemeriksaan profesional tentang itu. Statistik semacam itu akan menyelesaikan selisih pendapat yang ada. Statistik kini ditolak dengan ajakan *Rijkseenheid.* Slogan *Rijkseenheid* hanyalah sebuah dogma yang dibuat untuk meramaikan Hindia Belanda, sama seperti dogma-dogma sebelumnya yang disajikan dalam bentuk kebijakan.[425]

Pernyataan Belanda bahwa mereka memberikan pengorbanan ekonomi yang sama beratnya dengan Hindia Belanda pun cuma omong kosong belaka,

Isu tentang kepemilikan tanah oleh golongan Indo-Eropa dikedepankan kembali pada 14 Juli 1936 dengan adanya edaran *Rapport van de Commissie coor het grondbezeit van Indo European.* Secara umum, terbukti bahwa sepetak tanah untuk hidup, berkebun, dan beternak bagi orang Indo yang miskin perlu dialokasikan. Hal ini bisa dilakukan tanpa meninggalkan kerusakan yang tidak perlu, serta menggerogoti hak tanah yang telah diatur bagi penduduk pribumi. Dari rekomendasi ini, hak tanah hanya diberikan kepada orang Indo-Eropa yang status sosial dan ekonominya sama dengan saudara pribumi mereka.[426] Isu tersebut dimuat dalam dua kubu pers, dan juga disinggung dalam debat anggaran pada tahun 1937, di Volksraad periode sidang Juli/Agustus 1936. Akan tetapi, kaum Indo tetap akan sangat terdorong untuk dapat diterima oleh lapisan pihak kolonial. Pada 13 Juli 1935, Fraksi Nasional mendesak IEV untuk berhenti menjadi alat pemerintah dalam melakukan politik *devide et impera.* Tuntutannya ialah, pimpinan IEV harus mempertimbangkan identifikasi sepenuhnya dengan bangsa Indonesia agar dapat meletakan dasar bersama untuk persatuan nasional. Visi ini bukan sekedar utopia karena negara seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Swiss secara nasional menjadi bersatu dan bukan didasarkan pada pembedaan rasial masyarakat mereka, tetapi karena keinginan untuk segera mengakhiri cara yang ditempuhnya selama ini.[427]

Di pihak lain, Fraksi Nasional dan IEV sering bersama ketika keduanya beroposisi terhadap pemerintah, misalnya tentang konsesi lama dan baru untuk tambang timah, minyak, dan bijih besi. Perusahaan-perusaan tambang itu dipandang merugikan kepentingan Hindia Belanda yang menyebabkan negeri kita selalu dalam keadaan harus dipulihkan.[428] Pada 30 Juli 1936, pemimpin IEV, De Hoog, berusaha memperpanjang diskusi tentang penemuan Komisi Spit.

425 *Handelingen Volksraad* 1936-1937, hlm. 146-147 dan 151
426 *Pemandangan*, 24 Mei 1937
427 *Handelingan Volksraad* 1935-1936, hlm. 181-182
428 *Handelingen Volksraad* 1938-1939, hlm. 1382

13 Juli 1936 merupakan bencana dan merupakan periode yang tidak menggembirakan bagi Indonesia, sedang De Hoog menyatakan kepada De Jonge dengan jelas sangat sedikit pengertiannya mengenai posisi kaum pribumi.[429]

Oleh karena itu, fraksi pribumi, seperti halnya Thamrin sehari sebelumnya, menjelaskan posisinya terhadap pemerintah dengan menilainya sebagai kerja sama yang sah dengan grup lain, sepanjang ikatan dengan Belanda tetap kuat. Dalam hubungan itu, ia merujuk pada pandangan Suroso tentang *Indonesia Merdika*. Ia menyatakan bahwa pandangan semacam itu dengan sendirinya membuat dirinya menentang, karena ia menginginkan diperintah Belanda sebagai jalan untuk mencapai jalinan antara Belanda dengan Hindia.[430]

Pandangan De Hoog, meskipun bersedia bersama dengan grup lain, terutama Fraksi Nasional, belakangan juga selaras dengan kelompok Sutarjo. Dalam mengritik pemerintah, De Hoog masih bertumpu pada pandangan bahwa IEV tidak memihak kepada pihak manapun, sehingga dapat membentuk koalisi politik dengan kedua kelompok yang ada. R.G.A.Z. Peekma dalam jawabannya menuduh De Hoog sebagai pengkhianat tingkat tinggi, serta terdapat petunjuk bahwa perilaku para pemimpin IEV mengarah kepada semacam ancaman politik. Selanjutnya, ia menilai Thamrin telah melakukan taktik debat yang bermuka dua, sehingga membuat sia-sia perannya dengan menjerumuskan dirinya sendiri dan menjadi bayang-bayang Peekma.[431]

Di dalam negeri, bidang perekonomian mulai menunjukan tanda-tanda pemulihan. Hal itu menyebabkan Volksraad, yang perhatian utamanya berada pada masalah ekonomi, kembali pada perbincangan sosial dan politik. Namun, pada kenyataannya, kemiskinan dan penderitaan tak terkirakan di antara penduduk pribumi. Lebih jauh lagi, segala macam prospek cerah bagi pribumi ke depannya telah dirampok, oleh karena harga produk mereka yang dihargai sangat rendah, sementara beban besar ditimpakan pada mereka. Menambahkan bahwa keuangan orang Hindia dikorbankan dan selanjutnya untuk suatu rekonstruksi yang tepat bantuan dari pemerintah Hindia Belanda diperlukan dan dilaksanakan juga dengan cara mengambil alih hutang Hindia. Hanya setelah kondisi kehidupan diperbaiki dengan langkah-langkah pemulihan tersebut, bangkitnya kembali masyarakat

Di dalam negeri, bidang perekonomian mulai menunjukan tanda-tanda pemulihan. Hal itu menyebabkan Volksraad, yang perhatian utamanya berada pada masalah ekonomi, kembali pada perbincangan sosial dan politik.

429 *Handelingen Volksraad* 1936-1937, hlm. 605
430 *Handelingen Volksraad* 1936-1937, hlm. 604
431 *Handelingen Volksraad* 1936-1937, hlm. 696

Hindia-Belanda bisa segera datang. Selanjutnya langkah-langkah yang perlu diambil adalah sebagai berikut:[432]

Di sektor keuangan:

a. Belanda mengambil alih bagian penting utang dan membayarnya dengan seluruh beban;
b. Untuk sementara memperpanjang sistem pajak ekspor bagi produk yang memberikan pendapatan seperti minyak, teh, kina, serat tembakau, Deli, dan minyak sawit;
c. Memperpanjang pemulihan rakyat yang menerima sewa tanah, menghapus pajak garam; dan
d. Meningkatkan peran negara dalam eksploitasi sumber mineral.

Selanjutnya, di sektor ekonomi:

a. Diadakannya upah minimum;
b. Subsidi terhadap pertanian dan industri rakyat.

Dalam persidangan kedua, observasi Fraksi Nasional dan usul drastis yang disarankannya menjadi bahasan dan kecaman keras pihak Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, terutama oleh Peekma. Apa yang disampaikan oleh Fraksi Nasional dianggap mengandung banyak hal yang dilebih-lebihkan, tidak punya dasar, dan tidak realistis jika ditinjau dari keadaan sulit yang dialami oleh Belanda dan tanah jajahannya. Catatan pemerintah dalam membuat kebijakan yang lebih ekonomis, serta berusaha melakukan pemulihan, juga tidak mendapatkan pengakuan secukupnya. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menantang Fraksi Nasional untuk memberikan bukti terkait apakah formula kewajiban moral dan etika benar-benar menjadi penolong dalam menyembunyikan muka buruk tatanan lama kolonial Belanda yang mendukung penghisapan terstruktur yang selama ini dilakukan.[433]

Dalam persidangan kedua, observasi Fraksi Nasional dan usul drastis yang disarankannya menjadi bahasan dan kecaman keras pihak Pemerintah Kolonial Hindia Belanda ...

Juga diperlukan bukti klaim tentang tujuan *Rijkseenheid* yang dianggap hanya sekedar sebagai alat untuk memudahkan terjadinya eksploitasi rakyat pribumi. Apa yang dikemukakan oleh Fraksi Nasional tidak menunjukan hegemoni dari salah satu fraksi terbesar di dewan.[434] Fraksi Nasional secara ringkas mengemukakan empat pokok penting mengenai politik ekonomi pemerintah, yaitu:[435]

---

432 *Handelingen Volksraad* 1936-1937, hlm. 153-154
433 *Handelingen Volksraad* 1936-1937, hlm. 146
434 *Handelingen Volksraad* 1936-1937, hlm. 849-851
435 *Handelingen Volksraad* 1936-1937, hlm. 968

1) Kemiskinan penduduk merupakan bagian paling memprihatinkan selama krisis;
2) Kepentingan penduduk yang luas diletakkan di bawah kepentingan kapitalisme kolonial;
3) Ketiadaan atau kurangnya program kesejahteraan yang disediakan pemerintah untuk mengatasi pemiskinan rakyat;
4) Oleh karena itu, bagian politik ekonomi ini telah gagal dan harus ditinjau ulang.

Lebih lanjut, Pemerintah Kolonial dengan acak menggunakan pasal-pasal hukum pidana, dan dengan cepat menghubungkan kata-kata seperti *Indonesia Merdeka* dengan pengertian bahwa suatu hari orang Eropa akan di dorong kelaut, bom-bom akan dilemparkan, orang-orang Eropa akan tewas terbunuh, dan banyak omong kosong lainnya. Perwakilan Fraksi Nasional di Volksraad dan Gedelegeerden berusaha menghidupkan dewan itu dari keadaan kemandegan politis selama bertahun-tahun sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berat. Mereka berharap bahwa proses taktik mereka sendiri terhadap masalah-masalah yang kini muncul di Asia akan mendorong pemerintah untuk melibatkan pihaknya agar mampu bertindak dengan lebih konstruktif. Fraksi Nasional bertahan pada taktiknya dengan tetap menantang dan mengejar posisi moral pemerintah agar setidaknya dapat lebih terakomodasi. Tetapi, mereka yang berpaham asosiasi lain dan agak kurang bersifat revolusioner memilih pendekatan gradualis. Dengan cara ini, kelompok moderat konservatif dapat menunjukan rasa realisme yang lebih besar di muka dewan. Salah satu momentum kemunculan pertama kelompok moderat ini adalah dengan tampilnya Sutarjo Kartohardikusumo, Ketua *Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumiputra* (PPBB), sebagai penandatangan utama petisi. Ia merupakan sosok yang loyal, atau mungkin dapat dikatakan "jinak", dengan jabatannya sebagai seorang pangreh praja Jawa.[436]

Mereka berharap bahwa proses taktik mereka sendiri terhadap masalah-masalah yang kini muncul di Asia akan mendorong pemerintah untuk melibatkan pihaknya agar mampu bertindak dengan lebih konstruktif.

Petisi tersebut dinamai sesuai dengan namanya, yaitu "Petisi Sutarjo", yang kemudian ditandatangani oleh I.J. Kasimo, Ratu Langie, Lanjumin gelar Datu Tumenggung, Mr. Ko Kwat Tiong, dan Said Abdullah bin Salim Alatas. Semuanya penandatangan relatif berada di luar Fraksi Nasional di Volksraad. Lanjumin adalah sekretaris dari PPBB yang merupakan bangsawan asal Minangkabau, sementara Kasimo mewakili *Perkumpulan Politik Katholiek di Indonesia* (PPKI), Mr. Ko Kwat Tiong mewakili *Partai Tionghoa Indonesia* (PTI) yang

436 *Volksraad zittingsjaar* 1936-1937, *Onderwerp*, 26 *Stuk* 1. *Perhimpoenan* 1937, hlm. 16

agak radikal, Ratu Langie mewakili organisasi *Persatuan Minahasa*, suatu partai progresif yang mewakili golongan kristen Minahasa, dan Alatas mewakili *Persatuan Arab Indonesia* (PAI). Masing-masing di antara mereka berasal dari latar belakang yang sama dalam kehidupan golongan etnisnya masing-masing, yakni keluar dari tradisi untuk meraih hak-hak sosial yang baik, serta memperkaya intelektualitas diri. Dalam pengantar petisi tersebut, *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) dan *Memorie Antwoord* (Memori Jawaban) direncanakan untuk dilangsungkan suatu konferensi dengan delegasi yang mewakili Belanda dan Hindia Belanda yang dapat secara sejajar merundingkan pemerintahan yang mandiri untuk Hindia Belanda dalam kerangka Pasal 1 Konstitusi.[437]

Ketua dewan, yang ditunjuk oleh Raja Belanda, dengan demikian menjadi ketua dari Volksraad yang tidak mewakili kelompok ini atau itu, tetapi seluruh masyarakat Hindia Belanda di ruang persidangan dan seterusnya. Ketua Volksraad dengan senang hati dianggap sebagai orang yang berdiri dan berkedudukan, yang kadang-kadang mengucapkan kata-katanya atas nama seluruh kaum borjuis (terutama Eropa).[438]

Hal ini dinyatakan dalam kebiasaan bahwa setiap tahunnya, pada upacara yang mengesankan dari audiensi publik, pada kesempatan perayaan ulang tahun yang megah, ketua Volksraad atas nama masyarakat dan dihadapan semua perwakilan asing akan mengucapkan selamat kepada Gubernur Jenderal untuk menyampaikan keagungannya. Namun, upacara ini tidak terbatas pada hal itu saja. Pidato ini telah menjadi salah satu pidato terpenting dari kehidupan publik resmi, seperti halnya dengan pidato tanggapan dari Gubernur Jenderal.[439]

Memang, seseorang dapat memberikan gambaran yang lebih baik daripada Ketua Volksraad. Dengan cara yang sama, tidak ada partai atau kelompok di Volksraad yang dihitung berdasarkan para pengikutnya. Hal tersebut sejauh ini berlaku untuk setiap ketua. Ketua harus independen dari semua orang dan juga kelompok, tetapi pada saat yang sama, ketua juga harus mampu menjadi sumber informasi, orang yang dapat dipercaya, dan juga konselor. Sepanjang tahun itu, dia dimakamkan di kursinya, baik di dewan rakyat atau di perguruan

Ketua dewan, yang ditunjuk oleh Raja Belanda, dengan demikian menjadi ketua dari Volksraad yang tidak mewakili kelompok ini atau itu, tetapi seluruh masyarakat Hindia Belanda di ruang persidangan dan seterusnya.

437 *Volksraad Zittingsjaar* 1936-1937, *Onderwerp*, 26, *Stuk* 1, 3, 5. *Perhimpoenan* 1937, hlm. 18
438 *Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling, collectie* 329, W.H. *van Helsdingen, de maasbode, van zaterdag* 26 *Oktober* 1935 - *Avondblad - Tweede blad*, hlm. 3
439 *Ibid.*, hlm. 3-4

tinggi para delegasi. dia tidak berbicara, tetapi dia mendengar lebih banyak. Volksraad adalah satu-satunya tempat di mana wakil-wakil dari seluruh kepulauan yang termasuk ke dalam wilayah Hindia Belanda berkumpul, masing-masing dengan pandangannya dan keinginannya masing-masing. Meskipun ini juga berlaku untuk istana lain, tetapi tidak, sebab Hindia Belanda adalah keseluruhan yang jauh dan lebih heterogen dan koheren daripada pemerintah lainnya. Ketua Volksraad mendengarkan semua orang, mulai dari penduduk asli dari segala jenis, seperti mereka yang berasal dari suku Jawa, Sunda, Bali, Minangkabau, Batak, Aceh, Makassar, Minahasa, maupun dari warga keturunan Cina dan Arab. Termasuk juga mengabdi pada pengusaha resmi dan swasta, guru, bupati, orang-orang dari golongan priayi yang tinggi dan sederhana, juga untuk semua campuran ras, pangkat dan status, dan agama, pandangan dunia, serta peradaban dan budaya yang sama sekali tidak homogen. Ketua Volksraad mengetahui bahwa mereka semua memiliki tujuan yang berbeda dengan semua orang, menyarankan berbagai hal, sehingga ia mengerti apa yang terselubung atau terasa canggung, sangat berani atau hanya setengah-setengah.[440]

Ketua Volksraad mengetahui semua dokumen, mengawasi seluruh undang-undang, sebab ia adalah saksi atas semua tindakan dan reaksi.

Ketua Volksraad mengetahui semua dokumen, mengawasi seluruh undang-undang, sebab ia adalah saksi atas semua tindakan dan reaksi. Ia memberi saran dan memberi tahu, ia mendorong dan memberi nasihat, oleh karena otoritas yang dimilikinya. Ia adalah penasehat penting bagi pemerintah dan memiliki pangkat dan gaji yang setara dengan direktur manajemen umum. Sebelumnya, gaji direktur semacam itu adalah *f* 24,000, sementara presiden dewan adalah sebesar *f* 25,000. Ketua Volksraad lebih tinggi dari keduanya, bahkan pada terakhir kali masih ada suara yang menuntut Ketua Volksraad dalam pangkat, otoritas, dan gaji akan sama dengan anggota Dewan Hindia.[441]

Kami berharap bahwa refleksi ini dapat secara jelas menunjukkan posisi khusus dan unik dari seorang ketua dewan rakyat, yang merasa dan diterima (lebih dari Dewan Rakyat) sebagai suara kaum menak, serta sebagai suara hati nurani publik. Dengan demikian, ketua dewan rakyat sekali lagi mengucapkan kata-kata tertulis pada penutupan rapat dewan terakhir. lebih lanjut tentang itu nanti.[442]

Penyelesaian permasalahan ekonomi Hindia Belanda diperbaiki sedikit demi sedikit secara bertahap, dan melalui suatu cara pendekatan

440 *Ibid.*, hlm. 4-5
441 *Ibid.*, hlm. 5
442 *Ibid.*, hlm. 6

yang komunikatif dengan masyarakat dari berbagai daerah di Hindia Belanda guna menyerap seluruh aspirasi rakyat yang dibahas dalam sidang-sidang Volksraad di kemudian hari.

3.7 Lika Liku Petisi Soetarjo

Pada 15 Juli 1936, Soetarjo Kartohadikusumo mengajukan petisi. Garis besar isinya adalah usulan agar Indonesia dalam waktu sepuluh tahun dapat berdiri sendiri atau mencapai kemerdekaannya, meskipun masih dalam batas-batas seperti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 *Grondwet* (Undang-Undang Dasar). Dalam Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda Pasal 1 tersebut, disebutkan bahwa Kerajaan Belanda meliputi wilayah *Nederland* (Belanda), Hindia-Belanda, Suriname, dan Curacao. Petisi tersebut didukung oleh Kasimo dan Ratulangi.

Butir lainnya dari petisi itu ialah desakan agar diselenggarakan suatu konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil, baik dari negeri

Belanda maupun Hindia Belanda, dengan kedudukan yang sejajar. Tujuannya adalah untuk merancang bersama rencana sepuluh tahun ke depan, guna menyiapkan Hindia Belanda memiliki otonomi, walaupun tetap berada dalam jalinan kesatuan dengan Kerajaan Belanda. Oleh karena itu, petisi ini memandang perlu terbentuknya sebuah dewan kerajaan yang terdiri dari wakil-wakil Belanda maupun Indonesia untuk mendiskusikan hubungan keduanya dalam kerangka konstitusi yang ada, serta mempertimbangkan kemungkinan kedudukan Indonesia untuk menjadi pihak yang sejajar dengan Belanda.[443]

Belanda maupun Hindia Belanda, dengan kedudukan yang sejajar. Tujuannya adalah untuk merancang bersama rencana sepuluh tahun ke depan, guna menyiapkan Hindia Belanda memiliki otonomi, ...

Sebenarnya, Petisi Sutarjo memiliki landasan yuridisnya sendiri karena jika kita melihat Pasal 1 dari Undang-Undang Kerajaan Belanda, disebutkan bahwa Kerajaan Belanda meliputi wilayah Belanda (*Nederland*), Hindia Belanda (Indonesia), Suriname, dan Curacao. Menurut Sutarjo, keempat wilayah ini sudah sepantasnya memiliki kedudukan yang sama, sehingga Sutarjo sangat yakin untuk mengajukan petisi yang dinilainya wajar itu dalam rangka pemberian otonomi bagi Indonesia, guna membentuk pemerintahan yang dapat berdiri secara mandiri. Dengan demikian, warga pribumi juga akan diperlakukan setara dengan warga Belanda.

Petisi tersebut jelas memancing perdebatan yang alot di Volksraad. Pembahasan isu panas tersebut berlangsung selama seminggu, hingga pada akhirnya dilakukan pemungutan suara pada

443 Lihat Deliar Noer, 1980, *Gerakan Modern Islam di Indonesia* 1900-1942 (Jakarta: LP3ES)

29 September 1936 yang hasilnya antara lain sebagai berikut: 26 suara setuju dan 20 suara menolak. Kelompok yang setuju di antaranya ialah Sutarjo Kartohadikusumo, Alatas, I.J. Kasimo, Kusumo Utoyo, Kwet Cong, Sam Ratulangi, Dt. Tumenggung, M.H. Thamrin, Soangkupon, Van Ardenne, Otto Iskandardinata, Yahya, Gandasubrata, De Hoog, Daeng Mapuji, Abd. Rassid, Wermuth, Leunissan, dan Bustan. Sedangkan kelompok yang menolak antara lain Bekhout, Jansen, Van Loukhuyzen, Notosutarso, C.C. van Helsdingen, van Balen, Sandkuyl, van Kesteren, Hedebrand, Kruyne, Sastrohadikusumo, Weyer, Verboom, Suroso, Wiwoho, Kersten, Sukarjo Wiropranoto, Moh. Nur, Nyonya Razoux Schultz, Surono, dan Ketua Volksraad M.V. van Helsdingen.[444] Wiwoho, selaku ketua (Jong Islaminten Bond) JIB dan anggota Fraksi Nasional di Dewan Rakyat juga menolak.[445]

Kelompok yang menolak Petisi Sutarjo mengatakan bahwa rakyat Indonesia belum matang untuk berdiri sendiri, sedangkan pendukung Petisi Sutarjo beralasan sebaliknya, yakni rakyat Indonesia telah cukup matang untuk berdiri sendiri. Mereka juga mendesak pemerintah untuk memberikan lebih banyak lagi hak-hak yang seharusnya dimiliki rakyat.

Namun yang jelas, Petisi Sutarjo ditolak oleh Parlemen Belanda dengan alasan bahwa saat ini belumlah waktunya bagi Belanda dan Hindia Belanda untuk duduk sederajat dalam satu meja. Penolakan tersebut dituangkan dalam Keputusan Kerajaan pada 16 November 1938. Sikap kerajaan itu terkait erat dengan kondisi perpolitikan di Belanda yang dikendalikan oleh Perdana Menteri Hendrik Colijn yang terkenal sangat konservatif. Demikian halnya dengan Menteri Jajahan yang bernama Charles Joseph Welter yang kaku dalam membuat kebijakan yang terkait dengan Hindia Belanda. Kedua tokoh tersebut berpendapat bahwa perubahan fundamental terhadap status Hindia Belanda merupakan suatu gagasan yang amat prematur, mengingat perkembangan sosial sebagian besar penduduk Hindia Belanda yang masih terbelakang.

Sikap menolak terhadap petisi ini sangat jelas diperlihatkan oleh Ratu Belanda secara resmi pada November 1938. Alasan penolakannya disebutkan bahwa bangsa Indonesia belum mampu memikul tanggung jawab dalam menyelengarakan pemerintahan sendiri. Lain halnya dengan tokoh pergerakan yang menjadi anggota Volksraad. Sebut saja, Soangkupon yang terus mendesak agar Volksraad dapat dijadikan sebagai alat untuk menjaga kepentingan anak negeri. Masalah lainnya

> Belanda maupun Hindia Belanda, dengan kedudukan yang sejajar. Tujuannya adalah untuk merancang bersama rencana sepuluh tahun ke depan, guna menyiapkan Hindia Belanda memiliki otonomi, walaupun tetap berada dalam jalinan kesatuan dengan Kerajaan Belanda

444 LRKN, 1986 : 119.
445 Deliar Noer, *Op Cit.*, hlm. 232

adalah saat itu Cipto Mangunkusumo tidak dapat menghadiri sidang Volksraad karena ditahan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. M.H. Thamrin memperjuangkan agar Cipto tetap dapat hadir dalam sidang Volksraad, yang dengan demikian dapat menyatakan sikapnya terhadap Petisi Sutarjo.[446]

Sikap Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang mengabaikan suara rakyat, termasuk yang disampaikan melalui Volksraad, melahirkan kekecewaan demi kekecewaan dari kaum pergerakan. Sarekat Islam (SI), misalnya, sudah sejak awal tahun 1920-an memperlihatkan kekecewaannya pada *Kongres Sarekat Islam* V di bulan Maret 1921 yang diadakan di Yogyakarta. Suryopranoto, selaku Ketua Sarekat Islam, menganggap berbagai usulan organisasinya kepada pemerintah selalu diabaikan. Oleh karenanya, ia menyarankan pembentukan Dewan Sarekat Islam (*SI Raad*) dan menggiring SI untuk tidak lagi mempercayai Volksraad, sehingga berdampak pada pada tahun 1923 SI memutuskan keluar dari lembaga perwakilan tersebut, untuk kemudian di tahun 1924 mengambil sikap nonkooperasi terhadap pemerintah.[447]

Dalam mosi sesudahnya, Sujono, dkk. kembali mengajukan mosi untuk mendapatkan kursi parlemen di negeri Belanda dan *Staten General*, serta meminta pemerintah untuk mempelajari isu tersebut.[448] Mosi ini mencerminkan aspirasi untuk memastikan kemajuan kolaborasi antara Indonesia dengan Belanda, serta untuk menyelesaikan struktur parlemen yang tidak layak yang tercermin dari Volksraad, yang selama ini telah menjadi sumber iritasi dari kubu sana dan sini. Seperti halnya Petisi Sutarjo, lima tahun kemudian, Mosi Sujono menunjukan maksudnya untuk mendapatkan otonomi sebagai bagian seberang lautan Imperium Belanda di Eropa. Tetapi, mosi tersebut gagal sebelum masuk ke proses pemungutan suara karena mosi tersebut ditarik setelah ada tanda-tanda penarikan diri Sujono dari Volksraad. Dalam kata-kata Helsdingen, Sutarjo menjemput ancaman evolusi, di mana sesungguhnya Sujono telah menariknya lima tahun sebelumnya.[449]

Diskusi sesungguhnya mengenai petisi dilakukan di Volksraad dalam sidang yang dilangsungkan pada 18, 28, dan 29 September 1936. R.G.A.Z. Peekma tidak hadir dalam sidang-sidang itu, dan hal ini kemudian dikritik oleh Kan, Sutarjo, serta Thamrin karena menunjukan

Sikap Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang mengabaikan suara rakyat, termasuk yang disampaikan melalui Volksraad, melahirkan kekecewaan demi kekecewaan dari kaum pergerakan.

446 Atashendartini Habsjah, 2007, *Perjalanan Panjang Anak Bumi: Biografi R.M.A.A. Koesoemo Oetoyo* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia), hlm. 190
447 LKRN, 1986, hlm. 85
448 *Volksraad Zittingsjar* 1933-1934, *Onderwerp*, *Stuk* 9
449 *Helsdingen*, 1946, hlm. 132

Hermen Kartowisastro dari Semarang, seorang anggota Volksraad dari golongan pribumi
[Sumber: KITLV 116412]

kurang adanya perhatian dan keseriusan dari pemerintah. Akan tetapi, Ketua W.H. van Helsdingen menyatakan bahwa tidak hadirnya pejabat tersebut disebabkan oleh karena petisi tidak memerlukannya. Selama perdebatan, seperti biasa terjadi perang tarik tambang antara kekuatan progresif dengan konservatif. Kelompok konservatif seperti Verboom dari VC, Keertesns dari IKP, Van Helsdingen dan Notosutarso dari CSP mengecam usul petisi dan menganggapnya sebagai suatu gagasan yang prematur dan kurang berlandaskan politik, atau bahkan moral. Pada pokoknya, alasan mereka ini ialah bahwa Indonesia sama sekali tidak siap untuk menerima status otonomi dalam segala bentuknya.[450]

Pengikut dekat Colijn, Pemimpin CSP, C.C. van Helsdingen, meragukan apakah terdapat moral Kristen seperti kehormatan, integritas, dan loyalitas yang berlaku umum di Indonesia. Apakah hal-hal ini cukup mendasari pemikiran masyarakat Indonesia untuk mengatasi dan menghancurkan bentuk-bentuk nepotisme pribumi, serta adanya sifat buruk dan jahat yang dapat mempengaruhinya. Dengan sesal yang dalam, ia menyimpulkan bahwa komunitas pribumi Indonesia secara keseluruhan mendapatkan pertimbangan publik yang gagal bereaksi dengan kuat terhadap nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat Belanda yang masih dipengaruhi oleh moral Kristen.[451] Sadar akan rasa tidak puas terhadap hubungan yang ada antara Hindia Belanda dan Belanda, Rup dari PEB dan Kerstens dari IKP menyadarkan untuk menghidupkan, bukan suatu konferensi, tetapi suatu komisi negara tentang urusan konstitusional yang isunya pernah diangkat oleh Colijn pada tahun 1928.[452] Hermen Kartowisastro dari *Vereeninging van Ambtenaren bij de Inlandsche Bestursdienst* (VAIB) atau Persatuan Pegawai Negeri, mencoba menempuh jalan tengah. Dengan menyambut kemungkinan perubahan konstitusi yang menyangkut hubungan dua negeri, ia tidak menghendaki hubungan dengan kerajaan ataupun organisasi pemerintah yang ada ini rusak.[453]

De Hoog, pimpinan kelompok Eropa terbesar, dekat dengan pendapat ini. Ia berharap *Rijksraad* dapat menjadi obat mujarab untuk menjamin terciptanya otonomi Hindia Belanda dalam Imperium Belanda. Ia akan menyokong pengusulan ini karena usul tersebut merupakan langkah pertama bagi terciptanya suatu pemerintahan sendiri, meskipun bukan dalam kerangka kemerdekaan.[454] Semuanya

450 *Handelingen Volksraad* 1936-1937, hlm. 1506-1546
451 *Handelingen Volksraad* 1936-1937, hlm. 1672
452 *Handelingen Volksraad* 1936-1937, hlm. 1517-1525
453 *Handelingen Volksraad* 1936-1937, hlm. 1693
454 *Handelingen Volksraad* 1936-1937, hlm. 1544-1545

itu tidak dapat diterima oleh mereka yang tergabung dalam Fraksi Nasional, oleh karena terkesan terlalu samar-samar. Terlebih lagi, sebagai seorang nasionalis sejati, petisi itu tidak beranjak lebih jauh untuk mendekati kemerdekaan sebagai tujuan Fraksi Nasional. Gusti M. Noor, meski bukan lagi anggota Fraksi Nasional menyatakan:

> *"Tujuan hari depan saya tidak kurang maupun lebih dari Indonesia merdeka. Keberatan saya yang pertama terhadap usul petisi itu nampak sebagai meminta-minta untuk reformasi konstitusi. Terlebih lagi menyodorkan dengan untuk meminta persen, yang memalukan dan sama sekali tidak berguna.*[455]

Dalam permasalahan ini, lebih jauh ia menyatakan bahwa tidak ada di dunia ini konsesi konstitusional diberikan murni karena rasa adil dari pihak kaum yang memerintah. Diperlukan tekanan, baik sebagai faktor internal maupun eksternal, secara domestik dengan kekuatan moral internasional. Pandangan M. Noor ini memperoleh gemanya dalam sambutan Wiwoho, yang juga baru keluar dari fraksi, yang menyatakan apakah orang Hindia tidak diperbolehkan berkata tidak jika Holland berkata ya. Sukarjo dari Fraksi Nasional khawatir bahwa petisi ini dapat melemahkan, atau bahkan merusak ideologi pergerakan, oleh karena pandangan yang dekat dengan PNI Baru.[456]

Dalam permasalahan ini, lebih jauh ia menyatakan bahwa tidak ada di dunia ini konsesi konstitusional diberikan murni karena rasa adil dari pihak kaum yang memerintah.

Partai ini merasa bahwa petisi tersebut sarat dengan tindak pengkhianatan terhadap rakyat karena berpotensi membunuh kemauan berjuang rakyat.[457] Di pihak lain, Fraksi Nasional memperhitungkan pemungutan suara akan segera dilakukan, dengan IEV dan PEB yang nampaknya akan memberikan suara mendukung. Mungkin sekalinya mereka memperhitungkan sesudah itu, sentimen nasional yang kuat akan timbul kembali, meskipun tidak sekuat ketika kemarahan terhadap isu sekolah liar mencuat pada tahun 1932. Dengan demikian, mereka memutuskan untuk memasang "paku pendek" saja.

Ketua dewan dalam Volksraad telah mencapai perkembangan yang sepenuhnya, yang sepadan dengan upaya beberapa pertimbangan. Hal ini mendapat reaksi positif dari ketua Tweede. Namun, baik anggota dan ketua dari Tweede Kamer dipilih para anggota Tweede

455 *Handelingen Volksraad* 1936-1937, hlm. 1693
456 *Handelingen Volksraad* 1936-1937, hlm. 1676
457 Lihat *Darmo Kondo*, 6 Desember, 1937

Kamer berdasarkan rekomendasi dari majelis dan ketua majelis, di mana hubungan konstituen di pengadilan tinggi sangat menentukan. Hal ini sama sekali berbeda dengan yang terjadi di Dewan Rakyat. Namun, pemerintah juga telah membiarkan diri mereka untuk mengembangkan tradisi di sini, yakni bahwa Volksraad mengajukan kandidat untuk mengisi kekosongan jabatan presiden, tetapi tradisi ini tidak didasarkan pada hak hukum apa pun. Lebih dari itu, Volksraad dan Presiden Tweede Kamer saat ini telah mencapai kedudukannya dengan mengabaikan sepenuhnya kandidat yang diajukan oleh dewan.[458]

Sidang pembukaan Volksraad tahun 1936.
[Sumber: *Soerabaijasch handelsblad*, 18 Juni 1936]

Bagi Fraksi Nasional, yang sampai akhir memupuk harapan langkah-langkah yang pernah dilakukan fraksi tersebut, berhadapan dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Tjarda van Starkenborgh Stachouwer setidaknya akan mempermudahkan kompromi untuk melakukan konferensi. Perkembangan dari usulan ini berpuncak pada penolakan melalui Dekrit Kerajaan pada 16 November 1938, suatu hal yang begitu sulit untuk diterima. Kerajaan Belanda menolak Petisi Sutarjo berdasarkan beberapa pertimbangan dan dasar yang terutama dipusatkan pada isu otonomi dan implikasinya yang bukan pada permintaan untuk mengadakan pemerintahan mandiri, tetapi juga tidak memberikan status otonomi kepada Hindia Belanda dalam lingkungan Imperium Belanda. Indikasi kasus semacam itu ada tercantum pada Pasal 62–64 dari konstitusi, sehingga dengan demikian politik kolonial mengarah pada penyusunan undang-undang dan administrasi masalah-masalah internal, diberi kuasa sebanyak mungkin, dan berada di tangan badan-badan dan otoritas Hindia

458 *Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling, collectie 329, W.H. van Helsdingen, de maasbode, van zaterdag 26 Oktober 1935 - Avondblad - Tweede blad.*

WISSELING VAN DE LANDVOOGDIJ.

Upacara di Volksraad pada tahun 1936 dalam rangka menyambut Gubernur Jenderal yang baru, van Starkenborgh Stachouwer.

[Sumber: *Soerabaijasch handelsblad*, 18 September 1936]

Belanda. Namun, diatur bahwa setiap langkah otonomi lebih besar tidaklah tumbuh seperti buah-buahan yang masak secara alami. Oleh karena itu, mempercepat perkembangan di dalam atau di luar periode tertentu, atau juga mengikuti suatu rencana tertentu atau tidak, tidaklah bisa diterima karena hal itu tidak melayani kepentingan Hindia Belanda. Hanya otonomi yang tujuannya melayani kepentingan Hindia Belanda-lah yang akan dipertimbangkan secara lebih. Otonomi dengan tegas diarahkan dengan konsolidasi dasar-dasar sosial, dan di atas segalanya bertujuan untuk melayani kepentingan lokal dan regional yang dianggap dapat dilaksanakan.[459]

Pada Juli 1938, atas nama anggota Fraksi Nasional di dalam Volksraad, Thamrin menyatakan bahwa mulai saat itu dalam berbagai sidang fraksinya hanya akan berbahasa Melayu. Tiga hari setelah Thamrin mengeluarkan pernyataan tersebut, ia kembali menggunakan bahasa Belanda dalam sidang yang diikutinya. Pada tanggal 12 Juli 1938, Thamrin berpidato dengan judul *Kebijaksanaan Diwaktu Krisis* dalam sidang Volksraad menggunakan bahasa Melayu dengan merujuk kepada hak-hak yang telah diberikan oleh pemerintah pada tahun 1918.

> *"Toean Voorzitter! Pada pertama kali fractie kami memakai bahasa Melayu (Indonesia) maka soedah sepantasnja kami mengoemoemkan pertimbangannja berhoeboeng dengan sikap ini.*
>
> *Antara beberapa pertimbangan maka kami kemoekakan jang penting-penting sadja seperti maksoed menghargakan bahasa sendiri sehingga bahsa Indonesia djangan terdesak dalam pemakaian sehari-hari. Terdesaknja bahasa itoe ternjata dari sikap beberapa badan Pemerintah sendiri jang lambat laoen memakai bahasa Belanda sedemikian roepa sehingga boleh dibilang kebanjakan pengoemoeman dikeloearkan dalam bahasa Belanda, maoepoen pengoemoeman dari fihak Pemerintah Tinggi sendiri atau bagian-bagiannja. Djoega segala peratoeran jang termoeat dalam ordonnantie, maoepoen dalam verdorderning dari Provincie dan Gemeente telah oemoem ditetapkan dalam bahasa Belanda sadja."*[460]

459 *Helsdingen*, 1946, hlm. 133-136
460 A. Zainoel Ihsan dan Pitut Soeharto, 1981, *Aku Pemuda Kemarin di Hari Esok. Capita Selecta Pertama: Kumpulan Tulisan Asli, Lezing, Pidato Pergerakan Kebangsaan* 1913–1938 (Jakarta: Jayasakti), hlm. 255

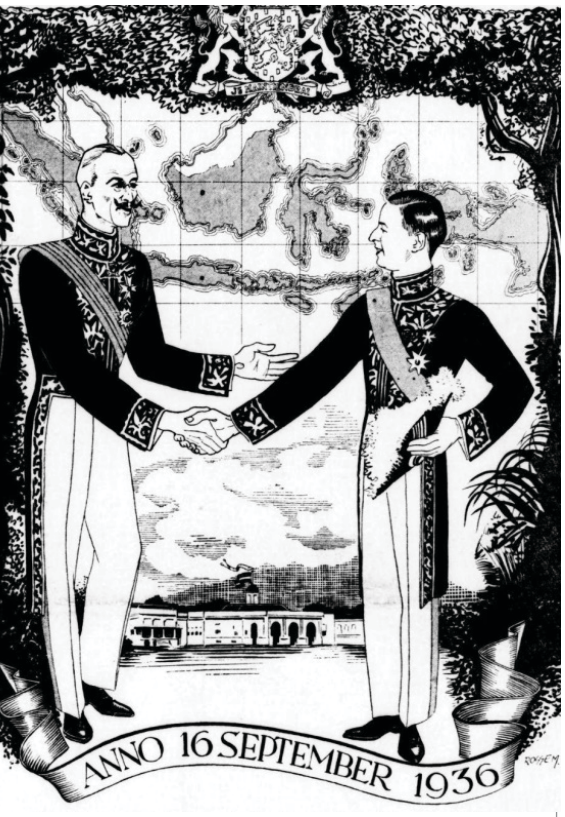

Ilustrasi yang menggambarkan serah terima jabatan Gubernur Jenderal dari de Jonge (kiri) kepada van Starkenborgh Stachouwer.
[Sumber: *Bataviaasch nieuwsblad*, 16 September 1936]

Pembukaan pidato Thamrin diawali dengan pengumuman penggunaan bahasa Melayu dengan isi pidato yang sebenarnya terkait dengan beberapa hal, antara lain persoalan politik, ekonomi, dan keuangan. Seperti yang diungkapkan Thamrin dalam kalimat penutup pidatonya:

> "*Akan kami menoetoep pemandangan oemoem tentang rentjangan oentoek 1939 ini, hendaknja kami memadjoekan kesimpoelan:*
>
> a. Tentang sikap politiek.
> Soepaja Pemerintah bersama-sama wakil Ra'jat mentjari djalan oentoek bekerdja bersama-sama jang sesoeai dan selaras dengan tjita-tjita dan angan-angan ra'jat.
> b. Tentang sikap economie.
> Soepaja mementingkan economie ra'jat dan mengingat bahwa ra'jat asli boekan sadja diperlindoengkan akan tetapi soepaja ditoendjang dan dimadjoekan;
> c. Tentang sikap keoeangan.
> *Mengentengkan beban ra'jat dan mendjaga djangan hasil dan kekajaan Indonesia mengalir keloear oentoek negeri dan bangsa Asing*."[461]

Pengumuman ini menimbulkan ketegangan, baik di dalam maupun di luar Volksraad. Namun, pemerintah memutuskan untuk mengambil sikap setuju dan tidak membiarkan dirinya diprovokasi. Dewan Hindia-Belanda, Ketua Volksraad W.H. van Helsdingen, dan juga Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jhr. A.W.L. Tjarda van Starkenborg Stachouwer memperlihatkan rasa khawatir pada propaganda politik yang akan timbul karena pemakaian bahasa Melayu oleh para anggota Volksraad yang mampu, dan bahkan sesungguhnya sangat mampu berbahasa Belanda. Demikian juga kekhawatiran terhadap pers Melayu yang dapat mempublikasikan semua pidato yang disampaikan tanpa dapat disensor sebelumnya dari segala ungkapan yang tidak dikehendaki. Selanjutnya, keberatan terhadap alasan praktis, sebagai akibat diizinkannya bahasa Melayu, muncul dari sebagian orang Eropa

461 *Ibid.*, hlm. 272

yang tidak bersedia untuk mengikuti debat-debat dalam Volksraad hingga keteraturan dan tata tertib dapat ditegakkan di persidangan oleh ketua. Proses penerjemahan tentu berjalan lambat, sementara biaya penerjemahan tentu mahal.[462]

De twintigste opening van den Volksraad — Links Z. Exc. de gouverneur-generaal bij het uitspreken van zijn rede — Achter hem de Raad van Indië, links en rechts bevinden zich de regeeringsgemachtigden — Rechts de voorzitter, met den secretaris en den adj.-secretaris

Sidang pembukaan Volksraad tahun 1938.
[Sumber: *Bataviaasch nieuwsblad*, 15 Juni 1938]

Kasus penolakan terhadap Petisi Sutarjo merupakan pukulan hebat bagi kaum pergerakan pada umumnya, terutama bagi mereka yang beraliran moderat. Gagalnya perjuangan terhadap Petisi Sutarjo, yang didukung oleh kalangan pergerakan nasional, telah menjadi cambuk bagi kaum pergerakan nasional untuk menuntut dan menyusun kembali barisan dalam wadah organisasi persatuan, yakni Gabungan Politik Indonesia (GAPI), yang secara terbuka menuntut "Indonesia Berparlemen".[463]

Kegagalan Petisi Sutarjo merupakan sebuah titik balik dari sikap kooperatif rakyat terhadap Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang berlandaskan pada ketidakpercayaan yang sudah menumpuk, yang di kemudian hari memunculkan beberapa gagasan untuk membawa pergerakan ke arah yang lebih kuat demi mengupayakan hak otonomi secara utuh.

462 Lihat Kees Groeneboer, 1993, *Weg tot het Westen. Het Nederlands voor Indie* 1600-1950 (Leiden: KITLV)
463 Atashendartini Habsjah, *Op.Cit.*, hlm. 191

3.8 Keinginan Untuk Bernegara yang Berdiri di Atas Kaki Sendiri

Setelah kegagalan Petisi Sutarjo di Volksraad, isu untuk mendirikan negara yang otonom secara utuh mulai digembar-gemborkan lagi di kalangan masyarakat Hindia Belanda, baik melalui organisasi-organisasi pergerakan maupun partai-partai politik yang menjadi wadah untuk para anggota Volksraad di kala itu.

Pada 21 Mei 1939, dibentuklah Gabungan Politik Indonesia (GAPI) oleh M.H. Thamrin. GAPI merupakan gabungan dari Parindra, Gerindo, Persatuan Minahasa, Partai Islam Indonesia, Partai Katolik Indonesia, Pasundan, dan PSII. Pimpinan GAPI dipegang oleh M.H. Thamrin dari Parindra dan Amir Syarifuddin dari Gerindo, yang tujuan utamanya adalah menuntut "Indonesia berparlemen". Dalam hal ini, Sutarjo merujuk pada pembentukan GAPI pada bulan Mei 1939, yang menurutnya merupakan reaksi yang tepat karena Indonesia telah menjadi korban penolakan Kerajaan Belanda pada petisi yang diajukannya pada tahun 1936. Sebelum itu, pada Juli 1939, Sutarjo memperingatkan dewan bahwa Fraksi Nasional akan mengambil aksi pada saat petisi ditolak karena bagi Fraksi Nasional, tidak semestinya rakyat negeri jajahan yang telah bersikap damai dan berperilaku sebegitu moderatnya pada pihak kolonial justru dihambat upayanya dalam mencapai kemandirian.[464]

Exc. Gouverneur-Generaal Mr. Jhr. A. W. L. Tjarda van Starkenborgh opent de hoofdzitting van den Volksraad — Achter Z. E. de Vice-president en leden van den Raad van Indië, links en rechts de regeering gemachtigden

Sidang pembukaan Volksraad tahun 1939.
[Sumber: *Bataviaasch nieuwsblad*, 15 Juni 1939]

Maka, kegagalan yang ada justru menjadi puncak dari inisiatif fraksi sebagaimana terjadi pada periode 1930-an dan permulaan 1940-an. Tumbuh ikatan kuat di antara organisasi-oraganisasi politik di luar Volksraad, sementara di dalam dewan sendiri bermunculan

464 *Handelingen Volksraad* 1937-1938, hlm. 102

serentetan mosi dan petisi yang disampaikan oleh delegasi nasional selama dua tahun berikutnya, yang keseluruhannya menuntut otonomi konstitusional yang lebih besar. Di samping itu, bekerja sama dengan *Kahuripan* dan *Tumapel* dengan sistem semacam bank pedesaan dilaksanakan untuk kepentingan para petani. Pembayaran dilakukan berdasarkan hasil panen mereka, dengan harapan bahwa akan muncul harga yang pantas untuk sekitar dua puluh lumbung padi yang dikelola oleh *Rukun Tani Parindra* di daerah Lumajang, Sidoarjo, dan Surabaya.

Pada masa-masa itulah, kaum elite Indonesia menginginkan keterlibatan secara wajar dalam menghadapi perkembangan. Anggaran pertahanan Hindia Belanda berlipat dua pada tahun 1936 dan 1938, lalu naik lagi pada tahun 1939 dan 1940.[465] Fraksi Nasional terus menerus melakukan kritik keras, terutama yang sehubungan dengan partisipasi milisi orang Indonesia. Mayoritas anggota dewan menghendaki peningkatan anggaran itu, dan biasanya Fraksi Nasional yang akan menentang.[466] Fraksi Nasional memandang pertahanan Hindia itu merupakan urusan Belanda.[467]

Tanpa konsesi politik yang terikat dalam pembentukan milisi pribumi, mereka tidak akan bersedia mendukungnya, suatu keputusan yang mudah diambil setelah ditolaknya Petisi Sutarjo. Sebelum itu, Sukarjo Wiropranoto mempertanyakan kekuatan mobilisasi itu, juga jika seandainya diadakan akan berada di bawah bendera pihak mana, Belanda atau Indonesia yang merdeka.[468] Pernyataan dan pandangan dari Fraksi Nasional yang disampaikan di Kongres Parindra, khususnya dari segi keamanan, dipandang oleh sejumlah pejabat pemerintah sebagai sikap yang tidak loyal, tetapi juga dihubungkan dengan sikap pro terhadap Jepang yang di pupuk oleh pimpinan Parindra.

Dalam sidang dewan pada 11 Juli 1939 yang diketuai Jonkman, Thamrin memberikan pidatonya sebagai berikut:

> "*Pemerintah Indonesia semenjak dahoeloe kala sehingga sekarang ta' pernah memperhatikan kehendaknya atau memperhatikan perasaan anak negeri jang asli, malah atoeran-atoerannja memperboeatkan kegandjilan terhadap anak negeri dan mempertahankan kerendahan darajatnya terhadap lain bangsa di negeri ini.*"[469]

Pada masa-masa itulah, kaum elite Indonesia menginginkan keterlibatan secara wajar dalam menghadapi perkembangan.

465 *Handelingen Volksraad* 1937-1938, hlm. 1728-1730
466 *Handelingen Volksraad* 1936-1937, hlm. 1273
467 Lihat *Handelingen Volksraad* 1939-1940
468 *Handelingen Volksraad* 1936-1937, hlm. 908-910
469 Handelingen Volksraad 1939-1940, hlm. 51.

Pada saat itu, Thamrin juga berada dalam keadaan gelisah, dengan kenyataan bahwa baik kepemimpinan Volksraad Indonesia dan *Raad van Indië* diabaikan oleh pemerintah. Sebelum penugasan Jonkman sebagai Ketua Volksraad yang ke-7, ia mengusulkan agar dipilihnya seorang Indonesia dalam kelompok mingguan yang dipimpin oleh Ratu Langie, yaitu *Nationale Commentaren*. Berikut ini pencalonan ketua yang disarankan oleh badan pekerja atau *Gedelegeerden* secara berturut-turut:

1. Kusumo Utoyo
2. Wiranatakusuma
3. Jonkman

Pilihan Fraksi Nasional tertuju pada nomor 1 atau 2 dari daftar yang diajukan *Gedelegeerden*.[470] Sebelumnya, Ratu Langie menyarankan Thamrin sebagai pihak yang telah begitu lama berdinas di dewan, maka dialah yang perlu diberi kesempatan pertama sebagai calon ketua, baru kemudian Sutarjo dan Mulia.

isteravond heeft mr. J o n k m a n, voorzitter van den Volksraad een bezoekavondje georganiseerd in het ge-bouw van den Volksraad voor leden, den regeeringsgemachtigde voor Algemeene Zaken en den secretaris, met hunne dames, dit ter bevordering van het onderlinge contact

Ketua Volksraad, Jonkman bersama para anggota Volksraad dalam suatu pertemuan.
[Sumber: *Bataviaasch nieuwsblad*, 12 Januari 1940]

Usul dari Fraksi Nasional untuk membentuk suatu konsentrasi nasional jelas merupakan upaya yang menyegarkan kembali, bahkan memperluas lebih lanjut dari apa yang sudah ada sebelumnya, tetapi

470 Nationale Commentaren th. 1, no. 50, 24 Desember 1938, hlm. 944-947.

tidak aktif, yaitu *Badan Perantaraan Partij-Partij Politik Indonesia* (BAPEPPI). Setelah berbagai langkah krusial diambil oleh pengurus eksekutif PSII dan Parindra, badan itu diperluas dengan masuknya Gerindo dan Pasundan, lalu kemudian dibentuk kembali pada 4 Mei 1938. Hal itu dimaksudkan untuk kerja sama yang lebih kuat di antara semua partai politik yang ada di Indonesia, melalui Kongres Indonesia yang direncanakan akan berlangsung secara periodik dan mencakup penyusunan rencana aksi. Semua organisasi di Indonesia, bahkan organisasi golongan Indo dengan haluan kooperatif, diundang untuk bergabung. Namun ternyata, gabungan ini dalam keadaan lemah, oleh karena tidak ada partai anak negeri lain yang bergabung, sementara Gerindo menarik diri, kemudian Pasundan dan Parindra justru mengejar kepentingannya massing-masing. Hanya PSII dengan inisiatifnya saja yang tetap siap mempertimbangkan BAPEPPI dengan serius.

3.9 Tuntutan Kongres Rakyat Indonesia

Keinginan rakyat Hindia Belanda semakin menggebu setelah dibentuknya GAPI sebagai salah satu wadah pemersatu, dari sanalah mulai terpolarisasinya sebuah strategi dari para anggota Volksraad, yang termasuk dalam organisasi pergerakan dan partai-partai politik pada saat itu.

Keinginan rakyat Hindia Belanda semakin menggebu setelah dibentuknya GAPI sebagai salah satu wadah pemersatu, dari sanalah mulai terpolarisasinya sebuah strategi dari para anggota Volksraad,

Pada permulaan 1939, suhu panas mulai meningkat secara dramatis, yang dengan cepat disampaikan dalam rapat pengurus eksekutif Parindra di Sala. Para pengurus sekali lagi menugaskan dirinya untuk membicarakan isu konsentrasi nasional dengan para pergerakan yang lain. Bersama Ratulangie dari *Persatuan Minahasa* dan Mr. Samsuddin dari Parindra, maka dari itu terbentuklah *Comite Persiapan Nationale Concentratie*. Setelah itu, komite akan menyusun anggaran dasar dan program kerja yang kemudian diedarkan di antara pengurus eksekutif partai-partai politik, bersama dengan undangan rapat untuk mendiskusikannya.[471]

Sesudah itu, masalahnya berkembang agak cepat dengan masalah yang dapat diperhitungankan, di samping adanya beberapa keberatan dari PSII dan Gerindo. PSII akan bergabung dengan sayap-sayap yang membelot, yakni kelompok PSII Penjedar Salim tidak ada di dalamnya. Sedangkan dari Gerindo, terdapat rumor bahwa kelompok Yamin telah

471 *Soeara Oemoem*, 3 Mei 1939

mendirikan partai sendiri. Yamin pada akhirnya diskors dari Gerindo setelah terpilih sebagai anggota Volksraad dengan dukungan yang ia dapatkan dari sejumlah anggota kelompok Minangkabau, bukan Gerindo.[472] Dengan demikian, sempalan partai yang didirikan Yamin pada 21 Juli 1939, yaitu *Partai Persatuan Indonesia* dan *Penjedar* Salim, berada di luar konsentrasi. Tidak lama kemudian, Yamin berhasil menarik dua orang Sumatera, Soangkupon dan Dr. Abdul Rasyid, serta seorang kelahiran Borneo, yakni Mr. Tajuddin Noor untuk keluar dari Fraksi Nasional dan bergabung dalam fraksi yang dibentuk Yamin, yaitu *Golongan Nasionalis Indonesia* (GNI atau GONI).[473]

Ketika dua butir dari mosi yang diajukan oleh PPPI ditolak, maka Maruto Nitimiharjo, Suprapto, dan Chaerul Saleh protes dengan keluar dari sidang. Hal ini merupakan satu-satunya perselisihan yang timbul, sehingga kongres melangkah lebih lanjut dengan meluncurkan slogan *Indonesia Berparlemen Sekarang*, dengan diikuti mosi. Semua anggota *Kongres Rakyat Indonesia* yang duduk dalam dewan-dewan yang ada akan menarik diri jika tuntutan berparlemen ditolak lagi oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.[474] Pada akhir Desember 1939, dalam langkahnya yang jelas untuk menjaga jarak dari Fraksi Nasional dan GAPI, Yamin dari GNI mengirimkan petisi kepada *Tweede Kamer* di Belanda untuk mengumumkan kebijakan bagi kepentingan rakyat Indonesia dan Belanda tentang pemilihan parlemen secara demokratis di Indonesia, serta pembentukan pemerintah yang bertanggung jawab kepada parlemen tersebut. Di samping adanya percobaan yang jelas hendak memecah gerakan, hasil terpenting aksi GAPI ialah berhasilnya organisasi tersebut dalam menenangkan partai-partai yang saling berbeda untuk menerima satu tujuan. Belum pernah dalam sejarah gerakan politik pribumi memiliki kesatuan begitu besar seperti yang terjadi pada saat ini.[475] Kini, *Indonesia Berparlemen* menjadi semboyan yang diangkat dan dijadikan sebagai seruan nasional pergerakan. Kampanye terhadap semboyan ini meraih kesuksesan, dan begitu diperkenalkan kepada umum segera mendapatkan persetujuan dari kalangan masyarakat yang sadar politik.

Dalam hal lain, pembahasan mengenai sumber daya mineral di New Guinea (Papua Nugini) di bahas juga dalam sidang Volksraad. Pembahasan khususnya berfokus kepada pembahasan kandungan tambangnya. Bagaimanapun, agenda pembahasan terhadap RUU

Dalam hal lain, pembahasan mengenai sumber daya mineral di New Guinea (Papua Nugini) di bahas juga dalam sidang Volksraad.

472 *Tjaja Timoer*, 25 April 1939
473 *Handelingen Volksraad* 1939-1940, hlm. 50
474 *Matahari*, 29 Desember 1939
475 Pijper kepada Tjarda, 10 Januari 1940, hlm. 8

tentang eksplorasi emas di New Guinea (Papua Nugini) dalam sidang Volksraad jelas memakan waktu. Gerakan Thamrin sudah disebutkan di *Bataviaasch Nieuwsblaad*, yang berisi sejumlah seruan kepada menteri untuk mengubah desain yang telah ditangani dengan cepat. Beberapa poin telah ditolak, atau juga telah ditarik, oleh para pengusul, sementara yang lainnya telah diterima. Dengan cara ini, orang dapat membayangkan keinginan yang Volksraad hargai.

Para wakil di Fraksi Nasional, seperti Thamrin, Ratu Langi, dan Wiryopranoto juga telah mengusulkan untuk menetapkan bahwa mayoritas sahamnya harus selalu ada di Belanda, tetapi tentu saja ini tidak menjamin masa depan. Dalam rancangan itu, hanya dijamin bahwa manajemen dan pengelolaannya akan selalu harus berada di tangan Belanda. Jaminan itu lebih dari cukup untuk pengembangan hubungan yang sehat antara penduduk Hindia Belanda dan Pemerintah Kolonial.[476]

3.10 Gerakan Indonesia Berparlemen

Di luar Volksraad, gerakan nasional bersatu, walaupun di dalam Volksraad suara mereka terpecah. Perpecahan ini khususnya terjadi pada tubuh Fraksi Nasional sendiri. Setelah pembukaan Volksraad yang baru pada tahun 1939, Fraksi Nasional ditinjau kembali. Yamin, yang pada 1939 menjadi anggota Volksraad, menyusun rencana yang dalam beberapa hal lebih luas daripada rencana yang dirancang oleh Thamrin. Yamin mengusulkan agar Fraksi Nasional dapat menyusun suatu program yang akan diumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya adalah untuk menghentikan kecaman bahwa Fraksi Nasional itu tidak hanya bekerja untuk Jawa, tetapi juga untuk daerah-daerah di luar Jawa.

Di luar Volksraad, gerakan nasional bersatu, walaupun di dalam Volksraad suara mereka terpecah. Perpecahan ini khususnya terjadi pada tubuh Fraksi Nasional sendiri.

Usul Yamin tidak disetujui oleh Thamrin. Maka, pada tanggal 10 Juli 1939, atas gagasan Yamin di Volksraad didirikanlah Golongan Nasional Indonesia (GNI) di samping Fraksi Nasional. Badan tersebut tidak mewakili partai-partai di Volksraad, melainkan mewakili golongan-golongan rakyat. Dapat dikatakan bahwa GNI ini bersifat provinsialistis. Semua anggota GNI adalah utusan-utusan dari luar Jawa, seperti Yamin, Soangkupon, Abdul Rasyid, dan Tajuddin Noor. Anggota Fraksi Nasional dari luar Jawa yang tetap setia pada Fraksi Nasional adalah Mukhtar dan Lapian.

476 *Bataviaasch Nieuwsblaad*, 20 Februari 1936

Pers menyambut baik perihal pendirian GNI dan melihatnya sebagai upaya untuk meningkatkan perjuangan nasional. Namun, ada suara lain yang mengkhawatirkan upaya tersebut sebagai tindakan memecah-belah yang justru akan memperlemah perjuangan. Dilihat dari asas dan tujuannya, kedua kelompok tersebut tidak jauh berbeda karena sama-sama mengurus kepentingan-kepentingan di berbagai daerah luar Jawa, sehingga sebenarnya orang-orang Sumatra juga dapat tetap berada dalam Fraksi Nasional.

Akan tetapi, setelah beberapa rapat yang diadakan Parindra dan GAPI diusik oleh Polisi, maka Fraksi Nasional pun terpaksa membawanya ke dewan.[477] Mereka memutuskan untuk mengajukan interpelasi yang diterima tanpa keberatan pada 20 Februari 1940.[478] Fraksi Nasional mengajukan empat pertanyaan sekaligus:[479]

1. Apakah pemerintah mengetahui bahwa kegiatan penguasa polisi setempat, dalam menghadapi pertemuan umum yang mendapatkan izin, sebenarnya melanggar jaminan hak berserikat dan berkumpul?
2. Apakah pemerintah tidak setuju dengan penulis bahwa menerbitkan surat peringatan yang tidak tepat, menghentikan orang yang sedang berbicara, membubarkan pertemuan, semuanya sebenarnya tidak diperkenankan?
3. Adakah dasar untuk, menurut penulis, melakukan eskalasi lebih lanjut tindakan polisi terhadap gerakan rakyat?
4. Jika ya, apakah pemerintah siap menjelaskan motif eskalasi semacam itu?

Akan tetapi, setelah beberapa rapat yang diadakan Parindra dan GAPI diusik oleh Polisi, maka Fraksi Nasional pun terpaksa membawanya ke dewan.

Pada 15 Agustus 1939, Thamrin mengajukan mosi yang menuntut penggantian kata *Nederlandsch-Indië* dan *Inlander* dalam istilah perundang-undangan menjadi *Indonesia*, *Indonesiër*, dan *Indonesisch*. Pada tanggal 18 Januari 1940, Abikusno, Thamrin, dan Amir Syarifuddin menerbitkan pengumuman *Kongres Rakyat Indonesia* (KRI). Mereka mengajak semua putra-putri Indonesia untuk menjadi propagandis demi mewujudkan *Indonesia Berparlemen* dengan cara membentuk komite-komite, tempat studi, dan arak-arakan umum. Disebutkan juga bahwa mereka telah mengadakan hubungan dengan rakyat Belanda melalui badan-badan seperti Komisi Kolonial SDAP, NVV, berikut juga para utusan SDAP di Majelis Rendah dan Tinggi Belanda. Para anggota ini diharapkan dapat melaksanakan perundingan dengan

477 *Handelingen Volksraad* 1939-1940, hlm. 1846-1847
478 *Handelingen Volksraad* 1939-1940, hlm. 1654
479 *Volksraad Zittingsjaar* 1939-1940, *Onderwerp*, hlm. 140

GAPI mengenai masalah dewasa ini dalam bulan Februari 1940, ketika soal anggaran Indonesia dibahas. Trio pimpinan harian KRI memperingatkan rakyat untuk menunggu dengan sabar perkembangan ini dan percaya pada keadilan bagi Indonesia untuk berparlemen.[480]

Pada 23 Agustus 1939, Dr. H.J. Levelt yang merupakan wakil dari pemerintah memberikan jawaban atas mosi tersebut. Disebutkan bahwa pemerintah akan menghapus kata "*inlander*" dalam masyarakat, dan menganjurkan untuk mengganti penggunaan istilah "*Indonesier*" atau "*inheemse*" dengan "Bumiputra". Namun untuk mengganti istilah "*Nederlandsch-Indië*" dengan "Indonesia", pemerintah merasa berkeberatan karena hal tersebut memerlukan penggantian redaksional terhadap Undang-Undang Dasar ketatanegaraan Hindia Belanda. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan dengan izin *Staten Generaal* yang pada waktu itu tidak dapat dihubungi lagi. Pemecahan permasalahan tersebut ditangguhkan hingga perang usai.

Pada 23 Agustus 1939, Dr. H.J. Levelt yang merupakan wakil dari pemerintah memberikan jawaban atas mosi tersebut.

Mosi berikutnya adalah keseragaman pemakaian istilah "*Indisch burgerschap*" (Kewarganegaraan Hindia). Penyeragaman kewarganegaraan dalam mosi tersebut adalah usaha untuk menghapus segala perbedaan demi kesatuan penduduk, baik ke luar maupun ke dalam. Seperti mosi sebelumnya, mosi ini berhubungan dengan ketatanegaraan Hindia, sehingga pemecahan terhadap mosi tersebut ditangguhkan.

Pada bulan Agustus 1939, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menolak desakan organisasi perempuan Indonesia untuk menunjuk Datu Tumenggung dan Maria Ulfah Santoso menjadi anggota Volksraad, mewakili perempuan Bumiputra. Penolakan ini disusul dengan demonstrasi yang digelar oleh 45 organisasi perempuan yang menuntut keadilan agar tak hanya perempuan Belanda saja yang berhak menjadi anggota Volksraad.

Dalam pertemuan GAPI pada 23 Februari 1940, telah terbentuk 120 *Komite Indonesia Berparlemen*, sementara delegasi GAPI akan segera dikirim ke Belanda untuk menjelaskan lebih lanjut tentang tuntutan Indonesia Berparlemen, serta aksi-aksi yang dilakukan terhadap partai-partai dan rakyat Belanda. Tanggapan terhadap ajakan GAPI muncul dengan cepat. Parindra dan *Pasundan* bergabung ke dalam kongres ke-25 pada tanggal 23-24 Maret, sementara PII dalam kongres pertama pada 11-14 April, dan PAI dalam kongres tanggal 18-23 April. Kesertaan tersebut menunjukan kesatuan partai-partai politik

480 *Kebangoenan*, 22 Januari 1940, hlm. 2-3

Indonesia dalam mendukung ajakan GAPI untuk meningkatkan aksi *Indonesia Berparlemen*.[481]

Pada 23 Februari 1940, muncul mosi Wiwoho Purbohadijoyo mengenai hak perluasan berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 1. Pada dasarnya, mosi ini mengulang apa yang pernah dikemukakan dalam Petisi Sutarjo yang ditolak oleh pemerintah. Dalam isi mosi tersebut diungkapkan bahwa perubahan situasi menghendaki kerja sama yang erat, sementara situasi internasional memaksa peninjauan kembali ketatanegaraan Hindia. Diharapkan pemerintah dapat mengangkat Dewan Pemerintah dan memperluas wewenang Volksraad, sehingga para kepala departemen bertanggung jawab pada Volksraad.

Dalam penjelasan 11 Juli 1940, ditegaskan bahwa mosi tersebut dibicarakan seperti apa adanya tanpa mengalami perumusan baru untuk menghindari tuduhan penyalahgunaan keadaan, sehubungan dengan jatuhnya Belanda ke tangan kekuasaan Jerman. Dengan alasan bahwa Mosi Wiwoho berhubungan dengan perubahan ketatanegaraan Hindia, maka pembahasan mosi tersebut juga ditunda hingga perang usai.

Dalam penjelasan 11 Juli 1940, ditegaskan bahwa mosi tersebut dibicarakan seperti apa adanya tanpa mengalami perumusan baru untuk menghindari tuduhan penyalahgunaan keadaan, ...

Meskipun telah dianjurkan untuk menggunakan wewenang darurat, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda tetap bersikukuh untuk tidak membahas mosi-mosi tersebut. Sikap pemerintah menimbulkan ketidakpuasan para pengusulnya. Pada bulan Agustus 1940, GAPI mengeluarkan resolusi yang menuntut diadakannya perubahan sistem ketatanegaraan di Hindia Belanda. Mereka mengusulkan suatu Uni Indonesia-Belanda berdasarkan kedudukan setara bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini, Volksraad akan berubah menjadi badan legislatif yang bersifat bikameral atas dasar sistem pemilihan yang adil. Resolusi tersebut kemudian dikirimkan kepada Gubernur Jenderal, Volksraad, Ratu Wilhelmina, dan kabinet Belanda di London, Inggris.

Pada 14 September 1940, atas persetujuan Pemerintah Belanda, dibentuklah *Commisie tot bestudeering van Staatsrechtelijke hervormingen* (Panitia untuk penyelidikan perubahan-perubahan ketatanegaraan) di bawah pimpinan Dr. F.H. Visman. Panitia ini selanjutnya dikenal dengan nama Komisi Visman. Pembentukan komisi ini tidak mendapatkan sambutan dari anggota Volksraad, terutama dari GAPI yang secara terang-terangan menyatakan ketidaksetujuan mereka. Dalam sidang anggaran belanja bulan Oktober 1940, mosi Wiwoho kembali diungkapkan. Pemerintah memberikan jawaban

481 Lihat *Sipatahoenan*, 26 Maret 1940

yang tidak bijaksana. Para nasionalis dituduh bahwa tujuan mereka sesungguhnya adalah untuk mencapai Indonesia merdeka, dan terlepas dari kuasa kolonial Belanda.

Komisi Visman bermaksud untuk mengadakan pertemuan dengan GAPI. Mereka menyampaikan undangan pada 10 Desember 1940, dan GAPI menerima undangan tersebut dan langsung menugaskan kepada pimpinan sekretariat umum untuk menyusun ketatanegaraan Indonesia untuk disampaikan pada pertemuan itu. Pertemuan antara Komisi Visman dan GAPI akhirnya berlangsung pada 31 Januari 1941. Sekretaris Umum GAPI, Abikusno Cokrosuyoso, menyampaikan kepada Komisi Visman mengenai garis besar ketatanegaraan Indonesia. Pada 14 Februari 1941, GAPI menyerahkan rencana yang lebih terinci kepada Komisi Visman, yaitu sebuah rencana yang sesungguhnya hanya duplikat dari demokrasi Barat yang menempatkan Indonesia dan Belanda dalam satu wadah perserikatan.

Kepercayaan anggota pergerakan lainnya terhadap Volksraad juga semakin memudar. Volksraad pernah dijanjikan untuk akan diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang,

Kepercayaan anggota pergerakan lainnya terhadap Volksraad juga semakin memudar. Volksraad pernah dijanjikan untuk akan diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang, namun upaya tersebut tidak pernah berhasil hingga keberadaan lembaga ini dieliminasi pada tahun 1942. Demikian juga dengan rencana pemberian wewenang yang lebih luas pada Volksraad. Hal ini pernah dikemukakan oleh Gubernur Jenderal van Limburg Stirum, namun juga tidak pernah terwujud. Kekecewaan demi kekecewaan mengundang pendapat pedas dari H. Agus Salim yang dulu melihat Volksraad hanya sebagai "Komidi Omong Kosong". Bahkan, ada pihak yang anti dengan Volksraad dengan menyatakan bahwa dewan tersebut hanya sebatas panggung sandiwara saja. Dalam kenyataannya, Volksraad memiliki ketergantungan yang amat sangat pada pemerintah Hindia Belanda, karena hampir dua per tiga anggota Volksraad merupakan "orang" pemerintah, walaupun di antara mereka ada yang sering tidak berkesesuaian dengan garis atau rancangan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, termasuk juga ketika beberapa usulan mereka sering diabaikan.[482]

Dalam rangka memenuhi permintaan untuk saran tentang pencalonan Volksraad, diperlukan perjanjian yang dibuat setelah mempertimbangkan enam pedoman, sehingga sifat penunjukan dijadikan sebagai bentuk koreksi pada sistem sebelumnya. Dalam beberapa kasus, ada beberapa hal yang saling berkaitan antara satu

482 Atashendartini Habsjah, *Op.Cit.*, hlm. 190-191

dengan yang lainnya. Beberapa di antaranya adalah arti dari kebijakan yang begitu umum, sehingga yang lain dapat diabaikan. Enam pedoman tersebut di antaranya:

1. Di tempat yang paling awal, harus dipastikan bahwa jika bukan kelompok yang terorganisir, gerakan, ideologi, atau lintasan ekonomi yang diwakili oleh pemilihan di Volksraad, harus diekspresikan untuk memberikan Volksraad representasi paling benar dari masyarakat Hindia.[483] Penguatan suatu kelompok yang telah memperoleh satu atau lebih kursi selama pemilihan mungkin sangat berguna, tetapi SI menjadi kurang signifikan. Maka dari itu, direpresentasikan berbagai macam pendapat berbagai kelompok karena penggerak suatu kelompok dengan jumlah suara yang besar harus dipromosikan; dalam partai-partai besar, pemungutan suara berdasarkan disiplin diputuskan, di mana tanggung jawab pribadi ada di balik keputusan massa dan bukannya argumen sendiri yang ditarik dari argumen-argumen yang diajukan.[484]
2. Diharapkan bahwa sidang paripurna dan penunjukan bersama menghasilkan perolehan Majelis Pleno Volksraad, yang mana kerja sama yang bermanfaat dengan Pemerintah Kolonial dapat diharapkan. Mode ini tidak dimaksudkan untuk disesuaikan dengan ekosistem janji pemerintahan di Volksraad, tetapi juga di satu sisi dijadikan sebagai representasi dari kelompok yang kurang beruntung. Namun, begitu dibuat kuat atau didukung oleh kelompok-kelompok terkait, mereka akan dapat mempertahankan posisinya, kendati di sisi lain, sambil mempertahankan presentasi masyarakat yang hidup dalam masyarakat, garis pemisah tidak sesuai dengan garis pemisah. Dengan kata lain, perhatian harus diambil untuk memastikan bahwa sekelompok orang pribumi yang berpikiran hukum. Untuk penjelasan lebih rinci tentang tema ini, merujuk pada penjelasan pendahulunya, Dr. Meyer Ranneft, dengan eksposisi yang dikirimkan sebagian besar berkaitan dengan proporsi divisi kelompok di kanan, kiri, dan kiri moderat, tidak berbeda secara signifikan dari yang sekarang.
3. Diharapkan untuk mempromosikan komposisi yang tepat dari panel delegasi dengan menggunakan hak pengangkatan Volksraad, dengan pengertian bahwa pemerintah harus berusaha menerima pilihan berupa orang-orang tertentu,

Kepercayaan anggota pergerakan lainnya terhadap Volksraad juga semakin memudar.

483 *Volksraad Zittingsjaar 1938-1943 Onderwerp 4 Stuk 1*
484 *Ibid.*

tetapi harus dipastikan kemudian.[485] Untuk empat suara dari masing-masing kelompok, yang akan diwakilkan dalam Dewan Delegasi, dapat dicapai dengan kombinasi denominasi. Misalnya, dari seorang pemimpin serikat Katolik yang jika perlu akan memberikan suaranya untuk seorang Katolik atas nama panel delegasi.

Hal itu benar-benar diperbolehkan, ya, tentu saja, bahwa untuk kemungkinan penunjukan pihak-pihak terkait ditanya tentang sikap yang akan diharapkan dari dia dalam komposisi dewan delegasi, untuk mendapatkan kombinasi. Sumpah atau prolog untuk penerimaan keanggotaan (Pasal 59, paragraf 2 IS) sama sekali tidak ada di sini, seperti persyaratan untuk memilih tanpa biaya atau konsultasi dengan mereka, dengan siapa mereka telah ditunjuk (Pasal 59 ayat 1 IS), karena menyangkut komposisi panel delegasi dan bukan suara pada subyek yang harus ditangani.

4. Kesinambungan tertentu diinginkan, sebab pengalaman parlementer tidak diperoleh dalam beberapa tahun. Bahkan bagi orang yang memiliki perkembangan yang mencukupi, pertemuan pertama dengan anggaran di semua bagiannya dan dengan banyak rencana lain yang sifatnya berbeda dan membingungkan. Namun, setiap anggota harus memilih sebagai aturan. Kepabeanan parlementer yang tertulis dan tidak tertulis pun menjadi milik mereka sendiri dalam waktu singkat. Hasilnya adalah bahwa dengan beberapa pendatang baru dari penilaian mereka sendiri tidak ada banyak dalam waktu yang pertama; posisi mereka terhadap anggota parlemen yang berpengalaman karenanya melemah. Jumlah mutasi di setiap periode plebisit sangat besar, dan sebagaimana sudah cukup jelas.
5. Tentunya tidak diinginkan bahwa pejabat tertentu selalu ditunjuk untuk kelompok tertentu, atau masyarakat, seolah-olah sudah diatur, dan di dicadangkan untuk pejabat itu. Penunjukan oleh Gubernur Jenderal akan benar-benar membuat jalan untuk kerja sama oleh beberapa pemimpin serikat pekerja atau masyarakat yang bersangkutan.
6. Ketika menilai kecocokan pribadi, perhatian tidak hanya harus dibayarkan pada pengembangan, usia, dan disposisi, tetapi juga pada fakta bahwa nama tersebut lebih akrab. Nama Dewan Rakyat telah dirusak oleh fakta bahwa beberapa anggota, seperti Mr. Ratu Langie, Van Baalen, Coolhaas,

Diharapkan bahwa sidang paripurna dan penunjukan bersama menghasilkan perolehan Majelis Pleno Volksraad, yang mana kerja sama yang bermanfaat dengan Pemerintah Kolonial dapat diharapkan.

485 *Volksraad Zittingsjaar 1938-1943 Onderwerp 4 Stuk 2*

Danusugondo, dan kurang lebih juga Lonkhuyzen, telah didiskreditkan pada akhir periode.[486]

Kenyataannya, pada 10 Februari 1940, dinyatakan bahwa reformasi yang dikehendaki GAPI tidak dapat dilaksanakan sepanjang rakyat umum pribumi tidak mampu menyerap arti sebenarnya dari perkembangan politik itu. Selanjutnya, gagasan suatu Pemerintah Kolonial yang bertanggung jawab kepada parlemen tanah jajahan merupakan sesuatu yang dianggap tidak relevan, sepanjang negeri Belanda tetap melaksanakan tanggung jawabnya dalam kebijakan politik di Hindia Belanda. Dalam tanggapannya, J.E. Stokvis berhati-hati dalam menyusun kata-katanya, dan atas nama SDAP ia mengundang pemerintah untuk melakukan investigasi tentang arah dan ruang lingkup bagi diberikannya kekuasaan konstitusional yang lebih luas kepada Hindia Belanda.[487]

Kenyataannya, pada 10 Februari 1940, dinyatakan bahwa reformasi yang dikehendaki GAPI tidak dapat dilaksanakan sepanjang rakyat umum pribumi tidak mampu menyerap arti sebenarnya dari perkembangan politik itu.

Masalah yang dikemukakan Sutarjo begitu singkat dan jelas untuk menjadi bukti selama Pendudukan Jerman terhadap Belanda, sampai pada pecahnya Perang Pasifik. Penguasa kolonial Belanda tetap menganggap remeh aspirasi kaum nasionalis, meskipun terus menerus dipersoalkan, yang mereka sebut sebagai orang yang terus memegang kebiasaan lama. Pemerintah tetap mencatat semua permintaan reformasi konstitusional, walaupun perubahan sama sekali tidak dikehendaki karena itu akan berarti Pemerintah Kolonial berkewajiban untuk berbagi kekuasaan, atau juga memberikan keuntungan, kepada wilayah jajahan. Lagipula, tidak pernah menyenangkan untuk turun dari posisi yang tinggi.[488]

Seperti yang dilakukan oleh Sutarjo pada April 1940, Fraksi Nasional menyatakan bahwa Indonesia selama ini tidak diperintah secara demokrasi, tetapi murni totaliter di bawah kendali pihak kolonial. Pidato di Volksraad itu disampaikan dalam bahasa Indonesia, yang diwakili oleh Thamrin, sebagai berikut:

> "*Segala kekuasaan Indonesia dipoesatkan di tangan satoe orang, jaitoe gouverneur generaal. System totalitair ditjela orang Belanda, akan tetapi sebenarnja system itoe banyak dipakai sendiri. Democratie di Indonesia tjoema bajangan sadja.*"[489]

---

486 *Volksraad Zittingsjaar* 1938-1943 *Onderwerp* 4 *Stuk* 3-4
487 *Handelingen Volksraad* 1939-1940, hlm. 1162
488 *Handelingen Volksraad* 1940-1941, hlm. 783
489 *Handelingen Volksraad* 1940-1941, hlm. 784

Sementara itu, pada sidang Volksraad tanggal 8 dan 9 November 1940, Yamin dan Thamrin mengemukakan keraguan mereka terhadap legalitas konstitusional Pemerintah Kolonial yang berkedudukan di negeri asing. Mereka bertanya lebih pada kesalahan sejumlah pejabat pemerintah, apakah Pemerintah Belanda di pengasingan tidak bertentangan dengan Pasal 21 sub 2 Konstitusi Belanda.[490] Tetapi argumen para tokoh nasionalis itu dibuat tertinggal oleh R.G.A.Z. Levelt yang diperkuat oleh isi nota tertanggal 24 Mei 1940 yang disampaikan oleh Prof. W.F. Wertheim dan Jb. Zijlemaker Jnz. yang mengakui legalitasnya dengan rujukan situasi darurat yang ada, dan menolak pandangan Thamrin dan Yamin. Dalam hubungan ini, Levelt juga menolak pandangan Thamrin dan Sutarjo yang menyarankan agar Hindia Belanda secara de facto dapat diakui sebagai negara merdeka, sehingga dengan demikian diperlukan landasan hukum baru untuk mengakui derajat kemerdekaan itu. Levelt mengakui bahwa Hindia Belanda memang lebih bebas, tetapi kenyataan ini tidak mengubah apapun juga dalam struktur Kerajaan Belanda.[491]

Pemimpin pergerakan telah meninggalkan pandangan mereka ketika itu karena adanya perkembangan yang mendahului persidangan bulan November. Pada pembukaan sidang Volksraad, dengan saling menghadapi ajakan gubernur dan aspirasi golongan nasionalis bagi persetujuan kerja sama berdasar semangat Mei 1940 yang merujuk pada pidato inagurasi Tjarda pada 15 Juni 1940. Tjarda sekaligus menolak kemungkinan perubahan konstitusional. Hal semacam itu harus menunggu sampai kemenangan perang dan Belanda telah dibangun kembali. Dalam hal ini, kaum nasionalis tidak disebut sama sekali, apalagi GAPI. Hal ini kontras dengan bagian lain yang ketika Tjarda menyebut, baik penguasa setempat seperti para pangeran yang memerintah wilayahnya, ataupun kepala-kepala suku dan desa, telah memberikan jutaan sumbangan. Bagi Tjarda, yang paling menyentuh adalah suara suara-suara mereka yang begitu lemah lembut, yang dalam jumlah besar dapat didengar melewati pedesaan dan pesawahan negeri cantik ini.[492]

Pemimpin pergerakan telah meninggalkan pandangan mereka ketika itu karena adanya perkembangan yang mendahului persidangan bulan November.

490 *Handelingen Volksraad* 1940-1941, hlm. 753
491 *Handelingen Volksraad* 1940-1941, hlm. 1235
492 *Handelingen Volksraad* 1940-1941, hlm. 6

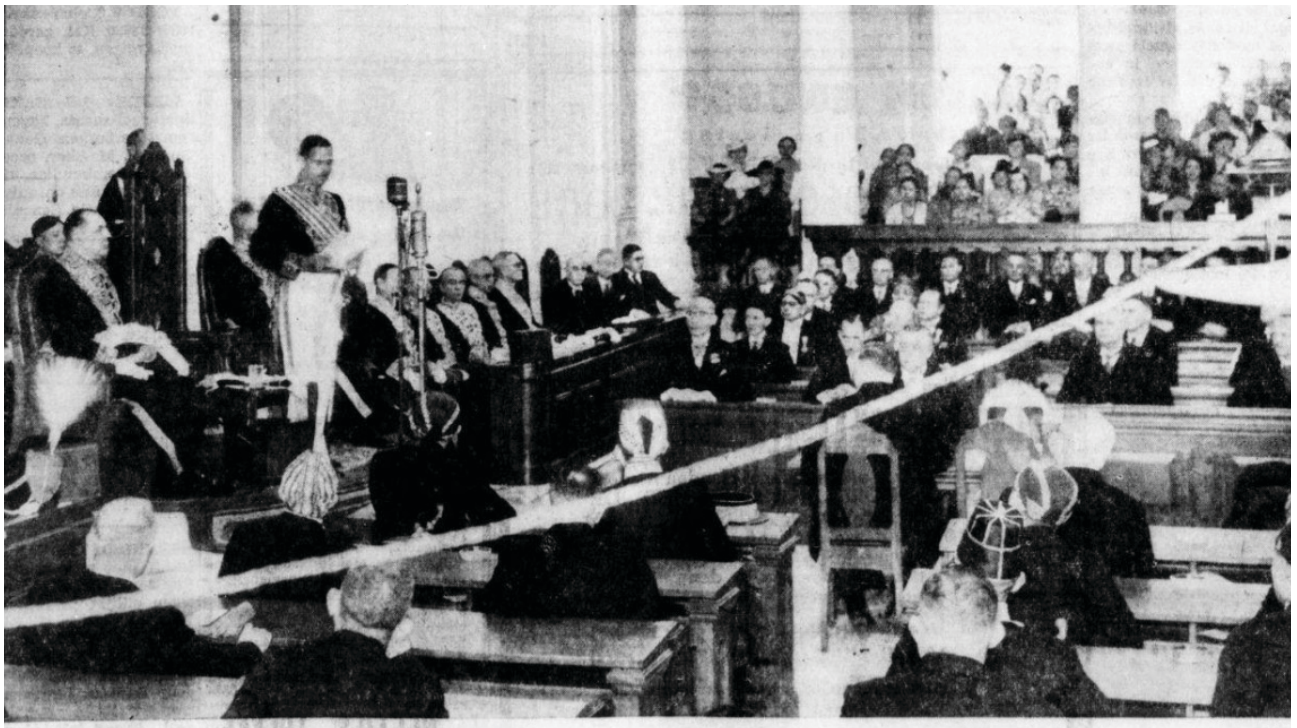
De opening van den Volksraad ; de Lan dvoogd dankt de Indische gemeenschap

Sidang pembukaan Volksraad tahun 1940.
[Sumber: *Bataviaasch nieuwsblad*, 15 Juni 1940]

R.G.A.Z. Levelt menyatakan bahwa identifikasi Indonesia dengan *Nederlands East Indies* juga sangat sesuai dengan obyeknya. Akan tetapi, pemerintah dalam konteks ini agak tidak logis, dan siap untuk mengizinkan penggunaan kata "*Indonesier*" dan bukan lagi "*Inlander*" (Pribumi) dalam komunikasi resmi karena telah menyadari bahwa hal itu dapat menjadi sesuatu yang agak menyinggung perasaan. Penggunaan kata "*Indonesia*" berlaku bagi seluruh subyek penduduk di berbagai kepulauan Indonesia, tidak hanya sekedar dalam korespondensi antarpejabat. Mosi yang lain dari Sutarjo meminta agar dibentuk suatu komite yang bertugas untuk melakukan formulasi tentang kewarganegaraan seluruh penduduk Hindia yang seragam. Hal ini pun dikesampingkan begitu saja oleh pemerintah. Dalam dua kasus tersebut, pemerintah telah memberikan nilai di bawah dari yang sebenarnya mengenai perbedaan di antara pihak sana dan sini. Meskipun mereka menyatakan dengan maksud mengurangi segala sisa diskriminasi rasial dan hambatan lain, hal itu mengulangi bahwa berpindahnya sesuatu akan memerlukan perubahan menyeluruh dalam hati manusia.[493]

493 *Handelingen Volksraad* 1940-1941, hlm. 559

Kemudian Levelt tenggelam ke dalam rincian monolog dengan berbagai aspek moral dan psikologi dari isu rasial. Hasilnya sebagai yang dimaksudkan Sutarjo tak lebih dari nol. Tiga mosi nasionalis yang sangat komperhensif itu diperdebatkan pada pertengahan kedua di sidang tahun 1940. Selain itu, terdapat pula Mosi Wiwoho Purbohadijoyo yang menghimpun semua tuntutan yang pernah dibuat oleh Cokroaminoto dan Jayadiningrat di masa lampau secara cukup komperhensif, serta pernah diusulkan pula oleh Sutarjo dua tahun sebelumnya. Mosi tersebut meminta Pemerintahan Kolonial untuk sekali lagi berunding dengan Pemerintah Kerajaan Belanda, dengan maksud untuk menyusun otonomi bagi Indonesia dalam kerangka Kerajaan Belanda. Dengan demikian, suatu Dewan Kerajaan perlu dibentuk dengan adil dan diisi oleh perwakilan yang sederajat dari empat wilayah yang ada di kerajaan. Sedangkan untuk Indonesia, keanggotaan dan wewenang Volksraad ditingkatkan agar setara dengan Kepala Departemen Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang mempunyai tanggung jawab terhadap menteri-menteri. Wiwoho memandang perubahan ini penting, mengingat kondisi dunia dewasa ini memerlukan perkembangan lebih cepat. Dengan demikian, dikehendaki bahwa reformasi lebih lanjut dan mendalam terkait struktur politik Hindia Belanda adalah suatu hal yang diperlukan oleh semua golongan dan kelas masyarakat Indonesia.[494]

Kemudian Levelt tenggelam ke dalam rincian monolog dengan berbagai aspek moral dan psikologi dari isu rasial. Hasilnya sebagai yang dimaksudkan Sutarjo tak lebih dari nol.

Dalam hal tuntutan, R.G.A.Z. Levelt setidaknya mau memenuhinya setengah, sedang Mosi Wiwoho, Sukowati, dan Kasimo ditolak. Levelt menyatakan secara kategoris bahwa perubahan konstitusional semacam itu belumlah waktunya bagi Hindia Belanda. Persoalan selesai jika pemerintah memerlukan dan anggota dewan yang bersangkutan pula memerlukan. Beberapa hari kemudian, pada 28 Agustus 1940, Wiwoho berbicara dan ketiga mosi itu ditarik. Dalam ikhtisarnya, ia membeberkan kepada para penyampai mosi sampai pada kesimpulan yang sangat menyesalkan bahwa terdapat jarak yang begitu lebar antara pemerintah dengan pandangan mereka, bahwa hal itu tidak akan membuahkan sesuatu yang dapat diharapkan dari pemerintah dalam tingkat ini.[495]

Dengan penyesalan dan kesedihan yang dalam, para peneken mosi harus mendengarkan penolakan menyeluruh dari pemerintah terhadap tuntutan mereka dalam sidang 23 Agustus 1940. Sebenarnya,

494 *Volksraad Zittingsjaar* 1939-1940, *Onderwerp* 96, *Stuk* 13
495 *Handelingen Volksraad* 1940-1941, hlm. 579

tuntutan itu sangat moderat dan terlebih lagi hanya tercermin dalam kehendak yang telah dipupuk oleh GAPI dan dinyatakan dalam manifesto mereka, serta petisi GNI dari Yamin yang ditujukan kepada *Staten General*. Semangat Mei 1940 setidaknya bagi para nasionalis yang duduk di dewan hanyalah masa yang pendek saja. Pengumuman pemerintah tentang pembentukan komisi kecil yang akan ditugaskan melakukan survei aspirasi politik yang hidup di antara berbagai macam kelompok penduduk tidaklah terdapat dalam ikhtisar Wiwoho.[496]

Komite tersebut merupakan semacam komite pencari fakta yang terdiri dari sejumlah orang yang mempunyai kemampuan, sehingga sesungguhnya dapat menjadi pengurang rasa sakit bagi kaum pergerakan untuk tetap berada pada garis perjuangannya. Hal ini dibatalkan dengan tegas oleh Thamrin dalam pidatonya yang berbahasa Indonesia, sebagai berikut:

> "*Dalam memori van Antwoord (memori jawaban) pemerintah menerangkan motie-Wiwoho dan motie-Soetardjo minta mengadakan commissie, sekarang pemerintah telah mengadakan commissie: mengapa ra'yat Indonesia masih goesar tidak membantoe (Soetardjo interjects: 'Rewel'), Boekan sadja rewel. Saja kira dasarnja commissie visman tidak sesoeai dengan yang diminta oleh motie Wiwoho dan motie Soetardjo, sebab tindakan jang diadakan itoe memboeang tempo sadja.*"[497]

Semangat Mei 1940 setidaknya bagi para nasionalis yang duduk di dewan hanyalah masa yang pendek saja.

Maka, seperti yang telah disampaikan oleh Wiwoho beberapa bulan sebelumnya, jurang antara kaum nasionalis dengan pemerintah sulit untuk dijembatani. Di samping karena adanya perbedaan persepsi antara Barat dan Timur, Pemerintah Kolonial tidaklah bekerja berdasarkan norma yang diterimanya sendiri mengenai demokrasi. Perdana Menteri Belanda yang baru, Gerbrandy, belakangan ini telah mengabaikan demokrasi Barat, sehingga mengarahkan struktur pemerintahan kepada bentuk yang lebih otoriter.[498]

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda begitu menentang, menolak penggantian kata "*Nederlands Indies*" dengan "Indonesia", dan dalam waktu yang sama menganjurkan penggunaan kata "*Inlander*" (Pribumi).

496 *Handelingen Voksraad* 1940-1941, hlm. 558
497 *Handelingen Volksraad* 1940-1941, hlm. 784
498 *Handelingen Volksraad* 1940-1941, hlm. 1235

Pada saat itu, Fraksi Nasional mempertanyakan tentang itu, "*Masa boleh orang menjeboet nama* Indonesier *dan* Indonesisch *kalau tidak ada nama Indonesia!*". Bahkan, Verboom menyela dengan kata-kata "*Zeer juist!*" (benar sekali!). Setelah berterima kasih pada Verboom, Fraksi Nasional melanjutkan dengan pepatah "*Adakah teloer, djikalau tidak ada ajamnya*?".[499]

Selanjutnya, Fraksi Nasional membuat ikhtisar hal-hal yang dipandangnya sangat penting bagi rakyat untuk dicapai. Dalam bidang politiknya, seperti mengamati:

1. Perjanjian antara rakyat dan pemerintah tentang struktur dasar konstitusional harus dibuat dengan semangat memperkuat kekuatan moral dalam dan luar rakyat Indonesia;
2. Pandangan pemerintah tentang perubahan itu haruslah tidak lagi menunggu pembangunan kembali segala sarana kekuasaan Belanda di Holland;
3. Haruslah diakui bahwa Indonesia memerlukan suatu tatanan baru juga. Pengaturan baru semacam itu haruslah memperhatikan peningkatan standar hidup rakyat yang jauh lebih ekstensif daripada keadaan sekarang;
4. Semangat berjuang rakyat harus digalakan dengan peningkatan standar politik, sosial, dan ekonominya.

Setelah merujuk pada jurang yang kian mendalam antara kelompok pergerakan dan pihak pemerintah, serta pengamatannya tentang misi dagang Jepang, Fraksi Nasional pun kian meragukan arah perkembangan politik negeri ini. Mereka sadar bahwa perundingan dagang itu didorong oleh usaha pemerintah Belanda untuk melakukan strategi akomodasi dengan pihak Jepang, seiring dengan meningkatnya kekhawatiran dalam menghadapi mereka. Meski para dewan di Fraksi Nasional dengan hati-hati berbicara tentang kekuatan Jepang yang dapat muncul dalam kejadian-kejadian di kawasan Indonesia, hal ini tentunya sangat sah untuk berbicara tentang keperluan mendesak mengenai adanya "tatanan baru yang harus dibangun bagi rakyat Indonesia".[500]

Setelah merujuk pada jurang yang kian mendalam antara kelompok pergerakan dan pihak pemerintah, serta pengamatannya tentang misi dagang Jepang, ...

499 *Handelingen Volksraad* 1940-1941, hlm. 785
500 *Handelingen Volksraad* 1940-1941, hlm. 782

De opening van den Volksraad — De gouverneur-generaal tijdens het uitspreken van zijn rede — Links de regeeringsgemachtigden, rechts het corps consulaire — Tegenover Z. Excellentie de voorzitter, mr. J. A. Jonkman

Sidang pembukaan Volksraad tahun 1941, periode terakhir Volksraad sebelum Hindia Belanda dikuasai oleh Jepang pada tahun 1942.
[Sumber: *Bataviaasch nieuwsblad*, 16 Juni 1941]

Di bawah ancaman pasukan Jepang yang telah mendarat di Indonesia pada awal tahun 1942, Volksraad mengadakan sidang di Kota Bandung. Dalam kesempatan tersebut, Letnan Jenderal H.J. van Mook, di depan sidang Volksraad, memberikan pandangannya tentang situasi saat itu:

> "*Toen Japan op 8 december den oorlog begon, stond het tegenover een materieel en moreel sterk front. Door den val van Singapore echter is de weg naar Nederland-Indië voor de Japanners open gekomen. Indië moet zich nu alleen tegenover een overmachtigen vijand verdedigen.*"[501]

> [Ketika Jepang memulai perang pada 8 Desember, Jepang menghadapi front yang secara material dan moral kuat. Namun, karena jatuhnya Singapura, jalan ke Hindia Belanda terbuka untuk Jepang. Hindia sekarang harus sendirian mempertahankan diri melawan musuh yang kuat.]

Van Mook melanjutkan:

> "*Ondanks den fellen Nederlandschen afweer is het den Japanners gelukt, sterke strijdkrachten op Java aan land te zetten. De verdedeging moet nu op bepaalde gebieden worden samen getrokken, waar de natuurlijke situatie het mogelijk maakt, stand te houden tegenover een sterkeren aanvaller.*"

501 "Volksraad bijeen te Bandoeng", *De Tijd*, 6 Maret 1942, hlm. 1

> [Terlepas dari pertahanan Belanda yang kuat, Jepang berhasil membentuk pasukan kuat di Jawa. Pertahanan sekarang harus digabung bersama-sama di daerah-daerah tertentu, di mana situasi alam memungkinkan untuk bersama-sama melawan penyerang yang lebih kuat.][502]

Dalam dekade terakhir masa pemerintahan kolonial yang reaksioner telah mencatat lahirnya Fraksi Nasional dengan istilah "Front kulit sawo matang" dalam Volksraad sebagai semangat baru bagi kaum pribumi untuk menyuarakan aspirasinya. Fraksi nasional tidak dapat dipisahkan dari M.H. Thamrin sebagai sosok yang Moderat dan memperjuangkan hak kesetaran bagi kaum Pribumi.

Krisis Ekonomi pada 1930an merupakan bencana bagi rakyat Pribumi, namun tidak membuat Pemerintah kolonial Hindia Belanda memperhatikan mempedulikan rakyat yang nota bene merupakan kawulanya. Tuntutan Petisi Sutarjo yang lunak saja tidak dipedulikan apalagi dipenuhi. Sikap pemerintah kolonial yang reaksioner inilah yang membuat simpati rakyat Indonesia segera beralih ke bangsa Jepang yang sejak tahun tahun 1930-an sudah mempersiapkan dirinya untuk datang ke Indonesia.

Setelah merujuk pada jurang yang kian mendalam antara kelompok pergerakan dan pihak pemerintah, serta pengamatannya tentang misi dagang Jepang, ...

502 *Ibid.*

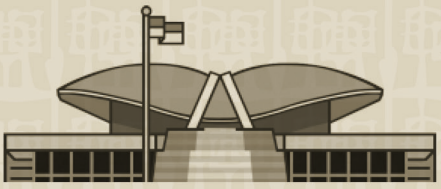

BAB IV

Chuo Sangi-In 1942 – 1945

Setelah menyerang Pearl Harbour pada 8 Desember 1941, Jepang mengarahkan sasaran perang Asia Timur Raya yang dicetuskannya ke Asia Tenggara. Indonesia merupakan sasaran utama karena kekayaan sumberdaya alam terutama minyak yang sangat dibutuhkan.

DENGAN jatuhnya Singapura, kedudukan Belanda di Indnesia terancam. Sasaran Jepang kemudian adalah pangkalan minyak di Tarakan diserang dan diduduki pada 10 Januari 1942. Berturut-turut setelah Balikpapan jatuh ke tangan Jepang pada 20 Januari, Pontianak 2 Februari, Banjarmasin malam harinya dan setelah Palembang jatuh pada 14 Februari 1942, Jawa hanya tinggal selangkah lagi.

Tentara Jepang masuk ke Jawa di tiga tempat pendaratan: Banten, Eretan (Jawa Barat), dan Kragan (Jawa Timur). Menarik dicatatan pada umumnya kedatangan tentara Jepang disambut baik orang Indonesia. Faktor pertama adalah karena masyarakat Indonesia ketika itu percaya kepada ramalan Jayabaya sebagai bentuk ungkapan aspirasi kemerdekaan di kalangan rakyat. Kemudian, hal itu juga sudah disadari

Para anggota Volksraad, c. 1935. Tampak di antaranya M.H. Thamrin (berdiri, 13 dari kanan), Soangkupon (berdiri, 7 dari kanan), dan Kusumo Utoyo (duduk, 4 dari kanan)
[Sumber: KITLV 2641].

oleh Jepang, sehingga pada saat mengumumkan Perang Pasifik, Jepang bergerak cepat dalam mengambil tindakan dengan menyatakan kepada orang-orang Jawa melalui pamflet-pamflet yang disebarkan dari pesawat udara. Pada pamflet yang disebar tersebut, dijelaskan bahwa bangsa Jepang akan segera memenuhi janji Jayabaya, bahwa akan ada orang berkulit kuning dari utara yang datang untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Kedua, faktor eksternal yang berperan sebagai sumber inspirasi kaum nasionalis Indonesia yang baru muncul, yaitu kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Selain itu, orang-orang Indonesia juga mulai mengenal orang Jepang secara pribadi dalam bentuk pemilik toko yang memberikan pelayanan yang baik kepada orang-orang Indonesia.[503]

Ketika Jepang menguasai Indonesia di masa awal pendudukannya, pemerintahan bersifat sementara, sehingga kemudian dibentuklah

503 Arniati Prasedyawati Herkusumo, "Chuo Sangi-in: Dewan Pertimbangan Pusat pada masa Pendudukan Jepang", hlm. 6

Kantor Pemerintah Militer Jawa (*Jawa Gunseibu*) yang berada di bawah pengawasan langsung Kepala Staf Tentara Ke-16 yang diangkat sebagai Kepala Pemerintahan.[504] Pemerintahan militer di wilayah-wilayah Indonesia yang diduduki diatur oleh dua dokumen pokok, yaitu "Asas-asas mengenai pemerintahan di Wilayah-wilayah Selatan yang diduduki", yang dirumuskan pada Konferensi Penghubung antara Markas Besar Kemaharajaan Jepang dengan Kabinet Jepang pada tanggal 20 November 1941, serta "Persetujuan Pokok antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut mengenai pemerintahan militer di wilayah-wilayah yang diduduki", tertanggal 26 November 1941. Berdasarkan dokumen tersebut, pemerintahan militer di Jawa diatur oleh Panglima Tentara Ke-16 yang mempunyai kode "Kelompok Osamu". Selama masa pendudukan, ia dikenal sebagai *Gunshireikan* atau *Saiko Shikikan* (Panglima Tertinggi), tetapi pemerintahan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Pemerintahan Militer yang disebut *Gunseikan*. Saiko Shikikan menetapkan peraturan yang dinamakan *Osamu Seirei*, sedangkan peraturan yang dikeluarkan oleh Gunseikan disebut *Osamu Kanrei*. Peraturan-peraturan tersebut diumumkan dalam *Kan Fo*, surat kabar milik pemerintah, yang merupakan sebuah penerbitan resmi yang dikeluarkan oleh *Gunseikanhu* (Kantor Kepala Pemerintahan Militer).[505]

Masa lebih kurang tiga setengah tahun dalam sejarah Indonesia berdampak pada ingatan kolektif bangsa secara negatif maupun positif. Masih dalam banyak catatan sejarah betapa kejam praktik pemerintahan militer Jepang di Indonesia terkait antara lain Romusha, penjarahan atas hampir semua harta kekayaan yang dimilki masyarakat untuk kepentingan Jepang. Belum lagi mengenai berapa banyak kaum perempuan yang dipaksa untuk melayani nafsu kelakian serdadu Jepang dikenal sebagai *yugun ianfu*. Akan tetapi asih juga diingat betapa dalam masa pendudukan Jepang memberi kesempatan misalnya kepada para pemuda yang dilatih dalam Tentara Pembela Tanah Air (PETA) dan sebagian lagi dibawa ke medan pertempuran sebagai anggota Heiho, atau tentara pembantu pasukan Jepang.

Pada masa pendudukan Jepang yang singkat bagi pergerakan nasional telah memberi peluang yang cukup besar dalam pematangan menuju kemerdekaan. Meskipun perdebatan boleh berlanjut mengenai apakah Jepang berperan terhadap kemerdekaan Indonesia, fakta menunjukkan bahwa Jepang membentuk suatu badan untuk bekerja

Masa lebih kurang tiga setengah tahun dalam sejarah Indonesia berdampak pada ingatan kolektif bangsa secara negatif maupun positif.

504 *Ibid.*, hlm. 8
505 *Ibid.*, hlm. 9

dalam kerangka persiapan kemerdekaan. Wadah itu adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (*Dokuritsu Zyunbi Cosakai*). Dalam badan itulah bangsa Indonesia melalui para pendiri bangsa merancang dan merumuskan Negara Indonesia merdeka, baik dari landasan dasar Negara, wilayah negara, dan susunannya. Suatu badan yang juga dibentuk dalam masa pendudukan Jepang adalah Cuo Sangi In, yakni badan pertimbangan

Pada 1 Agustus 1943, Panglima Tertinggi Tentara Ke-16 mengumumkan tentang garis besar rencana pengambilan bagian dalam pemerintahan negeri yang meliputi *Chuo Sangi-in*, atau Dewan Pertimbangan Pusat, dan *Shu Sangi-kai*, atau Dewan Pertimbangan Daerah, serta jabatan tinggi lainnya yang diperuntukkan bagi orang-orang Indonesia. Chuo Sangi-in hanya mempunyai fungsi sebagai penasihat. Hal tersebut sebenarnya serupa dengan Volksraad atau Dewan Rakyat yang sebelumnya dibentuk oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Kekuasaan Dewan Rakyat dapat dikatakan hanya sebatas memberi nasihat saja, bukan merupakan badan legislatif yang berlaku secara utuh. Saran atau nasihat yang diberikan adalah khususnya berkisar pada persoalan anggaran, yaitu perhitungan kelebihan dan kekurangan anggaran belanja, serta perihal peminjaman uang. Untuk masalah tersebut, Gubernur Jenderal diwajibkan untuk meminta nasihat dari Dewan Rakyat. Alasan mengapa dewan ini tidak diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang, menurut Pleyte yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Urusan Tanah Jajahan, ialah karena anggota-anggota Dewan Rakyat tersebar di seluruh tanah Hindia Belanda, dan mereka hanya dapat mempergunakan sebagian waktunya bagi kegiatan di dewan itu. Hak yang dimiliki Dewan Rakyat di masa Hindia Belanda adalah hak petisi, yaitu hak mengajukan usul, agar persoalan kepentingan penduduk di Hindia Belanda dapat diatasi. Hak ini dapat diajukan oleh seluruh anggota, kecuali yang menyangkut masalah pembuatan undang-undang. Selain hak petisi, ada pula hak inisiatif atau hak untuk mengajukan rancangan undang-undang, hak interpelasi atau hak meminta keterangan kepada pemerintah, serta hak-hak lainnya yang berhubungan dengan pemerintahan negeri.

Pada waktu itu, situasi perang tidak memungkinkan Jepang untuk memikirkan dan membentuk sistem perwakilan rakyat.

Pada waktu itu, situasi perang tidak memungkinkan Jepang untuk memikirkan dan membentuk sistem perwakilan rakyat. Jepang hanya mendirikan Chuo Sangi-in sebagai dewan yang hanya bertugas untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemerintah pendudukan militer Jepang, serta mengajukan usul

yang tidak ada akibatnya bila tidak dilaksanakan oleh pemerintah pendudukan Jepang.[506]

Pemerintahan militer Jepang di Indonesia memberikan izin kepada orang-orang Indonesia untuk berpartisipasi di bidang politik, sehingga tindakan yang diambil oleh Pemerintah Militer Jepang sehubungan dengan pernyataan tersebut di atas, yaitu: *Pertama*, membentuk Chuo Sangi-in di Jakarta dan Shu Sangi-kai di tujuh belas keresidenan, Kota Praja Istimewa Jakarta, serta di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta; *Kedua*, mengangkat penasihat (*sanyo*) untuk departemen-departemen pemerintah militer Jepang, seperti yang telah diuraikan di atas. Pembentukan badan-badan tersebut, yang diisi dengan pengangkatan orang-orang Indonesia, bertujuan untuk memberi ruang partisipasi orang Indonesia secara terbuka di dalam menentukan kebijaksanaan dan pelaksanaan pemerintahan militer Jepang.

Para tokoh politik Indonesia diberikan tempat atau lembaga untuk menyampaikan aspirasi, lembaga bersuara untuk menyuarakan aspirasinya yang serupa dengan Volksraad di zaman Belanda, tetapi fungsinya hanya sebagai penasihat yang harus sejalan dengan strategi politik Jepang.[507]

Pemerintah militer Jepang di Jawa juga mengeluarkan serangkaian peraturan di masa awal kekuasaannya, khususnya mengenai pembentukan Chuo Sangi-in adalah sebagai berikut:

Pemerintah militer Jepang di Jawa juga mengeluarkan serangkaian peraturan di masa awal kekuasaannya, khususnya mengenai pembentukan Chuo Sangi-in

Osamu Seirei No. 36 tentang Chuo Sangi-in

Pasal 1.

"*Dengan maksoed oentoek memadjoekan oesaha. Pemerintah Balatentara dengan pesat dan tepat, maka diadakan Tyuuoo Sangi-in. Tyuuoo Sangi-in adalah dibawah penilikan langsoeng dari Saikoo Sikikan, dan tentang oeroesan pemerintahan, Tyuuoo Sangi-in memberi djawaban atas pertanjaan Saikoo Sikikan serta memadjoekan oesoelan kepada Saikoo Sikikan serta memadjoekan oesoel-oesoel kepada Saikoo Sikikan.*"

506 *Ibid.*, hlm. 6
507 Atashendartini Habsjah, Mooriati Sudiharto, dan Putut Trihusodo (ed.), 2007, "Perjalanan Panjang Anak Bumi", hlm. 219

Pada pasal 1 tersebut, Pemerintah Militer Jepang memutuskan untuk membentuk Chuo Sangi-in yang langsung berada di bawah pengawasan langsung Saiko Shikikan selaku Panglima Tertinggi. Pada pasal tersebut ditegaskan bahwa Chuo Sangi-in dapat mengajukan usulan-usulan kepada Saiko Shikikan.

Pasal 2.

"*Tyuuoo Sangi-in tersoesoen dari Giin (Anggota) dan Tyuuoo Sangi-in Zimukyoku (Kantor oeroesan Tyuuoo Sangi-in—selandjoetnja dibawah ini diseboet Zimukyoku).*"

Pasal 3.

"*Jang menjadi Giin Tyuuoo Sangi-in ialah orang jang diangkat oleh Saikoo Sikikan dari antara pendoedoek di Djawa, jang berwatak baik serta mempoenjai pengetahoean dan pendirian yang utama, orang yang dipilih antara anggota-anggota Syuu Sangi-kai atau Tokubetu Si Sangi-kai sendiri, dan djoega orang jang dioesoelkan oleh Koo. Banjaknya Giin ditetapkan sebagai terseboet dalam daftar jang dibawah ini.*"

Pasal 4.

"*Pada Tyuuoo Sangi-in diadakan seorang Gityoo (Ketoea) dan doea orang Huku Gityoo (Wakil ketoea) dan mereka itoe diangkat oleh Saikoo Sikikan dari antara tjalon-tjalon jang doea kali banjaknya Gityoo dan Huku Gityoo dan dipilih antara dan oleh anggota-anggota sendiri.*"

Pasal 5.

"*Pada Zimukyoku diadakan Kyokutyoo (Kepala Zimukyoku—selandjoetnja dibawah ini diseboet Zimukyoku-tyoo), dan ia diangkat oleh Saikoo Sikikan. Zimukyoku-tyoo memimpin serta mengoeroes pekerdjaan Tyuuoo Sangi-in dan memnja ditetapkan oleh Gunseikan.*"

... Pemerintah Militer Jepang memutuskan untuk membentuk Chuo Sangi-in yang langsung berada di bawah pengawasan langsung Saiko Shikikan selaku Panglima Tertinggi.

Pasal 6

"*Gunseikan boleh menjoeroeh pegawai Gunseikanbu hadir dan toeroet bersoeara dalam sidang, agar soepaja dapat memberi bantoean jang perloe oentoek memoedahkan djlan peroendingan dalam sidang Tyuuoo Sangi-in.*"

Pasal 7

"*Panggilan, pemboekaan dan penoetoepan sidng Tyuuoo Sangi-in ditetapkan atas perintah Saikoo Sikikan. Tempat dan lamanja sidang ditetapkan oleh Saikoo Sikikan.*"

Pasal 8.

"*Gityoo, memimpin dan mengatoer sidang tyuuoo Sangi-in. Apabila Gityoo tidak dapat menghadiri sidang oleh karena sesoeatu hal, maka Huku Gityoo mewakili Gityoo dalam djabatannya, dan djika Gityooo dan Huku Gityoo kedoeanja berhalangan, maka salah seorang Giin jang ditoenjeokkan oleh Saikoo Sikikan mewakili Gityoo dalan djabatannja. Peratoeran tentang peroendingan dalam sidang ditetapkan dengan istimewa.*"

Peratoeran tentang peroendingan dalam sidang ditetapkan dengan istimewa.

Pasal 9.

"*Peroendingan dalam sidang dipoetoeskan dengan soeara jang lebih dari separoeh dari banjaknya Giin jang berhimpoen dan djika bilangan soeara Giin jang setoedjoe bersamaan dengan jang tidak setoedjoe bersamaan dengan jang tidak setoedjoe maka Gityoo memberi kepoetoesan.*"

Pasal 10.

"*Pertanjaan-pertanjaan Saikoo Shikikan kepada Tyuuoo Sangi-in disampaikan dengan soerat kepada Gityoo dengan perantaraan Zimukyoku-tyoo, sedang rantjangan oesoel dari Giin disampaikan kepada Gityoo, sedang rantjangan oesoel dari Giin disampaikan kepada Gityoo dengan perantaraan Zimukyoku-tyoo.*"

Pasal 11.

"*Segala soerat-soerat jang mengenal oeroesan sidang Tyuuoo Sangi-in, aslinya teroelis dalam bahasa Nipon dan salinannja dalam bahasa Melajoe.*"

Pasal 12.

"*Lamanja djabatan Giin ialah satoe tahoen. Akan tetapi apabila diangkat seseorang anggota baroe oentoek mengisi djabatan jang lowong, maka lamanja djabatan itu sama dengan lamanja djabatan Giin yang digantinja.*"

Pasal 13.

"*Giin mendapat kehormatan tertinggi antara pendoedoek di Djawa, terketjoeali Koo dan pegawai negeri. Atoeran tentang oeang djabatan dan penggantianongkos jang dikeloearkan Giin, ditetapkan oleh Gunseikan.*"

Atoeran Tambahan.

"*Oendang-oendang in moelai berlakoe pada hari dioemoemkan. Djakarta, tanggal 5, boelan 9, tahoen Syoowa 18 (2603). Saiko Sikikan Osamu Kanrei No. 5*"

Peratoeran oentoek mendjalankan Oendang-oendang tentang

Tyuuoo Sangi-in

"*Oeang djabatan, ongkos djalan dan oeang sakoe oentoek Giin Tyuuoo Sangi-in ditetapkan sebagai berikoet:*

1. Oeang djabatan (tahoenan):
   - Gityoo (Ketoea) f 6.000,- (Anam riboe roepiah),
   - Huku Gityoo (Wakil ketoe) f 4800,- (Ampat riboe delapan ratoes roepiah),

"Giin mendapat kehormatan tertinggi antara pendoedoek di Djawa, terketjoeali Koo dan pegawai negeri.

- Giin (Anggota) f 3.600.- (Tiga riboe anam ratoes roepiah);

2. Oeang djabatan jang diberikan oentoek orang yang merangkap djabatan Tyuuoo Sangi-in:
   a. Banjaknya oeang djabatan yang diberikan kepada anggota Syuu Sangi-kai atau Tokubetu Si Sangi-kai jang merangkap salah satoe djabatan Chuo Sangi-in, seperti djabatan Gityoo, Huku Gityoo atau Giin, ditetapkan separoeh dari oeang djabatan masing-masing jang terseboet pada satoe di atas;
   b. Banjaknya oeang djabatan jang diberikan kepada pegawai negeri, pegawai badan pemerintahan daerah atau orang jang dianggap sebagai pegawai-pegawai itoe (termasoek djoega pegawai negeri dan pegawai Badan pemerintahan daerah di Kooti), jang merangkap salah satoe djabatan Tyuuoo Sangi-in seperti djabatan Gityoo atau Giin, ditetapkan separoeh dari oeang djabatn masing-masing jang terseboet pada 1 di atas;

Banjaknya oeang djabatan jang diberikan kepada pegawai negeri, pegawai badan pemerintahan daerah atau orang jang dianggap sebagai pegawai-pegawai itoe

3. Ongkos djalan dan oeang sakoe:
   - Oeang sakoe f 15.- (Lima belas roepiah sehari),
   - Oeang penginapan f 30,- (TIga poeloeh roepiah) semalam,
   - Ongkos kereta api jang diberikan dengan kartjis pertjoema, kelas satoe,
   - Ongkos kendaaran f 0.15 (lima belas sen) setiap kilometer.
   - Peratoeran ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan
   - Djakarta, tanggal 5, boelan 9, tahoen Syoowa 18 (2603). Gunseikan.

Osamu Kanrei No. 6
Peratoeran tentang Tyuuoo Sangi-in Zimukyoku

Pasal 1.
"*Tyuuoo Sangi-in Zimukyolu melakoekan persiapan sidang Tyuuoo Sangi-in, mengatoer peroendingan memboeat tjatetan peroendingan, menjampaikan djawaban dan oesoelnya kepada Saikoo Sikikan serta mengoeroes hal-hal lain jang mengenai oeroesan Tyuuoo Sangi-in.*"

Pasal 2.
"*Pada Zimukyoku diadakan doea Ka (Bahagian) ialah Syomu-ka (Bahagian oeroesan oemoem) dan Gizi-ka (Bahagian oeroesan peroendingan)*
Syomu-ka mengoeroes hal-hal tentang oeroesan oemoem, keoeangan dan soerat-soeratan.
Gizi-ka melakoekan persiapan sidang, mengatoer peroendingan, memboeat tjatetan peroendingan, mendjalankan pekerdjaan djoeroe bahasa serta menjalin, mengadakan perhoeboengan dengan Giin, mengoeroes hal-hal jang mengenai perhoeboengan dengan loear serta mengoeroes poela hal-hal jang tidak masoek pekerdjaan Syomu-ka."

Pasal 3.
"*Pada Zimukyoku diangkat pegawai-pegawai jang di bawah ini, dan Katyoo dan pegawai dibawahnja diangkat oleh Gunseikan:*

- *Kyokutyoo (Kepala kantor): 1 orang diangkat dari Tyokunin-kan,*
- *Katyoo (Kepala bahagian): 2 orang diangkat dari Soonin-kan atau Syokutaku,*
- *Kyoku-zuki (Pegawai tata oesaha): 6 orang antaranya 3 orang diangkat dari Soonin-kan atau Syo kutaku, sedang tiga orang lainnja diangkat dari pegawai negeri pendoedoek di Djawa,*

Syomu-ka mengoeroes hal-hal tentang oeroesan oemoem, keoeangan dan soerat-soeratan.

- *Syoki (Penoelis): beberapa orang*
- *Tuuyaku (Djoroe bahasa) : beberapa orang*"

Atoeran tambahan.
"*Peratoeran ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan, Djakarta, tanggal 5, boelan 9, tahoen Syoowa 18 (2603)*"

Sehari menjelang diadakannya sidang pertama Chuo Sangi-in di Jakarta, Ki Hajar Dewantara menyampaikan pidato di radio pada 14 Oktober 1943.

Sehari menjelang diadakannya sidang pertama Chuo Sangi-in di Jakarta, Ki Hajar Dewantara menyampaikan pidato di radio pada 14 Oktober 1943.

Tentang Tyuoo Sangi-in: Pidato Radio K.H. Dewantara mengatakan :

> "*Besok pagi Tyuuoo Sangi-in akan dilantik dengan resmi dan akan memoelaikan poela melakoekan kewadjibannja jang sangat penting, baik oentoek pemerintah maoepun oentoek rakjat kita seloeroehnja. Penting bagi Pemerintah oleh karena di dalam segala pekerdjaannja jang mengenai pelbagai oeroesan, Pemerintah akan dapat bantoean dari beberapa orang anggauta dari pada Tyuuoo itoe, jang satoe-satoenja mempoenjai ketjakapan dan kesanggpoepan masing2. Di dalam melakoekan kewadjibanja jang maha berat dan maha soelit itoe, lebih-lebih pada masa perang ini, Pemerintah akan dapat poengoet segala boeah pikiran serta pengalaman para Giin, jaitoe para anggauta Tyuuoo Saangi In jang semoeanja telah sanggoep mentjoerahkan segala kekoetannja dan tenaganja oentoek meringankan beban Pemerintah jang sangat berat itoe, baik jang mengenai oeroesan pemerintahan serta pertanggoengan djawab dalam oesahanja membentoek masjarakat baroe, maoepoen dalam segala oentoek mentjepatkan datangnja kemenangan achir, di Asia Timoer Raya dalam oemoemnja, di Jawa pada choesoesnja.*

Dalam pada itoe terboektilah dengan berdirinja Tyuuoo Sangi In itoe, bahwa soenggoeh2 Pemerintah Balatentara Dai Nippon di Djawa ini tidak hanja berdjanji2 sadja, tetapi setjara ksatrya ja'ni djoedjoer dan ichlas, melaksanakan segera apa jang telah disabdakan oleh jang Mulia Perdana Menteri Tozyo dalam sidang Parlemen di Tokyo pada boelan Djoeli j.l. Pernah langkah oetama ini saja seboet satoe2nja "Sabda Pandita Ratoe", jaitoe sabda dari seorang jang bidjaksana serta berwatak kstrya. Dengan sikap yang sedemikian itoe boleh dipastikan, bahwa sekalian pemimpin rakjat jang sedjati, tak dengan ketjoealian, akan berdiri tegak dibelakang Pemerintah Balatentara dan sanggoep dengan ichlas dan bersemangat oentoek memberi sokonganja kepada Pemerintah, jang didalam sedikit waktoe sadja dapat mengambil hati rakjat kita. Dengan memberi kesempatan pada rakjat oentoek turut tjampur di dalam oeroesan pemerintahan negeri, maka teranglah Pemerintah tidak melemahkan kedoedoekannja, tetapi sebaliknja, jaitoe memperkoeat daulatnja, karena menebalkan kepertjajaan rakjat terhadap pimpinan Dai Nippon. Adanya Tyuuoo Sangi In itoe oentoek rakjat kita poen sangat penting..Kalau rakjat insjaf betoel akan kebenaran kepentingan perang ini, maka batas jang teroetama antara keinginan dan kemoengkinan itoe pastilah mendjadi terang dan njata, dan inilah akan meringankan beban dan pertanggoengan djawab kita sebagai wakil2 rakjat didalam Tyuuoo Sangi In itoe.

Djanganlah keterangan ini agaknja mengetjilkan pengharapan rakjat jang kitan wakili didalam Tyuuoo Sangi In itoe.

Anggauta2nja hampir semoea terkenal sebagai pemimpin rakjat jang selaloe mempertahankan kepentingan rakjat oemoem. Segala golongan segala kepentingan, segala tjoorak warna dari

Dalam pada itoe terboektilah dengan berdirinja Tyuuoo Sangi In itoe, bahwa soenggoeh2 Pemerintah Balatentara Dai Nippon di Djawa ini tidak hanja berdjanji2 sadja,

berbagai-bagai masjarakat kita diseloeroeh Djawa dan Madoera, ada wakilnja didalam Tyuuoo Sangi In itoe.

Djangan takoe-takoet; djangan ragoe-ragoe; berilah kepertjajaan sepenuhnya kepada mereka. Ini perloelah, agar para Giin nanti dapat bekerdja dengan senang dan ketegoehan hati, karena merasa dipertjaya oleh rakjat jang kita wakili. Pertjajalah, bahwa kita para Giin, didalam garis-garis kemoengkinan akan bekerdja sekoeat-koeatnja oentoek kepentingan rakjat seloeroehnja agar lekaslah seloeroehnja, agar lekaslah tertjapai kkemenangan achir, jang akan berarti datangnja djaman gilang-gemilang, jaitoe kesedjahteraan rakjat-rakjat di semoean bagian dari lingkoengan Asia Timoer Raya."

"Hari ini berkoempoel di kota Djakarta, segenap anggota-anggota Tyuuoo Sangi- In, baik jang diangkat maoepun jang dipilih oentoek menghadiri pemboekaan Tyuuoo Sangi In dan oentoek melangsungkan rapat jang pertama dari badan terseboet.

Selanjut diperdengarkan juga pidato Mr. R. Samsudin

"Hari ini berkoempoel di kota Djakarta, segenap anggota-anggota Tyuuoo Sangi- In, baik jang diangkat maoepun jang dipilih oentoek menghadiri pemboekaan Tyuuoo Sangi In dan oentoek melangsungkan rapat jang pertama dari badan terseboet. Pembukaan Tyuuoo sangi In ini, akan tertjatat dalam riwajat Indonesia sebagai langkah jang soenggoeh penting; sebagai soeatu ketika jang soenggoeh berharga, berharga tidak sadja sebagai soeatu langkah permoelaan, sebagai langkah pertama oentoek mewoejoedkan tindakan lain jang loeas demikian keterangan Padoeka Toean Soomubutyo pada kaoem wartawan tanggal 3 boelan 8 tahoen 2603), akan tetapi berharga teroetama sebagai langkah jang soenggoeh penting kalau itoe diingatkan bahwa perwoedjoedan badan terseboet itoe dilakoekannja sedang asap peperangan diseloeroeh Asia Timoer masih melipoeti

awan; lebih berharga lagi kalau mengingatkan dan diheboengkan dengan tindakan2 jang lain, jang kesemoeanja dimaksoedkan sebagai sjarat2 dan oesaha2 kedjoeroesan pembentoekan masjarakat baroe di seloeroeh Asia Timoer Raya."[508]

Pimpinan Tertinggi Gunseikan memberi nasihat pada para *giin* (anggota Chuo Sangi-in) pada upacara pembukaan persidangan Chuo Sangi-in yang pertama. Meskipun keadaan dunia sedang genting pada saat itu, oleh karena tengah berlangsungnya Perang Dunia II, dan sebagai antisipasi juga bagi berlangsungnya pemerintahan militer Jepang di Jawa di kemudian hari kemungkinan akan lebih banyak menemui kesukaran. Upacara pembukaan Chuo Sangi-in dilangsungkan dengan bantuan seluruh rakyat yang sebesar-besarnya. Maka dari itu, ia dengan gembira sekali mengucapkan selamat kepada para anggota Chuo Sangi-in. Sebelum persidangan dimulai, ia menyatakan pandangannya dalam bentuk pesan kepada para anggota, sebagai berikut:

"Pertama, tentang kedudukan *giin* di Chuo Sangi-in. Adapun maksud mengadakan Chuo Sangi-in ialah untuk memperkuat dan menyesuaikan Pemerintah Militer Jepang agar semakin sempurna di jalannya. Hal ini bisa saja digunakan oleh musuh untuk menjalankan rencana tipu muslihat, kesukaran karena kekurangan barang-barang, terutama akibat peperangan yang masih berlanjut, semakin lama semakin mempersulit kehidupan rakyat.

Pimpinan Tertinggi Gunseikan memberi nasihat pada para *giin* (anggota Chuo Sangi-in) pada upacara pembukaan persidangan Chuo Sangi-in yang pertama

Kedua, yaitu mengenai sikap *giin* dalam perundingan. Apabila para *giin* menyelidiki dan membicarakan soal-soal perundingan, tuan-tuan harus senantiasa memperhatikan keadaan yang sebenar-benarnya. Menurut P.T. Gunseikan,

508 *Soeara Asia*, 16 Oktober 1943

bagaimanapun bagus dan baiknya perundingan, jika ditujukan kepada kehidupan yang serba nyaman seperti masa damai (sebelum Perang Dunia II), dengan menutup mata bahwa sekaranglah bangkit atau runtuhnya Asia Timur Raya dan jika dilupakan kewajiban bahwa seluruh rakyat Asia harus mengabdikan seluruh hidupnya dan jika dilupakan, kewajiban bahwa seluruh rakyat Asia harus mengabdikan dirinya di tengah-tengah peperangan Asia Timur Raya, maka perundingan serupa itu untuk Asia Timur Raya tidak ada gunanya sama sekali. Selanjutnya, segala kritik yang dikeluarkan hanya ingin mengkritik saja maka sudah bukan tempatnya lagi.

Selain dari kelompok Bumiputra, *giin* juga terdiri dari etnis Cina yang sudah menjadi penduduk Indonesia. *Giin* juga harus menyadari tujuan pemerintahan militer Jepang. Dengan bantuan seluruh rakyat, tuan-tuan harus berusaha merundingkan dengan sepenuh hati dan semangat, bekerja bersama-sama berdasarkan cita-cita hidup makmur bersama-sama di tanah Jawa. Camkanlah bahwa Pemerintah Militer Jepang sangat berharap akan hasil-hasil perundingan itu.

Selain dari kelompok Bumiputra, *giin* juga terdiri dari etnis Cina yang sudah menjadi penduduk Indonesia.

Singkatnya, apabila para *giin* sadar akan maksud dan tujuan dari peperangan Asia Timur Raya, dan membicarakan segala soal perundingan dengan anggapan yang luas, maka tercapailah maksud mengadakan Chuo Sangi-in. Dengan demikian, tercapai pula cita-cita Pemerintah Militer Jepang. Akan tetapi, berhasil atau tidaknya semata-mata tergantung kepada cara bagaimana susunan baru ini dijalankan. Saya harap supaya para *giin* memusatkan pikirannya kepada hal yang tersebut tadi, dan hendaklah tuan-tuan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan kewajiban dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, tanggal 16, bulan 10, tahun *Syoowa* 18 (2603)

Gunseikan Sinsitiro Kokubu."[509]

4.1 Tanggapan pembentukan Chuo Sangi-in

Nippon Sangyo, surat kabar ekonomi yang berpengaruh, menuliskan bahwa keinginan bangsa Indonesia di Jawa sejak Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, baru sekarang dapat dilaksanakan. Tindakan pemerintah itu mengangkat nama *Dai Nippon* dan adalah suatu kehormatan bagi bangsa Indonesia.

Sementara itu, *Mainiti Shinbun* menyebutkan bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia di Jawa berharap untuk menerima penghargaan itu, untuk cita-citanya yang sudah lama dikejar, sebagaimana juga seharusnya dikejar oleh semua bangsa Asia. Tetapi, hendaknya penduduk di Jawa sadar akan tanggung jawabnya sekarang. Tanggung jawab yang mereka pikul seharusnya diiringi dengan kesadaran, bahwa mereka telah dilepaskan dari penjajahan Belanda. Juga hendaknya, mereka lebih giat lagi bekerja bersama-sama. Nippon dan bangsa-bangsa Asia lainnya bertujuan untuk membangkitkan Asia Raya.

Berbeda lagi dengan *Asahi Shinbun* yang menyoroti fakta bahwa 95% penduduk di Jawa adalah buta huruf. Hal ini menjadi tanggung jawab Nippon, sama besarnya dengan tanggung jawab pemimpin-pemimpin Indonesia, oleh karena faktor tersebut dapat berperan besar dalam memajukan sistem pendidikan, kebudayaan, perindustrian, dan bidang-bidang lainnya dari rakyat umumnya. Sesungguhnya, kewajiban itu tak mudah dan memerlukan kerja sama sepenuhnya antara bangsa Nippon dengan bangsa Indonesia.

Berbeda lagi dengan *Asahi Shinbun* yang menyoroti fakta bahwa 95% penduduk di Jawa adalah buta huruf.

Sambutan seorang pemimpin di Tanah Melayu atas pembentukan Chuo Sangi-in datang dari Onan bin Siradj yang menyatakan bahwa hal ini adalah bukti dari ketulusan Nippon. Bangsa Nippon sesungguhnya merasa bersaudara dengan penduduk Indonesia di Jawa. Oleh sebab itu, kesetiaan rakyat Indonesia dan kepercayaannya atas kemenangan akhir dalam perjuangan saat ini sungguh besar. Bahasa Indonesia digunakan dalam urusan pemerintahan dan ini tidak saja merupakan

509 *Soeara Asia*, 17 Oktober 1943

kehormatan bagi rakyat Indonesia, tetapi juga bagi rakyat di Tanah Melayu karena persamaan bahasanya.

Berikut adalah beberapa pernyataan dari anggota terpilih tentang diangkatnya mereka sebagai anggota Chuo Sangi-in:

> Soekarno: "Saya harap saudara-saudara Indonesia jangan kandas pada ujian ini dan marilah bekerja keras untuk menunjukkan muka kita yang paling bersih. Tunjukkanlah kejujuran hati dan kecakapan kita. Dalam Chuo Sangi-in, bukan suatu tempat oposisi, melainkan kita harus bekerja sama untuk nusa dan bangsa."

> Muhammad Hatta: "Keangkatan saya menjadi anggota Sangi-in berarti pekerjaan saya dalam tata negara dan mungkin meluaskan pekerjaan itu."

> Ki Hajar Dewantara: "Pemerintah Balatentara Dai Nippon telah menerangkan, bahwa badan ini badan perwakilan dan dengan pembentukan ini menunjukkan perbuatannya yang jujur. Inilah ada satu jaminan, bahwa di dalam badan ini duduk golongan partikelir dan orang-orang yang berdekatan dengan rakyat. Inilah langkah yang pertama untuk menambah kepercayaan rakyat kepada pemerintah."

> K.H.M. Mansur: "Di zaman Belanda belum pernah kejadian buat duduk dalam badan yang penting demikian diambilkan dari kalangan ulama-ulama. Terdapatnya beberapa ulama di dalam Sangi-in sungguh menyenangkan hati saya. Dulu tidak mungkin seorang ulama digubris oleh pihak pemerintahan. Lebih menyuarakan hati saya, bahwa di dalam Sangi-in didapatkan ulama yang beraliran tua dan modern. Begitulah hingga golongan-golongan itu mempunyai wakil di dalam Sangi-in."

Ki Hajar Dewantara: "Pemerintah Balatentara Dai Nippon telah menerangkan, bahwa badan ini badan perwakilan dan dengan pembentukan ini menunjukkan perbuatannya yang jujur.

R.P Suroso: "Saya merasa girang sekali atas keangkatan saya itu saya dapat bekerja buat tanah air dan bangsa serta dapat bekerja bersama pemerintah untuk kemenangan. Tentang barisan pembela saya sangat setuju. Memang di sanubari-sanubari pemuda kita semangat ke jurusan itu menyala-nyala."

R.M.A.A. Kusumo Utoyo: "Saya merasa gembira atas keangkatan saya dalam Chuo Sangi-in bekerja sungguh-sungguh dalam badan itu untuk mendirikan Djawa Baroe di lingkungan A.T.R."

Mr. Samsudin: "Atas kepercayaan atas diri saya Pemerintah Balatentara Dai Nippon, atas diri saya, saya menyatakan sangat berterima kasih dan saya berjanji akan mencurahkan segenap tenaga untuk mencapai maksud yang dikendaki oleh badan tersebut. Saya menerangkan mudah-mudahan dengan berdirinya badan ini segala tenaga rakyat dapat lebih dikuatkan dan dicurahkan untuk membantu Balatentara Dai Nippon dalam menyelesaikan ini."

Oey Tiang Tjoei: "Pengangkatan saya tidak saya duga lebih dulu sehingga sangat terharu. Tanggungan anggota Chuo Sangi-in berat sekali. Saya hanya bisa menyatakan saya akan bekerja sunnguh-sungguh serta memberikan sekedar bantuan saya kepada Pemerintah Balatentara Nippon."

Pangeran Haria Suryadiningrat: "Menyatakan kegembiraannya yang sangat besar berhubung dengan diangkatnya beliau itu. Beliau merasa terharu sebab mendapat kepercayaan untuk duduk sebagai wakil rakyat dalam suatu badan yang sangat penting. Beliau akan menjalankan kewajiban itu dengan pertanggungan jawab yang penuh kepada rakyat."

R.M.A.A. Kusumo Utoyo: "Saya merasa gembira atas keangkatan saya dalam Chuo Sangi-in bekerja sungguh-sungguh dalam badan itu untuk mendirikan Djawa Baroe di lingkungan A.T.R."

K.R.M.T.H. Wuryaningrat: "Orang-orang pergerakan terutama anggota-anggota Parindra dulu, barangkali heran mendengar kabar bahwa saya menjadi anggota Chuo Sangi-in. Dulu di zaman imperialism Belanda, saya selalu menolak keanggotaan Dewan Rakyat. Saya menerima keangkatan itu dengan ikhlas sebab saya yakin bahwa badan baru itu akan maju pada akhirnya akan sampai ke cita-cita yang diidamkan rakyat. Kita semuanya percaya kepada sabda P.J.M. Perdana Menteri Tozyo, bahwa bangsa Indonesia akan mendapat tempat yang layak, sepadan dengan kecakapannya. Chuo Sangi-in adalah suatu badan tempat tenaga bangsa Indonesia bekerja bersama-sama untuk mencapai kemenangan akhir. Saya mengucapkan Banzai bagi Dai Nippon dan Hidup bagi Indonesia."

Dr. Samsi: "Dengan terbitnya aturan dan keterangan tentang campur tangan Pemerintahan Negeri maka kita rakyat Indonesia harus benar-benar menyadari bahwa beban ini membawa pertanggung-jawaban yang berat

Dr. Samsi: "Dengan terbitnya aturan dan keterangan tentang campur tangan Pemerintahan Negeri maka kita rakyat Indonesia harus benar-benar menyadari bahwa beban ini membawa pertanggungjawaban yang berat dan ujian bagi kita dalam mengatur negeri dan budi pekerti tinggi seperti yang diharapkan oleh pemerintah untuk memberi sumbangan di dalam cita-cita menyokong Dai Nippon hingga tercapai kemenangan terakhir dan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Dengan diangkatnya saya sebagai anggota Chuo Sangi-in saya merasa mendapat kehormatan yang ikhlas dari pihak pemerintah. Kehormatan ini sesungguhnya meminta pula pertanggungjawaban yang setulus mungkin."

R. Roslan Wongsokusumo: "Saya gembira dengan keangkatan itu, bukan lantaran saya mendapat kesusukan yang tinggi, tetapi karena saya akan dapat mencurahkan pikiran dan tenaga untuk kepentingan rakyat dan kepentingan peperangan Asia Timur Raya."

R. Otto Iskandar Dinata: "Di zaman Belanda kita bangsa Indonesia tidak mengetahui keadaan Negeri Nippon atau budi pekerti bangsa Nippon. Akan tetapi selama satu setengah tahun Pemerintah Balatentara Dai Nippon, bangsa Indonesia sudah banyak mendapat pelajaran dari bangsa Nippon. Kesempatan uuntuk mengambil bagian dalam pemerintahan negeri diberikan kepada kita, meskipun Dai Nippon sedang berperang. Yang sangat membesarkan hati ialah kesempatan membangun *Djawa Baroe dengan Semangat Baroe*, berdasarkan cita-cita Asia yang suci."

4.2 Dasar dan Tujuan Pembentukan Chuo Sangi-in

Seperti telah disebutkan di atas mengenai peluang partisipasi politik bagi orang-orang Indonesia, maka tindakan yang diambil oleh Pemerintah Militer Jepang sehubungan dengan pernyataan tersebut adalah: *Pertama*, membentuk Chuo Sangi-In di Jakarta dan Shu Sangi-kai di tujuh belas wilayah keresidenan, Kota Praja Istimewa Jakarta, serta di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta; *Kedua*, mengangkat penasehat (*sanyo*) untuk departemen-departemen Pemerintah Militer Jepang seperti yang telah diuraikan di atas. Pembentukan badan-badan tersebut, atau pengangkatan orang-orang Indonesia tersebut, dimaksudkan untuk menjamin partisipasi orang Indonesia secara terbuka dalam menentukan kebijaksanaan dan pelaksanaan pemerintahan militer Jepang. Maksud pernyataan Tojo mengenai partisipasi politik sebenarnya adalah untuk mempromosikan kerja sama penduduk Jawa. Hal itu merupakan kunci penting dalam memperkuat pertahanan di wilayah Asia Tenggara. Untuk maksud ini, Saiko Shikikan memanggil empat pemimpin Putera (Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, K.H. Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara), anggota Komite Penyelidik Sistem Adat dan Tata Negara, pejabat-pejabat pemerintah, dan guru-guru ke tempat kediamannya untuk menegaskan maksud kerja sama politik yang disebutkan Tojo.

Pada tanggal 5 September 1943, Saiko Shikikan mengeluarkan Osamu Seirei No. 36 dan 37 tentang pembentukan Chuo Sangi-in dan Shu Sangi-kai. Pada Pasal 1 Osamu Seirei No. 36 disebutkan bahwa,

Gambar 2. Perdana Menteri Jepang, Tojo (kanan depan) bertemu dengan pimpinan Putera. Tampak Sukarno (kiri depan), Hatta (tengah), dan Ki Hajar Dewantara (kanan belakang)
[Sumber: NIOD 48836]

"Dengan maksud untuk memajukan usaha pemerintah dengan pesat, maka diadakan Chuo Sangi-in. Chuo Sangi-in adalah organisasi yang berada di bawah pengawasan langsung dari Saiko Shikikan. Tentang urusan pemerintah, dari bunyi Pasal 1 tersebut di atas tampak jelas bahwa dewan ini dibentuk agar dapat membantu Pemerintah Pendudukan Militer, sebab dalam pemerintahan itu Chuo Sangi-in merupakan kekuasaan yang efektif, yang dapat mendorong masyarakat Indonesia di Jawa bertanggung jawab sesuai dengan keinginan Jepang. Dengan demikian, dewan itu akan bermanfaat bagi Pemerintah Pendudukan Militer Jepang.

Di samping itu, berdasarkan Osamu Seirei No. 36 Tahun 1943, soal-soal yang boleh dirundingkan oleh Chuo Sangi-in adalah harus yang menyangkut topik-topik sebagai berikut: pengembangan Pemerintah Militer, meningkatkan derajat rakyat, pendidikan, dan penerangan, soal-soal industri dan ekonomi, kemakmuran dan bantuan sosial, serta kesehatan.

Semua hal yang tersebut di atas diarahkan kepada usaha untuk membantu keperluan Perang Asia Timur Raya

Semua hal yang tersebut di atas diarahkan kepada usaha untuk membantu keperluan Perang Asia Timur Raya. Bila dilihat sepintas lalu, hal-hal yang boleh dirundingkan oleh Chuo Sangi-in tampaknya memang mencakup semua bidang. Akan tetapi, semua ini ditujukan untuk kepentingan Jepang semata, sehingga apa yang dimaksudkan dengan mempertinggi derajat rakyat, kemakmuran, bantuan sosial, maupun kesehatan adalah sangat bertentangan dengan arti yang sebenarnya. Hal tersebut sama sekali tidak terbukti dilakukan oleh pemerintah pendudukan, walaupun berulangkali diusulkan oleh Chuo Sangi-in dalam sidang-sidangnya. Bahkan sebaliknya, derajat rakyat banyak, kemakmuran, serta kesehatan justru semakin menurun sejak pendudukan Jepang.

Sidang-sidang Chuo Sangi-in, baik yang biasa maupun yang istimewa, diadakan di Jakarta. Sidang-sidang tetap diadakan setiap tiga bulan sekali. Sepuluh hari sebelum diselenggarakan sidang, hal-hal yang akan dibicarakan dan peraturan-peraturan terkait persidangan diumumkan oleh Saiko Shikikan. Sidang Istimewa Chuo Sangi-in hanya diadakan bila dianggap perlu, misalnya diadakannya Sidang Istimewa pada 11 September 1944 sehubungan dengan diumumkannya "Janji Kemerdekaan".

Menurut Pasal 2 peraturan perundingan Chuo Sangi-in, sidang dibuka oleh Ketua Chuo Sangi-in dengan membacakan "perintah pembukaan sidang", dan ditutup dengan membacakan "perintah

penutupan sidang" dari Saiko Shikikan. Bahkan, apabila dipandang perlu, ketua dapat menghentikan sidang. Dalam persidangan, bila anggota hendak angkat bicara, ia harus mendapat izin dari ketua (Pasal 4), demikian pula halnya dengan pegawai Gunseikanbu yang hadir dalam persidangan (Pasal 8). Untuk kepentingan perundingan, bila dipandang perlu, ketua dapat menunjuk anggota-anggotanya untuk membentuk *Biinkakai* (Panitia Kecil) dan *Tokubetsu Iinkai* (Panitia Istimewa), seperti halnya pada Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia (DPA RI) saat ini yang dilengkapi dengan badan-badan seperti Badan Pekerja, Komisi-komisi, Panitia Hoc, dan Sekretariat. Sidang-sidang Chuo Sangi-in bersifat "tertutup dan terbuka". Sidang terbuka, dalam arti dapat dihadiri oleh wakil-wakil dari Angkatan Laut, wartawan, serta pembesar-pembesar lainnya dari Pemerintah Pendudukan Militer Jepang.

Mengenai siapa yang diundang diatur oleh *Zimukyoku*. Sangat dibatasinya kegiatan Chuo Sangi-in memperlihatkan bahwa pemerintah militer Jepang takut akan tuntutan rakyat yang semakin kuat, Jepang hanya akan sebatas meminta nasihat dari Chuo Sangi-in. Selain itu, campur tangan Jepang dalam bentuk pemberian nasihat dilakukan oleh Zimukyoku, yang dapat dikatakan sebagai "pembimbing" bagi Chuo Sangi-in.

Pembentukan Chuo Sangi-in memperlihatkan bahwa ternyata Jepang mempunyai suatu pemikiran tersendiri untuk membentuk sebuah dewan yang mirip dengan Volksraad di masa Pemerintah Kolonial Belanda, namun dengan corak organisasi dan fungsinya berbeda dari Volksraad. Perbedaan ini diperjelas oleh pernyataan resmi Pemerintah Pendudukan Militer Jepang yang menandaskan bahwa tidak ada pegawai pemerintah yang duduk dalam dewan ini. Perbedaan ini adalah wajar jika dilihat dari berbagai situasi perang yang membutuhkan struktur dan fungsi tertentu. Volksraad adalah suatu dewan yang dibentuk dalam keadaan damai yang fungsinya didasarkan atas asas liberal parlementer, sehingga para anggotanya mempunyai kesempatan berinisiatif dan mengajukan resolusi yang meminta pemerintah untuk mengoreksi sikapnya mengenai masalah tertentu. Tentu saja hal ini pun tidak berarti bahwa semua yang diajukan oleh para anggota Volksraad diterima oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, lembaga negara yang mempunyai fungsi sama dengan Chuo Sangi-in adalah DPA RI. Menurut Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, dewan ini berkewajiban

Pembentukan Chuo Sangi-in memperlihatkan bahwa ternyata Jepang mempunyai suatu pemikiran tersendiri untuk membentuk sebuah dewan yang mirip dengan Volksraad

untuk memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul-usul kepada pemerintah. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dewan ini hanya sebatas menjadi badan penasihat.

Pendapat Ir. Soekarno sehubungan dengan dibentuknya Chuo Sangi-in, bila dibandingkan dengan Volksraad, adalah meskipun ada ketidakberdayaan, dalam kenyataannya anggota Volksraad dapat dengan bebas mengritik pemerintah dengan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan hampir semua aspek Pemerintah Kolonial. Akan tetapi tidak demikian dengan Chuo Sangi-In Hal ini semakin nyata ketika Pemerintah Pendudukan Militer Jepang menerangkan bahwa para anggota harus sadar bahwa tidak ada tempat bagi orang Indonesia yang bertujuan selain kehendak Jepang.

dalam kenyataannya anggota Volksraad dapat dengan bebas mengritik pemerintah dengan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan hampir semua aspek Pemerintah Kolonial.

4.3 Keanggotaan Chuo Sangi-in

Dalam Osamu Seirei No. 36 Tahun 1943 tentang pembentukan Chuo-Sangi-in disebutkan bahwa Chuo Sangi-in terdiri dari para anggota Chuo Sangi-in dan Sekretariat Chuo Sangi-in, atau yang disebut Zimukyoku (Pasal 2). Yang menjadi anggota Chuo Sangi-in adalah mereka yang diangkat oleh Saiko Shikikan dan mereka yang dipilih untuk mewakili daerah (*Shu* dan *Tokubetsu-shi*), serta yang diusulkan oleh daerah istimewa (*kochi*). Banyaknya anggota adalah sebagai berikut:

1. Anggota yang diangkat oleh Saiko Shikikan adalah 23 orang;
2. Anggota yang dipilih dari antara dan oleh anggota Shu Sangi-kai dan Tokubetsu Shi Sangi-kai (dari tiap Shu dan Tokubetsu-shi masing-masing satu orang), jumlah seluruhnya 18 orang; dan
3. Anggota yang diusulkan dari Kochi adalah dua orang.

Dalam penjelasan Osamu Kanrei No. 36 dan 37 Tahun 1943 yang dikeluarkan oleh Gunseikan, dinyatakan bahwa agar suara rakyat yang sebenarnya dapat diperhatikan oleh pemerintah, maka Pegawai Pangreh Praja tidak diangkat sebagai anggota Chuo Sangi-in, baik di pusat maupun di daerah. Para Pangreh Praja dibiarkan fokus pada jabatannya saja. Menurut Pasal 4 Osamu Seirei 36 Tahun 1943, Ketua (*Gicho*) dan Wakil Ketua (*Huku Gicho*) dari Chuo Sangi-in dipilih oleh anggota-anggota Chuo Sangi-in. Tetapi, dalam kenyataannya, seluruh keputusan tetap berada di tangan Saiko Shikikan, sebagaimana terjadi dalam pemilihan Wakil Ketua Chuo Sangi-in yang pertama. Seperti telah disebutkan di atas, Chuo Sangi-in terdiri dari para anggota dan

Zimukyoku. Zimukyoku ini terdiri dari dua bagian (*ka*), yaitu Bagian Urusan Umum (Shomu-ka) yang mengurus hal-hal tentang urusan umum, keuangan, dan surat menyurat, serta Bagian Perundingan (Gizi-ka) yang melakukan persiapan persidangan, menjalankan pekerjaan juru bahasa (penerjemah), mengatur perundingan, membuat catatan perundingan, mengadakan hubungan dengan para anggota Chuo Sangi-in, dan mengurus hal-hal yang berhubungan dengan luar, serta mengurus hal-hal yang tidak termasuk pada pekerjaan Shomu-ka. Keanggotaan Zimukyoku terdiri dari:

1. Kepala Kantor satu orang;
2. Kepala Bagian atau *Kacho*, dua orang;
3. Pegawai Tata Usaha atau *Kyoku-zuki*, enam orang, tiga di antaranya diangkat dari pegawai negeri penduduk Jawa;
4. Penulis atau *Syoki* yang terdiri dari beberapa orang Jepang dan pegawai negeri penduduk Jawa; dan
5. Juru bahasa atau *Tsuyaku*.

Dalam persidangan Chuo Sangi-in, Ketua Chuo Sangi-in memimpin dan mengatur sidang. Apabila ketua tidak dapat menghadiri persidangan karena sesuatu hal, maka wakil ketua menggantikan ketua dalam jabatannya. Kemudian, bila ketua dan wakil ketua sama-sama berhalangan, maka salah seorang anggota yang ditunjuk oleh Saiko Shikikan dapat diangkat untuk mewakili ketua dalam jabatannya. Lama jabatan anggota Chuo Sangi-in adalah satu tahun, tetapi bila diangkat seorang anggota baru untuk mengisi jabatan yang kosong, maka lama jabatannya adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya. Seperti yang telah disebutkan di atas, selain anggota yang diangkat oleh Saiko Shikikan, terdapat pula anggota yang merupakan wakil dari Shu dan Tokubetsu-shi. Dalam hal ini, anggota tersebut ditunjuk oleh *Shuchokan*, jadi bukan dipilih oleh dan dari para anggota Shu atau Tokubetsu-shi, seperti yang terdapat dalam penjelasan Osamu Seirei No. 36 Tahun 1943. Sesudah menunggu Shu dan Tokubetsu-shi menetapkan anggotanya sebagai wakil dari daerahnya masing-masing, maka pada tanggal 4 Oktober 1943, diumumkanlah nama-nama anggota Chuo Sangi-in yang diangkat, baik oleh Saiko Shikikan maupun yang mewakili daerah diumumkan. Yang diangkat Saiko Shikikan adalah sebagai berikut:

1. dr. Abdul Rasyid
2. dr. Buntaran Martoatmojo
3. Kiai Haji Bagus Hadikusumo

Dalam persidangan Chuo Sangi-in, Ketua Chuo Sangi-in memimpin dan mengatur sidang.

4. Ki Hajar Dewantara
5. Kiai Haji Abdul Halim
6. Drs. Mohammad Hatta
7. Prof. Husein Jayadiningrat
8. R.M.A.A. Kusumo Utoyo
9. Liem Thwan Tik
10. Kiai Hadji Mas Mansur
11. Oey Tiong Tjoei
12. Oey Tjong Hauw
13. R. Otto Iskandar Dinata
14. R. Ruslan Wongsokusumo
15. dr. Samsi Sastrawidagda
16. Mr. R. Samsudin
17. Mr. R. Sartono
18. R. Sukarjo Wiryopranoto
19. Ir. Soekarno
20. P.A. Suryodiningrat
21. R. Panji Suroso
22. Kiai Haji Wahid Hasyim
23. K.R.M.T.H. Wuryaningrat

Dalam konferensi itu dibicarakan masalah hubungan tertutup antara Jepang, Manchukuo, Cina, Filipina, Thailand dan Burma. Hal ini mengecewakan orang-orang Indonesia ...

Di antara anggota yang diangkat, maupun yang ditunjuk untuk mewakili daerah, terdapat 21 orang dari golongan nasionalis. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan kaum nasionalis lebih baik, jika dibandingkan dengan kedudukannya dalam Volksraad pada masa sebelumnya. Selain itu, dari golongan Islam terdapat enam orang yang terpilih, sementara dari golongan Pangreh Praja, yang sesungguhnya tidak akan diikutsertakan, ternyata setelah diumumkan terdapat nama-nama anggota sebanyak delapan orang. Lalu, terdapat tiga orang non-Indonesia (Cina). Pada sidang pertama Chuo Sangi-in tanggal 1 Juli 1943, dilantiklah secara resmi Ketua Chuo Sangi-in, yaitu Ir. Soekarno, serta dua Wakil Ketua, yaitu R.M.A.A. Kusumo Utoyo dan dr. Buntaran Martoatmojo. Pelantikan dilakukan oleh Zimukyokucho. Pada tanggal 5–6 November 1943 di Tokyo, diadakan Konferensi Asia Timur Raya. Indonesia tidak diundang, namun hanya sebagai peninjau. Dalam konferensi itu dibicarakan masalah hubungan tertutup antara Jepang, Manchukuo, Cina, Filipina, Thailand dan Burma. Hal ini mengecewakan orang-orang Indonesia yang ketika itu merasa sebagai salah satu anggota Asia Timur Raya. Maka, untuk

menghilangkan rasa, serta menarik perhatian orang-orang Indonesia, diumumkan oleh Pemerintah Militer (*Gunsei*) bahwa beberapa tokoh "diundang sebagai delegasi Indonesia ke Tokyo, yang terdiri dari Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, dan K.H. Bagus Hadikusumo, diantarkan oleh dua orang Jepang, yaitu Miyoshi dan Terada Kuchi untuk menyatakan terima kasih pada Tenno Heika atas kemurahan hatinya atas kesempatan untuk bekerja sama dalam pemerintahan militer". Delegasi Chuo Sangi-in tersebut tiba di Tokyo pada tanggal 15 November 1943. Seluruh surat kabar di Indonesia menyiarkan kunjungan ini. Begitu pula dengan Kantor Penerangan di Tokyo yang mengumumkan kunjungan ini, bahwa atas nama seluruh penduduk Indonesia, delegasi menyatakan terima kasihnya atas diberikannya kesempatan untuk bekerja sama dengan pemerintah Jepang.

Selama kunjungan delegasi Chuo Sangi-in ini di Jepang, orang Jepang memperlakukan mereka secara berlebihan. Selain itu, mereka diperlihatkan pabrik-pabrik baja, amunisi, serta kapal dengan produksi penuh, untuk kepentingan perang. Pada kesempatan pertemuan dengan Perdana Menteri Tojo di Tokyo, Soekarno meminta keterangan kepada Tojo mengenai status Indonesia. la juga mengulang permintaan para nasionalis Indonesia agar diizinkan untuk mengibarkan bendera "Sang Merah Putih", menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya", serta mendesak agar Indonesia dapat disatukan di bawah satu pemerintahan. Namun, semua permintaan tersebut ditolak. Tojo tidak dapat memberi jaminan kepada Soekarno, kecuali sesudah Jepang menang atas Sekutu dalam peperangan, maka barulah pemerintah Jepang akan berusaha memenuhi permintaan para nasionalis. Demikian jawaban yang diberikan oleh Perdana Menteri Tojo.

Selama kunjungan delegasi Chuo Sangi-in ini di Jepang, orang Jepang memperlakukan mereka secara berlebihan.

Setelah satu tahun masa keanggotaan Chuo Sangi-in, pada tanggal 5 September 1944 dikeluarkanlah Osamu Seirei No. 36 tentang tindakan istimewa terhadap lamanya masa jabatan keanggotaan Chuo Sangi-in, serta Shu dan Tokubetsu-shi, yaitu lamanya jabatan dilanjutkan atau diperpanjang selama satu tahun, terhitung mulai bulan Oktober 1944. Peraturan ini berlaku sejak diumumkannya pada tanggal 5 September 1944. Situasi perang yang semakin memburuk bagi kedudukan Jepang mengharuskan Jepang untuk mengambil tindakan guna mempertahankan pengaruhnya di antara penduduk Indonesia. Maka, berdasarkan Sidang Istimewa ke-SS Parlemen Jepang di Tokyo, pada tanggal 7 September 1944, dinyatakan oleh Perdana Menteri Koiso kepada seluruh dunia bahwa Hindia Timur (Indonesia)

akan diberi kemerdekaan di kemudian hari. Pernyataan ini kemudian dikenal sebagai "Janji Koiso". Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 10 September 1944, Pemerintah Pendudukan Militer Jepang mengumumkan nama-nama anggota Chuo Sangi-in yang baru, yang diangkat berdasarkan Osamu Seirei No. 37 tertanggal 15 September 1944.

4.4 Sidang Pertama Chuo Sangi-in, 16–20 Oktober 1943

Pada tanggal 5 Oktober, dikeluarkan maklumat Saiko Shikikan Nomor 3 tentang panggilan sidang Chuo Sangi-in yang pertama, yang diperintahkan untuk diadakan pada tanggal 16 Oktober di Jakarta.[510] Lamanya sidang ditetapkan selama lima hari. Sehubungan dengan itu, maka pada tanggal 15 Oktober 1943 diadakan pertemuan permulaan. Pada hari itu, *Somubucho* (Kepala Departemen Urusan Umum), Zimukyokucho, dan pembesar-pembesar Jepang lainnya, serta para anggota Chuo Sangi-in menghadap Saiko Shikikan di Istana Gambir, untuk melaporkan bahwa seluruh anggota Chuo Sangi-in telah berkumpul di Jakarta. Dengan pimpinan Utada, seorang Zimukyokucho, dilakukan ziarah ke Makam Pahlawan Jepang di Menteng Pulo dan dilanjutkan ke Kuil Chureido yang menempati bekas Gereja Willeniskerk (sekarang Gereja Immanuel). Upacara ini dihadiri oleh Saiko Shikikan, Gunseikan, Somubucho, wakil-wakil dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut, serta pembesar-pembesar Jepang lainnya. Setelah berziarah, mereka kemudian menuju Gedung Chuo Sangi-in di Pejambon (sekarang Gedung Departemen Luar Negeri). Pada kesempatan itu, Zimukyokucho memberi petunjuk tentang acara sidang setiap harinya kepada para anggota Chuo Sangi-in, berikut hal-hal tentang pemilihan ketua, upacara, dan sebagainya, yang keseluruhannya harus dilakukan pada sidang Chuo Sangi-in yang akan diselenggarakan pada periode selanjutnya.

Pada tanggal 5 Oktober, dikeluarkan maklumat Saiko Shikikan Nomor 3 tentang panggilan sidang Chuo Sangi-in yang pertama, ...

Chuo Sangi-in memulai sidangnya yang pertama dengan pernyataan terima kasih Jepang atas kesediaan rakyat Indonesia untuk bekerja sama dalam pemerintahan pendudukan militer Jepang. Sesuai dengan rencana, pada 16 Oktober 1943 pukul dua siang diadakan upacara pembukaan Sidang Pertama Chuo Sangi-in.[511] Setelah dilakukan upacara penghormatan ke arah Tokyo dan mengheningkan

510 Arniati Prasedyawati Herkusumo, *Op.Cit.*, hlm. 45
511 *Soeara Asia*, 17 Oktober 1943

cipta untuk arwah pahlawan Jepang yang merupakan keharusan mutlak, dibacakan perintah untuk membuka sidang. Pada upacara pembukaan ini, Saiko Shikikan memberikan nasihatnya kepada seluruh anggota Chuo Sangi-in yang antara lain menyatakan hal-hal berikut:

> "... dasar kemenangan Jepang yang tidak mungkin dikalahkan sudah didirikan di seluruh Asia Timur Raya, tetapi Amerika dan Inggris kini sedang mengadakan serangan balasan. Oleh karena itu, rakyat di seluruh Asia Timur Raya harus tampil ke muka untuk mencapai kemenangan akhir dalam perang dengan memperkokoh persatuan dan tenaga. Maka, dibentuknya Chuo Sangi-in dimaksudkan agar Chuo Sangi-in dapat menyadarkan seluruh rakyat Jawa akan kehendak Jepang. Berdasarkan tiga pernyataan tersebut di atas, tampak jelas keinginan Jepang yang sebenarnya, yaitu bantuan perang. Dalam hal ini, Chuo Sangi-in tampil sebagai perantara untuk maksud Jepang tersebut. Adapun tujuan pemerintah militer Jepang di Indonesia untuk mendirikan Chuo Sangi-in adalah agar lembaga tersebut menyadarkan kehendak Pemerintah Militer Jepang kepada seluruh rakyat Indonesia supaya usaha pemerintahan militer Jepang menjadi luas dan menjadi semakin kuat.[512] Belum lagi setelah dibacakannya ucapan selamat dari Perdana Menteri Tojo dan Saiko Shikikan Tentara Umum Selatan, Toskazu Terauchi, yang berisi harapan agar Chuo Sangi-in memenuhi kewajibannya dan menjadi perantara antara Pemerintah Pendudukan Militer Jepang di Jawa dengan rakyat serta menjadi pendorong yang dapat mengerahkan seluruh tenaga penduduk Jawa. Selanjutnya, R.M.A.A. Koesoemo Oetojo membacakan sumpah Chuo Sangi-in yang berbunyi sebagai berikut: "... anggota Chuo Sangi-in akan menyumbangkan tenaga, jiwa, dan raga untuk memenuhi kewajiban, sesuai dengan kehendak Pemerintah Militer Jepang, agar

Pada upacara pembukaan ini, Saiko Shikikan memberikan nasihatnya kepada seluruh anggota Chuo Sangi-in

512 *Ibid.*

kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya segera tercapai." Teks sumpah tersebut dibuat oleh Zimukyoku dan harus dibacakan pada setiap upacara pembukaan sidang. Dalam hal ini, para anggota Chuo Sangi-in, atau katakanlah para nasionalis, tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menuruti apa yang digariskan. Pada sidang hari pertama, Gunseikan memberikan nasihatnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila para anggota Chuo Sangi-in menyadari maksud dan tujuan Perang Asia Timur Raya dan membicarakan masalah yang dirundingkan dengan anggapan yang luas, maka akan tercapailah cita-cita pemerintah Jepang. Maksud dari ucapan ini adalah bahwa Chuo Sangi-in dibentuk untuk membantu atau memperkuat kedudukan Pemerintah Pendudukan Militer Jepang, dan dalam merundingkan suatu masalah, hendaknya diperhatikan keadaan yang sebenarnya. Sidang Chuo Sangi-in berjalan lambat, karena para pejabat Jepang yang berbicara di muka sidang menggunakan bahasa Jepang yang tidak dimengerti oleh anggota-anggota Chuo Sangi-in. Setelah itu, baru diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh juru bahasa Taniguchi.

Setelah disahkan Saiko Shikikan, dalam sidang tanggal 17 Oktober 1943, diumumkan pengangkatan ketua dan dua wakil ketua, sehingga selanjutnya, pimpinan sidang diserahkan kepada Ir. Soekarno.

Setelah disahkan Saiko Shikikan, dalam sidang tanggal 17 Oktober 1943, diumumkan pengangkatan ketua dan dua wakil ketua, sehingga selanjutnya, pimpinan sidang diserahkan kepada Ir. Soekarno. Saat itu, Soekarno memberikan pidato sambutan atas terpilihnya ia menjadi Ketua ChuoSangi-in:

"Sidang yang terhormat, kira-kira setengah jam yang lalu, Paduka Yang Mulia Saiko Shikikan berkenan mengangkat saya menjadi Ketua Chuo Sangi-in. Saya mengucapakan terima kasih kepada tuan-tuan bahwa tuan-tuan kemarin telah memilih saya menjadi calon ketua. Kepada Allah subhanahu wata'ala saya mendoa moga-moga kepercayaan dan kehormatan yang dilimpahkan oleh Paduka Yang Mulia Saiko Shikikan dan tuan-tuan atas diri saya itu, tidak tersia-sialah hendaknya.

Tuan-tuan yang terhormat, ini hari adalah hari yang amat penting. Pada hari ini buat pertama kali dalam sejarah –politik Indonesia, seorang bangsa Indonesia menjadi ketua resmi dari satu sidang perwakilan rakyat. Hal itu adalah satu simbol, satu lambang yang amat penting! Pada hari ini, kita memulai satu sejarah baru! Beberapa bulan yang lalu, Perdana Menteri Hideki Tozyo mengucapkan perjanjiannya yang termashyur. Tidak lama kemudian dari pada itu, Pemerintah Balatentara di sini mengumumkan akan diadakannya Chuo Sangi-in. Kemarin itu Chuo Sangi-in dibuka, sekarang ia punya ketua bangsa Indonesia. Sungguh cepat jalannya sejarah di bawah pemerintahan Balatentara Dai Nippon! Warisan-warisannya Pemerintahan Belanda dilikuidasi dengan kecepatan yang mengagumkan dan penyusunan masyarakat.

Paduka Yang Mulia Saiko Shikikan tempo hari dengan tegas mengatakan bahwa Chuo Sangi-in ialah langkah pertama kepada apa yang dijanjikan oleh Paduka Yang Mulia Perdana Menteri Tozyo. Beliau dan juga Somubucho menyebutkan Chuo Sangi-in satu ujian. Saya mendoakan kepada Tuhan supaya ujian ini kita dapat selesaikan dengan sempurna agar supaya lekaslah kita dikaruniai oleh Pemerintah dengan tindakan kemudian yang lebih luas. Insyafkanlah. Tuan-tuan, nasib Indonesia di masa datang adalah di tangan kita sekarang!"[513]

Soekarno juga menekankan bahwa Perdana Menteri Tojo telah memberikan janji yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia, walaupun tetap dalam usaha untuk mencapai kemerdekaan tidak terlepas dari kerja keras yang dilakukan oleh rakyat.

Pada saat Soekarno berpidato setelah dipilih menjadi ketua Chuo Sangi-in, terlihat bahwa apa yang ia sampaikan di hadapan para anggota Chuo Sangi-in lainnya adalah bentuk kepercayaan dan optimisme terhadap janji dari pemerintah Jepang yang direpresentasikan oleh Perdana Menteri Jepang pada saat itu, yakni Perdana Menteri Tojo yang telah memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia. Soekarno juga menekankan bahwa Perdana Menteri Tojo telah memberikan

513 *Soeara Asia*, 18 Oktober 1943

janji yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia, walaupun tetap dalam usaha untuk mencapai kemerdekaan tidak terlepas dari kerja keras yang dilakukan oleh rakyat.

Pokok pembicaraan dalam sidang pertama Chuo Sangi-in adalah, "bagaimana cara dan jalan yang praktis dalam menggiatkan usaha Perang Asia Timur Raya yang dapat disumbangkan oleh penduduk Jawa?". Somubucho atau Kepala Departemen Urusan Umum mcnerangkan maksud dari pertanyaan atau permintaan nasihat Saiko Shikikan, yaitu tentang bagaimana cara memperkuat tenaga perang dengan menggerakkan semua sumber, baik tenaga manusia maupun benda. Menurut Somubucho, usaha memperbesar tenaga perang dapat dilakukan apabila tenaga rakyat dipersatukan.

Somubucho atau Kepala Departemen Urusan Umum mcnerangkan maksud dari pertanyaan atau permintaan nasihat Saiko Shikikan, ...

Selain itu, harus diperhatikan juga masalah di garis belakang, yaitu bagaimana cara untuk membesarkan hati para prajurit di medan perang dengan melindungi urusan rumah tangga mereka. Selanjutnya, dikatakannya bahwa kaum buruh mempunyai peranan penting, misalnya untuk membuat lapangan udara atau membuka sumber-sumber bahan mentah di berbagai daerah di Indonesia. Mengenai masalah yang berhubungan dengan kebendaan kemudian dijelaskan oleh Somubucho, bahwa hal yang penting adalah menghilangkan kebiasaan menggunakan barang-barang buatan luar negeri.

Pernyataan yang terakhir yang tersebut di atas tampak sangat bertentangan dengan keadaan rakyat Indonesia, yang sejak pendudukan Jepang tidak pernah atau tidak mampu untuk membeli barang-barang buatan luar negeri, karena segala sesuatunya diambil oleh Jepang dengan dalih untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Selain itu, dibicarakan pula masalah cara memperbesar hasil bumi, agar dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan juga memperbesar kekuatan perang. Bila dikatakan untuk kepentingan perang, memang dapat dibenarkan, tetapi sulit rasanya untuk dikorelasikan upaya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Bahkan para petani dipaksa untuk menyerahkan padinya, ataupun diharuskan menjual padinya dengan harga yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Pendudukan Militer Jepang. Semua ini membuat para petani di Jawa semakin menderita.

Dalam merundingkan pertanyaan Saiko Shikikan, sesuai dengan penjelasan Somubucho, Ketua Chuo Sangi-in memutuskan untuk membentuk empat *bunkakai* (panitia kecil). Bunkakai I membahas soal memperkuat dan melindungi prajurit Peta, Bunkakai II membahas soal pengerahan tenaga pekerja untuk keperluan perang dan masyarakat,

Bunkakai III menjelaskan tentang meneguhkan susunan penghidupan rakyat dalam masa perang, sedangkan Bunkakai IV membahas soal memperbanyak hasil produksi.

Setelah masing-masing Bunkakai mengadakan perundingan, maka pada sidang hari keempat masing-masing melaporkan hasil perundingannya. Bunkakai I memutuskan agar setiap penduduk Jawa dapat membantu usaha pembentukan tentara Peta dan Heiho, sehingga perlu dibentuk suatu organisasi yang teratur, seperti membentuk Pusat Pimpinan Tata Usaha Pembantu Prajurit Peta yang terdiri dari pemimpin-pemimpin Indonesia dan orang-orang yang terkemuka di bawah pengawasan Gunseikan. Tugas dari badan ini adalah untuk menyelenggarakan hal-hal yang berhubungan dengan rakyat, misalnya membangkitkan semangat, membantu pendaftaran, mengumpulkan sumbangan uang, juga mengurus penghidupan keluarga prajurit. Badan ini tidak saja didirikan di pusat, tetapi juga di daerah-daerah. Selain itu, diusulkan pula agar diadakan pendidikan militer secepatnya di Jawa, terutama di tingkat sekolah menengah.

Bunkakai II memutuskan perlunya dibentuk badan yang mengurus pengumpulan buruh, serta membangkitkan semangat bekerja, sehingga mereka dengan sukarela dapat dipekerjakan di daerah-daerah lain. Badan ini dibentuk di masing-masing shu, kochi, dan tokubetsu-shi dengan berhubungan dengan kepala-kepala *ken*, *gun*, *son*, dan *ku*. Untuk mencukupi kebutuhan kaum buruh dengan segera, maka perlu dicatat nama-nama mereka yang ingin bekerja di luar Jawa ataupun di Jawa. Badan ini juga harus membantu pengiriman uang ataupun surat-surat dari buruh-buruh yang ditujukan kepada keluarganya. Dalam hal ini, keuangan badan ini akan mendapat bantuan dari Gunseikanbu.

Bunkakai III berpendapat bahwa dalam meneguhkan susunan penghidupan rakyat di masa perang, perlu diperkuat semangat tolong-menolong. Dan untuk kepentingan itu, perlu didirikan Rukun Kampung, Rukun Desa, dan sebagainya. Selain itu, rakyat harus menghemat keperluan sehari-hari, misalnya dalam hal berpakaian, jika perlu mengubah kebiasaan dan adat istiadat yang tidak praktis, seperti pakaian adat Jawa.

Bunkakai III berpendapat bahwa dalam meneguhkan susunan penghidupan rakyat di masa perang, perlu diperkuat semangat tolong-menolong.

Bunkakai IV memutuskan untuk melakukan perbaikan dalam produksi makanan dan penjualan padi, serta palawija. Selain itu, untuk mencukupi kebutuhan pakaian, dianjurkan untuk membangun industri kecil, misalnya pemintalan benang dengan menggunakan tangan

sendiri, pembuatan sabun, dan penyediaan alat-alat pertanian. Semua jawaban atau keputusan Bunkakai tersebut di atas didasarkan atas penjelasan Somubucho. Untuk menyusun keempat keputusan tersebut, sebagai jawaban atas pertanyaan Saiko Shikikan, maka Ketua Chuo Sangi-in membentuk Panitia Istimewa atau *Tokubetsu Iinkai*. Pada tanggal 20 Oktober 1943, telah disepakati jawaban atas pertanyaan Saiko Shikikan sebagai berikut:

1. Memperkuat dan melindungi para prajurit Peta dan Heiho;
2. Menggerakkan tenaga kerja untuk keperluan masyarakat dan perang;
3. Meneguhkan susunan penghidupan masyarakat dalam masa perang; dan
4. Memperbanyak hasil bumi.

Keputusan Chuo Sangi-in yang mendapat perhatian utama dari Saiko Shikikan adalah mengenai usaha menggerakkan tenaga pekerja untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah. Sehubungan dengan itu, pada 5 dan 6 November 1943 diadakan pertemuan *Naiseibucho* (para kepala pangreh praja) dari masing-masing Shu di Jawa, untuk membicarakan tindakan apa yang akan diambil untuk memenuhi putusan tersebut.

Sejak tahun 1943, Jepang mengadakan propaganda yang menyatakan bahwa romusha adalah "prajurit pekerja" atau "prajurit ekonomi" yang digambarkan sebagai orang yang menunaikan tugas suci untuk Angkatan Perang Jepang.

Sejak tahun 1943, Jepang mengadakan propaganda yang menyatakan bahwa romusha adalah "prajurit pekerja" atau "prajurit ekonomi" yang digambarkan sebagai orang yang menunaikan tugas suci untuk Angkatan Perang Jepang. Pada kenyataannya, mereka tidak lebih adalah budak. Diperkirakan jumlah mereka yang dikirim ke luar Jawa adalah kira-kira 300,000 orang, walaupun menurut Kepala Pemerintahan Militer di Jawa, Yamamoto, jumlah tenaga kerja yang dikirim jumlahnya adalah sekitar 140,000 sampai 160,000 orang saja. Pada bulan November 1943, didirikan *Romukyokai* (Perhimpunan Tenaga Kerja) di daerah-daerah. Dalam usaha mengerahkan rakyat pedesaan, pada bulan Januari 1944, Jepang memperkenalkan wadah baru, yaitu Tonarigumi (Rukun Tetangga). Tonarigumi ini merupakan usaha Jepang yang paling ambisius untuk menembus desa-desa dan guna memobilisasi kaum petani untuk keperluan perang. Lalu, untuk menjamin berfungsinya badan itu, Jepang memilih orang-orang yang agak terkemuka di desa bersangkutan untuk menjadi Kepala Tonarigumi, misalnya para pemuka agama atau adat, dan lain-lain. Sebagai tindakan yang diambil Pemerintah Pendudukan Militer Jepang terhadap jawaban Chuo Sangi-in tentang hal memperkuat dan

melindungi prajurit Peta dan Heiho, maka pada tanggal 8 Desember 1943 dibentuk *Chuo Honbu* (Kantor Pusat) di Jakarta, Chuo Honbu di masing-masing Shu, dan *Shibu* (Kantor Cabang) di masing-masing ken dan gun. Tugas badan ini adalah untuk mengadakan propaganda pembelaan tanah air. Selain itu, pada tanggal 11 November 1943, diadakan latihan militer bagi guru-guru sekolah menengah dan sekolah tinggi selama satu bulan, agar setelah mereka kembali ke tempat masing-masing, mereka dapat mengajarkan latihan militer yang didapatnya kepada murid-muridnya.

Dalam hal yang menyangkut kehidupan rakyat, selain pangan, yang juga penting adalah masalah sandang. Pada jaman penjajahan Belanda, masalah sandang di Hindia Belanda sangat tergantung pada impor dari negeri Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, untuk mengatasi hal tersebut, diusahakan untuk mengadakan percobaan penanaman kapas dan usaha lain karena pada masa pendudukan ini perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang sandang mengalami kekurangan bahan baku, maka usaha tersebut lambat laun ditutup. Percobaan mencari pengganti benang kapas dilakukan secara intensif. Bahkan karena keadaan ekonomi yang semakin buruk bagi rakyat, banyak di antara mereka yang mengganti pakaiannya dengan karung, bahkan lembaran karet. Pada bulan April 1944, oleh pemerintah pendudukan diadakan pekan pengumpulan pakaian untuk rakyat jelata.

Dalam usaha memperbesar produksi hasil bumi, petanilah yang mendapat beban paling berat. Pada usaha itu, petani hanya diperbolehkan untuk mengambil 40 persen dari hasil setiap panen. Bagian yang 30 persen harus diserahkan kepada pemerintah melalui *Kumiai* (organisasi pembelian beras), yang kemudian akan dibeli dengan harga yang telah ditentukan pemerintah, sementara 30 persennya lagi diserahkan untuk bibit yang harus diserahkan kepada lumbung desa. Hal ini menyebabkan para petani tidak mempunyai cukup beras untuk dirinya sendiri. Di samping itu, kadang-kadang mereka dipaksa untuk menjadi romusha. Keadaan ini merupakan tindakan yang berlawanan dengan gagasan untuk meningkatkan produksi untuk masyarakat. Bagi rakyat, tindakan pemerintah Jepang telah mengakibatkan kesengsaraan yang berlipat ganda. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pendudukan Jepang yang didasarkan keputusan Chuo Sangi-in ini memperlihatkan bahwa, secara tidak disadari ataupun disengaja, keputusan Chuo Sangi-in lebih banyak membawa akibat yang merugikan bagi rakyat Jawa. Hal ini terutama tampak dalam

Dalam usaha memperbesar produksi hasil bumi, petanilah yang mendapat beban paling berat.

masalah tenaga kerja dan penambahan hasil produksi.

Sementara itu, dalam rangka memperoleh dukungan yang sangat besar dari penduduk di wilayah Bogor yang potensial akan hasil buminya, pemerintah di Bogor pada 14 Mei 1944 mengundang para anggota Chuo Sangi-in untuk berkunjung ke perkebunan di Bogor. Setibanya di Bogor, para anggota Chuo Sangi-in diterima oleh Dr. Hakaide, Kepala Dinas Perkebunan Bogor yang menjelaskan tentang berbagai percobaan yang telah dilakukan untuk menambah penyediaan bahan makanan dan bahan untuk pakaian rakyat. Pada usaha penyediaan bahan makanan, dilakukan percobaan menanam tanaman "cantel", yaitu sejenis jagung yang didatangkan dari beberapa negara Asia Timur. Sementara dalam rangka menambah bahan pakaian, ditanam tanaman kapas, macam-macam sisal, atau rosela.[514]

Selanjutnya, Hakaide mengajak para anggota Chuo Sangi-in melihat ke suatu ruangan yang terdapat banyak tanaman seperti padi, jagung, dan ubi. Selain itu, di ruangan tersebut juga ada benang yang dibuat dari kapuk randu bercampur serat, serta benang yang terbuat dari kapas yang digunakan sebagai bahan baku membuat pakaian. Setelah mengunjungi Bogor, pada 12 Mei para anggota Chuo Sangi-in juga mengadakan kunjungan ke Sukabumi, yaitu ke Sekolah Polisi di Sukabumi dan disambut oleh ratusan murid di sekolah itu. Rombongan Chuo Sangi-in saat itu dipimpin oleh Zimukyokucho dan Gicho-nya, yaitu Ir. Soekarno. Saat acara kunjungan tersebut, Soekarno melakukan *seikeirei* (membungkukkan badan) dan *mokuto* (mengheningkan cipta), kemudian ia memperkenalkan para anggota Chuo Sangi-in kepada para murid Sekolah Polisi. Pada kunjungan tersebut Soekarno berpidato:

> "Tenaga sepuluh tahun harus kita kumpulkan dalam setahun ini. Tuan-tuan bukan kaum pekerja biasa, tetapi prajurit yang akan berjuang untuk mencapai kemenangan akhir, bukan saja pada masa perang, juga sesudah perang. Azas yang penting sekali bagi kewajiban tuan-tuan ialah bertabiat suci dan berbudi pekerti tinggi. Itulah semangat yang menyusun masyarakat baru.[515]

Saat acara kunjungan tersebut, Soekarno melakukan *seikeirei* (membungkukkan badan) dan *mokuto* (mengheningkan cipta), kemudian ia memperkenalkan para anggota Chuo Sangi-in kepada para murid Sekolah Polisi.

514 Susanto Zuhdi, 2017, *Bogor Zaman Jepang* 1942–1945 (Depok: Komunitas Bambu), hlm. 86
515 *Ibid.*, hlm. 87

4.5 Sidang Kedua Chuo Sangi- in, 30 Januari – 3 Februari 1944 (Penyempurnaan Kekuatan di Jawa)

Pertanyaan yang diajukan oleh Saiko Shikikan dalam Sidang Kedua Chuo Sangi-in ialah "bagaimana cara yang praktis dan nyata dari penduduk untuk dapat menyempurnakan susunan kekuatan di Jawa yang sudah siap melakukan pertempuran, yang akan membawa kemenangan?".[516] Perlu diketahui bahwa sejak Sidang Kedua Chuo Sangi-in ini, para anggota memakai tanda keanggotaan berupa bintang berwarna emas yang dihiasi permata merah dengan bundaran perak di tengahnya. Dalam bundaran tersebut, terdapat gambar pilar yang melambangkan *Kaigido* (Gedung Parlemen Jepang), dan di sebelah belakang terdapat lima huruf kanji yang berbunyi Chuo Sangi-in dan nomor. Di samping itu, mulai digunakan pula pesawat pendengar, untuk mendengarkan terjemahan dalam bahasa Indonesia, sementara pejabat Jepang berpidato guna menghemat waktu.

Pada tanggal 30 Januari 1944, Sidang Kedua Chuo Sangi-in dibuka. Saiko Shikikan memberikan amanatnya, yang antara lain adalah: "... pertempuran di berbagai tempat di Asia Timur Raya hampir mencapai puncaknya, maka merupakan kewajiban bagi penduduk Jawa untuk menyelesaikan perang, dengan mencurahkan segalanya.". Dari pernyataan tersebut, tampak bahwa Jepang saat itu sudah mulai berada di pihak bertahan, dan sebaliknya sekutu menjadi pihak yang menyerang. Walaupun demikian, pada saat itu Ketua Chuo Sangi-in tetap menyambut amanat tersebut dengan mengatakan bahwa ia "akan melaksanakan amanat tersebut". Pada pembukaan sidang, Gunseikan juga memberi nasihat agar Chuo Sangi-in dapat berunding dengan singkat dan tepat tanpa membuang waktu dengan menunjukkan kepandaian berpidato untuk mengritik Jepang, dengan maksud mendapat simpati dari rakyat. Nampaknya, pernyataan ini agak aneh. Apakah Pemerintah Pendudukan Militer Jepang menyadari bahwa pemerintahannya patut menerima kritik? Di samping Gunseikan, seperti pada sidang sebelumnya, Somubucho memberikan penjelasan tentang pertanyaan Saiko Shikikan, yaitu tentang bagaimana cara memperkokoh pembelaan tanah air, memperbanyak-hasil bumi, serta meningkatkan semangat perang yang diuraikan secara panjang lebar. Pada sidang kedua ini, seluruh anggota Chuo Sangi-in hadir, termasuk

Somubucho memberikan penjelasan tentang pertanyaan Saiko Shikikan, yaitu tentang bagaimana cara memperkokoh pembelaan tanah air

516 Arniati Prasedyawati Herkusumo, *Op.Cit.*, hlm. 57

dr. Buntaran dan R. Sukarjo yang telah kembali dari kunjungannya ke Jepang. Pembicaraan sidang diawali dengan usul yang dikemukakan oleh H. Mas Mansur, sehubungan dengan telah diterimanya tanda jasa oleh wakil-wakil Indonesia (Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, dan K.B. Hadikusumo). Dalam membahas pertanyaan Saiko Shikikan, ketua membentuk dua Bunkakai. Bunkakai pertama membahas masalah peningkatan kapasitas pembelaan rakyat, sedangkan Bunkakai kedua membahas masalah peningkatan suplai bahan makanan.

Pada sidang hari ketiga, untuk pertama kalinya, Chuo Sangi-in membicarakan usul-usul yang datang dari pihak anggota. Usul pertama diajukan oleh Ir. A. Sofwan, yaitu tentang pemberantasan penyakit malaria, yang menurut pendapatnya harus diambil tindakan dengan memberikan pertolongan yang sempurna pada penderitanya. Perlu diadakan pembagian pil kina pada rakyat dan diberikan penjelasan cara untuk membasmi penyakit tersebut. Usul ini mendapat sambutan dari dr. A. Rasyid. Dr. Buntaran juga mengusulkan agar didirikan badan penyelidik bahan makanan yang berguna bagi kesehatan yang dapat menggantikan beras. Badan ini harus bekerja sama dengan Pangreh Praja, Badan Pertanian, Chuo Sangi-in, Kehutanan, *Izi Hokokai* (Perhimpunan Kebaktian Dokter), dan *Jawa Hokokai*. Usul ini diperkuat oleh Fathurachman yang menyatakan bahwa memperbanyak bahan makanan berarti menambah kekuatan tenaga ekonomi. Tentang industri kecil (rumah) dan kerajinan tangan diusulkan oleh Ruslan. Menurut Ruslan, hal itu dapat menambah hasil yang sangat dibutuhkan dalam masa perang, termasuk juga untuk mengurangi pengangguran. Usul ini mendapatkan dukungan dari Ir. Rooseno.

... adalah usulan yang diajukan oleh Mr. Samsudin. la mengusulkan agar diadakan perbaikan di kalangan petani dengan memikirkan kebutuhan petani itu sendiri.

Usul yang paling menarik perhatian para anggota Chuo Sangi-in adalah usulan yang diajukan oleh Mr. Samsudin. la mengusulkan agar diadakan perbaikan di kalangan petani dengan memikirkan kebutuhan petani itu sendiri. Usul ini mendapat dukungan dari hampir seluruh anggota Chuo Sangi-in, terutama sekali dari Drs. Mohammad Hatta. Usul Mr. Samsudin ini merupakan usul ataupun pernyataan pertama yang merupakan kritik langsung kepada pemerintah pendudukan, yang selama ini memperlakukan para petani dengan sewenang-wenang. Begitu menariknya usul ini, sehingga Ketua Chuo Sangi-in memutuskan untuk membentuk Panitia Istimewa untuk membahas usul tersebut.

Pada hari itu juga, Panitia Istimewa mengadakan perundingannya, yang kemudian memutuskan bahwa untuk menyebarkan semangat

berbakti, mencapai penyerahan bahan makanan dengan mudah, dan mengadakan pembagian yang sempurna pada rakyat, diusulkan agar pemerintah dapat menetapkan jumlah yang harus diserahkan dan jumlah yang perlu dipertahankan bagi keperluan tiap daerah secara adil. Pada saat itu, walaupun sidang dihadiri oleh beberapa orang Jepang, mereka tidak dapat mengikuti pembicaraan Chuo Sangi-in, terutama perundingan-perundingan Panitia Istimewa, karena mereka tidak mengerti bahasa Indonesia yang menjadi bahasa pengantar dalam sidang tersebut. Baru setelah laporan Panitia Istimewa diserahkan kepada tsuyuku untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang, usul Mr. Samsudin ternyata menimbulkan masalah. Hal itu nampak pada sidang hari terakhir ketika, seperti biasanya, Somubucho menyampaikan pidato penutupan sidang. Setelah menyampaikan terima kasih atas putusan sidang Chuo Sangi-in, dikatakannya dengan nada keras kepada seluruh anggota Chuo Sangi-in bahwa, "... para anggota bukannya bersidang untuk mempertunjukkan kecakapan berpidato atau mengritik saja.".

Baginya, banyak di antara anggota yang masih bersikap kanak-kanak dan tidak dapat merasakan kegentingan di Jawa. Sebagai penutup, ia kembali memperingatkan agar di kemudian hari hendaknya para anggota tetap fokus dalam pokok pembicaraan. Akhir peristiwa tersebut di atas tentu sudah dapat diduga, seperti kebiasaan Pemerintah Pendudukan Militer Jepang. Tidak lama sesudah peristiwa itu, Mr. Samsudin diangkat menjadi *Shicho* di Sukabumi. Maka dengan pengangkatan ini, ia terpaksa berhenti sebagai anggota Chuo Sangi-in. Cara ini merupakan cara yang jitu untuk menutup suara yang tidak diinginkan.

Baginya, banyak di antara anggota yang masih bersikap kanak-kanak dan tidak dapat merasakan kegentingan di Jawa.

Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan Saiko Shikikan, telah dibentuk dua Bunkakai. Setelah mengadakan perundingannya, Bunkakai I menghasilkan keputusan sebagai berikut: *Pertama*, dalam memperteguh persiapan mencegah serangan dadakan oleh musuh, harus diambil tindakan untuk memperdalam kesadaran rakyat di berbagai tempat tentang perlunya mencegah atau menangkis usaha serangan dadakan musuh. Untuk kepentingan itu, para pemimpin harus memberikan penerangan akan arti dari Perang Asia Timur Raya yang sebenarnya, misalnya dengan menggunakan kesempatan, seperti dalam pertemuan-pertemuan, atau melalui perhimpunan Tonarigumi atau badan-badan lain. Selain itu, sebaiknya di perusahaan-perusahaan atau di pabrik-pabrik diadakan penjagaan untuk mengawasi

orang-orang yang masuk dan keluar, serta diadakan pengawasan dan pemeriksaan riwayat hidup pegawai atau pekerja untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. *Kedua*, dalam memperkuat pembelaan rakyat terhadap serangan udara, hendaknya dilakukan latihan-latihan seperti memadamkan kebakaran, membuat lubang perlindungan, dan lain-lain. Hal tersebut sebaiknya ditangani oleh Tonarigumi, juga oleh badan kebaktian penduduk yang akan segera dibentuk.

Bunkakai II memutuskan agar dalam usaha memperbanyak bahan makanan rakyat, diperlukan usaha memelihara kesuburan tanah dengan menggunakan pupuk, serta mengadakan perbaikan tanah pertanian, misalnya dengan memperbanyak saluran air. Untuk menyusun keputusan kedua Bunkakai, sebagai jawaban atas pertanyaan Saiko Shikikan, maka dibentuk Panitia Istimewa. Pada sidang hari terakhir, setelah Panitia Istimewa mengadakan perundingan, dengan suara bulat Chuo Sangi-in menyetujui putusan Panitia Istimewa mengenai tindakan apa yang akan dilakukan Chuo Sangi-in dalam memperbesar kekuatan di Jawa untuk memenangkan perang. Chuo Sangi-in berpendapat bahwa:

1. Di samping tenaga kemiliteran yang kokoh dan kuat dari pemerintah pendudukan militer, yaitu Peta dan Heiho, dibutuhkan susunan tenaga penduduk Jawa, sehingga tiap orang hendaknya menempatkan diri sebagai prajurit untuk mempertahankan tanah air dan untuk menghancurkan Amerika dan Inggris;
2. Perlunya memperteguh persiapan mencegah atau membasmi usaha serangan dadakan musuh dengan cara:
   a. Memperdalam dan memperluas kesadaran rakyat tentang perlunya mencegah dan menangkis serangan musuh;
   b. Meneguhkan persiapan dalam hal mencegah dan menangkis serangan dadakan musuh di berbagai tempat perusahaan yang penting; dan
   c. Menggiatkan bantuan rakyat kepada yang berwajib;
3. Perlunya memperkuat susunan pembelaan rakyat terhadap serangan dari udara;
4. Perlunya memperbanyak hasil bahan makanan dengan cara:
5. Memelihara kesuburan tanah dan memperbaiki cara memupuk;
   a. Memperbaiki jenis padi dan persemaian;
   b. Mencegah kuman-kuman dan hama, serta binatang lain yang dapat menimbulkan kerugian pada tanaman; dan

... dalam memperkuat pembelaan rakyat terhadap serangan udara, hendaknya dilakukan latihan-latihan seperti memadamkan kebakaran, membuat lubang perlindungan, dan lain-lain.

c. Memperluas pertanian dan memperbaiki tanah pertanian dengan jalan yang sederhana dan mudah;
d. Perlunya membangkitkan semangat dan kemauan kaum tani untuk menyelenggarakan tambahan hasil bumi;

6. Perlunya memajukan dan memperkokoh susunan masyarakat berdasarkan Tonarigumi (Rukun Tetangga); dan
7. Sesuai dengan yang dianjurkan di atas, adalah merupakan kewajiban untuk membentuk badan kebaktian penduduk Jawa.

Maka, pada tanggal 1 Maret 1944, dibentuk Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa yang disebut *Jawa Hokokai*. Badan ini merupakan organisasi resmi Pemerintah Pendudukan Militer Jepang yang berada di bawah pengawasan Gunseikan. Badan ini dibentuk tidak hanya sebagai pengganti Putera maupun *Kakyo Sokai* (Perhimpunan Orang Cina) yang telah didirikan sebelumnya di Jawa, tetapi juga meliputi beberapa perwakilan orang-orang Eropa dan masyarakat Arab di Jawa. Hal yang penting adalah bahwa dibentuknya Jawa Hokokai ini perlu disadari sebagai perampasan forum kaum nasionalis, oleh karena badan ini langsung berada di bawah Gunseikan. Jawa Hokokai meliputi semua organisasi yang telah diciptakan sebelumnya oleh Jepang, sehingga Jawa Hokokai merupakan suatu organisasi massa dengan cabang-cabangnya yang mencapai tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan, dan struktur organisasi pemerintah yang terkecil dalam desa, yaitu Tonarigumi.

Tindakan pemerintah pendudukan atas jawaban dan usul Chuo Sangi-in yang telah dilakukan, diumumkan oleh juru bicara pemerintah pada tanggal 7 Mei 1944. Pertama, dalam hal meneguhkan persiapan rakyat dalam membela tanah air, telah diadakan penerangan-penerangan, baik pada pertemuan-pertemuan maupun melalui selebaran-selebaran. Juga telah dilakukan latihan-latihan, misalnya latihan memadamkan kebakaran, cara menyelamatkan diri ke tempat perlindungan untuk menghindari peluru, cara memberi pertolongan pertama, cara membatasi cahaya lampu, dan sebagainya yang semuanya dilakukan di bawah bimbingan Jawa Hokokai yang telah dibentuk. Sedangkan untuk mencegah bahaya serangan udara, mereka dibimbing oleh anggota *Keibodan* (Badan Pembantu Polisi). Kedua, adalah tentang cara yang praktis untuk memperbanyak hasil bahan makanan melalui diadakannya sejumlah kursus dan latihan bagi para petani untuk meningkatkan teknik pertanian, seperti berladang dan lain-lain.

... pada tanggal 1 Maret 1944, dibentuk Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa yang disebut *Jawa Hokokai*.

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan sehubungan dengan usul yang diajukan oleh Chuo Sangi-in adalah sebagai berikut: dalam pemberantasan malaria telah dilakukan pembagian pil kina, perawatan dan pengobatan cuma-cuma oleh dokter yang berkeliling ke desa-desa yang mulai dilakukan sejak bulan Maret 1944, serta perbaikan salurah air untuk memberantas nyamuk malaria. Namun, pada kenyataannya setelah dilakukan selama tiga bulan, tindakan ini tidak pernah lagi dilakukan oleh pemerintah pendudukan. Tentang industri kecil dan kerajinan tangan, pemerintah hanya merencanakan perhal pembagian besi tua untuk menambah bahan baku bengkel pandai besi, yang kemungkinan besar besi-besi tua itu dicabut dari pagar-pagar rumah penduduk secara paksa. Sedangkan untuk usaha tenun, dianjurkan untuk menenun dengan tangan. Adapun mengenai perbaikan masalah pangan dinyatakan oleh pemerintah pendudukan bahwa hal tersebut dapat diperbaiki dengan usaha sendiri.

Para siswa sekolah pun dikerahkan untuk ikut mencangkul atau berkontribusi di bidang lainnya untuk mendukung kemenangan Perang Asia Timur Raya.

Terkait dengan hasil-hasil sidang Chuo Sangi-in keempat, yang berhubungan dengan cara menambah tenaga romusha, pada 27 Agustus 1944 di Bogor, Shu Sangi-kai mengadakan rapat umum untuk pertama kalinya. Rapat tersebut dihadiri oleh para alim ulama, para *kencho*, dan rakyat. Dalam kesempatan itu, dr. Marzuki Mahdi selaku Ketua Shu Sangi-kai Bogor mengatakan bahwa nasib bangsa Indonesia hanya dapat ditentukan dengan perang. Apabila tidak berhasil menang, maka sebanyak 50 juta jiwa penduduk di Jawa akan terpuruk. Hal ini mengingat bahwa Jawa merupakan lumbung pangan di daerah selatan yang harus dipertahankan. Oleh karena itu, menurut Marzuki, sudah seharusnya semua pihak, yakni laki-laki dan perempuan baik tua maupun muda, bersedia untuk bekerja di pabrik-pabrik, ladang, dan kantor. Para siswa sekolah pun dikerahkan untuk ikut mencangkul atau berkontribusi di bidang lainnya untuk mendukung kemenangan Perang Asia Timur Raya.[517]

Respon terhadap sidang Chuo Sangi-in ke-4 juga muncul dari R. Gatot Mangkudipraja yang merupakan anggota dari Shu Sangi-kai Bogor. Ia menyampaikan jasa-jasa Jepang bagi bangsa-bangsa di Asia, terutama bagi bangsa Indonesia, dan ia juga menyatakan sikap untuk bekerja sama serta berjuang dengan Jepang. Satu minggu setelah R. Gatot Mangkudipraja memberikan pernyataannya, ia diangkat menjadi anggota Chuo Sangi-in.

517 Susanto Zuhdi, *Op.Cit.*, hlm. 87

4.6 Sidang Ketiga Chuo Sangi-in, 7 – 11 Mei 1944 : Memperdalam Kesadaran dan Persaudaraan di antara Rakyat

Sidang Ketiga Chuo Sangi-in ini membicarakan tentang "bagaimana cara menyadarkan seluruh penduduk akan kewajibannya, serta mempergiat kerja sama dalam suasana persahabatan dengan tidak mengenal perbedaan bangsa, pekerjaan, dan pangkat". Sebelum Ketua Chuo Sangi-in membuka sidang, ia terlebih dulu diperkenalkan anggota baru, yaitu R. Drajat Sosrohadisubroto, menggantikan Ir. Rooseno yang baru saja diangkat menjadi Guru Besar Sekolah Teknik Tinggi Bandung. Pada penjelasan pertanyaan Saiko Shikikan, Somubucho mengatakan bahwa tujuan pemerintah Jepang adalah menciptakan dan mendirikan ketertiban yang berdasarkan keadilan dan perikemanusiaan, maka merupakan kewajiban seluruh penduduk Jawa untuk menyelesaikan perang. Dalam hal persahabatan di antara penduduk, ia mengatakan bahwa Jawa Hokokai telah berusaha memperbaikinya, karena menurut Somubucho, "Pemerintah Belanda telah meninggalkan sisa-sisa politik memecah belah". Setelah Somubucho memberikan penjelasan, Zimukyokucho memberikan keterangan tentang tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Militer Jepang, sehubungan dengan jawaban dan usul Chuo Sangi-in pada sidangnya yang pertama dan kedua.

Pada sidang hari kedua, kesempatan pertama diberikan oleh Ketua Chuo Sangi-in kepada B.P. Puruboyo untuk menyatakan pendapatnya terkait pertanyaan yang diajukan oleh Saiko Shikikan. Kesempatan berikutnya diberikan kepada Oey Tjong Hauw, K.H. Mas Mansur. dan R.P. Suroso. B.P. Puruboyo menyatakan bahwa upaya memperkokoh kebaktian dalam menghadapi perang bertujuan untuk menyempurnakan usaha dalam menyadarkan seluruh lapisan penduduk tentang kewajibannya.

Menurut Oey Tjong Hauw, pada masa perang, setiap orang harus mampu menjadi manusia yang baru, atau dalam arti sanggup menghadapi kesukaran dan siap berkorban. Dalam hal pembagian kewajiban, pembagian harus dilakukan dengan menjauhkan rasa perbedaan bangsa karena hal ini merupakan rintangan terbesar dalam usaha mempererat hubungan persaudaraan di kalangan penduduk. K.H. Mas Mansur, dengan merujuk pada hukum-hukum Islam, berpendapat bahwa perlu diusahakan perluasan propaganda guna menginsyafkan rakyat, agar timbul rasa kesadaran dan ketakwaan pada rakyat. Mas

Menurut Oey Tjong Hauw, pada masa perang, setiap orang harus mampu menjadi manusia yang baru, atau dalam arti sanggup menghadapi kesukaran dan siap berkorban.

Mansur adalah Penasihat Pengurus Besar Muhammadiyah, sehingga wajar saja jika ia menghubungkan pendapatnya tersebut dengan ajaran Islam. Sementara itu, R.P. Suroso mengusulkan agar bangsa Indonesia dapat menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri, serta membuka kesempatan untuk bertukar pikiran secara proporsional, baik melalui Tonarigumi atau badan resmi lainnya, dengan memberikan kelonggaran atau sedikit kebebasan dalam cara menyiarkan informasi, agar maksud perang dapat lebih mudah untuk dimengerti oleh penduduk. Pendapat R.P. Suroso ini memperlihatkan bahwa ketika itu semua orang Indonesia, terutama di Jawa, sebenarnya menyadari akan kedudukannya yang tidak dapat melakukan apa pun, oleh karena semua tindakan selalu diawasi ketat oleh Jepang. Pendapat-pendapat tersebut di atas merupakan bahan untuk menyusun jawaban atas pertanyaan Saiko Shikikan. Untuk kepentingan tersebut, Ketua Chuo Sangi-in membentuk Panitia Istimewa untuk membahasnya.

Pendapat R.P. Suroso ini memperlihatkan bahwa ketika itu semua orang Indonesia, terutama di Jawa, sebenarnya menyadari akan kedudukannya yang tidak dapat melakukan apa pun ...

Dalam sidang tertutup Panitia Istimewa, para anggota menyatakan pendapatnya. Antara lain dr. Buntaran yang menyatakan bahwa, sebagai anggota Chuo Sangi-in yang merupakan pemimpin rakyat, haruslah ada kesadaran untuk memimpin penduduk Jawa dalam menerangkan tujuan perang Jepang. Kemudian, untuk memupuk rasa persaudaraan, hendaknya dibentuk satu badan yang akan atau dapat menimbulkan rasa persaudaraan di antara semua golongan bangsa di Jawa. Selain dari itu, R.M.A.A. Kusumo Utoyo menegaskan tentang perlunya diadakan perbaikan dalam cara penggilingan padi, sementara R. Sukarjo Wiryopranoto mengusulkan agar dibentuk badan perjuangan Jawa yang anggotanya terdiri dari penduduk Jawa, yang akan menjadi dasar untuk memperkuat susunan masyarakat dalam masa perang.

Selanjutnya, Mr. Samsudin, Otto Iskandar Dinata, dr. K.R.T. Rajiman, A. Aris, Mr. Suyudi, dan dr. Toha pada pokoknya sama-sama menguraikan pentingnya memperdalam kesadaran penduduk akan arti perang yang sebenarnya. Oey Tjong Hauw menambahkan bahwa diperlukan penyesuaian kedudukan dalam organisasi yang dapat disesuaikan dengan keahlian masing-masing orang. Mr. Sunarko secara lebih langsung mengemukakan pentingnya mengatur Jawa Hokokai, serta memberikan kelonggaran kepada pembicara dalam masa propaganda. Pembicara terakhir adalah Mr. Iskaq dan Rooslan Wongsokusumo yang menyatakan bahwa para pemimpin harus lebih dulu mengetahui keadaan rakyat yang sebenarnya, dan rakyat harus dipimpin dengan mempercayai segala kemampuannya.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, sidang tertutup Panitia Istimewa diselenggarakan untuk menyusun jawaban atas pertanyaan Saiko Shikikan. Maka, berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, Chuo Sangi-in memutuskan bahwa dengan diposisikannya Jawa di tengah-tengah medan perang, seluruh penduduk dihadapkan pada kewajiban untuk berusaha mencapai kemenangan akhir pada Perang Asia Timur Raya. Khususnya di Jawa, harus dikerahkan penambahan tenaga perang dengan menjauhkan segala bentuk perselisihan yang menjadi rintangan bagi persaudaraan dan persatuan. Chuo Sangi-in juga berpendapat bahwa usaha praktis untuk menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri memerlukan suatu penjelasan yang rinci, dalam arti mendidik dengan contoh yang nyata, misalnya dengan menyusun dan menyesuaikan kehidupan dengan adanya perang, memperbesar produksi dalam segala bidang, menghemat konsumsi, dan menyempurnakan pembagian barang secara adil. Dalam hal ini, Chuo Sangi-in menganjurkan agar dengan segera dibentuk barisan pelopor dalam Jawa Hokokai yang terdiri dari pemuda-pemuda dewasa yang siap mengorbankan dirinya dalam rangka perjuangan memenangkan peperangan. Usaha ini dinyatakan Chuo Sangi-in tidak akan dapat berjalan baik tanpa adanya suasana persahabatan. Maka, Chuo Sangi-in memutuskan untuk melakukan tindakan permulaan sebagai berikut:

1. Mendirikan balai pertemuan untuk segala bangsa;
2. Memajukan kesenian pada khususnya, serta kebudayaan pada umumnya dari segala bangsa dengan mengadakan pertunjukan bersama;
3. Menggiatkan bidang olahraga bagi segala golongan bangsa;
4. Menjalankan kewajiban umum bersama, misalnya beberapa kewajiban dalam lingkungan Tonarigumi
5. Mewujudkan persatuan di antara para pegawai negeri, para wakil rakyat (anggota Chuo Sangi-in, Shu Sangi-kai dan Jawa Hokokai), para alim ulama dan lain-lainnya; dan
6. Mendirikan koperasi untuk keperluan hidup sehari-hari bagi segala lapisan masyarakat.
7. Semua kegiatan di atas, terutama dilakukan oleh Jawa Hokokai dan Tonarigumi.

Khusus mengenai Panitia Istimewa yang dalam perundingannya memutuskan untuk menyoroti kekurangan bahan pakaian, muncul usulan dari Otto Iskandar Dinata untuk memperbanyak tanaman berserat seperti kapas, rami, dan randu sebagai tanaman yang sesuai dengan iklim dan tanah di Jawa. Kemudian, sebaiknya serat-serat itu

Usaha ini dinyatakan Chuo Sangi-in tidak akan dapat berjalan baik tanpa adanya suasana persahabatan.

dipintal dan ditenun dengan alat yang sederhana, serta dilakukan di rumah-rumah.

Pada awal pendudukan Jepang, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang penenunan sudah mulai kekurangan bahan baku, kendati sudah ada inisiatif pemerintah Jepang untuk penanaman kapas selama lima tahun ke depan. Sebagai percobaan, telah dipilih daerah-daerah untuk penanaman kapas, yaitu Cirebon, Malang, Kediri, dan Besuki. Setelah percobaan ini berjalan selama dua tahun, maka dari daerah-daerah tersebut ternyata hanya Kediri dan Besuki yang dapat menghasilkan kapas yang baik. Di samping itu, telah didirikan laboratorium penenunan di Bandung untuk melaksanakan pendidikan teknik menenun.

Pada awal pendudukan Jepang, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang penenunan sudah mulai kekurangan bahan baku, ...

Usul berikutnya dalam sidang Panitia Istimewa diajukan oleh dr. M. Mahdi, dr. A. Rasyid, dan Mr. Budhyarto, yaitu perihal memperbaiki kesehatan rakyat. Usul ini diterima sidang setelah diadakan perundingan, sehingga diputuskan bahwa untuk kesehatan rakyat hendaknya diadakan latihan cara memberikan pertolongan pertama, sebagai persiapan dalam menghadapi serangan udara dan bencana lain, serta diberikan pula pengetahuan sederhana tentang kesehatan kepada rakyat.

Selain itu, dalam hal penggunaan obat-obatan tradisional juga hendaknya diadakan pemeriksaan dan percobaan secara ilmiah, untuk kemudian disiarkan hasil penelitiannya kepada rakyat. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan usul tersebut di atas telah diusahakan bersama Izi Hokokai dan Jawa Hokokai, serta telah dilakukan gerakan untuk mengatur badan pertolongan pertama pada kecelakaan yang telah juga sudah mengadakan kursus pertolongan dan latihan di masing-masing Shu, juga di tingkatan Tonarigumi. Terkait pemakaian dan penggunaan obat-obatan tradisional, pada bulan Juni 1944, telah dibentuk panitia yang terdiri dari ahli-ahli Indonesia, yang tetap berada di bawah pengawasan Pemerintah Pendudukan Jepang untuk menyelidiki pemakaian tumbuh-tumbuhan sebagai obat tradisional.

Usul ketiga diajukan oleh Mr. Sunarko, R.P. Suroso, dan Bagus Hadikusumo tentang latihan keprajuritan rakyat Jawa yang diterima baik oleh sidang, dan pada akhirnya diputuskan agar di tiap-tiap Shu diadakan latihan keprajuritan dengan memakai senjata yang sesungguhnya, agar latihan tersebut dapat berjalan dengan semestinya dan dalam suasana persahabatan. Namun, pemerintah Jepang menolak usul ini dengan alasan kekurangan senjata.[518]

518 *Ibid.*, hlm. 70

4.7 Sidang Ke-empat Chuo Sangi-in

Pada sidang Chuo Sangi-in keempat yang diadakan di bulan November 1944, dr. Marzuki Mahdi yang merupakan perwakilan dari Shu Sangi-kai Bogor meminta kepada pemerintah agar diadakan latihan militer yang sebenarnya, oleh karena kondisi masuknya tentara musuh ke wilayah Indonesia, sementara waktu untuk mengadakan milisi umum tidak ada. Marzuki mendesak agar segera diadakan latihan militer bagi masyarakat, misalnya seperti latihan-latihan barisan Seinendan, Keibodan, dan Barisan Pelopor.[519] Selanjutnya, untuk memperkuat barisan belakang, dianjurkan supaya Badan Pembantu/ Penolong Keluarga Prajurit dapat bekerja lebih keras, begitu pula dengan para romusha. Marzuki juga meminta kepada Pemerintah Militer jepang supaya lebih memperhatikan nasib para petani yang telah giat bekerja meningkatkan hasil pertanian agar lebih diperhatikan lagi, terutama dalam hal biaya produksi yang sebaiknya tidak lebih tinggi daripada harga hasil-hasil produksi kerajinan rakyat.[520]

Meskipun telah terbentuk organisasi seperti Hokokai, ternyata Pemerintahan Militer Jepang di Indonesia ingin terus meningkatkan dukungan penduduk Jawa untuk mencapai kemenangan perang. Oleh sebab itu, pada 10 Juni 1944, pemerintah membentuk *Jawa Sentotai* (Benteng Perjuangan Jawa). Jawa Sentotai lahir dari sidang ketiga Chuo Sangi-in, yang kemudian dibahas dalam Chuo Sangi-in cabang Bogor Shu sebagai badan yang bertujuan untuk mempersatukan seluruh rakyat secara bersama-sama menggiatkan usaha demi mencapa kemenangan perang. Pada perkembangan berikutnya, akhirnya Jawa Sentotai disatukan ke dalam Jawa Hokokai.

Dr. Marzuki Mahdi merupakan salah satu tokoh intelektual Bogor Shu, sekaligus dokter yang mengepalai sebuah rumah sakit jiwa di Bogor. Maka dari itulah ia bisa mengerahkan potensi yang ada di rumah sakit tempatnya bekerja. Saat itu, para pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut diberikan pelatihan keterampilan agar dapat menganyam, sehingga mereka dapat membuat tas, menenun, dan membuat kerajinan tangan lainnya yang dapat berkontribusi pada Jawa Sentotai.[521]

Berikut adalah pertanyaan yang diajukan oleh Saiko Shikikan dalam sidang keempat tersebut, termasuk juga sambutan dari para anggota Chuo Sangi-in:

Dr. Marzuki Mahdi merupakan salah satu tokoh intelektual Bogor Shu, sekaligus dokter yang mengepalai sebuah rumah sakit jiwa di Bogor.

519 Susanto Zuhdi, *Op.Cit.*, hlm. 90
520 *Ibid.*
521 *Ibid.*, hlm. 98

... Soal pertanjaan pada masa peperangan yang sengit dan dahsjat sekarang ini tenaga kaoem pekerdja soenggoeh dibolehkan sebesar-besarnja.

Pertanjaan Saikoo Shikikan Kepada sidang Chuo Sangi-in ke IV

Sidang Chuoo Sangi-in keempat akan diboeka pada pertengahan boelan Delapan j.a.d. Berhoeboeng dengan itoe hari ini Saikoo Shikikan memadjoekan pertanjaan kepada Chuoo Sangiin.:

Pertama, Soal pertanjaan pada masa peperangan yang sengit dan dahsjat sekarang ini tenaga kaoem pekerdja soenggoeh dibolehkan sebesar-besarnja. Oentoek memenoehi keboetoehan itu haroes diambil berbagai-bagai tindakan mempertinggi tenaga kaoem pekerdja serta haroes poela seloeroeh pendoedoek bekerdja serentak dengan menghapoeskan paham lama tentang perboeroehan dan djoega mentjoerahkan segenap tenaganja oentoek membela tanah air dan oentoek memperbanyak hasil prodoeksi sebagai prsdjoerit pekerdja jang moelia.

Berhoeboeng dengan itoe saja bertanja kepada Chuoo Sangiin bagaimanakan tjara jang djelas oentoek meninsjafkan seloeroeh pendoedoek sedalam-dalamnja akan toedjoean itu serta dan selekas-lekasnja?

Kedoea. Alasan pertanjaan.

Keadaan peperangan sekarang soedah sampai di tengah-tengah pertempoeran achir jang akan menentoekan kalah atau menang dan serangan serta pembelaan baik pada pihak kita maoepoen pada pihak moesoeh sangat hebat dan sengit: waktoenja telah tiba bagi kita oentoek menghantjoer-leboerkan moesoeh jang angkoeh dan sombong itoe dengan mengambil kesempatan jang baik oentoek membinasakannja.

Pertanjaan P.J.M. Saikoo Shikikan soenggoeh2 mengenai sewoetoehnja isi Djawa Sentootai jaitoe mempertinggi tenaga kaoem pekerdja sebagai Peradjoerit ekonomi

Berhoeboeng dengan itoe kita haroes kita haroes membentoek Benteng Perdjoeangan jang tegoeh dan koeat sebagai goenoeng batoe, baik dalam hal rohani maoepoen hal djasmani dengan djalan menjempoernakan pembealaan tanah air serta menjatoekan tenaga Balatentara dan tenaga rakjat di Djawa dan haroes poela melipat-gandakan dan meloeaskan tenaga prodoeksi segiat-giatnja.

Baik oentoek melaksanakan maksoed tsb. Diatas atau oentoek mendirikan bangoenan2 goena pembelaan A.T.R. maoepoen oentoek memperkoeat dan menambah tenaga prodoeksi dipaberik, ditempat peroesahaan, dihoetan, disawah, ladang dsb, maka jang paling perloe masa sekarang ialah tenaga kaoem pekerdja. Keboetoehan tenaga kaoem pekerdja besar sekali di tiap-tiap lapangan. Maka oentoek memenoehi keboetoehan itu kita haroesmengadakan soesoenan perboeroehan jang baroe dengan berani misalnja dgn. Mempertinggi tenaga pekerdjaan masing2 atau dengan memindahkan tenaga pekerdja jang tidak perloe dgn. mempertinggi masing2 atau dengan memindahkan tenaga pekerdja jang tidak perloe dengan segera kelapang lain jang perloe memboetoehkannja atau dengan menjetahkan sesoeatu djabatan jang dipegang pekerdja laki2 keada tenaga pekerdja laki2 kepada tenaga pekerdja perempoean dsb.

Samboetan para giin (anggota) terhadap pertanjaan P.J.M. Saikoo Shikikan Mengatoer tjara bekerdja jg. Praktis menjempoernakan tenaga prodoeksi Pradjoerit Ekonomi.

Sambutan Ki Hajar Dewantara:

Pertanjaan P.J.M. Saikoo Shikikan soenggoeh2 mengenai sewoetoehnja isi Djawa Sentootai jaitoe mempertinggi tenaga kaoem pekerdja sebagai Peradjoerit ekonomi mengerahkan segala kekoeatan

mereka dengan menghilangkkan sikap perboeroehan lama dan semoeanja itoe ditoedjoekan memperbanjak hasil proeduksi goena pembelaan tanah air.

a. *`Alasan2 jang dimadjoekan dan termoeat dalam pemberi tahoean sebenarnja dengan sendiri soedah memberi petoendjoek tjoekoep bagi sekalian Giin oentoek menjoesoen soeatoe djawaban tepat. Petoendjoek2 itoe dengan singkat demikianlah maksoednja:*
b. *`Membentoek Benteng Perdjoeangan Djawa jang koeat, baik dalam arti lahir maoepoen batin oentoek dapat lekas mentjapai kemenangan achir dengan djalan menjatoekan tenaga Balatentara dan rakjat teristimewa dengan tjara menjempoernakan tenaga prodoeksi;*
c. *`Mengadakan soesoenan perboeroehan baroe dalam arti mengadakan kewadjiban bekerdja sebagai "National Duty" mengatoer tjara bekerdja praktis (misalnya memindahkan kaoem pekerdja dari lapang pekerdjaan jang satoe kelapang lain sesuai dengan ketjakapan atau kepandaiannja; mengganti kaoem pekerdja kaoem laki2 dengan pekerdja perempoean di mana moengkin atau dimana perloe); dalam pada itoe diperloekan mengobar-ngobarkan kegembiraan bekerdja;*
d. *`Menginsjafkan semoea kaoem pekerdja serta mempertebal ketetapan hati dan disamping itoe mendjaoehkan segala rintangan jang menghalang-halangi timboelnja keichlasan serta kegembiraan itoe;*

Diakoei, bahwa didalam pembahroean tjara bekerdja itoe, soal bekerdja itoe mempoenjai perhoeboengan jang sangat rapat dengan kehidoepan pendodoek seoemoemnja.

`Alasan2 jang dimadjoekan dan termoeat dalam pemberi tahoean sebenarnja dengan sendiri soedah memberi petoendjoek tjoekoep bagi sekalian Giin oentoek menjoesoen soeatoe djawaban tepat.

Demikianlah isi pertanjaan serta alasan-alasan jang dimadjoekan Saiko Shikikan kepada Chuuoo Sangi-in jang kini bersidang keepat kalinja. Dalam pertanjaan seerta alasan-alasan jang saja oeraikan tadi ada satoe bahagian jang sangat penting dan menoeroet fikiran saja boleh dibilang soeatoe pokok persoalan penting jang saja maksoedkan yaitoe tentang menghapoeskan faham lama jaitoe tentang perboeroehan jaitoe tentang perboeroehan oemoemnja dan menggantinja dengan faham baroe.

Dengan satoe kalimat agar terang dapatlah soal itoe kita singkatkan demikian:

Mengganti dasar perseorangan (individualism) serta kemoerkaan benda (capitalism) dalam perboeroehan dengan dasar gotong royong atau system kekeloergaan jang bersemangat kebuktian. Faham perseorangan dan kemoerkaan benda menoeroet kejakinan saja memang ada pada tiap-tiap djiwa manoesia, tetapi dalam masjarakat jang telah berdab hanja hidoep sebagai sisa-sisa, sebagai "instinct", jakni dasar watak manoesia jang beloem beradab; djadi watak asli dari hidoep manoesia sebeloem ada adab serta ketingkatan tinggi. Dalam masjarakat jang soedah beradab kemanoesiaan dasar perseorangan dan kemoerkaan benda itu haroes soedah lenjap dan diganti dasar kemanoesiaan jang bersifat loehoer. Di dalam masjarakat kita di Djawa sebenarnya soedah berabad-abad terpakai tjara hidoep bersama jang soenggoh boleh dibanggakan jaitoe cara hidoep gotong rojong lebih tepat djika diseboet hidoep kekeloergaan. Keloeraga berasan dari gaboengan doea perkataan: "Kawoela" dan "warga". Kawoela berarti abdi, sedang warga berarti anggota. Selakoe kawoela kita haroes berbakti menjerahkan segala tenaga kita oentoek mentjapai tertib dan damai, sedangkan selakoe warga kita berhak toeroet mengoroes segala keadaan kita bersama. Dengn sikap keloerga jang soenggoeh loehoer dan indah itoe lenjaplah sendiri dasar individualisme dan

Mengganti dasar perseorangan (individualism) serta kemoerkaan benda (capitalism) dalam perboeroehan dengan dasar gotong royong atau system kekeloergaan jang bersemangat kebuktian.

kapitalisme jang sedjak djaman Belanda moelai meradjalela. Sebenarnja doea dasar boeroek itoe timboel dan mendjalarnja didalam masjarakat kita sebagai boeah pendidikan.

4.8 Penyempurnaan Hasil Produksi dan Penguatan terhadap Pembelaan Rakyat (Sidang ke-IV Chuo Sangi-in, 12 – 16 Agustus 1944)

Pada bulan Juli 1944, Kepulauan Saipan, yang merupakan salah satu garis pertahanan Jepang di Pasifik, jatuh ke tangan Amerika.

Pada bulan Juli 1944, Kepulauan Saipan, yang merupakan salah satu garis pertahanan Jepang di Pasifik, jatuh ke tangan Amerika. Hal ini memicu sebuah kegoncangan bagi pemerintah Jepang di Tokyo. Memasuki bulan Agustus, situasi Jepang semakin mundur, dukungan moral semakin surut, dan produksi perang Jepang terhalang karena kekurangan bahan baku. Ini semua berakhir pada kurangnya persediaan senjata dan amunisi. Selain itu, timbul juga masalah logistik karena sejumlah kapal angkut dan kapal perang Jepang dinyatakan hilang dalam perang. Keadaan ini juga berpengaruh bagi Pemerintah Pendudukan Militer Jepang di Jawa. Sehubungan dengan itu, Saiko Shikikan mengeluarkan maklumat agar diadakan Sidang Keempat untuk Chuo Sangi-in. Pertanyaan yang diajukan pada sidang ini adalah "tindakan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan tenaga kerja, pembelaan tanah air, dan produksi bahan baku?".[522] Dalam penjelasan tentang pertanyaan Saiko Shikikan, Somubucho menerangkan bahwa dalam suatu benteng perjuangan yang kuat sangat diperlukan untuk menentukan masa depan bangsa Asia dalam perang ini.

Untuk melaksanakan hal tersebut, perlu dilaksanakan upaya untuk memperkuat dan menambah hasil produksi, baik di pabrik, perusahaan, hutan, maupun di sawah dan ladang. Maka dari itu, yang diperlukan adalah "tenaga pekerja", baik wanita maupun pria. Ditekankan pula oleh Somubucho bahwa tanah di Jawa merupakan sumber dari berbagai komoditas penting bagi daerah Asia Tenggara. Penjelasan tersebut di atas mendapat sambutan dari K.B. Hadikusumo yang mengatakan bahwa, dilihat dari hukum Islam bekerja untuk kepentingan hidup khalayak banyak adalah wajib hukumnya. Ia juga menganjurkan agar para pekerja yang bekerja untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya diberikan penghargaan yang sepantasnya. Dalam hal

522 *Ibid.*, hlm. 71

pengerahan tenaga pekerja, K.H. Dewantara menyatakan perlunya dibentuk suatu organisasi "Benteng Perjuangan Jawa" yang kuat dan membuat susunan perburuhan baru, dalam arti mengatur kewajiban dan cara bekerja itu sendiri. Pendapat ini mendapat dukungan dari R. Rooslan Wongsokusumo yang kemudian menerangkan mengenai efisiensi pekerja. Lalu, untuk menunjukkan adanya perhatian terhadap kaum pekerja, Otto Iskandar Dinata menganjurkan agar segera dibentuk sebuah badan pembantu prajurit.

Untuk merundingkan pertanyaan Saiko Shikikan berdasarkan penjelasan Somubucho dan pendapat para anggota, Ketua Chuo Sangi-in membentuk tiga bunkakai, antara lain: Bunkakai I yang membahas masalah peningkatan semangat bekerja, Bunkakai II yang membahas masalah peningkatan efisiensi pekerja, serta Bunkakai III yang membahas masalah usaha untuk mengadakan bantuan kepada kaum pekerja dan keluarganya, juga persoalan terkait Romukyokai dan Jawa Hokokai. Pada tanggal 15 Agustus 1944, setelah masing-masing bunkakai mengadakan perundingannya, maka diumumkan hasilnya adalah sebagai berikut:

Bunkakai I memutuskan bahwa dalam masalah paham kerja dan membangkitkan semangat kerja, hendaknya paham kerja lama yang berdasarkan perorangan diganti dengan yang berdasarkan "bakti kepada tanah air". Diputuskan pula agar seluruh penduduk, baik laki-laki maupun wanita dari seluruh bangsa dan lapisan masyarakat di Jawa, bekerja sebagai bentuk baktinya kepada tanah air. *Pertama*, cara untuk meresapkan paham baru itu adalah dengan memberikan pembimbingan dengan bukti yang nyata melalui badan-badan yang telah ada, misalnya melalui organisasi seperti Tonarigumi, Romukyokai, Sendenbu, dan Jawa Hokokai, atau melalui media surat kabar, film dan lain-lain. *Kedua*, dalam dalam meningkatkan rasa giat tersebut, hendaknya para pekerja diberikan penghargaan yang sesuai dengan kedudukannya sebagai prajurit pekerja dan pada keluarganya pun diberikan bantuan secukupnya untuk menunjang kehidupan sehari-hari.[523]

Diputuskan pula agar seluruh penduduk, baik laki-laki maupun wanita dari seluruh bangsa dan lapisan masyarakat di Jawa, bekerja sebagai bentuk baktinya kepada tanah air.

Dalam hal memperbesar tenaga kerja, Bunkakai II memutuskan untuk menempatkan tenaga kerja pada tempat yang sesuai dengan kecakapannya, melindungi rohani dan jasmani kaum pekerja dan keluarganya, melatih tenaga produktif dengan memberikan pendidikan yang terutama dilakukan oleh pemimpin perusahaan masing-masing,

523 *Ibid.*, hlm. 72

serta mengadakan barisan kebaktian yang terutama dianjurkan oleh Tonarigumi.

Bunkakai III yang membahas urusan prajurit pekerja dan perlindungan kepada keluarganya memutuskan bahwa, *pertama*, perlu diadakan pemeriksaan terhadap besaran pendapatan pekerja, sesuai dengan naiknya harga. Persediaan makanan di tempat pekerjaan hendaknya turut diperhatikan, termasuk juga masalah pakaian, perumahan, dan kesehatan. Untuk menghibur hati para pekerja, hendaknya diusahakan untuk mengadakan pertunjukan atau permainan di daerah masing-masing, dan hendaknya prajurit pekerja dihormati dan diperlakukan dengan baik. Kedua, hendaknya dibentuk "Badan Pembantu Pekerja" yang berada di bawah binaan Jawa Hokokai.

Untuk mempropagandakan tenaga pekerja kasar atau romusha, Ir. Soekarno selaku Ketua Chuo Sangi-in beserta dengan dua orang anggota, yaitu Mr. Sartono dan Otto Iskandar Dinata, mendaftarkan diri pada romusha dalam rombongan pertama sebagai pekerja sukarela pada tanggal 29 Agustus 1944. Mengenai persoalan ini, Soekarno, dalam buku biografinya yang ditulis oleh Cindy Adams yang berjudul *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, mengatakan bahwa ada dua cara untuk bekerja. Yang pertama adalah melalui tindakan revolusi. Tindakan revolusi menimbulkan pertumpahan darah dan korban yang besar, seperti terbukti dalam peristiwa pemberontakan Peta di Blitar, yang sesungguhnya memperlihatkan bahwa rakyat belum cukup siap untuk itu. Yang kedua adalah melalui kerjasama dengan Jepang, sambil mengkonsolidasi kekuatan rakyat Indonesia dan menanti sampai tiba saatnya Jepang jatuh.[524] Soekarno memilih cara kedua. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan bahwa Soekarno telah menjual bangsa Indonesia kepada Jepang, sebab menurutnya, dengan memberikan Jepang apa yang mereka perlukan, kita dapat menuntut lebih banyak konsesi yang kita sendiri perlukan. Ini adalah cara yang terbukti berdampak positif, jika memang yang dikehendaki bersama adalah kemerdekaan.

Ini adalah cara yang terbukti berdampak positif, jika memang yang dikehendaki bersama adalah kemerdekaan.

Tindakan Pemerintah Pendudukan Militer Jepang yang sehubungan dengan jawaban Chuo Sangi-in adalah bahwa pada tanggal 1 Februari 1945, terjadi pendaftaran untuk pengerahan tenaga kerja. Adanya pengerahan tenaga kerja melalui pendaftaran telah mengakibatkan keadaan pekerja semakin menderita karena kebanyakan pekerja berasal dari daerah-daerah miskin di Jawa Tengah

524 *Ibid.*, hlm. 73

dan Jawa Timur. Adanya program pendaftaran tersebut menimbulkan praktik "jual-beli kebebasan" dengan cara menyuap pegawai resmi yang bertugas di bagian pendaftaran, atau bahkan mengupahi temannya yang lebih miskin untuk menggantikannya. Akibatnya lebih parah lagi, yaitu ada sekelompok orang-orang Cina yang dibebaskan dari pendaftaran diri sebagai tenaga kerja, sementara masyarakat yang miskin yang menderita karena terdesaknya posisi mereka di masyarakat semakin banyak. Mulai tanggal 19 November, dilakukan pemindahan tenaga kerja laki-laki yang kemudian digantikan dengan tenaga kerja wanita yang tugasnya adalah untuk mengawasi tenaga kerja yang ada. Untuk usulan terkait menolong keluarga pekerja, didirikan Panitia Pengurus Tenaga Kerja, baik di pusat maupun di daerah. Selain itu, pemerintah pendudukan telah menetapkan aturan kerja sukarela dan mempercepat pembentukan "Barisan Pekerja Sukarela".

Pada Sidang Keempat Chuo Sangi-in juga diajukan usul-usul kepada pemerintah pendudukan. Pertama, K.H. Mas Mansur mengusulkan agar kalangan prajurit Jepang diberikan tanda jasa, dengan tujuan untuk mengobarkan semangat rakyat untuk ikut berjuang. Tentu saja, usul itu disambut baik oleh pemerintah pendudukan. Usul kedua merupakan usul gabungan dari R.P. Suroso, Mr. R. Sunarko, R.M.A.A. Kusumo Utoyo, dr. Buntaran, Suyudi, dan Sukarjo Wiryopranoto, yaitu tentang masalah yang berhubungan dengan perekonomian. Untuk membahas usul ini, dibentuklah Panitia Istimewa, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah mengadakan perundingan, Panita Istimewa memutuskan bahwa untuk memperbaiki dan menyempurnakan distribusi diusulkan agar pembagian bahan pangan untuk penduduk hendaknya dipegang oleh pemerintah atau badan-badan resmi lainnya. Pembagiannya dilakukan melalui perkumpulan pedagang atau toko-toko. Cara penjualan barang tersebut oleh toko-toko hendaknya disesuaikan pula dengan petunjuk yang diberikan oleh desa-desa atau rukun tetangga. Para pedagang atau toko diminta untuk mendaftarkan jumlah persediaan barang demi memudahkan proses distribusi. Selain itu, pedagang diharuskan mempunyai izin dan harus bersatu dalam perkumpulan. Para pelanggar peraturan distribusi kelak perlu dikenakan sanksi dengan diumumkan namanya di dalam muka *aza* (kampung) oleh Tonarigumi yang bersangkutan.

Untuk menyempurnakan masalah pengangkutan, diusulkan agar dibentuk badan pengangkut yang bekerja untuk kepentingan

Untuk menyempurnakan masalah pengangkutan, diusulkan agar dibentuk badan pengangkut yang bekerja untuk kepentingan umum.

umum. Di samping itu, dibentuk barisan pengangkut yang terdiri dari orang-orang yang dengan sukarela membantu. Mengenai harga barang, diusulkan agar di tiap shu, kochi, dan tokubetsu-shi dibentuk suatu badan yang terdiri dari wakil-wakil dari Hokokai, aza atau Tonarigumi, serta Kumiai atau pedagang, untuk menyelidiki dan memberi laporan tentang harga-harga barang. Selanjutnya, dapat dibentuk pula cabang-cabang dan ranting-rantingnya dari tingkatan ken, shi, sampai son. Perdagangan gelap hendaknya diberantas agar dapat menahan laju kenaikan harga barang, sedangkan untuk memudahkan pengumpulan barang hendaknya persediaan hasil bumi untuk penduduk dikumpulkan dalam lumbung desa. Maka dari itu, Gunseikan telah memerintahkan masing-masing kepala daerah untuk mendirikan perserikatan perusahaan pengangkutan.

Pada bulan Agustus 1944, keadaan Jepang semakin memburuk di medan perang.

4.9 Sidang Istimewa V Chuo Sangi-in, 11 September 1944 Indonesia Akan Diberi Kemerdekaan di Kemudian Hari

Pada bulan Agustus 1944, keadaan Jepang semakin memburuk di medan perang. New Guinea, Kepulauan Solomon, Marshal, dan Saipan, yang merupakan titik-titik pertahanan Jepang di Pasifik, jatuh ke tangan Amerika, sehingga komunikasi Jepang dengan daerah Asia Tenggara menjadi terhambat. Hal ini menimbulkan kegoncangan politik yang serius, ditandai oleh pengunduran diri Perdana Menteri Tojo pada tanggal 17 Juli 1944, yang kemudian digantikan oleh Kuniaki Koiso. Pada Sidang Istimewa ke-58 Parlemen Jepang di Tokyo, diumumkan oleh Perdana Menteri Koiso bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan di kemudian hari. Tindak lanjut dari pernyataan ini adalah adanya perluasan partisipasi politik, serta diperkenankannya orang-orang Indonesia untuk mengadakan penyelidikan tentang masalah yang berhubungan dengan kemerdekaan tersebut. Selain itu, pada tanggal 8 September 1944, sehari sebelum diumumkannya "janji kemerdekaan" oleh Koiso, telah dikeluarkan Maklumat Shikikan Nomor 6 tentang diperkenankannya pengibaran bendera Indonesia "Sang Merah Putih", serta diizinkannya masyarakat untuk menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya".[525]

Janji Koiso ini dapat dikatakan masih bersifat abu-abu karena tidak benar-benar dibicarakan secara serius, atau ditetapkan batas

525 *Ibid.*, hlm. 77

waktu yang tepat dari kemerdekaan itu sendiri, seperti yang juga dilakukan pemerintah Jepang terhadap Burma dan Filipina. Pengaruh janji Koiso bagi bangsa Indonesia kemudian ditulis secara besar-besaran dalam sejumlah surat kabar setempat, sehingga muncul perasaan antusias, gembira, dan berterima kasih di kalangan masyarakat, serta muncul perayaan-perayaan sesudahnya. Tetapi, apakah sambutan rakyat terhadap janji Koiso waktu itu dilakukan dengan sepenuh hati sesungguhnya tidak dapat ditentukan, mengingat segala hal yang terjadi dilakukan atas sponsor Jepang dalam rangka propagandanya.

Maka, sebelas bulan terakhir Pemerintah Pendudukan Militer Jepang di Indonesia dapat dibagi menjadi dua periode. Yang pertama, mulai bulan September sampai bulan Februari 1945, sedangkan yang kedua adalah dari bulan Maret sampai bulan Agustus 1945. Janji Koiso tentang kemerdekaan Indonesia menimbulkan luapan semangat yang berjangkit cepat di antara rakyat Indonesia, terutama di Jawa. Pada saat itu, tujuan utama Jepang adalah mengidentifikasikan perangnya dengan perjuangan pemimpin-pemimpin Indonesia untuk menolak kembalinya kekuasaan Belanda. Menurut Harry J. Benda, bagaimanapun juga orang Indonesia, terutama di Jawa, tidak mempunyai pilihan lain selain membuat atau menganggap perang Jepang sebagai perangnya Indonesia, sebab harga yang harus dibayar untuk merebut otonomi akan jauh lebih besar.

Menurut W.H. Elsbree, setelah tanggal 7 September 1944, juru bicara Indonesia seperti dalam pidato Ir. Soekarno atau nasionalis lainnya tampak mulai kurang berpihak pada Jepang.[526] Keterangan itu memang tampak berlawanan bila kita bandingkan dengan laporan tertulis pidato radio Soekarno yang berjudul "Penggemblengan Rakyat Indonesia ke arah Kemerdekaan" pada tanggal 8 Desember 1944 yang masih berisi pujian terhadap Jepang dan mengritik habis liberalisme Amerika dan Inggris. Tetapi, haruslah diingat juga bahwa sebuah laporan tertulis tidak selalu mesti sesuai dengan pidato yang diucapkan. Hal ini terbukti dari sambutan-sambutan yang luar biasa dari massa, dan seringkali para nasionalis yang memberi pidato itu dipanggil oleh Gunseikan untuk mempertanggungjawabkannya. Setelah semangat massa mulai menyusut, semakin jelas bahwa kemerdekaan yang dijanjikan Jepang masih jauh. Sementara Pemerintah Pendudukan Militer Jepang merasa dapat menggunakan janji ini sebagai "alat

Setelah semangat massa mulai menyusut, semakin jelas bahwa kemerdekaan yang dijanjikan Jepang masih jauh.

526 *Ibid.*, hlm. 78

perang"-nya, kalangan pemimpin Indonesia pun memanfaatkan masa-masa itu untuk menyiapkan dirinya dan rakyat Indonesia bagi perjuangan yang akan datang. Itu berarti bahwa bagi Jepang, perang lebih penting daripada kemerdekaan Indonesia. Sidang Istimewa Chuo Sangi-in kemudian secepatnya diadakan sesudah pernyataan Koiso, yang tujuannya adalah untuk "merayakan dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Jepang di Tokyo".

Pada tanggal 7 September 1944, Gunseikan di Jakarta melalui Somubucho menyampaikan kepada Ir. Soekarno selaku Ketua Chuo Sangi-in tentang kemerdekaan Indonesia, dengan tetap menekankan bahwa "bila kemenangan akhir Perang Asia Timur Raya tidak terwujud, maka dengan sendirinya tidak ada kemerdekaan bagi Indonesia, karena itu pemerintah Jepang perlu sekali bantuan orang-orang Indonesia untuk mewujudkannya".[527]

Sesuai dengan rencana, pada tanggal 11 September 1944, Sidang Istimewa Chuo Sangi-in dibuka oleh Ketua Somubucho

Pada tanggal 8 September 1944, Saiko Shikikan mengeluarkan Maklumat No. 5 tentang panggilan Sidang Istimewa Chuo Sangi-in untuk mengadakan sidangnya pada tanggal 11 September 1944 selama satu hari penuh. Pertanyaan yang diajukan adalah "bagaimana cara membuktikan rasa terima kasih penduduk Indonesia kepada pemerintah Jepang, serta bagaimana cara membangkitkan semangat juang rakyat untuk menghancurkan Amerika dan Inggris?". Secara keseluruhan, selama periode bulan September 1944 sampai dengan akhir bulan Februari tahun berikutnya, perkembangan situasi di Jawa tetap sama sekali tidak penting jika dilihat dari sudut pandang bangsa Indonesia. Hal itu tampak karena juru bicara dari Chuo Sangi-in justru terus menerus menekankan kebutuhan perang, ketimbang menekankan realisasi kemerdekaan yang sesegera mungkin.

Sesuai dengan rencana, pada tanggal 11 September 1944, Sidang Istimewa Chuo Sangi-in dibuka oleh Ketua Somubucho. Dalam pembukaan itu disampaikan penjelasan mengenai pertanyaan Saiko Shikikan menyatakan bahwa Jepang telah berikhtiar agar negara baru yang akan didirikan di Indonesia di kemudian hari akan menjadi negara yang adil dan benar, yang tidak mencemarkan kehormatan sebagai bagian dari Asia Timur Raya.[528] Dikatakannya juga bahwa hal yang perlu diperhatikan adalah tercapainya maksud Jepang agar kemenangan akhir tercapai, sehingga jelas betul bahwa tujuan utama dari penyampaian janji Koiso tersebut hanyalah untuk memastikan bantuan perangnya tersedia dari bangsa Indonesia.

527 *Ibid.*, hlm. 79
528 *Ibid.*, hlm. 80

Dalam merundingkan pertanyaan Saiko Shikikan, Drs. Mohammad Hatta dan K.R.M.T. Wuryaningrat mengajukan pendapatnya bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam menjawab pertanyaan tersebut adalah penyempurnaan susunan Tonarigumi, Seinendan, Keibodan, Suishintai, dan barisan-barisan semacamnya. Produksi harus ditingkatkan agar perekonomian menjadi lebih kokoh, tenaga kerja harus dikerahkan, dan penghidupan rakyat harus diperkuat dengan gotong-royong. Lebih dari itu, K.R.M.T. Wuryaningrat menyatakan pula agar "rakyat Indonesia bersedia untuk sehidup dan semati dengan Jepang untuk memperoleh kemenangan akhir".

Untuk merundingkan pendapat tersebut, dibentuklah Panitia Istimewa yang diketuai oleh Ir. Soekarno sendiri, dengan anggota yang terdiri dari seluruh anggota Chuo Sangi-in. Pada kesempatan tersebut, beberapa anggota mengemukakan pendapatnya, di antaranya adalah K.H. Dewantara yang mengatakan bahwa "pemberian kemerdekaan Indonesia tidak dapat ditawar lagi"; Faturachman yang mengatakan "tujuh puluh juta rakyat Indonesia terharu mendengar pengumuman tersebut karena janji pemerintah Jepang telah diucapkan, maka janji ini juga tentu akan dapat terwujud"; dr. Maas berpendapat bahwa untuk menghargai kemerdekaan, harus disediakan alat untuk menyambutnya, seperti misalnya intensifikasi latihan pemuda; serta Ir. Sofwan, Oey Tjong Hauw, dan dr. Samsi menyatakan akan bekerja lebih giat untuk mencapai kemenangan akhir.[529] Dari seluruh anggota Chuo Sangi-in, tidak ada seorang pun yang membicarakan mengenai kemerdekaan Indonesia. Untuk menyusul jawaban atas pertanyaan Saiko Shikikan, dibentuk lagi satu Panitia Istimewa yang diketuai oleh R.P. Suroso.

"Sehubungan dengan diperkenankannya kemerdekaan Indonesia kelak di kemudian hari, Chuo Sangi-in menyatakan terima kasih kepada Tenno Heika dan Tentara Jepang.

Pada hari itu juga diumumkan jawaban terhadap pertanyaan tersebut, sebagai berikut: "Sehubungan dengan diperkenankannya kemerdekaan Indonesia kelak di kemudian hari, Chuo Sangi-in menyatakan terima kasih kepada Tenno Heika dan Tentara Jepang. Chuo Sangi-in Juga menyatakan kesanggupan bangsa Indonesia untuk terus berjuang bersama Jepang, menanamkan semangat keprajuritan dalam hati seluruh rakyat Indonesia agar menjadi bangsa yang kuat untuk merdeka, berusaha untuk memperkuat dan memperbesar pasukan tentara Peta dan Heiho, melipatgandakan produksi, menggerakkan tenaga pekerja, serta menambah erat rasa persaudaraan di antara bangsa-bangsa Asia Timur Raya menuju ke arah kekeluargaan dan kemakmuran. Dan hendaknya pemerintah pendudukan mengumumkan

529 *Ibid.*, hlm. 80-81

diperkenankannya kemerdekaan Indonesia kepada seluruh rakyat Indonesia sampai kepelosok-pelosok, serta memperingati tanggal 7 September sebagai hari diperkenankannya kemerdekaan Indonesia di kemudian hari, dengan mengibarkan bendera Jepang dan bendera kebangsaan Indonesia.".

Dengan dibacakannya jawaban Chuo Sangi-in tersebut, maka Sidang Istimewa pun kemudian ditutup. Tindakan yang dilakukan pemerintah pendudukan atas jawaban Chuo Sangi-in pada tanggal 6 Februari 1945 ditetapkan melalui Jawa Hokokai, agar penduduk bersedia untuk membantu perang dan mengerahkan harta benda mereka untuk kepentingan perang. Ini membuat rakyat Indonesia yang sudah miskin menjadi semakin miskin.

Dengan dibacakannya jawaban Chuo Sangi-in tersebut, maka Sidang Istimewa pun kemudian ditutup.

Sebelum sidang Chuo Sangi-in diselenggarakan, suatu rapat raksasa telah diadakan di Lapangan Ikada untuk mengumumkan janji kemerdekaan ini dengan resmi kepada seluruh rakyat. Semua pegawai dan murid-murid sekolah berbaris menghadiri rapat tersebut dengan membawa bendera "Merah Putih" dan *Hinomaru*.

Bersamaan dengan janji kemerdekaan, bendera Indonesia diakui sah dan diperbolehkan untuk dikibarkan bersama bendera Jepang. Pada tanggal 28 September 1944, diadakan rapat Barisan Pelopor yang diselenggarakan di Taman Raden Saleh. Rapat itu mengambil keputusan untuk "meminta kepada Saiko Shikikan agar dapat diadakan milisi umum di Indonesia". Tuntutan ini sama seperti ketika zaman penjajahan Belanda. Masalah milisi umum ini dibahas pada sidang Chuo Sangi-in yang keenam.

4.10 Sidang VI Chuo Sangi-in, 12–17 November 1944: Mempersatukan Segala Tenaga dan Mempertinggi Derajat Penduduk ke arah Perjuangan dan Pembentukan Indonesia Merdeka

Berdasarkan Maklumat Saiko Shikikan Nomor 3 tentang panggilan sidang, maka pada tanggal 12 November dibukalah Sidang Keenam Chuo Sangi-in. Selama sidang-sidang diselenggarakan, sidang inilah yang terbanyak dihadiri oleh para undangan di luar anggota, yaitu antara lain *Kikakukacho* (Kepala Bagian Perencanaan Gunseikanbu), *Naimubucho* (Kepala Departemen Dalam Negeri), *Jakarta Tokubetsu Shicho* (Kepala Daerah Kota Praja Istimewa Jakarta), para Sanyo

(penasihat), wakil dari Jawa Hokokai, Masyumi, dan Fujinkai, Wakil Ketua *Tokubetsu Shi Kakyo Sokai* (Perhimpunan Orang Cina Kota Praja Istimewa), penduduk sipil Jepang, serta para wartawan dan lain-lainnya. Maksud dari diundang pihak-pihak tersebut adalah untuk mendengar usul-usul mereka sehubungan dengan diumumkannya janji kemerdekaan. Pertanyaan yang diajukan oleh Saiko Shikikan adalah "bagaimana cara memperoleh hasil yang sungguh-sungguh dalam hal membulatkan segala tenaga penduduk untuk menjalankan perang, dan cara apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan derajat penduduk pada tingkatan perang yang memuncak?". Pada penjelasan tentang pertanyaan tersebut, Somubucho menyatakan bahwa, "Jepang telah berhasil mengusir Pasukan Laut Istimewa Amerika dalam pertempuran di Laut Taiwan dan Filipina". Dalam penjelasannya tersebut, ia sama sekali tidak menyinggung kekalahan-kekalahan yang diderita tentara Jepang selama bulan Juli dan Agustus, yang sesungguhnya merupakan titik balik bagi kekalahan Jepang di Pasifik.

Telah disebutkan juga di atas tentang milisi umum yang diusulkan oleh Barisan Pelopor. Mengenai masalah ini, Somubucho menyatakan bahwa permohonan itu pada dasarnya diterima baik oleh pemerintah pendudukan, tetapi mengingat gentingnya keadaan perang Jepang, maka agaknya pemerintah tidak akan punya cukup waktu untuk menyelenggarakan milisi umum, terlebih hal itu jelas akan memakan waktu bertahun-tahun. Tegasnya, usul tersebut ditolak dan masalah yang dibahas dalam sidang Chuo Sangi-in ini tetap saja ditekankan pada bantuan perang.

Untuk merundingkan pertanyaan Saiko Shikikan, para anggota mulai mengemukakan pendapatnya. Di antaranya adalah Otto Iskandar Dinata yang mengulangi pertanyaan Saiko Shikikan dan penjelasan Somubucho tentang keadaan yang dihadapi Jawa, yaitu terkait kemungkinan Jawa menjadi medan perang. Otto Iskandar Dinata berpendapat bahwa perlu dibentuk suatu "barisan pengangkut" yang cepat, baik untuk pengangkutan barang-barang untuk kepentingan perang maupun bahan pangan, serta "pasukan palang merah". Selain itu, Abikusno Cokrosuyoso menganjurkan pembentukan organisasi pertahanan dan penyerangan.

Telah disebutkan juga di atas tentang milisi umum yang diusulkan oleh Barisan Pelopor.

Tokoh nasional asal Sunda disebut di atas juga menyampaikan bahwa badan-badan yang sudah ada saat ini hanya bersifat untuk memperkuat pertalianan di garis belakang, seperti Tonarigumi, Fujinkai, Keibodan, Seinendan, dan Jawa Hbkdkai, sehingga beberapa

badan lainnya perlu untuk disatukan. Lalu, untuk menyempurnakan badan penyerangan, di samping Peta dan Heiho hendaknya dibentuk "laskar rakyat", serta didirikan pusat gabungan ahli, baik di bidang teknik, ekonomi, militer, dan lain-lain yang akan menyempurnakan usaha tersebut. Selain itu, Puro Martodipuro mengajukan agar pemuka atau pemimpin rakyat juga harus berani menderita kesukaran seperti rakyat dan agar diadakan pemberantasan buta huruf.

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas, terlihat bahwa sebenarnya anggota Chuo Sangi-in pun tidak menutup mata terhadap keadaan sekelilingnya, walaupun mereka juga menyadari bahwa mereka tidak dapat berbuat banyak di bawah pendudukan Jepang karena selalu dibatasinya pembicaraan dalam sidang. Maka, dapat dikatakan bahwa para anggota Chuo Sangi-in ataupun para pemimpin lainnya yang bekerja pada Pemerintah Pendudukan Jepang tidak pernah mengadakan penjajakan untuk mengetahui apa keinginan rakyat yang sebenarnya.

Anggota Chuo Sangi-in lainnya yang mengemukakan pendapatnya adalah Mr. Sumanang yang menyatakan perlunya persatuan penduduk, baik antara Jawa Hokokai dengan Masyumi maupun dengan Kakyo Sokai. Oey Tjong Hauw menyatakan bahwa untuk mencapai persatuan persaudaraan, haruslah melalui Tonarigumi yang dapat memulai cara-cara mempererat persaudaraan antara bangsa-bangsa. Pada kesempatan dengar pendapat tersebut, pengajuan pendapat tidak terbatas pada para anggota Chuo Sangi-in saja, tetapi juga para undangan lain, seperti yang disebutkan sebelumnya. Yang mengajukan pendapatnya antara lain adalah Wakil Ketua Tokubetsu-shi Kakyo Sokai, Then Djin Seng, yang menyatakan perlunya mempererat hubungan antargolongan penduduk Indonesia, serta pembentukan badan pertemuan agar pemusatan tidak hanya berada di pucuk pimpinan Jawa Hokokai, tetapi juga di tiap daerah besar dan kecil. Dikatakannya pula bahwa pihak Tionghoa sudah lama memperlihatkan kesanggupannya dalam menghadapi perang. Kemudian, Kartosudarmo dari Masyumi dan Wangsa Wijaya dari Jawa Hokokai juga menekankan perlunya persaudaraan sebagai syarat utama dalam usaha memperkuat kemerdekaan Indonesia kelak.

Dengan berbagai pendapat tersebut di atas, yang merupakan bahan untuk menjawab pertanyaan Saiko Shikikan, Ketua Chuo Sangi-in membentuk dua bunkakai. Bunkakai I membahas masalah terkait upaya memperkuat dan membulatkan segala sumber daya manusia,

Bunkakai I membahas masalah terkait upaya memperkuat dan membulatkan segala sumber daya manusia, alam, dan kebendaan di Pulau Jawa

alam, dan kebendaan di Pulau Jawa sementara Bunkakai II membahas masalah terkait cara meningkatkan derajat penduduk pada situasi perang yang terus memuncak.

Sesudah kedua *bunkakai* mengadakan perundingan masing-masing, maka pada tanggal 16 November dibentuk Panitia Istimewa untuk menyusun keputusan kedua *bunkakai* sebagai jawaban atas pertanyaan Saiko Shikikan. Keputusan itu adalah Chuo Sangi-in berpendapat bahwa segala tenaga, baik manusia maupun benda yang ada di Pulau Jawa, harus didorong efisiensinya dengan cara:

1. Menyempurnakan semua tindakan dan usaha yang telah dianjurkan oleh Chuo Sangi-in dalam sidang-sidang terdahulu;
2. Mengadakan koordinasi atas segala badan-badan yang ada dan ditambah dengan tenaga golongan yang akan disusun, seperti golongan tenaga ahli;
3. Sehubungan dengan adanya serangan balasan dari Amerika ataupun Inggris, baik yang terlihat maupun tidak, penduduk wajib dengan perantaraan badan-badan dari atas sampai Tonarigumi, memperhebat tindakan untuk menangkis serangan udara dan serangan agen rahasia musuh; untuk itu hendaknya:
   a. Jawa Hokokai dengan bagian-bagiannya diwajibkan membantu gerakan pembasmian mata-mata musuh;
   b. Pemerintah mengadakan pembersihan masyarakat Jawa dari pengaruh Sekutu, terutama di kalangan orang-orang yang mempunyai kedudukan penting;
4. Seluruh penduduk hendaknya disiapkan untuk menghadapi perang, sehingga usaha yang perlu dijalankan adalah latihan keprajuritan;
5. Hendaknya pasukan-pasukan dipersenjatai dengan lengkap; dan
6. Untuk mempersatukan segala tindakan dan usaha tersebut di atas, hendaknya di tiap Shu, ataupun daerah satuan militer, pimpinan diletakkan dalam satu tangan.

Seluruh penduduk hendaknya disiapkan untuk menghadapi perang, sehingga usaha yang perlu dijalankan adalah latihan keprajuritan

Atas pertanyaan yang kedua, yaitu untuk mempertinggi derajat penduduk pada tingkatan perang, Chuo Sangi-in mengusulkan perluasan latihan untuk memperkuat semangat perjuangan dan kebaktian, serta menimbulkan rasa percaya terhadap diri sendiri dan

memperbesar rasa tanggung jawab. Pelatihan ini juga dimaksudkan untuk memberikan kesadaran kepada rakyat terhadap kewajiban pada negara dan bangsa yang berdasarkan cita-cita Asia Timur Raya. Cara yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Latihan rohani, yaitu memperkuat semangat juang dan kebaktian serta disiplin diri sendiri, mendidik rakyat untuk menolong dirinya sendiri, menebalkan rasa kebangsaan Indonesia berdasarkan cita-cita Asia Timur Raya, serta memperbaiki budi pekerti dengan memperhatikan dasar-dasar agama;
2. Latihan jasmani, yaitu meningkatkan kesehatan rakyat dengan memperbaiki cara hidup sehari-hari, baik mengenai makanan maupun pemberantasan penyakit;
3. Latihan pengetahuan, yaitu berusaha dengan segala tenaga untuk memberantas buta huruf, serta memperkuat kesadaran berkoperasi di kalangan rakyat karena koperasi adalah badan yang juga mendidik rasa percaya diri sendiri dan rasa tanggung jawab. Selain itu, untuk memperluas pengetahuan, dibuatlah sekolah-sekolah dan kursus-kursus, termasuk juga memperdalam pengetahuan terkait kebudayaan, sejarah, bahasa, dan kesenian; dan
4. Untuk menyempurnakan hal tersebut di atas, perlu diadakan latihan di tiap Shu dengan mengikutsertakan segala golongan. Misalnya, golongan pegawai negeri, pangreh praja, alim ulama, gum, pengurus Jawa Hokokai, dan kalangan Tonarigumi.

... pada masa pendudukan Jepang, jumlah murid menurun sebanyak tiga puluh persen pada sekolah dasar dan sembilan puluh persen pada sekolah menengah.

Jawaban Chuo Sangi-in yang pertama, yaitu agar para prajurit diberi senjata yang sesungguhnya dalam latihan, masih tidak dikabulkan oleh pemerintah pendudukan, yang tentu dengan pertimbangan bahwa ada kemungkinan kelak senjata itu akan digunakan untuk melawan Jepang dan bukannya demi pertahanan perang. Sedangkan, mengenai pertanyaan Saiko Shikikan untuk meningkatkan derajat penduduk, salah satu jawaban Chuo Sangi-in adalah dengan cara menambah ilmu pengetahuan. Sehubungan dengan itu, perlu diketahui bahwa dalam sistem pengajaran pada masa pendudukan Jepang, jika dibandingkan dengan masa akhir penjajahan Belanda, jumlah sekolah dasar menurun dari 21,500 menjadi 13,500 sekolah di seluruh Indonesia, sementara sekolah menengah menurun dari 850 menjadi 20 sekolah saja.

Maka, pada masa pendudukan Jepang, jumlah murid menurun sebanyak tiga puluh persen pada sekolah dasar dan sembilan puluh persen pada sekolah menengah. Akibatnya, angka buta huruf melonjak tinggi sekali, walaupun ada usaha untuk memberantas buta huruf yang sebelumnya dipelopori oleh Putera, Jawa Hokokai, dan Tonarigumi.

Pada masa pendudukan Jepang, semua perguruan tinggi ditutup, walaupun kemudian ada yang dibuka kembali seperti Sekolah Tinggi Dokter (*Ika Daigaku*) di Jakarta dan Sekolah Tinggi Teknik (*Kogyo Daigaku*) di Bandung. Jepang sendiri membuka Sekolah Tinggi Pamong Praja (*Kenkoku Gakuin*) di Jakarta dan Sekolah Tinggi Kedokteran Hewan di Bogor.

Susunan kurikulum maupun sistem pengajaran pada masa pendudukan Jepang seluruhnya ditujukan untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Misalnya, pada tingkat sekolah dasar dan menengah, para guru dilatih di Jakarta untuk menerima suatu indoktrinasi dalam bentuk propaganda yang dilakukan pemerintah Jepang. Sehubungan dengan itu, mata pelajaran yang diberikan antara lain pendidikan semangat, dalam arti para siswa diharuskan memiliki semangat Jepang atau yang disebut dengan *Nippon Seishin*. Selain itu, dipelajari pula bahasa dan adat Jepang, lagu-lagu Jepang, olahraga, pendidikan tentang dasar-dasar pertahanan, dan lain sebagainya.

Pada sidang Chuo Sangi-in hari keempat, yaitu yang berlangsung pada tanggal 15 November 1944, diajukan sejumlah usulan. Usul pertama diajukan oleh Mr. Iskaq, yaitu tentang memperbaiki masalah penyerahan padi. Usul ini diajukan sehubungan dengan anjuran Pemerintah Pendudukan Jepang untuk melipatgandakan hasil bumi. Usul kedua diajukan oleh Otto Iskandar Dinata, yaitu mengenai usaha menghidupkan semangat kebaktian pedagang.

Dengan adanya kedua usul tersebut di atas, Ketua Chuo Sangi-in membentuk Panitia Istimewa untuk merundingkan usul-usul tersebut. Setelah mengadakan perundingan, Panitia Istimewa yang merundingkan usul Mr. Iskaq memutuskan bahwa tindakan yang perlu diambil dalam hal penyerahan padi adalah sebagai berikut:

1. Memperdalam kesadaran rakyat tentang pentingnya melipatgandakan hasil bumi, menyediakan alat pertanian sebagai hadiah penghargaan atas kebaktian petani. Untuk keperluan ini, hendaknya diserahkan kepada Jawa Hokokai; dan
2. Di tiap wilayah hendaknya dibentuk semacam koperasi

Susunan kurikulum maupun sistem pengajaran pada masa pendudukan Jepang seluruhnya ditujukan untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya.

pertanian, bersama-sama dengan pangreh praja turut membantu menetapkan bagian penyerahan padi. Hendaknya pengurus koperasi pertanian dapat membina hubungan yang erat dengan pabrik penggilingan padi. Panitia Istimewa yang merundingkan usul yang kedua memutuskan bahwa dalam dunia perdagangan, perlu diutamakan kepentingan umum guna mencegah adanya perdagangan gelap. Diusulkan pula agar diadakan pertemuan resmi para pedagang se-Jawa untuk membentuk satu organisasi kaum pedagang yang ditentukan oleh panitia persiapan perekonomian baru bagi rakyat di Jawa.

Setelah mengadakan perundingan, diputuskanlah lima pedoman hidup, atau apa yang disebut "Panca Dharma" untuk bangsa Indonesia

Selain kedua usul di atas, pada sidang keenam ini diajukan mosi oleh dr. Samsi dan Mr. R. Sartono, yang dimaksudkan untuk memperkokoh keputusan Permusyawaratan Asia Timur Raya yang diadakan tanggal 6 November 1943 setahun yang lalu. Mosi ini mendapat sambutan dari Fathurachman yang menyatakan kegembiraannya karena adanya hubungan dengan bangsa-bangsa yang berada dalam kawasan Asia. Untuk menyusun rancangan keputusan, dibentuk satu Panitia Istimewa lagi yang diketahui oleh Ir. Soekarno sendiri. Setelah mengadakan perundingan, diputuskanlah lima pedoman hidup, atau apa yang disebut "Panca Dharma" untuk bangsa Indonesia, sehubungan dengan Trimurti Perjuangan Indonesia. Trimurti Perjuangan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Berjuang mati-matian untuk mencapai kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya dengan menghancurkan Amerika, Inggris, dan Belanda, serta menyusun Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya;
2. Berjuang mencapai dan membangun Indonesia Merdeka yang sempurna berdasarkan moral yang utama; dan
3. Berjuang melukiskan sejarah baru dengan angkatan muda Indonesia sebagai barisan depan untuk mengembalikan bangsa Indonesia pada semangat dan adat lembaga yang asli.

Berdasarkan ketiga hal tersebut di atas itulah, ditetapkan lima pedoman hidup, yaitu sebagai berikut:

1. Kita bersama dengan bangsa-bangsa lain di Asia Timur Raya adalah sekutu yang sehidup-semati dengan Jepang;
2. Kita akan mendirikan negara Indonesia Merdeka, dengan penuh penghormatan atas jasa/bantuan Jepang dan tetap menjadi anggota persemakmuran;

3. Kita akan berusaha untuk memajukan moralitas yang tinggi dan kebudayaan kita;
4. Kita akan mengabdi kepada negara dan rakyat dengan seluruh kekuatan kita dan bertaqwa kepada Allah; dan
5. Berdasarkan prinsip Jepang Hakko Ichi-u, kita akan berjuang membangun perdamaian abadi.

Dari keputusan tersebut, tampak mulai adanya perhatian Chuo Sangi-in untuk membicarakan rencana kemerdekaan Indonesia, yang pada sidang-sidang sebelumnya hanya membahas masalah bantuan perang saja.

4.11 Sidang VII Chuo Sangi-in, 21–26 Februari 1945: Dasar Usaha untuk Mencapai Kemenangan Akhir dan Tercapainya Kemerdekaan Indonesia di Kemudian Hari

Keangkuhan pemerintah pendudukan militer Jepang tidak kunjung menurun, demikian pula dengan kekuasaannya. Sementara itu, keadaan ekonomi semakin hari semakin memburuk. Hal itu turut menciptakan keresahan di antara rakyat, yang akhirnya meledak dalam pemberontakan suatu detasemen Peta melawan perwira-perwira Jepang di Blitar pada pertengahan bulan Februari. Pemberontakan ini dilakukan karena kemarahan dan kebencian di kalangan anggota Daidan Blitar karena mereka melihat kesengsaraan dan penderitaan para romusha.

Pemberontakan ini gagal, tetapi telah memberikan kejutan yang amat sangat dan merupakan tantangan yang paling berbahaya terhadap Pemerintah Pendudukan Militer Jepang di Jawa.

Pemberontakan ini gagal, tetapi telah memberikan kejutan yang amat sangat dan merupakan tantangan yang paling berbahaya terhadap Pemerintah Pendudukan Militer Jepang di Jawa. Sekiranya hal ini terjadi pada masa yang lebih awal, kemungkinan besar Pemerintah Pendudukan Militer Jepang akan mengambil tindakan dengan konsekuensi-konsekuensi yang jauh jangkauannya. Tetapi, hal itu terjadi pada tingkatan yang dapat dikatakan terlambat bagi Jepang, yaitu pada masa sesudah diumumkannya "janji kemerdekaan". Maka, pemerintah pendudukan tidak dapat menggunakan pemberontakan ini sebagai alasan untuk memperlambat pelaksanaan "janji kemerdekaan".

Pengawasan Pemerintah Pendudukan Militer Jepang tidak juga diperketat karena adanya pemberontakan di Blitar, karena ternyata

pada akhirnya mereka mulai memperlunak pegangannya terhadap kehidupan politik Indonesia. Sebagai contoh, keadaan dalam sidang Chuo Sangi-in yang ketujuh, yang berlangsung pada bulan Februari 1945. Dalam sidang ini, terbukti bahwa pengawasan pemerintah pendudukan mulai melunak, tidak seketat sebelumnya, sehingga para anggota mulai melontarkan kritik-kritik pada pemerintah.

Pada tanggal 10 Februari 1945, dikeluarkan Maklumat Saiko Shikikan Nomor 1 tentang Panggilan Sidang VII Chuo Sangi-in. Pertanyaan yang diajukan ialah "Bagaimana melaksanakan pembaharuan penghidupan rakyat dengan cepat dan tepat". Alasan yang diberikan sehubungan dengan pertanyaan ini adalah mengingat pentingnya usaha untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, sehingga sudah sewajarnya bila rakyat memperdalam kesadaran bahwa mereka sedang turut berperang dan harus secepatnya menciptakan cara dan jalan yang tepat untuk segala sesuatu dalam penghidupan rakyat yang dipusatkan untuk tenaga perang, bagi tercapainya kemenangan akhir dan kemerdekaan Indonesia.

> Dalam hal ini ada dua macam kebebasan, yaitu kebebasan dari luar yang berarti kebebasan dari musuh (Amerika, Inggris, dan Belanda), dan kebebasan dari dalam.

Dari alasan tersebut di atas, nampaknya bantuan perang tetap ditekankan sebagai komponen yang utama di bahas dalam persidangan, sementara janji kemerdekaan Indonesia hanyalah sebagai alat pendorong rakyat Indonesia agar mau berjuang melawan musuh Jepang, yaitu Sekutu. Dengan kata lain, jika Jepang menang, barulah Indonesia merdeka. Tetapi, hal ini bisa juga tidak terjadi, yaitu bila Jepang menang kemungkinan Indonesia tidak akan dibebaskan dari kekuasaannya, sebab pada dasarnya janji kemerdekaan Indonesia itu diberikan karena keadaan Jepang yang terjepit.

Sehari sebelum sidang diadakan, pada tanggal 20 Februari 1945, seluruh anggota Chuo Sangi-in lengkap menghadap Saiko Shikikan di Istana. Ketua melaporkan pengangkatan anggota baru yang ditunjuk dari Besuki Shu, yaitu Asmo Asmodisastro yang menggantikan Mr. Budhyarto Martoatmojo, sementara Sudirman dari Surabaya Shu menggantikan Mr. Iskaq Cokrohadisuryo.

Pada tanggal 21 Februari 1945, Sidang Ketujuh Chuo Sangi-in dibuka. Seperti biasanya, Somubucho memberikan penjelasan tentang pertanyaan Saiko Shikikan. Somubucho menyampaikan bahwa maksud dari penghidupan baru adalah "bagaimana cara untuk memperbaharui penghidupan lahir dan batin, sehingga sesuai dengan panggilan zaman". Dalam hal ini, ia juga menerangkan mengenai arti kemerdekaan. Dikatakannya bahwa kemerdekaan adalah kebebasan.

Dalam hal ini ada dua macam kebebasan, yaitu kebebasan dari luar yang berarti kebebasan dari musuh (Amerika, Inggris, dan Belanda), dan kebebasan dari dalam. Kebebasan dari dalam inilah yang harus diselidiki. Penjelasan Somubucho ini tentu sangat menarik perhatian para anggota, yang dengan sendirinya menganggap kebebasan dari dalam tentu kebebasan Indonesia dari Jepang sendiri. Sehubungan dengan pertanyaan Saiko Shikikan maupun penjelasan Somubucho, para anggota mengemukakan pendapatnya.

Mr. Suyono dan R.H. Fathurachman menganjurkan agar rakyat diberi sikap hidup baru dalam semangat, termasuk di bidang ekonomi dan pendidikan. Dr. Rajiman menganjurkan agar sifat lemah yang terdapat dalam rakyat Indonesia, sebagai akibat penjajahan Belanda, diganti dengan sifat rakyat yang merdeka.

Berbagai pendapat tersebut di atas merupakan bahan untuk menjawab pertanyaan Saiko Shikikan. Untuk itu, Ketua Chuo Sangi-in membentuk satu Panitia Istimewa yang terdiri dari seluruh anggota dan diketuai oleh Ir. Soekarno sendiri. Dalam perundingan, para anggota mengemukakan pendapatnya, antara lain, Ir. Ukar, T. Rujito, dan T. Gunari meminta agar ditetapkan aturan hidup untuk rakyat sesuai dengan zaman dan semangat kebaktian ditanamkan dalam hati rakyat; Mr. Sunarko mengatakan bahwa syarat pembaharuan penghidupan terletak pada pendidikan, dan ia mengharapkan agar tenaga intelektual dikerahkan untuk membimbing rakyat. Selanjutnya, T. Aris, Abikusno Cokrosuyoso, K.B. Hadikusumo, dan Mr. Lathuharhary, serta Puro Martodipuro menyatakan bahwa perlu dibangkitkan kekuatan rakyat dengan mempertebal keyakinan agama dan mengingat adat istiadat, selain kesehatan juga harus diperhatikan.

Kemudian dr. Yap Tjwan Bing mengemukakan pentingnya persatuan di antara golongan penduduk, sehingga untuk itu perlu diperdalam sifat ketimuran.

Kemudian dr. Yap Tjwan Bing mengemukakan pentingnya persatuan di antara golongan penduduk, sehingga untuk itu perlu diperdalam sifat ketimuran. Tampaknya hal ini ditujukan kepada orang-orang Cina karena jika diperhatikan, hampir semua usul yang diajukan oleh wakil golongan Cina selalu ditekankan untuk persatuan segala golongan bangsa di Jawa. Selain itu, Bing meminta agar pemerintah pendudukan mendirikan laboratorium istimewa untuk menyelidiki bahan makanan bagi rakyat. Dr. Marzuki menyatakan cita-cita Indonesia merdeka yang baru dapat menarik perhatian rakyat Indonesia, jika diselaraskan dengan ayat-ayat Al-Quran dan Hadits.

Selanjutnya, A.R. Baswedan menyatakan agar diadakan pendaftaran tenaga kerja dari segala golongan penduduk, sehingga

setiap anggota masyarakat mendapat bagian untuk berbakti pada masyarakat. Mr. Maramis menyatakan bahwa untuk membentuk penghidupan baru, hubungan antara pimpinan dan rakyat, serta antara sesama pemimpin harus dipererat. Yang terakhir, Moh. Toha dan Wiwoho menambahkan bahwa Jawa Hokokai dan Pangreh Praja hubungannya sudah baik, tetapi perlu disempurnakan dan hendaknya diusahakan pula mengadakan badan-badan Hokokai, Masyumi, Fujinkai, dan lain-lain di desa-desa, serta termasuk pula mendirikan balai desa untuk keperluan pembimbingan rakyat.

... Chuo Sangi-in memberikan kepercayaan kepada Angkatan Muda Indonesia agar dengan semangat yang berapi-api dan teguh bersedia untuk mempertahankan nusa dan bangsa Indonesia.

Setelah diadakan dengar pendapat dan perundingan, Chuo Sangi-in memutuskan bahwa usaha utama yang perlu ditekankan untuk mencapai kemenangan akhir dan kemerdekaan bangsa dan rakyat Indonesia adalah memperbesar tenaga produktif untuk melipatgandakan hasil bumi dan pertahanan. Untuk itu, Chuo Sangi-in memberikan kepercayaan kepada Angkatan Muda Indonesia agar dengan semangat yang berapi-api dan teguh bersedia untuk mempertahankan nusa dan bangsa Indonesia. Sehubungan dengan itu, Chuo Sangi-in menganjurkan kepada rakyat Indonesia untuk mengamini usaha gerakan hidup baru, sebagai berikut:

1. Kuatkan semangat juang dan kebaktian, serta tanamkan semangat keprajuritan dan sifat kesatriaan;
2. Kuatkan keyakinan pasti menang dalam pertempuran apapun;
3. Bulatkan kemauan dengan tekad yang tak kunjung padam;
4. Kuatkan rasa cinta pada tanah air dan semangat Asia Timur Raya;
5. Tunduk pada disiplin;
6. Kuatkan semangat tolong-menolong;
7. Kuatkan kepercayaan pada kesanggupan bangsa;
8. Teguhkan iman dan hidup bertakwa kepada Tuhan dan menjalankan ajaran-Nya;
9. Menjunjung tinggi adat istiadat dan kebudayaan ketimuran;
10. Kuatkan disiplin pada diri sendiri;
11. uatkan kepercayaan dan penghargaan pada diri sendiri;
12. Berantas sifat mementingkan diri sendiri;
13. Hormati orang tua;
14. Biasakan hidup bersih lahir dan batin;
15. Hormati adat istiadat dan buang kebiasaan buruk;

16. Cintai kebenaran dan keadilan;
17. Tepati janji;
18. Kuatkan keberanian bertanggung jawab;
19. Jauhkan dari segala fitnah dan jangan memfitnah;
20. Setia dan tahu terima kasih;
21. Jangan omong kosong;
22. Golongan atas, hiduplah bersahaja dan berhemat;
23. Pemimpin, berilah contoh dalam kesederhanaan dan keikhlasan;
24. Tuntutlah pelajaran dan membaca;
25. Tanamkan semangat untuk belajar;
26. Biasakan bangun pagi dan lekas bekerja;
27. Kuatkan usaha menanami setiap ruang tanah dengan tanaman yang berguna;
28. Pergunakan setiap waktu yang luang;
29. Muliakan dan hargai pekerjaan tangan;
30. Jagalah keselamatan tetanggamu sebagaimana menjaga keselamatan keluarga sendiri;
31. Ikhlaskan hati untuk agama, tanah air, dan bangsa;
32. Bersatulah rakyat Indonesia; dan
33. Selalulah siap sedia.

Jawaban Chuo Sangi-in, seperti yang disebutkan di atas, dapat dikatakan sebagai hasil sidang yang terpenting selama dewan ini berdiri karena hal yang dibicarakan lebih berani dan hidup dibandingkan dengan sidang-sidang sebelumnya. Dewan ini mengeluarkan gerakan hidup baru dalam 33 pasal yang direncanakan untuk menyadarkan semua lapisan rakyat bagi kemerdekaan Indonesia. Program ini dapat dikatakan luar biasa, karena sama sekali tidak menguraikan ide-ide atau slogan-slogan Jepang. Gerakan hidup baru ini kemudian menjadi alat propaganda yang paling luas dipublikasikan di tangan Hokokai atau Masyumi, yang tampaknya bersaing untuk memperebutkan kepemimpinan di dalamnya. Tindakan yang diambil oleh pemerintah pendudukan sehubungan dengan jawaban Chuo Sangi-in sudah dapat diduga tentunya, yaitu hanya mengambil hal-hal yang menguntungkan Jepang, yaitu Pasal 4 tentang menguatkan rasa cinta pada tanah air Indonesia dan semangat Asia Timur Raya, Pasal 27 tentang usaha menanami setiap ruang tanah yang kosong, dan Pasal 29 tentang memuliakan kerja dan menghargai pekerjaan tangan. Semua pasal yang diterima tersebut adalah untuk kepentingan bantuan perang.

... sejak pemerintahan pendudukan Jepang memegang kekuasaan di Jawa, salah satu aturan dalam bidang ekonomi adalah perbatasan keluar-masuknya barang-barang dari satu daerah ke daerah lain.

... Hatta atas nama Buntaran, Sofwan, dan Rooslan mengusulkan "perbaikan keadaan romusha" yang dalam praktiknya telah banyak terjadi kesalahan.

Pada sidang hari keempat, tanggal 24 Februari 1945, para anggota mengajukan usul-usul. Seperti telah diketahui, sejak pemerintahan pendudukan Jepang memegang kekuasaan di Jawa, salah satu aturan dalam bidang ekonomi adalah perbatasan keluar-masuknya barang-barang dari satu daerah ke daerah lain. Hal ini menyebabkan timbulnya perbedaan kemakmuran yang sangat menyolok di antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, oleh karena pertukaran barang-barang kebutuhan sehari-hari tidak dapat dilakukan dengan bebas. Sehubungan dengan itu, Sudirman, Rooslan, Sofwan, dan Kusumo Utoyo mengajukan usul agar dilakukan pertimbangan perubahan dalam peraturan mengenai peredaran barang-barang kebutuhan sehari-hari, atau setidaknya diusahakan agar kelebihan hasil dari satu daerah dapat dikirim ke daerah lain yang membutuhkan. Untuk membahas usul ini, dibentuk Panitia Istimewa, yang setelah mengadakan perundingannya memutuskan dengan suara bulat, sebagai berikut:

1. Pembatasan barang-barang, terutama barang kebutuhan sehari-hari, hendaknya diperlonggar dengan tidak mengurangi kepentingan pemerintah; dan
2. Hendaknya pemerintah mendatangkan barang-barang tersebut dari daerah yang kelebihan ke daerah yang kekurangan.

Usul lainnya merupakan usul gabungan yang diusulkan oleh Dr. Rajiman atas nama Sunarko, Sofwan, dan Dr. Rajiman sendiri, yaitu "agar latihan keprajuritan untuk rakyat diperhebat". Usul ini kemudian dirundingkan dalam Panitia Istimewa yang diketuai oleh Wiwoho, yang kemudian memutuskan sebagai berikut:

1. Agar di seluruh Jawa dan Madura, di samping memperkuat barisan tentara seperti Peta dan Heiho, rakyat hendaknya juga dilatih dengan teratur tentang ilmu perang dengan menggunakan senjata, agar siap tempur setiap saat, terutama pada barisan-barisan yang sudah teratur dalam gabungan Seinendan, Keibodan, Suishintai, Gakutotai (Barisan Pelajar), dan lain-lain;
2. Meminta pertimbangan pemerintah agar para pemuda Indonesia diberi kesempatan untuk dilatih dalam angkatan udara;
3. Agar rakyat umum diperkenankan mempelajari ilmu kebatinan (kekuatan gaib) untuk memperkuat usaha perang; dan

4. Latihan itu hendaknya digerakkan untuk memperluas pengertian cita-cita Perang Asia Timur Raya dan keyakinan Indonesia Merdeka.

Dalam perang, tidak saja hasil produksi yang harus dilipatgandakan, tetapi juga perlu diperbesar tenaga produktif untuk menyelenggarakan tuntutan tersebut. Sehubungan dengan itu, Hatta atas nama Buntaran, Sofwan, dan Rooslan mengusulkan "perbaikan keadaan romusha" yang dalam praktiknya telah banyak terjadi kesalahan. Setelah diadakan perundingan dalam Panitia Istimewa tersendiri yang dipimpin oleh Sosrodiningrat, panitia memutuskan sebagai berikut:

1. Memelihara tenaga dan semangat pekerja, dalam hal ini perlu dilakukan:
   a. Romusha diperlakukan dengan baik, di luar maupun di dalam pekerjaannya;
   b. Romusha sedapat-dapatnya diberi makan cukup;
   c. Romusha diberi pakaian seragam selama bekerja;
   d. Bila telah habis masa perjanjian bekerja, mereka hendaknya dikembalikan ke tempat asalnya, dan jangan dibiarkan terlantar;
   e. Romusha yang dirawat sementara waktu di asrama, sebelum dikirim ke daerah tempat bekerja ataupun sebelum dikirim kembali pulang, hendaknya diperlakukan pantas "sebagai manusia";
   f. Romusha yang akan dikerahkan hendaknya diperiksa lebih dulu kesehatannya, sehingga untuk ini diminta bantuan *Shu Eiseika* (Bagian Kesehatan Daerah) dan Izi Hokokai (Wadah Kebaktian Para Dokter).
2. Tentang pengerahan tenaga, hendaknya para petani jangan sampai terganggu dalam melipatgandakan hasil bumi. Hendaknya pengerahan kaum tani dibatasi dan kekurangan romusha dipenuhi dari:
   a. Orang-orang kota yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, tapi sanggup bekerja dengan tidak memandang bangsa;
   b. Pengemis yang berkeliaran di kota; serta
   c. Dalam hal pengerahan tenaga laki-laki dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, yang lebih penting hendaknya diperhatikan adalah apakah lowongan itu dapat diisi dengan tenaga wanita sesuai dengan kemampuannya.

Tentang pengerahan tenaga, hendaknya para petani jangan sampai terganggu dalam melipatgandakan hasil bumi.

Usul berikutnya diajukan oleh K.H. Dewantara dan Suryadiningrat, yaitu mengenai pendidikan. Hal ini diusulkan sehubungan dengan banyaknya anak-anak yang belum bersekolah dan banyaknya pelajar sekolah menengah yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah karena kekurangan biaya. Usul ini dirundingkan dalam Panitia Istimewa, yang kemudian memutuskan:

1. Agar di kota-kota dan di desa-desa diperluas Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah serta sekolah-sekolah lainnya, baik untuk laki-laki maupun perempuan, dengan bantuan tenaga dan benda dari pihak rakyat. Maka, hendaknya Osamu Seirei No. 22 Juli 1943 yang telah diubah dengan Osamu Seirei No. 14 dan 16 April 1944 tentang Pendidikan Rakyat, diubah sedemikian rupa, sehingga rakyat diperbolehkan mendirikan dan mengusahakan sekolah menengah sebagai bantuan kepada pemerintah untuk mencapai kemenangan akhir dan kemerdekaan Indonesia yang berdaulat; dan
2. Hendaknya pemerintah memberikan bantuan pengajaran untuk pemuda rakyat jelata di Jawa dan Madura yang pandai.

Usul mengenai perbaikan keadaan pekerja dan masalah pemasukan barang tidak mendapat perhatian dari pemerintah pendudukan Jepang.

Pada tingkatan perang yang akan menentukan kalah atau menang dan untuk mencapai negara Indonesia Merdeka, seluruh gerakan rakyat Indonesia perlu diperkuat dan dipersatukan, dan untuk itu Chuo Sangi-in mengusulkan agar dua organisasi, Jawa Hokokai dan Masyumi, dipersatukan. Selain usul-usul tersebut di atas, pada Sidang Ketujuli ini diajukan mosi tentang perjuangan dan semboyan "merdeka atau mati". Dengan dibacakannya mosi ini, maka Sidang Ketujuh Chuo Sangi-in ditutup.

Selanjutnya, dapat dipahami bahwa tindakan yang diambil Pemerintah Pendudukan Militer Jepang selaras dengan usul yang diajukan Chuo Sangi-in. Tentang perluasan latihan militer, Jepang tetap menolak melatih lebih dari beberapa orang Indonesia dengan senjata yang sesungguhnya. Umumnya, orang Indonesia hanya dilengkapi dengan bambu runcing atau senapan kayu karena Jepang mengkhawatirkan potensi pemberontakan yang dipicu oleh seringnya orang Jepang berlaku kejam terhadap orang Indonesia. Di lain pihak, pemimpin Indonesia menginginkan latihan militer yang lebih baik bagi rakyat Indonesia untuk mempersiapkan diri bagi kemerdekaan, baik melawan Belanda maupun melawan Jepang sendiri.

Usul mengenai perbaikan keadaan pekerja dan masalah

pemasukan barang tidak mendapat perhatian dari pemerintah pendudukan Jepang. Demikian pula dalam hal pendidikan, Jepang hanya menjanjikan akan menambah sekolah-sekolah, dan mengenai perubahan peraturan sekolah swasta (partikelir), pemerintah pendudukan memberikan kelonggaran dan izin untuk mendirikan sekolah menengah swasta dan sekolah menengah putri.

Organisasi politik yang utama di Jawa pada waktu pendudukan Jepang adalah Masyumi dan Jawa Hokokai. Usul untuk mempersatukan kedua organisasi itu tampaknya tidak menarik perhatian kedua organisasi tersebut, terutama para pengurus Masyumi yang memilih untuk tidak menanggapi anjuran ini.

4.12 Sidang VIII Chuo Sangi-in, 18–21 Juni 1945: Membangkitkan Semangat Rakyat Untuk Memperkuat Persiapan Kemerdekaan Indonesia Secepatnya

Segala sesuatunya berjalan cukup cepat bagi Jepang. Hal itu menyebabkan impian mereka untuk mewujudkan "Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya" lambat laun mulai menghilang. Pada tanggal 1 Maret 1945, Saiko Shikikan mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada tanggal 6 Maret 1945, Saiko Shikikan mengumumkan bahwa masih ada tiga kesulitan untuk dapat mewujudkan kemerdekaan Indonesia, yaitu *pertama*, badan yang menyelidiki persiapan kemerdekaan harus dibentuk; *kedua*, harus didirikan lembaga latihan nasional; *ketiga*, pendapat umum tentang kemerdekaan harus dibangkitkan semangatnya. Setelah terjadi berbagai perubahan lebih lanjut, akhirnya Panglima Tentara Wilayah Ketujuh yang dipimpin oleh Jenderal Itagaki Seishiro di Singapura mengizinkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 28 Mei 1945. Badan ini terdiri dari ketua, wakil ketua, dan enam puluh anggota, termasuk empat orang dari golongan Cina dan Arab, serta seorang dari golongan Indo-Belanda.

Selain itu, terdapat tujuh orang Jepang sebagai anggota istimewa menghadiri setiap sidang, tetapi tidak mempunyai hak suara. Perlu diketahui pula bahwa hampir setengah dari anggota Chuo Sangi-in turut menjadi anggota badan ini. Pada upacara pembukaan badan ini di tanggal 28 Mei 1945, yang bertempat di Gedung Chuo Sangi-in,

Muhammad Yamin dan Soekarno terdapat di antara para pembicara yang mengusulkan lima dasar falsafah negara, yang kemudian dikenal sebagai *Pancasila*

dilakukan pengibaran bendera Hinomaru oleh Mr. A.G. Pringgodigdo, yang kemudian disusul dengan pengibaran bendera "Sang Merah Putih" oleh Toyohido Masuda.

Pada sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sebagian besar anggota Indonesia menekankan pendapatnya mengenai masalah kemerdekaan yang akan datang. Muhammad Yamin dan Soekarno terdapat di antara para pembicara yang mengusulkan lima dasar falsafah negara, yang kemudian dikenal sebagai *Pancasila*. Lalu, sidang kedua di tanggal 10–16 Juli 1945 membicarakan berbagai masalah, antara lain bentuk negara dan struktur pemerintahan. Semua berjalan tanpa campur tangan Jepang. Hanya saja batas wilayah negara yang akan dibentuk tetap berada di dalam Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya.

Resolusi yang kedua ini didorong oleh ketidaksabaran para pemuda dalam menanti janji-janji Jepang yang tidak kunjung tiba.

Sebelum BPUPKI dibentuk, pada tanggal 16–18 Mei 1945 telah diadakan kongres pemuda seluruh Jawa di Bandung yang diselenggarakan atas sponsor Angkatan Muda Indonesia yang dibentuk oleh Jepang pada pertengahan tahun 1944. Acara kongres ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang resmi dengan pidato-pidato sambutan dari orang Jepang, dan yang tidak resmi yang disambung dengan perdebatan antara para utusan. Acara yang tidak resmi ini mempertegas solidaritas antara mereka.

Kongres ini menghasilkan dua resolusi. *Pertama*, semua perkumpulan di Indonesia harus dipersatukan dan bernaung di bawah satu pimpinan; *Kedua*, kemerdekaan Indonesia harus direalisasikan secepatnya. Resolusi yang kedua ini didorong oleh ketidaksabaran para pemuda dalam menanti janji-janji Jepang yang tidak kunjung tiba. Sementara itu di akhir bulan April 1945, Jawa Hokokai mengorganisasikan latihan gerilya bagi penduduk Jawa dengan slogan "merdeka atau mati". Latihan ini dipercayakan kepada kelompok nasionalis yang dipilih secara teliti, yang kemudian disebarkan ke seluruh pelosok di Jawa.

Pada tanggal 18 Juni 1945, untuk terakhir kalinya dalam masa pendudukan Jepang, Chuo Sangi-in mengadakan sidangnya, yaitu Sidang Kedelapan. Ketika itu, perang telah semakin dekat ke Pulau Jawa, sementara Morotai dan Tarakan pada saat itu sudah berada di tangan Sekutu. Serangan bom, terutama di Kalimantan dan Sulawesi, telah bertambah gencar. Pertanyaan yang diajukan oleh Saiko Shikikan pada sidang adalah "bagaimana cara dan jalan untuk melaksanakan usaha membangkitkan segenap penduduk agar bersedia mengerahkan

tenaganya dan menjalankan latihan untuk memperkuat pembelaan dan penyempurnaan usaha persiapan kemerdekaan Indonesia secepatnya".

Sebelum perundingan dilakukan, Ketua Chuo Sangi-in memperkenalkan anggota baru, yaitu Suprojo Projowidagdo dan Ir. Darmawan. Selain itu, juga diadakan pemilihan Wakil Ketua baru untuk menggantikan R.M.A.A. Kusumo Utoyo yang mengundurkan diri. Berdasarkan hasil pemungutan suara, Drs. Mohammad Hatta memperoleh suara terbanyak, disusul oleh K.H. Dewantara. Setelah diserahkan hasil pemilihan tersebut kepada Saiko Shikikan untuk dipertimbangkan, maka Drs. Mohammad Hatta secara resmi diangkat menjadi Wakil Ketua (Huku Gicho) dari Chuo Sangi-in.

Untuk merundingkan pertanyaan Saiko Shikikan, ketua membentuk dua Bunkakai. Bunkakai I membahas cara dan jalan melaksanakan usaha untuk membangkitkan semangat penduduk agar mengerahkan tenaganya untuk Indonesia Merdeka. Bunkakai I ini diketuai oleh Mr. Sartono. Sementara, Bunkakai II membahas cara menjalankan latihan untuk memperkuat pembelaan dan penyempurnaan usaha persiapan kemerdekaan dengan secepatnya. Bunkakai II ini diketuai oleh Mr. Latuharhary.

Pada sidang hari ketiga, setelah masing-masing Bunkakai mengadakan perundingannya dan masing-masing ketua menyampaikan laporannya, untuk menyusun kata-kata jawaban berdasarkan putusan kedua Bunkakai, dibentuklah Panitia Istimewa yang diketuai oleh K.H. Dewantara. Putusan Chuo Sangi-in adalah sebagai berikut:

"Atas dasar keyakinan bahwa Perang Asia Timur Raya adalah suatu perang kemerdekaan dan lanjutan pergerakan kemerdekaan rakyat Indonesia menentang imperialisme Barat, maka Chuo Sangi-in menganjurkan:

A.

1. Mengadakan gerakan semangat, yaitu:
   a. Memperkuat cinta tanah air;
   b. Mengembangkan sifat keprajuritan; dan
   c. Membangkitkan perasaan kekeluargaan dan persatuan bangsa;
2. Menyerahkan selekasnya kekuasaan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, kepada tenaga Indonesia dengan menyerahkan jabatan pimpinan yang bertanggung jawab kepadanya;
3. Memperluas kesempatan untuk berkembangnya inisiatif

Pada sidang hari ketiga, setelah masing-masing Bunkakai mengadakan perundingannya dan masing-masing ketua menyampaikan laporannya

rakyat dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya; serta

4. Menyempurnakan pembagian bahan makanan dan pakaian bagi rakyat.

B.

1. Memperluas Tentara Peta;
2. Menyempurnakan latihan pembelaan dan perang bagi rakyat, dengan cara:
   a. Latihan menghadapi serangan musuh;
   b. Latihan perang gerilya dan Iain-lain;
3. Membangkitkan dan memperkuat usaha dalam segala bidang, misalnya
   a. Melatih tenaga muda untuk ditempatkan di jawatan negeri, baik di kota maupun di daerah;
   b. Mengerahkan ahli ilmu pengetahuan, filsafat, dan kebudayaan Indonesia untuk memelihara segala usaha dan benda-benda kebudayaan seperti museum, perpustakaan, arsip, lembaga kesenian, dan sebagainya;
   c. Menyelenggarakan usaha pendidikan dan pengajaran; serta
   d. Menyelenggarakan latihan politik, dengan cara memberikan penerangan tentang masalah tata negara, kemerdekaan, dan lain-lain."

Semua ditujukan untuk menipersiapkan suatu negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat penuh.

Selain jawaban atas pertanyaan Saiko Shikikan, Chuo Sangi-in juga mengusulkan agar diadakan perbaikan kehidupan rakyat di desa, serta mengajukan mosi yang menyatakan "agar kaum pemuda bersatu untuk menghancurkan musuh dan mempertahankan Indonesia".

Baik usul maupun mosi yang diajukan Chuo Sangi-in dalam Sidang Kedelapan ini sangat berbeda dengan putusan sidang sebelumnya, yaitu tidak satu masalah pun ditujukan untuk kepentingan penguasa Jepang. Semua ditujukan untuk menipersiapkan suatu negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat penuh. Menurut Harry J. Benda, hal ini terjadi karena Jepang mulai memperlunak pengawasan atas jalannva sidang. Akan tetapi, terlepas dari penilaian tersebut, pada kenyataannya para anggota Chuo Sangi-in mulai menyadari kedudukan Jepang yang semakin terdesak setelah serentetan kekalahan perang.

Hal tersebut merupakan kesempatan yang baik untuk menentukan sikap bangsa Indonesia yang sebenarnya. Permintaan Chuo Sangi-in untuk memasukkan pemuda dan pemimpin militer ke

dalam kepemimpinan nasional merupakan gambaran ketidaksabaran yang secara luas terasa dan semakin meningkat di kalangan orang Indonesia karena keterlambatan Jepang dalam memenuhi janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai jawaban penguasa Jepang atas usul tersebut di atas, pada tanggal 2 Juli 1945, diumumkan persetujuan untuk mendirikan "Gerakan Rakyat Baru". Gunseikan mengangkat empat wakil Indonesia untuk mengetuai panitia persiapan, sementara Gerakan Rakyat Baru, diwakili oleh Soekarno dan Hatta dari kaum nasionalis dan Hokokai, Wahid Hasyim dari Masyumi, dan Wiranatakusumah yang merupakan mantan Bupati Bandung.

Setelah organisasi tersebut di atas dibentuk, Somubucho menegaskan bahwa setiap organisasi pemuda yang tergabung di dalamnya harus tunduk kepada perwakilan sipil generasi tua yang diangkat Gunseikan dalam kerjasama dengan pemerintah. Ini menimbulkan reaksi dari para pemuda, sehingga ketika badan ini dibentuk, tokoh golongan pemuda radikal tidak ada yang bersedia duduk di kursi yang disediakan untuk mereka. Di sini tampak adanya perselisihan paham antara golongan tua dan golongan muda tentang pelaksanaan berdirinya negara Indonesia merdeka.

Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, sejak Maret 1942 sampai dengan Agustus 1945, bekas Hindia Belanda hidup di bawah suatu pendudukan militer. Masa yang singkat ini secara mendalam telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan di Indonesia, misalnya stratifikasi sosial yang tidak lagi berdasarkan kategori rasial, yang pada masa penjajahan Belanda merupakan ciri masyarakat kolonial, ataupun atas dasar kelahiran menurut tingkat kebangsawanan. Hal ini semua berubah di masa pendudukan Jepang. Bangsa Indonesia, yang pada masa penjajahan Belanda menduduki tingkatan sosial yang terakhir, pada masa pendudukan Jepang justru menduduki tingkat yang "seharusnya" di tanah airnya sendiri.

Politik Jepang di Jawa merupakan kebalikan daripada apa yang sebelumnya dijalankan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang secara tradisional kebijaksanaan penjajahannya bertumpu pada dukungan kaum bangsawan Indonesia dan para pejabat dari kelas priyayi. Pada masa pendudukan Jepang, pemimpin-pemimpin nasionalis Indonesia ditunjuk sebagai pejabat tinggi, sedangkan golongan Islam mendapat tempat atau perhatian yang istimewa. Meskipun begitu, peranan yang dimainkan orang Indonesia, terutama dalam posisi penasihat bagi Pemerintah Pendudukan Militer Jepang, bersifat sangat terbatas dalam kenyataannya. Chuo Sangi-in di Jakarta beserta cabang-cabangnya di daerah adalah forum yang sama sekali tidak memadai bagi kegiatan

Politik Jepang di Jawa merupakan kebalikan daripada apa yang sebelumnya dijalankan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, ...

kelompok nasionalis dalam menjalankan propaganda. Chuo Sangi-in, jika dibandingkan dengan dewan rakyat yang dibentuk pemerintah Hindia Belanda, dapat dianggap telah menukar paksa peranan kelompok nasionalis Indonesia, dari yang sebelumnya bertindak sebagai pengritik yang tidak efektif menjadi kolaborator yang sesunguhnya sama tidak efektifnya. Kondisi ini berlaku setidaknya hingga akhir bulan Agustus 1944. Pada masa itu, mereka baru diberikan kesempatan dan kedudukan resmi, yaitu sesudah diberikannya janji kemerdekaan.

Meskipun ada fakta bahwa pemimpin-pemimpin nasionalis tetap dihalangi untuk melaksanakan kekuasaan politiknya, Pemerintah Pendudukan Militer Jepang secara tidak langsung turut membantu dalam pembentukan kelompok elite yang sebenarnya. Mengenai hal ini, pemerintah pendudukan menyadari dan memutuskan untuk mencoba memperlambat proses konsolidasi dengan menggunakan politik memecah belah. Para nasionalis yang terpecah-pecah kedudukannya diberi peranan penting dalam Hokokai atau Tonarigumi. Di samping itu, Jepang juga menempatkan sejumlah penguasa, atau lebih tepatnya para aristokrat, dalam berbagai dewan penasihat. Sebagai contoh, R.M.A.A. Kusumo Utoyo, salah seorang priyayi terkenal di Jawa yang pernah menjadi Bupati Ngawi dan Ketua Muda Volksraad, diangkat menjadi Wakil Ketua Chuo Sangi-in.

Chuo Sangi-in telah berusaha untuk memperbaiki keadaan sosial rakyat Indonesia, terutama rakyat kecil yang dijadikan sebagai romusha, yang semakin buruk keadaannya di bawah kekuasaan pemerintah Jepang. Akan tetapi, walaupun para pemimpin Indonesia yang duduk dalam Chuo Sangi-in telah berusaha sekuat-kuatnya, Chuo Sangi-in tetap tidak mempunyai kekuasaan apapun untuk menentukan jalannya pemerintahan. Keputusan-keputusan sidang Chuo Sangi-in yang dimaksudkan untuk menaikkan derajat bangsa Indonesia, terutama yang ada di Jawa, malah dimanfaatkan oleh penguasa Jepang untuk lebih menekan rakyat Indonesia dengan dalih untuk kemenangan akhir dan terwujudnya cita-cita Indonesia Merdeka.

Rencana Jepang akhirnya terkubur dalam perkembangan keadaan, seiring kekalahan yang diderita Jepang.

Rencana Jepang akhirnya terkubur dalam perkembangan keadaan, seiring kekalahan yang diderita Jepang. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Penguasa Tinggi Wilayah Selatan Jepang mengambil inisiatif dari penguasa Jepang di Jakarta untuk mendirikan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ketika panitia ini mulai bersidang, Jepang menandatangani Perjanjian Potsdam yang menandai penyerahan tanpa syarat Jepang kepada Sekutu. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mencapai kemerdekaannya sendiri tanpa campur tangan Jepang. Kemudian, dengan sendirinya, Chuo Sangi-in

buatan Jepang pun berakhir kegiatannya tanpa suatu pembubaran secara resmi.

Adapun usaha-usaha lainnya dari perwakilan Chuo Sangi-in dalam rangka memperoleh dukungan dan aspirasi rakyat adalah seperti yang dilakukan oleh Soekarno dan Abikusno Cokrosuyoso yang melakukan kunjungan-kunjungan dengan didampingi oleh Shimizu dan Sendenbucho ke Bogor. Di tingkat pusat, pada Sidang Chuo Sangi-in ke-7, Panitia Istimewa telah dibentuk, yang semua anggotanya tergabung di dalamnya dengan Soekarno menjadi *Shusa* (Ketua Panitia).[530]

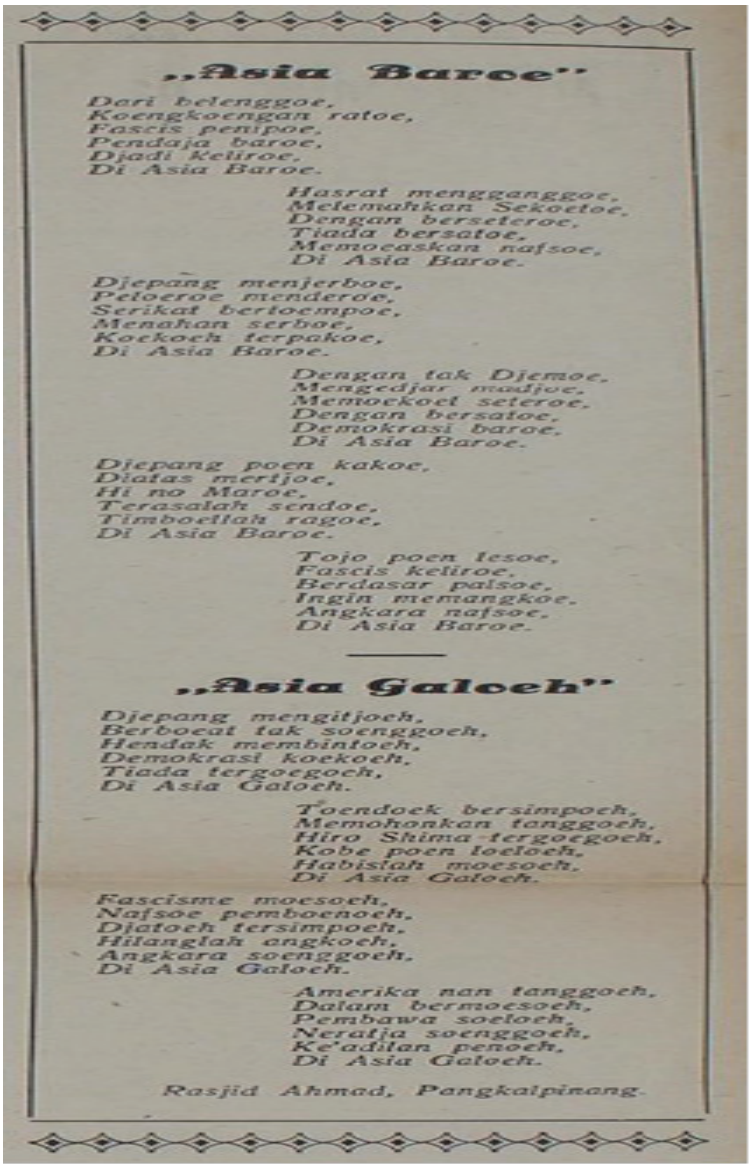

„Asia Baroe"

Dari belenggoe,
Koengkoengan ratoe,
Fascis penipoe,
Pendaja baroe,
Djadi Keliroe,
Di Asia Baroe.

Hasrat menggganggoe,
Melemahkan Sekoetoe,
Dengan berseteroe,
Tiada bersatoe,
Memoeaskan nafsoe,
Di Asia Baroe.

Djepang menjerboe,
Peloeroe menderoe,
Serikat bertoempoe,
Menahan serboe,
Koekoeh terpakoe,
Di Asia Baroe.

Dengan tak Djemoe,
Mengedjar moedjoe,
Memoekoel seteroe,
Dengan bersatoe,
Demokrasi baroe,
Di Asia Baroe.

Djepang poen kakoe,
Diatas mertjoe,
Hi no Maroe,
Terasalah sendoe,
Timboellah ragoe,
Di Asia Baroe.

Tojo poen lesoe,
Fascis keliroe,
Berdasar palsoe,
Ingin memangkoe,
Angkara nafsoe,
Di Asia Baroe.

„Asia Galoeh"

Djepang mengitjoeh,
Berboeat tak soenggoeh,
Hendak membintoeh,
Demokrasi koekoeh,
Tiada tergoegoeh,
Di Asia Galoeh.

Toendoek bersimpoeh,
Memohonkan tanggoeh,
Hiro Shima tergoegoeh,
Kobe poen loeloeh,
Habislah moesoeh,
Di Asia Galoeh.

Fascisme moesoeh,
Nafsoe pemboenoeh,
Djatoeh tersimpoeh,
Hilanglah angkoeh,
Angkara soenggoeh,
Di Asia Galoeh.

Amerika nan tanggoeh,
Dalam bermoesoeh,
Pembawa soeloeh,
Neratja soenggoeh,
Ke'adilan penoeh,
Di Asia Galoeh.

Rasjid Ahmad, Pangkalpinang.

Sumber: Pandji Ra'jat, 3 Desember 1946

Para anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibagi ke dalam beberapa Bunkakai dan satu Panitia Hukum Dasar dengan 19 orang anggota

530 *Ibid.*, hlm. 127

4.13 Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

Para anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibagi ke dalam beberapa Bunkakai dan satu Panitia Hukum Dasar dengan 19 orang anggota di bawah pimpinan Soekarno. Nama kepanitiaan ini kemudian diganti menjadi Panitia Undang-Undang Dasar. Sebagian Panitia Undang-Undang Dasar ditugaskan untuk duduk dalam Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar di bawah pimpinan Prof. Dr. Mr. Supomo. Dalam menjalankan tugasnya, BPUPKI mengadakan dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi yang seluruhnya diadakan di Jakarta, sebelum kekalahan Jepang terhadap pasukan Sekutu pada 14 Agustus 1945.[531]

BPUPKI mengadakan sidang-sidang resmi untuk membahas masalah dasar negara, wilayah negara, kewarganegaraan, serta rancangan Undang-Undang Dasar

BPUPKI mengadakan sidang-sidang resmi untuk membahas masalah dasar negara, wilayah negara, kewarganegaraan, serta rancangan Undang-Undang Dasar yang dipimpin langsung oleh Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Sidang pertama berlangsung pada tanggal 28 Mei – 1 Juni 1945 untuk membahas dasar negara, sementara sidang kedua berlangsung antara tanggal 10 – 17 Juli 1945 untuk membahas rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan, serta pendidikan dan pengajaran.

Sementara itu, sidang tidak resmi yang dihadiri oleh 38 orang anggota BPUPKI berlangsung dalam masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua untuk membahas rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan dipimpin oleh anggota BPUPKI, Soekarno.

Sidang pertama BPUPKI diadakan pada tanggal 29 Mei 1945 dengan agenda membahas tentang dasar negara Indonesia dan diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat dan R.P. Suroso. Pada sidang pertama tersebut, Muhammad Yamin selaku anggota menyampaikan kerangka uraian sebagai berikut:

I. Peri Kebangsaan

"Indonesia merdeka, sekarang – Nationalisme lama dan baru – Dasar Negara Seriwijaya dan Majapahit – Dasar peradaban Indonesia – Tradisi tata negara yang putus – Etat national – etats patrimoines, ettats puissances – kesukaran mencari dasar asli – Cita-cita yang hancur di medan perjuangan. Kebangsaan Indonesia mengharuskan dasar sendiri."

531 Saafroedin Bahar, 1995, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia Jakarta), hlm. xvii

II. Peri Kemanusiaan
"Kemajuan kemerdekaan – Kemerdekan akan menghidupkan kedaulatan negara – Anggota keluarga – dunia – status politik yang sempurna – Menolak dominion status, protectoraat, mandate, Atlantic charter pasal 3 – Status internasional yang berisi kemanusiaan dan kedaulatan sempurna."

III. Peri ke-Tuhanan
"Peradaban luhur – Ber-Tuhan – Dasar negara yang berasal dari peradaban dan agama."

IV. Peri Kerakyatan
a. Permusyawaratan: "Surat Asysyura ayat 38 – Kebaikan musyawarat – Musyawarat dalam masyarakat dalam semasa khalif yang empat dan sesudah itu – Musyawarat bersatu dengan dasar mufakat menurut adat – Perpaduan adat dengan perintah agama."
b. Perwakilan: "Dasar adat yang mengharuskan perwakilan – perwakilan sbagai ikatan masyarakat di seluruh Indonesia – Perwakilan sebagai dasar abadi bagi tatanegara."
c. Kebijaksanaan: "Rationalisme – Perubahan dalam adat dan masyarakat – keinginan penyerahan – Rationalisme sebagai Dinamika rakyat.
1. Faham Negara Indonesia: Membuang dasar negara filsafatiah (Plato, Aristoteles, Thomas More) – 6 Gabungan Dasar dan faham yang ditolak – 9 gabungan Dasar dan faham yang diterima – Kesimpulan Negara Kesejahteraan Rakyat Indonesia; dan terbentuknya Republik Indonesia yang berdasar nasionalisme – unitarisme.
2. Pembelaan: Dasar syuriah menimbulkan perang jihat – Perwakilan secara adat menimbulkan tenaga keraman – Kebijaksanaan teknik dan siasat perang – Balatentara kebangsaan Indonesia.
3. Budi Negara: Dahulu dan sekarang – 1. Setia Negara – 2. Percaya akan tenaga rakyat – 3. Ingin merdeka."

V. Kesejahteraan Rakyat.
"Keadilan Sosial. Kegembiraan dalam Negara Baru – perubahan bagi Republik Rakyat Kesejahteraan."

Sidang Pertama Rapat Besar yang diadakan pada 31 Mei 1945 dilaksanakan di Gedung Chuo Sangi-In, dengan agenda rapat membahas tentang "Dasar Negara Indonesia (lanjutan)

Sidang Pertama Rapat Besar yang diadakan pada 31 Mei 1945 dilaksanakan di Gedung Chuo Sangi-In, dengan agenda rapat membahas tentang "Dasar Negara Indonesia (lanjutan)" dan pembicaraan tentang "Daerah Negara dan Kebangsaan Indonesia". Pada waktu itu, Dr. Rajiman Wedyodiningrat menjadi ketua sidangnya. Saat sidang berlangsung, Supomo menanyakan tentang perihal dasar negara Indonesia merdeka. Supomo mengungkapkan bahwa ia sepakat dengan beberapa pembicara dalam sidang yang telah membahas syarat-syarat mutlak (faktor konstitutif). Syarat-syarat mutlak untuk mengadakan suatu negara, dipandang dari sudut hukum dan dari sudut formal (yurisprudensi), adalah harus adanya daerah (*territory*), rakyat, dan pemerintah yang berdaulat (*sovereignty*) menurut hukum internasional. Menurut Supomo, syarat-syarat mutlak tersebut tidak mengenai dasar kemerdekaan dari negara dalam arti sosiologi dan politik. Suatu syarat mutlak yang juga dibicarakan pada sidang itu ialah mengenai pembelaan tanah air. Maka, pembelaan tanah air sangat penting adanya, dan mengenai hal tersebut, Supomo menyetujui nasihat dan anjuran dari pihak Pemerintah Jepang, yakni dari Somubucho yang telah dimuat dalam surat kabar *Asia Raya*.

Syarat mutlak yang ketiga menurut hukum internasional adalah pemerintah yang berdaulat.

Pendapat Supomo termasuk juga tentang syarat-syarat mutlak lainnya, yaitu: *Pertama*, tentang daerah, ia setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa, "pada dasarnya Indonesia harus meliputi batas Hindia-Belanda."[532] *Kedua*, hal rakyat sebagai warga negara yang pada dasarnya merujuk pada warga negara yang mempunyai kebangsaan Indonesia, yang kemudian dengan sendirinya termasuk pada kategori bangsa Indonesia asli. Bangsa Peranakan Tionghoa, India, dan Arab yang telah turun-temurun tinggal di Indonesia harus diterima pula sebagai warga negara dengan diberikan kebangsaan Indonesia. Hal yang penting juga, menurut Sopomo, adalah antisipasi terhadap kewarganegaraan ganda (*dubbele onderdaanschap*) dan ketiadaan status (staatloosheid). Hal ini sebagian tentunya akan bergantung pada sistem undang-undang negara lain, namun pokok dasar kewarganegaraan Indonesia adalah *ius sanguinis* (prinsip keturunan) dan *ius soli* (prinsip teritorial).

Syarat mutlak yang ketiga menurut hukum internasional adalah pemerintah yang berdaulat. Menurutnya, jika hendak membicarakan tentang dasar sistem pemerintahan yang hendak kita pakai untuk

532 *Ibid.*, hlm. 31

negara Indonesia, maka dasar sistem pemerintahan itu bergantung kepada *Staatsidee*, kepada "*begrip*" dan "*staat*" (negara) yang hendak kita pakai untuk pembangunan Negara Indonesia. Oleh karena itu, penentuan terhadap dasar Negara Indonesia dikemukakan dalam pertanyaan sebagai berikut:

Pertama, apakah Indonesia akan berdiri sebagai negara persatuan (*Eenheidsstaat*), negara serikat (*Bondstaat*), atau negara persekutuan (*Statenbond*)? *Kedua*, bagaimana perhubungan antara negara dan agama? *Ketiga*, apakah negara ini akan menjadi suatu republik atau monarki? Menurut pendapat Supomo, sebelum membicarakan soal negara persekutuan atau serikat, corak republik atau monarki harus dibicarakan terlebih dahulu, termasuk kepada pengertian-pengertian yang ada terkait negara, oleh karena segala pembentukan susunan negara itu tergantung daripada dasar pengertian negara (*Staatsidee*) itu sendiri.

Supomo kemudian menjelaskan mengenai dasar negara Indonesia merdeka, melalui teori-teori negara antara lain:

1. Ada suatu aliran pikiran yang menyatakan bahwa negara berdiri atas dasar teori perseorangan atau teori individualistis, sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke (abad ke-17), Jean-Jacques Rousseau (abad ke-18), Herbert Spencer (abad ke-19), dan H.J. Laski (abad ke-20). Menurut aliran pemikiran ini, negara adalah masyarakat hukum (*legal society*) yang disusun atas kontrak antara seluruh seseorang dalam masyarakat itu (*social contract*). Susunan hukum negara yang berdasar individualisme dapat ditemukan pada negara-negara Eropa Barat dan Amerika.
2. Aliran pemikiran lain tentang negara ialah teori golongan (*class theory*) sebagaimana diajarkan oleh Marx, Engels, dan Lenin. Negara dianggap sebagai alat dari sesuatu golongan (*klasse*) untuk menindas golongan lain. Negara menjadi alat bagi golongan tertentu yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan-golongan yang lain, yang kedudukan lebih rentan. Negara kapitalistis, misalnya, adalah perkakas kaum borjuis untuk menindas kaum buruh. Oleh karena itu, para penganut pemikiran ini menganjurkan revolusi politik dari kaum buruh untuk merebut kekuasaan negara, sehingga kaum buruh dapat ganti menindas kaum borjuis.

Aliran pemikiran terakhir adalah teori integralistik yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel, dan lain-lain (abad ke-18 dan 19).

3. Aliran pemikiran terakhir adalah teori integralistik yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel, dan lain-lain (abad ke-18 dan 19). Menurut pemikiran ini, negara ada bukan untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi untuk menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Negara adalah suatu susunan masyarakat yang integral, dalam arti mencakup segala golongan, bagian, dengan anggotanya berhubungan erat satu sama lain, dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Yang terpenting dalam negara yang berdasar aliran pemikiran ini ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat, atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan.

Lantas, pertanyaannya adalah: "Sekarang tuan-tuan akan membangunkan Negara Indonesia atas aliran pikiran mana?"[533]

... di hadapan para anggota BPUPKI lainnya, Supomo mengatakan pula bahwa negara nasional yang bersatu itu tidak berarti bahwa negara akan bersifat religius.

Pada pidatonya di hadapan para anggota BPUPKI lainnya, Supomo mengatakan pula bahwa negara nasional yang bersatu itu tidak berarti bahwa negara akan bersifat religius. Negara nasional yang bersatu akan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, sehingga hendaknya Indonesia juga memakai dasar moral yang luhur, yang dianjurkan juga dalam agama Islam.

Selanjutnya, Supomo membicarakan tentang soal yang berhubungan dengan bentuk susunan negara, yaitu:

> "Dengan sendirinya negara secara federasi kita tolak, karena dengan mengadakan federasi, itu, bukanlah mendirikan satu negara. Jadi tinggal membicarakan "*eenheidsstaat*" atau "*bondstaat*". Jika benar bahwa "*bondstaat*" itu juga satu negara belaka, maka lebih baik kita tidak memakai etiket "*eenheidsstaat*" atau "*bondstaat*", oleh karena perkataan-perkataan itu menimbulkan salah paham. Sebagai telah diuraikan oleh anggota yang terhormat tuan Moh. Hatta, maka dalam negara itu soal sentralisasi atau desentralisasi pemerintahan tergantung daripada masa, tempat, dan soal yang

533 *Ibid.*, hlm. 33

bersangkutan. Maka, dalam Negara Indonesia yang berdasar pengertian negara integralistik itu, segala golongan rakyat, segala daerah yang mempunyai keistimewaan sendiri, akan mempunyai tempat dan kedudukan sendiri-sendiri sebagai bagian *organic* dari negara seluruhnya. Soal pemerintahan apakah yang akan diurus oleh pemerintah pusat dan soal apakah yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah, baik daerah besar maupun daerah kecil, itu semua akan tergantung daripada "*doelmatigheid*", berhubungan dengan waktunya, tempatnya dan juga soalnya.

Persoalan republik atau monarki, tidak mengenai dasar susunan pemerintahan karena yang penting ialah, hendaknya kepala Negara, bahkan semua badan pemerintahan mempunyai sifat pemimpin negara dan rakyat seluruhnya. Kepala Negara harus sanggup memimpin rakyat seluruhnya. Kepala Negara harus mengatasi segala golongan dan bersifat mempersatukan negara dan bangsa. Apakah Kepala Negara itu akan diberi kedudukan sebagai raja atau presiden atau sebagai adipati seperti di Birma, atau sebagai "*Führer*", itu semuanya tidak mengenai dasar susunan pemerintahan. Baik Raja atau Presiden atau *Führer* atau Kepala Negara yang bergelar ini atau itu, misalnya bergelar "Sri Paduka yang Dipertuan Besar" atau bergelar lain, ia harus menjadi pemimpin negara yang sejati. Ia harus satu jiwa dengan rakyat seluruhnya.[534]

Apakah kita akan mengangkat seorang sebagai Kepala Negara dengan hak turun-temurun, atau hanya untuk waktu tertentu, itulah hanya mengenai bentuk susunan pimpinan negara yang nanti akan kita selidiki dalam badan ini. Caranya mengangkat pemimpin negara itu hendaknya janganlah diturut cara pilihan menurut sistim demokrasi Barat itu berdasar atas paham perseorangan."

Pada sidang BPUPKI saat itu, Supomo menyampaikan juga tentang hubungan antara negara dengan perekonomian.

534 Disarikan dari *Ibid*., hlm. 41-42

Pada sidang BPUPKI saat itu, Supomo menyampaikan juga tentang hubungan antara negara dengan perekonomian. Menurut Supomo:

> "Dalam negara yang berdasar integralistik, yang berdasar persatuan, maka dalam lapangan ekonomi akan dipakai sistim "sosialisme negara" (*staatssocialisme*). Perusahaan-perusahaan yang penting akan diurus oleh negara sendiri, akan tetapi pada hakikatnya negara yang akan menentukan di mana dan di masa apa dan perusahaan apa yang akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau oleh pemerintah daerah atau yang akan diserahkan kepada sesuatu badan hukum *prive* atau kepada seseorang, itu semua tergantung daripada kepentingan negara, kepentingan rakyat seluruhnya. Dalam negara Indonesia baru, dengan sendirinya menurut keadaan sekarang, perusahaan-perusahaan sebagai lalu lintas, *electriciteit*, perusahaan alas rimba, harus diurus oleh negara sendiri. Begitupun tentang hal tanah. Pada hakikatnya negara yang menguasai tanah seluruhnya. Tambang-tambang yang penting untuk negara akan diurus oleh negara sendiri. Melihat sifat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat pertanian, maka dengan sendirinya tanah pertanian menjadi lapangan hidup dari kaum tani dan negara harus menjaga supaya tanah pertanian itu tetap dipegang oleh kaum tani.[535]
>
> Dalam lapangan ekonomi, negara akan bersifat kekeluargaan juga oleh karena kekeluargaan itu sifat masyarakat timur yang harus kita pelihara sebaik-baiknya. Sistem tolong menolong, sistim kooperasi hendaknya dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi Indonesia.
>
> Dasar totaliter dari negara kebangsaan

Dalam lapangan ekonomi, negara akan bersifat kekeluargaan juga oleh karena kekeluargaan itu sifat masyarakat timur ...

535 *Ibid.*, hlm. 43

yang bersatu itu mempunyai akibat-akibat pula dalam lapangan-lapangan lain, akan tetapi akan kepanjangang, jikalau saya membicarakan soal-soal dari lapangan-lapangan lain itu."[536]

Mengenai Hak Warganegara dan Negara Integralistik, pada 31 Mei 1945, secara teoretis Supomo pada awalnya menolak tegas usul Mohammad Hatta untuk dicantumkannya hak warga negara dalam rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Belakangan, ternyata ia bersikap terbuka dan menaati hasil musyawarah untuk mufakat.

Rapat Besar yang berlangsung pada 1 Juni 1945 diadakan di Gedung Pejambon (sebelumnya Gedung Chuo Sangi-in) untuk membahas tentang dasar negara Indonesia (lanjutan) dan diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Berikut adalah pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam rapat tersebut:

"Sesudah tiga hari berturut-turut anggota-anggota *Dokuritu Zyunbi Tyoosakai* mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapatsaya. Saya akan menetapi permintaan Paduka tuan ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia? Paduka tuan Ketua yang mulia kepada sidang *Dokuritu Zyunbi Tyoosakai* untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini.

Maaf, beribu, maaf! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka tuan Ketua yang mulia ialah dalam bahasa Belanda "*Philosofische grondslag*" daripada Indonesia merdeka. *Philosofische grondslag* itulah pundamen, filsafat, pikiran yang

Rapat Besar yang berlangsung pada 1 Juni 1945 diadakan di Gedung Pejambon (sebelumnya Gedung Chuo Sangi-in) untuk membahas tentang dasar negara Indonesia (lanjutan) dan diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat

536 Afroedin Bahar, Nannie Hudawati Sinaga, Ananda B. Kusuma, dkk., "Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei – 19 Agustus 1945" (kurang lengkap)

sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.

Merdeka buat saya ialah: "*political independence*", *politieke onafhankelijkheid*. Apakah yang dinamakan *politieke onafhankelijkheid*?

Satu Nationale Staat! Hal ini perlu saya terangkan lebih dahulu, meski saya di dalam rapat besar di Taman Raden Saleh sedikit-sedikit telah menerangkannya. Marilah saya uraikan lebih jelas dengan mengambil tempo sedikit: Apakah yang dinamakan bangsa? Apakah syaratnya bangsa? Menurut Renan syaratnya bangsa ialah "kehendak akan bersatu" Orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu. Ernest Renan menyebut syarat bangsa:, "*le desir d'etre ensemble*", yaitu kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, maka yang menjadi bangsa, yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya satu.

Kesinilah kita semua harus menuju: mendirikan satu *Nationale Staat*, dia atas kesatuan bumi Indonesia dari Ujung Sumatera sampai ke Irian. Saya yakin tidak ada satu golongan di antara tuan-tuan yang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan yang dinamakan "golongan kebangsaan". Ke sinilah kita harus menuju semuanya.

Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme,sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropa, yang mengatakan "*Deutschland uber Alles*", tidak ada yang setinggi Jermania yang katanya bangsanya *minulnyo*, berambut jagung, bermata biru, "bangsa Aria" yang dianggapnya tertinggi di atas dunia sedang bangsa lain-lain tidak ada harganya. Jangan kta berdiri di atas azas

Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme,sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropa ...

demikian, tuan-tuan jangan berkata bahwa bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulya, serta mereka, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan Negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.

Justru inilah prinsip saya yang kedua. Inilah *filosofisch principe* yang nomor dua yang saya usulkan kepada tuan-tuan yang boleh saya namakan "internasionalisme". Tetapi jikalau saya katakan internasionalisme, bukanlah saya bermaksud kosmopolitanisme yang tidak mau adanya kebangsaan, yang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggeris, tidak ada Amerika dan lain-lainnya. Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur dalam taman sarinya internasionalisme. Jadi, dua hal ini, saudara-saudara, prinsip 1 dan prinsip 2, yang pertama-tama saya usulkan kepada tuan-tuan sekalian, adalah bergandengan erat satu sama lain.

Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya ...

Kemudian apakah dasar yang ke-3? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara "semua buat semua", "satu buat semua", "semua buat satu". Saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan.

Prinsip No. 4 sekarang saya usulkan. Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu , yaitu prinsip kesejahteraan, prisip: tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Saya

katakan tadi: prinsipnya San Min Chu I ialah *Mintsu*, *Min Chuan*, *Min Cheng*: *nationalist*, *democracy*, *socialism*. Maka prinsip kita harus: Apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan?"

Pemaparan sidang-sidang BPUPKI dalam buku ini perlu dilakukan karena perlu untuk memperlihatkan perjalanan para anggotanya, ternyata kebanyakan adalah yang menjadi Chuo Sangi-In. Demikian pula keberlanjutannya sampai ke Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sebagian besar kalau bukan nyaris semuanya adalah para anggota lembaga yang dibentuk Jepang tersebut. Di bawah ini dibuatkan daftar nama.

Daftar Anggota Chuo Sangi-in, BPUPKI dan PPKI [537]

No.	Nama	Pekerjaan	Keanggotaan
1.	Abdul Abbas	Residen Lampung Pertama	Chuo Sangi-in Sumatera, Wakil Sumatera dalam PPKI
2.	M. Amir	Dokter	Anggota PPKI untuk Sumatera
3.	Aris	Gicho Pati Shu Sangi-kai dan Giin Chuo Sangi-In	Anggota BPUPKI
4.	A.R. Baswedan	Staf Hokokai	Anggota Chuo Sangi-in, Anggota BPUPKI, Anggota BP-KNIP
5.	B.P.H. Bintoro	Pejabat di Kesultanan Yogyakarta	Anggota BPUPKI
6.	P.F. Dahler	Pamong Praja	Anggota Volksraad mewakili Insulinde, Anggota BPUPKI
7	Agus Muchsin Dasaad	Fuku Gicho Jakarta Tokubetsu-shi di Shu Sangi-kai	Anggota BPUPKI
8	Ki Hadjar Dewantara	Pimpinan Pusat Tenaga Rakyat (Putera)	Anggota Chuo Sangi-in, Anggota BPUPKI dan PPKI
9	Husein Jayadiningrat	Akademisi/Guru Besar *Rechts Hoogeschool Jakarta* *Inspecteur voor de Cooperatie*, Jakarta/Pendiri Bank	Anggota Chuo Sangi-in, Anggota BPUPKI
10	Margono Joyohadikusumo	Negara Indonesia 1946	Anggota BPUPKI
11	Bagus Hadikusumo	Pepatih Yogyakarta Koo	Anggota Chuo Sangi-in, Anggota BPUPKI dan PPKI
12	Abdul Halim	Ketua Perikatan Ulama Indonesia	Anggota Chuo Sangi-in Jakarta, Anggota BPUPKI
13	Anang Abdul Hamidhan	Jurnalis	Anggota PPKI
14	Parada Harahap	Jurnalis	Anggota BPUPKI
15	Abdul Fatah Hasan	Pengurus Organisasi Pelajar Indonesia Malaya	Anggota Banten Shu Sangi-kai, Anggota BPUPKI
16	Muhammad Hasan	Gubernur Sumatera	Anggota PPKI
17	Abdul Wahid Hasjim	Pengurus Nahdlatul Ulama	Anggota Chuo Sangi-in Jakarta, Anggota BPUPKI dan PPKI
18	Mohammad Hatta	Pimpinan Putera	Anggota BPUPKI dan PPKI

537 *Ibid.* (Bagian Lampiran)

19	Hindromartono	Anggota *Industriederaad*	Anggota BPUPKI
20	Otto Iskandar Dinata	Pemimpin Surat Kabar *Tjahaja*	Anggota Chuo Sangi-In, Anggota BPUPKI dan PPKI
21	Abdul Kadir	Opsir Barisan Pembela Tanah Air	Anggota BPUPKI dan PPKI
22	Abdul Kaffar	Komandan *2e compagnie* Barisan I di Bangkalan	Anggota BPUPKI
23	Sutardjo Kartohadi-kusumo	Pengurus Besar *Naimubu*	Anggota BPUPKI
24	Sumitro Purbonegoro Kolopaking	Bupati Banjarnegara	Anggota BPUPKI
25	Jenal Asikin Wijaya	Dokter	Anggota BPUPKI
26	Suleiman Effendi Kusumaatmaja	Ahli hukum	Anggota BPUPKI
27	Johannes Latuharhary	Gubernur Maluku	Anggota BPUPKI dan PPKI
28	Koen Hian Liem	Ketua dewan direksi *Pewarta Surabaya*	Anggota BPUPKI dan KNIP
29	Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito	Kepala bagian wanita Kantor Besar Putera, Pengurus Fujinkai	Anggota BPUPKI
30	Mas Mansur	Ketua Muhammadiyah Yogyakarta	Anggota BPUPKI
31	A.A. Maramis	Majelis Pertimbangan Putera	Anggota BPUPKI
32	Buntaran Martoatmojo	Fuku Gicho kedua Chuo Sangi-in	Anggota BPUPKI
33	Martokusumo	Ketua Parindra	Anggota BPUPKI
34	Masykur	Pendiri pesantren/tokoh politik	Anggota BPUPKI
35	Mohammad Ibnu Sayuti Melik	Pemimpin Redaksi surat kabar *Sinar Baru*, Semarang	Anggota BPUPKI
36	Abdul Kahar Muzakir	Komisaris Pengurus Besar Partai Islam Indonesia	Anggota BPUPKI
37	Asikin Natanegara	*Ikyu Keishi* Departemen Kepolisian	Anggota BPUPKI
38	Mohammad Noor	Anggota Badan Pekerja Volksraad	Anggota BPUPKI
39	Tiang Tjoei Oey	Presiden *Hua Chiao Tong Hui*	Anggota Chuo Sangi-in, Anggota BPUPKI
40	Tjong Hauw Oey	Pendiri Chung Hua Hui	Anggota Chuo Sangi-in, Anggota BPUPKI
41	Pettarani	*Hoofdbestuur-Assistant* di Bone dan Takalar	Anggota PPKI
42	Abdulrahim Pratalykrama	Bupati Probolinggo	Anggota BPUPKI
43	I Gusti Ketut Puja	*Giyizei Komon*	Anggota PPKI
44	Puruboyo	Anggota Chuo Sangi-in	Anggota BPUPKI dan PPKI
45	G.S.S.J. Raatulangie	Anggota Majelis Putera	Anggota PPKI
46	Agus Salim	Pemimpim Umum Putera	Anggota Volksraad dan BPUPKI
47	Samsudin	Pengurus Putera	Anggota Volksraad dan BPUPKI
48	Maria Ulfah Santoso	Pegawai *Sjhobu* Jakarta	Anggota BPUPKI
49	Sartono	Pengurus Majelis Rakyat Indonesia	Anggota BPUPKI
50	Samsi Sastrawidagda	Anggota Majelis Pertimbangan Putera	Anggota Chuo Sangi-in dan BPUPKI
51	Sastromulyono	Hakim	Anggota BPUPKI
52	Singgih	Pembantu Umum *Naimubu Koseika Tyoo* Jakarta	Anggota BPPKI
53	Kasman Singodimejo	*Waarnemmed ladbouw consulent* kantor pusat pertanian	Anggota PPKI dan KNIP
54	Ahmad Subarjo	Pegawai *Departement Ekonomische Zaken* Jakarta	Anggota BPUPKI dan PPKI
55	Sudirman	Anggota Dewan Kota Surabaya	Anggota BPUPKI

56	Sukarno	Pemimpin Besar Putera	Ketua Chuo Sangi-in, anggota BPUPKI dan PPKI
57	Iwa Kusuma Sumantri	Advokat	Anggota PPKI
58	Supomo	Akademisi/Guru Besar *Rechts Hoogeschool Jakarta*	Anggota BPUPKI dan PPKI
59	Suryo	Bupati Magetan	Anggota BPUPKI
60	Rooseno Suryohadikusumo	Fuku Gicho Shu Sangi-kai	Anggota Chuo Sangi-in, Anggota BPUPKI
61	Suroso	Loco burgemeester/Wakil Walikota	Anggota BPUPKI dan PPKI
62	Suwandi	Sanyo	Anggota BPUPKI dan PPKI
63	Sosrodiningrat	Anggota Chuo Sangi-in	Anggota BPUPKI
64	Eng Hoa Tan	®-	Anggota BPUPKI
65	Susanto Tirtoprojo	Madiun Sicho	Anggota BPUPKI
66	Surachman Cokroadisuryo	Pemimpin Kantor Pusat Kerajinan	Anggota BPUPKI
67	Abikusno Cokroadisuyoso	Architecparticulir dan Ketua Umum Jawa Hokokai	Anggota BPUPKI
68	Rajiman Wedyodiningrat	Dokter	Anggota BPUPKI dan PPKI
69	Wiranatakusuma	Bupati Bandung	Anggota BPUPKI dan PPKI
70	Sukarjo Wiryopranoto	Pemimpin surat kabar Asia Raya	Anggota BPUPKI
71	Sukiman Wiryosanjoyo	Dokter	Anggota BPUPKI
72	Ruslan Wongsokusumo	Pembantu Kantor Cabang Asia Raya dan Djawa Shimbun	Anggota BPUPKI
73	Wongsonagoro	Bupati Sragen	Anggota BPUPKI
74	Wuryaningrat	Bupati Nayoko Kaprah Tangen dalam Kraton Solo	Anggota Chuo Sangi-in dan BPUPKI
75	Muhamad Yamin	Penasihat Sendenbu-sendenka (Sanyo-Sendenbu)	Anggota BPUPKI
76	Bing Tjwan Yap	Pengelola Apotek	Anggota BPUPKI

Tentu banyak pengalaman bangsa Indonesia telah dirasakan hidup dalam masa penjajahan kolonial Hindia Belanda maupun pendudukan Jepang. Harga termahal dari pengalaman itu adalah makna yang seharusnya dapat dipetik. Sejarah menjadi gudang pengalaman itu sendiri. Tema parlemen atau lembaga perwakilan dalam masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang tentu tidak dalam arti sesungguhya untuk memberi wakil-wakil menyuarakan aspirasi sepenuhnya masyarakat jajahan. Sebab justru para wakil khususnya dari masyarakat jajahan yang di duduk di Volksraad atau Chuo Sangi-In lebih dituntut untuk memberi saran untuk kepentingan kepada pemerintah daripada untuk masyarakat. Namun demikian wakil-wakil masyarakat jajahan di lembaga-lembaga tersebut memberi pengalaman bagi bangsa Indonesia dalam mengatur dalam negara kemudian merdeka.

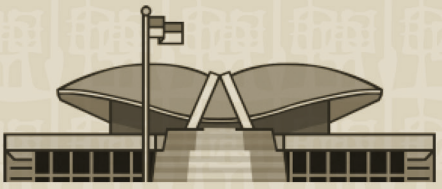

BAB V

Komite Nasional Indonesia Pusat 1945 – 1949

5.1 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Pada tanggal 7 Agustus 1945, *Nanpo Gun* (Tentara Umum Selatan) mengumumkan terbentuknya *Dokuritsu Junbi Inkai* atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Hanya berbeda beberapa jam, di Jakarta, Saiko Shikikan juga memberikan pengumuman yang sama kepada rakyat di daerah Jawa dan Madura.[537]

KEMUDIAN, posisi Ketua dan Wakil Ketua PPKI dipegang oleh Soekarno dan Mohammad Hatta, sedangkan Badan Penasihat diketuai oleh Mohammad Hatta dan wakilnya Ahmad Subarjo.[538] Walaupun PPKI dibentuk berdasarkan keputusan Nanpo Gun, tetapi dalam kenyataannya baru mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia merdeka. Dengan demikian, PPKI tidak lagi

537 J.R. Chaniago, 1979, *Wajah Dua Muka Sebuah Kekuatan Politik Badan Pekerja KNIP Periode Jakarta* (1945 – 1948), hlm. 7 dan 12.
538 *Ibid*., hlm. 9

Gambar 1.
Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada bulan Agustus 1945.
Sumber: NIOD 57080

terikat pada keputusan Nanpo Gun tersebut, sebab adanya proklamasi berarti semua hukum yang diberlakukan, baik oleh Hindia Belanda maupun tentara pendudukan Jepang, menjadi teranulir. Proklamasi merupakan sumber dari segala sumber tata hukum yang baru.[539]

Selanjutnya, penambahan anggota ini menjadikan PPKI bukan lagi milik Jepang, tetapi sudah menjadi milik Republik, karena penambahan itu dilakukan oleh orang Indonesia sendiri, bukan Jepang. Selain itu, karena anggota PPKI bukan hanya berasal dari Jawa, tapi dari berbagai kepulauan Indonesia, maka PPKI sifatnya hanya menjadi badan pendahuluan Komite Nasional. PPKI pada hakikatnya mempunyai sifat representatif atau sifat perwakilan bagi seluruh rakyat Indonesia.[540]

Mengenai kekuasaan, badan legislatif, gagasan, dan asas-asasnya dibicarakan pada sidang hari pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal yang sama juga berlaku dengan Komite Nasional. Pada Sidang PPKI hari kedua, Komite Nasional hanya disinggung sedikit saja karena tergeser oleh masalah lain yang lebih mendesak, seperti departemen dan pemerintahan daerah (Pemda). Sedangkan pada sidang hari

539 *Ibid.*, hlm. 12
540 *Ibid*, hlm. 14

ketiga, yaitu yang dilaksanakan pada 22 Agustus 1945, Komite Nasional merupakan pokok permasalahan. Hal itu terlihat dalam keputusan PPKI yang sangat terperinci mengenai Komite Nasional.[541]

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan (*Trias Politica*) sebagaimana diajarkan oleh Montesquieu, melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan negara. Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan karena:

1. UUD 1945 tidak membatasi secara tajam bahwa setiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh satu organ/badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan.
2. UUD 1945 tidak membatasi kekuasaan dibagi atas tiga bagian saja dan juga tidak membatasi pembagian kekuasaan dilakukan oleh tiga organ/badan saja.
3. UUD 1945 tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)[542]

Kemudian, kekuasaan legislatif Presiden dapat dilihat dari keterangan Supomo pada sidang PPKI yang menyebutkan "Di samping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR dapat disebut sebagai badan yang, bersama-sama dengan Presiden, bertujuan membentuk Undang-Undang (UU) bersama Presiden, dalam suatu badan legislatif."[543] Kekuasaan legislatif dari Presiden antara lain adalah membuat UU dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal itu terlihat pada Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20 Ayat (1), dan Pasal 21 Ayat (1) UUD 1945.

... DPR juga merupakan rekanan Presiden di tingkatan legislatif, serta sarana untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan-keputusan MPR

DPR sebetulnya memegang kekuasaan terbanyak dalam Republik Indonesia. Selain mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan UUD 1945, DPR juga merupakan rekanan Presiden di tingkatan legislatif, serta sarana untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan-keputusan MPR, karena anggota DPR juga merangkap menjadi anggota MPR pada masa itu. Selain itu, masih terdapat sejumlah pasal yang mengatur hak DPR, seperti Pasal 20 Ayat (2), Pasal 21 Ayat (2), Pasal 22 Ayat (2) dan (3), serta Pasal 23 Ayat (1) dan (5) UUD 1945. Oleh karena anggota DPR juga merangkap sebagai anggota MPR, maka segala pasal yang menyangkut hak MPR juga menjadi hak DPR. Dengan dijadikannya DPR sebagai sarana pengawasan, maka MPR tidak mungkin dapat bersidang sewaktu-waktu. Oleh sebab itu, sering para ahli menyebutkan bahwa DPR

541 *Ibid.*, hlm. 16-17
542 *Ibid.*, hlm. 17
543 *Ibid.*, hlm. 18

mempunyai dua fungsi, yaitu: *Pertama*, fungsi menetapkan kebijakan dan membuat UU. *Kedua*, fungsi kontrol. Untuk yang pertama, DPR mempunyai hak legislatif, hak amandemen, dan hak anggaran, sedangkan untuk fungsi yang kedua DPR mempunyai hak tanya, hak interpelasi, hak angket, dan hak mosi.[544]

Pada sidang hari ketiga itu, PPKI mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dengan pusat di Jakarta;
2. Komite Nasional adalah penjelmaan kebulatan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat;
3. Usaha-usaha Komite Nasional ialah:
   a. Menyatakan keinginan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa Indonesia yang merdeka;
   b. Mempersatukan rakyat dari segala lapisan dan jabatan, supaya terpadu pada segala tempat di seluruh Indonesia, persatuan kebangsaan yang bulat dan erat;
   c. Membantu menenteramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum; serta
   d. Membantu pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia, dan di daerah membantu pemda untuk kesejahteraan umum;
4. Komite Nasional di pusat memimpin dan memberi petunjuk kepada Komite Nasional di daerah. Di mana perlu, di daerah didirikan pusat daerah; dan
5. Komite Nasional di pusat, pusat daerah, dan daerah dipimpin oleh seorang Ketua dan beberapa orang anggota pengurus yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional. Untuk pertama kali, Ketua Pusat Daerah ditetapkan oleh Presiden.[545]

Pada malam harinya, sejumlah tokoh berkumpul di Gedung Permusyawaratan Golongan-golongan Bangsa di Jalan Gambir Selatan 10 untuk membicarakan siapa-siapa yang akan diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Mereka adalah Soekarno, Hatta, Sartono, Suwiryo, Otto Iskandar Dinata, Sukarjo Wiryopranoto, Buntaran, A.G. Pringgodigdo, Sutarjo, Tajaluddin, dan beberapa orang lainnya.[546] Pada kesempatan tersebut, Hatta

Pada malam harinya, sejumlah tokoh berkumpul di Gedung Permusyawaratan Golongan-golongan Bangsa di Jalan Gambir Selatan 10 untuk membicarakan siapa-siapa yang akan diangkat sebagai anggota KNIP.

544 *Ibid.*, hlm. 19
545 *Ibid.*, hlm. 25-26
546 *Ibid.*, hlm. 44

mengulangi lagi kenapa nama badan pembantu Presiden ini adalah Komite Nasional. Menurut Hatta, nama ini sudah muncul menjelang masuknya Jepang. Ketika itu, Hatta baru saja dikembalikan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda bersama Syahrir dari pengasingannya di Banda Neira. Komite Nasional yang akan diadakan menjelang Jepang masuk itu merupakan suatu wadah nasional, yang akan menerangkan kepada Jepang nantinya bahwa yang berperang adalah Jepang dengan Belanda, bukan dengan rakyat Indonesia. Komite Nasional menurut pikiran Hatta saat itu merupakan tempat pengerahan massa.[547]

Ketika membicarakan wadah yang akan dipakai untuk menghadapi suasana revolusi, Hatta teringat lagi akan nama yang telah diciptakannya empat tahun sebelumnya, hanya saja dalam bentuk gagasan yang lain. Komite Nasional menurut Hatta adalah semacam wakil-wakil rakyat untuk membantu Presiden selama Perang Asia Timur Raya belum berakhir. Jadi, sifatnya adalah sementara saja, dan kalau suasana damai sudah datang, maka akan dibentuk MPR, DPR, dan DPA menurut ketentuan UUD 1945.[548]

Pada pertemuan di Gambir Selatan ini, Komite Nasional tidak hanya membicarakan mengenai jumlah mereka yang akan menjadi anggota KNIP, tetapi juga mendiskusikan mengenai fungsi KNIP, sesuai dengan makna Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, yakni sebagai Pembantu Presiden. Pembicaraan mengenai fungsi ini kemudian tercermin pada hasil keputusan PPKI tanggal 22 Agustus 1945 tentang fungsi dan usaha-usaha KNIP dan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID).

Komite Nasional haruslah berdasarkan kedaulatan rakyat.

Mengikuti penjelasan Soekarno dan Hatta dalam pidatonya, dapat disimpulkan bahwa Komite Nasional adalah penjelmaan kebulatan cita-cita dan tujuan dari bangsa Indonesia untuk merealisasikan kemerdekaan Indonesia. Komite Nasional haruslah berdasarkan kedaulatan rakyat. Ia harus berfungsi untuk menyalurkan keinginan rakyat dan memperkuat persatuan dan kesatuan. Karena itulah, Komite Nasional, baik di pusat maupun daerah, harus mampu menjadi wadah bagi seluruh aliran dan golongan dalam masyarakat, sehingga persatuan tetap tergalang.[549]

Tujuan dari masuknya semua golongan dan aliran dalam KNIP adalah untuk menghadapi situasi mendatang, terutama kabar akan mendaratnya tentara Sekutu. Maka, salah satu keputusan

547 *Ibid.*, hlm. 44-45
548 *Ibid.*, hlm. 45
549 Disarikan dari *Ibid.*, hlm. 45

PPKI tentang Komite Nasional, selain membantu pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia, adalah turut menjaga ketertiban dan keamanan dengan menciptakan ketentraman di antara rakyat. Dengan demikian, Komite Nasional juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dengan rakyat. Dari atas, komite ini menerjemahkan kebijaksanaan pemerintah, sementara dari bawah, komite menyampaikan keinginan rakyat kepada pemerintah.[550]

Pertemuan Gambir Selatan menetapkan anggota KNIP yang lebih dari 60 orang jumlahnya. Walaupun mereka terdiri dari wakil aliran dan golongan tertentu dalam masyarakat, juga ada wakil-wakil daerah, tapi diusahakan mereka dapat berkedudukan atau tinggal di Jakarta. Dengan kata lain, para anggota yang ada merupakan para putra daerah, tetapi bersedia untuk berdomisili di Jakarta. Jumlah yang ditentukan itu tidak ada hubungannya dengan perimbangan penduduk, dan jumlah 60 itu masih bisa ditambah menurut kebutuhan. Mereka juga sepakat bahwa rapat pertama KNIP diadakan tanggal 29 Agustus 1945.[551]

Pelantikan itu sendiri dilakukan pada hari Rabu malam, tanggal 29 Agustus 1945, bertempat di Gedung Komedi (sekarang Gedung Kesenian Jakarta) di Jalan Pos, Pasar Baru. Sebelum pelantikan, ruangan telah dihiasi dengan slogan-slogan yang membangkitkan semangat akan arti dan makna kemerdekaan. Pada pukul 21.00, para anggota sudah hadir di ruangan. Pintu putih tempat Presiden dan Wakil Presiden akan lewat, dijaga oleh Barisan Pelopor.

Pertemuan Gambir Selatan menetapkan anggota KNIP yang lebih dari 60 orang jumlahnya.

Setelah kedua tokoh tersebut memasuki ruangan, lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan bersama-sama. Setelah itu, baru Kasman Singodimejo, yang dipercaya untuk mempersiapkan acara pelantikan ini, mengucapkan pidatonya. Setelah mengulang kembali fungsi Komite Nasional, seperti yang telah diputuskan PPKI dan diterangkan dalam pidato radio Soekarno tanggal 23 Agustus 1945, Kasman menyebutkan bahwa kewajiban Komite Nasional adalah berjuang sekeras-kerasnya agar RI dapat diakui dan dihormati oleh seluruh dunia. Untuk mencapai hal itu, seluruh rakyat harus berdiri di belakang pemerintah RI. Sesudah ia mengucapkan pidatonya, Kasman menghadap Presiden dan menyatakan siap sedia menjalankan perintah.[552]

Setelah mendengarkan pidato Presiden, sidang kemudian membentuk sebuah panitia untuk menyusun mosi, janji, dan maklumat

550 *Ibid.*, hlm. 46
551 *Ibid.*, hlm. 47
552 *Ibid.*, hlm. 51

pertama KNIP kepada rakyat. Panitia kecil ini diketuai oleh Gatot dengan anggota-anggota Budiarto, Iwa Kusuma Sumantri, Ki Hajar Dewantara, dan Ahmad Subarjo. Mereka berlima langsung bersidang dan membacakan hasilnya di hadapan sidang KNIP. Keputusan pertama adalah janji KNIP yang berbunyi: "Kami segenap anggota KNIP berjanji mencurahkan segala pikiran, tenaga, harta benda, dan jiwa raga untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merdeka yang adil, kekal, makmur, dan berdasarkan keadilan rakyat."[553]

Keputusan kedua, yakni mosi rakyat Indonesia, memutuskan bahwa bangsa Indonesia menuntut pengakuan internasional terhadap Republik Indonesia sebagai salah satu syarat perdamaian dunia, mewajibkan segenap rakyat untuk mewujudkan kemerdekaan RI sepenuhnya agar rakyat Indonesia dapat menjalankan rencana-rencana ekonominya dan menggarap sumber-sumber alamnya, serta menganjurkan kepada daerah-daerah untuk secepatnya menyusun Pemerintahan Daerah di daerahnya masing-masing.[554]

Keputusan yang ketiga adalah maklumat yang isinya tidak jauh berbeda dengan isi mosi, sebab hanya ditambahkan dengan sebuah ucapan belasungkawa terhadap pengorbanan-pengorbanan yang diberikan rakyat selama perang untuk mewujudkan negara Republik Indonesia. Setelah membacakan keputusan dan disetujui sidang, KNIP memasuki acara terakhir, yakni memilih pimpinan KNIP. Yang terpilih adalah:

- Ketua : Kasman Singodimejo
- Wakil Ketua I : Sutarjo
- Wakil Ketua II : Latuharhary
- Wakil Ketua III : Adam Malik

Dengan terpilihnya pimpinan KNIP, maka selesailah acara pelantikan KNIP, yang merupakan realisasi dari Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945.[555] Pada keesokan harinya, KNIP mengirim rombongan ke Bandung untuk mengusahakan pembentukan KNID (daerah). Pengiriman rombongan ke daerah-daerah ini kemudian menjadi suatu tugas rutin KNIP dengan maksud yang sama, yakni mendirikan KNID.

Dengan terpilihnya pimpinan KNIP, maka selesailah acara pelantikan KNIP, yang merupakan realisasi dari Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945.

553 *Ibid.*, hlm. 52
554 *Ibid.*, hlm. 52 dan 53
555 *Ibid.*, hlm. 53

Menjelang Sidang Pleno I KNIP di Jakarta

KNIP ternyata lebih banyak bekerja sebagai pembantu eksekutif daripada pengganti MPR, DPR, dan DPA.[556] Sebagai pembantu pemerintah, Komite Nasional dalam praktiknya sering berfungsi sebagai pengganti pangreh praja dan polisi. Hal ini terutama mungkin sangat terasa di daerah, dan jelas merupakan suatu dualisme. Bahkan, kalau kita perhatikan berbagai keputusan, baik berupa maklumat, instruksi, dan lain sebagainya, akan terlihat bahwa KNIP lebih banyak dijadikan sebagai alat dan penasihat pemerintah daripada pengganti MPR dan DPR dalam masa revolusi.[557]

Berdasarkan serangkaian fakta-fakta tersebut, terlihat bagaimana situasi KNIP pada awal perjalanannya. Selama hampir sebulan lebih, tidak satupun produk KNIP yang memperlihatkan bahwa komite ini merupakan MPR dan DPR dalam masa revolusi. KNIP lebih banyak berfungsi untuk menerjemahkan kebijaksanaan pemerintah kepada rakyat daripada merekam dan menyampaikan kondisi dan keinginan masyarakat kepada pemerintah. Dalam situasi seperti itu, tidak mengherankan kalau kritik-kritik muncul menyerang KNIP.[558]

KNIP ternyata lebih banyak bekerja sebagai pembantu eksekutif daripada pengganti MPR, DPR, dan DPA.

Kritikan terhadap kekuasaan Soekarno merupakan akibat dari Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa segala kekuasaan dipegang Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Revolusi manapun di dunia ini pasti membutuhkan komando atau pemimpin yang satu, kalau tidak revolusi itu akan gagal. Ketika hal itu terdapat pada Soekarno, banyak tokoh menyebutkan bahwa ia fasis. Kekuasaannya tidak terbatas, dan karena ia dibantu oleh Komite Nasional, maka jalan satu-satunya adalah menegakkan demokrasi.

Selanjutnya, untuk mengatasi kritikan-kritikan dan untuk memenuhi ketentuan Ayat (1) dan (2) dari Aturan Tambahan UUD 1945, maka pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 mengeluarkan pengumuman bahwa persiapan-persiapan untuk mengadakan pemilihan umum (pemilu) telah dilaksanakan. Konsiderans dari pengumuman itu menyebutkan bahwa untuk memenuhi UUD 1945, terutama aturan-aturan tentang kedaulatan rakyat. Pengumuman ini merupakan kabar pertama tentang akan diadakannya pemilu.[559] Adanya pengumuman pemerintah tentang akan diadakannya pemilu tidak mengurangi keinginan untuk memfungsikan badan itu sesuai

556 *Ibid.*, hlm. 54
557 *Ibid.*, hlm. 55
558 *Ibid.*, hlm. 58
559 *Ibid.*, hlm. 60

dengan asasnya. Dua hari setelah pengumuman itu, yakni pada tanggal 7 Oktober 1945, muncul sebuah referendum dalam KNIP. Referendum itu disponsori oleh 50 anggota KNIP yang mendesak Presiden untuk memakai kekuasaan istimewanya agar membentuk MPR dengan segera, agar anggota-anggota KNIP dapat dianggap sebagai anggota MPR.[560]

Kelompok Syahrir

Menurut jalan pikiran Syahrir, revolusi Indonesia haruslah merupakan revolusi rakyat, yang dalam perjuangannya menuntut hak-haknya sebagai bangsa untuk jaminan bahwa ia tidak akan diperlakukan lagi sebagai budak belian. Oleh karena itu, revolusi Indonesia dari luar terlihat seperti sebuah revolusi nasional, sementara dari dalam berupa revolusi kerakyatan yang mengubah struktur sosial yang ada secara revolusioner, yakni dengan menghancurkan feodalisme. Jalan ke arah itu adalah dengan demokratisasi aparat-aparat pemerintahan dan kemasyarakatan, seperti membentuk perwakilan rakyat dari desa sampai ke pusat, sehingga ada jaminan penyaluran aspirasi rakyat. Untuk mencapai tujuan itu, revolusi harus dipimpin oleh golongan demokratis yang revolusioner dan bukan golongan nasionalis yang diperbudak kekuatan fasis, baik Belanda maupun Jepang.[561]

Menurut jalan pikiran Syahrir, revolusi Indonesia haruslah merupakan revolusi rakyat, yang dalam perjuangannya menuntut hak-haknya sebagai bangsa

Kemudian, bertolak dari anggapan Soekarno-Hatta, kekuasaan yang sebenarnya berada pada golongan sosialis demokrat. Sekitar akhir September 1945, berkumpul sejumlah pengagum Syahrir di rumah Subadio Sastrosatomo di Jalan Guntur 23. Di antara mereka yang hadir ada Supeno, Sakirman, Mangunsarkoro, serta tuan rumah sendiri. Setelah mengadakan diskusi panjang, mereka menyimpulkan tiga keputusan penting, yaitu: (1) KNIP, yang saat itu merupakan pembantu Presiden, harus dijadikan sebagai badan legislatif sementara MPR dan DPR belum terbentuk; (2) Setelah KNIP menjadi badan legislatif, akan diadakan perubahan terhadap UUD 1945, antara lain mengintroduksi kabinet parlementer dengan Syahrir sebagai Perdana Menteri (PM); (3) Membentuk kabinet dengan golongan sosialis demokrat menduduki sebagian besar kursinya. Ketiga keputusan itu tidak jauh berbeda dengan jalan pikiran Syahrir, sehingga Syahrir adalah yang paling didukung untuk mencalonkan diri sebagai PM.[562]

560 *Ibid.*, hlm. 60-61
561 *Ibid.*, hlm. 66-67
562 *Ibid.*, hlm. 68-69

Selanjutnya, dengan inti "demokrasi dulu baru nasionalisme", "manuver" pertama dari kelompok Syahrir mulai dilaksanakan dengan pengajuan referendum oleh 50 anggota KNIP pada tanggal 7 Oktober 1945 yang mendesak Presiden agar memakai kekuasaan istimewanya untuk membentuk MPR dengan segera. Sebelum MPR terbentuk, anggota-anggota KNIP yang ada meminta untuk dianggap sebagai anggota MPR.[563] Referendum inilah yang menyebabkan diadakannya Sidang Pleno I KNIP di Jakarta pada tanggal 16-17 Oktober 1945, sekitar sembilan hari sejak referendum itu diajukan.[564]

Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat

Sidang Pleno I KNIP diadakan pada 16-17 Oktober 1945, bertempat di Gedung Balai Muslimin Kramat, dan dimulai pada pukul 10 pagi. Wakil Presiden Hatta datang bersama para menteri, tetapi Presiden Soekarno tidak hadir karena sedang berada di Sukabumi. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan penyampaian pidato pembukaan oleh Ketua KNIP Kasman Singodimejo, sidang mendengarkan pidato Sakirman, yang pada tanggal 7 Oktober 1945 telah mengajukan referendum bersama 50 anggota KNIP agar KNIP diberikan kekuasaan MPR.[565]

Pada waktu referendum itu dibicarakan, salah seorang yang mengambil kesempatan berbicara adalah Amir Syarifuddin. Menurut Amir, berhubung situasi yang sangat genting dengan mendaratnya Sekutu, besar kemungkinan para anggota tidak akan bisa hadir pada setiap rapat yang diadakan KNIP. Selain itu, KNIP yang begitu besar dan dengan anggota yang begitu banyak akan sukar mengambil keputusan-keputusan cepat yang sesungguhnya sangat diperlukan dalam suasana genting. Maka, Amir mengusulkan agar dibentuk sebuah "*working committee*", atau badan pekerja, yang untuk sementara waktu dapat diberikan tugas-tugas legislatif. Amir mencontoh badan pekerja yang ada pada *Indian National Congress* di India. Badan pekerja itu akan bersidang 10 hari sekali, sedangkan KNIP hanya setahun sekali.[566]

Kedua usul itu dibicarakan, kemudian diputuskan bahwa KNIP dapat segera mengirim surat kepada pemerintah. Karena Wakil Presiden Hatta ada dalam ruangan itu, maka surat yang diajukan kepada pemerintah langsung saja dibicarakan. Konsep balasan dari

Sidang Pleno I KNIP diadakan pada 16-17 Oktober 1945, bertempat di Gedung Balai Muslimin Kramat, dan dimulai pada pukul 10 pagi.

563 *Ibid.*, hlm. 71 dan 72
564 *Ibid.*, hlm. 72
565 *Ibid.*, hlm. 85
566 *Ibid.*, hlm. 86

pemerintah digarap oleh Wakil Presiden Hatta, Sekretaris Negara A.G. Pringgodigdo, dan Amir Syarifuddin sendiri. Surat balasan pemerintah itu berbentuk maklumat yang kemudian lebih terkenal dengan Maklumat No. X ("Maklumat Eks").[567]

Maklumat No. X tidak memuat secara jelas tentang hak dan kewajiban Badan Pekerja (BP). Hak dan kewajiban itu baru dijelaskan empat hari kemudian oleh BP sendiri. Penjelasan itu dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 1945, dengan keterangan bahwa kewajiban BP adalah: (1) Turut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang berarti bahwa BP berkolaborasi dengan Presiden dalam menetapkan GBHN; dan (2) Bersama-sama Presiden menetapkan UU. Penjelasan pertama merupakan tugas MPR, sedangkan penjelasan kedua merupakan tugas DPR.[568]

Penjelasan itu juga menyebutkan bahwa BP yang bertugas atas nama KNIP tidak lagi mengurus pekerjaan eksekutif.

Penjelasan itu juga menyebutkan bahwa BP yang bertugas atas nama KNIP tidak lagi mengurus pekerjaan eksekutif. Kekuasaan BP akan berakhir setelah terbentuknya MPR dan DPR. Jika diperhatikan lebih lanjut, Maklumat No. X dan penjelasan yang diberikan kemudian mengubah secara drastis makna pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Dengan maklumat itu, kekuasaan Presiden dikurangi, sementara kekuasaan KNIP yang sehari-hari dilaksanakan oleh BP berubah, dari yang semula pembantu Presiden menjadi badan tersendiri yang mempunyai kekuasaan legislatif. Maklumat No. X, yang kelahirannya didorong oleh Sidang Pleno I KNIP, telah menjadikan KNIP sebagai akar kelahiran MPR dan BP cikal bakal dari DPR.[569]

Dengan Mosi Sukarni, Ketua KNIP yang lama, Kasman Singodimejo secara sukarela mengundurkan diri, sehingga pimpinan sidang untuk sementara dipegang oleh Latuharhary. Namun, masalah pokok belum terjawab, yaitu: siapa yang akan memimpin BP, yang sekaligus memimpin KNIP? Dalam kesempatan itu, Sukarni dan Ny. Mangunsarkoro mengusulkan nama Syahrir, yang sebelumnya memang sudah bersedia menjadi PM, tetapi bukan Ketua KNIP. Sidang kemudian memilih Syahrir dan Amir Syarifuddin untuk menjadi formatur dalam menyusun komposisi dan personalia BP.

Sidang hari kedua yang berlangsung pada tanggal 17 Oktober 1945 tidak lagi dipimpin oleh Kasman yang sudah mengundurkan diri, tetapi oleh Latuharhary yang merupakan Wakil Ketua II. Seperti di

567 *Ibid.*, hlm. 86-87
568 *Ibid.*, hlm. 87-88
569 *Ibid.*, hlm. 88-89

hari pertama, sidang di hari kedua dibuka pada pukul 10 pagi. Setelah pembukaan oleh Ketua, sidang mendengarkan laporan formatur yang ditugaskan untuk membentuk komposisi dan personalia BP. Jumlah anggota BP adalah 15 orang, antara lain:[570]

- Ketua : Sutan Syahrir
- Wakil Ketua : Amir Syarifuddin
- Sekretaris : Suwandi

Selanjutnya, setelah Syahrir mengucapkan kata sambutan, sidang diteruskan untuk membahas situasi tanah air yang semakin genting dan hangat. Pembahasan itu kemudian menghasilkan dua resolusi, satu ditujukan ke dalam dan satu lagi ke luar.[571] Setelah kedua resolusi dibacakan dan disetujui, maka berakhirlah Sidang Pleno I KNIP yang berlangsung selama dua hari itu. Sidang ini kemudian ditutup secara resmi oleh Wakil Presiden Hatta, yang antara lain mengatakan bahwa wajah baru yang sudah melekat pada Komite Nasional merupakan satu fase baru dalam kemerdekaan yang baru berjalan dua bulan. Selama masa itu, Sekutu telah sedemikiannya didesak untuk mengakui Republik Indonesia secara *de facto*. Untuk masa-masa mendatang, tanggung jawab terhadap revolusi Indonesia tidak saja terletak pada pemerintah, tetapi juga pada Komite Nasional yang telah mempunyai kekuasaan legislatif.[572]

Selanjutnya, setelah Syahrir mengucapkan kata sambutan, sidang diteruskan untuk membahas situasi tanah air yang semakin genting dan hangat.

Kabinet Syahrir

Melalui BP, pada tanggal 30 Oktober 1945, ketika Soekarno-Hatta dan Amir Syarifuddin sedang berada di Surabaya untuk menengahi pertikaian antara rakyat Surabaya dengan Sekutu, mereka mengusulkan kepada pemerintah agar rakyat dapat diberikan kesempatan untuk mendirikan partai-partai politik. Konsiderans yang diajukan dalam usul BP adalah karena kemerdekaan bersidang dan berkumpul dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena yang dijunjung adalah asas demokrasi, maka tidak boleh hanya satu partai yang ada, sehingga menurut BP, partai-partai bisa saja didirikan dengan catatan bahwa partai-partai tersebut ada untuk memperkuat perjuangan, mempertahankan kemerdekaan, serta menjamin keamanan masyarakat. Usul BP ini ditandatangani oleh Syahrir sebagai ketua, dan Suwandi sebagai sekretaris.[573]

570 *Ibid.*, hlm. 92
571 *Ibid.*, hlm. 96
572 *Ibid.*, hlm. 97
573 *Ibid.*, hlm. 99-100

Setelah Soekarno-Hatta kembali dari daerah, usul BP ini langsung dijawab. Oleh karena paham *Dwitunggal* memungkinkan salah seorang di antara keduanya bisa menandatangani satu keputusan pemerintah atas nama yang satu lagi, maka pada tanggal 3 November 1945 keluarlah maklumat pemerintah yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Hatta, yang isinya "menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itu, dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat."[574]

Manuver selanjutnya dari kelompok Syahrir untuk merealisasikan Keputusan Guntur 23 melalui BP adalah Pengumuman Badan Pekerja No. 5 yang dikeluarkan tanggal 11 November 1945. Pengumuman ini berisi usul BP tentang pertanggungjawaban menteri kepada DPR. Pertimbangan yang diajukan BP atas usulnya adalah dengan diubahnya Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 tentang KNIP, yang semula pembantu Presiden menjadi badan legislatif.[575]

Manuver selanjutnya dari kelompok Syahrir untuk merealisasikan Keputusan Guntur 23 melalui BP,,,

Dalam pertemuan di rumah Hatta, Wakil Presiden Hatta dapat menerima usul BP, sementara Syahrir ditunjuk untuk membentuk kabinet baru. Kabinet baru yang disebut Dewan Menteri diumumkan pada tanggal 14 November 1945, tiga hari setelah dikeluarkannya usul BP mengenai pertanggungjawaban menteri kepada DPR.[576]

Kabinet Syahrir ini jelas menyalahi UUD 1945, di mana para menteri hanya dapat diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menurut Pasal 17 dari UUD 1945, setiap menteri bertanggung jawab kepada Presiden, sedangkan Kabinet Syahrir bertanggung jawab kepada KNIP. Namun, Kabinet Syahrir dianggap sah dengan alasan "*convention*" atau kebiasaan, yang menurut sebagian ahli secara politis pada waktu itu dapat saha dibenarkan oleh suasana darurat revolusioner.[577]

Menjelang Sidang Pleno II KNIP di Jakarta

Fungsi BP dapat dilihat dari tiga sumber, antara lain: (1) Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945; (2) Penjelasan BP tanggal 20 Oktober 1945 tentang Maklumat Wakil Presiden No. X; dan (3) Pengumuman BP No. 5 tanggal 11 November 1945 tentang usul BP agar menteri bertanggung jawab kepada DPR. Kekuasaan legislatif MPR dapat ditemukan pada Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945. Pasal 3

574 *Ibid.*, hlm. 100
575 *Ibid.*, hlm. 100
576 *Ibid.*, hlm. 103
577 *Ibid.*, hlm. 107 dan 108

menerangkan tugas MPR sebagai lembaga yang memiliki kuasa untuk menetapkan UUD dan GBHN, sedangkan Pasal 37 menyebutkan bahwa kekuasaan MPR untuk mengubah UUD serta prosedur yang harus ditempuh.[578]

Fungsi dan tugas DPR menurut UUD 1945 adalah:

1. Bersama-sama dengan pemerintah membentuk UU. Sebagai pelaksanaan dari fungsi dan tugas ini, maka DPR mempunyai hak inisiatif dan amandemen.
2. Menetapkan APBN. Pelaksanaannya dilakukan melalui hak budget dan amandemen.
3. Melakukan pengawasan terhadap tindakan kebijaksanaan dari pemerintah. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan ini, DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan (interpelasi), hak mengadakan penyelidikan (angket), dan hak mengajukan pernyataan pendapat.[579]

Walaupun Maklumat No. X memungkinkan KNIP menjalankan semua kekuasaan legislatif dari MPR dan DPR, namun BP yang merupakan pelaksana sehari-hari KNIP, sesuai dengan penjelasannya tanggal 20 Oktober 1945 hanya akan menjalankan sebagian dari Pasal 3 dari UUD 1945 yang berhubungan dengan GBHN. Dari ketiga fungsi yang dipunyai DPR, hanya yang menyangkut fungsi bersama-sama pemerintah membentuk UU (?). Jika dijabarkan, maka kewajiban BP hanya terbatas pada:

1. Bersama-sama Presiden menetapkan GBHN.
2. Berinisiatif untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan bersama-sama Presiden menetapkan UU tersebut.
3. Mengadakan amandemen terhadap RUU yang diajukan pemerintah dan bersama-sama Presiden menetapkan UU tersebut.[580]

Baik dalam fungsinya, seperti yang termuat dalam Maklumat No. X, maupun dalam fungsinya yang baru, yakni menerima pertanggungjawaban menteri, hingga Sidang Pleno II KNIP, BP berhasil mengeluarkan delapan keputusan. Keputusan itu, antara lain: (1) Penjelasan BP tentang Maklumat Wakil Presiden No. X; (2) Pengumuman BP No. 1 tentang segala sesuatu yang dibicarakan oleh BP dan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan

Walaupun Maklumat No. X memungkinkan KNIP menjalankan semua kekuasaan legislatif dari MPR dan DPR, namun BP yang merupakan pelaksana sehari-hari KNIP

578 *Ibid.*, hlm. 108-109
579 *Ibid.*, hlm. 109
580 *Ibid.*, hlm. 109

usul-usulnya secara tertulis; (3) Pengumuman BP No. 2 tentang RUU KNID; (4) Pengumuman BP No. 3 tentang usul kepada pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik; (5) Pengumuman BP No. 4 tentang usul BP tentang GBHN; (6) Pengumuman BP No. 5 tentang usul BP tentang pertanggungjawaban menteri kepada DPR; (7) Pengumuman BP No. 6 tentang usul BP tentang tindakan apa yang sebaiknya diambil pemerintah sehubungan dengan terbentuknya (kepanjangannya belum disebutkan sebelumnya) (AMACAB); dan (8) Protes BP terhadap pengeboman yang dilakukan oleh Inggris di Surabaya. Dari kedelapan hasil BP tersebut, enam di antaranya dapat disimpulkan sebagai lima hak inisiatif dan satu hak mosi.[581]

Ditinjau dari paham sosialis-demokrat yang dianut oleh Syahrir, banyaknya partai tidak menjadi soal. Namun, jika kembali kepada KNIP dan BP-nya, maka harus disediakan pula tempat bagi wakil-wakil aliran partai tersebut untuk duduk dalam KNIP dan BP. Bertolak dari keinginan bahwa keanggotaan KNIP harus disempurnakan dengan golongan-golongan yang hidup di masyarakat, maka penambahan anggota dan adanya Sidang Pleno II KNIP perlu diadakan. Walaupun larangan rangkap jabatan belum ada, tapi sebagian besar elite politik saat itu mengerti bahwa seseorang yang sudah menjabat eksekutif tidak dibenarkan lagi untuk duduk dalam legislatif. Ketika hal itu justru terjadi pada Ketua dan Wakil Ketua BP, maka Sidang Pleno KNIP tidak dapat diundur lagi.[582]

Ditinjau dari paham sosialis-demokrat yang dianut oleh Syahrir, banyaknya partai tidak menjadi soal.

Sidang Pleno II KNIP diadakan di Jakarta pada tanggal 25-27 November 1945, sebelas hari setelah Kabinet Syahrir terbentuk. Sidang Pleno itu diadakan di ruangan bekas asrama Ika Daigaku, sekarang depan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Hadir dalam sidang ini sebanyak 244 orang, di antaranya dari luar Jawa sebanyak 50 orang.[583]

Sidang ini dipimpin oleh Syahrir dan selama tiga hari itu dibicarakan hal-hal terkait Laporan Ketua BP tentang hasil-hasil yang telah dicapai BP sejak dibentuk tanggal 17 Oktober 1945, juga pembicaraan mengenai pemerintahan, khususnya soal pembentukan Kabinet Syahrir, serta pemilihan pimpinan dan anggota BP yang baru.[584]

581 *Ibid.*, hlm. 111-112
582 *Ibid.*, hlm. 120-121
583 *Ibid.*, hlm. 121
584 *Ibid.*, hlm. 122

5.2 KNIP Periode Mr. Assaat (1946–1949)

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada periode Mr. Assaat (1946–1949) melanjutkan perannya sebagai lembaga legislatif untuk membantu presiden, sebelum didirikannya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam perkembangannya, KNIP aktif dalam menyuarakan aspirasi berbagai partai politik dan golongan masyarakat yang tergabung di dalamnya. Sebagai lembaga pembantu presiden, peran KNIP pada periode Mr. Assaat sebetulnya jauh lebih besar daripada itu, termasuk menjadi semacam parlemen yang turut andil dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang penting bagi kelangsungan Republik Indonesia. Walaupun senantiasa muncul konflik dalam tubuh KNIP, terutama dari kubu oposisi Persatuan Perjuangan di masa revolusi, hubungan antara KNIP dengan lembaga kepresidenan (Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, dan Kabinetnya) berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari bagaimana KNIP selalu menyetujui program pemerintah, meskipun pembahasan yang kerap kali berjalan dengan alot, khususnya pada Sidang Pleno KNIP maupun Rapat Badan Pekerja (BP) KNIP.

Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tanggal 29 Agustus 1945 sesuai dengan amanat Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945

5.2.1 BP KNIP

Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tanggal 29 Agustus 1945 sesuai dengan amanat Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 yang menjelaskan bahwa sebelum dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), segala wewenang yang nantinya dimiliki oleh ketiga badan tersebut untuk sementara dijalankan oleh presiden, dengan bantuan suatu Komite Nasional. Para anggota KNIP adalah tokoh-tokoh dalam masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, baik mereka yang berjuang dalam jalur militer maupun juga mereka yang berdiplomasi di meja perundingan. Terbentuknya Badan Pekerja KNIP tidak terlepas dari kondisi masa revolusi yang mengharuskan kerja legislatif agar dilakukan secara lebih "fleksibel", namun tetap berkesinambungan dengan anggota yang lebih kecil jumlahnya. Pada sidang ke-2 KNIP pada tanggal 16–17 Oktober 1945, diputuskan bahwa pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh sebuah BP KNIP yang dipilih oleh dan juga bertanggung jawab kepada anggota KNIP sendiri. Sejak saat itu, tanggal 16 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi BP KNIP. Dalam perkembangannya, BP KNIP menjadi suatu badan penting yang bekerja bahu membahu bersama pemerintah

dalam merumuskan peraturan dan undang-undang, serta mengambil keputusan penting di rentang periode 1945–1949.

Dalam situasi yang tidak menentu di masa revolusi, masalah tempat kedudukan menjadi suatu hal penting bagi BP KNIP dalam menjalankan tugasnya. Sejak tahun 1945 hingga Februari 1946, BP KNIP memiliki tempat kedudukan di Jakarta. Alasan keamanan yang semakin tidak menentu di Jakarta setelah kembalinya Belanda membuat BP KNIP berupaya mencari domisili yang baru. Di luar Jakarta, tempat yang menjadi pilihan adalah Yogyakarta, Surakarta, Salatiga, Magelang, dan Purwokerto. Namun, kelima kota tersebut sudah dipenuhi oleh aktivitas republik. Pilihan mengenai domisili KNIP jatuh pada Purworejo di Jawa Tengah, sebuah kota kecil dan relatif aman di masa revolusi, serta dekat dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta.[585] Setelah semua perangkat pendukung beserta dengan sarana dan prasarana telah dipersiapkan, pada tanggal 23 Maret 1946, BP KNIP mengadakan sidang perdananya di Purworejo. Salah satu hasil kerja BP KNIP pada sidang perdananya di Purworejo adalah dibentuknya Badan Penghubung BP KNIP yang berkantor di Jl. Cilacap No. 4, Jakarta untuk menjalin hubungan tetap antara BP KNIP di Purworejo dengan pemerintahan di Jakarta yang saat itu dipegang oleh Kabinet Syahrir.[586] Selain itu, dalam sidang ini, BP KNIP juga mengesahkan beberapa rancangan undang-undang, di antaranya adalah Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan yang kemudian ditetapkan menjadi UU No. 3 tahun 1946 dengan disahkannya UU tersebut pada 18 Januari 1946, selain berbagai rancangan undang-undang yang lain.

Dalam situasi yang tidak menentu di masa revolusi, masalah tempat kedudukan menjadi suatu hal penting bagi BP KNIP dalam menjalankan tugasnya.

5.2.2 Peraturan Tata Tertib dan Pelaksanaannya oleh KNIP

Tidak salah apabila dikatakan bahwa KNIP adalah lembaga "masa revolusi", karena masa aktifnya yang secara penuh diisi pada periode revolusi Indonesia. Setelah Konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949, KNIP pun tetap aktif hingga proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1945. Dapat

585 J.R. Chaniago, 1979, "Wajah Dua Muka: Sebuah Kekuatan Politik Badan Pekerja KNIP Periode Jakarta (1945–1948)" (Jakarta, Skripsi FSUI), hlm. 21

586 Kewajiban Badan Penghubung BP KNIP di Jakarta antara lain: (1) Meminta keterangan dari para menteri serta instansi lainnya; (2) Memberikan keterangan dan pendapat-pendapat kepada para menteri; dan (3) Membuat dokumentasi yang tidak dapat dilakukan di Purworejo. Di masa setelahnya, tempat kedudukan BP KNIP berpindah ke Yogyakarta. (Dalam surat kabar *Merdeka*, 27 Maret 1946)

dibayangkan suasana kerja KNIP ketika itu yang lebih adaptif terhadap situasi, tetapi juga begitu aktif. Agar kerja KNIP lebih efektif, seperti yang telah disinggung sebelumnya, dibentuklah BP KNIP yang bertugas untuk menjalankan kegiatan sehari-hari KNIP dalam hal fungsi legislatif dalam pemerintahan Republik Indonesia. Rapat-rapat BP KNIP, baik di kalangan sendiri maupun bersama-sama dengan pemerintah, dilakukan dalam suasana sederhana. Agar masyarakat umum dapat mengetahui pembicaraan-pembicaraan dalam BP KNIP, pemerintah dengan BP KNIP secara berkala menerbitkan pemberitaan yang disampaikan melalui media surat kabar dengan nama *Berita Republik Indonesia*.[587]

Agar masyarakat umum dapat mengetahui pembicaraan-pembicaraan dalam BP KNIP, pemerintah dengan BP KNIP,,,

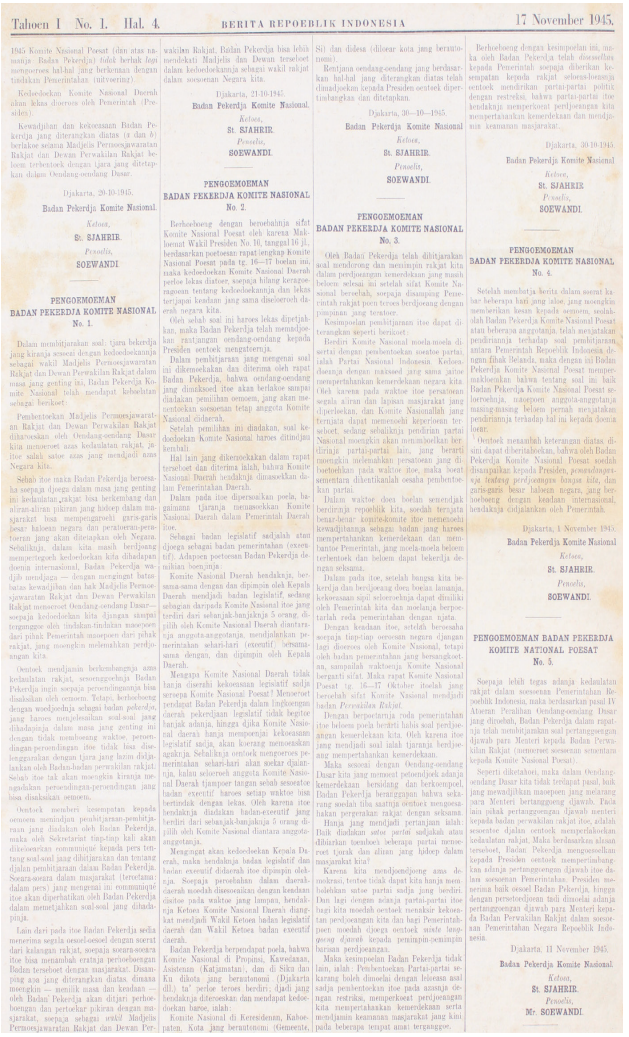

Tahoen I No. 1. Hal. 4. BERITA REPOEBLIK INDONESIA 17 November 1945.

PENGOEMOEMAN
BADAN PEKERDJA KOMITE NASIONAL
No. 1.

Djakarta, 30-10-1945.
Badan Pekerdja Komite Nasional.
Ketoea,
St. SJAHRIR.
Penoelis,
SOEWANDI.

PENGOEMOEMAN
BADAN PEKERDJA KOMITE NASIONAL
No. 2.

Djakarta, 31-10-1945.
Badan Pekerdja Komite Nasional.
Ketoea,
St. SJAHRIR.
Penoelis,
SOEWANDI.

PENGOEMOEMAN
BADAN PEKERDJA KOMITE NASIONAL
No. 3.

Djakarta, 30—10—1945.
Badan Pekerdja Komite Nasional
Ketoea,
St. SJAHRIR.
Penoelis,
SOEWANDI.

PENGOEMOEMAN
BADAN PEKERDJA KOMITE NASIONAL
No. 4.

Djakarta, 30-10-1945.
Badan Pekerdja Komite Nasional
Ketoea,
St. SJAHRIR.
Penoelis,
SOEWANDI.

PENGOEMOEMAN BADAN PEKERDJA
KOMITE NATIONAL POESAT
No. 5.

Djakarta, 1 November 1945.
Badan Pekerdja Komite Nasional
Ketoea,
St. SJAHRIR.
Penoelis,
SOEWANDI.

Gambar 1. Cuplikan Berita Republik Indonesia, 17 November 1945
Sumber: Berita Republik Indonesia, 17 November 1945

587 J.R. Chaniago, *Op.Cit.*, hlm. 32

Sebelum periode BP KNIP aktif di Purworejo, masalah pencatatan dan pengarsipan dokumen-dokumen KNIP masih bersifat sederhana. Pembahasan dalam rapat-rapat BP KNIP hanya dicatat secara ringkas, terutama mengenai hasil rapatnya. Perubahan terjadi setelah BP KNIP bekerja di Purworejo, di mana notulensi dicatat secara lebih terperinci dan sistematis. Hal ini sejalan dengan kegiatan BP KNIP yang diadakan secara lebih teratur. Sistem "sidang", yaitu serangkaian rapat yang dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu, semakin baik pelaksanaannya sejak BP KNIP bertugas di Purworejo. Dalam sidang, BP KNIP juga kerap memberlakukan "masa reses", yaitu periode saat para anggota menghentikan sementara pembahasan dalam sidang.[588] Namun, oleh karena masalah keamanan, diperlukan waktu yang cukup panjang hingga akhirnya BP KNIP dapat lebih membuka diri kepada pers. Barulah pada akhir 1946, rapat-rapat BP KNIP dihadiri oleh perwakilan wartawan.[589]

Selain mengerjakan fungsi legislatif, BP KNIP juga berfungsi untuk melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah. Secara umum, fungsi-fungsi ini dijalankan oleh BP KNIP dengan membagi anggota BP ke dalam kepanitiaan-kepanitiaan yang lebih kecil. Kepanitiaan ini bertugas untuk membahas suatu permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya, yang kemudian hasilnya dibicarakan dalam Rapat Pleno BP KNIP dengan mekanisme "tanya jawab" yang akan menghasilkan suatu mosi dari BP KNIP. Pihak pemerintah juga menunjuk perwakilan yang ditugaskan untuk menjawab atau memberikan keterangan dalam sidang-sidang BP KNIP. Mengacu kepada tugasnya sebagai lembaga yang terlibat dalam proses keluarnya undang-undang, BP KNIP memiliki panitia-panitia yang memfokuskan diri pada pembahasan undang-undang yang dibicarakan bersama dengan menteri negara terkait. Dalam kaitannya dengan rumah tangga internalnya, BP KNIP memiliki panitia rumah tangga yang mengatur perihal surat menyurat.

Selain mengerjakan fungsi legislatif, BP KNIP juga berfungsi untuk melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah.

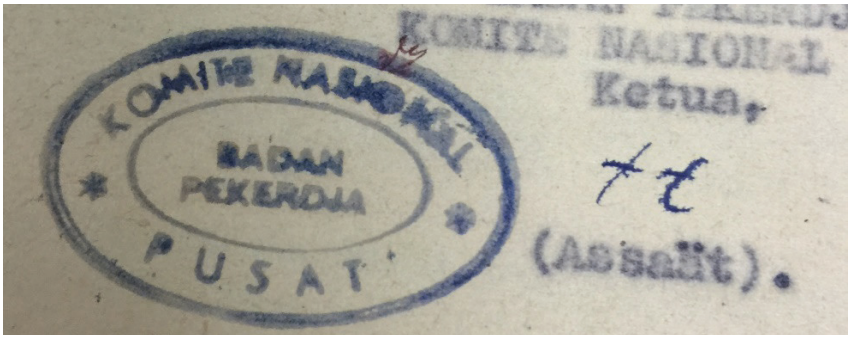

Gambar 2. Stempel BP KNIP Masa Periode Mr. Assaat, 1946–1949
Sumber: ANRI, Dokumen KNIP, No. 79 (1947)

588 *Seperempat Abad DPR RI*, *Op.Cit.*, hlm. 44
589 *Ibid.*, hlm. 45

Perkembangan peraturan tata tertib dan administrasi sebagai pedoman kerja BP KNIP dari awal mula pembentukannya hingga akhir merupakan suatu komponen yang menarik untuk dilihat dan dipahami. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan oleh karena banyaknya dokumen KNIP yang hilang pada masa revolusi. Dokumen-dokumen KNIP tersebut sengaja dihancurkan oleh pihak republik pada masa Agresi Militer Belanda ke-2 untuk menghindari jatuhnya informasi penting Republik Indonesia kepada pihak Belanda.[590] Sebagian arsip yang masih ada dihimpun oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dalam kumpulan arsip yang diberi judul "Dokumen BP KNIP". Di antara arsip yang masih ada, terdapat peraturan tata tertib yang paling awal tertanggal 10 Juni 1947 yang menjelaskan peraturan tata tertib pada masa-masa awal BP KNIP ketika dipimpin oleh Mr. Assaat.[591] Dokumen ini menjelaskan cara kerja BP KNIP baik dalam merancang dan mengesahkan undang-undang bersama pemerintah maupun dalam tugas kontrol atas pemerintah. Terdapat pula ketentuan tentang badan-badan perlengkapan yang membantu BP KNIP dalam melaksanakan tugasnya, di antaranya adalah:

1. Panitia Tetap
2. Panitia Khusus
3. Seksi-seksi
4. Panitia Rumah Tangga

Tugas Panitia Tetap dan Panitia Khusus adalah membantu BP KNIP untuk membentuk undang-undang, dan juga untuk keperluan-keperluan lain yang berkaitan dengan perundang-undangan. Panitia tetap berkewajiban untuk mengadakan pemeriksaan persiapan atas rancangan undang-undang, termasuk melaporkan hasil pemeriksaannya dengan bersama-sama menyusun "Laporan Gabungan" yang disampaikan kepada menteri, agar selanjutnya dapat dijawab secara tertulis melalui mekanisme "Memori Jawaban".

Selanjutnya, dengan menggunakan Laporan Gabungan dan Memori Jawaban pemerintah sebagai bahannya, Rapat Pleno BP KNIP merundingkan rancangan undang-undang tersebut, lalu mengambil keputusan. Berdasarkan sifatnya, Rapat Pleno BP KNIP bersifat terbuka. Rapat Pleno BP KNIP dilaksanakan secara tertutup hanya jika terdapat usulan dari anggota BP KNIP, sekurang-kurangnya tiga orang, yang menganggapnya perlu, atau berdasarkan usulan dari pemerintah sendiri.

,,, dengan menggunakan Laporan Gabungan dan Memori Jawaban pemerintah sebagai bahannya, Rapat Pleno BP KNIP merundingkan rancangan undang-undang tersebut, lalu mengambil keputusan.

590 Achmad Nadjamudin, "Inventaris Arsip Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), 194 –1950" (Jakarta, Skripsi Kearsipan Program Diploma III), hlm. v
591 ANRI, *Dokumen KNIP*, No. 79 (1947)

Selain Panitia Tetap dan Panitia Khusus, BP KNIP memiliki badan perlengkapan yang terbagi ke dalam beberapa seksi. Terdapat enam seksi dalam BP KNIP, yaitu:

1. Luar Negeri
2. Dalam Negeri
3. Pembangunan
4. Penerangan
5. Pertahan negara; dan
6. Kemasyarakatan

Kewajiban enam seksi tersebut dalam BP KNIP, antara lain:

1. Memperhatikan kebijaksanaan pemerintah dalam hal-hal yang masuk dalam urusan seksi tersebut;
2. Memperhatikan kesulitan-kesulitan pemerintah dalam menjalankan undang-undang;
3. Mendengar suara rakyat dalam hal terkait kebijaksanaan pemerintah, seperti menerima rakyat pada hari-hari tertentu dan memperhatikan surat-surat masuk;
4. Melakukan penyelidikan atas peristiwa-peristiwa penting atas kehendak sendiri atau atas keputusan Badan Pekerja; dan
5. Mengajukan usul-usul dan laporan-laporan tentang persoalan yang termasuk urusannya kepada badan Pekerja.[592]

Mengenai urusan rumah tangga dan administrasi, BP KNIP memiliki anggota sekurang-kurangnya empat orang yang bersama-sama dengan Ketua BP KNIP berkewajiban untuk: (1) Mengawasi sekretariat BP KNIP; (2) Mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai sekretariat, kecuali sekretaris; dan (3) Membuat rancangan anggaran belanja BP KNIP.

Dengan bantuan badan-badan perlengkapan yang ada ini, BP KNIP menjalankan tugasnya, termasuk mengenai tugas pengawasan atas pemerintah, di mana BP KNIP bertugas untuk mendengar keterangan pemerintah tentang kebijaksanaan yang akan atau telah dijalankan oleh pemerintah. Keterangan pemerintah ini kemudian dibahas dan diperdebatkan dengan suatu mekanisme yang disebut sebagai "Pemandangan Umum" dari Rapat Pleno BP KNIP. Setelah itu, pemerintah diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban. Dalam sesi pembahasan yang dapat berlangsung cukup panjang ini,

> ,,, BP KNIP menjalankan tugasnya, termasuk mengenai tugas pengawasan atas pemerintah,

592 *Seperempat Abad DPR RI*, *Op.Cit.*, hlm. 48

anggota BP KNIP dapat mengajukan mosi mendukung atau tidak mendukung terhadap usulan atau kinerja pemerintah yang dilaporkan.

5.2.3 Tata Kerja Rapat dan Sidang BP KNIP

Peraturan tata tertib BP KNIP tanggal 10 Juni 1947 menjelaskan bahwa Sidang Pleno BP KNIP dilakukan setidak-tidaknya dua kali di tiap bulannya, antara tanggal 10 dan 25. Anggota BP KNIP dengan sendirinya berkewajiban untuk menghadiri sidang. Apabila berhalangan hadir, anggota BP KNIP diharuskan untuk memberitahukannya pada panitia sidang, sebelum sidang tersebut dimulai. Apabila secara berturut-turut anggota tidak dapat menghadiri sidang tanpa alasan yang jelas, anggota tersebut dapat dikenai sanksi setinggi-tingginya, yaitu berupa pemberhentian dari keanggotaan dalam BP KNIP.[593]

Rapat atau Sidang Pleno BP KNIP dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah dari jumlah anggotanya. Apabila pada jam yang telah ditetapkan jumlah anggota minimal (kuorum) belum terpenuhi, maka ketua dan anggota-anggota yang hadir dapat menentukan waktu rapat selanjutnya. Ini berkaitan dengan suasana revolusi yang mengharuskan KNIP untuk bertindak secara fleksibel. Dengan cara ini, rapat tidak perlu ditunda hingga kuorum terpenuhi. Sementara itu, susunan agenda rapat disusun dan ditetapkan oleh Ketua BP KNIP, bersama dengan ketua-ketua seksi.

Rapat atau Sidang Pleno BP KNIP dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah dari jumlah anggotanya.

Ketentuan tata tertib rapat dan sidang pleno adalah sebagai berikut:

1. Anggota harus mendapatkan izin ketua untuk berbicara;
2. Berbicara pada tempatnya dan berdasarkan giliran;
3. Tidak menggunakan kata-kata yang menghina atau menyinggung perasaan;
4. Tidak menyimpang dari agenda rapat; dan
5. Tidak melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban.[594]

Apabila terdapat pelanggaran dalam rapat atau sidang pleno, ketua dapat mengambil tindakan-tindakan penanggulangan, seperti melarang anggota yang bersangkutan berbicara, mengusulkan kepada rapat agar anggota itu dilarang menghadiri rapat selanjutnya, menghentikan rapat, atau menunda rapat ke hari yang lain.

Dalam hal jalannya rapat atau sidang, ketua memberikan tiga kali

593 *Seperempat Abad DPR RI*, *Op.Cit.*, hlm. 52
594 ANRI, *Dokumen KNIP*, No. 79 (1947)

kesempatan bagi anggota untuk menyampaikan gagasannya. Setelah pembahasan selesai, ketua mengatur persiapan yang diperlukan untuk mengambil suara, baik secara lisan maupun tertulis, apabila persoalannya menyangkut individu tertentu. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan memanggil para anggota seorang demi seorang. Saat namanya dipanggil, anggota itu berkewajiban memberikan suaranya dengan kata-kata "setuju" atau "tidak setuju", dan tidak diperbolehkan untuk "abstain". Pengambilan suara ini dapat pula diadakan secara duduk atau berdiri.[595] Para anggota yang berdiri pada saat mekanisme ini dijalankan berarti setuju, sedangkan yang duduk berarti tidak setuju. Keputusan dianggap sah apabila tercapai suara terbanyak yang mutlak, dengan memperhatikan kuorum. Apabila jumlah suara yang setuju sama banyaknya dengan jumlah suara yang tidak setuju, maka pemungutan suara harus diulang. Apabila sampai dua kali pengulangan pemungutan suara hasilnya tetap sama, maka diadakan suatu pengundian untuk memperoleh keputusan.

Pengambilan suara ini dapat pula diadakan secara duduk atau berdiri.

Dalam peraturan tata tertib tahun 1947 ini, terdapat pula ketentuan tentang bagaimana cara anggota KNIP mempergunakan "hak demokratis"-nya sebagai anggota kamar legislatif, walaupun belum ada peraturan UU yang mengukuhkan akan hal ini. Hak-hak yang dimiliki oleh anggota KNIP, seperti yang tertulis dalam tata tertib BP KNIP tahun 1947, antara lain:

1. Hak memajukan suatu usulan;
2. Hak mengadakan penyelidikan atas suatu permasalahan;
3. Hak interpelasi; dan
4. Hak untuk memberikan pertanyaan kepada pemerintah.[596]

Satu hal menarik yang juga dijelaskan dalam tata tertib rapat dan sidang BP KNIP tahun 1947 adalah mengenai peraturan bagi BP KNIP dalam hubungannya kepada masyarakat, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Pada masa BP KNIP melakukan sidang, disediakan waktu selama satu hari untuk menerima rakyat yang ingin menyampaikan keluhan, keberatan, pendapat, atau usul;
2. Seksi yang berkaitan dengan keluhan, keberatan, pendapat, atau usul itulah yang berkewajiban dalam menerima dan menjawab masyarakat;
3. Dalam Sidang Pleno BP KNIP, masyarakat atau peninjau tidak

595 *Seperempat Abad DPR RI*, *Op.Cit.*, hlm. 54
596 ANRI, *Dokumen KNIP*, No. 79 (1947)

diperbolehkan untuk menyampaikan pendapatnya, atau mengganggu jalannya sidang dengan cara apapun. Apabila hal ini tetap terjadi, ketua sidang akan meminta kepada peninjau tersebut untuk keluar dari tempat acara.[597]

5.2.4 Peraturan mengenai Tata Tertib KNIP

Secara umum, Tata Tertib KNIP dikeluarkan sebagai panduan untuk Sidang Pleno KNIP di suatu periode. Dengan pemahaman ini, tata tertib pada satu periode sidang akan berbeda dengan tata tertib periode sidang yang lain. Dalam penulisan ini, kami hanya dapat menghimpun Tata Tertib KNIP yang terakhir digunakan, yaitu pada Sidang KNIP ke-6 pada tahun 1949 di Yogyakarta.

Menurut tata tertib ini, ketua, yang ketika itu digantikan oleh wakil ketua karena berhalangan, memiliki beberapa kewajiban, yaitu:

1. Merancang daftar pekerjaan dalam Sidang KNIP;
2. Mengatur dan memimpin pekerjaan KNIP; dan
3. Menjaga ketertiban rapat, dan juga menjalankan keputusan rapat.

Sementara, Sekretaris Sidang bertugas untuk menyampaikan notulensi dari tiap-tiap rapat KNIP. Apabila dirasa perlu, ketua dan wakil ketua dapat membentuk kepanitiaan khusus untuk melakukan suatu pekerjaan dan memberikan laporan kepada Sekretaris Sidang.

Tata Tertib Sidang Pleno KNIP adalah tata peraturan yang sama dengan Tata Tertib Sidang BP KNIP yang telah disampaikan sebelumnya. Yang membedakan adalah terdapatnya pengaturan mengenai tempat duduk tertentu bagi presiden, wakil presiden, perdana menteri, dan para menteri dalam Sidang Pleno KNIP.[598] Sedangkan pada rapat atau sidang BP KNIP, tidak ada pengaturan mengenai tempat duduk peserta. Begitu pula dengan tata tertib pada sidang. Anggota Sidang Pleno KNIP memiliki hak-hak demokratis yang sama, yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib Sidang KNIP.

Apabila hal ini tetap terjadi, ketua sidang akan meminta kepada peninjau tersebut untuk keluar dari tempat acara.

597 *Seperempat Abad DPR RI*, *Op.Cit.*, hlm. 54
598 *Ibid.*, hlm. 56

5.3 KNIP dan Oposisi dari Persatuan Perjuangan, 1946 – awal 1947

Pada tanggal 28 Februari–3 Maret 1946, Sidang Pleno KNIP ke-4 berhasil diadakan di Gedung Gubernuran, Surakarta.

Pada tanggal 28 Februari–3 Maret 1946, Sidang Pleno KNIP ke-4 berhasil diadakan di Gedung Gubernuran, Surakarta. Diselenggarakannya Sidang Pleno KNIP ini adalah suatu pencapaian yang baik, karena tekanan Belanda telah membuat aktivitas pemerintah Republik Indonesia menjadi demikian terbatas. Sidang Pleno KNIP, yang merupakan wadah pertemuan berbagai perwakilan dari partai politik, organisasi, kemasyarakatan, dan perwakilan KNI daerah, adalah suatu "hajatan besar" bagi republik. Anggota-anggota Komite Nasional yang diundang dalam Sidang KNIP di Solo ini juga semakin banyak. Menurut pengumuman Badan Pekerja KNIP tanggal 22 dan 26 Februari 1946, anggota KNIP yang diundang untuk menghadiri sidang berjumlah sekitar 203 orang, ditambah mereka yang diminta menjadi anggota melalui surat kawat atau telegram, serta para wakil ketua Komite Nasional Daerah Karesidenan yang dianggap menjadi anggota KNIP. Pada kenyataannya, anggota KNIP yang hadir dalam rapat di Solo justru lebih besar lagi. Hal ini terlihat dari jumlah anggota yang hadir pada hari pertama Sidang Pleno, yaitu sekitar 218 anggota, ditambah dengan 200 orang undangan lain. Angka ini semakin bertambah di hari-hari Sidang Pleno selanjutnya, seperti yang dicatat pada laporan KNIP bahwa terdapat 225 anggota yang mengeluarkan suaranya mengenai *Laporan Badan Pekerja/Politik Luar Negeri Pemerintah*.[599] Walaupun begitu, berkumpulnya para tokoh pusat dan daerah dalam sidang KNIP juga membawa kekhawatiran yang cukup besar, apabila dikaitkan dengan kondisi genting di berbagai daerah pada masa revolusi ini. Sidang Pleno KNIP ke-4 tahun 1946 akhirnya tidak sampai menyelesaikan beberapa pokok persoalan karena sebagian besar anggotanya telah meninggalkan rapat, akibat situasi yang tidak menentu di daerah.

Dalam Sidang Pleno KNIP ke-4 ini, keputusan-keputusan penting diambil oleh anggota sidang. Harian *Merdeka*, 2 Maret 1946 menyebutkan bahwa pada hari pertama sidang (28 Februari 1946), Presiden Soekarno mengumumkan secara resmi pembubaran Kabinet Syahrir. Para anggota KNIP yang telah dipengaruhi oleh kelompok oposisi pemerintah bernama Persatuan Perjuangan (PP) sebelumnya cukup keras menuntut adanya perubahan dalam Kabinet Syahrir agar lebih representatif dan tidak hanya didominasi oleh kelompok

599 *Ibid.*, hlm. 13

tertentu. Sebagai dampaknya, Presiden Soekarno akhirnya memilih untuk membubarkan Kabinet Syahrir.[600] Hari pertama Sidang Pleno juga membahas mengenai Laporan Kerja BP KNIP. Perdebatan yang cukup keras mewarnai pembahasan laporan kerja tersebut, khususnya kritik-kritik tajam yang disampaikan oleh PP, sehingga membuat pembahasan berlangsung sengit. Harian *Merdeka* tanggal 2 Maret 1946 juga mengatakan bahwa hingga Sidang Pleno hari pertama selesai pada pukul 17.00, perdebatan mengenai Laporan Kerja BP KNIP masih terus berlangsung.[601]

Perlu kiranya dibahas pula mengenai latar belakang terbentuknya PP yang mewarnai perkembangan KNIP pada periode ini. Sebelum diadakannya Sidang Pleno KNIP ke-4 ini, PP telah muncul menjadi kekuatan oposisi yang kuat terhadap KNIP. Apabila ditinjau lebih lampau lagi, awalnya PP adalah perwujudan gagasan yang lahir dari suatu kongres yang dihadiri oleh perwakilan organisasi sipil, partai, laskar, dan juga ketentaraan pada tanggal 3–5 Januari dan 15–16 Januari 1946. Pada kongres pertamanya di tanggal 3–5 Januari 1946 di Gedung Serba Guna Purwokerto, hadir 132 perwakilan dari organisasi dan partai, yang di antaranya adalah perwakilan dari Partai Komunis Indonesia, Serikat Buruh Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia, Hizbullah, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Angkatan Muda Republik Indonesia, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, dan organisasi masyarakat serta partai lainnya. Mereka berkumpul untuk mendukung sikap Tan Malaka yang menolak jalur diplomasi pilihan Presiden Soekarno.[602] Dalam rapat ini, Tan Malaka menyampaikan dua rencananya, yaitu pembentukan Front Rakyat (*Volksfront*) dan "Minimum Program" untuk mencapai kemerdekaan Indonesia yang seratus persen. Dengan adanya kongres ini, pokok-pokok gagasan terbentuknya PP telah tersampaikan.

Perlu kiranya dibahas pula mengenai latar belakang terbentuknya PP yang mewarnai perkembangan KNIP pada periode ini.

Kemudian, pada tanggal 16 Januari 1946 di kongres lanjutan yang diadakan di Balai Agung, Solo, lahirlah PP. Pada saat itu, perwakilan partai dan organisasi yang datang untuk mendukung pembentukan PP berjumlah sekitar 500 orang, yang merupakan perwakilan dari 141 organisasi.[603] "Minimum Program", atau haluan dari PP berjumlah tujuh

600 *Merdeka*, 2 Maret 1946
601 *Merdeka*, 2 Maret 1946
602 Tan Malaka menggagas pembentukan Persatuan Perjuangan (PP) sebagai respon terhadap pidato Presiden Soekarno dalam sidang pelantikan KNIP tanggal 29 Agustus 1945, yang mengatakan bahwa jalan yang ditempuh untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan untuk mencari pengakuan internasional bagi Republik Indonesia ialah jalan diplomasi. (Dalam Osman Raliby, 1953, *Documenta Historica*, hlm. 121
603 Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, *KNIP: Komite Nasional Indonesia Pusat, Parlemen Indonesia 1945–1950* (Jakarta, Risalah), hlm. 55

pokok program, antara lain sebagai berikut:

1. Berunding atas pengakuan kemerdekaan 100%;
2. Pemerintahan rakyat;
3. Tentara Rakyat;
4. Melucuti tentara Jepang;
5. Mengurus tawanan bangsa Eropa;
6. Menyita dan memanfaatkan pertanian musuh; dan
7. Menyita dan memanfaatkan perindustrian musuh.

Minimum Program digunakan sebagai garis politik yang disampaikan, baik dalam mimbar-mimbar pertemuan maupun pers. Tidak terkecuali dalam Sidang Pleno ke-4 KNIP di Solo, PP menyuarakan kritik-kritiknya terhadap pemerintah dengan dasar Minimum Program. Bagi PP, hubungan Indonesia dengan Belanda pada periode itu dianggap bersifat "kompromistis" dan bukan atas dasar pengakuan kemerdekaan yang seratus persen. Kritikan PP terhadap pemerintah dalam situasi revolusi yang serba sulit ini dianggap sebagai suatu penentangan, atau bahkan suatu gerakan radikal kepada pemerintah.[604] Walaupun begitu, pada Sidang Pleno ke-4 ini, KNIP berhasil menyelesaikan agenda-agenda pentingnya.

Pada Sidang tanggal 1 Maret 1946, pembahasan utama adalah mengenai Laporan Kerja BP KNIP. Namun sebelumnya, Ketua Sidang Mr. Assaat mengingatkan betapa kerasnya perdebatan dan situasi sidang KNIP ini. Ia mengharapkan agar para anggota KNIP selalu ingat untuk menjaga persatuan dan mengutamakan kepentingan negara.[605] Setelah diskusi yang cukup keras dalam sidang, akhirnya Laporan Kerja BP KNIP diterima melalui pemungutan suara, dengan jumlah suara sebesar 140 suara menerima, 67 suara menolak, dan 18 suara abstain.[606] Pada sidang ini, hadir pula Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Jenderal Sudirman, dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Jenderal Sudirman juga berkesempatan untuk turut berpidato di depan Sidang Pleno untuk menyampaikan situasi terkini perihal keadaan militer dan perjuangan rakyat.

Pada Sidang tanggal 1 Maret 1946, pembahasan utama adalah mengenai Laporan Kerja BP KNIP.

604 Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagyo Toer, dan Ediati Kamil, 1999, *Kronik Revolusi Indonesia, Jilid II* (Jakarta: ?), hlm. 174
605 *Kedaulatan Rakyat*, 4 Maret 1946 (Dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 62-63
606 Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 63

Gambar 4. Sidang Pleno ke-4 KNIP di Solo

Beberapa foto yang diambil dalam Sidang Pleno ke-4 di Solo. Tampak Presiden Soekarno (kanan-atas) dan Jenderal Sudirman (kanan-bawah) di sidang itu.
Sumber: *Merdeka*, Maret 1946

,,, Wikana sebagai perwakilan PP menyampaikan bahwa PP telah memutuskan untuk melarang anggotanya masuk dalam kabinet baru pemerintah.

Pada Sidang Pleno KNIP tanggal 2 Maret 1946, Wikana sebagai perwakilan PP menyampaikan bahwa PP telah memutuskan untuk melarang anggotanya masuk dalam kabinet baru pemerintah. Hal ini adalah respon dari PP, setelah PP menganggap bahwa tuntutan Minimum Program ditolak secara halus oleh pemerintah. Sebelumnya, pada malam hari tanggal 1 Maret, beberapa perwakilan PP menghadap presiden untuk meminta pemerintah menjalankan Minimum Program dari PP. Soekarno dan Hatta ketika itu menjawab bahwa mereka akan mempertimbangkannya. Menanggapi tekanan dari PP ini, pemerintah memikirkan kembali keputusannya. Selain karena PP amat berpengaruh dalam KNIP, Minimum Program rupanya bermanfaat untuk rakyat, walaupun realitanya akan sulit ketika dirundingkan dengan pihak Belanda. Soekarno dan Hatta akhirnya memutuskan untuk mengangkat Syahrir sebagai formatur kabinet dengan beberapa mandat yang

mencerminkan pengaruh yang dapat ada dengan diterapkannya Minimum Program, yaitu:

1. Pemerintah berunding dengan Belanda atas pengakuan RI seratus persen (pengaruh dari Minimum Program Nomor 1);
2. Pemerintah mempersiapkan rakyat dan negara di segala lapangan politik, ketentaraan, ekonomi, dan sosial (pengaruh Minimum Program Nomor 3, 6, dan 7);
3. Susunan Pemerintah Pusat/Daerah berdasarkan demokrasi (pengaruh Minimum Program Nomor 2);
4. Pemerintah berusaha segiat-giatnya untuk menyempurnakan produksi, pembagian makanan, dan pakaian (pengaruh Minimum Program Nomor 6 dan 7);
5. Tentang perusahaan perkebunan, yang penting hendaknya diambil tindakan seperlunya oleh pemerintah, sehingga memenuhi maksud sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 33 (pengaruh Minimum Program Nomor 6 dan 7).[607]

Melihat pengaruh dari PP dalam mandat yang disampaikan presiden dan wakil presiden kepada formatur kabinet ini, kita dapat memahami bahwa anggota-anggota PP, dalam kapasitasnya sebagai anggota KNIP, mampu menekan pemerintah melalui usulan yang keras karena usulan PP yang berpijak besar pada kepentingan rakyat. Kita juga dapat melihat bagaimana KNIP muncul sebagai kekuatan semi-independen yang mampu menerima atau menolak usulan pemerintah, sehingga mencerminkan dirinya sebagai suatu "organisasi poros baru" yang dinamis dalam perpolitikan RI.

Pada hari terakhir Sidang Pleno KNIP ke-4 tanggal 3 Maret 1946, secara resmi Mr. Assaat diangkat sebagai Ketua BP KNIP. Seperti halnya tugas ketua BP KNIP sebelumnya, Mr. Assaat bersama anggota BP KNIP berkewajiban untuk membahas berbagai permasalahan republik, serta menyetujui atau menolak rencana undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pada hari terakhir Sidang Pleno KNIP ke-4 tanggal 3 Maret 1946, secara resmi Mr. Assaat diangkat sebagai Ketua BP KNIP.

Setelah pengangkatan Mr. Assaat sebagai ketua BP KNIP dalam sidang Pleno ini, sebenarnya terdapat dua agenda lainnya yang masuk dalam rencana pembahasan, yaitu masalah pertahanan dan keamanan RI, dan juga mengenai susunan dan kedudukan anggota KNIP dan KNI Daerah. Namun, sidang tidak melanjutkan pembahasan ini, sebab sebagian anggota KNIP memutuskan untuk undur diri setelah mendapatkan kabar terkait perkembangan situasi keamanan

607 *Merdeka*, 6 Maret 1946

di daerah asalnya. Dengan demikian, Sidang Pleno KNIP menyerahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan presiden dengan kepercayaan penuh.[608]

Gambar 5. Sidang Pleno ke-4 KNIP di Solo
Sumber: ANRI – IPPHOS (Maret 1946)

Gambar 6. Sidang Pleno ke-4 KNIP di Solo
Sumber: *Pantja Raja*, 15 Maret 1946

Dengan demikian, Sidang Pleno KNIP menyerahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan presiden dengan kepercayaan penuh.

608 *Merdeka*, 6 Maret 1946

5.3.1 Pandangan BP KNIP terhadap aktivitas Persatuan Perjuangan

Setelah Sidang Pleno ke-4 KNIP usai, BP KNIP kembali aktif bekerja seperti biasanya. BP KNIP menyoroti masalah yang diakibatkan oleh aktivitas PP. Pada masa-masa setelah Sidang Pleno ke-4, popularitas PP memang semakin naik ke permukaan dengan berbagai kegiatan politik yang dijalankannya. Dari sudut pandang pemerintah RI, keaktifan kelompok oposisi ini dianggap merugikan. Pada tanggal 17 Maret 1946, bertepatan dengan selesainya Kongres PP di Madiun pada tanggal 15–17 Maret 1946, tokoh-tokoh PP seperti adalah Tan Malaka, Sukarni, Abikusno Cokrosuyoso, Mohammad Yamin, Chaerul Saleh, dan Sayuti Melik ditangkap oleh pemerintah Kabinet Syahrir. Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin mengatakan bahwa:

> "Oleh sebab oposisi yang tidak loyal terus dilakukan Persatuan Perjuangan, maka langkahnya diawasi, sebab ada kekuasaan lain di luar kekuasaan pemerintah. Hal ini tidak boleh dibiarkan karena dalam fase yang seperti sekarang ini, hal itu berbahaya. Selain daripada itu, ada beberapa kenyataan yang Persatuan Perjuangan mengadakan gerakan untuk merubuhkan Pemerintahan Pusat dengan jalan di luar undang-undang".[609]

Setelah penangkapan tokoh-tokoh PP oleh pemerintah, kegiatan PP tetap berjalan seperti biasanya.

Setelah penangkapan tokoh-tokoh PP oleh pemerintah, kegiatan PP tetap berjalan seperti biasanya. PP berusaha untuk merangkul berbagai organisasi politik, sosial, ekonomi, dan juga badan-badan perjuangan rakyat untuk hadir dalam konferensi di Gedung KNI Yogyakarta tanggal 5 Mei 1946, sekitar dua bulan setelah penangkapan tokoh-tokoh PP, yang tujuannya adalah untuk membentuk konsentrasi nasional.[610] Konferensi ini berhasil diadakan dan dihadiri oleh berbagai perwakilan organisasi-organisasi seperti Pesindo, Partai Sosialis, Partai Katolik (PKRI), Barisan Tani Indonesia, dan juga perwakilan dari PP sendiri. Hasil dari konferensi ini adalah pembentukan Konsentrasi Nasional yang dijadikan sebagai suatu federasi organisasi politik, ekonomi, sosial, atau juga badan perjuangan yang memiliki kantor pusat dan kantor cabang, setidaknya sepuluh cabang, dalam lima

609 Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagyo Toer, dan Ediati Kamil, 1999, *Op.Cit.*, hlm. 174
610 Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 68

karesidenan.[611] Menariknya, walaupun PP berhasil membentuk Konsentrasi Nasional, front ini justru lebih loyal kepada pemerintah pusat.

Melalui aktivitas politik PP, kita dapat melihat bagaimana dinamisnya suasana demokratis pada masa revolusi. PP, sebagai kelompok oposisi pemerintah, diizinkan untuk berkegiatan di kantor KNI Yogyakarta, suatu hal yang menjelaskan bagaimana dapat terjalin hubungan yang erat antara PP dengan KNI Yogyakarta, dan juga lembaga KNIP secara luas. Hubungan antara PP dengan pemerintah memburuk ketika pada tanggal 27 Juni 1946 Perdana Menteri Syahrir dan beberapa orang pegawai pemerintahan lainnya, seperti Mayor Jenderal Sudibyo, Sumitro Joyohadikusumo, dan Darmawan Mangunkusumo, diculik oleh anggota PP di Surakarta. Presiden Soekarno, melalui Maklumat Presiden No. 1 tanggal 29 Juni 1946, mengumumkan bahwa kekuasaan pemerintahan untuk sementara waktu berada di tangan Presiden.[612] Kabinet parlementer yang dianut RI langsung berubah menjadi kabinet presidensial selama masa darurat. Dengan berlakunya kabinet presidensial, menteri-menteri dalam kabinet bertanggung jawab kepada presiden, sementara presiden bertanggung jawab kepada KNIP.

Melalui aktivitas politik PP, kita dapat melihat bagaimana dinamisnya suasana demokratis pada masa revolusi.

Menanggapi respon pemerintah, BP KNIP pimpinan Mr. Assaat menyetujui keputusan ini, dengan catatan bahwa kekuasaan penuh presiden tersebut hanya berlaku sementara (darurat) hingga kondisi politik kembali stabil. Situasi semakin keruh ketika PP kembali melakukan aksi pada tanggal 3 Juli 1946 dengan mengajukan petisi langsung kepada Presiden Soekarno. Tidak hanya itu, PP dalam aksinya ini juga turut merencanakan pembebasan tokoh-tokoh mereka yang dipenjara, serta merencanakan penangkapan terhadap Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin. Isi petisi PP kepada Presiden Soekarno pada tanggal 3 Juli, antara lain, sebagai berikut:

1. Pemberhentian kabinet Syahrir;
2. Penyerahan kekuasaan dari Presiden kepada Dewan Pimpinan Politik yang terdiri dari Buntaran Martoatmojo, Budiarto, Chaerul Saleh, Gatot Mangkupraja, Iwa Kusumasumantri, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Sunario Kolopaking, Tan Malaka, dan Wahid Hasyim; serta
3. Pengangkatan kabinet baru, terdiri atas 13 menteri dan 12 menteri negara.[613]

611 *Ibid.*
612 *Pantja Raja*, 15 Juli 1946
613 *Ibid.*

Dampak dari Peristiwa 3 Juli 1946 ini adalah penangkapan terhadap para pemimpin PP.

Dampak dari Peristiwa 3 Juli 1946 ini adalah penangkapan terhadap para pemimpin PP. Pemerintah menganggap bahwa tindakan PP sudah membahayakan keselamatan negara, terlebih karena PP juga menginginkan Presiden Soekarno untuk menyerahkan kekuasaannya pada orang-orang yang ditunjuk oleh PP. BP KNIP pun segera meminta kepada pemerintah untuk memberikan keterangannya terkait peristiwa 3 Juli tersebut, beserta dengan penangkapan para pemimpin PP.

Keterangan pemerintah disampaikan pada Sidang Pleno BP KNIP di Yogyakarta, tanggal 7 dan 8 Juli 1946. Setelah sidang, BP KNIP menyimpulkan bahwa penculikan dan pengajuan petisi yang dilakukan oleh PP amat berbahaya bagi Republik Indonesia. Untuk itu, BP KNIP mengeluarkan tiga tuntutan sebagai resolusi dari peristiwa tersebut, yakni:

1. Pengembalian kekuasaan sepenuhnya ke tangan presiden merupakan jalan yang bijaksana dan tepat untuk menjamin keselamatan negara;
2. Menuntut secara hukum mereka yang terlibat dalam usaha perebutan kekuasaan dengan kekerasan; dan
3. Mengadakan pembersihan di kalangan tentara sehubungan dengan tersangkutnya Mayor Jendral Sudarsono dalam perebutan kekuasaan itu.[614]

Ketiga pernyataan di atas adalah respon positif BP KNIP terhadap tindakan pemerintah. Dengan adanya pernyataan dukungan dari BP KNIP, pemerintah dapat lebih mudah untuk mengendalikan situasi dari permasalahan yang ditimbulkan oleh PP.

Sistem kabinet dikembalikan lagi ke sistem parlementer atas permintaan Sidang BP KNIP di Purworejo pada tanggal 13 Agustus 1946.[615] Maklumat Presiden No. 2 tanggal 2 Oktober 1946 mengenai Pengembalian Sistem Kabinet dikeluarkan oleh Presiden Soekarno untuk mencabut Maklumat Presiden No. 1 Tahun 1946. Pada tanggal 5 Oktober 1946, Kabinet Syahrir yang baru dilantik. Secara resmi, status keadaan darurat yang diakibatkan oleh aktivitas PP di wilayah Republik Indonesia berakhir. Peran BP KNIP yang responsif dan juga positif mendukung kerja pemerintah adalah kunci dari penyelesaian masalah ini.

614 *Pantja Raja*, 1 September 1946
615 *Ibid.*

5.3.2 Pandangan dan sikap BP KNIP terhadap berbagai isu pada tahun 1946

Setelah Mr. Assaat dilantik sebagai Ketua BP KNIP pada 3 Maret 1946, terdapat berbagai isu dari dalam dan luar negeri yang turut menjadi perhatian BP KNIP. Subbab ini membahas mengenai pokok-pokok perhatian yang diberikan oleh BP KNIP terhadap isu-isu yang berkembang di sepanjang tahun 1946.

5.3.3 Pandangan BP KNIP mengenai sikap pemerintah terhadap Belanda

Pada masa ini, sikap Pemerintah Indonesia terhadap Belanda menjadi fokus perhatian khalayak ramai. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa peperangan sudah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia antara pihak Indonesia dengan Belanda. BP KNIP menjalankan perannya untuk mengawasi kinerja Pemerintah Indonesia dengan meminta keterangan pemerintah atas tindakan-tindakannya dalam menghadapi Belanda. Sidang BP KNIP pada tanggal 9 Juli 1946 diadakan untuk mendengar keterangan pemerintah tentang usulan pihak Indonesia kepada Belanda yang disampaikan pada tanggal 11 Juni 1946. Bunyi usulan pihak Indonesia adalah bahwa Belanda diharapkan dapat menyetujui kemerdekaan Indonesia yang meliputi seluruh daerah bekas jajahan Hindia Belanda. Untuk mencapai hal ini, Pemerintah Indonesia mengusulkan agar Belanda setidaknya dapat mengakui kekuasaan penuh Republik Indonesia atas Jawa dan Sumatera. Setelah itu, Pemerintah Indonesia dan Belanda dapat bekerja sama dalam memasukkan daerah-daerah lainnya ke dalam wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, Republik Indonesia yang merdeka akan membentuk perjanjian persahabatan dengan Belanda.[616]

Dalam sidang ini, BP KNIP mengambil keputusan dengan suara bulat menyatakan kepercayaan kepada pemerintah untuk melanjutkan perundingan dengan Belanda. BP KNIP beranggapan bahwa pemerintah telah benar dalam menyikapi Belanda, yang dilandasi oleh program pemerintah Pasal 1 (Pemerintah berunding dengan Belanda atas pengakuan RI seratus persen) yang diumumkan dalam Rapat Pleno KNIP pada tanggal 2 Maret 1946 di Solo.[617]

Pada masa ini, sikap Pemerintah Indonesia terhadap Belanda menjadi fokus perhatian khalayak ramai.

616 Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 77
617 *Ibid.*

5.3.4 Permasalahan mengenai susunan keanggotaan KNIP

Mengenai susunan keanggotaan, KNIP memandang bahwa penambahan jumlah anggota KNIP secara terbatas akan berdampak pada kualitas KNIP. Pada Sidang Pleno ke-4 KNIP, sidang telah memberi mandat kepada anggota KNIP Sarmidi Mangunsarkoro untuk membentuk komisi pembaharuan untuk keanggotaan KNIP. Pada akhir sidang, mandat ini diserahkan kembali kepada presiden karena ketiadaan waktu untuk meneruskan pembahasan. Oleh pemerintah, susunan keanggotaan KNIP diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1946 tentang Pembaharuan KNIP. Melalui PP No. 2 ini, jumlah anggota KNIP bertambah dari yang sebelumnya sekitar 137 orang menjadi 200 orang, terdiri dari 100 orang wakil daerah, 60 orang wakil organisasi politik, dan 40 orang ditunjuk oleh presiden.[618] Wakil ketua I dan II dari komite ini diangkat oleh presiden dari tiga orang calon yang disebut sebagai Badan Pembaharuan KNIP. Badan ini berpusat di Yogyakarta, dengan cabang-cabang pada tiap karesidenan untuk pulau Jawa dan Sumatera, serta di tempat kedudukan gubernur untuk Kalimantan dan Maluku. Untuk daerah Sunda Kecil dan Sulawesi, cabangnya didirikan di tempat yang ditetapkan oleh Badan Pembaharuan KNIP.

Mengenai susunan keanggotaan, KNIP memandang bahwa penambahan jumlah anggota KNIP secara terbatas akan berdampak pada kualitas KNIP.

Namun, dalam waktu singkat, PP No. 2 Tahun 1946 diperbaharui lagi oleh pemerintah pada bulan Juni 1946 dengan UU No. 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan KNIP. Setelah dikeluarkannya UU baru ini, pada bulan September 1946, Presiden Soekarno melantik Pusat Badan Pembaharuan Susunan KNIP yang bertugas untuk membentuk susunan KNIP baru. Ketua Badan ini adalah anggota KNIP yang juga mantan ketua BP KNIP, Supeno. Anggota dari badan ini berjumlah sebanyak delapan orang, yang terdiri dari Burhanuddin Harahap, Syamsuddin Sutan Makmur, Gusti Abdul Muis, Manai Sophiaan, Muchsin Hadiprabowo, A. Yahya, R. Jufri Nitiharjo, dan K.R.T. Brotokusumo. Pada bulan yang sama, BP KNIP membentuk tiga panitia tetap, sebagai berikut:

1. Panitia Bidang I (Luar Negeri)
   a. Ketua: Burhanuddin Harahap (Masyumi).
   b. Wakil Ketua: Sujono.
   c. Anggota: Mr. Tambunan, A. Halim, Sugondo Joyopuspito,

618 *Ibid.*, hlm. 81

S. Mangunsarkoro, Mohammad Sa'at, Adam Malik, dan Sumarsono (Pegawai Kesekretariatan KNIP) sebagai penulis.

2. Panitia Bidang II (Pertahanan)
   a. Ketua: Lukman Hakim (PNI).
   b. Wakil Ketua: Safiuddin Suryoamidharmo.
   c. Anggota: Mohammad Gozali, P. de Queljoe, Supeno, Susilowati, Zein Jambek, Dr. Johannes, dan J. Pulungan (Pegawai Kesekretariatan KNIP) sebagai penulis.
3. Panitia Bidang III (Sosial Politik)
   a. Ketua: Subadio Sastrosatomo (Partai Sosialis)
   b. Wakil Ketua: Tan Ling Ji
   c. Anggota: Yusuf, Wiyono, Syamsuddin Sutan Makmur, A. Wibowo, A.A. Maramis, Sukarni, dan Udoyo (Pegawai Kesekretariatan KNIP) sebagai penulis.

Seperti yang disampaikan oleh Subadio Sastrosatomo dalam wawancaranya dengan Deliar Noer (2005), anggota panitia ini cukup fleksibel dan dapat menangani bidang lain di luar bidang yang ditunjukkan kepada mereka. Hal lain yang juga penting untuk diperhatikan adalah pengaruh presiden dalam menentukan susunan anggota panitia tetap ini.[619] Anggota yang masuk dalam tiga panitia tetap ini tidak ditentukan oleh ketua BP KNIP ataupun partainya, melainkan murni atas pilihan presiden.

Pada tanggal 15 November 1946, pemerintah pusat di bawah pimpinan PM Syahrir menandatangani Perjanjian Linggarjati di Jakarta.

5.3.5 Tanggapan BP KNIP terhadap PP No. 6 Tahun 1946 dan Perjanjian Linggarjati

Pada tanggal 15 November 1946, pemerintah pusat di bawah pimpinan PM Syahrir menandatangani Perjanjian Linggarjati di Jakarta. Selanjutnya, BP KNIP, sebagai badan legislatif sementara RI, harus meresponnya dengan menerima atau menolak hasil perjanjian tersebut. Menanggapi Perjanjian Linggarjati, BP KNIP terbagi menjadi dua kubu: Kubu Persatuan Perjuangan yang menolak hasil Perjanjian Linggarjati dan Kubu Pemerintah di bawah pimpinan PM Syahrir, dan juga Soekarno-Hatta. Pada situasi ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1946 mengenai Penyempurnaan Susunan Anggota KNIP yang dinilai kontroversial. Dengan adanya PP

619 Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 83

No. 6 Tahun 1946 ini, jumlah anggota KNIP yang beberapa bulan sebelumnya baru saja bertambah menjadi 200 orang, melonjak hingga mencapai 314 orang.

Sebagian anggota BP KNIP melihat bahwa PP No. 6 Tahun 1946 adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa BP KNIP meratifikasi Perjanjian Linggarjati. Dengan tegas, para anggota BP KNIP yang kontra dengan PP melakukan penolakan terang-terangan. BP KNIP menyadari bahwa elemen penting dalam ratifikasi Perjanjian Linggarjati adalah melalui jumlah dan susunan anggota KNIP, sehingga pembahasan terus berlangsung hingga tahun berikutnya. Anggota-anggota BP KNIP yang kontra, seperti Mr. Sartono (PNI), Mangunsarkoro (PNI), B.M. Diah (non-partai), dan R.A. Kasmat (Muhammadiyah) bahkan mendukung Rencana Undang-Undang Pembatalan PP No. 6 pada tanggal 17 Januari 1947. Polemik mengenai PP No. 6 Tahun 1946 akhirnya selesai pada Sidang BP KNIP tanggal 27 Februari 1947, lewat argumentasi Wakil Presiden Hatta yang mengatakan:

Dengan tegas, para anggota BP KNIP yang kontra dengan PP melakukan penolakan terang-terangan.

> "*Tuduhan jang mengatakan bahwa pengangkatan anggota KNIP atas dasar Peraturan Presiden No. 6 adalah siasat Presiden untuk meratifikasi naskah Linggarjati, ini saja tolak sekeras-kerasnya. Tanpa Peraturan Presiden No. 6 pun naskah Linggarjati dapat diratifikasi, perhatikan sadja bahwa anggota KNIP lama 151 orang pro naskah dan 104 orang anti naskah... Jika saudara-saudara masih djuga menyangkal Peraturan Presiden No. 6, lebih baik cari Presiden jang lain dan kami akan meletakkan jabatan.*" (*Berita Indonesia*, 29 Februari 1947)

Pada sidang itu juga, Mr. Assaat selaku Ketua BP KNIP akhirnya menerima PP No. 6 Tahun 1947 untuk disetujui oleh badan legislatif tersebut.

5.3.6 Pandangan BP KNIP mengenai Kewarganegaraan

Permasalahan mengenai kewarganegaraan adalah pembahasan yang penting dalam BP KNIP dalam rangka meneguhkan kedudukan warga negara di lingkungan negara Republik Indonesia. Pada tahun 1946, BP KNIP menyetujui Undang-Undang Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia (UU No. 3 Tahun 1946) dengan poin-poin penting, di antaranya adalah:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) ialah orang yang asli dalam daerah Negara Indonesia;
2. WNI adalah orang yang tidak masuk dalam golongan orang asli, tetapi keturunan dari seorang dari golongan itu, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di dalam daerah Indonesia; dan
3. WNI adalah orang yang mendapat kewarganegaraan Indonesia dengan cara naturalisasi.

Dari Undang-Undang ini, terlihat BP KNIP mengakomodir azas *ius Soli* (hak menjadi warga negara berdasarkan tempat lahir) dan *ius Sanguinis* (hak menjadi warga negara berdasarkan pertalian darah). Termasuk juga dalam kaitannya dengan naturalisasi, UU No. 3 Tahun 1946 membahas secara rinci mekanisme perpindahan kewarganegaraan asing ke kewarganegaraan Indonesia.

5.3.7 Permasalahan mengenai Ekonomi dan Keuangan

BP KNIP pada tahun 1946 membahas dan menyetujui beberapa hal, di antaranya seputar Pinjaman Nasional 1946 (penjualan Surat Pengakuan Hutang kepada WNI dalam UU Pinjaman Nasional 1946) untuk menyehatkan keuangan negara melalui mekanisme hutang dalam negeri. BP KNIP juga menyetujui pembatasan dalam membawa uang dari satu daerah ke daerah lain (UU No. 10 Tahun 1946), kewajiban menyimpan uang di dalam bank (UU No. 18 Tahun 1946), dan UU Pengeluaran Uang RI (UU No. 19 Tahun 1946).

BP KNIP pada tahun 1946 membahas dan menyetujui beberapa hal, di antaranya seputar Pinjaman Nasional 1946

Dalam Bayang-bayang Perjanjian Linggarjati dan Agresi Militer Belanda: KNIP Pada Tahun 1947

Bagi KNIP, dapat dikatakan bahwa tahun 1947 adalah tahun yang penuh ketidakpastian karena Agresi Militer Belanda I dan II

dilancarkan ke daerah kantong dan pusat aktivitas republik, sehingga membuat rapat-rapat BP KNIP semakin sulit diadakan. Bahkan di kota-kota yang dikuasai sepenuhnya oleh republik seperti di Yogyakarta dan Purworejo, suasana tidak menentu juga mempengaruhi aktivitas penghuninya. Namun demikian, BP KNIP pimpinan Mr. Assaat tetap menjalankan tugasnya dengan cermat. Dimulai dari pembahasan mengenai respon terhadap susunan anggota KNIP oleh pemerintah, pembahasan mengenai pertahanan dan keamanan, hubungan dengan Belanda, hingga masalah kewarganegaraan dan administrasi daerah. Di awal tahun 1947, KNIP juga mengadakan Sidang Pleno-nya yang ke-5, tepatnya di Kota Malang, Jawa Timur, yang juga menjadi basis kekuatan republik. Dipilihnya Malang sebagai tempat diadakannya Sidang Pleno ke-5 oleh BP KNIP juga melalui pertimbangan yang matang dari segi pertahanan dan keamanan, serta juga sarana dan prasarananya. Bagaimanapun juga, Sidang Pleno KNIP adalah acara besar demokrasi Indonesia di masa revolusi. Selepas sidang ini, BP KNIP kembali menjalankan tugasnya sebagai "pelaksana harian" badan legislatif yang turut mendukung jalannya pemerintahan Republik Indonesia.

Sidang Pleno KNIP adalah acara besar demokrasi Indonesia di masa revolusi.

5.4. Sidang Pleno KNIP di Malang

5.4.1 Suasana sidang Pleno KNIP ke-5 di Malang

Sebagai tempat dilangsungkannya Sidang Pleno KNIP ke-5, aktivitas di Kota Malang meningkat di awal tahun 1947. Hal ini disebabkan oleh persiapan Sidang Pleno KNIP, dan juga datangnya para anggota KNIP dan KNI Daerah dari berbagai wilayah Republik Indonesia ke kota ini. Dari arsip KNIP yang dapat ditemukan, dapat diketahui suasana menjelang dan pada saat sidang berlangsung pada tanggal 25 Februari hingga 5 Maret 1947.

Dalam hal keamanan secara umum, situasinya adalah sebagai berikut:

> "*Penjagaan oleh polisi tentara dan polisi negara oemoemnya sangat rapi, teroetama di dalam dan di sekitar gedoeng parlemen, ditempat2 penting, di vitale bedrijven [bangunan penting] dan diseloeroeh djalan raja dalam kota Malang. Hanja beberapa tempat tinggal anggota KNIP jang*

bermalam di hotel-hotel agak koerang baik, terutama di Hotel Sian A, Hotel Bian Wan Ki, dan Hotel Trio dimana orang2 dari Sajap Kiri bertempat tinggal, hingga orang loear jang tidak berkentingan dapat masoek dengan moeda. Manakala pada waktoe itoe ada kedjadtian sesoeatoe jang boeroek soenggoeh2 akibatnja akan membahajakan bagi kita."[620]

Seperti yang dijelaskan diatas, keamanan Kota Malang pada saat menjelang dan berlangsungnya sidang menjadi tanggung jawab TNI dan Polri. Hasil pekerjaan dari kedua lembaga ini juga baik, terbukti dari laporan yang menjelaskan bahwa penjagaan mereka menghasilkan suatu lingkungan yang amat kondusif, baik di tempat umum maupun di gedung pemerintahan. Beberapa hotel yang menjadi tempat tinggal anggota sayap kiri agak rawan keamanannya, oleh karena akses untuk mencapai hotel-hotel itu kurang terjangkau dan pada akhirnya mempengaruhi kualitas keamanan, ataupun standar hotel-hotel itu kurang baik dalam menjaga tamu-tamunya.

Sebagai dampak dari panasnya situasi dalam Sidang Pleno KNIP, resiko pencurian terhadap dokumen rahasia, baik yang milik individu, partai, maupun negara, amat tinggi terjadi, seperti yang disampaikan dalam laporan KNIP berikut:

"Selain dari pada itoe poen siaran2 radio, soeasana hangat di dalam sidang djoega mempengaroehi keadaan politik, pekerdjaan selandjoetnja kearah itoe (politik), jang lebih berbahaja djoega telah dikerdjakan seperti oesaha mentjoeri dokumen2 jang berada di roemah-roemah, kantor-kantor, di kereta api dan dilain-lain kendaraan kepoenjaan orang2 party."[621]

Seperti yang dijelaskan diatas, keamanan Kota Malang pada saat menjelang dan berlangsungnya sidang menjadi tanggung jawab TNI dan Polri.

620 *Laporan Mengenai Pelaksanaan Sidang Pleno KNIP ke-5*. ANRI, *Arsip BP KNIP* No. 111 (Februari 1947)
621 *Ibid.*

Gambar 1. Suasana di luar gedung pada Sidang Pleno KNIP ke-5 di Malang

Suasana di luar Gedung Sidang KNIP ke-5. Tampak ada spanduk bertuliskan "*Pahlawan di Garis Depan Minta Boekti Djasamoe!*".
Sumber: IPPHOS-ANRI, No. 82 (Februari–Maret 1947)

"Tindakan poelisi negara dan tentara terhadap reactia dan telah dikatakan tegas, terboekti tiap-tiap gerakan jang demonstratief ...

Dalam hal penindakan terhadap elemen atau situasi yang dapat mengancam keamanan pada masa Sidang Pleno ke-5, laporan KNIP menjelaskan bahwa:

> *"Tindakan poelisi negara dan tentara terhadap reactia dan telah dikatakan tegas, terboekti tiap-tiap gerakan jang demonstratief dari pihak reaksioner jang bermaksoed akan mengeroehkan soeasana sidang KNIP dapat mereka padamkan dengan seketika itoe. Soal pertahanan dapat dikerdjakan dengan rapi hanja sajang kesatoean komando dari fihak tentara dan poelisi beloem ada, hingga beberapa kali timboel kesalahan faham diantara poelisi tentara dan PAM. Soal ini soenggoeh2 kami sesalkan dan harapan kami di kemoedian hari dapatlah terjipta adanja kesatoean komando dengan arti jang sesoenggoehnja, agar artinja: stable gouvernement (pemerintahan jang stabil) dapat diwoedjoedkan."*[622]

622 *Ibid.*

Laporan KNIP menjelaskan bagaimana kerja sama yang terjalin antara polisi, tentara, dan PAM (Pengamanan Masyarakat) dalam menghalau "gerakan yang demonstratif" di Malang berjalan dengan cukup baik. Setiap kali ada gerakan yang bersifat mengganggu, gerakan itu dengan cepat dapat dipadamkan. Meskipun begitu, koordinasi antara ketiga elemen keamanan masih belum baik, sehingga kerap kali timbul kesalahpahaman di lapangan. Namun, dalam laporan ini, tidak dijelaskan bagaimana bentuk kesalahpahaman yang terjadi.

Mengenai perilaku para aparat keamanan, laporan KNIP memberikan catatan berikut:

> "*Disiplin mereka (tentara) keras sekali tetapi sajang koerang disertai dengan ramah tamah hingga banjak tamoe2 dari anggota KNIP jang merasa koerang senang dengan sikap pendjaga. Gerakan laskarpoen tidak sedikit djoemlahnja, teroetama lasjkar2 jang datang dari loear daerah, seperti laskar KRIS dari Djawa Barat (Krwang), BPRI, dari Djawa Barat (Tjirebon) dan Soerabaja (tretes), Banteng dari Solo, dan Kediri dengan adanja gerakan lasjkar tersebut diatas itoe, jang kadang-kadang bertindak setjara machtsvertoon dan demonstratief dapat menimboelkan angst- psychologie massa yang akibatnja tidak baik dan dapat mempengaroehi djalannja sidang KNIP. Kesemoeanja itoe boeat kita tetap adalah perboeatan jang mengatjau. Tetapi dengan tindakan kita bersama2 dengan alat negara jang tetap dan bidjaksana kesemoeanja itoe dapat kita bereskan dengan sebaik-baiknja.*"[623]

Dapat dipahami bagaimana sikap keras diterapkan oleh aparat keamanan terhadap anggota KNIP pada masa ini.

Dapat dipahami bagaimana sikap keras diterapkan oleh aparat keamanan terhadap anggota KNIP pada masa ini. Selain karena situasi revolusi yang mengharuskan penjagaan ekstra terhadap anggota KNIP, aparat keamanan juga harus berhati-hati terhadap kemungkinan adanya penyusup yang tidak diinginkan, ataupun masuknya intelijen Belanda ke dalam Sidang Pleno ini. Keberadaan laskar dari berbagai daerah yang juga ikut serta sebagai penonton, baik di dalam atau di luar sidang, semakin menambah kompleksitas situasi yang harus dijaga oleh aparat keamanan.

623 *Ibid.*

Pada saat Sidang Pleno KNIP ke-5 berlangsung, terdapat juga tindakan yang mengancam keamanan dan ketertiban, di antaranya adalah yang dilakukan oleh anggota-anggota laskar. Namun sekali lagi, tindakan seperti ini dapat dihentikan oleh aparat keamanan. Laporan KNIP mengatakan:

> "*Beberapa waktoe sebeloemnja sidang KNIP diadakan, oedara politik memang sangat panas, berhoebong dengan adanja provokasi2 dan ditambah dengan adanja gerak lasjkar jang bersifat anarchistis dan demonstratief. Matjam finister compagne telah disebarkan kepada massa dengan maksoed mengatjau dan mengadoe-dombakan. Poen waktoe sidang diadakan, tidak sedikit oesahanja oentoek tetap dapat mengeroehkan soeasana sidang dengan menghamboerk2kan palaat dan pamfleet dan ditambah poela dengan adanja rapat2 jang diadakan dengan diam2, tetapi kesemoeanja itoe oleh tindakan jang tepat dari kita bersama2 dengan alat2 negara intimidasi poletik jang telah dikerdjakan oleh fihak reaksioner itoe dapat kita batalkan.*"[624]

Pada saat Sidang Pleno KNIP ke-5 berlangsung, terdapat juga tindakan yang mengancam keamanan dan ketertiban, di antaranya adalah yang dilakukan oleh anggota-anggota laskar.

Pada bagian lain, laporan KNIP juga menjelaskan mengenai praktek suap-menyuap kepada anggota KNIP yang akan menghadiri Sidang Pleno KNIP ke-5. Dalam laporan KNIP, tertanggal 24 Februari 1947, di Hotel Trio, Malang didapatkan informasi sebagai berikut:

> "*Pembitjaraan KNIP jang berada di hotel tsb; (oetoesan dari Soematra) mengatakan bahwa di Solo banjak KNIP akan disoeap dengan oeang oentoek mengintai anti Naskah. Sedang jang mengoesahakan komplotan2 badan rahasia di Solo.*"[625]

Tidak diketahui pasti mengenai para pelakunya, selain dari informasi yang mengatakan bahwa ada rencana yang hendak dilakukan oleh suatu "badan rahasia" di Solo untuk memberikan suap kepada anggota-anggota KNIP di Solo. Informasi ini diketahui dari pembicaraan anggota KNI Daerah Sumatera, terkait dengan isu

624 *Ibid.*
625 *Ibid.*

Perjanjian Linggarjati. Dapat dipahami bagaimana praktek jual-beli suara dapat memberikan keuntungan besar bagi para pelakunya, serta kerugian bagi jalannya demokrasi.

Mengenai kepanitiaan, atau subpanitia yang mengurusi masalah rumah tangga pada Sidang Pleno ke-5 di Malang, laporan KNIP memberikan catatan sebagai berikut:

> *"Oemoemnja semoea sub-sub panitia bekerdja sangat giat, tetapi berhoeboeng tjara bekerdja mereka koerang tepat dan systematisch terdapat djoega kesalahan2 jang diantaranja ada jang dapat menimboelkan bahaja djika pada waktoe itoe seketika tidak dapat diketahoei."*[626]

Kepanitiaan dalam Sidang Pleno KNIP dibentuk oleh BP KNIP untuk mempersiapkan dan menjalankan hal-hal teknis terkait Sidang Pleno.

Kepanitiaan dalam Sidang Pleno KNIP dibentuk oleh BP KNIP untuk mempersiapkan dan menjalankan hal-hal teknis terkait Sidang Pleno. Dalam situasi revolusi, perihal kebocoran informasi atau kesalahan teknis terkait penyampaian informasi dapat berakibat fatal. Sidang Pleno ke-5 KNIP, seperti yang disampaikan dalam kutipan laporan KNIP di atas, memiliki kepanitiaan yang baik. Kekurangan yang terdapat dalam pengerjaannya dapat segera ditangani oleh Panitia Sidang Pleno untuk menghindari "bahaya" bagi republik karena jatuhnya informasi penting ke tangan pihak yang tidak diinginkan.

Gambar 2. Ketua BP KNIP Mr. Assaat Memimpin Sidang KNIP ke-5 di Malang
Sumber: ANRI – IPPHOS, No. 441 (Februari – Maret 1947)

626 *Ibid.*

5.4.2 Jalannya Sidang Pleno KNIP ke-5 di Malang

Sidang pleno KNIP ke-5 dibuka oleh pidato dari Ketua BP KNIP Mr. Assaat. Ketua mengingatkan kepada peserta dan hadirin untuk menjaga tata tertib sidang dan fokus pada agenda-agenda persidangan. Selanjutnya, Sidang Pleno masuk pada agenda sidang yang utama, di antaranya adalah perdebatan yang telah dimulai pada tahun 1946 mengenai relevansi PP No. 6 Tahun 1946 tentang Susunan Tambahan KNIP. Mengenai pokok sidang ini, antara pihak oposisi dan pihak yang pro terhadap pemerintah ada dalam posisi yang berimbang. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pokok ini saja memerlukan waktu hingga berhari-hari dalam periode Sidang Pleno.

Dalam Sidang Pleno KNIP ke-5 ini, baik Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Perdana Menteri Syahrir, dan menteri-menteri negara, serta puluhan wartawan, baik dari dalam dan luar negeri, turut hadir. Animositas yang tinggi terhadap Sidang Pleno KNIP ke-5 ini juga yang pada akhirnya membuat laporan sidang ini lebih lengkap jika dibandingkan dengan sidang-sidang sebelumnya. Hadir pula 444 anggota KNIP, baik dari susunan lama sejumlah 214 orang maupun dari susunan baru yang berjumlah 230 orang, berdasarkan PP No. 6 Tahun 1946. Namun, kedatangan anggota baru KNIP ini hanyalah dimaksudkan untuk meninjau sidang.[627] Di hari pertama, tanggal 25 Februari 1947, Presiden Soekarno menyampaikan pidato sambutannya. Selanjutnya, Ketua KNIP Mr. Assaat menyampaikan pidato pembukaan yang menyampaikan pentingnya KNIP untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, ataupun kepentingan politis partainya, seperti berikut:

> *"... Haroes kita akoei, bahwa ternjata sampai saat ini perdjoeangan partai itoe ditoedjoekan kepada memperbesar pengaroeh dalam pemerintahan dan mempereboetkan kursi dalam badan-badan perwakilan. Sementara rakjat menderita sehebat-hebatnja, pemimpin-pemimpinnja bertjakar-tjakaran tentang soal jang tidak langsoeng mengenai nasib rakyat... Djanganlah perdjoeangan partai*

Animositas yang tinggi terhadap Sidang Pleno KNIP ke-5 ini juga yang pada akhirnya membuat laporan sidang ini lebih lengkap

627 Parada Harahap, 1951, *Saat Bersejarah: Ichtisar dan Pemandangan yang Didapat dari Persidangan Komite Nasional Indonesia Pusat di Malang, 25 Februari – 5 Maret 1947* (Jakarta: Gapura), hlm. 20

itu hanjalah dipoesatkan kepada mengeritik sadja. Djanganlah kita mengira bahwa djika kita berhasil mengganti seorang menteri lantas keadaan rakjat akan sekaligus beroebah... Rakjat jang baroe merdeka itoe soedah berabad-abad meringkoek di bawah telapak kaki pendjadjahan, adalah ibarat gadis baru berkain dan boedjang baru berkeris, jaitu penuh sentiment, kadang-kadang ijdel, kadang-kadang militant, jagalah dan pergoenakanlah perasaan rakjat itu dengan bidjaksana."[628]

Setelah pidato selesai disampaikan oleh Mr. Assaat, sidang kembali dilanjutkan dengan agenda laporan dari BP KNIP. Selanjutnya, pembahasan sidang masuk pada PP No. 6 Tahun 1946, yang menjadi satu pokok pembahasan.

Pada Sidang Pleno KNIP hari kedua tanggal 26 Februari 1947, pembahasan sidang masih seputar PP No. 6 Tahun 1946. Mr. Sartono dari PNI adalah salah satu dari kelompok yang mengajukan usul RUU Pembatalan PP No. 6 Tahun 1946. Ia menjelaskan dalam keterangannya, bahwa PP No. 6 Tahun 1946 bertentangan dengan rasa keadilan. RUU pembatalan yang diajukannya adalah salah satu upaya untuk mencari solusi dari permasalahan dengan pemerintah.[629] Hingga akhir sidang hari kedua, belum terlihat ada jalan keluar dari permasalahan terkait PP No. 6 Tahun 1946 ini.

Pada sidang pleno hari ketiga tanggal 27 Februari 1947, barulah ada titik terang dari pembahasan PP No. 6 Tahun 1946 ini setelah polemiknya bergulir hampir setahun lamanya. Di hari ketiga, Wakil Presiden Hatta memberikan pidatonya yang berbeda dari pidato-pidatonya sebelumnya yang "kaku" di tiap sidang KNIP. Kali ini, Wakil Presiden Hatta menyampaikannya dengan berapi-api. Seperti yang sudah disinggung juga dalam bab sebelumnya, dalam kesempatan ini, Wakil Presiden Hatta memberikan kalimat ultimatum dengan tegas kepada anggota sidang, yaitu:

> "Jika Saudara-saudara masih juga menyangkal Peraturan Presiden No. 6, lebih baik cari Presiden yang lain dan kami akan meletakkan jabatan".[630]

Di hari ketiga, Wakil Presiden Hatta memberikan pidatonya yang berbeda dari pidato-pidatonya sebelumnya yang "kaku" di tiap sidang KNIP.

628 *Ibid.*, hlm. 21-22
629 *Soeara Rakyat*, 27 Februari 1946 (Dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 106)
630 *Berita Indonesia*, 29 Februari 1947

Setelah pidato Hatta, di hari itu juga Ketua Sidang Mr. Assaat mengumumkan penarikan kembali RUU Pembatalan PP No. 6 tahun 1946. Dengan ini, maka PP No. 6 Tahun 1946 secara resmi diterima oleh KNIP. Diterimanya PP No. 6 Tahun 1946 mengenai susunan anggota KNIP juga menjelaskan bagaimana wibawa Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta begitu kuat dalam KNIP.

Sidang Pleno KNIP selanjutnya pada tanggal 28 Februari – 1 Maret 1947 memiliki agenda pemilihan dan penetapan ketua KNIP yang baru. Seperti halnya Sidang Pleno KNIP sebelumnya, ketua dan pengurus BP KNIP dipilih melalui mekanisme pemungutan suara. Pada sidang kali ini, para calon ketua KNIP adalah: Mr. Assaat (non-partai), Suwiryo (PNI), A.J. Patty (Maluku dan Sulawesi), dan Abu Hanifah (Masyumi). Menjelang pemungutan suara, Abu Hanifah mundur dari pencalonan, sehingga menyisakan tiga orang calon saja. Setelah melalui proses pemilihan dan penghitungan suara, Sidang Pleno KNIP ke-5 di Malang akhirnya memilih Mr. Assaat sebagai Ketua KNIP sekaligus Ketua BP KNIP yang baru.[631]

Gambar 3. Suasana Penghitungan Suara untuk Memilih Ketua KNIP, 1947
Sumber: ANRI – IPPHOS, No. 449 (Februari – Maret 1947)

631 Pemilihan Ketua KNIP 1947 dimenangkan oleh Mr. Assaat, dengan jumlah suara 299 untuk Mr. Assaat, 81 suara untuk Soewiryo, dan 6 suara untuk A.J. Patty. (Lihat Parada Harahap, 1951, *Op.Cit.*, hlm. 60

Selanjutnya pada tanggal 2–5 Maret 1947, Sidang Pleno KNIP dilanjutkan dengan agenda membahas mengenai kebijakan politik pemerintah, terutama mengenai Perjanjian Linggarjati. Selain dari pembahasan pada pokok Perjanjian Linggarjati, Sidang Pleno juga membahas tentang silabus pendidikan RI yang masih memakai materi pendidikan Hindia Belanda, wewenang polisi yang berada di bawah perdana menteri, keperluan terhadap pegawai pamong praja yang progresif untuk dikirim ke daerah-daerah, pendidikan bagi perempuan, dan juga pembimbingan bagi kaum tani.[632] Pada Sidang Pleno KNIP ke-5 hari terakhir tanggal 5 Maret 1947, diajukan dua mosi, yaitu mosi tentang perjuangan daerah-daerah di luar Jawa dan Sumatera, atau yang juga disebut dengan istilah "Mosi Orang Seberang", serta mosi kepercayaan pada kebijaksanaan politik pemerintah, termasuk pada perundingan dengan Belanda dan hasil Perjanjian Linggarjati. Mosi Orang Seberang diterima secara aklamasi, sedangkan mosi kepercayaan pada kebijaksanaan politik pemerintah disetujui setelah diadakan pemungutan suara.[633] Dalam kaitannya dengan persetujuan KNIP terhadap mosi percaya kepada pemerintah, terdapat beberapa syarat yang diajukan oleh KNIP, yaitu:

1. Mengusahakan penarikan kembali tentara pendudukan Belanda dari seluruh kepulauan Indonesia;
2. Mengusahakan terlaksananya hak-hak demokrasi di daerah-daerah kepulauan Indonesia yang belum masuk daerah de facto RI; dan
3. Menyusun dan menyelenggarakan program pemerintah di segala lapangan masyarakat untuk waktu tertentu.[634]

Dengan demikian, pada hari terakhir Sidang Pleno, sidang secara resmi menerima dan meratifikasi Perjanjian Linggarjati. Badan legislatif KNIP menerima secara sah bahwa wilayah RI terbatas pada Jawa, Madura, dan Sumatera. Surat kabar harian *Pandji Rakjat* memberitakan mengenai penerimaan sidang KNIP terhadap Perjanjian Linggarjati secara padat dan jelas, sebagai berikut:

> *"Pada hari terachir sidang pleno KNIP di Malang tanggal 5 Maret 1947, semoea partai (kecuali Masyumi dan PNI) menetapkan mosi berisi*

Selanjutnya pada tanggal 2–5 Maret 1947, Sidang Pleno KNIP dilanjutkan dengan agenda membahas mengenai kebijakan politik pemerintah,...

632 Parada Harahap, 1951, *Op.Cit.*, hlm. 66
633 *Soeara Rakjat*, 5 Maret 1947 (Dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 106
634 *Soeara Rakjat*, 6 Maret 1947 (Dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 128

> *pernyataan percaya dan mufakat terhadap sikap pemerintah, termasoek dalam hal peroendingan dengan pihak Belanda (terkait naskah Perjanjian Linggarjati).*"[635]

Namun, dalam perkembangannya, Agresi Militer Belanda I yang dilancarkan pada 21 Juli 1947 membuat pemerintah RI membatalkan ratifikasi Perjanjian Linggarjati. Sejak saat itu, dalam situasi yang semakin tidak menentu di masa revolusi, Sidang Pleno KNIP juga tidak bisa lagi diadakan hingga tahun 1949 di Yogyakarta.

Sisanya, BP KNIP pada periode 1947 melakukan pembahasan penting terkait situasi dalam negeri dan menyetujui diberlakukannya undang-undang untuk hal-hal penting yang akan dijelaskan pada subbab selanjutnya.

Gambar 4. Para Peninjau sedang Mengikuti Jalannya Sidang KNIP ke-5, 1947
Sumber: ANRI – IPPHOS, No. 446 (Februari – Maret 1947)

635 *Pandji Rakjat*, 7 Maret 1947

5.5 Pandangan dan Sikap KNIP terhadap Berbagai Isu pada tahun 1947

5.5.1 Pandangan dan Sikap KNIP terhadap Agresi Militer Belanda I

Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan serangannya yang disebut dengan Agresi Militer Belanda 1 (atau "aksi polisionil" menurut sumber Belanda) ke daerah-daerah Republik Indonesia di Jawa dan Sumatera. Serangan ini didukung oleh tentara Belanda dengan alat-alat persenjataan modern, serta pihak Indonesia yang pro terhadap kembalinya Belanda ke tanah air, oleh karena sebagian dari mereka merupakan lulusan *Koninklijk Nederlansch Indische Leger* (KNIL) atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Walaupun begitu, perlawanan rakyat Indonesia terhadap serangan Belanda begitu gigih di berbagai front pertempuran.

Apabila dilihat dari kacamata para perwakilan di meja perundingan, Agresi Militer Belanda I ini adalah satu dari banyak konsekuensi dari penolakan Pemerintah Indonesia atas *aide memoire* (nota diplomatik) yang diajukan oleh Lt. Gubernur Jenderal H.J. van Mook pada bulan Mei 1947. Isi dari *aide memoire* ini adalah:

1. Sebelum terbentuknya RIS, Belanda-lah yang berkuasa atas seluruh daerah Hindia Belanda, dan oleh karena itu RI harus menghentikan segala hubungannya dengan luar negeri;
2. Untuk keperluan keamanan dan ketertiban, pihak Belanda menghendaki diadakannya pasukan keamanan bersama dalam wilayah RI, termasuk daerah-daerah republik yang memerlukan bantuan Belanda;
3. Belanda menghendaki adanya dan dipertahankannya suatu ikatan kenegaraan (*Staatsverbond*) yang abadi antara Nederland dengan Indonesia. Indonesia akan tetap berbentuk federasi;
4. Antara Republik Indonesia dengan Belanda dibentuk pemerintahan *ad interim* bersama;
5. Mengeluarkan uang bersama Belanda dan mendirikan lembaga devisa bersama;
6. Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerah-daerah yang diduduki Belanda;
7. Menyelenggarkan pemilikan bersama atas impor dan ekspor.[636]

> ,,, Agresi Militer Belanda I ini adalah satu dari banyak konsekuensi dari penolakan Pemerintah Indonesia atas *aide memoire* (nota diplomatik) ,,,

636 *Siasat*, 28 Juni 1947 (Dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 128

Bagi pihak Indonesia, permintaan Belanda ini tidak dapat diterima, sebab berdasarkan *aide memoire* ini, Indonesia seolah "diminta" untuk masuk secara sukarela kembali dalam naungan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Bahkan, poin ketiga *aide memoire* ini sudah menyalahi pokok persetujuan dalam Perjanjian Linggarjati, yang baru diratifikasi oleh KNIP pada tanggal 5 Maret 1947.[637] Dalam Perjanjian Linggarjati, Uni Indonesia-Belanda yang akan dibentuk dapat memberikan hak kepada RI untuk memiliki kepala negara sendiri. Uni Indonesia-Belanda ini sendiri akan dikepalai oleh Raja/Ratu Belanda yang bertindak sebagai "*supervisor*/pengawas".

Untuk menghindari perang dengan Belanda, PM Syahrir mengajukan konsesi kepada Belanda, yaitu pengakuan kedaulatan Belanda atas Indonesia selama masa peralihan, suatu hal yang sesungguhnya dikecam oleh partai-partai dan juga BP KNIP. Kabinet Syahrir akhirnya jatuh pada tanggal 26 Juni 1947 karena tekanan yang luar biasa terkait konsesinya kepada Belanda. Kabinet Amir Syarifuddin (Fraksi PKI), yang menggantikan Kabinet Syahrir, juga kesulitan dalam menjawab *aide memoire* Belanda itu.

Kabinet Syahrir akhirnya jatuh pada tanggal 26 Juni 1947 karena tekanan yang luar biasa terkait konsesinya kepada Belanda.

Untuk itu kemudian BP KNIP mengadakan Sidang Tertutup bersama PM Amir Syarifuddin pada tanggal 10 dan 11 Juli 1947. Sidang BP KNIP berpendirian bahwa persoalan keamanan RI merupakan tanggung jawab pemerintah RI, dan karena itu BP KNIP menolak pengawasan keamanan bersama Belanda. Sidang BP KNIP bersama dengan PM Amir Syarifuddin mencapai kesepahaman untuk memberikan konsesi-konsesi lain kepada Belanda yang tidak terlalu merugikan Indonesia, namun ditolak Belanda yang tetap menginginkan *aide memoire* nya dikabulkan sepenuhnya.[638] Akibat tidak disetujuinya permintaan Belanda oleh RI, pada tanggal 21 Juli, Belanda melancarkan serangannya.

BP KNIP segera merespon Agresi Militer Belanda I dengan mengadakan rapat kilat di Yogyakarta. Hasil dari rapat ini adalah para ketua, pimpinan fraksi, dan golongan dari BP KNIP tetap berada di Yogyakarta untuk "selalu siap bersidang".[639] Upaya menarik simpati rakyat Belanda dilakukan oleh Wakil Ketua I BP KNIP, Iskandar Tejasukmana. Ia menyampaikan pidato melalui radio kepada rakyat Belanda agar memprotes keputusan pemerintahnya yang melakukan

637 Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 141
638 *Ibid.*, hlm. 146-147
639 Dengan demikian, sejak Agresi Militer Belanda I, domisili KNIP dari yang semula di Purworejo berpindah ke Yogyakarta. (Lihat *Sidang VI/Rapat ke I Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat di Jogjakarta*. ANRI, Arsip BP KNIP No. 98 [4 Agustus 1947])

Gambar 5.
Iskandar Tejasukmana, Wakil Ketua BP KNIP Masa Agresi Militer Belanda I
Sumber: *Soeara Rakjat*, 2 April 1952

penyerangan bersenjata terhadap RI. Ia juga mengutuk pemerintah Belanda yang menyebarkan pamflet-pamflet untuk menghasut rakyat Indonesia dan menyamakan tindakan ini kepada apa yang dilakukan oleh pendudukan Jepang. Anggota BP KNIP Manai Sophiaan juga menyampaikan pidato radio untuk menarik simpati negara-negara bentukan Belanda di Indonesia. Ia menyatakan ketidakpercayaannya pada sikap PM Negara Indonesia Timur (NIT), Najamuddin Daeng Malewa, yang sesungguhnya seorang pergerakan pro-Republik, yang turut menyetujui Agresi Militer Belanda ini.[640] Pidato-pidato yang disampaikan melalui radio ini dilakukan oleh anggota-anggota BP KNIP untuk menarik simpati rakyat Indonesia, dan juga Belanda. Bagaimanapun, anggota BP KNIP adalah orang-orang yang dihormati sebagai perwakilan rakyat Indonesia.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak RI, termasuk dalam hal ini kecaman BP KNIP, mendapat dukungan dari dunia internasional. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan (DK) PBB bersidang untuk membahas permasalahan Indonesia dengan Belanda. Hasilnya, DK PBB meminta kepada kedua belah pihak untuk memulai gencatan senjata. Pada tanggal 4 Agustus 1947, keputusan untuk melakukan gencatan senjata diumumkan, yang kemudian menandakan akhir dari periode Agresi Militer Belanda yang pertama.

5.5.2 Pidato Mr. Assaat Memperingati Ulang Tahun RI ke-2

Sebagai Ketua Kamar Legislatif KNIP, Mr. Assaat adalah petinggi penting Republik Indonesia bersama dengan jajaran kepala pemerintahan lain, seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, dan juga Perdana Menteri Syahrir. Dalam subbab ini akan dikutip isi pidato Mr. Assaat di Istana Presiden RI di Yogyakarta pada tanggal 17 Agustus 1947. Pidato ini juga merupakan pandangan secara resmi dari Ketua BP KNIP terkait persoalan yang terjadi pada kurun waktu dua tahun yang telah lalu, dan juga seputar Agresi Militer Belanda I. Pidato Mr. Assaat adalah sebagai berikut:

640 *Berita Indonesia*, 22–24 Juli 1947 (Dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 151-152

Pidato 2 Tahun Indonesia Merdeka (diucapkan oleh Ketua KNIP Mr. Assaat di Istana Presiden pada tanggal 17 Agustus 1947 pukul 10:25 WIB

"Presiden Negara Republik Indonesia!

Merdeka!

Hari ini kedua kalinya kita memperingati dan merajakan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, jaitu saatnja bangsa kita 2 tahun jang lalu mewujudkan hak pokok bangsa-bangsa kita 2 tahun jang lalu mewujudkan hak pokok bangsa-bangsa seperti jang telah diakui dalam Atlantic Charter jaitu menentukan nasib sendiri dan memilih bentuk pemerintahan jang disukai bangsa sendiri.

Terlebih dahulu saja mengutjapkan sjukur kepada Tuhan Jang Maha Murah Jang telah memberi rahmat kepada bangsa Indonesia dapat memperingati hari kemerdekaanja sekarnag di hadapan Kepala Negaranya dalam keadaan sehat walafiat.

Perajaan jang pertama sekali kita lakukan pada tempat ini djuga, tetapi suasananja adalah berlainan dengan sekarang. Dulu suasana terpengaruh oleh peristiwa pertjobaan coup d'etat jang membuktikan betapa keruhnja politik dalam negeri. Pada waktu itu belum terbentuk kabinet jang bertanggung djawab. Perundingan dengan pihak Belanda tidak memberi harapan penjelesaian. Kedudukan kita di luar negeri masih terkatung-katung, perhatian dunia terhadap pertikaian Indonesia – belanda tidaklah seberapa besar.

Sekarang suasana terpengaruh oleh malapetaka perang kolonial jang dipaksakan oleh imperialis Belanda. Pikiran kita melajang ke medan pertempuran jang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Kita teringat kepada pahlawan2 jang lagi berdjuang mempertahankan tanah air kita, baik angkatan perang, maupun rakjat biasa, laki2 atau

Sekarang suasana terpengaruh oleh malapetaka perang kolonial jang dipaksakan oleh imperialis Belanda.

perempuan, tua dan muda. Kita teringat kepada pahlawan jang baru gugur sebagai kusuma bangsa, kepada keluarga jang ditinggalkannja, isterinja, anaknja, ibunja, bapanja, saudara2nja. Kita teringat kepada mereka jang hidup sengsara dalam pengungsian, kehilangan rumah-tangga dan harta benda.

Dan berbeda pula dengan waktu hari perajaan kesatu politik dalam negeri kelihatan sekarang tertudju kepada persatuan. Kedudukа kita di luar negeri adalah kuat, hasil politik perdamaian jang kita pegang teguh dari mulai berdirinja Republik Indonesia sampai pada saat ini. Perhatian dunia luar biasa besarnja terhadap agresi Belanda di Indonesia.

Satu persamaan antara kedua perajaan itu ialah kebulatan tekad jang terbajang di muka para hadirin, untuk meneruskan revolusi ini sampai tertjapai tjita-tjita kita bersama jaitu Negara Republik Indonesia jang berdaulat sepenuh-penuhnja.

Satu persamaan antara kedua perajaan itu ialah kebulatan tekad jang terbajang di muka para hadirin, untuk meneruskan revolusi ini

Presiden Negara Republik Indonesia!

Alangkah tjepatnja djalan sedjarah dalam tahun jang lalu ini! Banjaklah peristiwa – peristiwa jang penting sudah terdjadi, penting dalam sedjsarah nasional dan penting dalam sedjarah dunia. Tapi bukanlah maksud saja hendak menjebutkan peristiwa-peristiwa itu satu demi satu. Baiklah itu saja serahkan kepada pemerintah. Hanja saja hendak menjebutkan beberapa kedjadian jang menggambarkan perhubungan politik luar negeri dengan politik dalam negeri, jang satu sama lain pengaruh-mempengaruhi.

Keruhnja politik dalam negeri jang memuntjak pada pertjobaan coup d'etat pada tahun jang lalu sangat melemahkan kedudukan kita di luar negeri. Begitu pula tiap-tiap penjerahan kekuasaan pemerintahan kepada presiden.

Sebaliknja politik luar negeri jang berachir dengan naskah Persetudjuan Linggardjati telah menimbulkan pertentangan dalam negeri jang tergambar njata dalam sidang Komite Nasional Pusat di Malang. Nota Balasan Republik tgl 7 Djuni, telah mengembalikan persatuan dalam politik dalam negeri. Sekurang-kurangnja menghilangkan keruntjingan pertentangan tadi.

Pidato radio Sjahrir tgl 9 Djuni jang bermaksud menghilangkan kegentingan perhubungan dengan belanda dan menghindarkan pertumpahan darah, telah menimbulkan pertentangan baru, jang menjebabkan berhentinja Kabinet Sjahrir III. Dan akhirnya agresi militer belanda telah menimbulkan pula persatujan kembali.

Dari pertjaturan politik dalam dan luar negeri selama dua tahun ini dapatlah kita mengambil kesimpulan sebagai berikut.

Untuk mendjalankan politik luar negeri jang akan bisa berhasil haruslah ada stable government jang demokratis dan pilitik luar negeri itu hendaklah politik perdamaian. Dan sebaliknja stable government hanja bisa tertjapai djika ada djaminan bahwa politik perdamaian itu tidak menghalang-halangi kemerdekaan negara.

Dengan susah pajah telah berhasil kita mengadakan stable government, jang sudah dipersaksikan dunia luar. Democratiseringsproces pun telah berdjalan dengan baik. Politik damai kita oegang teguh terus sampai sekarang. Tetapi kemerdekaan negara kita dilanggar oleh Belanda dan sudah banjaklah daerah Republik jang diperkosanja, ratusan, ribuan rakjat djadi korban keganasan agresi Belanda, ta' ternilai harga benda jang musnah karenanja.

Kita melawan, kita wadjib melawan, karena ini adalah soal hidup atau mati bagi Republik Indonesia, dan kita adalah pada pihak jang benar. Djika kita tidak

Dengan susah pajah telah berhasil kita mengadakan stable government, jang sudah dipersaksikan dunia luar.

melawan sekarang ini, sia-sialah revolusi kita dan berchianat kita kepada pahlawan-pahlawan bangsa jang telah mengorbankan djiwa raganja untuk kemerdekaan mulai zaman pendjajahan Belanda sampai pada saat ini.

Maka pada perajaan hari Kemerdekaan kedua ini perhatian saja terutama tertudju kepada satu soal sadja, jaitu kepada soal pertahanan negara.

Atas perintah Panglima Tertinggi pada tanggal 22 bulan jang lalu seluruh angkatan perang Republik Indonesia bersama-saam rakjat di seluruh kepulauan Indonesia sudah mengangkat sendjata melawan agresi Belanda.

Pertempuran besar2an terdjadi 2 minggu lamanja. Tentara dan rakjat Indonesia dengan persendjataan serba kurang mengadakan perlawanan hebat terhadap tentara Belanda jang dipersendjatai dengan alat perang jang serba modern.

Setelah perintah menghentikan permusuhan datang, tentara Belanda dibeberapa tenpat telah djauh masuk ke dalam daerah kita dan sesudah itu mereka masih berusaha di beberapa tempat meneruskan aksinja. Pada tempatnjalah disini dan pada saat ini saja menjatakan perasaan rakjat terhadap perbuatan Belanda itu dan tekad rakjat menghadapi segala kemungkinannja.

Djika seluruh dunia mentjela agresi belanda itu, betapa pula rakjat Indonesia sendiri. Rasa geram, djidjik meliputi seluruh lapisan rakjat.

Djika seluruh dunia mentjela agresi belanda itu, betapa pula rakjat Indonesia sendiri. Rasa geram, djidjik meliputi seluruh lapisan rakjat.

Biarpun menghadapi tank, Meriam didarat dan dilautan, senapan mesin dari segala djurusan, serta bom dari udara, rakjat berdjuang dengan tidak ada gentarnja karena tahu apa jang diperdjuangkannja. Rakjat jang sadar politik tahu bahwa jang diperdjuangkannjan itu ialah kemerdekaan politik, jang memberi djaminan tumbuhnja faham2 politik dengan leluasa. Rakjat jang belum sadar

politik tidak tahu betul, tetapi merasa bahwa jang diperdjuangkannja ialah kemerdekaan negara jang memberi djaminan kepada buruh dan tani tertjapainja kedudukan jang seharga dengan djasanja dalam masyarakat. Mereka jakin bahwa tudjuan perdjuangan kita ini adalah benar dan adil.

Sampai sekarang biarpun telah banjak daerah jang katanja diduduki tentara Belanda, rakjat tidak gentar. Rakjat tahu bahwa hal ini menimbulkan kesukaran besar sekali kepada Republik Indonesia, tetapi kesukaran Belanda lebih besar pula. Biarpun seluruh daerah Republik katanja didudukinja, rakjat ta'kan gentar, rakjat akan mengadakan perlawanan terus. Kekedjaman jang dilakukan tentara Belanda terhadap pemuda2 kita tidaklah menggentarkan rakjat, melainkan menambah kemarahannja dan memperkuat tekadnja.

Sampai sekarang biarpun telah banjak daerah jang katanja diduduki tentara Belanda, rakjat tidak gentar.

Selama perang dunia II dan selama memperpedjuangkan kemerdekaan dalam 2 tahun ini ta' terkira penderitaan dan pengorbanan rakjat, tetapi rakjat masih sanggup berkorban. Rakjat tahu bahwa perdjuangan ini adalah soal hidup mati bagi bangsa Indonesia.

Dalam pertempuran jang sudah hampir sebulan lamanja ini terbukti bahwa tekad bangsa Indonesia akan mempertahankan kemerdekaan tanah airnja dengan mati-matian bukanlah sembojan kosong sadja. Merdeka atau tenggelam adalah kenjataan sungguh2. Imperialis Belanda tidak akan mentjapai maksudnja dengan perang kolonial ini. Ia ta'kan mendapati pabrik2 dan kebun2 jang subur, melainkan hanja bumi hangus.

Sungguh ada di beberapa tempat penduduk jang terbudjuk oleh Belanda dengan pakaian atau lain barang, tetapi djumlahnja tidaklah berarti. Di tiap-tiap negara selalu ada manusia jang berhati lemah. Tetapi saja jakin bahwa perbuatan jang merugikan perdjuangan kita itu akan hilang atau berhenti sendirinja djika budjukan itu tidak ada lagi.

Pendek kata rakjat Indonesia sudah berhasil melalui udjian jang pertama ini. Tetapi tidaklah berarti, bahwa kita sudah boleh bersuka ria. Tidak. Itu baru udjian jang pertama, udjian pertjobaan. Udjian jang lebih hebat harus pula kita tempuh. Oleh sebab itu kita harus setiap saat waspada. Setiap waktu hendaklah kita pergunakan memperkuat pertahanan kita, memerika kelemahan kita dengan mengambil pengadjaran dari pengalaman jang pendek dan pahit itu.

Adalah satu hal jang penting jang harus diperhatikan benar2 oleh pemerintah.

People's defence hanja bisa berhasil baik djika tentara dan rakjat betul2 bisa merupakan suatu kesatuan. Ini tergantung pada ada tidaknja kepertjajan jang bulat dari pihak rakjat atas keberanian dan kedjudjuran tentar ajang memimpin perjoeangan.

Pendek kata rakjat Indonesia sudah berhasil melalui udjian jang pertama ini. Tetapi tidaklah berarti, bahwa kita sudah boleh bersuka ria.

Rakjat jang lagi berdjuang itu mempunjai perasaan jang halus, pemimpin jang tidak konsekwen atau tidak djudjur lekas diketahuinja dan dibentjinja,

Alangkah sajangnja djika perbuatan kesatria jang mengagumkan dunia itu dirusak oleh kelemahan pertahanan kita karena tidak adanja persatuan antara rakjat dan tentara?

Sebaliknja dari pihak rakjat mungkin ada jang belum insaf akan bahaja jang mengantjam negara kita. Kepada mereka itu saja berseru supaja mulai hari ini menjiapkan dirinja untuk pertahanan negara, menjerahkan tenaga dan harta benda dan djika perlu djiwanja untuk keselamatan negara. Ingatlah bahwa bagaimanapoen besarnja simpati dunia luar, namun kemenangan dalam perdjuangan ini tetap tergantung pada usaha dan tenaga kita sendiri djuga. Injaflah, bahwa hanja dengan pengorbanan jang penuh dari seluruh warga negara bisa terdjamin kemerdekaan bangsa kita. Harta ta'kan ada gunanja djika kita didjadjah kembali, pangkat ta'kan ada harganja djika kita diperbudak kembali.

Sekali lagi saja berseru kepada seluruh warga negara Republik Indonesia, dimanapun djuga ia berada, sekalipun di dalam daerah jang dikuasai oleh tentara Belanda, supaja mengerahkan segala tenaga melawan agresi Belanda. Bangkitlah, tanah air memanggilmu. Tunaikan kewadjibanmu sebagai patriot!

Sebagai penutup atas nama rakjat saja menjatakan terimakasih kepada tiap-tiap orang jang lagi berdjuang diseluruh kepulauan Indonesia mempertahankan kedaulatan negara kita. Kepada mereka jang sudah gugur sebagai pahlawan saja menjampaikan perhormatan tinggi.

Akhirnja saja menjampaikan terimakasih pula kepada kawan2 kita diluar negeri jang telah menjokong perdjuangan kita moril dan materil.

Sekianlah sambutan saja pada hari perajaan kemerdekaan jang kedua ini.

Sekali merdeka tetap merdeka!"

5.5.3 Permasalahan mengenai Kewarganegaraan

Dalam sidang-sidangnya, BP KNIP membahas dan menyetujui undang-undang dari usulan pemerintah ataupun usulan sendiri.

Dalam sidang-sidangnya, BP KNIP membahas dan menyetujui undang-undang dari usulan pemerintah ataupun usulan sendiri. Permasalahan mengenai kewarganegaraan Indonesia juga turut menjadi bagian dari pembahasan. Mengenai hal ini, seperti yang sudah termaktub dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1946, warga asing dapat menjadi WNI dengan sejumlah persyaratan tertentu. Untuk lebih memperjelas peraturan mengenai Kewarganegaraan Indonesia, termasuk juga proses naturalisasinya, BP KNIP menyetujui diberlakukannya UU Mengenai Kewarganegaraan No. 6 Tahun 1947. Undang-undang ini semakin memperjelas definisi orang Indonesia asli pada konstitusi. Di dalamnya terdapat klausul yang mengatakan bahwa warga "keturunan" orang Indonesia dapat disebut orang Indonesia asli selama ia telah tinggal selama lima tahun berturut di dalam daerah Indonesia.

Selanjutnya, pada periode 1947, tercatat bahwa BP KNIP

menyetujui naturalisasi beberapa orang keturunan Belanda dan Arab, di antaranya adalah: Johann Jordan (12 Februari 1947), Salim Basyir (12 Februari 1947), Frans Matheas Hesse (3 Mei 1947), Wilhelm Karl Gottfried Mewes (29 Agustus 1947), George Wilhelm August Friedrichs (29 Agustus 1947), Herman Oscar Gustav Fischer (29 Agustus 1947), dan Curt Ulrich Groos (29 Agustus 1947), namun belum diketahui bagaimana latar belakang dari mereka yang dinaturalisasi menjadi WNI ini.

5.5.4 Permasalahan mengenai Administrasi Kota dan Provinsi Republik Indonesia

Dua wilayah swapraja di Jawa, Surakarta dan Yogyakarta, telah menyatakan diri sebagai bagian dari wilayah RI yang sah sejak proklamasi kemerdekaan di tahun 1945. Meskipun demikian, Pemerintah RI belum juga mengatur bagaimana bentuk administrasi dua wilayah tersebut hingga 1947. Melalui UU No. 16 Tahun 1947, BP KNIP menyetujui terbentuknya Haminte-Kota Surakarta. Sedangkan untuk Haminte-Kota Yogyakarta, dikeluarkan UU No. 17 Tahun 1947.

Dalam peraturan ini, batas-batas kedua Haminte-Kota ditentukan berdasarkan wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Kemudian, susunan Pemerintahan Haminte-Kota terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Haminte-Kota (Dewan Kota), Dewan Pemerintah Kota, dan Walikota. Ketua dari Dewan Kota adalah walikota yang diangkat langsung oleh presiden. Mengenai urusan rumah tangga Haminte-Kota Surakarta dan Yogyakarta, diserahkan kepada Haminte-Kota masing-masing, seperti urusan pertanahan dan perumahan, kesehatan, pajak lokal, permuseuman, dan pembersihan kota. Disebutkan juga bahwa sejak saat itu, perkataan-perkataan dalam *stadsgemeente-ordonnatie* mengenai Gubernur Jenderal dan Residen berubah garis wewenangnya kepada Menteri Dalam Negeri RI.

Dalam peraturan ini, batas-batas kedua Haminte-Kota ditentukan berdasarkan wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

5.5.5 Permasalahan mengenai Lembaga Peradilan

Pada masa kolonial, terdapat dua lingkungan peradilan (*sferen van rechtspraak*). Di pihak Belanda, ada *Pengadilan Gouvernement*, atau *sfeer van de gouvernementsrechtspraak*, yang peradilannya dilakukan atas nama Raja/Ratu Belanda (in naam des Konings). Sedangkan di wilayah swapraja, ada Pengadilan Raja, atau *sfeer van de zelfsbestuursrechtspraak*. Sejak masa kemerdekaan, Pemerintah Republik memandang dikotomi peradilan seperti masa kolonial tidak dapat digunakan lagi. Oleh sebab itu, lewat persetujuan BP KNIP, dualisme dalam lembaga peradilan dihapuskan. Pengadilan Raja pun dihapus, sehingga lembaga peradilan hanya menggunakan atas nama Pemerintah Republik Indonesia saja. Dalam penjelasan UU No. 23 Tahun 1947, dikatakan bahwa:

> "Dalam Negara kita Republik Indonesia perpisahan itu sudah tidak pada tempatnya lagi. Pemerintah Negara Republik Indonesia sekali-kali bukan waris belaka yang mengganti "*Nederlandsch-Indische Regeering*" sebagai pemerintah asing. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang kita, seluruh bangsa Indonesia, mendirikannya bersama-sama sebagai Negara kesatuan yang berdaulat... Yang sekarang betul pada tempatnya, ialah semata-mata hanya perbatasan yang mengenai jenis hal yang diadili ("*zakelijke afbakening*") misalnya: a. peradilan agama, b. peradilan militer, c. peradilan administratif. Dengan demikian maka lingkungan-lingkungan peradilan yang bukan menyatakan perbatasan tentang jenis hal yang diadili, tidak pada tempatnya lagi."[641]

Undang-Undang No. 23 Tahun 1947 dikhususkan pada swapraja di Jawa (Kasunanan, Mangkunegaran, dan Kasultanan). Swapraja Pakualaman di Yogyakarta sudah menghapuskan peradilan ini sejak 1908, sedangkan di Sumatera tidak ada lagi raja-raja setelah peristiwa revolusi sosial yang berlangsung pada periode 1945–1947.

Pada masa kolonial, terdapat dua lingkungan peradilan (*sferen van rechtspraak*).

641 Penjelasan UU No. 23 Tahun 1947.

5.5.6 Permasalahan mengenai Kecelakaan Perang dan Ketentaraan

Sebagai dampak dari Agresi Militer Belanda I yang dilancarkan kepada Republik di periode 1947, pemerintah dan BP KNIP mengeluarkan undang-undang terkait kecelakaan perang, kecelakaan kerja, serta undang-undang terkait ketentaraan. Melalui UU Kecelakaan Perang No. 34 Tahun 1947, hak para buruh Indonesia yang tertimpa kecelakaan karena perang menjadi terjamin. Hal ini termasuk juga pembayaran ganti rugi kepada buruh yang mengalami kecelakaan kerja, bukan karena perang, yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 1947. Selain itu, BP KNIP juga turut membahas dan menyetujui terbitnya Susunan dan Acara Pengadilan Tentara melalui Undang-Undang No. 36 Tahun 1947, membahas dan menyetujui Undang-Undang tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara No. 40 Tahun 1947, dan juga mengatur tentang Kepenjaraan Tentara melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 1947.

5.5.7 Permasalahan Ekonomi dan Finansial

Dalam periode ini, BP KNIP turut andil dalam membahas dan menyetujui undang-undang terkait permasalahan ekonomi dan finansial. Keputusan-keputusan penting yang dihasilkan BP KNIP mengenai permasalahan ini adalah membuat Undang-Undang tentang Undian Negara, melalui UU No. 38 Tahun 1947. Undian Negara dirasa perlu karena rasio pengeluaran dan pemasukan uang negara pada periode ini belum cukup seimbang bagi Republik Indonesia. Dengan adanya Undian Negara, pemerintah dapat menarik uang dari masyarakat untuk keperluan yang tidak dapat dipenuhi oleh sektor penerimaan yang ada. Masyarakat, dengan demikian, dapat berpartisipasi langsung dalam mengisi kekosongan kas negara di masa revolusi.

Dalam periode ini, BP KNIP turut andil dalam membahas dan menyetujui undang-undang terkait permasalahan ekonomi dan finansial.

Selain mengeluarkan UU mengenai Undian Negara, BP KNIP juga membahas dan menyetujui perubahan pada Ordonansi Pajak Potong (UU No. 11 Tahun 1947), menetapkan Pajak Radio atas Semua Pesawat Penerimaan Radio (UU No. 12 Tahun 1947), dan menetapkan Pajak Pembangunan I (UU No. 14 Tahun 1947). Mengenai Pajak Radio, pertimbangan pemerintah dan BP KNIP adalah bahwa di masa kolonial, siaran radio diurus oleh N.V. Nirom. Pemegang pesawat radio kemudian

dipungut biaya langsung oleh perusahaan itu.

Di masa republik, pemerintah menarik pajak radio sebagai ganti biaya siaran radio pemerintah. Dikatakan juga bahwa jumlah pajak sebesar lima Rupiah sebulan tidak dianggap berat karena pesawat radio hanya dimiliki oleh orang berkemampuan ekonomi tertentu.[642] Untuk Pajak Pembangunan, dasar pertimbangan pemerintah dan BP KNIP adalah banyaknya iuran yang diminta kepada pemilik rumah penginapan maupun rumah makan kepada *Fonds Kemerdekaan* dan fonds-fonds lainnya di masa ini, sehingga diragukan oleh masyarakat apakah pajak tersebut benar-benar disampaikan kepada pemerintah. Oleh karena itu, Pajak Pembangunan diberlakukan dengan pembayaran langsung kepada pemerintah.

Setelah penanda-tanganan Perjanjian Renville, terjadi gejolak politik dalam Pemerintah RI.

5.6 KNIP di Masa Genting Revolusi, 1948

Pada tahun 1948, KNIP memasuki masa genting revolusi. Perjanjian Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas dek kapal USS *Renville* menandai sebuah babak baru pada jalannya revolusi Indonesia. Sebelumnya, pada Perjanjian Linggarjati di tanggal 15 November 1946, Belanda mengakui kekuasaan RI secara *de facto* atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Agresi Militer Belanda I yang dimulai pada 21 Juli 1947 membuat pertempuran semakin hebat di daerah-daerah. Penghentian tembak-menembak yang diumumkan pada tanggal 4 Agustus 1947 tidak membuat ketegangan antara Indonesia dengan Belanda berkurang. Dengan disetujuinya Perjanjian Renville, pencapaian yang dihasilkan oleh TNI di medan peperangan menjadi sia-sia. Ditambah lagi, tidak ada poin dalam Perjanjian Renville yang menyebutkan bahwa Belanda mengakui kekuasaan RI secara *de facto*. Dalam situasi ini, BP KNIP perlu merespon Perjanjian Renville secara komprehensif, termasuk juga menghadapi tantangan-tantangan lainnya pada periode ini.

Setelah penandatanganan Perjanjian Renville, terjadi gejolak politik dalam Pemerintah RI. Seluruh anggota PNI dan Masyumi yang tergabung dalam Kabinet Amir Syarifuddin mengundurkan diri sebagai wujud penolakan atas perjanjian ini. Amir Syarifuddin pun mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri enam hari setelah penandatanganan Perjanjian Renville. Pengganti Kabinet Amir Syarifuddin adalah Kabinet Wakil Presiden Mohammad Hatta. Ia

642 Penjelasan UU No. 12 Tahun 1947

memimpin Kabinet Presidensial Darurat yang memberikan seluruh pertanggungjawabannya langsung kepada Presiden Soekarno. Walaupun begitu, BP KNIP tetap menjalankan aktivitas sebagaimana layaknya kabinet parlementer, dengan menyampaikan pendapat-pendapatnya dan mengawasi jalannya lembaga eksekutif.

Melemahnya kedudukan RI di tingkat internasional membuat Belanda semakin berupaya untuk mempertahankan bekas negeri koloninya secara utuh dengan suatu skema baru mengenai kerja sama antara Indonesia dengan Belanda. Tidak lama setelah penandatanganan Perjanjian Renville, Belanda segera membentuk negara-negara boneka di bekas wilayah jajahannya pada tahun 1948, dimulai dari Negara Madura pada 23 Januari, Negara Sumatera Timur pada 24 Maret, Negara Pasundan pada 26 April, serta Negara Jawa Timur pada 26 November, yang sebelumnya merupakan bagian dari RI dalam Perjanjian Linggarjati.[643] Seperti halnya negara bentukan Belanda di luar wilayah Republik Indonesia, Belanda juga menawarkan suatu pemerintahan yang demokratis dan makmur kepada seluruh rakyat RI. Tawaran Belanda ini juga berarti ajakan untuk membuat suatu Dewan Perwakilan yang anggotanya berasal dari semua unsur masyarakat, seperti halnya yang ada di Negara Indonesia Timur (lihat bab terakhir). Bagi Belanda, apabila Soekarno-Hatta dapat menjanjikan demokrasi, maka Belanda pun dapat memberikan sistem demokrasi yang lebih layak bagi Indonesia. Ratu Belanda, Wilhelmina, dalam pidatonya melalui siaran radio pada tanggal 3 Februari 1948 menyampaikan pokok-pokok ajakannya kepada rakyat Indonesia, sebagai berikut:

> Melemahnya kedudukan RI di tingkat internasional membuat Belanda semakin berupaya untuk mempertahankan bekas negeri koloninya secara utuh ,,

> *"Bangsa-bangsa dalam Commonwealth kami telah mentjapai soeatoe haloean jang patoet diperingati. Soeatoe Indonesia jang bebas sedang melangkah akan mendoedoeki tempatnja diantara bangsa-bangsa demokratis di doenia ini. Berbahagialah kita, bahwa orang-orang di – Indonesia serta disini tjoekoep menemoei kebidjaksanaan dan ketjakapan akan membentoek pemerintah, jang mendjamin segala kemerdekaan serta hak-hak bagi banjak orang. Inilah jang dahoeloe kita bersama-sama perdjoeangkan. Djaoehlah*

643 Sedangkan Negara Indonesia Timur (NIT) sudah dibentuk sejak 24 Desember 1947, yaitu pada hari terakhir Konferensi Denpasar (7–24 Desember). Lihat bab terakhir.

kiranja djalan jang masih haroes ditempoeh. Banjak golongan rakjat diberbagai daerah di – Indonesia, dimana pemboenoehan, perampokan serta pembakaran masih meradjalela, beloem djoega bebas dari ketakoetan dan penderitaan

Rakjat Indonesia serta rakjat Belanda haroes membasmi moesoeh ini dalam kerdja-bersama jang tegoeh. Sebagai poela di-lain-lain tempat didoenia, disanapoen terdapat kaoem anarchis serta pengatjau, jang berusaha menghalang-halangi pembangoenan bangsa. Pengaroeh ini haroes diatasi. Kami penoeh kejakinan, bahwa rintangan ini dapat dihalaukan, karena rakjat Indonesia berkehendak tegoeh akan menerima tanggoeng djawab serta kewadjiban dari sesoeatoe pemerintahan sendiri jang demokratis, pemerintahan seperti kita djoega dikenal oleh kita semoea.

Rakjat Indonesia serta rakjat Belanda haroes membasmi moesoeh ini dalam kerdja-bersama jang tegoeh.

Pendjajahan telah berachir.

Kami mengandjoerkan serta menolong mereka dalam toedjoean mereka. Kami tidak memboeang riwajat kita, poen tidak meloepakan pekerdjaan jang maha besar jang telah terlaksana disana. Tetapi sesoeatoe bangsa haroes tjoekoep bertenaga akan memoelai soeatoe zaman baroe. Kami bersedia tenaga itoe. Bangsa-bangsa didoenia sekarang membutuhkan soeatoe masjarakat baroe, berdasarkan sama deradjat serta rasa saling mempertjajai.

Moengkin pemetjahan soal seperti tertjapai di-Indonesia ini, dapat dijadikan teladan bagi lain-lain daerah di-Asia. Segolongan bangsa, jang berdjoemlah sedikitnya 70 djoeta telah memihak demokrasi. Demokrasi yang kita telah rasai. Ini suatu kedjadian jang boekan ketjil. Indonesia, digaboengkan mendjadi satoe, diberkati kekajaan doenia jang tidak sedikit.

Besarlah kemungkinannja akan menjoembang pada perdjoeangan kita bersama, ialah membasmi kelaparan serta kekoerangan. Sambil bekerdja bersama setjara bebas dengan negeri Belanda, Suriname, dan Antillen, Indoensia jang berdaulat ini dapatlah kiranya meneroeskan pembangoenan ekonominja, jang sebeloem perang telah ta' ada bandingannja di-Asia. Indonesia dapatlah kiranja menjoembang setjara besar-besaran pada tenaga raksasa jang diboetoehkan dari rakjat Amerika goena melaksanakan rentjana-Marshall, dengan memberi hasil-hasilnya serta bahan-bahan mentahnja kepada Eropah dan Amerika.

Negeri ini telah bangoen kembali dari kekatjauan akibat pendoedoekan Djepang. Sekarang perkataan-perkataan sebagai "kebebasan dan tjinta tanah – air mendapat arti sebenarnja, karena kaoem nasionalis Indonesia sedang siboek membentoek federasi oentoek seloeroeh noesantara jang loeas itoe.

Karena tenaga bersama jang giat ini, jang didasarkan sama dengan Piagam Atlantik, maka bangoenlah Indonesia sedang mengharap-harap tiba waktoenja, dimana Negara Indonesia Serikatakan mendoedoeki tempatnja diantara serikat bangsa-bangsa, atas andjoeran oesoel negeri Belanda. Maka pada saat itoe akan kita melangkah sekali lagi kearah djalan menoedjoe kebebasan, jang soekar ditempoehnja itoe."[644]

> ... Ratu Wilhelmina optimistis mengenai suatu kerja sama antara rakyat Indonesia dengan rakyat Belanda untuk membentuk pemerintahan yang demokratis ...

Dalam pidatonya ini, Ratu Wilhelmina optimistis mengenai suatu kerja sama antara rakyat Indonesia dengan rakyat Belanda untuk membentuk pemerintahan yang demokratis dalam bentuk negara federal. Ia juga menekankan jalan yang dapat ditempuh Indonesia untuk mencapai "kebebasan" (atau kemerdekaan), yaitu melalui suatu hubungan kerja sama dengan Belanda. Setelah itu, berdasarkan pidato

644 "Pidato Radio Sri Baginda Ratoe Wilhelmina Pada Tanggal 3 Pebroeari 1948", dalam *Lampiran-Lampiran Bagian Jang Kedoea Dari Risalah: Kearah Ketertiban Hoekoem Baroe di Indonesia, Bahan-Bahan Oentoek Pembangoenan Federasi* (Tanpa tempat, nama penerbit, dan tahun terbit)

Ratu Wilhelmina, Negara Indonesia Serikat akan diusulkan oleh Belanda kepada PBB untuk bisa merdeka sepenuhnya. Tentunya, hal ini berbeda dengan cita-cita para nasionalis Republik.

Sidang BP KNIP pada periode pasca Perjanjian Renville diisi dengan melanjutkan agenda kegiatannya seperti biasa, tanpa adanya catatan respon terhadap pidato penguasa tertinggi Kerajaan Belanda itu. Pada periode ini, BP KNIP sudah turut "hijrah" ke ibukota RI di Yogyakarta, sehingga memudahkan koordinasi dan rapat-rapat yang semakin intens pasca Perjanjian Renville. Sebagian diantara para anggota BP KNIP yang turut pindah, beserta alamat mereka di Yogyakarta, antara lain:

Tabel 1. Daftar Anggota BP KNIP yang Hijrah ke Yogyakarta (Rombongan Terakhir)

No.	Nama	Partai/Daerah	Alamat
1.	Mr. Assaat Gelar Dato' Mudo (Ketua)	Partai Sosialis	Hotel Merdeka Km. No. 1 Telp. No. 30, Yogya
2.	Tan Ling Djie	Partai Sosialis	Jetis 6, Telp. 1044, Yogya
3.	S. Mangunsarkoro	PNI	Notowinatan 60, Telp. 930, Yogya
4.	Mr. Sartono	PNI	Tugu Kulon 105, Yogya
5.	Syamsudin St. Makmur	PNI	Hotel Merdeka, Km. No. 7, Telp. No. 30 Yogya
6.	Mr. Sujono Hadinoto Brotokusumo	PNI	Pakualaman 17, Telp. 345 Yogya
7.	S.M. Abidin	PBI	Pakuningratan No. 71, Yogya
8.	Nn. Suwarti	PBI	Pakuningratan No. 67, Telp. No. 556, Yogya
9.	Nyoto	PKI	Hotel Merdeka Km. No. 24, Telp. N0. 30, Yogya
10.	Dr. Rustam	PKI	Hotel Merdeka, Km. No. 24, Telp. No. 30, Yogya
11.	Mr. Tambunan	Parkindo	Hotel Merdeka, Km. No. 24, Telp. No. 30, Yogya
12.	Maruto Nitimiharjo	Partai Rakjat	Pakuningratan 31a, Telp. No. 832 siang, No. 140 malam
13.	Asrarudin	Buruh	Bintaran Wetan No. 6b, Yogya
14.	Sunyoto	Tani	Hotel Merdeka Km. No. 69, Telp. No. 30, Yogya
15.	Iskandar Tejasukmana	Sumatera	Hotel Merdeka, Km. No. 36, Telp. No. 30, Yogya
16.	Mr. Luat Siregar	Sumatera	Hotel Merdeka, Km. No. 82, Telp. No. 30, Yogya
17.	Zainal Abidin Ahmad	Sumatera	Kampung Mijen, Yogya
18.	Zainal Baharuddin	Sumatera	Hotel Merdeka Km. No. 28, Telp. No. 30, Yogya
19.	Gusti Johan	Kalimantan	Jl. Merbabu, No. 2, Telp. No. 966, Yogya
20.	Manai Sophiaan	Sulawesi	Bedog No. 9, Yogya
21.	J.D. Syaranamual	Maluku	Jl. Sumbing 16, Telp. 976, Yogya

Formasi Darurat Sekretariat BP KNIP			
1.	Mr. Kuncoro Purbopranoto	Sekretaris	Jl. Dagen (Jayengkarso) No. 39 Yogya
2.	R. Udoyo	Reviseur Stenograf	Ngadisuryan No. 200, Yogya
3.	R. Sumarsono Pringgodirejo	Wakil Sekretaris	Yudonegaran 5/58, Yogya
4.	Suwarjo	Administrasi	Tegalpanggung
5.	Dudung Sukarna	Administrasi (Ekspedisi – Tik)	Pracimasana Kraton Jogja

Sumber: Daftar-daftar Anggota-Anggota Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat, Jang Turut Menjingkir Bersama dengan Pemerintah, dengan Rombongan Terakhir, dan juga Formasi Darurat Sekretariat Badan Pekerdja K.N. Pusat. ANRI, Arsip BP KNIP No. 14 (22 Agustus 1947)

dengan cara bertukar pikiran dan mendengarkan kesan-kesan dari pemerintah.[645] Dengan demikian, segala persoalan politik dapat secepatnya dibahas oleh BP KNIP, termasuk segala bentuk ajakan atau provokasi Belanda kepada RI. Dalam sidang-sidangnya, perhatian BP KNIP difokuskan pada permasalahan rill, baik di dalam maupun luar negeri.

5.7. Pandangan dan Sikap BP KNIP terhadap Berbagai Isu tahun 1948

5.7.1 BP KNIP dan Responnya pada Masa Pemerintahan Kabinet Hatta I

Pada Masa pemerintahan Kabinet Hatta, hubungan BP KNIP dengan pemerintah berlangsung dengan cukup intensif. PM Hatta secara khusus menekankan kepada para menteri di jajaran kabinetnya untuk sering mengadakan rapat dengan BP KNIP. Hal ini dapat dijelaskan dari pandangan Hatta yang menghormati BP KNIP sebagai representasi praktik demokrasi di Indonesia. Walaupun sistem kabinet pada masa Hatta adalah kabinet presidensial, Hatta tidak meninggalkan BP KNIP sebagai badan legislatif yang dapat memperkuat kinerja pemerintah. Pada tanggal 14 Februari 1948, PM Hatta memberikan keterangan tentang program kabinetnya kepada BP KNIP. Beberapa hal yang disinggung dalam keterangan tersebut di antaranya adalah bahwa sistem kabinet presidensial yang dijalankannya hanya bersifat sementara untuk meredakan pertikaian antarpartai. Selanjutnya, Hatta berharap akan dapat segera kembali ke bentuk sistem parlementer.

Pada Masa pemerintahan Kabinet Hatta, hubungan BP KNIP dengan pemerintah berlangsung dengan cukup intensif.

Hatta menjelaskan bagaimana strategi perjuangan pemerintah telah berubah dari mempertahankan RI kepada pembentukan RIS. Betul bahwa RI dalam RIS akan banyak mengorbankan hak dan kekuasaannya.

645 *Sidang VI/Rapat ke I Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat di Jogjakarta*. ANRI, Arsip BP KNIP No. 98 (4 Agustus 1947)

Akan tetapi, inilah satu-satunya cara pada saat itu agar kemerdekaan dan kedaulatan di seluruh wilayah Indonesia dapat tercapai. PM Hatta mengatakan kepada BP KNIP bahwa perjuangannya selanjutnya adalah aktif dalam RIS, di mana RI akan memainkan peran tersendiri dalam pemerintahan sementara tersebut. Mengenai bagaimana hak dan kekuasaan yang akan diserahkan RI kepada RIS, akan dibahas kemudian oleh BP KNIP untuk menjadi bahan perundingan delegasi RI.[646] Dengan demikian, telah jelas melalui keterangan Hatta bahwa bentukan RIS adalah sesuatu yang sementara sebelum persatuan RI (nantinya disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI) dapat terwujud.

Hatta menjelaskan bagaimana strategi perjuangan pemerintah telah berubah dari mempertahankan RI kepada pembentukan RIS.

Menanggapi pidato Hatta pada tanggal 16 Februari 1948, BP KNIP mengadakan sidangnya. Dalam pandangan umum BP KNIP, terdapat catatan mengenai anggota-anggota yang menentang atau mendukung kabinet presidensial Hatta dan programnya. Para anggota yang menentang, di antaranya adalah Sunyoto (BTI), Syaranamual (Pesindo), Tambunan (Parkindo), dan Luat Siregar (PKI), sementara yang mendukung kabinet Hatta dan programnya adalah Syamsudin (Masyumi), Ki Mangunsarkoro (PNI), Anharudin (SOBSI), dan Abu Umar (STII). Anggota yang mengritik pemerintah, tetapi tidak mengambil sikap, adalah Iskandar Tejasukmana (wakil Sumatera), Zainul Arifin (Masjumi), K. Werjoyo (SOBSI), Lobo (wakil Sunda Kecil), Krissubanu (Pesindo), Cugito (Pesindo), dan Nyoto (PKI).[647] Perbedaan pendapat mengenai dibentuknya Kabinet Hatta ini turut mencerminkan pandangan dalam fraksi-fraksi yang ada pada BP KNIP.

Pada tanggal 24 Februari 1948, BP KNIP bersidang kembali untuk membahas penambahan seksi dalam alur kerjanya. Sidang memutuskan untuk membentuk seksi tambahan, oleh karena Kabinet Hatta memiliki kementrian baru, yaitu Pembangunan dan Pemuda. BP KNIP memutuskan bahwa seksi-seksi dalam BP pada tahun 1948 antara lain:

1. Seksi Dalam dan Luar Negeri, dengan ruang lingkup kerjanya meliputi Kementrian Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Jawatan Kepolisian, dan Urusan Minoritas;
2. Seksi Kemakmuran, dengan ruang lingkup kerjanya meliputi Kementrian Keuangan, Perhubungan, Pekerjaan Umum, dan Makanan Rakyat;

646 *Nasional*, 16 Februari 1948 dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 191
647 *Nasional*, 17, 18, dan 24 Februari 1948 dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, *Op.Cit.*, 2005, hlm. 192

3. Seksi Pertahanan, dengan ruang lingkup kerjanya meliputi Kementrian Pertahanan;
4. Seksi Kemasyarakatan, dengan ruang lingkup kerjanya meliputi Kementrian Pengajaran, Kesehatan, Agama, dan termasuk Kementrian Perburuhan dan Sosial; serta
5. Seksi Pembangunan dan Pemuda, dengan ruang lingkupnya meliputi Kementrian Pembangunan dan Pemuda.[648]

Pada tanggal 19 Mei 1948, BP bersidang untuk membahas masalah tahanan politik yang masih menjalani hukuman pada masa Kabinet Hatta. Fraksi PNI dan Partai Rakyat mengharapkan pembebasan para tahanan politik ini, dengan alasan bahwa tenaga mereka sangat dibutuhkan dalam menghadapi Belanda. Tahanan politik ini adalah para anggota Persatuan Perjuangan, di antaranya Tan Malaka dan Mohammad Yamin. Akhirnya, Sidang BP KNIP mengambil keputusan untuk menerima mosi permohonan kepada Presiden Soekarno untuk membebaskan para tahanan politik, yang kemudian dikabulkan. Pada tanggal 12 Juni 1948, Tan Malaka, Mohammad Yamin, Sukarni, Abikusno Cokrosuyoso, dan beberapa orang tahanan politik lainnya dibebaskan dari tahanan.

5.7.2 Pandangan BP KNIP mengenai Sistem Pemerintahan di Daerah RI

Jalannya pemerintahan di daerah-daerah RI telah menjadi perhatian para anggota BP KNIP sejak beberapa tahun silam. Namun, pembahasannya baru dapat dilakukan pada tahun 1948, yaitu sejak tanggal 15 Mei 1948. Sidang BP KNIP mengenai agenda ini dilanjutkan pada tanggal 20 Mei, 17 Juni, dan 19 Juni di tahun yang sama. Pada hari yang disebut hari terakhir ini, BP KNIP akhirnya sepakat mengenai pengajuan RUU Pokok Pemerintahan di Daerah yang diajukan oleh pemerintah dengan perubahan. Pokok dari RUU ini, setelah direvisi oleh BP KNIP, adalah sebagai berikut:

Jalannya pemerintahan di daerah-daerah RI telah menjadi perhatian para anggota BP KNIP sejak beberapa tahun silam.

Daerah RI dibagi atas tiga tingkatan daerah otonom yang mempunyai pemerintahan dan lapangan pemerintahan sendiri, yaitu provinsi, kabupaten atau kota besar, dan daerah desa;

Tiap-tiap daerah mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dipilih langsung oleh penduduk masing-masing. Sidang

648 *Nasional*, 26 Februari 1948 dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 193

badan eksekutif di samping DPRD dipimpin oleh ketua yang merangkap kepala daerah;

Pengangkatan kepala daerah dilakukan oleh presiden untuk provinsi, oleh menteri dalam negeri untuk kabupaten, dan oleh gubernur untuk daerah desa atas anjuran masing-masing DPRD. Kepala daerah memangku jabatan yang tidak terbatas lamanya, sementara DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepala daerah kepada institusi yang mengangkatnya;

Anggota Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) dipilih oleh dan dari anggota DPRD. Ketua dan wakil ketua DPRD tidak boleh duduk dalam badan DPD, sebab DPD bertanggungjawab pada DPRD sebagai *colegiaan bestuur* (pemerintahan bersama);

Daerah Istimewa (DI) susunannya sama dengan susunan daerah biasa, begitu juga dengan tingkatannya. Keistimewaan dari DI terletak pada pengangkatan kepala daerahnya yang dilakukan oleh presiden, diangkat dari orang-orang keturunan raja-raja di daerah yang bersangkutan sebelum zaman RI dan masih menguasai daerah itu. Dengan bentukan Daerah Istimewa, seorang raja atau sultan dapat terus memerintah daerahnya, walaupun kekuasaannya terbatas di bawah presiden, dan raja atau sultan itu harus mendengar suara dari DPRD.[649] Ini mencerminkan penghormatan kepada hak-hak kepala daerah tradisional dan juga pengakuan BP KNIP terhadap perjuangan mereka dalam revolusi Indonesia.

Kepala daerah memangku jabatan yang tidak terbatas lamanya, sementara DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepala daerah kepada institusi yang mengangkatnya;

5.7.3 Tanggapan BP KNIP terhadap Peristiwa Pemogokan Buruh di Delanggu

Pada tanggal 19 Mei 1948, para buruh pabrik dan petani kapas di Delanggu, Jawa Tengah melakukan pemogokan kerja. Mereka mengadakan aksi pemogokan selama 12 hari, dengan partisipasi buruhnya yang semakin meningkat dari hari ke harinya.[650] Menanggapi pemogokan ini, BP KNIP segera membentuk Panitia Angket untuk menyelidiki permasalahan. Ketua dari panitia tersebut adalah Mr. Sartono (PNI). Panitia Angket segera menemui Barisan Tani Pusat, Pemerintah Daerah Surakarta, serta DPRD Surakarta. Panitia juga mendatangi dan menyelidiki Pabrik Karung Goni Delanggu dan sekitarnya. Hasil penyelidikan Panitia Angket BP KNIP dibahas pada

649 *Siasat*, 27 Juni 1948, dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 197
650 Pemogokan buruh di Delanggu ini adalah yang paling lama durasinya dalam sejarah perburuhan di Asia pada masa itu, sehingga menyita perhatian media massa dari dalam dan luar negeri.

sidang tanggal 9–11 Juli 1948 dan 19–20 Agustus 1948. Terdapat tiga mosi yang muncul dalam sidang-sidang BP KNIP ini, yaitu:

1. Mosi Sartono (PNI) yang didukung oleh Prawoto Mangkusasmito (Masyumi), Maruto Nitimiharjo (Partai Rakyat), Tambunan (Parkindo), Gusti Johan (Kalimantan), dan Syaranamual (Maluku). Mosi ini meminta kepada pemerintah dan SOBSI untuk mengusahakan agar BTN (Badan Tekstiel Negara) dan SOBSI segera mengadakan perundingan lagi di Yogyakarta guna mencapai persetujuan secepatnya, dan harus disaksikan oleh Panitia Angket BP. Mosi ini diterima sidang BP dengan 15 suara melawan 2.
2. Mosi Asrarudin (SOBSI) yang didukung oleh Fraksi FDR, Suwarti, dan Krissubanu dari BTI (Barisan Tani Indonesia). Mosi ini semata-mata berpihak kepada buruh yang mogok di Delanggu, sehingga kemudian ditolak sidang dengan 13 suara melawan 15.
3. Mosi Sajarwo (BTI), didukung oleh Nyoto (FDR), Werdoyo (Buruh), dan Lobo (Nusa Tenggara), belum dapat diterima oleh sidang karena adanya penundaan, tetapi kemudian dilanjutkan dengan penyelesaian antara BTN dan SOBSI yang ditengahi oleh PM Hatta.

Pemogokan buruh di Delanggu menarik perhatian, baik kelompok sayap kanan maupun sayap kiri. Pihak sayap kiri mengeluarkan maklumat pada tanggal 12 Juli 1948 yang membenarkan tindakan buruh di Delanggu, dan ditandatangani oleh Amir Syarifuddin, Aidit (PKI), Asmo (PBI), dan Sudisman (Pesindo). PM Hatta ikut membantu menyelesaikan persoalan ini dengan bertemu SOBSI pada 14 dan 23 Juli 1948. Pertemuan yang ditengahi oleh PM Hatta berhasil mengakomodir kepentingan buruh dan fraksi-fraksi yang terkait. Masalah Pemogokan Buruh di Delanggu dapat diselesaikan pada bulan Juli 1948.

Pemogokan buruh di Delanggu menarik perhatian, baik kelompok sayap kanan maupun sayap kiri.

5.7.4 BP KNIP dan Permasalahan dengan Belanda tahun 1948

Perundingan antara Indonesia dengan Belanda berjalan dengan sangat intensif pasca Perjanjian Renville. Pada tanggal 10 Juli 1948, Seksi Luar Negeri dan Panitia Politik dari BP KNIP mengadakan rapat di Yogyakarta. Susunan panitia rapat tersebut, antara lain:

1. Ketua: Iskandar Tejasukmana
2. Wakil Ketua: Luat Siregar
3. Anggota: Sj. St. Makmur, S.M. Abidin, Maruto, Prawoto Mangkusasmito, dan I. Mangunsarkoro

Agenda rapat terbatas ini adalah mendengarkan laporan dari Iskandar Tedjasukmana, Wakil Ketua I BP KNIP yang baru kembali dari perjalanan ke daerah-daerah penguasaan Belanda di Jakarta, Bandung, dan Tasikmalaya. Tedjasukmana menyampaikan poin-poin penting sebagai berikut:

1. Rakyat pada umumnya masih patriotik membela Republik;
2. Semangat perjuangan rakyat tidak mengecewakan; dan
3. Pada umumnya rakyat kurang mengerti terhadap persoalan politik internasional, apalagi tentang perundingan Indonesia-Belanda.[651]

Berdasarkan penelusuran Tejasukmana, poin-poin di atas dapat terjadi oleh karena informasi yang diberikan oleh Pemerintah Belanda bersifat *eenzijdig* (bias) akibat tekanan politik yang diberikan Belanda kepada rakyat. Tejasukmana juga mengunjungi Konferensi Bandung, Konferensi Federal yang diadakan pada tanggal 27 Mei 1948 di Gedung Parlemen Negara Pasundan. Menurutnya, para peserta konferensi yang terdiri dari perwakilan negara dan daerah federal otonom ini telah terhasut Belanda. Di Bandung, Tejasukmana memberikan informasi yang utuh kepada mereka yang masih percaya pada Pemerintah RI tentang perundingan Indonesia-Belanda, mengenai *interim regering* (pemerintahan sementara) yang akan dibentuk, dan mengenai Negara Indonesia Serikat.[652] Perjalanan Tejasukmana ke daerah-daerah penguasaan Belanda ini penting untuk meneruskan pesan dari pihak RI, dan juga mengetahui kondisi rakyat. Aktivitas ini juga menjelaskan peran BP KNIP yang tidak hanya bekerja di dalam persidangan saja, tetapi juga di luar persidangan sebagai juru bicara pihak RI, sekaligus sebagai penyelidik.

Berdasarkan penelusuran Tejasukmana, poin-poin di atas dapat terjadi oleh karena informasi yang diberikan oleh Pemerintah Belanda bersifat *eenzijdig* (bias)

651 *Laporan Rapat Gabungan Seksi Luar Negeri dan Panitia Politik* (ANRI, *Arsip BP KNIP No.* 89, 10 Juli 1948)
652 *Ibid.*

Di saat yang sama, Belanda tetap melakukan tindakan-tindakan teror dan kekerasan kepada pendukung Republik di berbagai wilayah. Dalam lingkungan penguasaannya sendiri, pada tanggal 16 Agustus 1948, Belanda melakukan kekerasan fisik kepada anak-anak sekolah dan pramuka yang mengadakan upacara proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Karena tidak mau membubarkan diri, tentara Belanda pun menembaki mereka hingga seorang tewas dan enam orang lainnya luka-luka. BP KNIP segera merespon tindakan Belanda ini dengan membuka sidang pada tanggal 20 Agustus 1948 di Yogyakarta. Dalam sidang ini, BP KNIP menghasilkan tiga mosi, yaitu:

1. Mengutuk dan memprotes keras tindakan Belanda terhadap anak sekolah dan pramuka di Jakarta. Tindakan itu adalah suatu kejahatan perang dan akan merusak syarat-syarat untuk melakukan perundingan antara RI dengan Belanda;
2. Membenarkan pendirian pemerintah, bahwa pemerintah tidak akan mulai perundingan kembali dengan Belanda sebelum hak *immuniteit* (kekebalan) terjamin sepenuhnya. Pelaksanaan persetujuan gencatan senjata dan hak-hak demokrasi harus dijamin pula sebelum diadakan perundingan dengan Belanda; dan
3. Mendesak wakil RI di DK PBB supaya berusaha agar dewan tersebut bersedia untuk turut mengutuk perbuatan teror Belanda tersebut.[653]

BP KNIP memang memberikan tekanan yang tinggi kepada pemerintah dalam hal hubungan Indonesia dengan Belanda, terlebih dalam kaitannya dengan bagaimana delegasi RI di bawah Kabinet Hatta mampu menjaga prinsip-prinsip pokok RI di meja perundingan dengan Belanda. Kabinet sebelumnya, yang dipimpin Amir Syarifuddin, jatuh karena dianggap menyetujui keputusan yang lebih menguntungkan pihak Belanda di meja perundingan Renville. Di masa pemerintahan PM Hatta, walaupun komunikasi terus menerus dijalankan oleh pemerintah kepada BP KNIP, kepercayaan tidaklah mudah untuk dipertahankan. Memasuki bulan Desember 1948, perundingan dengan Belanda yang masih belum menunjukkan titik terang semakin membuat BP KNIP menaruh kecurigaan.

BP KNIP memang memberikan tekanan yang tinggi kepada pemerintah dalam hal hubungan Indonesia dengan Belanda, ...

Pada tanggal 11 Desember 1948, Pemerintah Belanda semakin jelas menyampaikan pandangannya. Dalam suatu pengumuman, Pemerintah Belanda di Den Haag menyatakan bahwa apabila Indonesia

653 *Nasional*, 21 Agustus 1948 dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 206

tetap tidak menerima kepemimpinan Belanda dalam Uni Indonesia-Belanda yang akan dibentuk, maka perundingan sebaiknya dihentikan saja. Lebih jauh lagi, Belanda juga menyatakan akan segera mendirikan pemerintahan sementara di Indonesia dan menyerahkan kekuasaan kepada wakil-wakil daerah/negara. Semua ini akan dilakukan Belanda tanpa perundingan dengan Pemerintah RI. PM Hatta segera merespon pernyataan Belanda ini dengan menyampaikan kepada Komisi Tiga Negara (KTN) bahwa RI menolak segala upaya yang dilakukan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia.

Selanjutnya, PM Hatta melakukan perundingan rahasia dengan KTN untuk membahas permasalahan ini lebih jauh. PM Hatta juga memilih untuk berkomunikasi secara terbatas dengan BP KNIP, yaitu hanya kepada pimpinan fraksi-fraksi dalam KNIP, seperti Ketua KNIP Mr. Assaat (non-partai), Wakil Ketua I KNIP Iskandar Tejasukmana (Sumatera), Syamsudin (Masyumi), Mangunsarkoro (PNI), dan Abdul Halim (non-partai).[654] Dengan komunikasi cara ini, banyak anggota dalam BP KNIP yang menaruh kecurigaan kepada PM Hatta. Hal ini diperburuk dengan adanya fraksi-fraksi dalam KNIP yang menolak kepemimpinan PM Hatta di kabinet sejak awal. Kecurigaan yang ada pada BP KNIP kepada Kabinet Hatta membuat perundingan dengan KTN semakin terbatas, hingga akhirnya dihentikan.

Pada tanggal 19 Desember, Belanda melancarkan serangan kepada Yogyakarta dan memulai Agresi Militer Belanda II. Pemimpin-pemimpin Indonesia yang berada di Yogyakarta ditangkap oleh Belanda, di antaranya adalah ketua dan para pemimpin fraksi dalam BP KNIP Darurat yang berdomisili di Yogyakarta sejak Agresi Militer Belanda I, seperti Mr. Assaat, Iskandar Tejasukmana, dan Mangunsarkoro. Penangkapan anggota-anggota BP KNIP membuat badan ini berhenti berjalan selama beberapa waktu. Agresi Militer Belanda II juga memakan korban Ketua KNIP Periode November 1945 – Januari 1946, Supeno, yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada Kabinet Hatta.[655] Ia ditembak oleh pasukan Belanda di Desa Ganter, Nganjuk pada tanggal 24 Februari 1949.

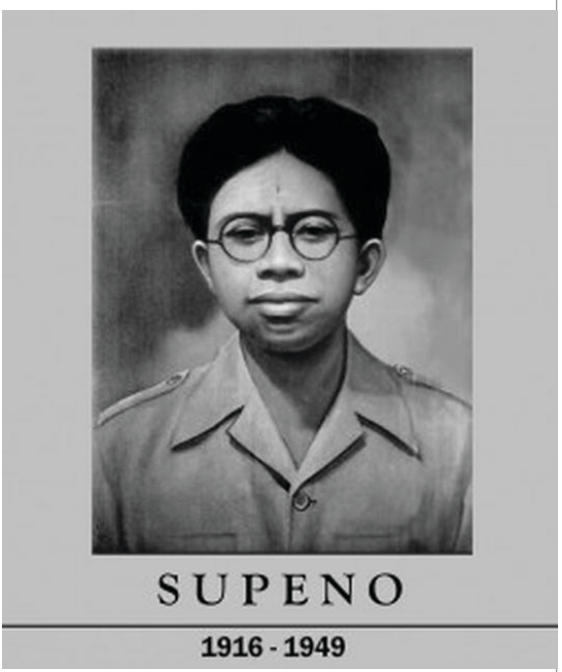

Gambar 1. Supeno, Ketua KNIP Periode November 1945 – Januari 1946 yang Tewas dalam Agresi Militer Belanda 2
Sumber: https://pahlawancenter.com/supeno/

654 *Warta Indonesia*, 29 Desember 1948 dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 219
655 Rosihan Anwar, 2002, *In Memoriam: Mengenang Yang Wafat* (Jakarta, Kompas), hlm. 132

5.7.4 BP KNIP Mr. Assaat merespon Peristiwa Madiun 1948

Peristiwa Madiun 1948 dikaitkan dengan kepemimpinan Musso, pemimpin PKI, dan Amir Syarifuddin, mantan PM RI, dalam suatu pemberontakan di Madiun, Jawa Timur. Amir Syarifuddin juga adalah pemimpin Sayap Kiri Front Demokrasi Rakyat (FDR) dalam KNIP yang kerap mengkritik dan tidak menyetujui langkah-langkah yang diambil oleh Kabinet Hatta. Pada hari terjadinya Peristiwa Madiun, yaitu tanggal 19 September 1948, para anggota FDR dan PKI menguasai kota Madiun, membunuh Gubernur Jawa Timur R.M. Suryo, seorang nasionalis bernama Dr. Muwardi, dan juga beberapa tokoh politik dan agama di Madiun, serta mengklaim berdirinya "Republik Soviet Indonesia". Presiden Soekarno segera merespon keadaan dengan menyatakan bahwa negara dalam keadaan bahaya dan mengeluarkan pernyataan melalui RRI Yogyakarta, yaitu "Pilih Musso dengan PKI-nya atau pilih Soekarno-Hatta".

Pada tanggal 20 September 1948, BP KNIP segera bersidang untuk membahas mengenai langkah-langkah yang perlu diambil terkait peristiwa ini. Sidang BP KNIP mendengar penjelasan Hatta tentang perkembangan situasi politik dan posisi RI setelah terjadinya Pemberontakan Madiun. Selanjutnya, Hatta mengajukan kepada BP KNIP mengenai RUU yang mengusulkan untuk memberian kekuasaan penuh kepada Presiden selama tiga bulan untuk mengatasi pemberontakan di Madiun.

Pada tanggal 20 September 1948, BP KNIP segera bersidang untuk membahas mengenai langkah-langkah yang perlu diambil terkait peristiwa ini.

Anggota BP KNIP merespon usulan RUU yang diajukan Hatta. K. Werdoyo (PBI), Syamsuddin (Masyumi), Maruto Nitimiharjo (Partai Rakyat), Abidin (non-partai), Kasman Singodimejo (Masyumi), Ny. Rasuna Said (Sumatera), dan Iskandar Tejasukmana (Sumatera) menyampaikan pendapat-pendapatnya. Diantara mereka, K. Werdoyo tidak setuju dengan RUU ini karena sudah sesungguhnya negara telah memiliki UU Keadaan Bahaya. Hatta menjawab dengan mengatakan bahwa UU Keadaan Bahaya saja tidak cukup untuk menjaga keselamatan negara, terutama untuk mengatasi pemberontakan FDR/PKI. Ia mengharapkan dukungan sepenuhnya dari BP KNIP untuk segera bertindak menumpas pemberontakan.[656] RUU ini pada akhirnya disetujui oleh BP KNIP.

Di dalam tubuh KNIP sendiri terdapat dua kelompok yang

656 *Nasional*, 21 September 1948 dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 213

memiliki penilaian berbeda terhadap RUU ini. Persetujuan terhadap RUU ini datang dari partai-partai Sayap Kanan dalam BP KNIP. Mereka mengecam dan mengutuk Peristiwa Madiun yang didalangi oleh FDR dan PKI. Kelompok ini, dalam BP KNIP, juga membentuk Front Kemerdekaan Nasional untuk mengamankan RI dan mempertahankan pemerintahan Soekarno-Hatta. Pengurus dari Front Kemerdekaan Nasional adalah Mangunsarkoro (PNI) sebagai Ketua, serta Syamsudin (Masyumi) dan Mohammad Saleh Suaidi (Masyumi) sebagai Wakil Ketua. Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Badan Kongres Pemuda RI (BKPRI) juga mengutuk peristiwa Madiun, serta memecat Sumarsono (Ketua BPKRI) yang terlibat. Lima organisasi buruh yang tergabung dalam SOBSI, yang dianggap mendukung Peristiwa Madiun, juga menyatakan diri keluar dari perserikatan, di antaranya adalah Serikat Buruh Kementrian Kehakiman, PBI, Serikat Buruh Kementrian Pekerjaan Umum, Serikat Buruh Bank Negara, dan Serikat Buruh Tembakau, atas dasar ketidaksetujuan mereka dengan pandangan SOBSI. Simpati yang besar dari gerakan buruh terhadap pemerintah menunjukkan bahwa tidak semua golongan sayap kiri ketika itu mendukung pemberontakan di Madiun.

Komunikasi yang intens dilakukan oleh pemerintah kepada BP KNIP mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menumpas pemberontakan Madiun.

Komunikasi yang intens dilakukan oleh pemerintah kepada BP KNIP mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menumpas pemberontakan Madiun. Pada bulan Oktober 1948, pemerintah memberi keterangan kepada BP KNIP tentang capaian-capaian yang berkaitan dengan Peristiwa Madiun. Pada umumnya, telah terlihat kemajuan dalam upaya menumpas pemberontakan. Menteri Kehakiman Susanto Tirtoprojo menjelaskan bahwa mereka yang terkait Pemberontakan Madiun sudah ditangkapi, termasuk juga mereka yang menerapkan militerisasi pada instansi-instansi penting di Madiun dan sekitarnya, seperti Jawatan Kereta Api, Jawatan Listrik dan Gas, serta Jawatan Pekerjaan Umum. [657]

Pada bulan Oktober hingga awal Desember 1948, pemerintah berhasil mengalahkan sisa-sisa pemberontak. Musso sendiri tewas ditembak dalam suatu kontak senjata pada akhir Oktober 1948. Amir Syarifuddin yang pada saat Peristiwa Madiun berada di Yogyakarta pun ditangkap, kemudian tewas di bulan Desember 1948 saat pemberontakan sudah berhasil dipadamkan oleh pemerintah RI.

657 *Berita Nasional*, 27, 29, dan 30 Oktober 1948 dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 215

Gambar 2. PM Hatta Memberikan Keterangan dalam Sidang BP KNIP Mengenai Pemberontakan PKI Madiun

Sumber: ANRI – IPPHOS, No. 945 (12 Oktober 1948)

Gambar 3. Sidang BP KNIP Mengenai Pemberontakan PKI di Madiun

Sumber: ANRI – IPPHOS, No. 946 (12 Oktober 1946)

5.7.5 Pidato Mr. Assaat pada Peringatan Tiga Tahun KNIP, 16 Oktober 1948

Dalam sidang BP KNIP di Yogyakarta tanggal 16 Oktober 1948, Ketua BP KNIP, Mr. Assaat, membuka sidang dengan sebuah pidato untuk memperingati tiga tahun KNIP. Pidato Mr. Assaat ini menyampaikan berbagai hal yang terjadi sepanjang tiga tahun kiprah BP KNIP. Mr. Assaat menyinggung tentang pentingnya Maklumat Wakil Presiden No. X, hak demokratis BP KNIP sebagai lembaga legislatif, Pemogokan Delanggu, dan juga PP No. 6 Tahun 1946. Ia berharap agar pada tahun depan, lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat sudah terbentuk di Indonesia. Ia menyampaikan pidatonya sebagai berikut:

> *"Saudara-saudara jang terhormat! Rapat saja buka! Hari ini, tanggal 16 Oktober 1948, genaplah 3 tahun usianja Badan Pekerdja. Rapat ini diadakan sengadja untuk memperingati hari jang bersedjarah itu. Pada tahun jang lalu peringatan itu dilangsungkan di pendopo Kepatihan dengan tjara sederhana, hari ini peringatan kita lakukan setjara jang lebih bersahadja lagi, kedua kalinja sesuai dengan keadaan dan suasana pada saatnya masing-masing.*
>
> *Djika artinya tanggal 16 Oktober 1945 itu ditindjau sebagai hari lahirnja Badan Pekerdja sadja, maka dalam suasana sekarang ini tjukuplah kiranja mengadakan peringatan dalam kalangan Badan Pekerdja sadja, antara anggauta2 dan pegawai2 Sekretariat Badan Pekerdja. Tetapi arti tanggal 16 Oktober 1945 itu adalah lebih penting dari pada itu. Hal ini sudah saja terangkan pada peringatan tahun jang lalu.*
>
> *Pada tanggal 16 Oktober 1945, dengan maklumat Wakil Presiden No. X Komite Nasional Pusat berganti sifat, dari Badan Perdjoangan jang*

Dalam sidang BP KNIP di Yogyakarta tanggal 16 Oktober 1948, Ketua BP KNIP, Mr. Assaat, membuka sidang dengan sebuah pidato untuk memperingati tiga tahun KNIP.

memimpin revolusi dari pusat sampai ke-daerah, mendjadi badan kontrole atas pimpinan negara dari badan executief jang membantu presiden, mendjadi badan legislatif bersama-sama Kepala Negara.

Mulai saat itu barangsiapa membatja konsiderans dari tiap-tiap peraturan negara jang bernama undang-undang sampai dewasa ini tentu akan bertemu dengan Maklumat Wk. Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X.

Bagaimanapun djanggal bunjinja, tetapi Maklumat Wakil Presiden itu telah memberi telah memberikan dasar hukum kepada Undang-Undang Republik Indonesia sampai saat ini.

Inilah artinja jang penting bagi kehidupan hukum, bukanlah hanja sebagai piagam pendirian Badan Pekerdja sadja, melainkan adalah urusan seluruh warga dari negara hukum Republik Indonesia.

Maka supaja instansi2 resmi dari pemerintahan pusat dapat kesempatan memperingati tanggal sedjarah dalam kehidupan hukum dewasa ini, Badan Pekerdja mengadakan rapat peringatan ini.

Pada peringatan tahun jang lalu telah saja uraikan riwajat pembentukan, susunan, tempat kedudukan dan sifatnja. Pun dasar serta tumbuhnja hak dan kewadjibanja telah saja djelaskan.

Semuanya itu ta' perlu diulang lagi. Pada saat ini Badan Pekerdja telah berlaku dan diperolehkan sebagai parlemen jang mempunjai dan mempertahankan hak-hak demokratis, selama Komite Nasional Pusat tidak bersidang.

Inilah artinja jang penting bagi kehidupan hukum, bukanlah hanja sebagai piagam pendirian Badan Pekerdja sadja, ...

Tanggal 16 Oktober 1945 adalah saat permulaan dan proses mewujudkan kedaulatan rakjat (demokratiseringsproces)

Sungguhpun belum ada sesuatu undang-undang jang mendjamin dan mengatur hak-hak demokratis dari perwakilan rakjat, hak-hak itu sudah didjalankan dan diterima oleh pihak jang bersangkutan seolah-olah hak itu sudah ditetapkan dengan undang-undang atau undang-undang dasar. Suatu Tjontoh jang njata dan jang masih aktuil, ialah hak enquete. Untuk menjelidiki hal-hal jang menjebabkan pemogokan Delanggu Badan Pekerdja telah memakai hak enquete, membentuk panitia enquete. Panitia ini diperlakukan baik oleh pemerintah maupun oleh rakjat demikian rupa, seolah-olah sudah ada undang-undang enquete jang memberi kekuasaan kepada panitia itu. Rupa-rupanja, djika orang betul-betul hendak mentjari kebenaran dan keadilan dengan sendirinja mengakui hak2 demokratis dari perwakilan rakjat, Undang-undang jang mendjamin adanja hak2 itu tidaklah begitu perlu.

Saudara2! Tanggal 16 Oktober 1945 adalah saat permulaan dan proses mewujudkan kedaulatan rakjat (demokratiseringsproces), bermula di Pusat Pemerintahan, kemudian diteruskan kepada Pemerintahan Daerah, maka oleh sebab itu lebih tepat djika peringatan hari ini tidak dinamai peringatan 3 tahun Badan Pekerdja melainkan peringatan 3 tahun demokrasi. Pidato peringatan inipun akan saja sesuaikan dengan sifat itu. Saja tidak akan menguraikan sekarang ini berita tahunan dari Badan Pekerdja, melainkan membahas beberapa hal jang berhubungan dengan demokratiseringsproces tadi itu.

Dalam process ini Badan Pekerdja telah dapat mentjapai kedudukan jang kuat. Hanja dalam satu hal kedudukannja amat lemah dipandang dari sudut demokrasi. Jaitu dalam hal pembentukan dan susunannja sendiri.

Betul Anggauta Badan Pekerdja dipilih oleh dan dari anggauta K.N.I.P., tetapi anggauta-anggauta K.N.I.P. sendiri tidak dipilih oleh rakjat umum, melainkan diangkat oleh presiden sebagian atas usul sesuatu panitia dan sebagian lagi atas usul beberapa partai atau organisasi seperti diatur dalam Peraturan Presiden No. 6 tahun 1946. Biarpun perimbangan perwakilan partai2 dan organisasi2 jang ditetapkan dalam peraturan itu pada saat itu kira2 dapat mendekati perimbangan pengaruh jang sesungguhnja ada dalam masjarakat, tetapi peraturan itu tetap dirasakan menjalahi paham demokrasi. Tidak heran kita, djika hal ini menimbulkan perdebatan jang dala sidang K.N.P. Pleno di Malang. Dengan penarikan usul inisiatif B.P. jang hendak membatalkan Peraturan Presiden No. 6 itu, dihabisilah perdebatan dalam sidang K.N.P. Pleno, tetapi rasa tidak adil jang ditimbulkan peraturan itu tidaklah hilang dengan sendirinja. Tjatjat jang melekat pada susunan K.N.P. sudah tentu terbawa pula kepada susunan B.P. karena B.P. mentjerminkan perimbangan dalam K.N.P. Hal ini setiap waktu dipergunakan oleh pihak oposisi dengan pernjataan, bahwa B.P. tidaklah representatief, artinja tidak mewakili rakjat.

Betul Anggauta Badan Pekerdja dipilih oleh dan dari anggauta K.N.I.P., tetapi anggauta-anggauta K.N.I.P.

Ketika pimpinan pemerintah dipegang oleh golongan Sajap Kiri dan Masjumi merupakan pihak oposisi, maka Masjumi mengadakan kampanje mendesak pemerintah supaja selekas-lekasnja mengadakan pemilihan umum, karena B.P. tidak representatief.

Ketika F.D.R. pada pihak oposisi, maka F.D.R. lah jang menganggap B.P. tidak representatief, bukan perwakilan rakjat, melainkan perwakilan burdjuis dsb.

Demikianlah nasibnja Badan Pekerdja jang dalam susunannja mengandung tjajat jang diterima

dari kandungan ibunja, jaitu dari susunan Komite Nasional Pusat jang tidak dibentuk dengan djalan pemilihan umum itu.

Ketjuali pihak oposisi, ada pula pihak lain jang selalu menganggap Badan Pekerdja tidak representatief, jaitu golongan2 jang tidak mempunjai wakil atau kurang wakilnja dalam Badan Pekerdja.

Andai kata susunan Komite Nasional pusat diperoleh dengan djalan pemilihan umum, setahun kemudian tentu akan dirasakan tidak representatief lagi, berhubung dengan tjepat dan pesatnja djalan kehidupan politik dewasa ini, tetapi perasaan ini tidak akan lekas dinjatakan seperti halnja sekarang dengan susunan Badan Pekerdja ini.

Disinilah letaknja kelemahan Badan Pekerdja sebagai Dewan Perwakilan Rakjat, dan disini pulalah kesukarannja membentuk Kabinet „„

Disinilah letaknja kelemahan Badan Pekerdja sebagai Dewan Perwakilan Rakjat, dan disini pulalah kesukarannja membentuk Kabinet jang sungguh-sungguh parlementer jang kuat, karena suara terbanjak dalam Badan Pekerdja belum mendjamin backing jang kuat diluar parlemen. Ini pulalah keterangannja maka sampai sekarang tiap-tiap krisis Kabinet berlaku lepas dari timbangan Badan Pekerdja dan diluar Badan Pekerdja.

Satu-satunja djalan untuk memperbaiki keadaan itu ialah mengadakan pemilihan umum.

Ada lagi satu hal jang menimbulkan kesulitan berhubung dengan djalannja kehidupan politik jang tjepat P.P. No. 6 telah menetapkan perimbangan perwakilan partai-partai dan organisasi dalam K.N.P. Bagaimanakah perimbangan itu djika ada perpetjahan dalam sesuatu partau, atau djika ada pergabungan dari beberapa partai, sedangkan tidak semua anggauta partai-partai itu turut dalam pergabungan itu, djika kita menganggap P.P. No. 6.

Sebagai ganti pemilihan umum, maka perimbangan perwakilan diukur menurut djumlahnja anggauta jang masuk golongan baru ini. Sampai sekian tidak ada lagi kesulitan besar. Tapi djika ada lowongan, karena seorang anggauta meninggal dunia misalnja, barulah timbul kesulitan, untuk menentukan partai jang manakah jang berhak mengisi lowongan itu? Partai jang aselikah atau partai petjahannja? Soal-soal begini tidak diatur dalam P.P. No. 6.

Dapatkah soal itu dipetjahkan dengan mengadakan perubahan pada P.P. No. 6? Mungkin bisa tetapi ukuran jang tepat untuk menentukan perimbangan pengaruh partai-partai dan organisasi dalam masjarakat tak kan mudah didapat, segala matjam perubahan akan merupakan tambahan2 belaka. Obatnya jang tepat ialah pemilihan umum.

Sebagai ganti pemilihan umum, maka perimbangan perwakilan diukur menurut djumlahnja anggauta jang masuk golongan baru ini.

Saudara-saudara jang terhormat.

Pada hari peringatan 3 tahun demokrasi ini saja meminta perhatian kepada suatu soal jang kelihatannja urgent dan hangat pada saat ini. Jaitu soal kedudukan wakil-wakil F.D.R. dalam Badan Perwakilan Rakjat.

Memang ada beberapa orang anggauta Badan Pekerdja wakil F.D.R. jang dalam tahanan berhubung dengan pemberontakan Muso, Amir, tetapi hal kedudukan mereka tidak dipersoalkan. Selama pemeriksaan dan sebelum ada putusan hakim pengadilan jang berhak selama itu belum ada perubahan kedudukan mereka. Selandjutnya tergantung pada hukumannja apakah kedudukannja sebagai anggauta D.P.R. dapat dipertahankan atau tidak. Selama karena tidak hadirnja anggauta – anggauta Badan Pekerdja wakil F.D.R quorum rapat tidak terganggu, maka kedudukan mereka sebagai anggauta tidak mendjadi soal.

Rupanja didaerah tidak demikian halnja,

orang sedikit gelisah dan mengambil tindakan jang terburu-buru, kursi Anggauta jang ditahan dianggap sudah kosong dan dibuat aturan untuk mengisi lowongan itu. Hal ini bisa terdjadi karena belum ada peraturan jang menetapkan manakala seseorang berhenti sebagai anggauta D.P.R. daerah dan bagaimana mengisi kuri jang lowong berhubung dengan perubahan konstelasi politik.

Oleh karena hal ini seharusnja diatur dalam undang2 Pem. Daerah atau Undang2 pemilihan anggauta D.P.R. Daerah, djadi materi Undang2, maka Pem. Daerah tidak boleh mengaturnja sendiri, sekalipun karena tidak hadlirnja anggauta jang ditahan itu quorum tidak bisa tertjapai. Sementara menunggu aturan dari Pemerintah Pusat., Pemerintah Daerah boleh mengadakan quorum darurat, seperti jang berlaku dalam Badan Pekerdja. Tiap-tiap tindakan jang mendahului putusan hakim jang berwadjib, bertentangan dengan rasa keadilan dan paham demokrasi. Bagaimana djika nanti ternjata bahwa anggauta jang ditahan itu tidak bersalah, sedangkan korsinja sudah diduduki oleh anggauta baru? Pun belum tentu, bahwa partai2 F.D.R, akan dinjatakan oleh hakim sebagai organisasi jang dilarang, djika tidak dilarang maka sukar sekali memberi alasan juridis untuk menjerahkan korsinja kepada partai lain.

Hal ini harus mendapat perhatian penuh dari kita jang duduk dalam Pemerintahan Pusat, dan harus diambil tindakan jang tjepat.

Saudara2 jang terhormat,

Memang dalam demokratiseringsproces hal pemilihan anggauta D.P.R. baik di pusat maupun di daerah adalah perkara besar. Segala kesulitan2 jang saja uraikan tadi dengan mudah dapat diatasi dengan djalan mengadakan pemilihan umum, baik buat anggauta D.P.R. Pusat maupun D.P.R. Daerah.

Sekarang Undang2 tentang susunan D.P.R. dan

Memang dalam demokratiserings-proces hal pemilihan anggauta D.P.R. baik di pusat maupun di daerah adalah perkara besar.

pemilihan anggautanja sudah berlaku dan kantor pemilihan sudah dibentuk, maka harapan saja supaja kantor ini lekas bekerdja dengan giat, supaja kita tidak perlu lagi mengadakan peringatan 4 tahun Badan Pekerdja.

Djadikanlah peringatan hari ini, peringatan penghabisan bagi Badan Pekerdja.

Sekianlah."[658]

5.7.6 BP KNIP Merespon Permasalahan Agraria, 1948

Pada bulan April 1948, BP melakukan inisiatif untuk membuat RUU penghapusan Hak Konversi atas Tanah, dan kemudian menjadi mosi. Sidang BP KNIP dibuat beberapa kali di bulan April, sebelum akhirnya sampai pada sebuah mosi untuk membuat RUU Penghapusan Hak Konversi atas Tanah di daerah Yogyakarta dan Surakarta. Dengan adanya RUU, para petani dapat tertolong karena hak Sultan di Yogyakarta dan Susuhunan di Solo, yang menguasai tanah mereka sejak zaman Kolonial Belanda, dihapuskan. Maka, para petani dapat memiliki tanah yang mereka hanya akan digarap untuk keperluan persawahan dan perladangan. Hak konversi tanah sebelumnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk kepentingan usaha perkebunannya, sehingga rakyat yang mengerjakan tanah-tanah desa terpaksa menjadi kuli tanpa tanah.

Sebelumnya, pemerintah membagi Sumatera secara administratif menjadi tiga daerah yang berbeda.

5.7.7 BP KNIP Merespon Permasalahan mengenai Wilayah Administratif Sumatera

Sebelumnya, pemerintah membagi Sumatera secara administratif menjadi tiga daerah yang berbeda. Hal ini mendapat kecaman dari beberapa anggota BP KNIP karena alasan pembagiannya. Sebagian anggota BP KNIP dalam sidangnya menyatakan bahwa pembagian pemerintahan di Sumatera menjadi tiga provinsi itu sama sekali bukan karena efisiensi administrasi atau keperluan daerah, melainkan berkaitan dengan kekecewaan pemerintah terhadap Gubernur

658 *Pidato Peringatan 3 Tahun BP KNIP, Diucapkan oleh Ketua BP KNIP Mr. Assaat di sidang peringatan tanggal 16 Oktober 1948 di Jogjakarta*, ANRI, *Arsip BP KNIP* (16 Oktober 1948).

Sumatera, Teuku Mohammad Hasan, yang dianggap sebagai diktator di wilayah itu. BP KNIP mengritik tindakan pemerintah itu karena biaya membagi Sumatera menjadi tiga wilayah administratif akan amat besar. Selain itu, diperlukan juga tenaga ahli yang lebih banyak lagi untuk menjalankan pemerintahan di Sumatera. Menanggapi kritik BP KNIP, pemerintah menyanggah dengan mengatakan bahwa pembagian itu dilandasi oleh kebutuhan perimbangan tugas, yaitu suatu usaha untuk melancarkan hubungan antara pemerintah pusat dengan bagian-bagian di Sumatera. Pada akhirnya, BP KNIP menyetujui pembagian Sumatera menjadi tiga wilayah administratif.

Agresi Militer Belanda II, yang dimulai pada tanggal 19 Desember 1948, membuat pemerintahan RI di Yogyakarta tidak berfungsi.

5.7.8 KNIP di antara Agresi Militer Belanda II dan Pembentukan RIS

Agresi Militer Belanda II, yang dimulai pada tanggal 19 Desember 1948, membuat pemerintahan RI di Yogyakarta tidak berfungsi. Belanda menahan para petinggi RI yang berada di ibukota Yogyakarta, termasuk Presiden Soekarno, Wakil Presiden merangkap PM Hatta, dan juga Ketua BP KNIP Mr. Assaat. Untuk meneruskan pemerintahan, RI mengirimkan telegram kepada pejabat-pejabat RI yang sedang berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat untuk menjalankan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibawah pimpinan Menteri Kemakmuran RI Syafruddin Prawiranegara. Di medan perang, pertempuran terus terjadi antara pihak Indonesia melawan Belanda. Korban-korban berjatuhan akibat Agresi Belanda ini, termasuk mantan Ketua KNIP Supeno yang tewas ditembak tentara Belanda pada bulan Januari 1949. Konsolidasi para diplomat dan pemimpin-pemimpin RI dilakukan, termasuk Mr. Mohammad Rum dan delegasi RI di PBB, PM Hatta di penahanan di Bangka, dan Pejabat Presiden Syafruddin Prawiranegara di Bukit Tinggi guna mendesak pemimpin-pemimpin internasional untuk mengambil sikap terhadap tindakan Belanda kepada RI. Hasilnya, tanggal 7 Mei 1949, lima bulan setelah agresi Belanda ke Yogyakarta, tercapailah Persetujuan Rum-Royen. Para pemimpin RI segera dibebaskan oleh Belanda, sedangkan pemerintahan dikembalikan kepada PM Hatta dari PDRI. Dalam sejarah BP KNIP, periode ini adalah fase eksistensinya yang terakhir. Tantangan BP KNIP pada saat itu adalah untuk menemukan cara yang tepat dalam meredam gejolak yang timbul pasca Agresi Militer Belanda II, serta mempersiapkan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS).

5.8 Sidang-Sidang dan Pembahasan dalam BP KNIP pada Tahun 1949

5.8.1 Sidang BP KNIP yang pertama pada tahun 1949

Pada tanggal 19–20 Juli 1949 di Yogyakarta, BP KNIP memulai sidang pertamanya. Kembalinya BP KNIP dalam menjalankan tugasnya turut berarti bahwa kehidupan demokrasi di RI semakin pulih pasca Agresi Militer Belanda II usai. Hal ini dapat dilihat dari perhatian jajaran pemerintah terkait sidang perdana BP KNIP ini. Presiden Soekarno, PM Hatta, seluruh menteri pada Kabinet Hatta, serta para pejabat sipil dan militer RI turut menghadiri sidang. Turut hadir pula Wakil Ketua Parlemen Negara Indonesia Timur (NIT) sebagai peninjau sidang.[659] Dalam sidang ini, PM Hatta memberikan keterangan bahwa perundingan antara RI dengan Belanda semakin bergerak ke arah yang positif. Menurut Hatta, Perjanjian Rum-Royen juga lebih menguntungkan bagi RI, jika dibandingkan dengan Perjanjian Renville. PM Hatta menghimbau BP KNIP untuk memperkokoh persatuan rakyat dengan turut membantu melaksanakan politik pemerintah.

Dikembalikannya pemerintahan RI di Yogyakarta adalah langkah awal untuk mewujudkan kedaulatan Indonesia dalam RIS, yaitu suatu pemerintahan sementara sebelum tercapainya kesatuan Republik Indonesia. Hatta juga menyampaikan prinsip dasar politik RI dalam masa perjuangan, yaitu: “Politik luar negeri yang damai, dan politik dalam negeri yang dalam menegakkannya perlu didasarkan pada kekuatan, tenaga, dan kecakapan tentara dalam menangkis serangan pihak asing.”[660] Setelah pidato dari PM Hatta, pihak pemerintah yang memberikan keterangannya adalah Syafruddin Prawiranegara mengenai kegiatan PDRI di Sumatera, serta Susanto Tirtoprojo, Komisaris Pemerintah di Jawa, yang memberikan keterangan tentang pemerintahan di Pulau Jawa.

Selanjutnya, sidang BP KNIP menyampaikan pandangan umum atas keterangan pemerintah, di mana akhirnya BP KNIP mendukung dan menyetujui tindakan-tindakan yang diambil oleh

Dikembalikannya pemerintahan RI di Yogyakarta adalah langkah awal untuk mewujudkan kedaulatan Indonesia dalam RIS, ...

659 Kehadiran wakil parlemen NIT dalam rapat BP KNIP pertama menjelaskan kedekatan RI dengan NIT, khususnya sejak diadakan pertemuan *Musyawarah Federal* pada tanggal 3–4 Maret 1949. Dalam Musyawarah Federal, NIT mendukung pendirian dan kedudukan RI di Yogyakarta, serta turut berupaya untuk segera diadakannya Konferensi Meja Bundar (KMB), sebagai satu perundingan ke arah pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). (Lihat: Ide Anak Agung Gde Agung, 1985, *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat* (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press), hlm. 568-569

660 *Warta Indonesia*, 20 Juli 1949 dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 227

pemerintah. Pernyataan penting juga disampaikan oleh anggota BP KNIP, Syaranamual (Parpim), yang mendesak untuk menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas berhasilnya Agresi Militer Belanda ke Yogyakarta. Selain itu, anggota BP KNIP yang turut menyampaikan pendapatnya adalah Syamsuddin (Masyumi), I. Mangunsarkoro (PNI), Ny. R. Rasuna Said (Sumatera), Maruto Nitimiharjo (Murba), Sunyoto (BTI), Abidin (PBI), dan Zainal Ahmad (Sumatera).[661] BP KNIP segera memberikan dukungan kepada Kabinet Hatta untuk menjalankan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelesaikan permasalahan terkait Agresi Militer Belanda II.

Gambar 1. Sidang Pertama KNIP Pasca Agresi Militer Belanda II
Sumber: ANRI – IPPHOS, No. 1273 (20 Juli 1949)

Sesuai dengan Perjanjian Rum-Royen yang ditandatangani pada 7 Mei 1949, pihak Indonesia dan Belanda akan secepatnya mengusahakan suatu Konferensi Meja Bundar (KMB)

5.8.2 Permasalahan mengenai Penyempurnaan Anggota BP KNIP dan KNIP

Sesuai dengan Perjanjian Rum-Royen yang ditandatangani pada 7 Mei 1949, pihak Indonesia dan Belanda akan secepatnya mengusahakan suatu Konferensi Meja Bundar (KMB) sebagai bagian dari upaya untuk menyerahkan kedaulatan bagi Negara Indonesia Serikat. BP KNIP, dalam rangka mempersiapkan KMB dan dampak-dampaknya, mengadakan sidang kembali pada tanggal 25 Juli 1949, dengan agenda menyempurnakan susunan struktur BP KNIP dan KNIP. Sidang BP KNIP ini memutuskan untuk membentuk Panitia Penyelidikan Penyempurnaan Susunan BP KNIP dan KNIP yang diketuai

661 *Ibid.*

oleh Syamsuddin Sutan Makmur (PNI), dengan anggota yang terdiri dari Kasman Singodimejo (Masyumi), Maruto Nitimiharjo (Murba), Sunyoto (BTI), Lobo (Sunda Kecil), Zainal Abidin Ahmad (Sumatera/Masyumi), dan Tambunan (Parkindo).[662] Penyempurnaan susunan BP KNIP dirasa perlu untuk memberikan kesempatan pada golongan politik yang belum ikut dalam BP KNIP maupun KNIP. Selain itu, Agresi Belanda telah menimbulkan jumlah korban jiwa yang besar, termasuk juga di antaranya mereka yang tergabung sebagai anggota KNIP. Oleh karena itu, diperlukan suatu penyempurnaan anggotanya kembali.

Pada Sidang BP KNIP tanggal 14 September 1949, diketahui bahwa transportasi yang begitu sulit pasca Agresi Belanda menyebabkan sebagian anggota KNIP kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, ada pula anggota KNIP yang "menyeberang" ke negara boneka bentukan Belanda atau meninggal dunia. Untuk mengganti kursi anggota BP KNIP yang kosong, sidang sepakat untuk menambah jumlah anggota melalui perwakilan partai-partai politik yang kursinya ditinggalkan.

5.8.3 BP KNIP Merespon Persoalan Pendidikan di Wilayah Republik Indonesia

Persoalan pendidikan di wilayah Republik Indonesia menjadi pokok persoalan BP KNIP pada tahun 1949. Hal ini dapat dipahami, mengingat persoalan pendidikan masih belum mendapatkan porsi pembahasan yang cukup, baik dalam sidang BP KNIP maupun oleh pemerintah, meskipun Departemen Pendidikan RI telah menjalankan tugasnya sejak 1945. BP KNIP mengadakan sidang tanggal 26, 27, dan 28 Oktober, serta 25 November 1949 untuk membahas mengenai RUU tentang Pokok Pendidikan dan Pengajaran yang diajukan pemerintah. RUU ini mengundang perdebatan, terutama tentang rencana memasukkan pelajaran agama sebagai pelajaran wajib di sekolah. Sebagian anggota BP KNIP menghendaki pelajaran agama sebagai pelajaran wajib. Ketua BP KNIP Mr. Assaat berinisiatif akan mencari jalan tengah, tetapi pemerintah kemudian menambahkan pernyataan sebagai berikut:

Persoalan pendidikan di wilayah Republik Indonesia menjadi pokok persoalan BP KNIP pada tahun 1949.

662 *Warta Indonesia*, 9 Juli 1949 dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 228

> *"Dalam sekolah negeri diadakan peladjaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikoeti peladjaran terseboet. Dengan begitoe maka peladjaran agama menjadi verplicht leervak [pelajaran wajib], mata peladjaran wajib bagi moerid yang soedah ditentoekan oleh orang toeanya oentoek mengikoetinya."*[663]

Dengan demikian, pelajaran agama tidak menjadi mata pelajaran wajib di sekolah negeri, melainkan atas saran dan persetujuan dari orang tua murid saja. Menanggapi hal ini, fraksi sayap kanan berbasis agama beraksi keras, salah satunya adalah Fraksi Masyumi yang tidak dapat menerima bahwa pelajaran agama bukanlah pelajaran wajib langsung bagi murid-murid sekolah.

Dengan demikian, pelajaran agama tidak menjadi mata pelajaran wajib di sekolah negeri, melainkan atas saran dan persetujuan dari orang tua murid saja.

Selain dari pelajaran agama, pokok-pokok dari RUU ini yang menjadi bahan perdebatan BP KNIP adalah dasar pendidikan (pedagogi), kewajiban belajar siswa, beasiswa pendidikan, dan pendidikan jasmani siswa. Pada tanggal 25 November, BP KNIP akhirnya sampai pada kesepakatan, sebagai berikut:

1. Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah untuk membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air;
2. Pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas Pancasila dan UUD RI, serta atas dasar kebudayaan kebangsaan Indonesia;
3. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan adalah juga bahasa pengantar di sekolah di seluruh Indonesia. Akan tetapi, di tingkatan Taman Kanak-kanak hingga kelas tiga Sekolah Dasar, bahasa daerah boleh dipergunakan sebagai bahasa pengantar;
4. Semua anak-anak yang sudah berumur enam tahun berhak, dan yang sudah delapan tahun diwajibkan, belajar di sekolah sedikitnya enam tahun lamanya;
5. Pelajaran di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Kementrian Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar; serta

663 *Pemandangan*, (28 – 29 November 1949)

6. Pendidikan jasmani yang menuju kepada keselarasan antara tumbuhnya badan dengan perkembangan jiwa merupakan suatu usaha untuk membentuk bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat dan kuat lahir dan batin, diberikan di segala jenis sekolah.[664]

Dengan demikian, pokok-pokok ini telah mencakup durasi "wajib belajar" bagi siswa sekolah di lingkungan RI, dengan waktu belajar sedikitnya enam tahun lamanya, hingga Sekolah Menengah Pertama. Pendidikan di pesantren, atau sekolah berbasis agama lainnya yang diakui oleh Kementrian Agama, juga diakui oleh negara.

5.8.4 BP KNIP Merespon Mengenai Permasalahan Daerah Aceh

Setelah mencapai kesepakatan mengenai RUU Pendidikan, Sidang BP KNIP pada tanggal 25 November 1949 juga membahas mengenai Laporan anggota BP KNIP, Maruto Nitimiharjo dan Lobo, mengenai kondisi di daerah Aceh. Selama dua minggu, kedua anggota BP KNIP tersebut melakukan penyelidikan di Aceh Timur. Mereka mencatat mengenai perkembangan demokrasi di Aceh yang berjalan cukup baik, berikut dengan perkembangan partai-partai, adanya rapat-rapat umum, dan bahkan juga demonstrasi di tingkat lokal. Disebutkan juga bahwa di tingkat kabupaten, terdapat wakil-wakil semua partai politik dan juga organisasi tani dan pemuda.[665] Temuan tersebut menjelaskan bagaimana Aceh mengalami perkembangan demokrasi yang baik. Seperti halnya Yogyakarta, Aceh juga merupakan satu daerah yang nasionalis. Sejak proklamasi kemerdekaan RI, rakyat Aceh terus mendukung segala upaya RI untuk mempertahankan kemerdekaan dan berdaulat.

Menurut keterangan kedua anggota BP KNIP tersebut, ekonomi rakyat Aceh telah jauh lebih baik daripada di Jawa.

Menurut keterangan kedua anggota BP KNIP tersebut, ekonomi rakyat Aceh telah jauh lebih baik daripada di Jawa. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya penduduknya yang kelaparan. Perekonomian didasarkan pada pertanian, perikanan, perkebunan, dan perdagangan. Aktivitas ekonomi di Aceh tetap aktif, meskipun terlihat bekas-bekas pembumihangusan objek-objek vital di sana, baik yang dilakukan oleh pihak RI sendiri maupun Belanda.

Yang juga menarik pada laporan ini adalah banyaknya kuli

664 *Pemandangan*, 28 dan 29 Oktober 1949
665 *Ibid.*

kontrak dari Jawa yang tinggal di Aceh.[666] Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai kuli kontrak di Sumatera Timur, kemudian pada saat revolusi dimulai barulah mereka pindah ke Aceh dan membuka lahan pertanian disana. Hal ini menjelaskan sektor pertanian yang relatif lebih baik di Aceh, jika dibandingkan di daerah sekitarnya pada masa revolusi.

5.8.5 BP KNIP Merespon Perundingan KMB

Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah suatu pertemuan yang menentukan bentuk dari RIS yang akan datang, dan juga hubungan kerja sama yang dilakukan antara RIS dengan Belanda. Sidang ini diadakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus–2 November 1949. Sebelum diadakannya KMB, pemerintah RI telah menjalin hubungan dengan pemerintah negara-negara federal (BFO) diantaranya NIT, Negara Pasundan, dan Negara Jawa Timur untuk mempersiapkan suatu rancangan mengenai bentuk RIS dan bagaimana hubungan RIS dengan Belanda di kemudian hari melalui Konferensi Antar-Indonesia, yang diadakan pada tanggal 19 Juli – 22 Juli 1949 (periode pertama) dan pada tanggal 31 Juli – 2 Agustus 1949 (periode kedua). Berdasarkan Komunike Konferensi Antar-Indonesia di tanggal 2 Agustus, telah ditemukan pokok-pokok mengenai ketatanegaraan, keuangan dan perekonomian, keamanan, kebudayaan, serta agama, sebagai dasar dari RIS.[667] Hasil inilah yang kemudian dibawa oleh delegasi RI dan BFO untuk dirundingkan bersama dengan Belanda di Den Haag.

Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah suatu pertemuan yang menentukan bentuk dari RIS yang akan datang, dan juga hubungan kerja sama yang dilakukan antara RIS dengan Belanda.

Hubungan BP KNIP dengan delegasi pemerintah RI dalam KMB terjalin dengan baik. Hal ini secara khusus diusahakan oleh Ketua Delegasi RI, Mohammad Hatta, yang menekankan kepada jajaran pemerintah dan anggota delegasi untuk senantiasa memberikan informasi terbaru terkait perkembangan perundingan KMB kepada BP KNIP di Yogyakarta. Selain itu, hal yang membuat komunikasi berjalan dengan lancar antara pemerintah dengan BP KNIP adalah adanya Wakil BP KNIP, yaitu Suyono Hadinoto, yang ikut sebagai anggota delegasi RI dalam KMB. Terdapat delapan sidang yang dilaksanakan BP KNIP kemudian untuk membahas mengenai KMB di tahun 1949, yaitu pada tanggal 20 September, 24 Oktober, 27 Oktober, 17 November, 23 November, 24 – 25 November, 1 Desember, 2-3 Desember, dan 3 – 4 Desember. Berikut ini akan dibahas isi persidangan BP KNIP pada tanggal-tanggal tersebut, yaitu:

666 *Ibid.*
667 *Komunike Konferensi Antar Indonesia*, 2 Agustus 1949 dalam Ide Anak Agung Gde Agung, 1985, hlm. 595-605

1. Sidang BP KNIP 20 September 1949

Pada tanggal 20 September 1949, BP KNIP mengadakan sidang untuk meminta keterangan pemerintah tentang perkembangan perundingan KMB. Menteri Kehakiman Susanto Tirtoprojo dan Menteri Dalam Negeri Wongsonegoro menjelaskan bahwa tujuan KMB adalah menyerahkan kedaulatan kepada RIS sebelum 1 Januari 1950. Mengenai pokok-pokok perjanjian KMB, Menteri Susanto Tirtoprojo mengatakan bahwa KMB sejauh ini hanya membahas mengenai kerja sama Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan Belanda.[668] Dalam perkembangannya, KMB juga memasukkan butir mengenai pengakuan kedaulatan RIS oleh Belanda.

2. Sidang BP KNIP 24 Oktober 1949

BP KNIP menggelar sidang tebuka untuk mendengarkan keterangan pemerintah tentang Perundingan KMB. Sidang BP KNIP mendengarkan keterangan dari Pejabat PM, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang menggantikan Hatta yang ketika itu sedang berada di Den Haag dalam rangka KMB. Menurut Sultan Hamengkubuwono IX, penyebab tidak lancarnya perundingan dalam KMB terdiri dari dua hal pokok, yaitu:

a. Mengenai Uni Indonesia-Belanda. Indonesia menghendaki agar sifat "Uni" tersebut hanyalah sebatas kerja sama yang bebas, tanpa adanya organisasi permanen, sedangkan Belanda menginginkan kerja sama yang luas dengan organisasi permanen yang luas cakupannya.
b. Mengenai hutang kolonial, Indonesia hanya mengakui hutang-hutang Hindia Belanda sampai kekalahan Belanda kepada Jepang. Sementara pihak Belanda berpendapat bahwa Indonesia harus mengambil semua kekayaan maupun hutang Hindia Belanda, termasuk biaya-biaya perang kolonial, dan juga revolusi.

Sultan Hamengkubuwono juga menjelaskan bahwa delegasi Indonesia dalam Perundingan KMB berpedoman pada mandat yang diberikan oleh Pemerintah RI. Pedoman yang menjadi dasar bagi delegasi Indonesia di KMB, adalah sebagai berikut:

,,, delegasi Indonesia dalam Perundingan KMB berpedoman pada mandat yang diberikan oleh Pemerintah RI.

668 *Merdeka*, 22, 26, dan 27 September 1949, dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 233

a. Tujuan KMB adalah untuk mempercepat penyerahan kedaulatan penuh secara sungguh-sungguh dan tanpa syarat kepada RIS, yang dapat terlaksana sebelum bulan Januari 1950;
b. Delegasi RI menolak segala perjanjian yang bersifat campur tangan pihak luar dalam urusan internal RIS, karena hal ini berarti mengurangi kedaulatan RIS;
c. Usaha kerja sama antara RIS dan Belanda harus didasarkan pada sifat sukarela antara dua negara yang berdaulat; dan
d. Hubungan dengan negara-negara dalam *Bijeenkomst voor Federal Overleg* (BFO) atau Permusyawaratan Negara Federal dipelihara dengan sebaik-baiknya. Baik delegasi RI maupun delegasi BFO bersama-sama menghadapi Belanda di dalam KMB.[669]

Menanggapi hal ini, BP KNIP menerima keterangan pemerintah dan mendukung segala hal yang dianggap perlu dalam KMB.

Menteri Kehakiman Susanto Tirtoprojo juga menyampaikan keterangannya tentang KMB.

3. Sidang BP KNIP 27 Oktober 1949

Sidang BP KNIP kali ini dilaksanakan secara tertutup. Anggota KNIP yang ikut sebagai delegasi RI ke KMB, yaitu Suyono Hadinoto dari PNI, memberikan keterangannya. Suyono tidak mengikuti KMB sampai selesai karena sudah harus kembali ke Indonesia pada tanggal 20 Oktober. Menteri Kehakiman Susanto Tirtoprojo juga menyampaikan keterangannya tentang KMB. Mendengar perkembangan KMB dari laporan-laporan yang ada, sebagian anggota BP KNIP, terutama mereka yang berasal dari kelompok Sayap Kiri, menyatakan ketidakpuasannya. Mereka beranggapan bahwa hasil-hasil KMB memberikan konsesi-konsesi baru kepada Belanda, yang kembali merugikan RI. Pokok-pokok kerugian RI, berdasarkan pendapat kelompok Sayap Kiri dalam BP KNIP, adalah sebagai berikut:

a. Hutang-hutang warisan Belanda;
b. Perlindungan bagi kepentingan ekonomi penjajah di Indonesia;
c. Penundaan persoalan Irian Barat berarti masih ada kolonialisme di Indonesia;
d. Kerjasama Indonesia-Belanda dianggap sebagai kolonialisme bentuk baru dalam bentuk kebudayaan; serta
e. Pemerintah dianggap telah menaikkan BFO ke tingkat internasional[670]

669 *Pemandangan*, 24 Oktober 1949 dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 239
670 Mohammad Hatta, 1979, *Memoir* (Jakarta, Tintamas), hlm. 559

4. Sidang BP KNIP 17 November 1949

Perjanjian KMB berhasil ditandatangani pada tanggal 2 November 1949 sesuai jadwal. Pokok-pokok hasil KMB, yaitu:

a. Suatu uni antara Belanda dan RIS disepakati dengan ratu Belanda sebagai pimpinan simbolis;
b. Soekarno akan menjadi Presiden, sementara Hatta akan menjadi Perdana Menteri dan merangkap sebagai Wakil Presiden RIS;
c. Berbagai jaminan diberikan kepada investasi-investasi Belanda di Indonesia, dan disepakati bahwa akan diadakan konsultasi-konsultasi mengenai beberapa masalah keuangan antara Indonesia dengan Belanda;
d. Belanda tetap memiliki kedaulatan atas Papua sampai perundingan-perundingan lebih lanjut;
e. RIS harus membayar hutang Hindia Belanda sebesar 4,3 milyar Gulden.[671]

Dalam sidang BP KNIP ini, persoalan utama yang menjadi pembahasan adalah menentukan apakah hasil Perjanjian KMB dapat langsung diratifikasi oleh BP KNIP, atau memerlukan Sidang Pleno KNIP terlebih dahulu. Presiden Soekarno memberikan pandangan bahwa, mengingat terbatasnya waktu dan biaya untuk mengadakan Sidang Pleno KNIP, sebaiknya KMB diratifikasi oleh BP KNIP. Namun, hal-hal yang dibahas dalam sidang ini adalah mengenai prinsip hasil KMB itu sendiri. Apabila hasil KMB merupakan perjanjian antarnegara, maka perjanjian harus diratifikasi oleh parlemen. BP KNIP, sebagai badan yang berhak melakukan pekerjaan parlemen, mampu untuk meratifikasi perjanjian. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa Perjanjian Renville dan Perjanjian Rum-Royen diterima melalui mosi dalam sidang BP KNIP tanpa mengadakan Sidang Pleno KNIP. Ketua BP KNIP Mr. Assaat memberikan pandangan bahwa hasil KMB harus diratifikasi oleh Sidang Pleno KNIP. Jika hasil KMB hanya diratifikasi oleh BP KNIP, akan muncul kesan kurang representatifnya lembaga tersebut, dan juga dapat menimbulkan rasa kurang puas pada rakyat di kemudian hari.[672] Pada akhirnya, BP KNIP mengambil keputusan untuk membawa hasil-hasil KMB ke Sidang Pleno KNIP yang direncanakan pada tanggal 5–15 Desember 1949.

Jika hasil KMB hanya diratifikasi oleh BP KNIP, akan muncul kesan kurang representatifnya lembaga tersebut

671 *Charter of the Transfer of Sovereignty over Indonesia, Signed at the Round Table Conference, the Hague, November 2, 1949* (1950). *International Organization*, 4(1), hlm. 176-177.
672 Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 241-242

5. Sidang BP KNIP 23 November 1949

Sidang ini membahas mengenai prosedur pelaksanaan Sidang Pleno KNIP. Selain itu, sidang juga membahas RUU tentang penyempurnaan susunan KNIP yang menambahkan anggota perwakilan partai politik, terutama partai yang belum mempunyai wakil dalam BP maupun KNIP. Sidang juga membahas mengenai kuorum Sidang Pleno dan membahas PP No. 6 tahun 1949 tentang kuorum sidang berpatokan pada jumlah total anggota KNIP sebanyak 510 orang. Sidang ini memutuskan bahwa kuorum yang ada pada PP No. 6 tahun 1949 tidak lagi menjadi patokan karena situasi darurat. Dalam pedoman baru, anggota yang dihitung untuk kuorum adalah anggota yang nyata ada sesuai laporan tim pembaharuan susunan KNIP terdahulu. Namun, presentase kuorum sejumlah dua per tiga dari anggota yang ada tetap digunakan dalam Sidang Pleno KNIP yang akan datang.

Dalam sidang lanjutan BP KNIP ini, PM Hatta memberikan keterangan tentang jalannya perundingan dan pokok-pokok politik pemerintah

6. Sidang BP KNIP 24 – 25 November 1949

Dalam sidang lanjutan BP KNIP ini, PM Hatta memberikan keterangan tentang jalannya perundingan dan pokok-pokok politik pemerintah, hingga tercapai hasil KMB. Menurut PM Hatta, sebagian anggota BP KNIP yang tidak setuju dengan KMB lebih karena ketidaktahuannya tentang KMB. Menurut Hatta, pemerintah telah mencoba untuk membawa rakyat Indonesia kepada kemerdekaan yang sepenuhnya yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi, kemerdekaan itu tidak dapat dilakukan secara serta-merta, melainkan secara bertahap. PM Hatta menyebutkan kembali pokok perjuangan RI dalam perundingan dengan Belanda, yaitu pengakuan kedaulatan yang dilakukan secara setahap demi setahap.

Hatta juga mengingatkan dalam sidang BP KNIP untuk tidak menghujat saudara-saudara sesama Indonesia yang berpihak pada BFO, sebab pertentangan sebangsa harus dijauhi karena hasil-hasil yang diperoleh dalam KMB tidak terlepas dari kerja sama yang erat antara delegasi RI dengan BFO. Kedua delegasi bersatu padu menghadapi permasalahan-permasalahan dalam KMB.

Mengenai Irian Barat, Hatta berpandangan bahwa sikap Belanda akan membawa kerugian bagi Belanda sendiri, karena cepat atau lambat Irian Barat harus diberikan haknya untuk menentukan nasib sendiri. Tetapi, jika RI tetap meminta Irian Barat sebagai bagian dari kedaulatan, konflik dengan Belanda tidak akan selesai.

Kemudian, mengenai Uni Indonesia-Belanda dalam RIS, Hatta

mengatakan bahwa ikatan ini tidak mengurangi kemerdekaan dan kedaulatan RIS karena pada dasarnya Uni Indonesia-Belanda hanyalah bersifat seremonial.

Sedangkan tentang hutang-hutang yang diwarisi RIS dari Hindia Belanda, Hatta berpendapat bahwa "Kita harus berani mengambil risiko jika kita benar-benar mau menjadi bangsa yang merdeka dan terhormat. Kita harus berani memikul pahitnya kemerdekaan dan kedaulatan."[673]

7. Sidang BP KNIP 28 November 1949

Sidang BP KNIP tanggal 28 November 1949 mengumumkan perihal telah disetujuinya RUU Penambahan Jumlah Anggota KNIP yang kemudian menjadi UU No. 6 Tahun 1949 tentang Penambahan Jumlah Anggota KNIP sebagai persiapan sebelum diadakannya Sidang Pleno KNIP. Isi pokok dari UU No. 6 Tahun 1949 adalah sebagai berikut:

a. Partai-partai politik yang tersebar di seluruh Indonesia dan belum mempunyai wakil dalam BP KNIP mendapat kesempatan untuk menempatkan seorang wakilnya pada badan ini; dan
b. Partai-partai politik yang mempunyai wakil dalam BP KNIP, namun belum memiliki jumlah lengkap dalam KNIP, mendapat kesempatan untuk melengkapinya sampai berjumlah 12 orang.[674]

Kiranya perlu juga dibahas mengenai pemberitaan media pada masa-masa sidang ini. pada tanggal 27 November 1949. Sehari sebelum sidang BP KNIP pada tanggal 28 November 1949, Majalah *Star Weekly* membahas mengenai bentuk badan legislatif yang ada dalam Republik Indonesia. Ini menjelaskan antusiasme media dan masyarakat mengenai rencana pembentukan RIS. Pembahasan mengenai RIS dalam *Star Weekly* mencerminkan keoptimisan tanpa ada keraguan mengenai bentukan RIS yang akan segera muncul. Pertanyaan-pertanyaan substansial mengenai badan perwakilan dalam RIS, antara lain: "Apakah dua badan perwakilan RIS ini untuk "membatasi" pengaruh negara bagian RI, yang lebih besar secara populasi namun hanya memiliki dua orang wakil dalam senat?" tidak muncul. *Star Weekly* menyampaikannya sebagai berikut:

"*Seperti djoega di Amerika Serikat, Republik Indonesia Serikat*

Hatta berpendapat bahwa "Kita harus berani mengambil risiko jika kita benar-benar mau menjadi bangsa yang merdeka dan terhormat. Kita harus berani memikul pahitnya kemerdekaan dan kedaulatan.

673 *Pemandangan*, 25 – 26 November 1949 dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 243 – 247
674 Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 249

poen aken mempoenjai doea matjem badan-badan perwakilan, jaitoe Senaat dan Badan Perwakilan Rakjat. Di Amerika Serikat diseboet Senate dan House of Representatives. Senaat meroepakan perwakilan dari daerah-daerah bagian dan Badan Perwakilan Rakjat meroepakan soeatoe pernjata'an dari persatoean antara rakjat di seloeroeh Indonesia."[675]

8. Sidang BP KNIP 1 Desember 1949

Sidang juga membahas mengenai pelaksanaan UU No. 6 Tahun 1949 tentang penambahan jumlah anggota KNIP dan membahas anggota KNIP yang "menyeberang" ke Belanda, atau menjadi anggota parlemen di luar RI. Beberapa anggota BP KNIP mengecam keras dan menghendaki agar mereka yang melakukan hal-hal tersebut dicoret dari daftar keanggotaan KNIP ataupun BP KNIP. Walaupun begitu, sidang akhirnya memutuskan bahwa masalah disiplin anggota adalah kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing partai.

Sidang membahas tentang usulan-usulan RUU yang semuanya berasal dari BP KNIP,

9. Sidang BP KNIP 2 – 3 Desember 1949

Sidang membahas tentang usulan-usulan RUU yang semuanya berasal dari BP KNIP, yaitu RUU Penggantian Presiden/Wakil Presiden pada masa RIS, RUU tentang jabatan yang tidak dapat dirangkap oleh anggota KNIP, dan RUU tentang Kuorum Darurat Sidang Pleno KNIP. RUU Penggantian Presiden/Wakil Presiden diinisiasi oleh Mr. Sartono (PNI), Prawoto Mangkusasmito (Masyumi), dan Tambunan (Parkindo). Dasar pertimbangan RUU ini adalah bahwa Presiden RI Soekarno dan PM merangkap Wakil Presiden RI Hatta tidak mungkin merangkap jabatan sebagai presiden dan wakil presiden RIS. Oleh karena itu, kelompok pengusul menyampaikan agar penentuan jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI diserahkan kepada ketua KNIP dengan diatur oleh UU. Prinsip dasar dari RUU ini disetujui, namun ada sebagian anggota KNIP yang tidak setuju dengan usulan nama tersebut, sehingga kemudian menyampaikan usulan nama lain, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pada akhirnya, BP KNIP menyetujui secara penuh usulan Mr. Sartono. RUU ini disahkan pada tanggal 5 Desember 1949 dengan nama Undang-Undang Tentang Penunjukan Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia.[676] Mengingat pentingnya pembahasan ini, berikut dijelaskan isi dari UU

675 *Star Weekly*, 27 November 1949
676 UU No. 7 Tahun 1949

tersebut sebagai berikut:

Jika Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka Ketua DPR menjalankan kewajiban itu sampai ada ketentuan tentang penggantian pemangku jabatan Presiden;

Jika Ketua DPR tidak dapat pula menjalankan kewajiban itu, maka ia digantikan oleh Wakil Ketua DPR.[677]

Menarik untuk dicermati bahwa inisiator UU dapat secara arif memberikan istilah "pemangku sementara jabatan presiden" sebagai istilah jabatan bagi ketua DPR/wakilnya untuk menjabat sebagai presiden. Hal ini dapat dipahami sebagai cara untuk menekankan bahwa ketua DPR/KNIP tidak bisa menduduki jabatan tersebut secara permanen.

10. Sidang BP KNIP 4 Desember 1949

Pembahasan sidang ini berkisar mengenai mekanisme kuorum darurat untuk Sidang Pleno yang sebelumnya sudah pernah dibahas dalam Sidang BP KNIP. Mekanisme kuorum darurat diajukan dalam format RUU dan diinisiasi oleh anggota BP KNIP, yaitu Johan Syahruzah (PSI), Abidin (PBI), dan Luat Siregar (Sumatera/PKI). Kuorum darurat diperlukan karena para pendaftar untuk turut serta dalam sidang belum mencapai jumlah dua per tiga dari total anggota, sesuai dengan Pasal 37 UUD 1945. Sementara itu, Sidang Pleno KNIP ke-6 akan segera tiba. Penyebab dari permasalahan ini adalah alamat para anggota KNIP yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, yang tidak diketahui lagi pascarevolusi. Luat Siregar, sebagai pengusul RUU, mendapat tentangan dari sesama Sayap Kiri terkait solusi-solusi yang ditawarkannya, sehingga Sartono (PNI), Prawoto Mangkusasmito (Masyumi), dan Sidik Joyosukarto (PNI) mengambil alih usulan ini. Sidang BP KNIP akhirnya menerima RUU ini, dengan demikian mekanisme kuorum darurat dalam sidang KNIP adalah setengah dari jumlah total anggota KNIP ditambah 1, sedangkan segala keputusan dalam Sidang Pleno KNIP diambil berdasarkan suara terbanyak.[678]

Pembahasan sidang ini berkisar mengenai mekanisme kuorum darurat untuk Sidang Pleno yang sebelumnya sudah pernah dibahas dalam Sidang BP KNIP.

677 Penjelasan UU No. 7 Tahun 1949
678 *Pemandangan*, 5 Desember 1949 dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 254

5.9 Sidang Pleno KNIP 6 – 15 Desember 1949

Sidang Pleno KNIP awalnya direncanakan untuk diadakan pada tanggal 5 Desember 1949 di Sitihinggil, Yogyakarta. Namun, sidang diundur karena pada hari itu jumlah anggota yang sudah mendaftarkan diri untuk hadir belum memenuhi syarat kuorum. Pada malam hari tanggal 5 Desember tersebut, barulah kuorum untuk Sidang Pleno berhasil tercapai, yaitu sekitar 252 orang anggota, ditambah 35 anggota tambahan yang sudah disepakati. Keseluruhan anggota sidang yang terdaftar berjumlah 288 orang (setengah dari jumlah seluruh anggota KNIP ditambah satu orang).[679] Dalam persidangan yang diadakan di Sitihinggil, bangsal Keraton Yogyakarta, semuanya duduk di kursi. Situasi ini menunjukkan sikap egaliter Keraton Yogyakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia. Presiden mendapat posisi istimewa sebagai pemimpin tertinggi RI dengan duduk di kursi kencana yang biasa digunakan sebagai tempat duduk Sri Sultan. Majalah *Merdeka* menyampaikan penggambaran situasi ini dua bulan sebelum sidang diadakan, sesuai perencanaan protokoler kenegaraan, sebagai berikut:

"*Tempat jang bakal disediakan untuk Presiden pada sidang KNIP [Sidang Pleno KNIP ke-6] adalah tempat jang biasa dipergunakan tempat duduk Sri Sultan, dan kalau kursi tempat duduk itu benar-benar diistimewakan, artinja memakai kursi Kentjana, maka benar-benar Presiden Soekarno dalam saat itu, sebagai "lenggah sinewaka", hanja susunan tempat duduknja jang berachir, dulu (menurut tradisi Keraton) hanja Bupati Anom (Onder Regent) ke atas jang mendapat kursi, jang lain duduk bersila, tetapi dalam sidang jang akan datang ini, semuanja sama duduk kursi.*" [680]

Presiden mendapat posisi istimewa sebagai pemimpin tertinggi RI dengan duduk di kursi kencana yang biasa digunakan sebagai tempat duduk Sri Sultan.

679 *Pemandangan*, 7 Desember 1949 dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 255
680 *Merdeka*, Oktober 1949

Gambar 2. Sidang Pleno KNIP ke-6 di Sitihinggil, Yogyakarta

PM Mohammad Hatta memberikan keterangan di depan Sidang KNIP
Sumber: ANRI – IPPHOS, No. 1423 (14 Desember 1949)

Presiden Soekarno menyampaikan pidatonya pada pembukaan Sidang Pleno KNIP ke-6 ini. Pidato Presiden Soekarno menjelaskan betapa pentingnya Sidang Pleno ke-6 KNIP, yang uraiannya dapat dilihat sebagai berikut:

> "... Sidang Pleno KNIP berkewajiban mengambil keputusan, mengesahkan atau tidak mengesahkan hasil-hasil KMB sebagai yang telah disetujui di Den Haag. Tidak cukup sidang ini hanya membenarkan atau tidak membenarkan *beleid* [kebijaksanaan] politik pemerintah, tetapi harus mutlak menyatakan menerima atau tidak hasil-hasil KMB. Saya minta keputusan ini diambil selekasnya dalam beberapa hari ini. Jika pihak Belanda sudah menerima hasil-hasil KMB, demikian juga hendaknya Sidang Pleno KNIP. Dengan demikian maka pada tanggal 27 Desember Ratu Belanda Juliana akan menyerahkan kedaulatan Indonesia

> kepada wakil-wakil Indonesia di Amsterdam, yang diikuti pula oleh penggantian bendera Belanda dengan bendera Indonesia (di Indonesia); walaupun hasil-hasil KMB itu belum memuaskan rakyat dan ada yang berpendapat bahwa hasil-hasil KMB tersebut tidak seimbang dengan apa yang diharapkan semula. Kepada sidang diminta supa dalam mengambil keputusan pergunakanlah pikiran dinamis dan tidak memandang keputusan KMB itu sebagai keputusan *an sich*, sebab hasil KMB itu adalah alat perjuangan untuk mencapai cita-cita nasional. Akan tetapi jika menolak hasil-hasil KMB, maka dengan tegas saya katakan bahwa saya tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi."[681]

Selanjutnya, Ketua BP KNIP dan KNIP Mr. Assaat menyampaikan pidatonya. Setelah itu, sidang mendengarkan keterangan PM merangkap Wakil Presiden Hatta. Kemudian, pemerintah memajukan dua buah RUU kepada Sidang KNIP untuk dibahas bersama, yaitu RUU tentang Persetujuan Bersama-sama Rancangan Persetujuan dan Segala Pertukaran Surat Menyurat mengenai Penyerahan Kedaulatan oleh Kerajaan Nederland kepada RIS dan RUU tentang Pengesahan Konstitusi RIS beserta Lampiran tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pemerintahan.

Pada tanggal 7 – 11 Desember 1949, Sidang Pleno KNIP mendengarkan pandangan umum tahap pertama dari anggota KNIP terhadap hasil-hasil KMB. Pro dan kontra mengenai hasil Perjanjian KMB dikemukakan dalam sidang. Pernyataan yang menarik disampaikan oleh Subadio Sastrosatomo (PSI) pada tanggal 8 Desember 1949. Ia mengatakan bahwa partainya tidak dapat bertanggung jawab atas hasil KMB, sebab partainya telah menyampaikan nasihat-nasihat kepada pemerintah terkait dengan masalah hutang-hutang Hindia Belanda dan Irian Barat, namun tidak didengar. Ia melanjutkan, bahwa pemerintah telah menuruti kehendak *United Nations Commision for Indonesia* (UNCI) yang sebenarnya adalah Amerika Serikat. Menurut Subadio, hasil-hasil KMB adalah kolonialisme ekonomi dan keuangan yang pokoknya terdapat dalam status Indonesia dalam Uni Indonesia-Belanda, yang akan menjadi penghambat bagi perjuangan merebut

Pada tanggal 7 – 11 Desember 1949, Sidang Pleno KNIP mendengarkan pandangan umum tahap pertama dari anggota KNIP terhadap hasil-hasil KMB.

681 *Pemandangan*, 7 Desember 1949

kembali kedudukan ekonomi bagi rakyat Indonesia.[682]

Selanjutnya, Mohammad Yamin (non-partai) juga menyampaikan pendapatnya. Ia mengatakan bahwa federalisme hanya merupakan perhubungan antara RI denga BFO, dan bukan yang lain. Cita-cita RI tetap adalah tetap unitarisme. Menurut Yamin, federalisme sangat mahal, sehingga ia mempertanyakan siapa yang kemudian dapat membiayai sekian banyak *excellencies* (paduka yang mulia) di dalamnya. Yamin juga menyampaikan keyakinannya bahwa pada tahun 1951, akan lahir RI yang kedua yang benar-benar seperti yang dicita-citakan dalam proklamasi 17 Agustus 1945.[683]

Selain Subadio Sastrosatomo dan Mohammad Yamin, dalam pandangan umum Sidang Pleno KNIP ini muncul pernyataan, kritik, persetujuan, dan penolakan, serta pertanyaan dari para anggota. Daftar pembicara pada Pemandangan Umum Tahap pertama, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Nama, Afiliasi, dan Pandangan Anggota KNIP mengenai Hasil-Hasil KMB

Nama dan afiliasi	Menerima/Tidak Menerima Hasil-Hasil KMB
Subadio Sastrosatomo (PSI)	Tidak menyatakan menerima atau tidak menerima
Mohammad Yamin (non-partai)	Tidak menyatakan menerima atau tidak menerima
Prawoto Mangkusasmito (Masyumi)	Menerima
Amelz (Sumatera)	Menerima
Maruto Nitimiharjo (Murba)	Menolak
Abdul Halim (non-partai)	Menerima
Asrarudin (Buruh)	Tidak menyatakan menerima atau tidak menerima
Mohammad Padang (Maluku)	Menolak
Abdulrahman Wangsadikarta (Partai Tani Indonesia Karawang)	Menerima
Samosir (Sumatera)	Tidak menyatakan menerima atau tidak menerima
Tambunan (Parkindo)	Menerima
Djoko Said (non-partai)	Tidak menyatakan menerima atau tidak menerima
Siauw Gok Chan (Peranakan Cina)	Menolak
Danuhusodo (Serikat Buruh Gula)	Tidak menyatakan menerima atau tidak menerima
Jusuf Abdullah (Sumatera),	Menerima
Patty (Partai Kemerdekaan Irian)	Tidak menerima
Werjoyo (Buruh)	Menerima
Umar Hubeisy (Peranakan Arab)	Menerima
Mr. Sartono (PNI)	Menerima
Aruji Kartawinata (PSII)	Menerima

Selain Subadio Sastrosatomo dan Mohammad Yamin, dalam pandangan umum Sidang Pleno KNIP ini muncul pernyataan, kritik, persetujuan, dan penolakan, serta pertanyaan dari para anggota.

682 *Merdeka*, 10 Desember 1949 dalam Deliar Noer dan Akbarsyah2005, *Op.Cit.*, hlm. 257
683 *Ibid.*, hlm. 260-261

Lobo (Sunda Kecil)	Menerima
Kobarsih (Buruh)	Tidak menerima
Nona Ratulangie (Sulawesi)	Menerima
Yap Tjwan Bing (Peranakan Cina)	Menerima
Iwa Kusumasumantri (non-partai)	Tidak menyatakan menerima atau tidak menerima
Sunyoto (BTI)	Tidak menyatakan menerima atau tidak menerima
Gusti Adikusuma (Kalimantan)	Tidak menyatakan menerima atau tidak menerima
B.M. Diah (non-partai)	Tidak menyatakan menerima atau tidak menerima
P.J. Queljoe (Maluku)	Menerima
Mohammad Sidik (PNI)	Menerima
Muis (Kalimantan)	Tidak menyatakan menerima atau tidak menerima
Sucipto (non partai)	Tidak menyatakan menerima atau tidak menerima
Gafar Ismail (Masyumi)	Menerima
B.R.M. Motik (non-partai)	Menerima
Suprapto (non-partai)	Tidak menyatakan menerima atau tidak menerima
Luat Siregar (PKI/Sumatera)	Tidak menerima
Nona Suwarti (PBI)	Tidak menyatakan menerima atau tidak menerima
Nyonya Mudigdo (PKI)	Tidak menerima
Iskandar Tejasukmana (Sumatera)	Menerima
Rondonuwu (Sulawesi)	Menerima
Sayuti Melik (Murba)	Tidak menerima
Sukarni (Murba)	Tidak menerima
Ngadiman Harjosubroto (PKI)	Tidak menerima

Sumber: *Keng Po*, 15 Desember 1949 dan *Merdeka*, 16 Desember 1949 dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, Op.Cit., hlm. 256-266

Pada tanggal 14 Desember, kembali pemerintah memberikan jawaban atas pandangan umum anggota KNIP tahap kedua.

Secara pokok, tanggal 12 Desember adalah sesi terkait jawaban pemerintah atas pandangan umum anggota KNIP tahap pertama. Pada tanggal 13 Desember, Sidang Pleno memberikan pandangan umum tahap keduanya bagi anggota KNIP. Pada tanggal 14 Desember, kembali pemerintah memberikan jawaban atas pandangan umum anggota KNIP tahap kedua. Selanjutnya, sidang masuk pada penentuan penerimaan/penolakan atas KMB. Setelah melalui pembicaraan yang panjang, anggota KNIP mencapai kesepakatan untuk meratifikasi hasil-hasil KMB pada sidang kali ini. KNIP menyetujui dua RUU yang diajukan pemerintah, beserta satu buah rancangan Maklumat Bersama Presiden dan KNIP. Selain itu, sidang juga membuka sesi mengenai tata cara pemilihan anggota DPR dan Senat RIS, serta pemilihan Wakil Ketua KNIP Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) yang terpilih oleh sidang. Pada tanggal 15 Desember 1949, Sidang Pleno KNIP ke-6 ditutup dengan pidato dari Ketua KNIP Mr. Assaat. Ia menyampaikan beberapa hal:

1. Para anggota KNIP yang masuk dalam lembaga perwakilan dalam RIS hendaknya menarik pelajaran yang baik dari kehidupan berparlemen di KNIP;
2. Anggota parlemen dijamin kebebasannya dalam berbicara, serta bebas dari ketakutan dan tuntutan. Tetapi, ini tidak berarti mereka bebas melukai hati atau menghina lawannya. Suasana harga menghargai harus tetap dipelihara;
3. Tidak perlu meniru hal-hal yang jelek dari parlemen luar negeri yang tidak sesuai dengan adat istiadat ketimuran;
4. Kepada anggota yang pro KMB, Mr. Assaat menganjurkan supaya membuktikan benar-benar bahwa hasil KMB dapat digunakan untuk melanjutkan perjuangan; serta
5. Kepada anggota yang kontra KMB, Mr. Assaat menganjurkan agar juga mencoba menggunakan hasil-hasil KMB untuk melanjutkan perjuangan yang membawa manfaat bagi negara dan rakyat.[684]

Gambar 3. Pelantikan Mr. Assaat sebagai Pejabat Presiden RI menggantikan Sukarno yang menjabat sebagai Presiden RIS
Sumber: ANRI – IPPHOS, No. 1448 (20 Desember 1949)

684 *Merdeka*, 16 Desember 1949 dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 281-282

Dengan pelantikan Mr. Assaat sebagai *acting* presiden Republik Indonesia di Yogyakarta, maka berarti negara itu merupakan satu dari negara-negara yang berada di dalam negara Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS yang terbentuk pada akhir tahun 1949 tidak berusia panjang karena pada bulan Agustus tahun 1950, negara federal itu berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paparan panjang dari Volksraad sampai KNIP ini dapat dilihat sebagai 'benang merah' yang menggambarkan sejarah parlemen di Indonesia. Meskipun bukan parlemen dalam arti yang sesungguhnya, karena aspirasi masyarakat jajahan sering berbenturan dengan kepentingan pemerintahan kolonial, tetapi hal berharga dari kehadiran Volksraad adalah pertama, karena lembaga ini memberi pengalaman penting bagi bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Kedua, merupakan pengalaman tersendiri bagi khususnya kaum pergerakan yang memilih taktik ko-operasi dengan pemerintah kolonial untuk banyak mengetahui cara-cara perjuangan melalui parlemen seperti Volksraad.

Chuo Sangi-In sejenis dewan pertimbangan bagi pemerintah militer Jepang tidak dapat dikatakan sebagai parlemen. Bahkan dibandingkan dengan Volksraad saja tidak sama. Pembentukan lembaga ini lebih ditujukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah militer. Suara dari anggota Chuo Sangi-In, yang nota bene sepenuhnya kaum pribumi hanya menjadi penguatan atas kebijakan yang diambil untuk pemerintah pendudukan. Melalui Chuo Sangi-In juga misalnya dukungan suara untuk pengerahan romusha, yang dipekerjakan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana perang dengan kondisi yang sangat menyedihkan.

Dalam Indonesia merdeka, bangsa Indonesia dapat sepenuhnya mengatur pemerintahan termasuk kehidupan legislatif. Karakter "dua muka" KNIP di awal kemerdekaan mewarnai dinamika kehidupan demokrasi bangsa yang baru merdeka. Dalam waktu yang sangat singkat sudah terjadi pergeseran sistem pemerintahan dari presidensial ke ministerial. Banyak partai dan beragam latar belakang termasuk ideologi yang disuarakan wakilnya di KNIP, membuat pemerintahan tidak stabil. Keputusan KNIP yang harus diambil untuk mendukung kepada pemerintah Syahrir dalam perjuangan diplomasi diserang bertubi-tubi dari kaum oposisi. Begitulah sampai Wakil Presiden Mohammad Hata harus mengancam ketika berpidato dalam sidang KNIP di Malang 1947 dalam kaitan ratifikasi hasil Perundingan

Banyak partai dan beragam latar belakang termasuk ideologi yang disuarakan wakilnya di KNIP, membuat pemerintahan tidak stabil.

Linggarjati. Ternyata sejarah parlemen Indonesia dalam periode pasca pengakuan kedaulatan sampai 1957 mengalami gejolak semakin keras dalam makna gejala jatuh bangunnya kabinet tentu berkaitan dengan dinamika parlemen pada masa itu.

Maka, pada tanggal 20 Agustus 1949, Ketua BP KNIP Mr. Assaat diangkat sebagai Pejabat Sementara Presiden Republik Indonesia. Ia menjabat posisi tersebut selama setahun kurang tiga hari, sebelum kekuasaan sebagai Presiden RI diserahkan kembali kepada Soekarno yang kembali menjabat sebagai Presiden RI dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mr. Assaat menjabat posisi tersebut selama setahun kurang tiga hari, sebelum kekuasaan sebagai Presiden RI diserahkan kembali kepada Sukarno yang kembali menjabat sebagai Presiden RI dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

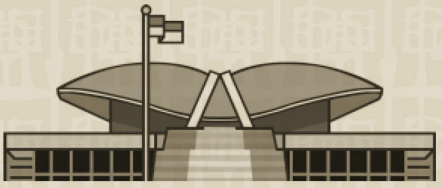

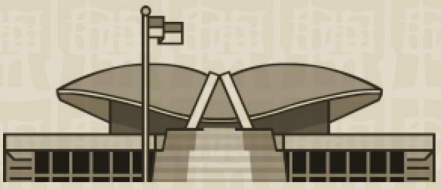

BAB VI

Penutup

Dua konsep yang prinsipil dalam sejarah adalah proses yang menunjukkan perubahan, atau suatu kesinambungan. Di antara dua kecenderungan tersebut, dalam konteks yang lebih umum, dikenal adanya istilah "benang sejarah".

KONSEP itu ingin memperlihatkan bahwa dalam sejarah, bagaimanapun suatu perkembangan atau perubahan terjadi, maka suatu "kesinambungan" dapat ditelusuri. Tentu saja, dasarnya adalah interpretasi atau tafsir yang dikenakan terhadap fakta sejarah dari sudut pandang tertentu. Dari perspektif tertentu itulah, suatu tafsir diberikan karena ada keinginan untuk memperoleh makna yang dianggap bermanfaat. Dalam konteks itu, sejarah berlaku seperti apa yang dikatakan oleh Levi Strauss, yaitu: "*History is never history of, it is always history for*". Artinya, sejarah tidak (hanya) kisah mengenai atau tentang sesuatu (*history of*), tetapi paling banyak sejarah (adalah) untuk sesuatu (*history for*).

Meskipun terdapat kecenderungan ideologis pada sejarah, pengerjaannya harus diletakkan ke dalam metodologi yang tepat. Oleh karena dengan metodologi itulah, kecenderungan ke arah ideologis, atau terlalu kepada epistemologis, sejarah dapat dikenali. Kecenderungan yang pertama akan membawa sejarah ke arah

"pembenaran sejarah", sedangkan kecenderungan yang satunya lagi menempatkan sejarah hanya sebagai ranah studi, tanpa segi praksis, sehingga sejarah merupakan ranah praktis yang berguna secara langsung bagi publik atau masyarakat.

Buku sejarah bangsa berparlemen jilid kesatu ini memperlihatkan, sekaligus membuktikan, adanya kecenderungan ideologis yang kuat ketika tujuan yang hendak dicapai adalah pelajaran sejarah yang dapat dipetik. Dalam konteks ini, nilai-nilai sejarah jauh lebih penting daripada fakta. Oleh karena itu, ia harus dikerjakan dengan metodologi dan dengan dukungan sumber yang memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

Sebagai penutup dari uraian panjang sejarah Volksraad, Chuo Sangi-In, BPUPKI, PPKI, hingga KNIP, dua kecenderungan terkait kesinambungan dan perubahan pada akhirnya digunakan untuk memperoleh makna. Seturut dengan tujuan dalam pendahuluan, maka tampak bahwa terdapat nilai atau makna dari kesinambungan perjalanan bangsa dalam berparlemen. Pendekatan struktural telah menunjukkan terjadinya perubahan nama badan atau lembaga, tetapi unsur nilai kejuangan suatu bangsa menjadikannya sebagai wadah untuk mewujudkan cita-cita yang tidak pernah padam, yakni kemerdekaan.

Dengan demikian, apapun nama badan atau lembaga yang memperlihatkan hakikat perwakilan dalam arti sesungguhnya, satu hal yang jelas adalah bahwa melalui peran agensi kaum pergerakan kebangsaan telah menjadikan wadah tersebut sebagai media perjuangan. Adalah mereka yang memilih Volksraad, seperti Agus Salim dan Mohammad Husni Thamrin, sebagai forum perjuangan, yang disebut sebagai kaum "kooperasi". Demikian, melalui pemikiran dan gagasan politiknya, mereka tidak harus bertentangan dengan mereka yang memilih jalur "non-koperasi", seperti Soekarno dan Mohammad Hatta, misalnya.

Buku sejarah bangsa berparlemen jilid kesatu ini memperlihatkan, sekaligus membuktikan, adanya kecenderungan ideologis yang kuat ketika tujuan yang hendak dicapai adalah pelajaran sejarah yang dapat dipetik.

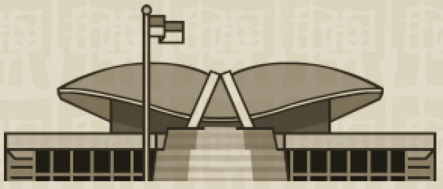

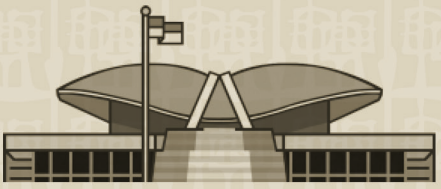

Daftar Acuan

Arsip

Handelingen der Staten Generaal 1916-1917, *3 Oktober* 1916, *6de vergadering*. Koleksi Nationaal Archief, Den Haag

Kamerstuk Tweede Kamer 1916-1917, *kamerstuk nummer* 22, *ondernummer* 6, Koleksi Nationaal Archief Den Haag

Verslag der Handelingen van den Volksraad, Eerste Gewone Zitting in 1918

Handelingen van den Volksraad 1918-1919, *Tahun* 1: 1.

Handelingen van den Volksraad, Tweede Gewone Zitting 1918-1919

Handelingen van den Volkraad. De Tweede Gewone Zitting 1918

Handelingen van den Volksraad, De Eerste Gewone Zitting 1920

Handelingen van den Volksraad, De Tweede Gewone Zitting 1920

Handelingen van den Volksraad, eerste zitting 1921,

Handelingen van den Volksraad, De Eerste Buitengewone Zitting 1921

Handelingen der Volksraad, Volksraad Tweede Gewone Zitting 1922

Handelingen van den Volksraad, De eerste buitengewone zitting 1922

Handelingen van den Volksraad, Tweede Gewone Zitting 1922

Handelingen van den Volksraad, De Eerste Buitengewone Zitting 1923

Handelingen van de Volksraad, Tweede Gewone Zitting 1923

Handelingen van den Volksraad, De Eerste Gewone Zitting 1924

Handelingen van den Volksraad, Tweede Gewone Zitting 1924

Handelingen van de Volksraad, De Eerste Buitengewone Zitting 1925

Handelingen van den Volksraad, Tweede Gewone Zitting 1925

Handelingan van den Volksraad, Eerste Gewone Zitting 1926

Handelingen van den Volksraad. Tweede Gewone Zitting 1926,

Handelingen van de Volksraad, Zittingsjaar 1927-1928
Handelingen van Volksraad Ziitingsjaar 1928-1929
Handelingen den Volksraad, Zittingsjaar 1929-1930,
Handellingen van den Volksraad, Zittingsjaar 1931-1932

Sumber yang diterbitkan

Nederlandsch Staatsblad, No. 535 1916
Indische Staatblad, No. 114 1917

Surat kabar dan Majalah

Algemeen Handelsblad, 'Koloniale Raad', 23-6-1913, hal.2.
Algemeen Handelsblad, 'Sarekat Islam en Indische Partij', 2-07-1913, hal. 2.
Algemeen Handelsblad, 'Decentralisatie in Indië', 10-09-1913, hal. 2.
Algemeen Handelsblad, 'De Les van Sangir', 21-05-1929, hal.2.
Bataviaasch Nieuwsblad, 'Decentralisatiewet', 18-11-1903, hal. 2.
Bataviaasch Nieuwsblad, 'Gemeentebelangen', 14-08-1905, hal. 1.
Bataviaasch Nieuwsblad, 'Verklaring van Trouw', 27-03-1917, hal.1
Bataviaasch Nieuwsblad, 'Opzienbarende Arrestatie', 31-07-1913, hal. 3.
Bataviaasch Nieuwsblad, 'De Volksraad', 16-05-1927, hal.1.
De Indische Courant, 'De Candidaatstelling voor de Volksraad', 2 -01-1924, hal.4.
De Indische Courant, 'De Volksraadverkiezingen', 16 -02- 1924, hal. 4.
De Indische Courant, 'De Volksraadsleden naar Bali', 15-09-1930, hal. 2.
Het Nieuws van den dag: kleine courant, 'Staten Generaal', 16-09-1903, hal. 14.
Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 'Het Indische Beweging', 7-10-1913, hal.1.
Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 'Verboden', 5-03-1913.
Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 'Verboden', 12-03-1913, hal.1.
Het Vaderland, 'De Vrouw in Indie', 11 Oktober 1930.

Java Bode, 'Beknopte biografie van de nieuwe ministers', 13-08-1955

Oetoesan Hindia, Th. 6, No. Extra, 29 November 1918.

H.A.S., "Volksraad: gerakan jang penting", *Neratja*, Th. II, No. 223, 26 November 1918, lb.1

Pandji Ra'jat, 1946

Soeara Asia, 1943

Soaera Asia, 1944

Soeara Asia, 1945

Artikel jurnal

Ave, Jan B. "'Indonesia', 'Insulinde', and 'Nusantara': Dotting the I's and Crossing the T", *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde*, Deel 145, 2/3 afl, 1989, 220-234.

Gouda, Frances "The Gendered Rhetoric of Colonialism and Anti-Colonialism in Twentieth-Century Indonesia", *Indonesia* no 55, April 1993, 1-22.

Buku

Amir, Makmur dan Reni Dwi, *Lembaga Perwakilan Rakyat*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Anderson, Benedict. 2018. *Revoloesi Pemoeda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa* 1944-1946. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.

Blumberger, Petrus, *de Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indië*, Haarlem: H.D. Tjeenk Willing & Zoon, 1931.

Chaniago, J.R. 1979. *Wajah Dua Muka Sebuah kekuatan Politik Badan Pekerja KNIP periode Jakarta* (1945 – 1946). Skripsi, Universitas Indonesia.

Dekker, E.F.E.Douwes, Tjipto Mangoenkoesoemo, R.M. Soewardi Soerjaningrat, *Onze Verbanning*. Schiedam: De Indier-Drukkerij 'De Toekomst', 1913.

Djajadingrat, P.A. Achmad, *Memoar Pangeran Aria Achmad Djajadingrat* . Jakarta: PT Dian Rakyat, 1996.

Elson, R.E. , *The Idea of Indonesia. Sejarah Pemikiran dan Gagasan*. Jakarta: Serambi, 2009.

Etek, Azizah (eds), *Kelah Sang Demang Jahja Datoek Kajo. Pidato Otokritik di Volksraad 1927-1938*. Yogyakarta: LKIS, 2008.

Giliomee, Hermann, *The Afrikaner: Biography of a people*. London: Hurst & Company, 2003.

Gondokusumo, Djody, *Parlemen Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1951.

Habsjah, Atashendartini (eds), *Perjalanan Panjang Anak Bumi. Biografi R.M.A.A. Koesoemo Oetoyo*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Habsjah, Atashendartini, Mooriati Sudiharto dan Putut Trihusodo (Ed.). 2007. "*Perjalanan Panjang Anak Bumi*". Jakarta: Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Hering, Bob, *M.H. Thamrin and His Quest for Indonesian Nationhood 1917-1941*. Stein: Yayasan Kabar Seberang, 1994.

Herkusumo, Arniati Prasedyawati. 1984. *Chuo Sangi-in Dewan Pertimbangan Pusat Pada Masa pendudukan Jepang*. Jakarta: PT Rosda Jayaputra.

Ihsan, A. Zainoel dan Pitut Soeharto, *Aku Pemuda Kemarin di Hari Esok: Kumpulan tulisan asli, lezing, pidato tokoh pergerakan kebangsaan 1913-1938*. Jakarta: Jayasakti, 1981.

Miert, Hans van, *Dengan Semangat Berkobar: Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia, 1918-1930*. Jakarta: KITLV, 2003.

Nagazumi, Akira, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia. Budi Utomo 1908-1918*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti-KITLV, 1989.

Panitia Buku Peringatan, *Seratus Tahun Haji Agus Salim*. Jakarta: Sinar Harapan, 1996.

Poesponegoro, Marwati Djoened dkk. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia* VI. Jakarta: Balai Pustaka.

Poeze, Harry, *Di Negeri Penjajah. Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.

Purbopranoto, Kuntjoro, *Sistem Pemerintahan*. Surabaya: Penerbitan Universitas Airlangga, 1960.

Ricklefs, M.C, *Sejarah Indonesia Modern* 1200-2004. Jakarta: Serambi, 2005.

Schmutzer, Eduard J.M. *Dutch colonial policy and the search for identity in Indonesia* 1920-1931.Leiden: E.J. Brill, 1977.

Soerjaningrat, Soewardi. 'Als ik eens Nederlander Was', Bandung: Inlands Comite tot herdenking van Neerlands Honderdjarige Vrijheid, 1913.

Soerjohardjo, Wardiningsih, *Radicale Concentratie versus Volksraad (Dewan Rakyat). Aspirasi Bangsa Indonesia Menentang 'Dewan Rayap'*. Jakarta: Abacus, 2011.

Sudarmanta, J.B, *Politik Bermartabat: Biografi I.J. Kasimo*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2011.

Sutherland, Heather, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid* V.

Wal, S.L. van der (ed), *De Volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Nederlandsch-Indië: een bronnenpublicatie. Eerste stuk* 1891-1926. Groningen: J.B.Wolters, 1964.

Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia-Belanda. Edisi Pemutakhiran Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Zuhdi, Susanto. 2017. *Bogor Zaman Jepang* 1942 – 1945. Depok: Komunitas Bambu.

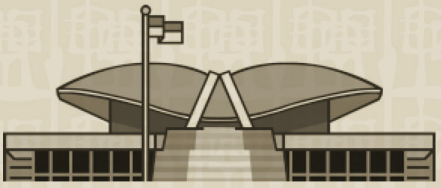

Penulis

SUSANTO ZUHDI

Prof. Dr. Susanto Zuhdi lahir di Banyumas 4 April 1953. Setelah meyelesaikan Sarjana Sastra di Fakultas Sastra Universtas Indonesia (UI) tahun 1979 ia melanjutkan studi magister dalam sandwich program UI dengan Vrije Universiteit Amsterdam (1988-1990) dengan tesis "Perkembangan Pelabuhan dan Kota Cilacap 1830 – 1942", yang dipertahankan di Program Pascasarjana UI (1991), kemudian menyelesaikan Program Doktor di UI tahun 1999 dengan disertasi"Labu Rope Labu Wana Sejarah Butun dalam Abad XVII – XVIII dan diangkat sebagai Guru Besar Tetap Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia tahun 2005. Di samping itu ia pernah menjabat sebagai Direktur Sejarah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia (RI) (2001 – 2006), Staf Ahli menteri Pertahanan RI Bidang Politik (2011 – 2013), dan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) 2013 – 2015.

Selain menjadi dosen di UI, ia mengajar di Universitas Pertahanan di Program Studi (Prodi) Perang Semesta, Prodi Damai dan Resolusi Konflik; serta di Sesko TNI Bandung serta Sesko AD, AL (Jakarta), AU (Lembang).

Bukunya yang sudah diterbitkan antara lain *Cilacap 1830 – 1942 Bangkit dan Jatuhnya Sebuah Pelabuhan di Jawa* (KPG 2002, cetak ulang 2016 Penerbit Ombak) dan *Sejarah Buton yang Terabaikan Labu Rope Labu Wana* (Rajawali Grafindo 2010) dan *Integrasi Bangsa dalam Bingkai Keindonesiaan* (Wedatama Widya Sastra 2017); Editor dan penulis *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid* 6 dan 8 (van Hoeve-Ikhtiar Baru 2012); *Nasionalisme, Laut dan Sejarah* (Komunitas Bambu 2014); bersama Muslimin AR Effendy *Perang Buton vs Kompeni Belanda*

Mengenang Kepahlawanan La Karambau 1752 – 1766 (Komunitas Bambu 2015). Mendapat penghargaan Dharma Pertahanan dari Menteri Pertahanan RI (2014) serta Satya Lancana Karya Satya XXX Tahun dari Presiden Republik Indonesia (2015).

Penulis dapat dihubungi melalui Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Pengetahuan Ilmu Budaya Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424, Indonesia. Email: susanto_zuhdi@ yahoo.com; MP: 0818947323

ACHMAD SUNJAYADI

Dr. Achmad Sunjayadi lahir di Jakarta 11 Mei 1973. Ia menyelesaikan program sarjana di Program Studi Belanda Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada 1996. Pada tahun 2000-2001 ia mengikuti program Dutch Studies di Universiteit Leiden, Belanda. Pada tahun 2006 menyelesaikan program magister di Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dengan tesis "Perhimpunan Turisme Batavia (1908-1942): Awal Turisme Modern di Jawa". Pada tahun 2017 ia menyelesaikan Program Doktor di Universitas Indonesia dengan mempertahankan disertasi "Dari Vreemdelingenverkeer ke Toeristenverkeer: Dinamika Pariwisata di Hindia-Belanda 1891-1942".

Pada tahun 2008-2009 pernah menjabat sebagai Koordinator Program Diploma 3 Bahasa Belanda di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Lalu pada tahun 2009-2016 ia menjabat sebagai Koordinator Program Studi Belanda dan sejak tahun 2018 menjabat sebagai Sekretaris Senat Akademik Fakultas di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Sejak 2004 hingga sekarang ia menjadi pengajar di Program Studi Belanda dan anggota Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Pada tahun 2004-2014 ia pernah menjadi pengajar bahasa Belanda sumber hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sejak 2016 ia menjadi pengajar luar biasa di Program Pascasarjana Kajian Wilayah Eropa, Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia.

Beberapa karya tulis yang dihasilkan, antara lain buku *Vereeniging Toeristenverkeer Batavia 1908-1942: Awal Turisme di Hindia-Belanda* (2007), 'Mengabadikan estetika: Fotografi dalam promosi pariwisata

kolonial di Hindia-Belanda' artikel di Jurnal *Wacana* Vol. 10 No 2 (2008), '*Culturele identiteit en de bevordering van het Nederlandsch-Indische toerisme*' artikel di jurnal *Neerlandica Wratislavi*ensia Vol.22 (2013), 'Kabar dari Koloni: Pandangan dan Pemberitaan Surat Kabar Belanda tentang turisme di Hindia-Belanda (1909-1940) artikel di *Jurnal Kajian Wilayah* LIPI Vol 5, No.1 (2014), '*Tracing the strategies of tourism promotion in the Netherlands East Indies, 1908-1941*' makalah untuk Southeast Asia Studies Symposium, University of Oxford & Sunway University Malaysia (2015), '*Indië in de ogen van Javanen*' dalam buku *45 jaar Studie Nederlands in Indonesië* (2016), '*Go to East: The Journey of Oscar Fabrés to Eastern Archipelago in 1932*' makalah untuk the International Conference on Nusantara Studies (2016), 'Raffles dan Pariwisata di Jawa' dalam buku *Raffles dan Kita. Peringatan 200 tahun the History of Java* (2017), 'Come to Holland: Promosi Pariwisata Belanda bagi Hindia-Belanda dan Indonesia', artikel di *Jurnal Kajian Wilayah* LIPI Vol. 8, No.1 (2017), 'Akulturasi dalam Turisme di Hindia-Belanda', artikel di *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya*, Vol.8. No.1 (2018), buku *(Bukan) Tabu di Nusantara* (Kompas, 2018).

Ia dapat dihubungi di Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424, email: achmad.sunjayadi@gmail.com

DITA PUTRI PRAMESWARI

Dita Putri Prameswari, M.Hum. lahir di Jakarta 15 Januari 1983. Pada 2007 menyelesaikan studi S1 di Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dengan skripsi berjudul *Lee Kuan Yew dan Proses Pembentukan Negara Singapura* 1963 – 1965. Pada 2011 ia menyelesaikan studi S2 di Program Studi Pascasarjana Ilmu Sejarah di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dengan judul tesis *Jose Rizal dan Propaganda Kelompok Reformasi Filipina* 1882 – 1896. Pada 2013 – 2015 pernah menjadi pengajar magang pada Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Sejak 2015 menjadi pengajar luar biasa di tempat yang sama.

Ia dapat dihubungi di Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424, email: ditaputri@ui.ac.id

GHAMAL SATYA MOHAMMAD

Ghamal Satya Mohammad, lahir di Jakarta pada tahun 1987. Menyelesaikan studinya di Program Studi S1 Ilmu Sejarah Universitas Indonesia tahun 2012. Kemudian melanjutkan studi ke Universitas Leiden, Belanda mengikuti program *Cosmopolis – Encompass* (Program S1 selama setahun, 2013 – 2014) dan program *Research Master* (setingkat M.Phil) pada *Colonial and Global History* (2014 – 2016). Sejak 2016, Ghamal adalah pengajar magang pada Departemen Sejarah, FIB UI.

FAJAR NUR ALAM

Fajar Nur Alam, S.Pd. lahir di Bandung pada 13 April 1994. Ia menyelesaikan studi S1 di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung pada tahun 2016. Selama menjadi mahasiswa Pendidikan Sejarah UPI, penulis aktif dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah (HIMAS) yaitu pada periode 2014-2015 sebagai Kabiro Pengabdian Pada Masyarakat Bidang V, kemudian penulis juga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada tahun 2015 sebagai Kabid Internal HMI KORKOM UPI 2015-2016, kemudian sebagai kepala departemen Infokom HMI Cabang Bandung 2016-2017. Sekarang sedang melanjutkan studi S2 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.

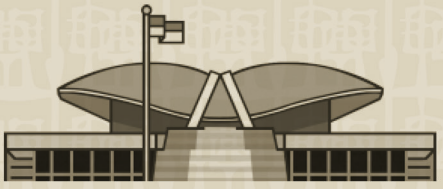

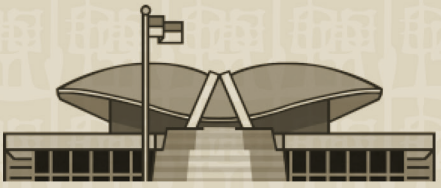

DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918 - 1949

1

Buku Jilid 1 "Dari *Volksraad* hingga KNIP, 1918—1950" ini, mengisahkan mengenai pengalaman bangsa Indonesia dalam berparlemen mulai dari masa pemerintah kolonial Hindia Belanda, masa pendudukan Jepang hingga zaman Republik Indonesia Serikat 1950, ketika bentuk negara kembali ke NKRI. Benar bahwa dua quasi parlemen terdahulu sulit dikatakan sebagai parlemen dalam arti sesungguhnya, akan tetapi lembaga seperti itu telah memberi pengalaman penting bagi para elite bangsa kelak dalam berparlemen di alam kemerdekaan. Di seputar pembentukannya pada tahun 1918, *Volksraad* harfiah berarti "dewan rakyat", yang sesungguhnya tidak lebih dari "lembaga penasehat", telah menunjukkan kemunculan dan menguatnya rasa kebangsaan Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor pembentukan *Volksraad* adalah keinginan penduduk di negeri kolonial itu, untuk membela negerinya (*Indie Werbaar*) menghadapi ancaman Perang Dunia Pertama (1914—1918) di Eropa. *Volksraad* bagi kaum pergerakan yang memilih strategi "kooperasi", telah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memperjuangkan nasib bangsa Indonesia dalam mengatasi ketidakadilan akibat praktik kolonialisme.

Pada masa pendudukan Jepang, dibentuklah pada 1943, *Chuo Sang-In,* suatu lembaga yang berfungsi memberi nasihat kepada *Gunseikanbu*, pemerintah militer Jepang di Indonesia. Sudahlah jelas bahwa pada masa pendudukan Jepang segala upaya ditujukan untuk memenangi Perang Asia Timur Raya. Begitulah maka *Chuo Sangi In* terus menerus meminta ide dan program dari anggotanya untuk mendukung sepenuhnya tujuan perang. Sementara itu *Dokuritsu Zyunbi Cosakai*, dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), yang dibentuk 1 Maret 1945, tidak dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia dalam berdiskusi dan membicarakan mengenai dasar negara.

Dalam wadah BPUPK yang seiring waktu ditambahkan dengan Indonesia (BPUPKI) inilah, bertransformasi menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 9 Agustus 1945. Begitulah maka dari PPKI ini 'menjelma' menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang dibentuk pada 29 Agustus, tanggal yang diperingati sebagai "hari jadi" Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRI RI). Jika kesinambungan merupakan unsur sejarah, maka jangan dilupakan bahwa terdapat beberapa orang Indonesia yang menjadi anggota *Volksraad* kemudian berturut-turut atau ada jeda sebagai anggota Chuo Sang In, BPUPKI, PPKI dan kemudian KNIP. Agus Salim dan A.A. Maramis, misalnya adalah mereka yang mengalami perjalanan bangsa berparlemen.

Dalam buku ini juga dikemukakan mengenai peran badan perwakilan rakyat dalam negara federal, yakni Negara Indonesia Timur (1946—1950) yang berpusat di Makassar. Bagian ini menjadi penting dimasukkan karena terdapat kisah sejarah ketatanegaraan Indonesia, yang pernah eksis sebagai negara federal yakni Republik Indonesia Serikat, yang terdiri atas 17 negara bagian, termasuk Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta.

SETJEN DAN BK DPR RI

dpr.go.id

BAGIAN PENERBITAN
BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN
SETJEN DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Subroto - Senayan
Jakarta - 10270
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISBN 978-623-91598-4-9

9 786239 159849